

PROFIL ANAK SUMATERA BARAT

2024



KATA PENGANTAR

Anak merupakan aset bangsa yang harus dipenuhi haknya dan dilindungi agar tumbuh secara optimal. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 menjadi standar dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut dibagi dalam 5 (lima) klaster yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus.

Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perlindungan anak sepenuhnya menyadari bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan dipelihara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup anak menjadi salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan melalui upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dengan telah menyusun program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak.

Untuk membantu pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang telah menyusun Buku Profil Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pembangunan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sehingga setiap anak di Sumatera Barat dapat tumbuh kembang secara optimal.

Publikasi Profil Anak Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana publikasi tahun-tahun sebelumnya menyajikan beragam jenis data statistik yang

memberikan gambaran kondisi anak pada setiap klaster berdasarkan Konvensi Hak Anak. Namun kami harus mengakui adanya data yang mungkin sama dengan tahun sebelumnya mengingat keterbatasan sumber daya kami dalam pengumpulan maupun penyajian data.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bersinergi dalam penyusunan Profil Anak Sumatera Barat Tahun 2023. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam menyusun perencanaan program, kegiatan, kebijakan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pencapaian pembangunan perlindungan anak. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, Untuk itu, kami harapkan saran dan tanggapan demi penyempurnaan kedepannya.

Padang, November 2024
Kepala Dinas

dr. Herlin Sridiani, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN	3
1.3 SUMBER DATA	3
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
1.5 METODOLOGI.....	5
BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN.....	6
2.1 JUMLAH PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	6
2.2 RASIO JENIS KELAMIN.....	13
2.3 KOMPOSISI PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN.....	18
BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	19
3.1 REALISASI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK.....	20
3.2 FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK.....	24
3.3 FORUM ANAK.....	52
BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF.....	56
4.1 PERSENTASE ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGASUHAN YANG LAYAK.....	56
4.2 PERNIKAHAN ANAK	76
4.3 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).....	100
4.4 PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	125
4.5 RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)	126

BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	128
5.1 PENOLONG PERSALINAN	129
5.2 INISIASI MENYUSUI DINI (IMD).....	139
5.3 PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI).....	142
5.4 STATUS GIZI ANAK.....	158
5.5 KEMATIAN NEO NATAL, BAYI DAN BALITA	167
5.6 KESEHATAN ANAK.....	174
5.7 PERILAKU MEROKOK ANAK.....	258
5.8 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH.....	276
5.9 SANITASI.....	282
5.10 RUMAH TANGGA KUMUH.....	311
5.11 FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK.....	323
BAB VI PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	328
6.1 PROGRAM INDONESIA PINTAR.....	329
6.2 PARTISIPASI SEKOLAH.....	331
6.3 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS), ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)	337
6.4 ANGKA BUTA HURUF	371
6.5 ANGKA PUTUS SEKOLAH	386
6.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH	395
6.7 FASILITAS PENDIDIKAN	403
6.8 SEKOLAH RAMAH ANAK.....	442
6.9 PUSAT KREATIFITAS ANAK (PKA)	454
BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS	460
7.1 ANAK KORBAN KEKERASAN.....	461
7.2 TUMPANG TINDIH PENGALAMAN KEKERASAN	473
7.3 ANAK TERLIBAT NAPZA.....	482

7.4 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH).....	484
7.5 PEKERJA ANAK.....	488
7.6 PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT	510

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (000Jiwa), 2023.....	7
Tabel 2 Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2023	8
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan	9
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan	10
Tabel 5 Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera barat (000 jiwa/km ²) 2013-2023	12
Tabel 6 Jumlah dan Rasio Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2013-2023.....	13
Tabel 7 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk	14
Tabel 8 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kempok Umur, 2023.....	15
Tabel 9 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2022—2023.....	16
Tabel 10 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari	21
Tabel 11 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari	22
Tabel 12 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	29
Tabel 13 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023.....	30
Tabel 14 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023.....	31
Tabel 15 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pernah Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam.....	34

Tabel 16 Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Twitter, Facebook, dan Whatsapp) dalam Tiga Bulan Terakhir, 2022-2023.....	36
Tabel 17 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023	37
Tabel 18 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Media yang Digunakan untuk Mengakses Internet, 2023.....	38
Tabel 19 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/ Kota dan Tempat Mengakses Internet, 2023.....	41
Tabel 20 Persentase Penduduk Berumur 5 (Lima) Tahun Keatas yang Mengakses Internet Dalam 3 (Tiga) Bulan Terakhir Menurut.....	44
Tabel 21 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tujuan Mengakses Internet, 2023.....	45
Tabel 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop menurut Kabupaten/Kota, 2023	47
Tabel 23 Banyaknya Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Lembaga Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	50
Tabel 24 Banyaknya Perpustakaan Terakreditasi Menurut.....	51
Tabel 25 Persentase Anak Usia Dini Menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir dan Karakteristik, 2021.....	58
Tabel 26 Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021	70
Tabel 27 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Karakteristik, 2021	70
Tabel 28 Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021	71
Tabel 29 Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021.....	72
Tabel 30 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Provinsi, 2021	75

Tabel 31 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	77
Tabel 32 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat, 2023	78
Tabel 33 Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023	80
Tabel 34 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023	80
Tabel 35 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023	81
Tabel 36 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat, 2023	82
Tabel 37 Persentase Penduduk Yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, 2021-2023	83
Tabel 38 Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di bawah 19 tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023	85
Tabel 39 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2022-2023	87
Tabel 40 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023.....	91
Tabel 41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan	92
Tabel 42 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi, 2021-2023.....	94
Tabel 43 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama, 2023.....	95
Tabel 44 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2023	99
Tabel 45 Persentase Penduduk 0-6 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2023	109
Tabel 46 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023.....	110
Tabel 47 Persentase Anak Usia Dini Yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2023	111

Tabel 48 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	114
Tabel 49 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	115
Tabel 50 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023	116
Tabel 51 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan.....	117
Tabel 52 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan.....	118
Tabel 53 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	119
Tabel 54 Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	123
Tabel 55 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	127
Tabel 56 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Berdasarkan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	132
Tabel 57 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir (%), 2020-2023	133
Tabel 58 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Persalinan ALH yang Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2023	134
Tabel 59 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2023	136
Tabel 60 Distribusi Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023.....	137
Tabel 61 Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan ALH yang Terakhir Dilahirkan Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Kurang dari Dua Jam Setelah Dilahirkan Menurut Provinsi, 2020-2022.....	140

Tabel 62 Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan ALH yang Terakhir Dilahirkan Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Kurang dari Satu Jam Setelah Dilahirkan Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	141
Tabel 63 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023.....	145
Tabel 64 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tabel Kelamin, 2023	146
Tabel 65 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI selama Sehari Kemarin menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023	147
Tabel 66 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023.....	148
Tabel 67 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) menurut Kabupaten/Kota dan Pemberian Makanan Padat, Setengah Padat, atau Lunak dalam 24 Jam Terakhir, 2023.....	149
Tabel 68 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023.....	152
Tabel 69 Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman selama Sehari Kemarin Menurut Provinsi, 2022-2023.....	156
Tabel 70 Persentase Anak Umur 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Provinsi, 2021-2023	157
Tabel 71 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Berat Badan dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan, 2023.....	159
Tabel 72 Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota.....	162
Tabel 73 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023	169
Tabel 74 Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	175
Tabel 75 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2021-2023	176

Tabel 76 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi yang Diterima, 2023	179
Tabel 77 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Pemberi Imunisasi, 2022	180
Tabel 78 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Alasan, 2022	182
Tabel 79 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2021-2023	188
Tabel 80 Jumlah Bayi yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi di Provinsi Sumatera Barat, 2023	189
Tabel 81 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	194
Tabel 82 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di.....	195
Tabel 83 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2020-2022	196
Tabel 84 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2022	197
Tabel 85 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022	198
Tabel 86 Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	201
Tabel 87 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023	203
Tabel 88 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023	205
Tabel 89 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan di Provinsi Sumatera Barat, 2023	206
Tabel 90 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Jalan di.....	207

Tabel 91 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi,	209
Tabel 92 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022	210
Tabel 93 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2022	211
Tabel 94 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2022.....	213
Tabel 95 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2022.....	215
Tabel 96 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2022.....	218
Tabel 97 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022	219
Tabel 98 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022	220
Tabel 99 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022	221
Tabel 100 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022	222
Tabel 101 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022	223
Tabel 102 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022	224
Tabel 103 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023	227
Tabel 104 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	229

Tabel 105 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Satu Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di.....	230
Tabel 106 Persentase Penduduk Menurut Jumlah Hari Rawat Inap Selama Setahun Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal	231
Tabel 107 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Rawat Inap Selama Setahun Terakhir di	232
Tabel 108 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2020-2022.....	234
Tabel 109 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022	235
Tabel 110 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023.....	236
Tabel 111 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan.....	237
Tabel 112 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap menurut Kabupaten/Kota, Jumlah Hari Rawat Inap, dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023.....	238
Tabel 113 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023	239
Tabel 114 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2023	240
Tabel 115 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023.....	241
Tabel 116 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023.....	242
Tabel 117 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023.....	243
Tabel 118 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perkotaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023.....	244

Tabel 119 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perdesaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023.....	245
Tabel 120 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023	246
Tabel 121 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	253
Tabel 122 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023	254
Tabel 123 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Tabel Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023.....	255
Tabel 124 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2023.....	256
Tabel 125 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	256
Tabel 126 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2023.....	257
Tabel 127 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2022-2023	260
Tabel 128 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2022-2023	261
Tabel 129 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2021-2023	262
Tabel 130 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2021-2023	263
Tabel 131 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Batang), 2021-2023.....	264
Tabel 132 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik (Batang), 2021-2023	265

Tabel 133 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau dan Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Kebiasaan Merokok di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	266
Tabel 134 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu di Provinsi Sumatera Barat, 2023.	268
Tabel 135 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kebiasaan Merokok, 2023	269
Tabel 136 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kebiasaan Merokok, 2023	271
Tabel 137 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023.....	273
Tabel 138 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023.....	274
Tabel 139 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023	275
Tabel 140 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Provinsi Sumatera Barat (%), 2022 - 2023.....	279
Tabel 141 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Sumatera Barat, 2023	280
Tabel 142 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2023.....	281
Tabel 143 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Provinsi Sumatera Barat (%), 2022 - 2023.....	285
Tabel 144 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Sumatera Barat, 2023	286
Tabel 145 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat	

Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	287
Tabel 146 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dan lain-lain di Provinsi Sumatera Barat, 2023	288
Tabel 147 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Dll. dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	288
Tabel 148 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Barat, 2023	289
Tabel 149 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat, 2023	290
Tabel 150 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023	291
Tabel 151 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023	292
Tabel 152 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023.....	293
Tabel 153 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2023	294
Tabel 154 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll., 2023.....	295
Tabel 155 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll., 2023.....	296
Tabel 156 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll., 2023	297
Tabel 157 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Dll. dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air	

Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2023	298
Tabel 158 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, Sumber Air Minum Bersih, dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2023	299
Tabel 159 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat, 2023	301
Tabel 160 Persentase Rumah Tangga ¹ menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di	302
Tabel 161 Persentase Rumah Tangga ¹ menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Sumatera Barat, 2023	303
Tabel 162 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2023	304
Tabel 163 Persentase Rumah Tangga ¹ di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2023	305
Tabel 164 Persentase Rumah Tangga ¹ di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2023	306
Tabel 165 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2023	307
Tabel 166 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik yang Dikosongkan/Dilakukan Penyedotan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Tinja dari Tangki Septik, 2022	309
Tabel 167 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik yang Dikosongkan/Dilakukan Penyedotan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Pihak yang Mengosongkan/Melakukan Penyedotan saat Terakhir Kali Tangki Septik Dikosongkan, 2022	310
Tabel 168 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah (m ²), 2023	313
Tabel 169 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai per Kapita (m ²), 2023	314
Tabel 170 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Provinsi Sumatera Barat, 2023	315

Tabel 171 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2023.....	316
Tabel 172 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2023	317
Tabel 173 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, dan Sumber Penerangan Utama, 2023	318
Tabel 174 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di.....	319
Tabel 175 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sebaran RTLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	320
Tabel 176 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022-2023	322
Tabel 177 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022-2023	323
Tabel 178 Penerima Penghargaan Pelayanan Ramah Anak Terbaik,	323
Tabel 179 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota.....	324
Tabel 180 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2021	326
Tabel 181 Capaian Program Indonesia Pintar, 2023.....	330
Tabel 182 Penyaluran Pemberian PIP Sumatera Barat, 2023.....	330
Tabel 183 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023	331
Tabel 184 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Status Pendidikan di.....	333
Tabel 185 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di	334
Tabel 186 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis	335
Tabel 187 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah.....	338
Tabel 188 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023	341

Tabel 189 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023	347
Tabel 190 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di	353
Tabel 191 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	355
Tabel 192 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	356
Tabel 193 Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	357
Tabel 194 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	358
Tabel 195 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	359
Tabel 196 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023.....	360
Tabel 197 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	365
Tabel 198 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di	367
Tabel 199 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023.....	367
Tabel 200 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023	368
Tabel 201 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat menurut Jenis Kelamin (%), 2021-2023.....	369
Tabel 202 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023	370
Tabel 203 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Sumatera Barat, 2023	376
Tabel 204 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Sumatera Barat, 2023	377

Tabel 205 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang	379
Tabel 206 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023	380
Tabel 207 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023	381
Tabel 208 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	382
Tabel 209 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	383
Tabel 210 Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	384
Tabel 211 Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023	385
Tabel 212 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi dan Jenjang	386
Tabel 213 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023	389
Tabel 214 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023	391
Tabel 215 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur di	392
Tabel 216 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di	393
Tabel 217 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023	400
Tabel 218 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2022-2023	402
Tabel 219 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024	417
Tabel 220 Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di	419
Tabel 221 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak	421
Tabel 222 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA)	422
Tabel 223 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan,	

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024	423
Tabel 224 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru.....	426
Tabel 225 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru,	428
Tabel 226 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024.....	431
Tabel 227 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut	433
Tabel 228 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid dan Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024.....	436
Tabel 229 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024	439
Tabel 230 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Sumatera Barat	441
Tabel 231 Data SMA/SMK/MAN dan SLB Yang Belum SRA Di Sumatera Barat	444
Tabel 232 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Januari s/d Desember 2023)	444
Tabel 233 Jumlah Tahanan Anak Di Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023.	487
Tabel 234 Jumlah Tahanan Anak Di Sumatera Barat Menurut Satuan Kerja Wilayah Sumatera Barat, 2023	487
Tabel 235 Angka Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2022–2023.....	495
Tabel 236 Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur, 2022–2023	497
Tabel 237 Angka Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022–2023	498
Tabel 238 Angka Pekerja Anak Berdasarkan Partisipasi Sekolah,	500
Tabel 239 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu, 2023.....	500

Tabel 240 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di.....	503
Tabel 241 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (jiwa), 2023.....	505
Tabel 242 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	506
Tabel 243 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2023..	509

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di	17
Gambar 2 Piramida Penduduk, 2023	18
Gambar 3 IP TIK Sumatera Barat, 2022-2023.....	27
Gambar 4 Persentase Anak Usia Dini Menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021	59
Gambar 5 Persentase Anak Usia Dini Menurut Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung dan Klasifikasi Desa, 2021	62
Gambar 6 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak, 2018-2021	64
Gambar 7 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Klasifikasi Desa, 2021	65
Gambar 8 Persentase Taman Penitipan Anak Menurut Status Negeri/Swasta, Tahun 2021/2022	67
Gambar 9 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Status Bekerja Ibu, 2021	68
Gambar 10 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2023	85
Gambar 11 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang Kawin Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Tingkat Kesejahteraan (Kuintil Pengeluaran), 2018.....	97
Gambar 12 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang /Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah , 2019-2023.....	105
Gambar 13 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Klasifikasi Desa dan Kelompok Pengeluaran, 2023.....	106

Gambar 14 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Karakteristik, 2023.....	108
Gambar 15 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023.....	109
Gambar 16 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun, 2019-2023.....	113
Gambar 17 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun menurut Karakteristik Demografi, 2023	113
Gambar 18 Angka Kesiapan Sekolah, 2019-2023.....	122
Gambar 19 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah dan Masih Diberi ASI Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	153
Gambar 20 Persentase Anak Umur 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	154
Gambar 21 Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman selama Sehari Kemarin Menurut Karakteristik, 2022	155
Gambar 22 Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022.....	163
Gambar 23 Prevalensi Balita Stunting (Panjang Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022	164
Gambar 24 Prevalensi Balita Stunting (Panjang Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, SSGI 2022.....	165
Gambar 25 Prevalensi Balita Wasting (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022	166
Gambar 26 Prevalensi Balita Wasting (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat SSGI 2022.....	167
Gambar 27 Jumlah Kematian Balita (0-59 Bulan) Menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023	171
Gambar 28 Proporsi Penyebab Kematian Neo Natal (0-28 Hari).....	171
Gambar 29 Proporsi Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Di Indonesia, 2023	172
Gambar 30 Proporsi Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)	173
Gambar 31 Lokasi Pemberian Imunisasi Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi, 2022	177

Gambar 32 Pemberi Imunisasi Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi, 2022.....	178
Gambar 33 Alasan Anak Umur 0-23 Bulan Tidak Pernah Diberi Imunisasi, 2022	181
Gambar 34 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2013-2023	183
Gambar 35 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2023.....	184
Gambar 36 Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap, 2020-2023	185
Gambar 37 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2023	187
Gambar 38 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022	191
Gambar 39 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik,2020-2022	192
Gambar 40 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	193
Gambar 41 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di.....	202
Gambar 42 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	208
Gambar 43 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Tetapi Tidak Pernah Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	226
Gambar 44 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Provinsi Sumatera Barat, 2023	229
Gambar 45 Rata-rata Rawat Inap Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	232
Gambar 46 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022	233
Gambar 47 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	248
Gambar 48 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2022	250

Gambar 49 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	251
Gambar 50 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022	252
Gambar 51 Persentase Penduduk yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022.....	259
Gambar 52 Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (%), 2023	279
Gambar 53 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Provinsi Sumatera Barat (m ²), 2022-2023	313
Gambar 54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2019-2023	344
Gambar 55 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2023	346
Gambar 56 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023	346
Gambar 57 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023.....	348
Gambar 58 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan,.....	350
Gambar 59 Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT menurut Kelompok Pengeluaran, 2023	352
Gambar 60 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023.....	354
Gambar 61 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023	364
Gambar 62 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023.....	369
Gambar 63 Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2023	373
Gambar 64 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi, 2023	373
Gambar 65 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-64 Tahun di Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023.....	378

Gambar 66 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023	388
Gambar 67 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat (tahun), 2020-2023.....	396
Gambar 68 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (tahun), 2023.....	397
Gambar 69 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, 2023	398
Gambar 70 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Karakteristik Demografi, 2023....	398
Gambar 71 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan,.....	404
Gambar 72 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status	405
Gambar 73 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023	406
Gambar 74 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2022/2023.....	407
Gambar 75 Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023	409
Gambar 76 Rasio Rombel per Kelas menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	411
Gambar 77 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	413
Gambar 78 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	413
Gambar 79 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023..	414
Gambar 80 Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan,	415
Gambar 81 Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023	416
Gambar 82 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan.....	420
Gambar 83 Peta Sebaran SRA , 2023.....	444
Gambar 84 Kekerasan Fisik Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021.....	465
Gambar 85 Kekerasan Fisik Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021.....	466

Gambar 86 Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021	469
Gambar 87 Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021.....	470
Gambar 88 Kekerasan Seksual Non Kontak Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021	472
Gambar 89 Kekerasan Seksual Non Kontak Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021	473
Gambar 90 Tumpang Tindih Pengalaman Kekerasan Anak Usia 13-17 Tahun, 2021	474
Gambar 91 Tumpang Tindih Pengalaman Kekerasan Anak Usia 13-17 Tahun Berdasarkan Pengalaman Kekerasan 12 Bulan Terakhir, 2021	475
Gambar 92 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, 2021	484
Gambar 93 Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia, 2023	490
Gambar 94 Jumlah Pekerja Anak (Juta Orang) dan Angka Pekerja Anak.....	494
Gambar 95 Angka Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Daerah	496
Gambar 96 Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur (Persen), 2022–2023	496
Gambar 97 Persentase Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022–2023	497
Gambar 98 Angka Pekerja Anak Menurut Partisipasi Sekolah (Persen),	499

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Anak adalah aset yang menentukan kehidupan bangsa dimasa depan. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini. Perwujudan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak agar bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh berbagai konvensi internasional, khususnya di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas (UNCRPD). Negara juga turut andil dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 serta meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Sebagai pertimbangan kebijakan, Pemerintah telah menyadari pentingnya ketersediaan berbagai macam indikator anak. Anak. Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak .

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030. Terdapat 35 dari 232 indikator spesifik dalam SDGs merupakan indikator yang langsung tertuju pada anak-anak. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya adalah penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya. Berbagai strategi untuk mencapai target tersebut telah disusun dengan baik serta berkesinambungan agar dapat diimplementasikan dengan tepat demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Pemerintah menyadari akan pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan lainnya. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dalam program unggulan *Three Ends* yaitu *End Violence Against Women and Children* (Akhirinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); *End Human Trafficking* (Akhirinya Perdagangan Manusia), dan *End Barriers To Economic Justice* (Akhirinya Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan). Untuk mendukung ketiga program penting tersebut diperlukan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah, organisasi swasta dan masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya dalam membangun Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Melalui program tersebut, pemerintah mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Dengan adanya kebijakan KLA maka diharapkan setiap wilayah kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak sebagai implementasi dari KHA di era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan KLA dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, karena itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

1.2 TUJUAN

Penyusunan buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah, institusi swasta dan masyarakat secara luas tentang kondisi anak -anak di Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung.

1.3 SUMBER DATA

Buku profil ini menggunakan berbagai macam Sumber, dari hasil survei-survei yang dilaksanakan oleh BPS dan instansi lain, serta dari hasil pencatatan administrasi sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024
2. Statistik Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
3. Statistik Kesejahteraan Indonesia Tahun 2023
4. Indikator Kesejahteraan Indonesia Tahun 2023
5. Statistik Pendidikan Tahun 2023
6. Keadaan Pekerja Di Indonesia Februari 2024

7. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Februari 2024
8. SNPHAR 2023
9. Analisis Profil Penduduk Indonesia Tahun 2023
10. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021
11. Profil Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2023
12. Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2023
13. Profil Anak Usia Dini Tahun 2023
14. Profil Statistik Kesehatan Tahun 2023
15. Perempuan dan Laki-Laki Indonesia Tahun 2023
16. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Buku ini disajikan dalam 7 (tujuh) bab. Pemilihan bab dalam publikasi Profil Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disesuaikan dengan lima kelompok hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.36 tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Bab pertama dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, Sumber, dan sistematika publikasi. Bab kedua mengulas mengenai struktur penduduk berusia 0-17 tahun. Bab ketiga membahas tentang hak sipil dan kebebasan. Bab keempat berisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bab kelima tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Bab keenam menyajikan pendidikan anak. Bab ketujuh dengan topik perlindungan khusus.

1.5 METODOLOGI

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan buku profil ini berupa *cross sectional* dimana pengumpulan data dilakukan dalam satu periode waktu. Buku profil ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan 24 (dua puluh empat) indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Sebagian besar data yang disajikan merupakan hasil pengolahan data Susenas, Sakernas, serta data Simfoni PPPA yang dilakukan oleh KemenPPPA. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang dihasilkan oleh sumber data lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan selanjutnya dipilah dan dikompilasi serta diolah sesuai dengan substansi 24 indikator dimaksud dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui penilaian proporsi dan persentase. Pengolahan dan analisis data dikelompokkan berdasarkan lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus. Penyajian data dapat berbentuk tabel, grafik atau kombinasi.

BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

2.1 JUMLAH PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

Dalam pembangunan, penduduk mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran serta menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk). Keadaan kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan, jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

Gambaran demografi suatu daerah memberikan informasi penting tentang komposisi dan struktur penduduk pada suatu daerah sehingga perencanaan pembangunan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda, seperti banyaknya penduduk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun), maka penyerapan tenaga kerja dan perluasan pendidikan bisa menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berarti penting untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi permintaan tenaga kerja dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 5,76 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 1,18 juta dari tahun 2022 yang berjumlah 5,58 juta jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (000 Jiwa), 2023

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	2023		
	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	254,17	243,10	497,27
5-9	232,25	222,43	454,68
10-14	242,66	229,66	472,32
15-19	256,25	238,59	494,83
20-24	252,23	235,98	488,21
25-29	246,21	230,96	477,17
30-34	231,67	219,00	450,67
35-39	213,81	204,36	418,16
40-44	197,96	192,10	390,06
45-49	180,36	178,49	358,85
50-54	159,35	161,87	321,22
55-59	136,36	143,23	279,59
60-64	111,29	121,10	232,38
65-69	85,03	96,75	181,78
70-74	54,89	66,40	121,29
75+	45,81	72,93	118,73
Jumlah/Total	2.900,27	2.856,94	5.757,21

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Jumlah penduduk Sumatera

Barat terbanyak berada pada usia 15-19 tahun yaitu sebesar 494,83 jiwa, ini terlihat dalam tabel 1

.Dari hasil Sensus Penduduk, mayoritas penduduk Sumatera Barat didominasi oleh generasi Z dan milineal (yang usia 8-23 dan usia 24-39 tahun). Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untukmempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih berada pada masa bonus Demografi dengan penduduk usia produktif lebih didominasi dibandingkan usia lansia.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Penduduk 0-17 Tahun <i>Number of Population Aged 0-17 Years</i>	
	2022 ²	2023 ³
(1)	(2)	(3)
<i>Kabupaten/Regency</i>		
1. Kep. Mentawai	30.796	31.616
2. Pesisir Selatan	155.867	158.920
3. Solok	120.943	123.820
4. Sijunjung	73.488	77.081
5. Tanah Datar	98.028	103.703
6. Padang Pariaman	129.538	136.092
7. Agam	143.856	153.147
8. Lima Puluh Kota	108.414	111.936
9. Pasaman	95.143	98.878
10. Solok Selatan	55.028	58.045
11. Dharmasraya	71.190	74.302
12. Pasaman Barat	145.788	147.546
<i>Kota/Municipality</i>		
1. Padang	265.214	272.803
2. Solok	24.921	26.628
3. Sawahlunto	19.009	20.029
4. Padang Panjang	18.751	19.844
5. Bukittinggi	40.688	43.459
6. Payakumbuh	43.143	45.791
7. Pariaman	28.920	30.959
Sumatera Barat	1.668.725	1.734.599

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2023

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		
	LK	PR	LK+PR
0-17	885.412	849.187	1.734.599
18+	2.014.858	2.007.753	4.022.611
Jumlah	2.900.270	2.856.940	5.757.210

Sumber: Diolah DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel 2 dan 3 terlihat bahwa penduduk Sumatera Barat yang dapat dikategorikan anak berjumlah 1.734.599 jiwa dengan jumlah laki-laki 885.412 jiwa dan perempuan sebesar 849.187 jiwa. Ini menunjukkan bahwa usia anak memiliki kontribusi sebesar 30,13 persen dari jumlah penduduk keseluruhan.

Anak laki-laki mendominasi 30,53 persen dari jumlah populasi laki-laki Sumatera Barat. Sedangkan anak perempuan sebesar 29,72 persen dari jumlah populasi perempuan Sumatera Barat.

Dilihat dari sisi distribusi penduduk usia 0-17 tahun, jumlah penduduk pada usia tersebut didominasi di wilayah perdesaan/ kabupaten. Ini artinya penduduk di usia anak didominasi di wilayah perdesaan yang harus dipenuhi haknya dan dilindungi oleh Pemerintah.

Dilihat dari segi distribusi, penduduk Sumatera Barat menyebar diseluruh Kabupaten/Kota seperti terlihat dalam tabel 4 dibawah ini. Dari tabel 4 terlihat bahwa sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat juga tidak merata. Kota Padang merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya. jumlah penduduk Sumatera Barat masih didominasi pada ibukota Provinsi, Padang dengan tingkat populasi sebesar 919.145 jiwa atau 16,30 persen penduduk Sumatera Barat tinggal di wilayah ini sesuai dengan data Sensus Penduduk tahun 2021. Sementara itu wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk sebanyak 57 ribu jiwa atau 1,03 persen dari penduduk Provinsi Sumatera Barat

Salah satu persoalan terkait dengan masalah kependudukan adalah ketimpangan distribusi penduduk antar daerah kabupaten dan kota dan antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata bisa menimbulkan permasalahan disuatu daerah. Beberapa daerah kota

penduduknya semakin besar sementara itu beberapa daerah kabupaten masih dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat setempat.

Di wilayah penduduk yang besar akan dihadapkan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, permasalahan kebutuhan untuk pemukiman serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah sosial lainnya. Disisi lain diwilayah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2023 ² (000 Jiwa) <i>Population by Sex, 2023² (000 people)</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency			
1. Kep. Mentawai	47,32	44,11	91,43
2. Pesisir Selatan	264,29	261,06	525,35
3. Solok	203,90	201,48	405,38
4. Sijunjung	123,38	120,33	243,71
5. Tanah Datar	193,19	190,49	383,68
6. Padang Pariaman	226,44	224,95	451,39
7. Agam	278,34	273,55	551,89
8. Lima Puluh Kota	198,68	197,75	396,43
9. Pasaman	157,98	155,22	313,20
10. Solok Selatan	97,42	94,12	191,54
11. Dharmasraya	121,70	118,22	239,92
12. Pasaman Barat	227,84	222,21	450,05
Kota/Municipality			
1. Padang	473,09	469,85	942,94
2. Solok	39,24	38,60	77,84
3. Sawahlunto	34,09	33,67	67,76
4. Padang Panjang	29,46	29,17	58,63
5. Bukittinggi	61,95	62,10	124,05
6. Payakumbuh	72,84	71,99	144,83
7. Pariaman	49,13	48,08	97,21
Sumatera Barat	2.900,27	2.856,94	5.757,21

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Salah satu indikator kemajuan di bidang persebaran penduduk adalah meningkatnya jumlah penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan adalah penduduk suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah menikmati sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Semakin tinggi jumlah penduduk perkotaan maka semakin banyak jumlah penduduk yang dapat menikmati fasilitas perkotaan baik yang ada di kota maupun di kabupaten. Jika dilihat dari jenis wilayahnya, daerah perdesaan memiliki penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Namun seiring berjalannya waktu, persentase penduduk di perkotaan meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan. Selain itu urbanisasi juga dapat menyebabkan terjadinya hal ini.

Salah satu persoalan terkait kependudukan adalah kepadatan penduduk. Distribusi penduduk yang melebihi batas ambang lingkungan dapat menimbulkan permasalahan di suatu daerah. Beberapa daerah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan daerah lainnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat di daerah tersebut.

Di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan dihadapkan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, permasalahan kebutuhan untuk pemukiman, tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah sosial lainnya. Disisi lain, di wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja.

Salah satu indikator kemajuan di bidang persebaran penduduk adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan.

Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah

Tabel 5 menunjukkan kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya, selama periode 2013-2023, terjadi peningkatan kepadatan penduduk Sumatera Barat. Kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 136,11 jiwa per km². Jumlah ini meningkat sebesar 1,88 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 134,23 jiwa per km². Selama satu decade terakhir, kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat meningkat sebesar 16,33 jiwa per km² atau sebesar 13,63 persen dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2023.

Tabel 5 Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera barat (000 jiwa/km²) 2013-2023

Tahun	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)
2013	119,78
2014	121,33
2015	122,85
2016	124,35
2017	125,81
2018	127,24
2019	128,64
2020	130,42
2021	132,33
2022	134,23
2023	136,11

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

2.2 RASIO JENIS KELAMIN

Dinamika kependudukan dapat terjadi karena adanya dinamika kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah, komposisi struktur penduduk, dan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 5,76 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 1,41 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 5,68 juta jiwa. Selama satu dekade terakhir, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat bertambah sebanyak 690,73 ribu jiwa atau meningkat sebesar 13,63 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2003.

Tabel 6 Jumlah dan Rasio Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
(1)	(2)	(3)
2013	5.066,48	98,64
2014	5.131,88	98,80
2015	5.196,29	98,93
2016	5.259,53	99,05
2017	5.321,49	99,17
2018	5.382,08	99,27
2019	5.441,20	99,35
2020	5.516,50	101,39
2021	5.597,31	101,47
2022	5.677,55	101,54
2023	5.757,21	101,52

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Penduduk Provinsi Sumatera Barat tersebar secara tidak merata di seluruh kabupaten/kota yang ada. Kota Padang merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya. Sebanyak 943 ribu jiwa atau 16,38 persen penduduk Sumatera Barat tinggal di wilayah ini. Sementara itu, wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk sebanyak 59 ribu jiwa atau 1,02 persen dari penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rilis BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk laki-laki Sumatera Barat sebanyak 2,9 juta jiwa atau 50,38 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat sebanyak 2,86 juta orang atau 49,62 persen dari penduduk Sumatera Barat.

Jika dilihat dari komposisi penduduk, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditandai dari rasio jenis kelamin yang bernilai diatas seratus, yaitu 101,52. Artinya, setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 atau 102 orang penduduk laki-laki.

Tabel 7 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Sumatera Barat, 2012-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
(1)	(2)	(3)
2012	5 000,18	98,48
2013	5 066,48	98,64
2014	5 131,88	98,80
2015	5 196,29	98,93
2016	5 259,53	99,05
2017	5 321,49	99,17
2018	5 382,08	99,27
2019	5 441,20	99,35
2020	5 534,47	101,39
2021	5 580,23	101,47
2022	5 640,63	101,54

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2022

Menurut kelompok usia, rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Barat terbesar berada pada usia 15-19 tahun dengan besaran rasio 107,40 Sedangkan rasio terendah pada kelompok usia 75 tahun keatas dengan besaran 61,81 seperti terlihat pada tabel dibawah.

Pada kelompok usia 50 tahun keatas, terlihat bahwa jumlah perempuan Sumatera Barat lebih mendominasi dibandingkan jumlah laki-laki dengan rasio jenis kelamin antara 61-98

Tabel 9 menyajikan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 Pada tabel ini terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota memiliki peningkatan rasio jenis kelamin yang berkisar antara 0,02-0,05 persen. Ini artinya tidak terjadi peningkatan yang signifikan antara rasio laki-laki dan perempuan, dengan kata lain jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 8 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kempok Umur, 2023

Kelompok Umur	Rasio Laki-Laki Terhadap Perempuan
0-4	104,55
5-9	104,41
10-14	105,66
15-19	107,40
20-24	106,89
25-29	106,60
30-34	105,78
35-39	104,62
40-44	103,05
45-49	101,05
50-54	98,44
55-59	95,20
60-64	91,90
65-69	87,89
70-74	82,66
75+	61,81

Sumber: Diolah DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, 2024

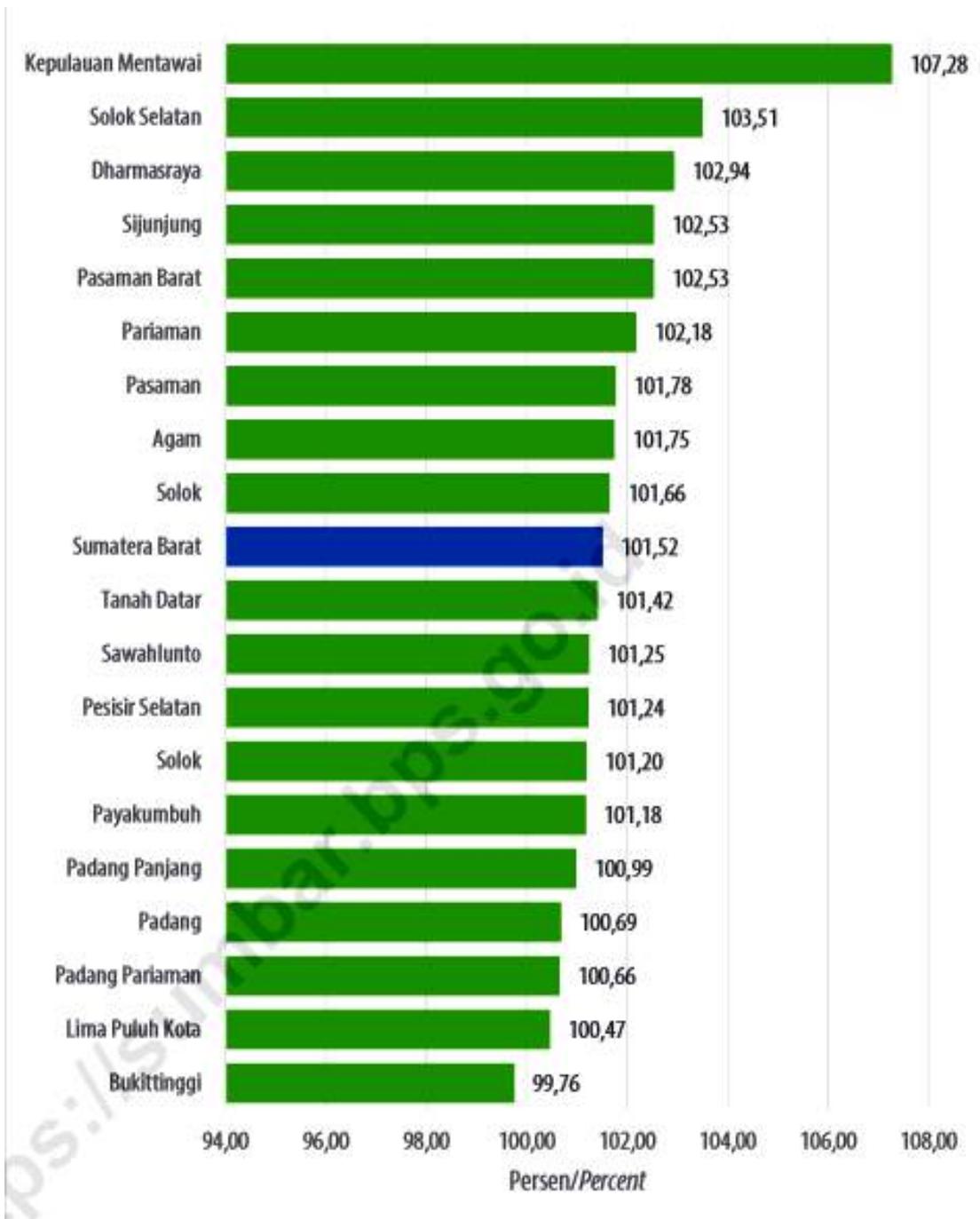
Tabel 9 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2022—2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>	
	2020 ¹	2023 ²
(1)	(23)	(24)
Kabupaten/Regency		
1. Kep. Mentawai	107,90	107,28
2. Pesisir Selatan	101,31	101,24
3. Solok	101,18	101,20
4. Sijunjung	102,77	102,53
5. Tanah Datar	100,30	101,42
6. Padang Pariaman	99,74	100,66
7. Agam	101,74	101,75
8. Lima Puluh Kota	99,97	100,47
9. Pasaman	101,17	101,78
10. Solok Selatan	104,14	103,51
11. Dharmasraya	103,59	102,94
12. Pasaman Barat	102,57	102,53
Kota/Municipality		
1. Padang	100,80	100,69
2. Solok	101,49	101,66
3. Sawahlunto	101,22	101,25
4. Padang Panjang	100,93	100,99
5. Bukittinggi	100,00	99,76
6. Payakumbuh	101,33	101,18
7. Pariaman	101,97	102,18
Sumatera Barat	101,39	101,52

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Pada gambar 1 juga ditunjukkan rasio jenis kelamin menurut Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki rasio tertinggi yaitu 107,28. Ini menunjukkan bahwa didalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki. Sebaliknya yang terendah Kota Bukittinggi sebesar 99,76. Dengan range yang berkisar 8 poin ini, maka diperlukan upaya Pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama terkait program Keluarga Berencana.

Gambar 1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023



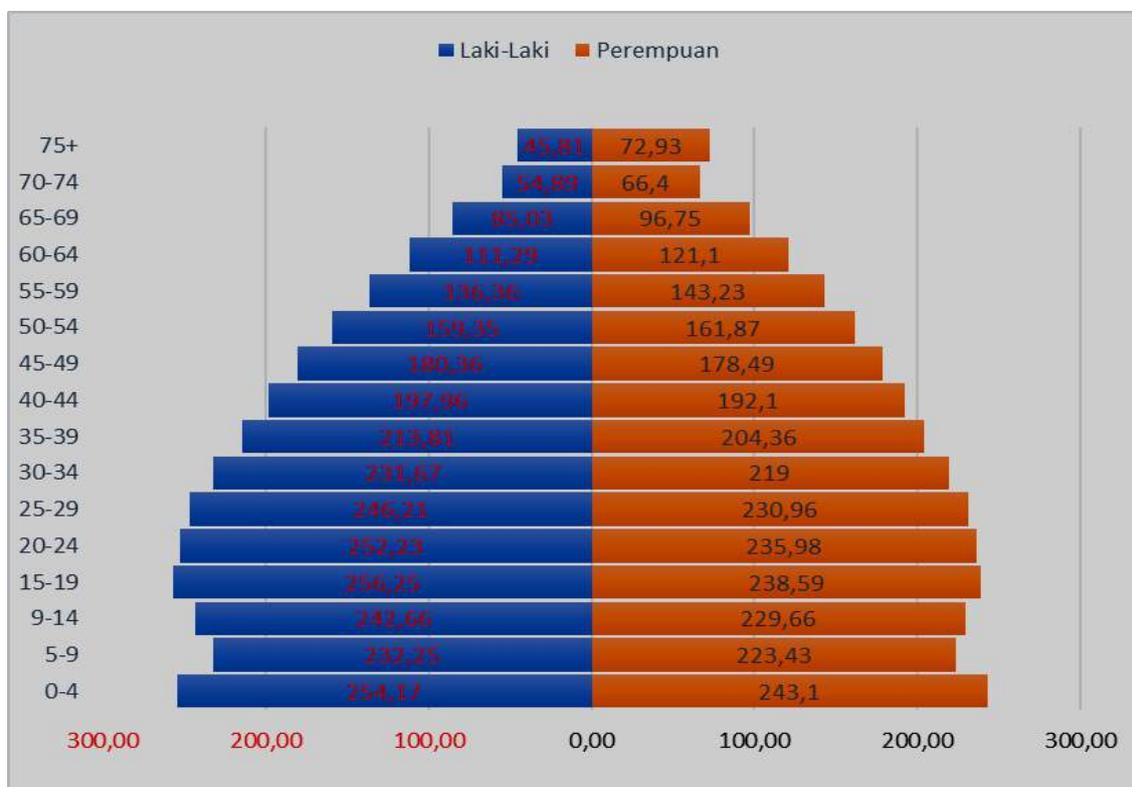
Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

2.3 KOMPOSISI PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

Proporsi penduduk usia 0-17 tahun sebesar 30,13 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023. Penduduk Sumatera Barat yang dapat dikategorikan dalam usia anak (0-17 tahun) berjumlah 1.734.599 jiwa dengan populasi laki-laki sebesar 885.412 jiwa dan perempuan sebesar 849.187 jiwa.

Bonus demografi yang masih dicapai Sumatera Barat saat ini harus digunakan dalam perencanaan pembangunan Sumatera Barat. Pembangunan yang telah dicapai harus memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup terutama anak-anak. Persentase penduduk usia anak-anak terus meningkat sejak tahun 1971, ini mencerminkan peningkatan usia harapan hidup anak. Secara umum, persentase penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk, Indonesia khususnya Sumatera Barat berada pada masa transisi menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.

Gambar 2 Piramida Penduduk, 2023



Sumber: Diolah DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, 2024

BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Dalam konsensus global tentang hak seseorang untuk memperoleh nama dan kebangsaan pada awalnya diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Dalam Konvensi Tahun 1961 tentang Pengurangan Penduduk tanpa Status Kewarganegaraan disebutkan bahwa siapapun yang lahir dalam suatu negara atau diluar negeri, termasuk juga yang ditelantarkan dijamin haknya memperoleh status kewarganegaraan. Hak atas nama dan kewarganegaraan tercantumkan dalam asas ketiga Deklarasi Hak Anak tahun 1959, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Konvensi Hak Anak tahun 1989.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu hak vital anak yang wajib dipenuhi adalah masalah hak sipil anak. Ketidakjelasan hak sipil anak akan berdampak tidak hanya pada status warga negara serta perlindungan terhadap anak tetapi juga pada hak dan kewajiban anak yang bersangkutan dimasa yang akan datang. Registrasi kelahiran dituangkan dalam bentuk kepemilikan akta kelahiran. Melalui kepemilikan akta kelahiran, seorang anak akan mendapat berbagai layanan dan perlindungan dari Pemerintah.

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), keperluan memasuki dunia pendidikan, pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain.

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari adanya manipulasi (rekayasa) identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak. Keberadaan anak, baik nama

maupun silsilah secara de jure dianggap tidak ada, dan bahkan kewarganegaraannya tidak terlindungi.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1989 mengenai hak-hak anak, dimana negara telah mengharuskan kepada semua anak untuk didaftarkan sesegera mungkin setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Pendaftaran kelahiran dilakukan secara gratis bagi semua anak, dengan harapan akan dapat meningkatkan pemenuhan hak identitas anak dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pencatatan kelahiran anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia juga telah menerapkan peraturan tentang hak-hak anak terkait dengan akta kelahiran. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ditekankan bahwa akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Sementara pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota) pada tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

3.1 REALISASI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK

Untuk melihat realisasi kepemilikan akta kelahiran pada anak, maka dilakukan disagregasi data kepemilikan akta kelahiran menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota. Kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen identitas diri seorang penduduk, maka capaian kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 berdasarkan data BPS dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, sebesar 1.702.402 jiwa (94,24%) dari 1.806.454 jiwa. Ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.719.995 jiwa. Masih ada 5,76% penduduk Sumatera Barat tidak memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan jenis kelamin, kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini mengisyaratkan kepada Pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk.

Tabel 10 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Having a Birth Certificate from The Civil Registration Office			Jumlah Total
	Memiliki Akta Kelahiran Have a Birth Certificate	Tidak Memiliki Akta Kelahiran Do Not Have a Birth Certificate	Tidak Tahu Do Not Known	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	87,10	12,31	NA	100,00
Kab. Pesisir Selatan	94,25	5,75	-	100,00
Kab. Solok	93,24	6,39	NA	100,00
Kab. Sijunjung	91,24	8,76	-	100,00
Kab. Tanah Datar	95,10	4,08	NA	100,00
Kab. Padang Pariaman	95,26	3,73	NA	100,00
Kab. Agam	95,07	4,93	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	91,29	8,71	-	100,00
Kab. Pasaman	92,68	7,10	NA	100,00
Kab. Solok Selatan	94,36	5,42	NA	100,00
Kab. Dharmasraya	93,30	6,28	NA	100,00
Kab. Pasaman Barat	95,59	4,03	NA	100,00
Kota Padang	94,38	5,62	-	100,00
Kota Solok	97,08	2,92	-	100,00
Kota Sawahlunto	98,28	1,72	-	100,00
Kota Padang Panjang	98,96	0,69	NA	100,00
Kota Bukittinggi	96,38	3,62	-	100,00
Kota Payakumbuh	97,59	2,41	-	100,00
Kota Pariaman	97,78	2,22	-	100,00
Sumatera Barat	94,24	5,52	0,24	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional diperoleh data bahwa penduduk usia 0-17 tahun, 5,52 persen belum memiliki akte kelahiran dan 0,24 persen tidak tahu kepemilikan akte kelahirannya seperti tersaji pada tabel 10. Ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk kepemilikan akte kelahiran anak telah mencapai 90% lebih. Persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,91% dan terendah berada di Kota Padang Panjang sebesar 0,69 persen. Bila dilihat dari perwilayahannya, kepemilikan akte kelahiran di daerah perdesaan masih relatif rendah dibandingkan daerah perkotaan.

Tabel 11 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Having a Birth Certificate from The Civil Registration Office			Jumlah Total
	Memiliki Akte Kelahiran Have a Birth Certificate	Tidak Memiliki Akte Kelahiran Do Not Have a Birth Certificate	Tidak Tahu Do Not Known	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	73,77	25,44	NA	100,00
Kab. Pesisir Selatan	83,42	16,58	-	100,00
Kab. Solok	82,05	16,80	NA	100,00
Kab. Sijunjung	83,34	16,66	-	100,00
Kab. Tanah Datar	85,70	12,23	NA	100,00
Kab. Padang Pariaman	86,87	11,88	NA	100,00
Kab. Agam	84,57	15,43	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	82,81	17,19	-	100,00
Kab. Pasaman	80,05	19,95	-	100,00
Kab. Solok Selatan	85,55	14,45	-	100,00
Kab. Dharmasraya	84,64	14,66	NA	100,00
Kab. Pasaman Barat	88,55	11,45	-	100,00
Kota Padang	87,54	12,46	-	100,00
Kota Solok	90,32	9,68	-	100,00
Kota Sawahlunto	95,27	4,73	-	100,00
Kota Padang Panjang	95,95	2,68	NA	100,00
Kota Bukittinggi	87,06	12,94	-	100,00
Kota Payakumbuh	92,70	7,30	-	100,00
Kota Pariaman	93,81	6,19	-	100,00
Sumatera Barat	85,51	14,15	0,35	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Sedangkan untuk penduduk yang berusia 0-4 tahun pada tahun 2023 berdasarkan kepemilikan akte kelahirannya adalah 85,51 persen telah memiliki, 14,15 persen belum memiliki dan 0,35 persen tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa adanya imej masyarakat bahwa kepengurusan akte kelahiran akan dilakukan pada saat mereka telah membutuhkan saja (pada saat anak mereka memasuki jenjang pendidikan). Karena salah satu persyaratannya adalah kepemilikan akte kelahiran. Ini menggambarkan perlunya program Pemerintah dalam peningkatan realisasi kepemilikan akte kelahiran pada daerah yang memiliki realisasi kepemilikan yang masih rendah.

Pemerintah masih perlu menerapkan berbagai macam strategi yang lebih komprehensif guna meningkatkan peran serta masyarakat agar berpartisipasi dalam program kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Peniadaan biaya pengurusan akta kelahiran merupakan salah satu langkah progresif yang telah diambil oleh pemerintah untuk memenuhi hak anak atas akta kelahiran.

Kendala lokasi geografis menimbulkan mahalnya biaya transportasi, sehingga kepemilikan akta kelahiran di daerah yang secara geografis sulit, masih rendah. Sebagai langkahnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran secara *online*. Walaupun baru sebagian kecil daerah yang telah mengaplikasikannya, diharapkan dengan terobosan ini peran serta masyarakat untuk pemenuhan hak anak akan akta kelahiran meningkat, sehingga selanjutnya berdampak kepada peningkatan proporsi kepemilikan akta kelahiran secara nasional.

Setiap anak baik anak laki-laki maupun perempuan dijamin mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akta kelahiran. Setiap warga negara tanpa batasan usia sejatinya memiliki hak yang sama rata atas kepemilikan akta kelahiran.

Alasan ketiadaan biaya diperkirakan masih menjadi penyebab utama ketidakpunyaan akta kelahiran baik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun Pemerintah nyatanya telah menghapus biaya pada setiap pembuatan akta kelahiran, seperti yang diatur pada UU nomor 23 tahun 2002 dan

perubahan UU nomor 24 tahun 2013 tentang akta kelahiran, namun masih terdapatnya daerah sulit menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Maka dari itu, penekanan sosialisasi kepada orang tua terutama yang tinggal pada wilayah dan akses yang sulit, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Terobosan baru juga sudah dilakukan di beberapa daerah dengan membuka kanal pembuatan registrasi penduduk secara *online*. Dari terobosan ini, partisipasi masyarakat diharapkan meningkat.

3.2 FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK

Ilmu pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan bagian dari kebutuhan mendasar dalam upaya percepatan pembangunan suatu negara. Daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global membutuhkan kualitas pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang tinggi.

Ada 3 (tiga) upaya mendasar dalam mendorong pemanfaatan perkembangan teknologi, yaitu

1. Literasi digital kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilah dan memilih informasi yang diakses,
2. Mengintervensi akses informasi dengan melakukan pembatasan akses dan pemblokiran pada berbagai sumber informasi yang beresiko merugikan masyarakat dan bangsa, dan
3. Melakukan penegakan dan penindakan hukum melalui bekerjasama dengan kepolisian agar manfaat IPTEK dapat menguntungkan bangsa dan negara.

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci utama pembangunan. Penguatan IP-TIK sebagai landasan percepatan pembangunan dikuatkan dengan adanya regulasi yang menguatkan semua pihak memiliki peran dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK menjadi payung dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-Undang ini menegaskan bahwa

penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi (IP-TIK) dapat dilakukan oleh semua pihak, baik perorangan, kelompok, institusi, badan usaha, lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi seperti universitas dan perguruan tinggi.

Keseimbangan akses terhadap sumber daya IP-TIK bagi perempuan dan laki-laki dan masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang IP-TIK menjadi fokus pemerintah, selain pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pembangunan IP-TIK. Pemerataan pembangunan dapat dicapai secara ideal dan proses pembangunan akan memberikan manfaat yang berkeadilan jika perempuan juga maju dan mumpuni di bidang IP-TIK.

Perkembangan teknologi informasi tentunya telah memberikan kemudahan kepada anak-anak kita. Tetapi di sisi lain, anak-anak juga rentan terpapar informasi yang tidak layak untuk dirinya. Fakta menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan dilakukan melalui media digital. Apalagi saat kondisi pandemi seperti saat ini. Kita semua termasuk anak-anak harus melakukan berbagai kegiatan secara daring, sehingga penggunaan gadget pada anak juga mengalami peningkatan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pemenuhan hak informasi layak anak adalah semakin berkurangnya tayangan atau penyediaan informasi khusus anak melalui berbagai media. Tayangan khusus anak di TV semakin berkurang, begitu juga di radio, media cetak, dan media sosial. Kondisi ini juga memaksa anak pada akhirnya kembali pada gadgetnya.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pemenuhan hak informasi layak anak adalah semakin berkurangnya tayangan atau penyediaan informasi khusus anak melalui berbagai media. Tayangan khusus anak di TV semakin berkurang, begitu juga di radio, media cetak, dan media sosial. Kondisi ini juga memaksa anak pada akhirnya kembali pada gadgetnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian upaya perlindungan anak, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan membentuk pusat informasi layak anak (PISA).

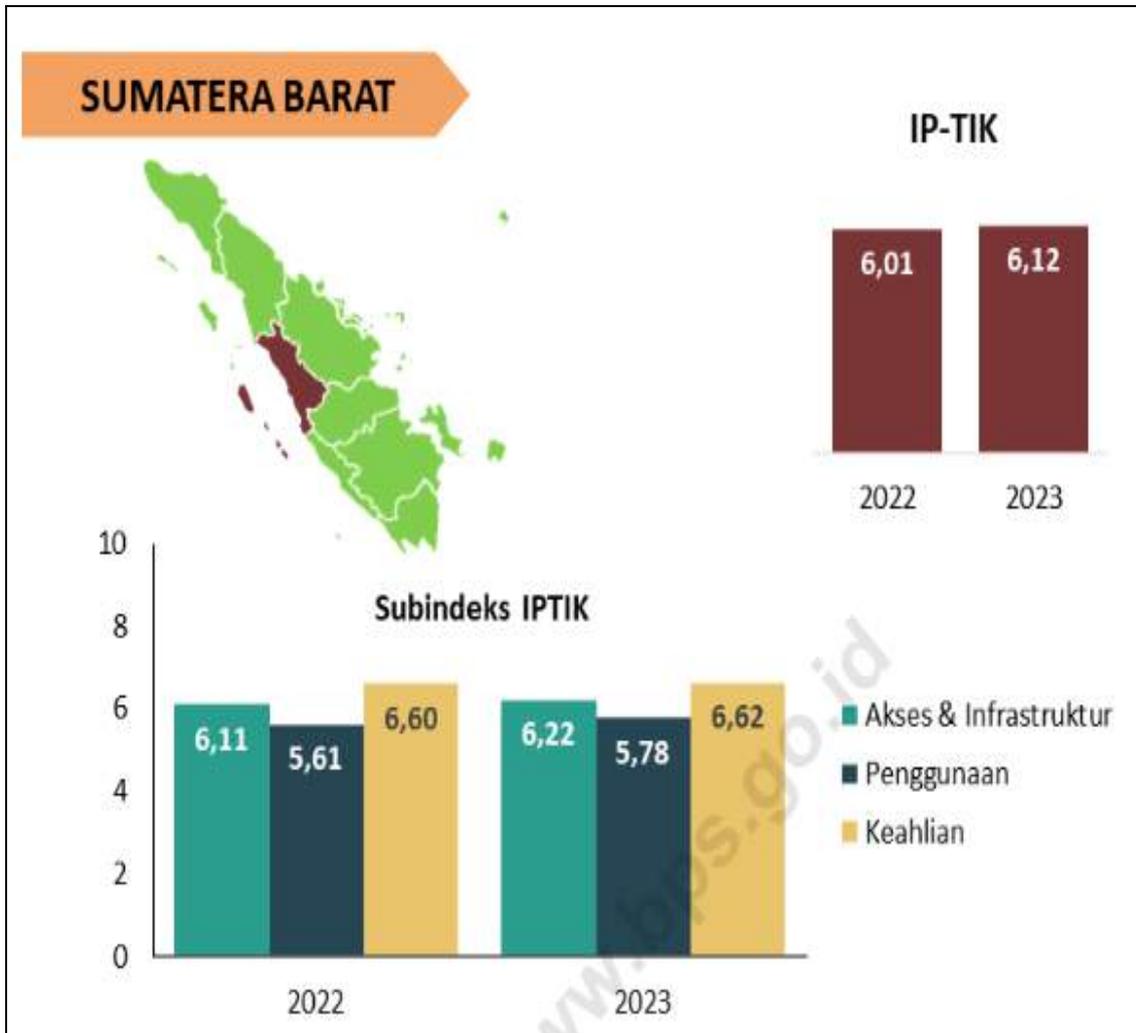
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dijelaskan bahwa “Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pada pasal 10 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pusat Informasi Layak Anak (PISA) merupakan pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. PISA merupakan integrasi dari tempat penyedia informasi anak, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi dan lain-lain.

Berdasarkan rilis BPS dalam indeks pembangunan TIK tahun 2023, IP TIK Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 5,25%, tahun 2020 sebesar 5,52% dan tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,92. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, IP TIK mengalami peningkatan 6,01 (2022) dan 6,12 (2023). Ini artinya sub indeks IP TIK di Sumatera Barat seperti akses dan infrastruktur, penggunaan dan keahlian penduduk telah semakin baik.

Handphone/telepon genggam/telepon seluler (HP) sebagai bukti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). HP merupakan salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia oleh semua orang. Perkembangan penggunaan HP, tidak hanya dari segi bentuk fisik HP sendiri, tetapi juga terjadi perkembangan dari fungsi dari HP itu sendiri. Diawali sebagai teknologi untuk berkomunikasi, HP sekarang ini sudah bertransformasi seperti layaknya sebuah komputer mini.

Gambar 3 IP TIK Sumatera Barat, 2022-2023



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Informasi, 2023

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan HP sebagai media komunikasi yang sangat praktis dan sangat membantu karena ukurannya yang semakin bervariasi sehingga dapat dibawa kemana saja. HP juga marak digunakan baik dikalangan anak muda, orang tua, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur.

Seperti terlihat pada tabel 12 persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan menggunakan telepon seluler dibandingkan perempuan pada masing-masing Kabupaten/Kota kecuali Kota Padang Panjang, namun memiliki selisih yang tidak signifikan. Persentase

penduduk usia 5 tahun keatas yang tertinggi untuk wilayah perkotaan berada pada Kota Solok sebesar 95,13 persen.

Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka persentase tertinggi untuk laki-laki adalah Kota Solok 96,41 persen dan untuk perempuan Kota Bukittinggi sebesar 94,56 persen. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap media komunikasi menjadi kebutuhan utama dimana hampir seluruh penduduk usia 5 tahun keatas telah menggunakan telepon seluler yang telah mencapai kisaran 88,88 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 85,65 persen. Rata-rata penggunaan telepon seluler pada kedua jenis kelamin berada pada angka ≥ 80 %. Ini menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk Sumatera Barat telah menggunakan telepon seluler sebagai media informasi.

Sedangkan untuk yang terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan besaran 66,50% (laki-laki), 58,71% (perempuan) dan secara keseluruhan hanya mencapai 62,73% (meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun 2022). Ini artinya hanya sebagian masyarakat di Kepulauan Mentawai yang menggunakan HP sebagai media komunikasi. Hal ini disebabkan kekuatan sinyal jaringan seluler masih rendah pada beberapa wilayah, sehingga diperlukan program Pemerintah dalam penyediaan jaringan komunikasi pada tahun selanjutnya

Bila dilihat dari persentase penduduk Sumatera Barat yang menguasai/memiliki telepon seluler, maka tingkat kepemilikan berada pada kisaran 72,12% pada jenis kelamin laki-laki dan 63,51% pada jenis kelamin perempuan. Secara gabungan tingkat kepemilikan telepon seluler sebesar 67,78%, ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh penduduk Sumatera Barat yang berusia 5 tahun keatas telah memiliki dan menguasai telepon seluler. Hal ini mengalami penurunan sebesar 1 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 12 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	66,50	58,71	62,73
Kab. Pesisir Selatan	92,99	89,77	91,36
Kab. Solok	83,38	79,56	81,46
Kab. Sijunjung	86,80	79,20	82,98
Kab. Tanah Datar	92,40	91,18	91,78
Kab. Padang Pariaman	85,68	82,78	84,20
Kab. Agam	87,77	85,09	86,41
Kab. Lima Puluh Kota	89,25	85,26	87,22
Kab. Pasaman	87,93	85,24	86,57
Kab. Solok Selatan	91,86	88,74	90,31
Kab. Dharmasraya	94,15	90,71	92,48
Kab. Pasaman Barat	85,37	80,25	82,82
Kota Padang	89,86	87,47	88,66
Kota Solok	96,41	93,88	95,13
Kota Sawahlunto	91,63	88,01	89,80
Kota Padang Panjang	92,19	92,76	92,48
Kota Bukittinggi	95,72	94,56	95,12
Kota Payakumbuh	90,68	90,47	90,58
Kota Pariaman	92,32	92,18	92,25
Sumatera Barat	88,88	85,76	87,31

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Tabel 13 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	54,75	38,70	46,98
Kab. Pesisir Selatan	66,99	56,85	61,87
Kab. Solok	68,01	56,83	62,39
Kab. Sijunjung	73,79	63,68	68,71
Kab. Tanah Datar	75,91	65,15	70,40
Kab. Padang Pariaman	68,44	60,63	64,47
Kab. Agam	75,24	68,94	72,04
Kab. Lima Puluh Kota	68,90	59,89	64,33
Kab. Pasaman	61,47	47,47	54,39
Kab. Solok Selatan	68,56	63,01	65,81
Kab. Dharmasraya	73,66	61,70	67,87
Kab. Pasaman Barat	65,30	52,40	58,89
Kota Padang	80,26	74,35	77,29
Kota Solok	79,21	73,53	76,33
Kota Sawahlunto	78,87	73,16	75,99
Kota Padang Panjang	77,67	78,46	78,07
Kota Bukittinggi	86,92	82,89	84,84
Kota Payakumbuh	74,87	74,16	74,51
Kota Pariaman	70,91	66,23	68,52
Sumatera Barat	72,12	63,51	67,78

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Namun bila dilihat dari kabupaten/kota, maka kepemilikan telepon seluler terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai 54,75% (laki-laki) dan 38,70% (perempuan). Kondisi geografis dan ekonomi menjadi salah satu faktor dominan dalam kepemilikan telepon seluler yang masih rendah. Hal senada juga terlihat pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat yang juga memiliki tingkat kepemilikan telepon seluler yang masih rendah (berada pada kisaran 60%).

Bila dikelompokkan kedalam zona perkotaan dan pedesaan, maka tingkat kepemilikan telepon seluler daerah perkotaan lebih besar dibandingkan pedesaan. Rata-rata pada daerah perkotaan berada pada angka 68,52-84,84%. Untuk wilayah pedesaan, rata-rata kepemilikan telepon seluler berada pada besaran 46,98-72,04%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Sumatera Barat yang berada perkotaan lebih menguasai dan memiliki telepon seluler sebagai sarana komunikasi.

Tabel 14 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	11,08	13,06	12,04
Kab. Pesisir Selatan	9,23	10,81	10,02
Kab. Solok	5,85	9,57	7,72
Kab. Sijunjung	10,10	13,97	12,05
Kab. Tanah Datar	12,99	15,42	14,24
Kab. Padang Pariaman	9,28	11,58	10,45
Kab. Agam	9,46	11,97	10,73
Kab. Lima Puluh Kota	6,85	7,26	7,06
Kab. Pasaman	6,27	7,58	6,93
Kab. Solok Selatan	10,83	12,80	11,81
Kab. Dharmasraya	6,85	13,47	10,06
Kab. Pasaman Barat	3,84	7,18	5,50
Kota Padang	20,60	24,39	22,51
Kota Solok	23,93	26,60	25,29
Kota Sawahlunto	13,89	16,67	15,29
Kota Padang Panjang	19,01	23,98	21,51
Kota Bukittinggi	26,18	27,36	26,79
Kota Payakumbuh	18,91	21,85	20,39
Kota Pariaman	17,24	24,27	20,84
Sumatera Barat	11,64	14,57	13,12

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Tanpa kita sadari, komputer telah menjadi suatu kebutuhan dan memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat. Hal ini berlaku tidak hanya di negara-negara yang sudah maju tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam beberapa tahun yang lalu, komputer sudah digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Seiring perkembangan teknologi, komputer juga mengalami perubahan fisik dan estetika serta fungsi seperti PC, laptop, notebook dan tablet.

Selain menggunakan telepon seluler, penduduk Sumatera Barat juga menggunakan komputer baik dalam bentuk PC, Laptop/Notebook dan tablet sebagai media informasi. Pada tabel 14 disajikan persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan komputer menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin. Rasio penduduk Sumatera Barat yang menggunakan komputer berada pada besaran 11,64% untuk laki-laki dan 14,57% untuk perempuan. Ini menggambarkan bahwa penduduk Sumatera Barat tidak terlalu dominan dalam penggunaan komputer sebagai media informasi. Rasio gabungan penggunaan komputer dari penduduk Sumatera Barat adalah 13,12%. Berdasarkan perwilayahan, penduduk di daerah perkotaan lebih banyak menggunakan komputer dibandingkan daerah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan program Pemerintah yang tertuju pada sosialisasi penggunaan komputer sebagai media informasi terutama pada daerah perdesaan sehingga masyarakat tidak gagap teknologi.

Rasio gabungan (laki-laki dan perempuan) tertinggi penggunaan komputer berada pada Kota Bukittinggi disusul oleh Kota Solok dan Kota Padang. Kota Padang sebagai ibukota provinsi menduduki peringkat ketiga dengan rasio gabungan pada besaran 25,29% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20,29%.

Sebaliknya, penggunaan komputer pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pada tahun sebelumnya berada pada level rendah yaitu sebesar 11,08% (laki-laki) dan 13,06%. (perempuan) dengan rasio sebesar 12,04%, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3% dengan rasio pada laki-laki sebesar 10,62 % dan perempuan 8,48%. Pada tahun 2023,

capaian terendah adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan rasio sebesar 5,50%.

Seiring dengan kebutuhan informasi, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi melalui TV/radio, namun informasi dapat diakses melalui media internet. Dengan media internet, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dalam negeri tetapi juga dapat mengakses informasi luar negeri.

Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat, demikian halnya dengan alat komunikasi yang terus mengalami perubahan. Segala temuan dan inovasi di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah membawa kita pada era digital. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat menyebabkan munculnya sebuah media baru, yaitu internet. Penetrasi internet terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kebutuhan internet masyarakat juga terus meningkat sejalan dengan perkembangan dunia digital. Misalnya, pergeseran perekonomian digital (e-commerce), kebutuhan pada media sosial, serta transportasi online. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir selama 2022-2023 di Provinsi Sumatera Barat, dari 63,13 persen pada tahun 2022 menjadi 68,64 persen pada tahun 2023. Kebutuhan akan internet diproyeksikan akan terus meningkat.

Pada tabel 15 disajikan persentase penduduk Sumatera Barat usia 5 tahun keatas yang mengakses internet. Hal ini terlihat bahwa akses internet dari penduduk laki-laki masih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun selisih dari kedua jenis kelamin relatif kecil hanya sebesar 5%. Meskipun rasio gabungan pengaksesan internet penduduk Sumatera Barat telah berada di angka 68,64%. Ini membuktikan bahwa hanya sebagian penduduk Sumatera Barat yang mengakses internet dengan pengakses internet terbesar berada pada daerah perkotaan.

Kota Padang Panjang menduduki posisi teratas dalam persentase pengakses internet, sedangkan yang berada pada posisi terbawah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 15 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pernah Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	50,12	36,60	43,58
Kab. Pesisir Selatan	65,54	60,63	63,06
Kab. Solok	62,00	57,83	59,90
Kab. Sijunjung	69,11	60,97	65,02
Kab. Tanah Datar	71,58	65,03	68,23
Kab. Padang Pariaman	65,15	60,54	62,80
Kab. Agam	68,72	63,67	66,16
Kab. Lima Puluh Kota	66,13	61,14	63,60
Kab. Pasaman	64,67	59,88	62,25
Kab. Solok Selatan	71,27	67,76	69,53
Kab. Dharmasraya	80,02	75,30	77,73
Kab. Pasaman Barat	66,41	57,59	62,02
Kota Padang	81,13	78,01	79,56
Kota Solok	83,43	80,29	81,83
Kota Sawahlunto	74,06	70,35	72,19
Kota Padang Panjang	85,68	85,67	85,68
Kota Bukittinggi	86,83	84,96	85,87
Kota Payakumbuh	77,80	77,01	77,40
Kota Pariaman	77,24	73,46	75,31
Sumatera Barat	71,10	66,21	68,64

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Kisaran persentase pengakses internet pada wilayah perkotaan adalah 70,49 (Kota Sawahlunto) hingga 84,51 (Kota Padang Panjang). Untuk wilayah pedesaan adalah 37,42% (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan 76,01% (Kabupaten Dharmasraya).

Bila dilihat dari jenis kelamin, rata-rata pengakses internet di Sumatera Barat adalah laki-laki kecuali pada wilayah perkotaan (Kota Bukittinggi). Ini menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Barat telah bisa mengakses internet

secara baik meskipun masih diperlukan upaya untuk peningkatan penggunaannya secara positif. Pada tabel 15 tergambar bahwa 68,64 persen penduduk Sumatera Barat telah mengakses internet. Rata-rata penduduk Sumatera Barat baik di perkotaan maupun di perdesaan telah pernah mengakses internet. Seluruh Kabupaten/kota mencapai diatas 50% kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru mencapai 43,58%.

Diharapkan dengan peningkatan penggunaan internet peran orang tua lebih optimal dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan internet bagi anak-anak. Orang tua harus proaktif dalam kemajuan teknologi, jangan sampai orang tua gagap teknologi.

Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan sosialisasi ke Kabupaten/Kota terkait penggunaan internet yang aman bagi anak-anak, salah satu melalui kegiatan internet ceria.

Disamping itu, diperlukan peran Pemerintah dalam mengawasi situs-situs yang dinilai tidak etis dikonsumsi oleh masyarakat terutama bagi anak-anak.

Dari tabel 16 dapat dilihat bahwa proporsi penduduk berjenis kelamin laki-laki di Sumatera Barat yang mengakses internet lebih tinggi dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan. Kecenderungan ini relatif sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja pada tahun ini proporsi pengguna internet untuk masing-masing kelompok jenis kelamin lebih tinggi

Penduduk laki-laki lebih banyak yang mengakses internet dibandingkan perempuan. Kecenderungan ini hampir mirip seperti yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak mengakses internet dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan. Hal ini sejalan dengan jangkauan internet yang di ada di wilayah perdesaan masih terbatas

Tabel 16 Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Twitter, Facebook, dan Whatsapp) dalam Tiga Bulan Terakhir, 2022-2023

Jenis Kelamin	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	65,32	71,1
Perempuan	60,93	66,21
Total	63,13	68,64

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Tabel 17 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas <i>Percentage of Population 5 Years and Over</i>		
	Pernah Mengakses Internet <i>Had Access The Internet</i>	Tidak Pernah Mengakses Internet <i>Never Access The Internet</i>	
(1)	(2)	(3)	
Kabupaten/Regency			
1. Kep. Mentawai	43,58	56,42	
2. Pesisir Selatan	63,06	36,94	
3. Solok	59,90	40,10	
4. Sijunjung	65,02	34,98	
5. Tanah Datar	68,23	31,77	
6. Padang Pariaman	62,80	37,20	
7. Agam	66,16	33,84	
8. Lima Puluh Kota	63,60	36,40	
9. Pasaman	62,25	37,75	
10. Solok Selatan	69,53	30,47	
11. Dharmasraya	77,73	22,27	
12. Pasaman Barat	62,02	37,98	
Kota/Municipality			
1. Padang	79,56	20,44	
2. Solok	81,83	18,17	
3. Sawahlunto	72,19	27,81	
4. Padang Panjang	85,68	14,32	
5. Bukittinggi	85,87	14,13	
6. Payakumbuh	77,40	22,60	
7. Pariaman	75,31	24,69	
Sumatera Barat	2023	68,64	31,36
	2022	63,13	36,87
	2021	58,14	41,86

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 18 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Media yang Digunakan untuk Mengakses Internet, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki/Male			
	PC/Desktop	Laptop/Notebook/Tablet	HP/Ponsel Cellular Phone	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	1,79	5,30	98,54	0,20
Kab. Pesisir Selatan	1,09	3,28	99,63	0,42
Kab. Solok	0,20	5,46	99,54	0,13
Kab. Sijunjung	2,62	8,50	99,04	-
Kab. Tanah Datar	1,94	7,70	97,89	0,32
Kab. Padang Pariaman	1,69	4,41	99,23	-
Kab. Agam	1,34	5,52	99,61	0,26
Kab. Lima Puluh Kota	0,73	5,55	99,64	-
Kab. Pasaman	1,16	4,42	98,48	-
Kab. Solok Selatan	0,95	4,69	99,78	-
Kab. Dharmasraya	0,54	3,57	99,64	0,01
Kab. Pasaman Barat	0,86	2,76	98,93	0,57
Kota Padang	3,81	15,27	98,21	-
Kota Solok	7,69	11,23	99,35	-
Kota Sawahlunto	4,50	8,52	99,52	-
Kota Padang Panjang	3,72	11,93	99,11	-
Kota Bukittinggi	8,72	14,79	97,60	-
Kota Payakumbuh	5,00	10,73	98,63	0,14
Kota Pariaman	6,77	7,11	99,33	0,21
Sumatera Barat	2,31	7,75	98,95	0,14

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perempuan/Female			
	PC/Desktop	Laptop/Notebook/Tablet	HP/Ponsel Cellular Phone	Lainnya Others
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Kepulauan Mentawai	4,96	12,27	98,04	-
Kab. Pesisir Selatan	2,01	4,78	100,00	-
Kab. Solok	2,24	5,87	99,09	0,14
Kab. Sijunjung	3,00	12,05	99,26	0,14
Kab. Tanah Datar	3,61	9,08	99,17	-
Kab. Padang Pariaman	2,86	7,21	98,36	0,09
Kab. Agam	2,47	9,69	99,56	-
Kab. Lima Puluh Kota	1,07	5,57	99,24	-
Kab. Pasaman	0,92	5,88	99,03	0,24
Kab. Solok Selatan	1,58	6,93	99,36	-
Kab. Dharmasraya	0,81	7,34	99,40	0,37
Kab. Pasaman Barat	0,47	4,65	97,48	1,33
Kota Padang	4,00	18,54	98,70	-
Kota Solok	6,96	13,87	99,02	-
Kota Sawahlunto	3,72	13,72	99,36	-
Kota Padang Panjang	1,87	15,74	99,31	0,17
Kota Bukittinggi	5,48	15,40	98,37	-
Kota Payakumbuh	6,50	13,86	98,16	0,14
Kota Pariaman	9,67	11,72	99,61	-
Sumatera Barat	2,89	10,38	98,95	0,15

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki + Perempuan/Male + Female			
	PC/Desktop	Laptop/Notebook/Tablet	HP/Ponsel Cellular Phone	Lainnya Others
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kab. Kepulauan Mentawai	3,08	8,13	98,34	0,12
Kab. Pesisir Selatan	1,53	4,01	99,81	0,21
Kab. Solok	1,19	5,66	99,32	0,14
Kab. Sijunjung	2,80	10,17	99,15	0,07
Kab. Tanah Datar	2,75	8,37	98,51	0,17
Kab. Padang Pariaman	2,26	5,78	98,80	0,05
Kab. Agam	1,89	7,55	99,58	0,13
Kab. Lima Puluh Kota	0,90	5,56	99,45	-
Kab. Pasaman	1,04	5,13	98,75	0,12
Kab. Solok Selatan	1,26	5,77	99,58	-
Kab. Dharmasraya	0,67	5,34	99,53	0,18
Kab. Pasaman Barat	0,68	3,63	98,26	0,92
Kota Padang	3,91	16,88	98,45	-
Kota Solok	7,32	12,54	99,19	-
Kota Sawahlunto	4,12	11,08	99,44	-
Kota Padang Panjang	2,79	13,85	99,21	0,09
Kota Bukittinggi	7,06	15,10	97,99	-
Kota Payakumbuh	5,75	12,29	98,39	0,14
Kota Pariaman	8,22	9,41	99,47	0,11
Sumatera Barat	2,59	9,03	98,95	0,14

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Dari tabel 19 terlihat bahwa media untuk mengakses internet bagi penduduk Sumatera Barat adalah komputer/desktop, laptop/notebook/tablet, HP/ponsel dan lainnya. Media mengakses internet terbesar dari komputer berada pada Kota Pariama (8,22%), media laptop/notebook/tablet pada Kota Padang (16,88%), media HP/ponsel pada Kabupaten Pesisir Selatan (99,81%) dan media lainnya pada Kabupaten Pasaman Barat (0,92%). Dalam tabel diatas juga terlihat bahwa penggunaan HP/ponsel masih menempati posisi

teratas sebagai media penggunaan internet, untuk itu diperlukan peran dari orang tua untuk mengawasi anak-anak penggunaan internet. Disamping itu, juga diperlukan pengawasan Pemerintah dalam melakukan filter konten yang akan muncul di internet terutama konten yang bersifat tidak layak anak.

Media akses internet terbesar untuk Sumatera Barat berada pada penggunaan HP/Ponsel yaitu 98,95% dan yang terkecil pada penggunaan lainnya (0,14%) seperti terlihat pada tabel 19.

Ditinjau dari segi jenis kelamin, 98,95% baik laki-laki maupun perempuan menggunakan HP/ponsel sebagai media akses internet. Perempuan cenderung lebih banyak menggunakan laptop/notebook dibandingkan laki-laki.

Tabel 19 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/ Kota dan Tempat Mengakses Internet, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sendiri Own House	Bukan Rumah Sendiri Not Own Home	Tempat Bekerja/ Kantor Office/Working Place	Gedung Sekolah/ Kampus School/Campus	Tempat Umum Public Site	Kondisi Bergerak On Moving Vehicle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	72,10	20,39	20,04	12,43	45,55	24,14
Kab. Pesisir Selatan	97,89	31,70	18,61	10,84	39,36	38,38
Kab. Solok	96,43	18,43	17,03	10,65	36,17	37,42
Kab. Sijunjung	97,04	54,21	21,99	11,24	54,49	42,09
Kab. Tanah Datar	98,28	26,76	20,11	11,46	28,22	23,78
Kab. Padang Pariaman	97,60	27,26	23,28	13,23	36,11	17,39
Kab. Agam	97,30	22,25	23,02	13,17	37,26	17,73
Kab. Lima Puluh Kota	97,81	30,76	15,96	9,51	34,64	23,02
Kab. Pasaman	97,38	45,42	17,42	7,95	43,48	35,66
Kab. Solok Selatan	94,91	32,27	18,33	11,12	33,92	26,63
Kab. Dharmasraya	98,32	56,42	31,66	7,68	54,94	42,37
Kab. Pasaman Barat	99,23	47,60	22,82	8,37	44,09	37,39
Kota Padang	97,91	38,58	32,10	17,71	55,54	55,71
Kota Solok	94,64	16,54	30,41	13,92	39,66	32,55
Kota Sawahlunto	97,02	28,22	31,99	6,82	58,98	32,24
Kota Padang Panjang	98,08	18,17	32,38	10,26	37,21	40,67
Kota Bukittinggi	99,52	36,83	37,16	14,77	51,54	41,81
Kota Payakumbuh	99,55	31,81	32,08	12,78	45,82	48,82
Kota Pariaman	99,54	37,99	28,33	14,57	54,78	38,32
Sumatera Barat	97,51	34,70	24,69	12,35	44,09	36,71

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Perkembangan teknologi menjadikan masyarakat lebih konsumtif dalam kebutuhan informasi. Berbagai media dapat digunakan masyarakat dalam mengakses informasi terutama akses internet. Tabel 19 menggambarkan tempat-tempat mengakses internet diantaranya rumah sendiri, bukan rumah sendiri, tempat bekerja/kantor, gedung sekolah/kampus, tempat umum dan kondisi bergerak.

Bila dilihat dari kontribusi masing-masingnya, porsi teratas tempat mengakses internet berada pada rumah sendiri (97,51) dan terendah berada pada tempat gedung sekolah/kampus (12,35%).

Kecenderungan penduduk Sumatera Barat dalam mengakses internet saat mereka berada dirumah baik di rumah sendiri maupun di bukan rumah sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa mereka mengakses internet saat mereka istirahat maupun mengisi waktu luang. Rata-rata tempat mengakses internet di rumah sendiri pada masing-masing Kabupaten/Kota berada pada angka 90% keatas kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang masih pada angka 72,10%. Sebaliknya, tempat mengakses internet pada tempat umum tertinggi berada pada Kota Sawahlunto (58,98%). Wilayah perkotaan memiliki persentase yang tinggi dalam tempat mengakses internet melalui sekolah karena ditimbulkan oleh banyaknya lembaga pendidikan yang ada di wilayah perkotaan.

Bila dilihat dari tempat mengakses internet pada tempat umum, masyarakat Sumatera Barat lebih cenderung mengakses internet pada lokasi-lokasi yang gratis. Ini menggambarkan bahwa *free wifi* lebih digandrungi masyarakat terutama kalangan muda seperti *cafe*, *coffee shop* dan lainnya.

Dengan gambaran diatas, maka Pemerintah harus mengambil langkah-langkah dalam penggunaan internet terutama bagi anak. Tingginya konsumtif masyarakat terutama anak-anak harus disikapi dengan tindakan preventif agar penggunaan internet tidak menyimpang dari yang diharapkan.

Berdasarkan data statistik, ada beberapa tujuan yang dilakukan penduduk Sumatera Barat dalam mengakses internet antara lain:

1. Mendapatkan informasi/berita
2. Mengerjakan tugas sekolah

3. Mengirim/menerima email
4. Sosial media/jejaring sosial
5. Pembelian barang/jasa
6. Penjualan Barang/Jasa
7. Hiburan
8. Fasilitas Finansial
9. Pembelajaran Online
10. Lainnya

Tujuan penduduk yang melakukan akses internet selama tahun 2023 paling banyak adalah untuk hiburan, baik berupa permainan, musik, dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa internet menjadi salah satu sumber hiburan bagi penduduk karena akses untuk mendapatkan musik, film, dan multimedia lainnya relatif lebih murah, sangat membantu untuk sekadar menghilangkan kepenatan atau sekadar mencari hiburan saja. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Sumatera Barat cenderung menggunakan dalam penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, tiktok, whatsapp dan sebagainya. Hal ini penggunaan media sosial juga bertujuan sebagai hiburan. Ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat menggunakan akses internet untuk mengisi waktu luang dengan hiburan-hiburan seperti youtube dan tiktok dan sebagainya.

Persentase yang besar ini menggambarkan perilaku penduduk masyarakat yang melek teknologi yang didominasi oleh usia muda, banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di jejaring sosial dunia maya. Selanjutnya, sosial media/jejaring sosial menempati posisi kedua sebagai tujuan penggunaan internet, yakni sebesar 79,18 persen. Tujuan penggunaan internet untuk memperoleh informasi/berita juga cukup tinggi, yakni sebesar 74,87 persen. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat semakin haus akan informasi dan berita mengenai apa yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Dengan kata lain, pengaruh internet saat ini telah menyentuh semua generasi, mulai generasi Z hingga generasi baby boomer. Sementara itu, penggunaan internet untuk pembelajaran online

dan bekerja online di rumah hanya mencapai 9,69 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan kegiatan belajar dan bekerja sudah diterapkan secara luring pasca pandemi COVID-19. Untuk kegiatan e-commerce, persentase penduduk yang mengakses internet dengan tujuan mendapat informasi barang/jasa, pembelian dan penjualan barang/jasa tercatat sebesar 41,44 persen.

Sebagai informasi proses belajar memberikan kontribusi sebesar 9,98% dari tujuan mengakses internet bagi penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa siswa/mahasiswa di Sumatera Barat tidak menggunakan media internet dalam proses pembelajaran, mereka lebih cenderung menggunakan media buku atau bacaan lainnya. Sebagian besar hanya menggunakan media internet sebagai referensi bacaan

Tabel 20 Persentase Penduduk Berumur 5 (Lima) Tahun Keatas yang Mengakses Internet Dalam 3 (Tiga) Bulan Terakhir Menurut Tujuan Mengakses Internet, 2023

Tujuan Mengakses Internet	Persentase
(1)	(2)
Mendapat informasi/berita	74,87
Pembelajaran online dan bekerja online di rumah	9,96
Mengirim/menerima email	11,56
Sosial media/jejaring sosial	79,18
Hiburan	83,62
Fasilitas finansial	7,74
Mendapat informasi barang/jasa, pembelian dan penjualan barang/jasa	41,44
Pembuatan konten digital dan lainnya	11,47

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Dalam data statistik kesejahteraan Sumatera Barat tahun 2023 digambarkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop adalah sebesar 20,14%. Ini mengasumsikan bahwa masih banyak rumah

tangga yang tidak memiliki komputer/laptop. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, kontribusi terbesar adalah Kota Padang Panjang (40,36%) dan yang terendah adalah Kabupaten Pasaman Barat (8,42%). Terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten yang masih kecil (< 20%) kepemilikan komputer/laptop. Ini diasumsikan adanya transformasi kebutuhan masyarakat dari memiliki laptop/computer ke sarana lainnya seperti handphone yang dinilai hampir memiliki kesamaan fungsi.

Tabel 21 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tujuan Mengakses Internet, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Mendapat Informasi/Berita Get Information/ News	Mendapat Informasi Barang/Jasa Get Information Goods/Service	Mengirim/ Menerima E-mail Send/Receive E-Mail	Sosial Media/ Jejaring Sosial Social Media/ Social Network	Pembelian Barang/Jasa Buy Goods/Service	Penjualan Barang/Jasa Sell Goods/Service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	69,38	15,39	7,31	84,13	9,74	2,53
Kab. Pesisir Selatan	68,57	14,23	6,62	76,41	6,15	1,21
Kab. Solok	63,07	10,27	5,51	78,91	9,95	2,89
Kab. Sijunjung	84,30	25,95	9,71	77,75	16,07	4,17
Kab. Tanah Datar	74,75	15,32	8,76	77,56	9,55	2,71
Kab. Padang Pariaman	59,69	13,96	5,44	79,37	16,54	4,15
Kab. Agam	73,42	19,98	5,98	73,05	10,57	2,45
Kab. Lima Puluh Kota	69,88	12,06	4,16	68,81	10,75	5,47
Kab. Pasaman	69,89	18,50	6,28	81,30	7,28	2,93
Kab. Solok Selatan	70,54	17,10	4,89	72,49	12,08	2,52
Kab. Dharmasraya	75,81	25,81	7,73	75,80	19,41	2,77
Kab. Pasaman Barat	75,10	17,46	7,48	79,65	11,98	2,62
Kota Padang	84,33	34,19	26,19	86,39	28,19	4,49
Kota Solok	74,53	20,57	12,00	79,48	18,17	5,29
Kota Sawahlunto	81,94	20,05	13,04	81,78	15,21	2,61
Kota Padang Panjang	75,84	16,62	11,75	79,30	16,15	3,88
Kota Bukittinggi	85,38	42,80	20,26	83,03	17,86	5,96
Kota Payakumbuh	83,78	31,61	12,36	83,31	24,89	7,48
Kota Pariaman	75,44	24,65	13,62	80,17	18,87	2,59
Sumatera Barat	74,87	21,95	11,56	79,18	15,92	3,57

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Fasilitas Finansial Financial Facility	Pembelajaran Online Online Learning	Bekerja Online Dari Rumah Work From Home (WFH)	Hiburan Periodic Entertainment	Pembuatan Konten Digital Digital Content Creation	Lainnya Others
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kab. Kepulauan Mentawai	8,30	7,08	0,78	73,54	15,36	6,87
Kab. Pesisir Selatan	2,29	5,51	0,55	87,11	7,46	6,10
Kab. Solok	5,80	8,86	1,15	77,01	4,94	2,31
Kab. Sijunjung	5,87	6,16	1,85	79,49	14,63	12,76
Kab. Tanah Datar	4,78	12,43	4,10	67,88	6,95	1,98
Kab. Padang Pariaman	5,33	6,36	0,80	85,44	3,14	6,77
Kab. Agam	3,36	11,59	1,45	76,36	2,18	5,30
Kab. Lima Puluh Kota	2,54	6,28	1,82	86,50	10,81	5,21
Kab. Pasaman	2,64	4,55	0,21	91,78	4,54	4,86
Kab. Solok Selatan	4,18	8,23	0,63	87,41	4,80	2,50
Kab. Dharmasraya	5,80	6,34	0,45	90,32	4,81	9,68
Kab. Pasaman Barat	8,24	6,11	0,84	80,24	6,29	5,34
Kota Padang	14,87	10,01	2,11	85,81	6,87	3,88
Kota Solok	16,45	12,38	0,97	95,70	5,97	0,85
Kota Sawahlunto	15,29	5,28	0,64	85,43	1,66	1,93
Kota Padang Panjang	10,43	12,68	2,25	90,42	0,75	1,70
Kota Bukittinggi	10,88	5,22	0,90	92,91	5,52	2,32
Kota Payakumbuh	13,97	9,93	1,94	86,68	5,50	4,53
Kota Pariaman	11,96	8,45	1,52	80,77	15,81	9,32
Sumatera Barat	7,74	8,23	1,46	83,62	6,42	5,05

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Tabel 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Komputer/Laptop/Tablet Computer/Laptop
(1)	(2)
Kab. Kepulauan Mentawai	12,92
Kab. Pesisir Selatan	10,86
Kab. Solok	13,11
Kab. Sijunjung	17,60
Kab. Tanah Datar	20,04
Kab. Padang Pariaman	12,60
Kab. Agam	12,52
Kab. Lima Puluh Kota	11,45
Kab. Pasaman	7,51
Kab. Solok Selatan	13,27
Kab. Dharmasraya	21,79
Kab. Pasaman Barat	10,21
Kota Padang	41,26
Kota Solok	33,98
Kota Sawahlunto	24,01
Kota Padang Panjang	37,24
Kota Bukittinggi	38,91
Kota Payakumbuh	34,54
Kota Pariaman	25,48
Sumatera Barat	19,75

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Pada wilayah perkotaan, kepemilikan komputer/laptop telah mencapai besaran diatas 25%. Sedangkan pada wilayah pedesaan masih berada pada kisaran 7,51%-21,79%. Ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Masyarakat perkotaan lebih konsumtif dalam penggunaan komputer/laptop seiring dengan kebutuhan terhadap media informasi.

Selain internet, PISA juga dapat berbentuk pelayanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu media belajar anak guna memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang diperlukan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang.

Perpustakaan memiliki peran penting untuk menunjang proses pembelajaran dan sebagai sumber informasi yang relevan. Perpustakaan juga berkaitan dengan minat baca dan budaya membaca. Keberadaan perpustakaan dapat mendukung dan mengembnagkan minat baca anak sehingga membaca dapat dijadikan sebagai budaya yang melekat dalam proses pembelajaran.

Hadirnya perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak, mengingat sarana tersebut merupakan bagian dari pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan anak dan bersifat ramah anak. Berdasarkan data KemenPPPA baru 41% anak yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Angka ini memang masih rendah jika dibandingkan angka maksimum sebesar 85%.

PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi (selain sebagai tempat untuk mendapatkan informasi juga sebagai tempat bermain, tempat mengembangkan kreatifitas dan juga tempat pengaduan) yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Melalui PISA diharapkan dapat meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya.

Pada tahun 2023, terdapat 26 unit perpustakaan dimiliki oleh TK/RA, 2821 unit pada SD, 816 unit pada SMP dan 465 unit pada SMA. Hal ini mengalami pengurangan jumlah perpustakaan pada setiap jenjang pendidikan kecuali pada SD. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah pengunjung dan kebutuhan sarana prasarana sekolah berupa pengadaan/penambahan kelas sehingga pada beberapa perpustakaan diambil alih fungsi menjadi kelas belajar. Selain itu, adanya pengalihan kurikulum menjadi buku yang tersedia tidak sesuai dengan bahan ajar yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pendidikan

yang harus dimiliki oleh sekolah baik negeri maupun swasta. Selain pada jenjang pendidikan, perpustakaan juga terdapat di Nagari/Desa/Kelurahan hingga kecamatan bahkan di rumah ibadah pun juga dijumpai perpustakaan. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan minat baca masyarakat terutama anak-anak.

Dalam rilis KemenPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022, persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,87 persen. Artinya belum mencapai sebagian anak yang pernah mengunjungi perpustakaan meskipun secara nasional capaian tersebut telah berada sedikit di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 42,87% . Dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2%.

Pada tabel 23 dibawah tergambar bahwa hampir seluruh SD negeri telah memiliki perpustakaan, selanjutnya 83% sekolah menengah lanjutan negeri juga telah memiliki perpustakaan sebagai salah satu sarana sekolah. Perbandingan yang seimbang terjadi pada jenjang pendidikan SMK dimana 51,52% sekolah negeri dan 48,48% sekolah swasta telah memiliki perpustakaan. Untuk itu, perlu attensi Pemerintah dalam menggenjot jumlah perpustakaan sekolah pada setipa jenjang pendidikan dan melakukan sosialisasi pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 23 Banyaknya Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Lembaga Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Perpustakaan/Type Library										Jumlah Total
	Umum General	TK/PA Kindergarten	SD Elementary School	SMP Senior High School	SMA Junior High School	Desa/ Nagari/ Kulurahan Village/ Traditional Village	Perguruan Tinggi College	TBM Society Reading	Khusus (Rumah Ibadah, SRPD, Puskesmas, Rumah Sakit) Especially (House Worship, Hospital)	Kecamatan Sub Districts	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten/Regency											
1. Kep. Mentawai	1	–	59	12	8	7	1	–	–	–	88
2. Pesisir Selatan	1	–	398	70	39	99	3	7	11	–	628
3. Solok	1	–	200	70	35	36	1	1	–	–	344
4. Sijunjung	1	–	146	32	9	28	–	–	4	–	220
5. Tanah Datar	1	1	130	99	26	77	5	–	2	–	341
6. Padang Pariaman	1	–	229	37	26	43	4	1	–	–	341
7. Agam	1	–	238	69	35	80	1	13	3	6	446
8. Lima Puluh Kota	1	1	155	80	40	74	1	6	3	–	361
9. Pasaman	1	–	156	34	20	37	3	13	12	–	276
10. Solok Selatan	1	–	60	15	17	28	1	1	2	–	125
11. Dharmasraya	1	–	129	45	24	50	2	1	54	–	306
12. Pasaman Barat	1	1	223	53	28	14	4	3	4	–	331
Kota/Municipality											
1. Padang	1	–	360	116	71	16	42	27	36	1	670
2. Solok	1	–	49	10	9	13	3	2	24	–	111
3. Sawahlunto	2	–	64	11	7	13	–	4	3	–	104
4. Padang Panjang	1	22	48	22	19	18	5	20	31	–	186
5. Bukittinggi	1	1	55	15	20	23	13	11	7	1	147
6. Payakumbuh	1	–	80	18	20	37	5	3	–	–	164
7. Pariaman	2	–	42	8	12	54	5	1	5	–	129
Sumatera Barat 2023	21	26	2.821	816	465	747	99	114	201	8	5.318
2022	21	–	2.282	586	401	645	107	63	92	8	4.205
2021	20	–	1.990	643	577	414	24	143	80	3	3.894

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 24 Banyaknya Perpustakaan Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perpustakaan Khusus Special library				Perpustakaan Sekolah School Library			
	Peringkat/Predicote			Jumlah	Peringkat/Predicote			Jumlah
	A	B	C		A	B	C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten/Regency								
1. Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pesisir Selatan	-	-	-	-	4	11	21	36
3. Solok	-	-	1	1	-	9	14	23
4. Sijunjung	-	-	-	-	-	1	19	20
5. Tanah Datar	-	-	-	-	-	1	3	4
6. Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Agam	-	-	-	-	1	7	26	34
8. Lima Puluh Kota	-	-	-	-	1	3	6	10
9. Pasaman	-	-	-	-	-	-	1	1
10. Solok Selatan	-	-	-	-	-	1	3	4
11. Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	20	20
12. Pasaman Barat	-	-	-	-	-	3	8	11
Kota/Municipality								
1. Padang	1	1	1	3	1	9	45	55
2. Solok	-	-	-	-	5	4	2	11
3. Sawahlunto	-	-	-	-	-	1	17	18
4. Padang Panjang	-	-	-	-	-	2	1	3
5. Bukittinggi	-	1	-	1	10	7	1	18
6. Payakumbuh	-	-	-	-	-	1	4	5
7. Pariaman	-	-	-	-	-	-	2	2
Sumatera Barat	1	2	2	5	22	60	193	275

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perpustakaan Perguruan Tinggi College Library				Perpustakaan Umum Public Library				Total
	Peringkat/Predicate			Jumlah	Peringkat/Predicate			Jumlah	
	A	B	C		A	B	C		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Kabupaten/Regency									
1. Kep. Mentawai	–	–	–	–	–	–	1	1	1
2. Pesisir Selatan	–	–	–	–	–	1	1	2	38
3. Solok	–	–	–	–	–	4	4	8	32
4. Sijunjung	–	–	–	–	–	1	–	1	21
5. Tanah Datar	1	–	–	1	–	–	2	2	7
6. Padang Pariaman	–	–	–	–	–	–	2	2	2
7. Agam	–	–	–	–	–	1	8	9	43
8. Lima Puluh Kota	–	1	–	1	–	1	1	2	13
9. Pasaman	–	–	–	–	–	–	1	1	2
10. Solok Selatan	–	–	–	–	–	–	1	1	5
11. Dharmasraya	–	–	–	–	–	–	1	1	21
12. Pasaman Barat	–	–	1	1	–	1	3	4	16
Kota/Municipality									
1. Padang	4	3	2	9	–	1	1	2	69
2. Solok	–	–	–	–	–	–	1	1	12
3. Sawahlunto	–	–	–	–	–	1	–	1	19
4. Padang Panjang	–	–	1	1	1	–	–	1	5
5. Bukittinggi	–	1	–	1	–	–	1	1	21
6. Payakumbuh	–	–	1	1	–	–	1	1	7
7. Pariaman	–	–	–	–	–	–	1	1	3
Sumatera Barat	5	5	5	15	1	11	30	42	337

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

3.3 FORUM ANAK

Pasal 12 Konvensi Hak Anak/CRC (Convention of The Rights of The Child) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak, menyebutkan mengenai menghargai pandangan anak. Pasal ini tidak hanya mewajibkan negara untuk menjamin anak dapat mengekspresikan

pandangannya secara bebas, tetapi juga wajib menjamin pandangan anak untuk didengar dan dipertimbangkan secara serius.

Partisipasi Anak diartikan sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 17 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai implementasi dari KHA dan UU Perlindungan Anak tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemen-PPPA membuat kebijakan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak (FA), sebagai wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh Negara, dikelola oleh anak, untuk menyuarakan aspirasi anak secara kolektif.

Pembentukan FA difasilitasi oleh pemerintah, dibentuk berbasis komunitas dimana anak tersebut tinggal. FA terdiri dari perwakilan anak dari kelompok- kelompok anak, sehingga FA diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, pandangan dan kebutuhan semua kelompok anak, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi. FA telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data KemenPPPA, sampai tahun 2022 Forum Anak sudah terbentuk di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota, 1.284 kecamatan dan 2.098 desa/kelurahan. Untuk itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas FA serta peningkatan peran FA untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak. Seiring dengan semakin berkembangnya FA di Indonesia, peran FA perlu semakin ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Untuk itu, peran FA difokuskan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta pelibatan FA dalam perencanaan pembangunan (musrenbang), agar program/kebijakan pembangunan benar-benar memperhatikan kepentingan

terbaik bagi anak dan memberikan manfaat yang optimal bagi anak. Oleh karena itu, Kemen-PPPA dan Dinas PPPA di daerah mempunyai program dan kegiatan pelatihan bagi FA sebagai 2P terkait isu-isu faktual anak, seperti perkawinan anak, informasi layak anak, anti rokok dan masalah lingkungan hidup. Pelatihan ini dilakukan setiap tahun dengan melibatkan narasumber yang kompeten terkait isu yang diangkat saat itu.

Melalui FA tentunya diharapkan dapat meningkatkan persentase anak yang mengikuti kegiatan berorganisasi yang persentasenya masih sangat rendah yaitu hanya 8,55% jika dibandingkan nilai maksimal sebesar 30%. Selain itu, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FA tentunya akan meningkatkan persentase anak yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, yang saat ini mencapai 69% dari nilai maksimum sebesar 100%.

Forum Anak Nasional (FAN) adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Forum Anak dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi anak itu sendiri merupakan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan tersebut.

Adapun data forum anak yang tersebar pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat adalah untuk tingkat Kabupaten/Kota telah mencapai 100%, namun pada tingkat kecamatan hingga nagari masih relatif kecil sehingga diperlukan peran Pemerintah terutama dinas yang membidangi forum anak

untuk terus berupaya membentuk forum anak hingga tingkat Nagari/Kelurahan/Desa.

Tujuan dibentuknya FA adalah: 1) Mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak; 2) Media komunikasi organisasi anak; 3) Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak; 4) Sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; serta 5) Media kompetisi prestasi anak. Dengan demikian FA memberikan manfaat antara lain: meningkatkan kemampuan anak untuk berjejaring, menyalurkan kemampuan minat dan bakat secara efektif; meningkatkan kecerdasan sosial anak; dan melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi.

Forum Anak mempunyai tugas sebagai Pelopor dan Pelapor (2 P). Pelopor, anak-anak diharapkan dapat memulai aksi/kontribusi positif dan sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan anak yang terjadi di wilayahnya. Sementara sebagai pelapor, anak-anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh negara. Kegiatan FA berfokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan.

BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya sehingga kesejahteraannya terpenuhi. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar tidak ada hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Orang tua dan keluarga merupakan lingkungan terdekat anak yang bertanggung jawab dalam mengasuh, memenuhi hak, serta memberikan perlindungan bagi anak. Namun jika tidak ada orang tua ataupun keluarga, maka diperlukan adanya pengasuhan alternatif agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, orang tua di lingkungan keluarga merupakan orang pertama yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Tujuannya adalah agar anak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan. Tidak hanya itu, kebutuhan non materil juga sangat diperlukan. Anak membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, serta hak-hak sipilnya dipenuhi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

4.1 PERSENTASE ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGASUHAN YANG LAYAK

Lingkungan pengasuhan sebagai salah satu faktor penting dalam proses tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak sehingga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya usaha pembinaan, khususnya orang tua, juga menjadi titik penting bagi anak.

Keluarga, diharapkan mampu melindungi anak sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu kluster yang disahkan dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) pada tanggal 20 November 1989 oleh PBB yaitu “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif”. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) diakui bahwa, untuk perkembangan kepribadian anak secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.

Usia dini merupakan tahapan usia pembentukan karakter, kepribadian, dan sikap anak ketika ia dewasa kelak. Karakter dan sikap ini pertama kali terbentuk dari lingkungan keluarga terutama orang tua. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya. Setiap orang tua memiliki caranya masing-masing dalam menerapkan pola asuh khususnya pada anak usia dini. Namun, pola asuh yang salah akan berdampak secara psikologi maupun sosial terhadap anak tersebut.

Berbagai kebersamaan aktivitas anak usia dini dengan orang tua/wali merupakan strategi pengasuhan positif sehingga anak tumbuh dengan pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO yakni menggalakkan kegiatan pembelajaran dini bagi anak usia dini dengan orang tua/wali. Orang tua/wali harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersama dengan anak usia dini

Kebersamaan antara orang tua dan anak dapat merangsang individu sehingga mengeluarkan banyak kata-kata, berani bertanya, mengekspresikan dirinya secara terbuka dan aman, menawarkan gagasannya, serta menggeneralisasikan makna secara aktif. Aktivitas bersama antara orang tua dan anak diperlukan agar anak tidak menekan ekspresi emosinya karena merasa takut untuk dicela atau ditertawakan sehingga sering kali menjadi anti sosial. Informasi yang diperoleh dari Susenas MSBP 2021 meliputi berbagai aktivitas seperti makan (termasuk juga belajar makan), menonton tv, berbincang-bincang, dan lain sebagainya. Referensi waktu yang digunakan adalah seminggu terakhir. Anak dan orangtua/wali dapat melakukan lebih dari satu aktivitas tersebut. Susenas MSBP 2021 mendata aktivitas yang bisa

dilakukan oleh anak dengan orang tua/wali diantaranya makan, menonton TV, berbincang-bincang, bermain, beribadah, belajar, membaca buku, bermain games atau mengakses internet.

Pengembangan kemampuan atau keterampilan literasi dasar pada anak usia dini dapat dilakukan oleh orang tua dengan melakukan kegiatan membaca buku cerita. Aktivitas tersebut dapat merangsang keaktifan anak sehingga menjadi sering bertanya ketika ada kosa kata yang tidak diketahui, membuat anak lebih sering membaca, serta menambah pengetahuan anak. Namun sangat disayangkan, kegiatan yang mendukung pada pengembangan kemampuan dan keterampilan literasi yang dilakukan bersama orang tua/wali masih menunjukkan persentase yang relatif rendah. Hal ini terlihat pada aktivitas yang dilakukan anak usia dini bersama orang tua/wali mereka, seperti dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng sebesar 17,21% dan belajar/membaca buku yang persentasenya mencapai 11,12 persen.

Tabel 25 Persentase Anak Usia Dini Menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir dan Karakteristik, 2021

Karakteristik (1)	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total (6)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Perkotaan (4)	Perdesaan (5)	
Makan/belajar makan	90,48	90,70	91,13	89,90	90,59
Menonton TV	60,81	61,32	63,56	57,89	61,05
Belajar/membaca buku	10,71	11,54	12,05	9,94	11,12
Dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng	16,59	17,86	21,16	12,21	17,21
Beribadah/berdoa	23,19	24,53	24,61	22,88	23,84
Berbincang-bincang/ mengobrol	68,68	69,55	71,01	66,69	69,10
Bermain/rekreasi/berolahraga	50,89	51,86	56,10	45,37	51,37
Bermain games	16,63	14,58	18,94	11,44	15,63
Mengakses internet	14,27	14,70	17,96	10,07	14,48
Mengurus rumah	2,62	4,00	3,04	3,61	3,29
Membantu menambah penghasilan	0,09	0,09	0,05	0,14	0,09
Tidak ada	0,26	0,25	0,19	0,34	0,26
Tidak relevan*)	1,66	2,03	1,60	2,14	1,84

Keterangan:

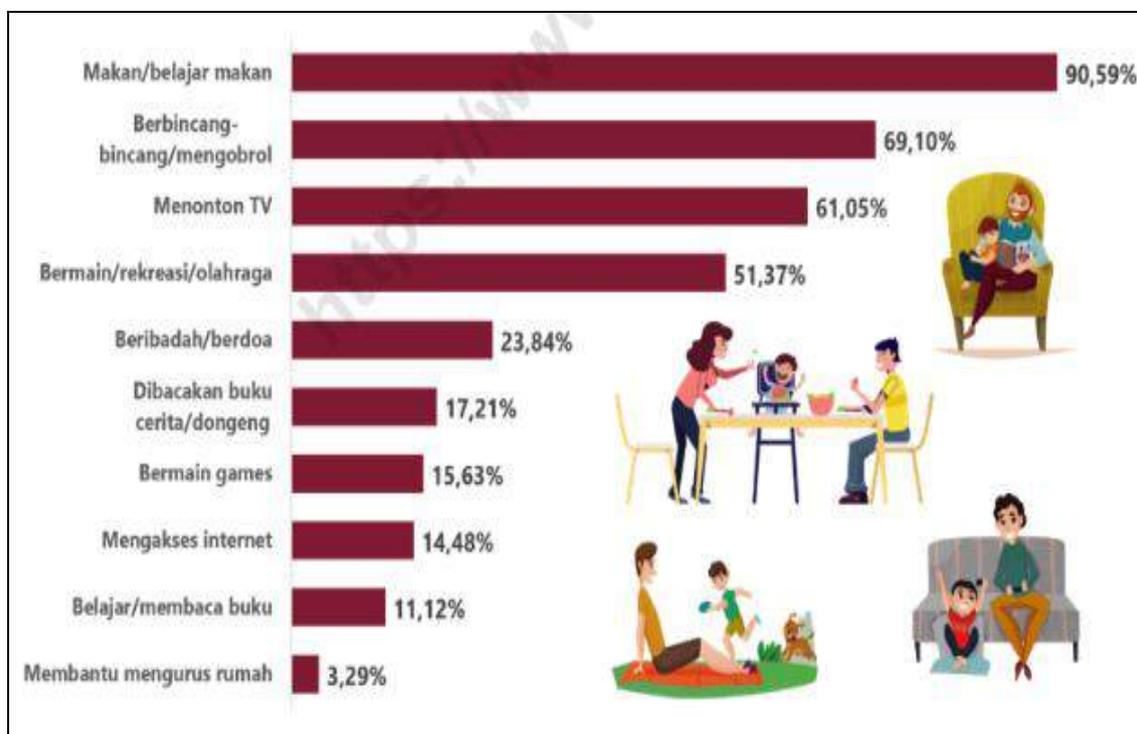
*) Tidak relevan, jika tidak tinggal bersama orangtua/wali, seperti pembantu, anak kost, dan lain-lain

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tidak hanya kebersamaan terkait literasi, dari hasil Susenas MSBP 2021 juga ditemukan bahwa masih terdapat sekitar 3,29 persen anak yang membantu mengurus rumah tangga bahkan terdapat sekitar 0,09 persen anak usia dini yang membantu orang tua menambah penghasilan. Di saat seharusnya seorang anak bermain dan belajar, mereka justru diharuskan bekerja di usia yang masih terlalu dini. Hal ini melanggar hak anak karena mereka belum memiliki kewajiban untuk membantu secara ekonomi.

Masa *golden age* adalah masa dimana karakter, kepribadian, dan sikap anak mulai terbentuk dan akan menjadi karakternya hingga ia dewasa kelak. Karakter tersebut pertama kali terbentuk dari lingkungan terdekat yaitu keluarga terutama orang tua. Sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya disebut sebagai pola asuh. Pola asuh setiap orang tua berbeda-beda dan memiliki caranya sendiri. Tetapi, jika pola asuh yang ditetapkan salah maka akan berdampak secara psikologi maupun sosial terhadap anak tersebut.

Gambar 4 Persentase Anak Usia Dini Menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa sekitar sembilan dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas makan/belajar makan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir. Sekitar tujuh dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas berbincang-bincang/mengobrol bersama dengan orang tua/wali dalam seminggu terakhir. Selanjutnya, sekitar enam dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas menonton TV bersama dengan orang tua/wali dalam seminggu terakhir.

Sayangnya, persentase dibacakan buku cerita/dongeng dan belajar/membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17,21 persen dan 11,12 persen. Padahal, kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini. Anak usia dini hingga menginjak usia 8 tahun memiliki otak yang sangat plastis dan responsif terhadap perubahan melalui interaksi genetika, lingkungan dan pengalaman. Optimalisasi perkembangan otak didukung oleh stimulasi lingkungan, salah satunya melalui interaksi sosial dengan orang tua/wali.

Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak). Orang tua di lingkungan keluarga adalah orang pertama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pengasuhan anak (PP Nomor 44 Tahun 2017). Susenas MSBP 2021 memberikan informasi mengenai anak usia dini yang tinggal bersama dengan orang tua.

Anak usia dini dikatakan tinggal bersama kedua orangtua apabila sehari-hari anak usia dini beserta ayah dan ibu kandung tinggal berdampingan dalam satu rumah tangga. Sementara itu, anak usia dini dikatakan tinggal bersama orangtua tunggal apabila dalam satu rumah tangga hanya terdapat salah satu orangtua, baik ayah maupun ibu kandung saja. Kondisi ini mungkin terjadi ketika ayah atau ibu kandung tidak tercatat sebagai anggota rumah tangga dikarenakan meninggal dunia, bercerai/berpisah, atau bekerja di luar kota/negeri yang tidak rutin setahun sekali pulang ke rumah. Lebih lanjut,

informasi ini tidak menutup kemungkinan adanya anggota rumah tangga lain di luar ayah/ibu kandung, seperti kakek, nenek, saudara, atau asisten rumah tangga yang menginap/tinggal di rumah tersebut. Informasi ini tidak menutup kemungkinan kehadiran anggota rumah tangga lain di luar ayah/ibu kandung. OECD melihat indikator ini untuk mengetahui seberapa besar proporsi anak yang tinggal bersama keluarga origin dan reconstituted. Hidup bersama orangtua tunggal cenderung memiliki efek buruk pada penyesuaian diri anak dan seberapa besar efek tersebut bergantung pada kondisi psikologis kedua orangtua, tingkat konflik di antara mereka, dan keadaan keuangan (Lamb, Sternberg, & Thompson; 1997).

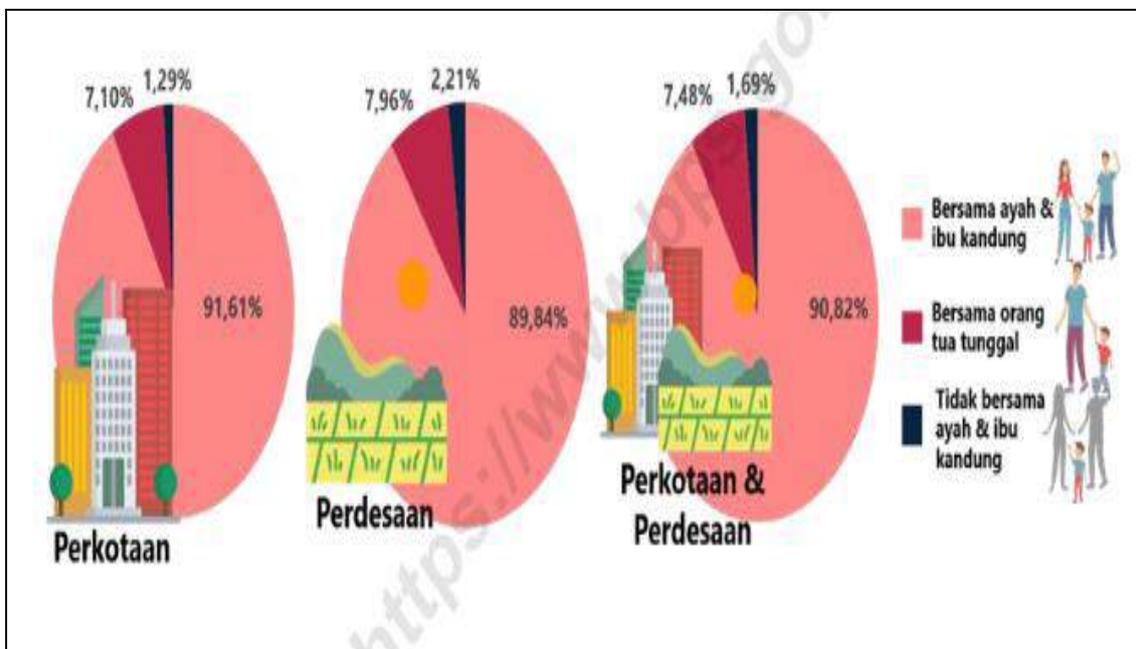
Hasil Susenas MSBP 2021 menunjukkan mayoritas anak usia dini tinggal bersama ayah dan ibu kandung (90,82 persen). Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, ternyata masih ada sekitar 7,48 persen anak usia dini tinggal bersama dengan orang tua tunggal baik bersama ayah kandung maupun ibu kandung saja. Keadaan tersebut mungkin terjadi ketika ayah atau ibu kandung tidak tercatat sebagai anggota rumah tangga karena meninggal dunia, bercerai/berpisah, atau bekerja di luar kota/negeri yang tidak rutin setahun sekali pulang ke rumah.

Di sisi lain, masih terdapat 1,69 persen anak usia dini yang tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung. Persentase anak usia dini yang tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung di perdesaan sedikit lebih besar dibandingkan perkotaan (2,21 persen berbanding 1,29 persen). Hasil tersebut sejalan dengan persentase anak usia dini yang tinggal bersama kedua orangtua di perdesaan yang lebih kecil dibandingkan di perkotaan (89,84 persen berbanding 91,61 persen)

Persentase anak usia dini yang tinggal bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar di perkotaan daripada perdesaan. Di lain pihak, persentase anak usia dini baik yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Hal ini perlu menjadi perhatian, meskipun tidak semua

orang tua tunggal memberikan pola asuh yang kurang baik. Masih adanya anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal dan tinggal tidak bersama ayah dan ibu kandung belum tentu mengindikasikan mereka memang sudah tidak memiliki ayah atau ibu kandung. Hal ini karena bisa jadi ayah atau ibu kandung tidak tinggal satu rumah dengan anak tersebut (bukan anggota rumah tangga). Di sisi lain, meskipun persentase anak usia dini yang tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung cukup besar, belum tentu dalam menjalani aktivitas kesehariannya anak tersebut selalu didampingi oleh orang tuanya

Gambar 5 Persentase Anak Usia Dini Menurut Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung dan Klasifikasi Desa, 2021



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dimulai dari individu anak itu sendiri, orang tua/wali, dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi jelaslah bahwa peran aktif orang tua/wali dalam pengasuhan anak usia dini sangatlah diperlukan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat orang tua yang belum tepat dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya. Selain mengumpulkan data mengenai keberadaan ayah dan ibu kandung serta kebersamaan orangtua/wali, Susenas MSBP 2021 juga mengumpulkan data mengenai indikator pengasuhan tidak

layak yang diperuntukkan bagi anak balita (0-4 tahun). Data tersebut diukur berdasarkan dua pertanyaan yaitu (i) apakah dalam seminggu terakhir anak pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia < 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama > 1 jam, serta (ii) apakah pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam. Anak usia dini dikatakan mendapatkan pengasuhan tidak layak jika dalam seminggu terakhir pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam

Hasil Susenas MSBP menunjukkan pada tahun 2021, persentase balita yang mendapat pengasuhan tidak layak sedikit menurun dibandingkan tahun 2018. Sekitar 3,69 persen balita pernah mendapat pengasuhan tidak layak pada tahun 2021. Dengan kata lain, 3-4 dari 100 balita pernah ditinggal sendiri atau diasuh oleh anak usia 1 jam dalam seminggu terakhir. Jika dilihat lebih rinci, persentase tersebut lebih tinggi pada anak usia dini yang ibunya bekerja dibandingkan tidak bekerja yaitu 5,47 persen. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anak yang memiliki ibu bekerja cenderung memperoleh pengasuhan yang tidak layak. Hal ini diasumsikan karena proses bekerja yang biasanya dilakukan di luar rumah cenderung menyita waktu dan perhatian ibu akan pola asuh anak. Meskipun ada pengasuh lain yang menggantikan ibu, namun seorang ibu lebih tahu dan paham mengenai karakter, kebutuhan serta keinginan anaknya. Meninggalkan anak di rumah sendirian seminggu sekali atau lebih berisiko menimbulkan masalah perilaku, hiperaktif/kurang perhatian, dan masalah hubungan teman sebaya

Gambar 6 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak, 2018-2021

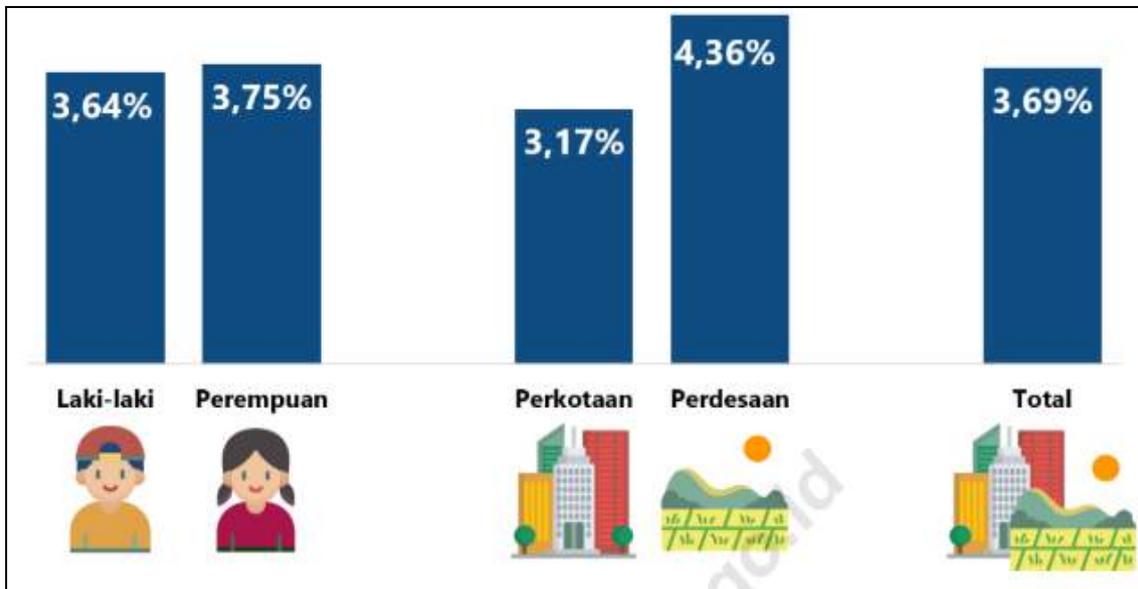


Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa sekitar 3,69 persen balita pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak. Persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sedikit lebih besar terjadi pada perempuan daripada laki-laki, dan sedikit lebih besar terjadi di perdesaann daripada perkotaan. Data ini bersesuaian dengan data sebelumnya yang menemukan bahwa persentase anak usia dini baik yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan.

Dilihat menurut klasifikasi desa tempat tinggal, persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak lebih besar di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Sekitar 4,36 persen balita di perdesaan pernah mendapat pengasuhan tidak layak, sedangkan di perkotaan hanya 3,17 persen balita yang pernah mendapat pengasuhan tidak layak. Pengasuhan tidak layak dapat ditekan dengan menghindari meninggalkan balita sendiri. Menurut National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) meninggalkan anak di rumah sendiri diperbolehkan ketika anak sudah menginjak usia 12 tahun ke atas.

Gambar 7 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Klasifikasi Desa, 2021



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Pola pengasuhan anak usia dini sangatlah penting. Menurut penelitian, terdapat hubungan pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak usia Dini. Semakin baik pengasuhan orang tua maka semakin baik pula perkembangan anaknya

Sementara itu, persentase balita yang mendapat pengasuhan tidak layak lebih besar pada balita dengan ibu kandung yang bekerja. Sekitar 5,88 persen balita dengan ibu yang bekerja mendapat pengasuhan tidak layak. Di sisi lain, kurang dari separuh angka tersebut, yakni 2,14 persen balita dengan ibu tidak bekerja mendapat pengasuhan tidak layak. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anak yang memiliki ibu bekerja cenderung memperoleh pengasuhan yang tidak layak. Hal ini diasumsikan karena proses bekerja yang biasanya dilakukan di luar rumah cenderung menyita waktu dan perhatian ibu akan pola asuh anak. Meskipun ada pengasuh lain yang menggantikan ibu, namun seorang ibu lebih tahu dan paham mengenai karakter, kebutuhan serta keinginan anaknya.

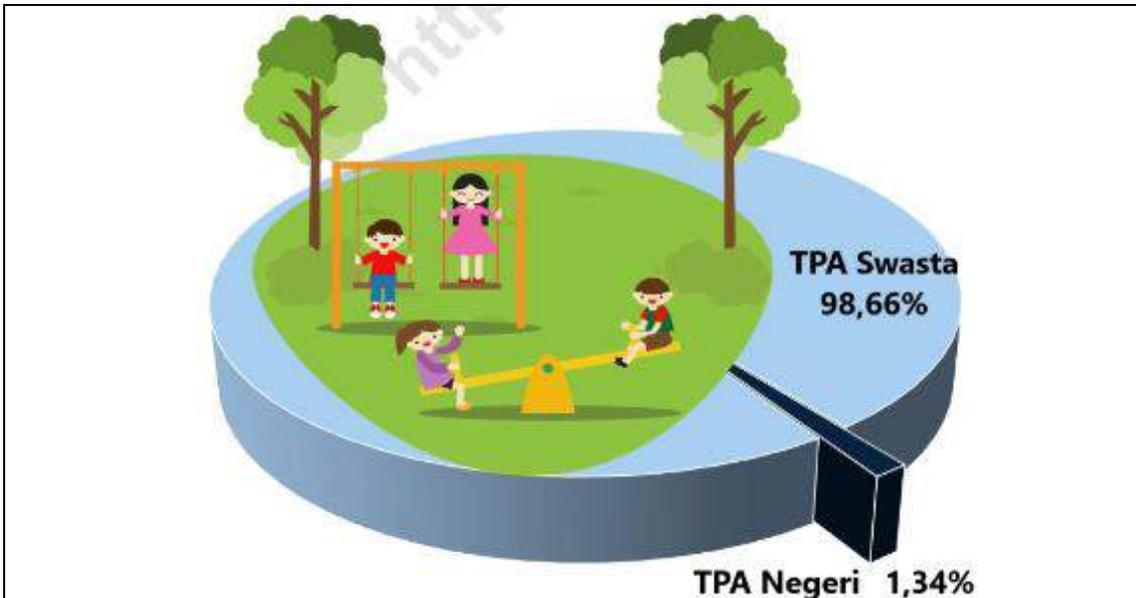
Salah satu kontributor pengasuhan tidak layak adalah balita dengan ibu kandung yang bekerja. Konsep pengasuhan tidak layak, yakni balita ditinggal sendiri atau ditinggalkan bukan pada orang dewasa selama lebih dari satu jam,

menjadi tantangan tersendiri untuk ibu bekerja, khususnya ibu yang bekerja di luar jam kerja normal. Selain itu, ibu yang menjadi orangtua tunggal yang bekerja juga menghadapi lebih banyak kesulitan dalam pengasuhan anak dibandingkan ibu yang bekerja namun memiliki pasangan/menikah.

Terlepas dari latar belakang pekerjaan ibu, pengasuhan balita tidak bisa bergantung pada satu orang dewasa saja. Pihak-pihak yang memiliki kapasitas pengasuhan juga perlu terlibat, seperti keluarga, tetangga, dan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membentuk lembaga asuhan anak untuk melaksanakan fungsi pengasuhan anak (PP Nomor 44 Tahun 2017). Lembaga asuhan anak juga dapat dibentuk oleh masyarakat (PP Nomor 44 Tahun 2017)

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Sosial Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dilaksanakan oleh pihak di luar keluarga inti. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua asuh, wali, pengangkatan anak, atau pengasuhan berbasis residential, yakni LKSA (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak). Pengasuhan alternatif merupakan salah satu alternatif pengasuhan anak usia dini pada dual-career family.

Gambar 8 Persentase Taman Penitipan Anak Menurut Status Negeri/Swasta, Tahun 2021/2022



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Pemerintah membangun Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai solusi dari kesulitan akses pengasuhan alternatif. Fasilitas ini memenuhi kebutuhan ibu bekerja sehingga tidak ragu meninggalkan anaknya. Selain itu, TPA yang mencakup layanan PAUD Holistik Integratif dapat mendeteksi, memantau, sekaligus meningkatkan tumbuh kembang anak, baik aspek kesehatan, pendidikan, maupun psikososial. Akan tetapi, TPA masih didominasi oleh pihak swasta. Adanya budget yang harus disiapkan oleh ibu untuk TPA membuat kesempatan TPA tertutup untuk sebagian golongan, khususnya kelompok ekonomi rendah

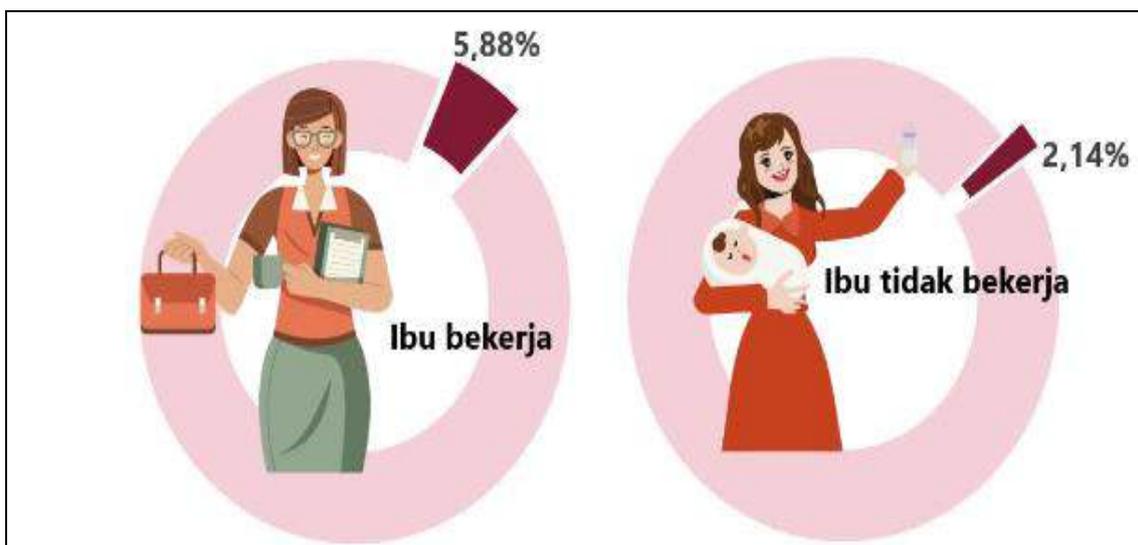
Salah satu pengasuhan alternatif adalah didirikannya Taman Penitipan Anak (TPA). TPA dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Namun, berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa TPA di Indonesia didominasi oleh TPA swasta, yaitu sebesar 98,66 persen. Terlepas dari jenis TPA (negeri dan swasta), penelitian menemukan bahwa TPA berperan sebagai pengganti orang tua sementara waktu. Dengan adanya TPA diharapkan dapat membantu orang tua

untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan perkembangan anaknya

Tidak hanya status bekerja ibu, jumlah anggota keluarga juga cenderung berpengaruh terhadap pengasuhan yang layak bagi anak usia dini. Hal ini terlihat dari tingginya balita yang pernah mendapatkan pengasuhan yang tidak layak dan tinggal hanya berdua dengan orangtua/wali. Jika orang tua/wali bekerja mencari nafkah, anak tersebut kemungkinan akan diasuh oleh keluarga ataupun pengasuh lain, atau bahkan bisa jadi ditinggal sendirian. Hal tersebut tentu akan sangat beresiko bagi anak usia dini jika ditinggal sendiri tanpa diawasi oleh orang dewasa

Dilihat menurut status bekerja ibu, ternyata persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak pada ibu bekerja lebih besar daripada ibu yang tidak bekerja (Gambar 8). Perlu adanya manajemen waktu, keluarga, pekerjaan, dan pengasuhan anak usia dini pada ibu yang bekerja. Dengan melakukan keempat manajemen tersebut menjadikan ibu bekerja dapat melakukan tanggung jawab di keluarga dan pekerjaan dengan efektif, yang pada akhirnya perkembangan anak usia dini dapat berkembang dengan maksimal.

Gambar 9 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Status Bekerja Ibu, 2021



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, anak balita laki-laki cenderung lebih besar tidak mendapat pengasuhan yang layak karena asumsi di masyarakat anak laki-laki harus mandiri dan kuat. Terlihat bahwa 1,29 persen anak di perkotaan tidak tinggal dengan ayah ibu kandung. Sebaliknya di perdesaan terdata sebanyak 2,21 persen. Ini membuktikan bahwa banyak anak-anak di perdesaan yang tinggal dengan kakek/nenek/paman. Salah satu pemicu tingginya angka tersebut karena faktor ekonomi atau perceraian. Seringkali anak menjadi korban dari perceraian orang tua atau orang tua kandung harus bekerja di perkotaan sehingga anak dititipkan pada orang lain.

Dilihat dari status disabilitas, anak disabilitas masih didominasi tinggal dengan ayah ibu kandung. Tidak dijumpai anak disabilitas yang tinggal dengan ayah kandung saja. Hal ini disebabkan oleh karakter ayah yang tegas yang secara psikologi akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Berdasarkan tipe daerahnya, aktivitas yang dilakukan anak usia dini bersama waktu luang baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah makan/belajar bersama. Di Provinsi Sumatera Barat tengah dikembangkan program makan bersama di meja makan dan program maghrib berjamaah 1821. Makan bersama keluarga memberikan manfaat bagi perkembangan psikis anak. Anak dapat menceritakan aktivitas yang dilakukan pada hari itu sehingga terjaga kedekatan dengan anak. Selain itu, makan bersama cenderung membuat anak mengkonsumsi makanan rumah yang sehat dan bergizi. Program maghrib 18-21 juga bermanfaat dimana orang tua dapat membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah

Tabel 26 Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021

Karakteristik	Keberadaan Orangtua Kandung		
	Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung ¹	Tinggal Bersama Orangtua Tunggal ²	Tidak Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung ³
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	90,82	7,48	1,69
Jenis Kelamin			
Laki-laki	90,73	7,46	1,81
Perempuan	90,92	7,50	1,58
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	91,61	7,10	1,29
Perdesaan	89,84	7,96	2,21

Catatan:

- ¹ Tinggal bersama ayah dan ibu kandung: ayah kandung dan ibu kandung merupakan ART
- ² Tinggal bersama orangtua tunggal: (i) ayah kandung merupakan ART dan ibu kandung selain ART; atau (ii) ibu kandung merupakan ART dan ayah kandung selain ART
- ³ Tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung: ayah dan ibu kandung bukan ART

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tabel 27 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Mendapat Pengasuhan Tidak Layak	
	Pernah	Tidak Pernah
(1)	(2)	(3)
Indonesia	3,69	96,31
Jenis Kelamin		
Laki-laki	3,64	96,36
Perempuan	3,75	96,25
Status Bekerja Ibu		
Bekerja	5,88	94,12
Tidak Bekerja	2,14	97,86
Tidak Relevan ¹	3,91	96,09
Jumlah ART		
2 orang	12,24	87,76
3-4 orang	3,11	96,89
>4 orang	4,27	95,73
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	3,17	96,83
Perdesaan	4,36	95,64

Catatan:

- ¹ Tidak Relevan jika Ibu bukan merupakan anggota rumah tangga (ART)

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tabel 28 Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021

Provinsi	Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung			Jumlah
	Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung	Tinggal Bersama Orang Tua Tunggal	Tidak Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	94,75	4,77	0,48	100,00
Sumatera Utara	92,62	5,51	1,88	100,00
Sumatera Barat	92,28	6,86	0,87	100,00
Riau	94,41	4,49	1,10	100,00
Jambi	93,78	5,07	1,15	100,00
Sumatera Selatan	94,73	4,21	1,05	100,00
Bengkulu	95,72	3,70	NA	100,00
Lampung	92,92	5,70	1,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,81	4,00	2,19	100,00
Kepulauan Riau	97,54	1,76	NA	100,00
DKI Jakarta	92,90	6,08	1,02	100,00
Jawa Barat	91,99	7,06	0,95	100,00
Jawa Tengah	87,00	10,90	2,10	100,00
DI Yogyakarta	92,38	7,31	NA	100,00
Jawa Timur	88,19	9,33	2,48	100,00
Banten	92,09	6,67	1,24	100,00
Bali	95,06	3,71	1,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	82,69	14,04	3,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,40	8,57	4,02	100,00
Kalimantan Barat	91,28	7,76	0,95	100,00
Kalimantan Tengah	94,82	4,58	0,60	100,00
Kalimantan Selatan	91,19	7,34	1,47	100,00
Kalimantan Timur	94,19	4,51	1,30	100,00
Kalimantan Utara	91,21	8,74	NA	100,00
Sulawesi Utara	88,09	8,32	3,58	100,00
Sulawesi Tengah	91,36	6,59	2,05	100,00
Sulawesi Selatan	89,89	7,96	2,14	100,00
Sulawesi Tenggara	86,14	11,47	2,40	100,00
Gorontalo	89,59	8,44	NA	100,00
Sulawesi Barat	88,30	8,76	2,94	100,00
Maluku	87,32	7,37	5,31	100,00
Maluku Utara	86,96	10,75	2,29	100,00
Papua Barat	85,69	7,48	6,83	100,00
Papua	89,69	7,54	2,77	100,00
Indonesia	90,82	7,48	1,69	100,00

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tabel 29 Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021

Provinsi	Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali			
	Makan/ belajar makan	Menonton TV	Belajar/ membaca buku	Dibacakan buku cerita/ diceritakan dongeng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	88,62	52,66	9,50	9,08
Sumatera Utara	91,78	60,14	9,10	10,48
Sumatera Barat	89,83	58,44	10,28	14,12
Riau	88,95	61,79	8,96	15,19
Jambi	89,59	60,65	10,44	16,40
Sumatera Selatan	92,43	63,05	10,01	10,30
Bengkulu	91,74	62,61	10,80	11,48
Lampung	91,65	66,36	9,55	9,68
Kep. Bangka Belitung	94,19	59,98	14,05	18,13
Kepulauan Riau	88,06	64,34	18,26	24,73
DKI Jakarta	88,08	67,49	12,54	31,06
Jawa Barat	93,10	63,09	9,27	22,78
Jawa Tengah	92,05	67,82	14,44	20,49
DI Yogyakarta	91,32	74,19	29,08	32,67
Jawa Timur	86,78	64,77	12,08	20,43
Banten	86,25	65,10	13,11	17,68
Bali	95,12	61,96	9,21	19,72
Nusa Tenggara Barat	90,41	58,55	9,44	11,12
Nusa Tenggara Timur	90,56	32,61	7,23	9,88
Kalimantan Barat	92,60	57,78	12,45	9,04
Kalimantan Tengah	88,30	58,28	9,44	12,37
Kalimantan Selatan	91,25	66,78	13,48	16,43
Kalimantan Timur	92,37	62,32	17,83	17,71
Kalimantan Utara	86,01	43,38	9,66	12,01
Sulawesi Utara	86,14	54,42	11,38	13,46
Sulawesi Tengah	91,83	51,53	5,99	9,72
Sulawesi Selatan	91,11	57,11	11,51	10,15
Sulawesi Tenggara	92,49	51,36	8,45	7,97
Gorontalo	91,85	51,04	3,13	10,78
Sulawesi Barat	88,40	50,76	8,36	5,46
Maluku	90,91	34,89	9,92	12,93
Maluku Utara	93,88	43,09	12,08	5,08
Papua Barat	91,46	25,16	4,75	8,30
Papua	88,14	26,49	3,70	6,64
Indonesia	90,59	61,05	11,12	17,21

Lanjutan

Provinsi	Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali			
	Beribadah/ berdoa	Berbincang- bincang/ mengobrol	Bermain/ rekreasi/ berolahraga	Bermain games
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	21,32	65,09	42,38	6,79
Sumatera Utara	20,60	66,67	47,41	14,30
Sumatera Barat	19,08	76,24	50,35	15,35
Riau	26,15	62,00	52,99	16,67
Jambi	20,11	64,07	49,24	13,66
Sumatera Selatan	14,72	69,04	45,27	8,09
Bengkulu	15,93	75,32	49,72	8,22
Lampung	21,19	61,91	41,95	10,57
Kep. Bangka Belitung	22,47	67,12	54,57	17,04
Kepulauan Riau	37,76	68,36	49,92	11,89
DKI Jakarta	22,02	63,13	56,38	26,41
Jawa Barat	22,45	72,17	56,11	19,61
Jawa Tengah	30,05	75,53	58,06	17,14
DI Yogyakarta	33,90	76,70	68,43	21,44
Jawa Timur	21,51	68,53	52,61	17,32
Banten	28,43	59,80	38,07	17,45
Bali	29,48	77,33	57,09	21,54
Nusa Tenggara Barat	25,60	69,53	57,55	11,08
Nusa Tenggara Timur	26,06	78,88	44,93	10,80
Kalimantan Barat	25,64	62,24	44,63	7,52
Kalimantan Tengah	26,02	58,18	51,15	12,20
Kalimantan Selatan	28,00	77,46	53,84	17,25
Kalimantan Timur	35,98	73,59	53,77	15,60
Kalimantan Utara	32,87	60,36	51,51	14,00
Sulawesi Utara	28,49	66,49	51,34	12,40
Sulawesi Tengah	19,65	60,84	55,61	8,62
Sulawesi Selatan	20,97	68,58	49,37	14,02
Sulawesi Tenggara	11,61	72,30	37,69	11,10
Gorontalo	12,98	77,82	52,25	8,12
Sulawesi Barat	13,14	54,81	40,78	3,81
Maluku	30,80	66,76	46,43	11,80
Maluku Utara	21,14	57,96	38,50	5,91
Papua Barat	31,17	69,15	52,97	8,65
Papua	26,93	57,76	34,83	5,86
Indonesia	23,84	69,10	51,37	15,63

Lanjutan

Provinsi	Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali				
	Mengakses internet	Mengurus rumah tangga	Membantu menambah penghasilan	Tidak ada kebersamaan	Tidak relevan ^{*)}
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	3,84	2,86	NA	NA	1,83
Sumatera Utara	9,03	4,59	0,31	NA	2,09
Sumatera Barat	10,24	5,75	NA	NA	3,31
Riau	14,82	3,60	NA	0,85	2,71
Jambi	7,86	4,30	NA	NA	2,57
Sumatera Selatan	10,12	2,51	NA	NA	1,33
Bengkulu	14,78	3,42	NA	NA	NA
Lampung	12,62	4,72	NA	NA	3,40
Kep. Bangka Belitung	17,27	3,56	NA	NA	NA
Kepulauan Riau	8,93	5,11	NA	NA	4,15
DKI Jakarta	22,34	NA	NA	NA	2,23
Jawa Barat	17,98	2,54	NA	NA	NA
Jawa Tengah	20,80	3,15	NA	0,17	1,36
DI Yogyakarta	40,05	5,06	NA	NA	NA
Jawa Timur	15,33	2,78	NA	0,25	2,57
Banten	9,63	1,90	NA	NA	5,00
Bali	17,08	6,29	NA	NA	0,79
Nusa Tenggara Barat	13,70	6,59	NA	NA	1,86
Nusa Tenggara Timur	5,49	4,48	NA	NA	1,11
Kalimantan Barat	5,82	2,01	NA	NA	1,71
Kalimantan Tengah	14,23	2,37	NA	NA	3,60
Kalimantan Selatan	23,72	3,93	NA	NA	NA
Kalimantan Timur	22,62	4,60	NA	NA	1,09
Kalimantan Utara	15,88	4,32	NA	NA	2,45
Sulawesi Utara	7,93	3,25	NA	NA	5,42
Sulawesi Tengah	6,77	3,79	NA	NA	3,22
Sulawesi Selatan	8,68	4,05	NA	NA	1,76
Sulawesi Tenggara	9,62	4,57	NA	NA	1,77
Gorontalo	13,74	3,22	NA	NA	1,10
Sulawesi Barat	6,73	2,44	NA	NA	1,56
Maluku	9,97	4,73	NA	NA	2,86
Maluku Utara	NA	2,40	NA	NA	NA
Papua Barat	8,43	4,37	NA	NA	0,94
Papua	2,15	2,11	NA	NA	1,24
Indonesia	14,48	3,29	0,09	0,26	1,84

Keterangan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

*) Tidak relevan, jika tidak tinggal bersama orangtua/wali, seperti pembantu, anak kost, dan lain-lain

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tabel 30 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	Tidak Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,77	94,23	100,00
Sumatera Utara	5,21	94,79	100,00
Sumatera Barat	1,85	98,15	100,00
Riau	3,58	96,42	100,00
Jambi	2,80	97,20	100,00
Sumatera Selatan	2,47	97,53	100,00
Bengkulu	2,79	97,21	100,00
Lampung	4,56	95,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,33	95,67	100,00
Kepulauan Riau	NA	96,52	100,00
DKI Jakarta	2,36	97,64	100,00
Jawa Barat	1,82	98,18	100,00
Jawa Tengah	4,32	95,68	100,00
DI Yogyakarta	3,36	96,64	100,00
Jawa Timur	3,42	96,58	100,00
Banten	4,10	95,90	100,00
Bali	5,26	94,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,13	95,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,49	92,51	100,00
Kalimantan Barat	3,68	96,32	100,00
Kalimantan Tengah	5,48	94,52	100,00
Kalimantan Selatan	3,20	96,80	100,00
Kalimantan Timur	2,24	97,76	100,00
Kalimantan Utara	NA	93,49	100,00
Sulawesi Utara	4,09	95,91	100,00
Sulawesi Tengah	6,70	93,30	100,00
Sulawesi Selatan	5,43	94,57	100,00
Sulawesi Tenggara	4,02	95,98	100,00
Gorontalo	8,72	91,28	100,00
Sulawesi Barat	5,15	94,85	100,00
Maluku	4,55	95,45	100,00
Maluku Utara	3,35	96,65	100,00
Papua Barat	4,02	95,98	100,00
Papua	4,24	95,76	100,00
Indonesia	3,69	96,31	100,00

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2022

4.2 PERNIKAHAN ANAK

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan baik secara formal atau informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 18 tahun. Perkawinan anak tidak hanya dilakukan terhadap anak perempuan saja tetapi juga dilakukan terhadap anak laki-laki. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua. Namun menurut *Internasional Humanist and Ethical Union*, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan *child abuse* (Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak

Hasil Susenas Maret 2023 dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang masih harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Data menunjukkan secara rata-rata usia perkawinan pertama, baik untuk laki-laki maupun perempuan di Provinsi Sumatera Barat, sudah jauh melewati usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Menurut undang-undang tersebut, usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (sebelumnya untuk perempuan adalah 16 tahun).

Tabel 31 terlihat bahwa rata-rata umur perkawinan pertama di Sumatera Barat secara keseluruhan adalah antara 23-24 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata umur perkawinan pertama laki-laki di Sumatera Barat adalah 25,84 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata umur perkawinan pertama perempuan yaitu 21,56 tahun.

Sementara bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, baik daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu umur perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding umur kawin pertama perempuan. Hal tersebut mengindikasikan hal yang baik terutama untuk perempuan karena umur perkawinan pertama di atas 20 tahun perempuan dianggap telah siap untuk bereproduksi karena apabila hamil di usia muda rahim belum siap dan membuat saluran kelahiran mudah pecah yang akibatnya dapat menyebabkan kematian saat melahirkan (BKKBN, 2013).

Selain itu, perempuan yang menikah atau kawin di usia yang masih belia dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki pendidikan yang berimbas pada tingkat kesejahteraannya, sehingga dapat memperpanjang masalah sosial yang sudah ada (UNICEF, 2005). Dari laporan kajian perkawinan usia anak di Indonesia, bayi yang dilahirkan oleh perempuan dibawah umur punya resiko kematian lebih besar. Bayi tersebut juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Dari sisi pendidikan, perempuan yang menikah di usia muda juga akan menghadapi banyak tantangan, kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya karena harus bertanggung jawab di kegiatan domestik rumah tangga.

Tabel 31 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	26,55	25,15	25,84
Perempuan	22,34	20,83	21,56
Laki-laki + Perempuan	24,27	22,80	23,51

Sumber: BPS, Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 32 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Status Perkawinan/ <i>Marital Status</i>			
	Belum Kawin <i>Single</i>		Kawin <i>Married</i>	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1. Kep. Mentawai	36,84	34,39	58,69	60,01
2. Pesisir Selatan	34,61	33,78	56,94	57,69
3. Solok	35,91	33,73	54,68	56,91
4. Sijunjung	32,67	32,70	59,98	59,94
5. Tanah Datar	35,38	32,30	54,62	56,35
6. Padang Pariaman	39,47	36,67	51,05	53,54
7. Agam	35,88	35,05	53,81	54,79
8. Lima Puluh Kota	33,42	30,64	57,79	61,11
9. Pasaman	38,00	35,03	53,96	56,14
10. Solok Selatan	33,34	32,97	59,75	60,25
11. Dharmasraya	30,75	32,11	62,87	61,28
12. Pasaman Barat	38,44	39,78	55,54	54,23
<i>Kota/Municipality</i>				
1. Padang	36,97	42,69	55,76	50,89
2. Solok	35,05	36,79	56,92	55,16
3. Sawahlunto	33,68	31,95	58,53	58,91
4. Padang Panjang	38,05	41,14	53,51	50,25
5. Bukittinggi	39,08	42,27	53,45	50,36
6. Payakumbuh	35,37	34,80	56,09	56,59
7. Pariaman	40,09	39,37	50,53	50,70
Sumatera Barat	36,02	36,24	55,81	55,6

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Status Perkawinan/Marital Status				Jumlah Total	
	Cera! Hidup Divorced		Cera! Mati Widowed		2022	2023
	2022	2023	2022	2023		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	1,08	1,59	3,39	4,01	100,00	100,00
2. Pesisir Selatan	2,63	2,27	5,82	6,26	100,00	100,00
3. Solok	1,98	2,00	7,43	7,36	100,00	100,00
4. Sijunjung	2,19	2,14	5,16	5,22	100,00	100,00
5. Tanah Datar	2,38	3,08	7,62	8,27	100,00	100,00
6. Padang Pariaman	2,76	2,21	6,72	7,58	100,00	100,00
7. Agam	2,20	2,60	8,11	7,56	100,00	100,00
8. Lima Puluh Kota	2,18	2,18	6,61	6,07	100,00	100,00
9. Pasaman	1,62	2,14	6,42	6,69	100,00	100,00
10. Solok Selatan	2,56	2,30	4,35	4,48	100,00	100,00
11. Dharmasraya	1,58	1,83	4,80	4,78	100,00	100,00
12. Pasaman Barat	1,38	1,26	4,64	4,73	100,00	100,00
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	1,87	1,30	5,40	5,12	100,00	100,00
2. Solok	3,02	2,76	5,01	5,29	100,00	100,00
3. Sawahlunto	1,91	2,54	5,88	6,60	100,00	100,00
4. Padang Panjang	2,55	2,88	5,89	5,73	100,00	100,00
5. Bukittinggi	2,27	2,23	5,20	5,14	100,00	100,00
6. Payakumbuh	2,95	3,10	5,59	5,51	100,00	100,00
7. Pariaman	2,85	2,44	6,53	7,49	100,00	100,00
Sumatera Barat	2,12	2,06	6,05	6,10	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Dalam tabel diatas terlihat bahwa 55,6 persen penduduk yang berumur diatas 10 tahun terdata telah kawin, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya pada kategori yang belum menikah terjadi peningkatan sebesar 0,22 persen. Kedua hal ini membuktikan bahwa perempuan Sumatera Barat tidak melakukan perkawinan di usia muda.

Tabel 33 Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki/Male				Jumlah Total
	Belum Kawin Single	Kawin Married	Cerai Hidup Divorced	Cerai Mati Widowed	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	40,29	57,97	1,32	0,42	100,00
Kab. Pesisir Selatan	39,09	57,93	0,78	2,20	100,00
Kab. Solok	38,33	57,36	1,09	3,21	100,00
Kab. Sijunjung	38,93	59,23	0,59	1,25	100,00
Kab. Tanah Datar	37,79	57,32	1,52	3,36	100,00
Kab. Padang Pariaman	42,53	54,11	0,40	2,96	100,00
Kab. Agam	41,33	54,99	0,89	2,79	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	36,57	60,81	1,14	1,49	100,00
Kab. Pasaman	40,48	56,26	0,65	2,61	100,00
Kab. Solok Selatan	37,96	59,45	0,76	1,83	100,00
Kab. Dharmasraya	37,31	59,34	0,57	2,78	100,00
Kab. Pasaman Barat	45,05	53,68	0,86	0,41	100,00
Kota Padang	46,54	51,22	0,70	1,54	100,00
Kota Solok	40,04	55,74	1,46	2,76	100,00
Kota Sawahlunto	37,25	58,90	1,32	2,54	100,00
Kota Padang Panjang	45,59	50,52	0,99	2,90	100,00
Kota Bukittinggi	45,37	52,27	0,97	1,39	100,00
Kota Payakumbuh	39,67	56,23	1,92	2,17	100,00
Kota Pariaman	44,99	51,32	1,41	2,28	100,00
Sumatera Barat	41,36	55,66	0,89	2,09	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Tabel 34 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perempuan/Female				Jumlah Total
	Belum Kawin Single	Kawin Married	Cerai Hidup Divorced	Cerai Mati Widowed	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kab. Kepulauan Mentawai	28,08	62,20	1,87	7,85	100,00
Kab. Pesisir Selatan	28,65	57,45	3,71	10,19	100,00
Kab. Solok	29,25	56,46	2,88	11,41	100,00
Kab. Sijunjung	26,52	60,65	3,68	9,15	100,00
Kab. Tanah Datar	27,08	55,43	4,56	12,92	100,00
Kab. Padang Pariaman	31,03	53,00	3,95	12,01	100,00
Kab. Agam	28,99	54,59	4,25	12,17	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	24,72	61,40	3,22	10,66	100,00
Kab. Pasaman	29,69	56,03	3,60	10,68	100,00
Kab. Solok Selatan	27,87	61,07	3,87	7,19	100,00
Kab. Dharmasraya	26,61	63,33	3,16	6,91	100,00
Kab. Pasaman Barat	34,36	54,80	1,68	9,16	100,00
Kota Padang	38,89	50,56	1,90	8,66	100,00
Kota Solok	33,64	54,60	4,02	7,74	100,00
Kota Sawahlunto	26,78	58,93	3,73	10,56	100,00
Kota Padang Panjang	36,77	49,99	4,73	8,50	100,00
Kota Bukittinggi	39,41	48,59	3,40	8,59	100,00
Kota Payakumbuh	29,98	56,94	4,27	8,80	100,00
Kota Pariaman	34,07	50,11	3,41	12,41	100,00
Sumatera Barat	31,20	55,55	3,21	10,04	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Tabel 35 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki + Perempuan/Male + Female				Jumlah Total
	Belum Kawin Single	Kawin Married	Cerai Hidup Divorced	Cerai Mati Widowed	
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kab. Kepulauan Mentawai	34,39	60,01	1,59	4,01	100,00
Kab. Pesisir Selatan	33,79	57,69	2,27	6,26	100,00
Kab. Solok	33,73	56,91	2,00	7,36	100,00
Kab. Sijunjung	32,70	59,94	2,14	5,22	100,00
Kab. Tanah Datar	32,29	56,35	3,08	8,27	100,00
Kab. Padang Pariaman	36,66	53,54	2,21	7,58	100,00
Kab. Agam	35,05	54,79	2,60	7,56	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	30,64	61,11	2,18	6,07	100,00
Kab. Pasaman	35,02	56,14	2,14	6,69	100,00
Kab. Solok Selatan	32,97	60,25	2,30	4,48	100,00
Kab. Dharmasraya	32,12	61,28	1,83	4,78	100,00
Kab. Pasaman Barat	39,77	54,23	1,26	4,73	100,00
Kota Padang	42,69	50,89	1,30	5,12	100,00
Kota Solok	36,79	55,16	2,76	5,29	100,00
Kota Sawahlunto	31,95	58,91	2,54	6,60	100,00
Kota Padang Panjang	41,14	50,25	2,88	5,73	100,00
Kota Bukittinggi	42,27	50,36	2,23	5,14	100,00
Kota Payakumbuh	34,80	56,59	3,10	5,51	100,00
Kota Pariaman	39,37	50,70	2,44	7,49	100,00
Sumatera Barat	36,24	55,60	2,06	6,10	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2023

Bila ditinjau dari sisi jenis kelamin persentase laki-laki yang berusia 10 tahun keatas yang belum menikah sebesar 41,36 sedangkan perempuan yang berusia 10 tahun keatas yang belum menikah sebesar 31,20 persen, sedangkan yang menikah mencapai 55,66 persen (laki-laki) dan 55,55 persen (perempuan). Ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan Sumatera Barat tidak melakukan pernikahan anak. Hal yang sama juga dibuktikan dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 36 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Belum Kawin <i>Single</i>	Kawin <i>Married</i>	Cera! Hidup <i>Divorced</i>	Cera! Mati <i>Widowed</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki/Male					
< 25	97,62	2,30	0,02	0,06	100,00
25–49	21,85	76,51	1,20	0,44	100,00
50 +	0,99	89,71	1,49	7,81	100,00
Perempuan/Female					
< 25	91,05	8,61	0,34	0,00	100,00
25–49	7,84	85,90	3,99	2,28	100,00
50 +	0,30	59,80	5,26	34,64	100,00
Laki-Laki+Perempuan <i>Male + Female</i>					
< 25	94,41	5,38	0,18	0,03	100,00
25–49	14,80	81,23	2,60	1,36	100,00
50 +	0,63	74,02	3,46	21,88	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 37 Persentase Penduduk Yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, 2021-2023

Kelompok Usia Perkawinan Pertama <i>Age of First Marriage Group</i>	Tahun/Year		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<16	4,35	3,77	3,93
16-24	71,69	71,57	73,28
25 +	23,95	24,66	22,79
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan hasil Susenas 2023, di Provinsi Sumatera Barat masih ada sekitar 3,93 persen perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada umur dibawah 16 tahun. Angka ini sedikit mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika dilihat dari kelompok usia kawin pertama lainnya, terlihat perubahan pola perkawinan pertama. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kelompok wanita kawin pertama di umur 16-24 tahun. Sebaliknya mengalami penurunan pada umur 25 tahun keatas. Hal ini menunjukkan bahwa wanita di Provinsi Sumatera Barat semakin memahami akan pentingnya melangsungkan perkawinan di umur yang matang.

Persentase perempuan Sumatera Barat usia 10 tahun keatas yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia dibawah 16 tahun dalam tiga

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun di Sumatera Barat perkawinan anak relatif sangat kecil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa program Pemerintah untuk mencegah perkawinan anak telah berjalan baik di Sumatera Barat. Hal ini juga menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan anak telah cukup tinggi.

Berbagai alasan masih tingginya perkawinan anak yaitu selain faktor pendidikan, ekonomi, stigma, juga karena rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi yang menyebabkan remaja tidak memiliki pilihan atau *bargaining position* yang lemah khususnya yang terjadi pada remaja perempuan.

Hasil dari Susenas 2023 dapat memberikan potret keberhasilan dan hal yang masih menjadi pekerjaan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Rata-rata usia perkawinan pertama baik laki-laki maupun perempuan di Sumatera Barat sudah jauh melewati usia yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dimana menurut Undang-Undang tersebut usia laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun.

Berdasarkan data Susenas Maret 2023, prevalensi pernikahan laki-laki dan perempuan dengan umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun menunjukkan perbedaan signifikan. Persentase umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun untuk perempuan lebih dari 7 kali lipat persentase laki-laki. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, prevalensi pernikahan dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan lebih besar di daerah perdesaan, dimana daerah perdesaan hampir dua kali daerah perkotaan.

Tabel 39 menunjukkan Sumatera Barat memiliki angka perkawinan anak perempuan dengan umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun sebesar 22,92 persen. Persentase ini memiliki arti bahwa terdapat 22-23 dari 100 anak perempuan di Sumatera Barat melakukan perkawinan pertama saat berumur di bawah 19 tahun.

UNICEF (2016) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan. Anak yang menikah dibawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari gambar diatas, tingkat

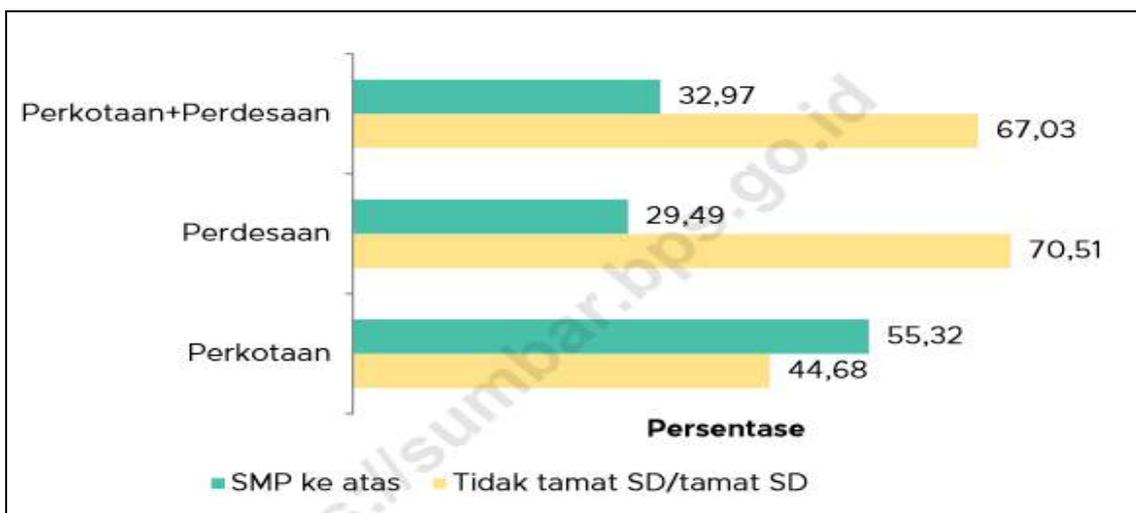
pendidikan perempuan yang umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun sebagian besar adalah tidak tamat/tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 67,03 persen. Tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, keduanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat atau bahkan tidak tamat. Menyikapi fenomena perkawinan usia anak dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Terdapat banyak faktor yang terlibat dalam menurunkan angka perkawinan usia anak ini, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Tabel 38 Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di bawah 19 tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	2,21	3,77	3,01
Perempuan	17,50	28,06	22,92

Sumber: BPS, Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, 2023

Gambar 10 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, keduanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat atau bahkan tidak tamat. Menyikapi fenomena perkawinan usia anak dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Terdapat banyak faktor yang terlibat dalam menurunkan angka perkawinan usia anak ini, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Tabel 39 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2022-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan (Persen)							
	Belum Kawin		Kawin		Ceraí Hidup		Ceraí Mati	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	36,84	34,39	58,69	60,01	1,08	1,59	3,39	4,01
Kab. Pesisir Selatan	34,61	33,79	56,94	57,69	2,63	2,27	5,82	6,26
Kab. Solok	35,91	33,73	54,68	56,91	1,98	2,00	7,43	7,36
Kab. Sijunjung	32,67	32,70	59,98	59,94	2,19	2,14	5,16	5,22
Kab. Tanah Datar	35,38	32,29	54,62	56,35	2,38	3,08	7,62	8,27
Kab. Padang Pariaman	39,47	36,66	51,05	53,54	2,76	2,21	6,72	7,58
Kab. Agam	35,88	35,05	53,81	54,79	2,20	2,60	8,11	7,56
Kab. Lima Puluh Kota	33,42	30,64	57,79	61,11	2,18	2,18	6,61	6,07
Kab. Pasaman	38,00	35,02	53,96	56,14	1,62	2,14	6,42	6,69
Kab. Solok Selatan	33,34	32,97	59,75	60,25	2,56	2,30	4,35	4,48
Kab. Dharmasraya	30,75	32,12	62,87	61,28	1,58	1,83	4,80	4,78
Kab. Pasaman Barat	38,44	39,77	55,54	54,23	1,38	1,26	4,64	4,73
Kota Padang	36,97	42,69	55,76	50,89	1,87	1,30	5,40	5,12
Kota Solok	35,05	36,79	56,92	55,16	3,02	2,76	5,01	5,29
Kota Sawahlunto	33,68	31,95	58,53	58,91	1,91	2,54	5,88	6,60
Kota Padang Panjang	38,05	41,14	53,51	50,25	2,55	2,88	5,89	5,73
Kota Bukittinggi	39,08	42,27	53,45	50,36	2,27	2,23	5,20	5,14
Kota Payakumbuh	35,37	34,80	56,09	56,59	2,95	3,10	5,59	5,51
Kota Pariaman	40,09	39,37	50,53	50,70	2,85	2,44	6,53	7,49
Provinsi Sumatera Barat	36,02	36,24	55,81	55,60	2,12	2,06	6,05	6,10

Sumber: BPS, sumbarbps.go.id

4.2.1 Dampak Buruk Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Anak yang telah menikah, sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagi anak perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir (UNICEF, 2019).

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

4.2.1.1 Dampak Perkawinan di Usia Anak Pada Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menjadi landasan terbangunnya kehidupan yang lebih baik. Namun kesempatan pendidikan menengah dan tinggi menjadi menurun bahkan hilang karena adanya perkawinan anak.

Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional, hal ini penyebab utama putus sekolah bagi remaja perempuan. Setiap tahun pernikahan sebelum usia 18 tahun mengurangi kemungkinan menyelesaikan sekolah menengah. Perkawinan anak juga menurunkan angka partisipasi dan penuntasan sekolah pada anak perempuan hingga minimal tingkat menengah. Menunda perkawinan anak berdampak pada tiga output pendidikan khususnya bagi perempuan yaitu: meningkatnya lama tahun pendidikan, tingkat melek huruf dan rendahnya putus sekolah tingkat

menengah pertama. Penghapusan perkawinan pada anak dapat meningkatkan partisipasi sekolah pada anak perempuan. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah sangat penting untuk mengurangi angka perkawinan anak.

Sejak tahun 2014 pemerintah Indonesia telah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar yang merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar. Program tersebut merupakan program bantuan dalam bidang pendidikan untuk membantu anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan minimal sampai pendidikan menengah. Selain itu, Pemerintah juga memberikan beasiswa dan insentif pada keluarga agar mempertahankan anak untuk bersekolah hingga minimal pendidikan dasar dan menengah.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Untuk itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh United Nations Development Programs (UNDP) pada tahun 1990 dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diukur melalui rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk di jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah dilakukan pada penduduk mulai usia 15 tahun ke atas untuk melihat jumlah tahun efektif bersekolah formal yang sudah dicapai penduduk dalam menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat Sekolah Menengah diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun (sirusa.bps.go.id).

Rata-rata ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan apakah penduduk tersebut menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu, misalnya pernah tinggal kelas, pernah melakukan berhenti sementara (cuti), atau pernah mengulang tingkat jenjang atau kelas tertentu karena alasan khusus.

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah merujuk pada 4 (empat) informasi yaitu, 1) partisipasi sekolah, 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 3) Ijazah tertinggi yang dimiliki dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (sirusa.bps.go.id).

Interpretasi pada hasil rata-rata lama sekolah bermakna bahwa semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, data yang ditunjukkan dalam hasil rata-rata lama sekolah ini dapat menginformasikan tentang kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Pada tahun 2022 terlihat rata-rata lama sekolah Sumatera Barat sebesar 9,18 meningkat sebesar 0,11 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun belum menunjukkan angka yang signifikan, dimana penduduk Sumatera Barat masih memiliki rata-rata lama sekolah pada 9 tahun. Ini artinya program wajib belajar 9 tahun telah dicapai namun belum dapat mencapai program wajib belajar 12 tahun. Rata-rata penduduk hanya dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat pendidikan menengah pertama.

Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah penduduk sudah mencapai 10-12 tahun, namun di wilayah perdesaan masih mencapai 7-9 tahun. Untuk itu, diperlukan program inovasi Pemerintah terutama Dinas Pendidikan dalam upaya menggenjot rata-rata lama sekolah tersebut melalui kemudahan akses pendidikan

Tabel 40 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	7,48	7,76
Kab. Pesisir Selatan	8,43	8,58
Kab. Solok	7,89	7,90
Kab. Sijunjung	8,30	8,57
Kab. Tanah Datar	8,90	9,02
Kab. Padang Pariaman	8,16	8,41
Kab. Agam	8,98	9,22
Kab. Lima Puluh Kota	8,08	8,12
Kab. Pasaman	8,11	8,13
Kab. Solok Selatan	8,41	8,69
Kab. Dharmasraya	8,56	8,71
Kab. Pasaman Barat	8,55	8,81
Kota Padang	11,60	11,62
Kota Solok	11,35	11,36
Kota Sawahlunto	10,43	10,44
Kota Padang Panjang	11,92	11,94
Kota Bukittinggi	11,63	11,64
Kota Payakumbuh	10,82	10,88
Kota Pariaman	10,78	10,79
Provinsi Sumatera Barat	9,18	9,28

Sumber: BPS, bps.go.id, 2023

Tabel 40 menggambarkan rata-rata lama sekolah pada perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah pada laki-laki sudah mencapai 9,2 tahun, sedangkan pada perempuan mencapai 9,37 tahun

Di tahun 2023, capaian rata-rata lama sekolah pada laki-laki meningkat sebesar 0,81 persen dibandingkan pada tahun 2022, sedangkan pada perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen menjadi 9,37 persen. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 9,2 dan perempuan sebesar 9,37. Baik di tahun 2019 hingga tahun 2023, capaian rata-rata lama sekolah pada perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Capaian rata-rata lama sekolah ini cukup jauh dari angka harapan lama sekolah (HLS) Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu 14,10 tahun.

Tabel 41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022-2023

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota			
	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	8.02	8.36	7.16	7.29
Kab. Pesisir Selatan	8.6	8.61	8.42	8.58
Kab. Solok	7.92	7.93	7.87	7.9
Kab. Sijunjung	8.42	8.66	8.21	8.55
Kab. Tanah Datar	8.72	8.78	8.98	9.22
Kab. Padang Pariaman	8.58	8.7	7.83	8.11
Kab. Agam	8.92	9.09	9.07	9.33
Kab. Lima Puluh Kota	8.41	8.45	8.07	8.11
Kab. Pasaman	8.37	8.39	8.03	8.05
Kab. Solok Selatan	8.42	8.67	8.4	8.72
Kab. Dharmasraya	8.94	8.95	8.54	8.7

Kab. Pasaman Barat	8.74	8.96	8.34	8.63
Kota Padang	11.69	11.71	11.55	11.56
Kota Solok	11.23	11.24	11.51	11.52
Kota Sawahlunto	10.39	10.4	10.58	10.59
Kota Padang Panjang	11.55	11.56	12	12.18
Kota Bukittinggi	11.45	11.46	11.63	11.64
Kota Payakumbuh	10.6	10.61	10.94	11.06
Kota Pariaman	10.65	10.7	10.89	10.9
Provinsi Sumatera Barat	9.19	9.2	9.17	9.37

Sumber: BPS, bps.go.id, 2023

Gambaran rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan kelompok perempuan lebih banyak yang tidak sampai jenjang sekolah menengah pertama dan atau tidak menamatkan jenjang pendidikannya di tingkat SMP/ sederajat; sedangkan laki-laki lebih banyak yang telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SMP/ sederajat namun belum menuntaskan jenjang Pendidikan di tingkat SMA/ sederajat. Rata-rata lama sekolah yang dicapai pada tahun 2023 ini sedikit diatas harapan program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah serta angka harapan lama sekolah.

Di wilayah perdesaan, terjadi kesenjangan yang signifikan pada rata-rata lama sekolah pada perempuan usia 15 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan laki-laki berdasarkan wilayah tempat tinggal, baik di perdesaan maupun di perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibanding laki-laki. Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Perempuan di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau setara dengan kelas 11, sedangkan perempuan di perdesaan hanya mampu menamatkan sekolah sampai dengan kelas 8. Kecenderungan yang sama juga terlihat untuk laki-laki 15 tahun ke atas di perkotaan yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMP,

sedangkan laki-laki di perdesaan mempunyai rata-rata lama sekolah setara dengan kelas 8 SMP/ sederajat

UNICEF (2016) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan. Anak yang menikah dibawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari gambar dibawah, tingkat pendidikan perempuan yang umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun paling banyak adalah tidak tamat/ tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 70,13 persen. Tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, keduanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat atau bahkan tidak tamat.

Tabel 42 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi		
	2021	2022	2023
SUMATERA BARAT	9.46	9.51	9.59
INDONESIA	8.97	9.08	9.13

Sumber: BPS, bps.go.id, 2023

Dilihat dari tabel 42, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat masih berada diatas rata-rata nasional. Ini membuktikan pendidikan di Sumatera Barat masih berjalan dengan baik, namun Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkannya agar berada diatas harapan lama sekolah nasional.

Tabel 43 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	<19	19+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	29,81	70,19	100,00
Kab. Pesisir Selatan	31,48	68,52	100,00
Kab. Solok	32,05	67,95	100,00
Kab. Sijunjung	31,35	68,65	100,00
Kab. Tanah Datar	16,40	83,60	100,00
Kab. Padang Pariaman	20,84	79,16	100,00
Kab. Agam	13,76	86,24	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	26,51	73,49	100,00
Kab. Pasaman	28,77	71,23	100,00
Kab. Solok Selatan	34,36	65,64	100,00
Kab. Dharmasraya	40,09	59,91	100,00
Kab. Pasaman Barat	27,22	72,78	100,00
Kota Padang	13,23	86,77	100,00
Kota Solok	17,93	82,07	100,00
Kota Sawahlunto	17,86	82,14	100,00
Kota Padang Panjang	7,88	92,12	100,00
Kota Bukittinggi	8,96	91,04	100,00
Kota Payakumbuh	13,26	86,74	100,00
Kota Pariaman	12,76	87,24	100,00
Sumatera Barat	22,92	77,08	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

4.2.1.2 Dampak Perkawinan di Usia Anak Pada Kesejahteraan

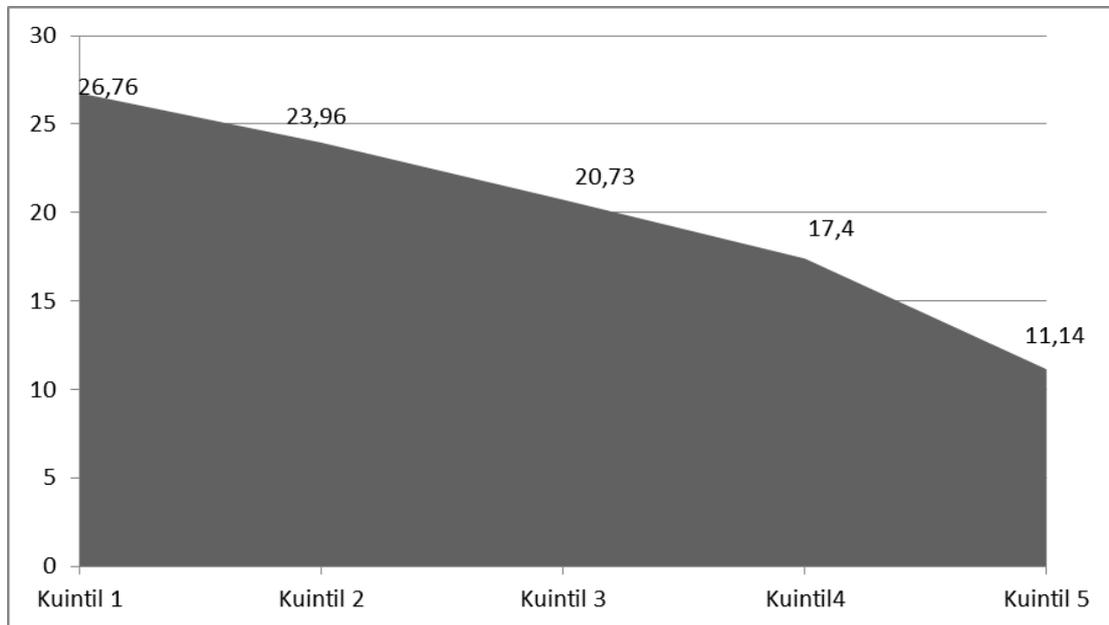
Perkawinan anak terjadi salah satunya karena adanya keterbatasan ekonomi keluarga. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan dengan beberapa anak menggunakan perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Bagi mereka, berkurangnya satu anak perempuan berarti berkurangnya satu orang untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan. Keluarga seringkali menggunakan pernikahan anak sebagai strategi untuk menghindari kerawanan pangan. Anak perempuan bahkan digunakan sebagai pengganti uang untuk menutup hutang dan menyelesaikan konflik. Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru.

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung

berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Sementara itu, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, pada kelompok kuintil pengeluaran kedua, ketiga, dan keempat, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 23,96 persen, 20,73 persen, dan 17,40 persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran kelima, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit dibandingkan pada kelompok lainnya, yaitu sebesar 11,14 persen

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia dibawah 18 tahun. Sementara itu, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun.

Gambar 11 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang Kawin Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Tingkat Kesejahteraan (Kuintil Pengeluaran), 2018



Sumber: BPS, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, 2020

Sementara itu, pada kelompok kuintil pengeluaran kedua, ketiga dan keempat, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 23,96 persen, 20,73 persen dan 17,40 persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran kelima, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit dibandingkan pada kelompok lainnya yaitu sebesar 11,14 persen.

Pernikahan anak menghambat anak perempuan pada pekerjaan produktif, dan seringkali hidup dalam kemiskinan. Pernikahan anak mengurangi kemampuan mereka untuk memperoleh sumber ekonomi. Perkawinan anak berdampak pada tingkat putus sekolah yang terkait menghambat peluang anak perempuan untuk mendapatkan upah yang lebih baik sebesar 9 persen selama hidup mereka. Terhambatnya akses anak terutama anak perempuan pada pendidikan menurunkan kesempatan anak untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi ketika dewasa.

Perkawinan anak melanggengkan siklus kemiskinan, memiliki lebih sedikit pengambilan keputusan dan daya tawar dalam rumah tangga mereka serta menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan termasuk agresi fisik, seksual, atau psikologis.

Perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun yang berstatus miskin lebih besar dibandingkan yang kawin diatas usia 18 tahun, yaitu 13,76 persen berbanding 10,09 persen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong melakukan perkawinan usia anak.

4.2.1.3 Dampak Perkawinan di Usia Anak Pada Kesehatan

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan.

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca melahirkan.

Perkawinan anak secara efektif mengakhiri masa kanak-kanak seorang gadis, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi,

meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menempatkannya pada risiko kehamilan dini, sering hamil, dan kehamilan berisiko tinggi.

Tabel 44 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	<19	19-49	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	26,32	73,68	100,00
Kab. Pesisir Selatan	15,75	84,25	100,00
Kab. Solok	14,53	85,47	100,00
Kab. Sijunjung	15,80	84,20	100,00
Kab. Tanah Datar	11,84	88,16	100,00
Kab. Padang Pariaman	4,74	95,26	100,00
Kab. Agam	5,42	94,58	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	13,81	86,19	100,00
Kab. Pasaman	19,50	80,50	100,00
Kab. Solok Selatan	20,19	79,81	100,00
Kab. Dharmasraya	28,11	71,89	100,00
Kab. Pasaman Barat	19,09	80,91	100,00
Kota Padang	7,15	92,85	100,00
Kota Solok	9,44	90,56	100,00
Kota Sawahlunto	7,88	92,12	100,00
Kota Padang Panjang	3,74	96,26	100,00
Kota Bukittinggi	4,92	95,08	100,00
Kota Payakumbuh	10,65	89,35	100,00
Kota Pariaman	4,88	95,12	100,00
Sumatera Barat	13,02	86,98	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Seperti yang terlihat pada tabel 44 persentase perempuan usia 15-49 tahun yang umur saat hamil pertamanya dibawah 19 tahun sebesar 13,02 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat persentase tertinggi

dengan nilai 26,32 persen. Hal ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut WHO (2020), kehamilan dini di kalangan remaja memiliki konsekuensi kesehatan yang besar bagi ibu remaja dan bayinya. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian di antara anak perempuan berusia 15–19 tahun di seluruh dunia. Risiko komplikasi dini dihadapi oleh ibu remaja (ibu berusia muda) sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan balita. Ibu remaja berusia 10–19 tahun menghadapi risiko eklampsia, endometritis nifas dan infeksi sistemik yang lebih tinggi dibandingkan wanita berusia 20-24 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang parah.

4.3 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Usia dini merupakan fase emas dari masa pertumbuhan anak dimana kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi dan sosial anak. Pengembangan anak usia dini yang berkualitas sebagai investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia. Oleh karena itu, dalam membentuk generasi emas diperlukan suatu peta data yang akurat, komprehensif dan terpercaya sebagai pijakan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah langkah pembangunan selanjutnya

Menyadari pentingnya mempersiapkan generasi unggul sejak dini, pemerintah Indonesia berupaya memberi perhatian lebih pada tumbuh kembang anak usia dini melalui hadirnya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). PAUD HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi serta berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. Adapun bidang yang menjadi sasaran dalam PAUD HI mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Melihat beragamnya bidang tersebut,

dibutuhkan adanya koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

Implementasi PAUD HI juga berpedoman pada perlindungan terhadap hak-hak anak sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mencakup lima klaster, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Keseluruhan payung hukum tersebut menjadi landasan dalam mencapai sasaran global SDGs, yaitu: pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

Perkembangan anak selama golden age (usia 0-6 tahun) sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada tahap berikutnya. Pada usia empat tahun intelegensi anak mulai terbentuk, hingga usia enam tahun anak telah mencapai dua pertiga intelegensi yang akan dimiliki saat usia 17 tahun. Perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan pengasuhan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Hak anak untuk mendapatkan pendidikan di usia dini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

PAUD dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah. Menurut penelitian anak yang mulai mengikuti sekolah dini memiliki skor kemampuan membaca dan berhitung, serta disiplin diri yang baik.

Pondasi karakter anak dapat dibangun sejak mereka masuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan yang diberikan untuk anak usia

3-6 tahun tidak hanya bertujuan mengenalkan anak pada bidang-bidang pelajaran ataupun melatihnya berinteraksi dengan anak sebaya. Lebih jauh dari itu, PAUD memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional.

Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Selanjutnya, dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD. Pengalaman belajar di PAUD akan membantu anak untuk lebih siap dalam menerima pelajaran formal di bangku pendidikan selanjutnya (SD) sehingga sedikit anak yang mengulang kelas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan UNESCO merekomendasikan setiap anak mendapatkan pendidikan anak usia dini pada usia prasekolah.

PAUD memiliki tiga jalur pendidikan, antara lain

- a. Jalur pendidikan formal yang merupakan pendidikan terstruktur untuk anak usia empat sampai enam tahun seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat.
- b. Jalur non formal yaitu pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran fleksibel untuk anak usia tiga bulan sampai usia enam tahun seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Play Group), dan bentuk lain yang sederajat.
- c. PAUD jalur pendidikan informal sebagai bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

untuk pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir (usia tiga bulan) sampai usia enam tahun.

Pendidikan anak usia dini dimulai sejak anak lahir hingga berusia enam tahun (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD). Dikutip dari Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi (a) layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan enam (0- 6) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)/sederajat; (b) layanan PAUD untuk usia dua sampai dengan empat (2-4) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya; dan (c) layanan PAUD untuk usia empat sampai dengan enam (4-6) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)/sederajat. PAUD diharapkan dapat membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak sehingga mereka memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014).

Pendidikan usia dini (PAUD) juga berperan sebagai pondasi bagi anak dalam memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan dalam pendidikan di masa yang akan datang. Pemerintah menyadari urgensi dari PAUD tersebut dan memberikan dukungan terhadap pendidikan prasekolah melalui program wajib PAUD dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang berlandaskan keilmuan, yuridis, sosial, budaya dan pedagogis baik secara teoritis maupun empiris (Kemendikbud 2017). Hal tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pelaksanaan pendidikan prasekolah belum sepenuhnya menjangkau semua anak usia dini. Meskipun program pendidikan bagi anak usia dini telah dilaksanakan sejak lama, namun anak usia 0-6 tahun yang memperoleh

layanan pendidikan masih cukup rendah. Pada tahun 2023, hanya sekitar 27,38 persen anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang tersentuh oleh pendidikan prasekolah (Gambar 13). Penelitian yang dilakukan Nurrachmah, Zwagery, dan Dewi (2019) menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi anak usia 0-6 tahun untuk memasuki pendidikan prasekolah.

Secara keseluruhan selama kurun waktu 2019-2023, persentase anak usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah relatif berkisar pada angka 26-27 persen. Faktor pandemi Covid-19 sempat menurunkan partisipasi PAUD pada tahun 2021-2022. Namun, seiring dengan membaiknya pandemi Covid-19 membuat partisipasi anak usia dini yang mengikuti pendidikan prasekolah mengalami peningkatan pada tahun 2023 (Gambar 13). Dilihat dari klasifikasi desa, tampak partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun lebih tinggi di daerah perkotaan. Namun, sejalan merebaknya wabah Covid-19 pada tahun 2020-2021, partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun di perkotaan turun sehingga gap antara perkotaan dan perdesaan menjadi kabur.

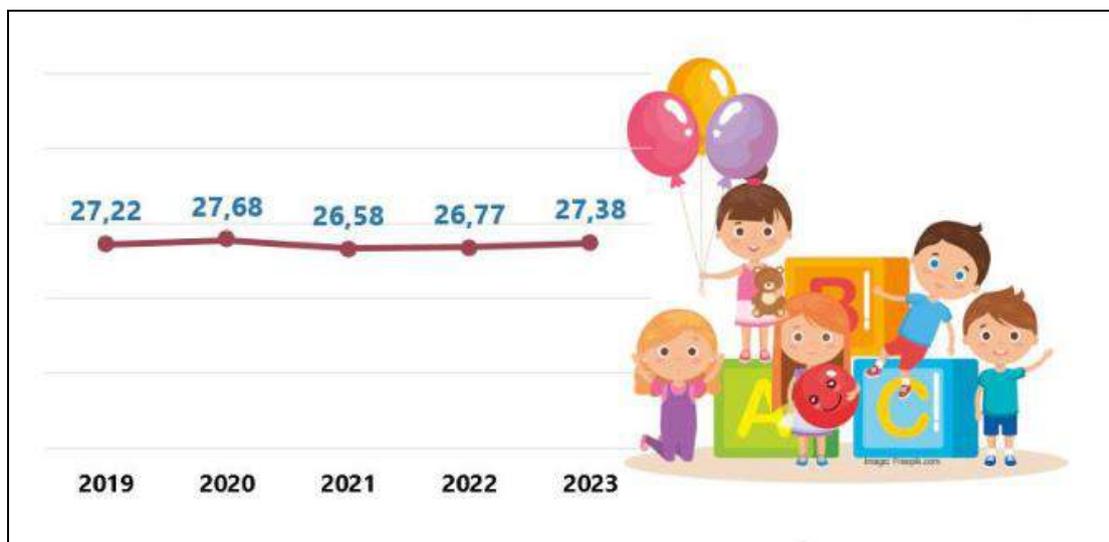
Kesenjangan partisipasi pendidikan prasekolah anak usia dini antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak terlalu kentara. Pada gambar 14 dapat dilihat bahwa angka partisipasi pendidikan prasekolah anak usia dini di perkotaan sebesar 27,67 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 26,99 persen. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam meningkatkan sarana maupun keterjangkauan PAUD di perdesaan yang sudah semakin membaik.

Ketimpangan akses terhadap pendidikan prasekolah tampak pada disagregasi menurut status disabilitas dan ekonomi rumah tangga. Anak dengan disabilitas dan tinggal di rumah tangga kuintil ekonomi terbawah memiliki proporsi keikutsertaan PAUD yang lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya.

Rendahnya persentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD; 2) fasilitas dan layanan PAUD yang

masih terbatas terutama di daerah perdesaan; 3) kondisi sosial ekonomi keluarga

Gambar 12 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang /Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah , 2019-2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Dari gambar 12 dapat diketahui bahwa di tahun 2022 dan 2023, persentase anak usia dini yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 26,77 persen. Artinya terdapat 1 dari 4 anak usia dini yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah.

Berdasarkan klasifikasi desa, terlihat bahwa selisih antara capaian perkotaan dengan perdesaan hanya sebesar 0,42 persen poin yang artinya tidak terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya peningkatan aksesibilitas, sarana, dan keterjangkauan pendidikan prasekolah tanpa membeda-bedakan daerah.

Semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, akan semakin memperbesar peluang seorang anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah (Salsabila dan Budyanra, 2022). Seperti yang terlihat pada Gambar 13, partisipasi anak usia dini pada kelompok pengeluaran terbawah (Kuintil 1) pada pendidikan prasekolah sebesar 24,49 persen. Sedangkan pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) partisipasinya mencapai 31,75 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Takerubun dan Marsisno

(2021) yang mengemukakan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran suatu rumah tangga akan memperbesar tingkat kecenderungan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah.

Gambar 13 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Klasifikasi Desa dan Kelompok Pengeluaran, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Berdasarkan gambar 13 terlihat bahwa pada tahun 2023, persentase anak usia dini yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 27,38 persen. Jika dilihat lebih detail dari kategori tempat tinggal, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan maupun perdesaan mengingat selisih persentase capaian perkotaan dengan perdesaan yang hanya sebesar 0,68 persen. Kondisi tersebut menandakan telah terjadi peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana serta keterjangkauan pendidikan prasekolah baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

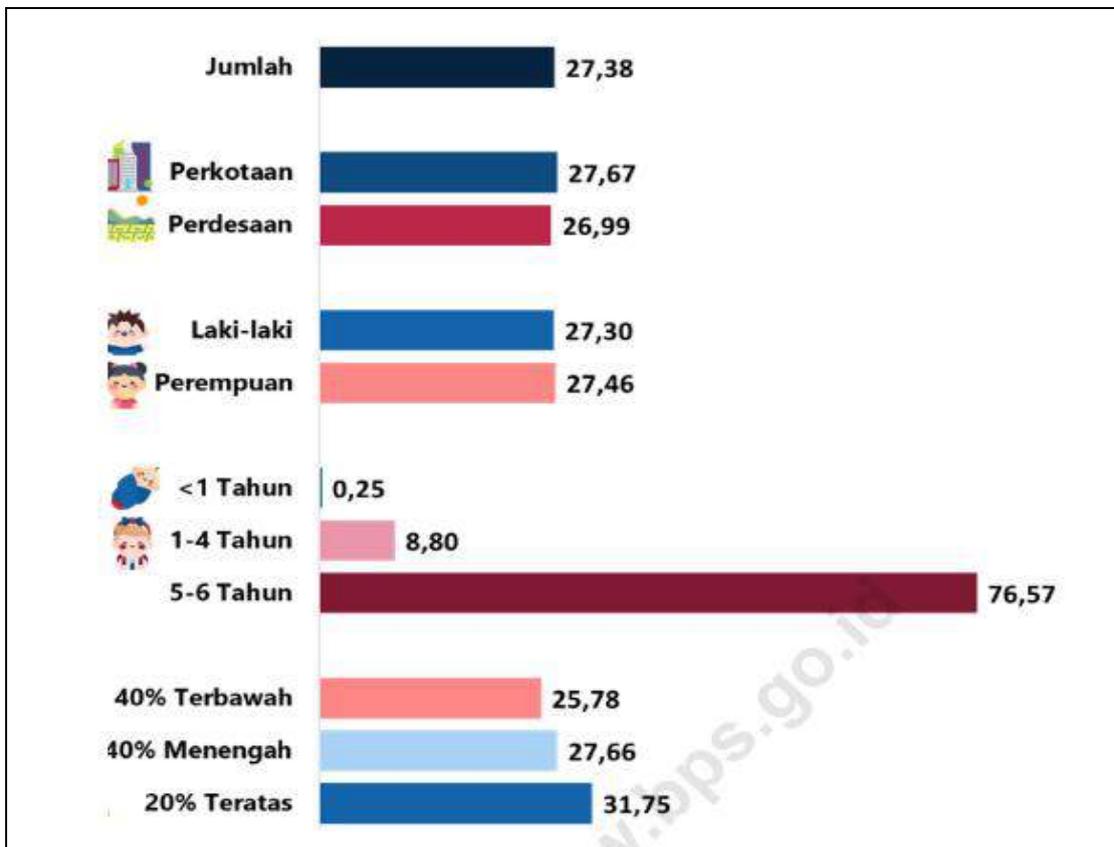
Selain itu, tampak bahwa capaian persentase anak perempuan yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah berdasarkan jenis kelamin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki (27,46 persen berbanding 27,30 persen). Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan

pendidikan, telah terdapat kesetaraan perlakuan dan akses terutama untuk memperoleh pendidikan prasekolah antara laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut telah sesuai dengan prinsip fundamental pengarusutamaan gender yang telah lama dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam tujuan ke-5 Sustainable Development Goals 2030. Selanjutnya, jika dilihat dari kelompok umur, pertambahan usia anak sejalan dengan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan prasekolah. Terlihat bahwa kelompok usia anak yang paling tua (5-6 tahun) memiliki persentase tertinggi yang telah mengikuti pendidikan prasekolah yakni sebesar 76,57 persen. Di sisi lain, faktor ekonomi masih menjadi halangan dalam menempuh pendidikan termasuk pendidikan prasekolah.

Terlihat dari gambar 13, berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga terdapat kesenjangan yang cukup signifikan pada partisipasi pendidikan prasekolah terutama antara anak usia dini yang berasal dari rumah tangga 20 persen teratas dan 40 persen terbawah (31,75 persen berbanding 25,78 persen).

Disisi lain, jika dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga, terdapat pola bahwa semakin baik status ekonomi rumah tangga maka partisipasi dalam mengikuti PAUD semakin tinggi. Status ekonomi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor yang mendorong orang tua untuk memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan pra sekolah.

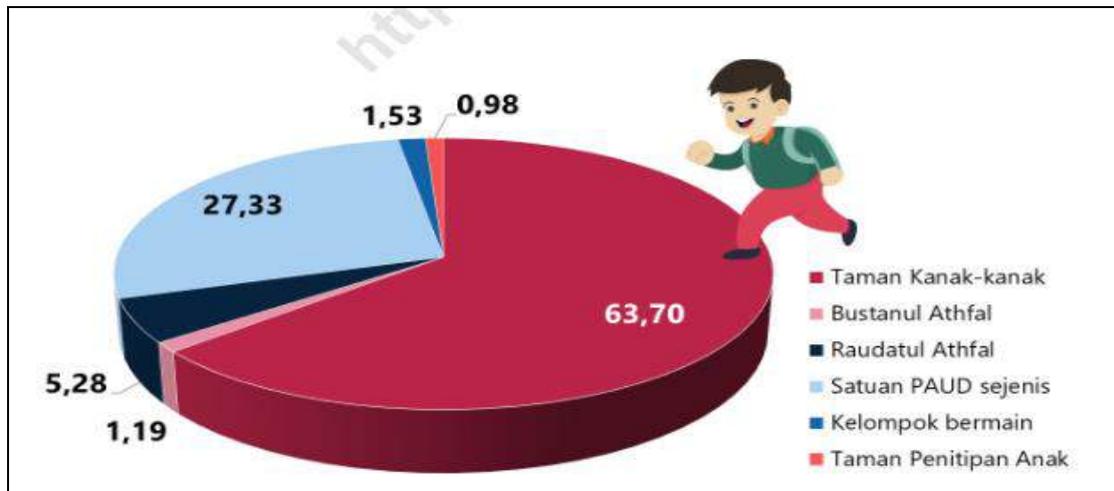
Gambar 14 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Karakteristik, 2023



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Secara umum, berdasarkan gambar 14 sebagian besar orang tua masih mempercayakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai jenis pendidikan prasekolah yang paling banyak diminati dibandingkan jenis lainnya dengan persentase mencapai 63,70 persen, diikuti oleh satuan PAUD sejenis (PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu) dengan persentase sebesar 27,33 persen, dan Raudatul Athfal sebesar 5,28 persen.

Gambar 15 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Tabel 45 Persentase Penduduk 0-6 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Masih Mengikuti Prasekolah TA 2022/2023 Still in Pre-School In This School Year (2022/2023)	Pernah Mengikuti Prasekolah TA 2022/2023 dan Sebelum TA 2022/2023 Attended Pre-School During Last School Year (2022/2023) and Before Last School Year	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Prasekolah Do Not/Never Attended Pre-School	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	19,89	7,15	72,96	100,00
Kab. Pesisir Selatan	15,12	6,32	78,55	100,00
Kab. Solok	16,20	2,22	81,57	100,00
Kab. Sijunjung	20,92	6,30	72,78	100,00
Kab. Tanah Datar	18,08	6,02	75,90	100,00
Kab. Padang Pariaman	11,22	7,80	80,97	100,00
Kab. Agam	11,45	7,65	80,90	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	14,79	5,17	80,04	100,00
Kab. Pasaman	14,14	9,78	76,08	100,00
Kab. Solok Selatan	13,18	8,96	77,85	100,00
Kab. Dharmasraya	21,72	3,11	75,17	100,00
Kab. Pasaman Barat	16,63	6,77	76,59	100,00
Kota Padang	16,36	3,86	79,79	100,00
Kota Solok	15,98	5,44	78,58	100,00
Kota Sawahlunto	30,85	7,82	61,33	100,00
Kota Padang Panjang	28,59	6,90	64,50	100,00
Kota Bukittinggi	19,27	4,45	76,28	100,00
Kota Payakumbuh	17,87	5,82	76,30	100,00
Kota Pariaman	20,80	6,17	73,03	100,00
Sumatera Barat	16,27	5,92	77,81	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Pada tabel 45 diatas, terlihat bahwa 77,81 persen anak usia 0-6 tahun di Sumatera Barat tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Artinya 8 dari 10 anak pada usia tersebut tidak/belum pernah mengikuti prasekolah. Sedangkan yang pernah mengikuti prasekolah untuk kelompok yang masih/pernah mengikuti prasekolah sebesar 22,19 persen.

Tabel 46 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Taman Kanak- Kanak Kindergarten	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll ECD Post/Hi ECD, BKB/Posyandu, etc	Kelompok Bermain Playgroup	Taman Penitipan Anak Child Day Care	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	70,84	-	28,47	0,68	-	100,00
Kab. Pesisir Selatan	78,92	2,65	18,43	-	-	100,00
Kab. Solok	68,21	1,13	29,61	1,04	-	100,00
Kab. Sijunjung	69,15	1,42	28,52	0,91	-	100,00
Kab. Tanah Datar	68,16	6,84	18,42	6,58	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	67,73	4,93	25,49	1,85	-	100,00
Kab. Agam	92,56	1,96	5,49	-	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	82,34	1,46	15,64	-	0,56	100,00
Kab. Pasaman	58,63	1,58	39,80	-	-	100,00
Kab. Solok Selatan	80,58	5,50	13,91	-	-	100,00
Kab. Dharmasraya	79,68	5,94	14,38	-	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	88,96	-	7,00	-	4,04	100,00
Kota Padang	78,22	3,38	14,74	3,66	-	100,00
Kota Solok	56,31	1,51	42,18	-	-	100,00
Kota Sawahlunto	62,15	1,90	35,95	-	-	100,00
Kota Padang Panjang	50,89	1,36	37,03	-	10,71	100,00
Kota Bukittinggi	85,63	2,32	5,92	1,45	4,68	100,00
Kota Payakumbuh	67,85	-	25,55	2,11	4,50	100,00
Kota Pariaman	70,69	-	27,43	0,79	1,09	100,00
Sumatera Barat	75,80	2,56	19,50	1,24	0,89	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Tabel 47 Persentase Anak Usia Dini Yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	27,07	25,92	25,87	26,76	26,31
Sumatera Utara	20,75	20,73	20,60	20,88	20,74
Sumatera Barat	23,03	21,40	21,99	22,39	22,19
Riau	20,02	22,13	20,26	22,38	21,29
Jambi	25,42	26,95	27,50	25,35	26,45
Sumatera Selatan	20,37	23,52	23,55	21,12	22,37
Bengkulu	23,30	20,86	21,22	22,09	21,65
Lampung	26,32	22,92	23,76	24,30	24,03
Kep. Bangka Belitung	25,80	24,43	26,01	24,35	25,21
Kepulauan Riau	19,80	28,84	18,14	23,30	20,66
DKI Jakarta	28,74	-	27,93	29,58	28,74
Jawa Barat	24,60	24,57	24,88	24,30	24,60
Jawa Tengah	36,04	33,64	34,40	35,43	34,91
DI Yogyakarta	40,90	53,21	45,55	41,90	43,80
Jawa Timur	39,34	35,67	37,69	37,84	37,76
Banten	24,46	17,84	22,10	23,73	22,90
Bali	23,71	17,68	21,51	22,73	22,12
Nusa Tenggara Barat	28,87	30,71	29,68	29,87	29,77
Nusa Tenggara Timur	24,61	27,24	26,53	26,74	26,63
Kalimantan Barat	15,98	17,56	18,13	15,84	17,00
Kalimantan Tengah	25,66	28,86	28,88	26,04	27,51
Kalimantan Selatan	30,45	33,24	31,04	32,72	31,87
Kalimantan Timur	20,41	24,88	20,64	23,04	21,82
Kalimantan Utara	21,37	24,30	22,17	22,64	22,41
Sulawesi Utara	22,94	28,33	25,71	25,32	25,52
Sulawesi Tengah	26,30	30,49	30,82	27,42	29,17
Sulawesi Selatan	23,14	23,77	23,75	23,19	23,48
Sulawesi Tenggara	25,75	26,41	25,83	26,51	26,17
Gorontalo	33,24	38,65	35,88	36,86	36,36
Sulawesi Barat	35,20	31,30	32,22	31,95	32,09
Maluku	20,56	27,76	24,44	25,39	24,90
Maluku Utara	23,33	30,36	27,67	29,26	28,47
Papua Barat	22,61	22,47	21,63	23,44	22,52
Papua	17,00	10,62	12,77	12,76	12,76
Indonesia	27,67	26,99	27,30	27,46	27,38

Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

4.3.1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini

Keberhasilan program pemerintah pada penyelenggaraan PAUD dalam rangka memperluas kesempatan mengenyam pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Dibandingkan angka partisipasi prasekolah, indikator APK PAUD memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai partisipasi prasekolah anak usia dini karena kelompok umur yang dilibatkan dalam penghitungan diperpendek dengan cakupan umur 3-6 tahun.

Pada tahun 2023, APK PAUD tercatat sebesar 36,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 3-6 tahun di Indonesia, baru sekitar 36 anak yang bersekolah pada tahapan PAUD. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2022 yang sempat menurun akibat terjadi pandemi Covid-19, dimana banyak orangtua cenderung tidak mendaftarkan ke jenjang PAUD (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Meskipun demikian, capaian APK PAUD tahun 2023 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 (2019-2020).

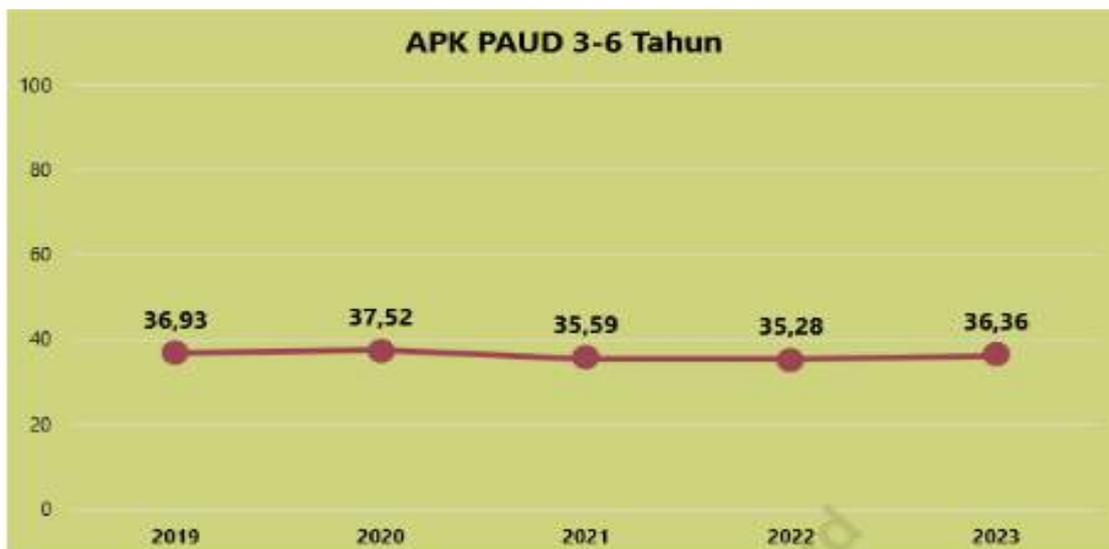
Kebijakan pemerintah untuk perluasan dan pemerataan PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD tampaknya cukup efektif. Hal ini tergambar dari tidak jauhnya disparitas antara APK PAUD daerah perkotaan dan perdesaan. Seperti yang terlihat gambar 16, di mana APK PAUD di perkotaan tercatat sebesar 36,83 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 35,71 persen.

Dibandingkan angka partisipasi prasekolah, indikator APK PAUD memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai partisipasi prasekolah anak usia dini karena kelompok umur yang dilibatkan dalam penghitungan diperpendek dengan cakupan umur 3-6 tahun. APK PAUD dihitung dari perbandingan penduduk umur 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah dan jumlah penduduk umur 3-6 tahun. Selain itu, jenis prasekolah yang dipertimbangkan adalah TK/RA/BA dan PAUD sejenis. Penghitungan indikator ini mengeluarkan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak sebagai jenis prasekolah.

Anak usia dini penyandang disabilitas masih banyak yang belum mengakses pendidikan. Disamping sekolah luar biasa dan sekolah inklusi

yang jumlahnya terbatas, juga masih ditemui penolakan terhadap anak penyandang disabilitas. Adanya keterbatasan pada anak penyandang disabilitas dirasa ikut menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam mengikuti layanan PAUD. Seperti yang terlihat pada gambar 17, APK PAUD anak penyandang disabilitas sekitar sepuluh persen lebih rendah dibanding bukan penyandang disabilitas (25,85 persen berbanding 36,42 persen)

Gambar 16 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun, 2019-2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 17 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun menurut Karakteristik Demografi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 48 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,08	34,18	33,63
Sumatera Utara	24,13	25,28	24,72
Sumatera Barat	28,78	27,81	28,31
Riau	20,09	20,98	20,50
Jambi	35,55	27,07	31,68
Sumatera Selatan	23,48	19,17	21,43
Bengkulu	29,28	22,88	25,90
Lampung	34,57	39,70	37,10
Kep. Bangka Belitung	38,05	32,68	35,60
Kep. Riau	26,30	28,52	27,34
DKI Jakarta	39,81	35,37	37,52
Jawa Barat	33,44	33,62	33,52
Jawa Tengah	50,60	48,49	49,56
DI Yogyakarta	60,80	58,40	59,72
Jawa Timur	55,45	54,63	55,04
Banten	27,96	29,70	28,83
Bali	33,50	30,59	32,04
Nusa Tenggara Barat	45,54	42,25	43,92
Nusa Tenggara Timur	31,99	27,88	30,13
Kalimantan Barat	28,02	13,40	21,05
Kalimantan Tengah	34,32	33,27	33,81
Kalimantan Selatan	40,46	45,17	42,79
Kalimantan Timur	22,35	28,90	25,55
Kalimantan Utara	34,91	29,05	31,55
Sulawesi Utara	26,52	27,35	26,91
Sulawesi Tengah	36,89	28,88	33,06
Sulawesi Selatan	33,21	31,69	32,47
Sulawesi Tenggara	29,68	32,54	31,22
Gorontalo	48,47	43,70	45,86
Sulawesi Barat	50,57	52,63	51,53
Maluku	23,11	25,76	24,37
Maluku Utara	36,07	26,78	31,03
Papua Barat	26,07	24,01	25,05
Papua	19,09	17,51	18,32
Indonesia	37,20	36,45	36,83

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 49 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,70	32,71	31,71
Sumatera Utara	23,93	21,44	22,72
Sumatera Barat	27,41	30,97	29,20
Riau	23,34	27,49	25,36
Jambi	33,11	32,49	32,81
Sumatera Selatan	31,55	25,57	28,66
Bengkulu	26,92	30,08	28,37
Lampung	31,39	28,78	30,08
Kep. Bangka Belitung	25,21	31,59	28,54
Kep. Riau	31,81	34,60	33,45
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	35,40	35,09	35,25
Jawa Tengah	45,11	47,32	46,20
DI Yogyakarta	73,90	73,06	73,51
Jawa Timur	51,58	51,40	51,49
Banten	21,01	27,21	23,93
Bali	23,96	28,27	26,08
Nusa Tenggara Barat	41,61	45,66	43,62
Nusa Tenggara Timur	35,79	35,64	35,72
Kalimantan Barat	22,46	22,17	22,32
Kalimantan Tengah	36,90	36,19	36,57
Kalimantan Selatan	46,23	46,08	46,15
Kalimantan Timur	28,29	31,67	29,91
Kalimantan Utara	33,52	40,48	36,94
Sulawesi Utara	33,21	37,80	35,38
Sulawesi Tengah	39,84	37,55	38,75
Sulawesi Selatan	29,31	32,27	30,80
Sulawesi Tenggara	36,49	34,68	35,61
Gorontalo	50,26	58,32	53,94
Sulawesi Barat	41,28	47,61	44,29
Maluku	34,63	36,47	35,53
Maluku Utara	40,63	41,71	41,19
Papua Barat	23,78	28,31	26,04
Papua	9,37	9,42	9,39
Indonesia	35,40	36,03	35,71

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 50 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,52	33,21	32,36
Sumatera Utara	24,03	23,53	23,78
Sumatera Barat	28,10	29,41	28,75
Riau	21,97	24,92	23,37
Jambi	33,93	30,74	32,44
Sumatera Selatan	28,55	23,23	25,99
Bengkulu	27,63	27,47	27,55
Lampung	32,46	32,38	32,42
Kep. Bangka Belitung	32,90	32,17	32,55
Kep. Riau	26,74	29,27	27,95
DKI Jakarta	39,81	35,37	37,52
Jawa Barat	33,81	33,90	33,85
Jawa Tengah	48,02	47,94	47,98
DI Yogyakarta	63,91	62,04	63,06
Jawa Timur	53,82	53,26	53,54
Banten	26,33	29,16	27,72
Bali	31,05	30,01	30,53
Nusa Tenggara Barat	43,58	43,95	43,77
Nusa Tenggara Timur	34,83	33,89	34,38
Kalimantan Barat	24,47	19,12	21,87
Kalimantan Tengah	35,85	34,92	35,41
Kalimantan Selatan	43,38	45,63	44,49
Kalimantan Timur	24,24	29,76	26,92
Kalimantan Utara	34,36	32,71	33,46
Sulawesi Utara	29,71	32,40	30,98
Sulawesi Tengah	38,91	34,80	36,95
Sulawesi Selatan	31,16	32,01	31,58
Sulawesi Tenggara	34,09	33,82	33,95
Gorontalo	49,58	51,46	50,51
Sulawesi Barat	43,25	48,64	45,80
Maluku	30,01	32,32	31,13
Maluku Utara	39,43	37,42	38,38
Papua Barat	24,67	26,66	25,66
Papua	12,16	11,72	11,94
Indonesia	36,44	36,27	36,36

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

4.3.2 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partisipasi murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu.

Tabel 51 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,77	33,70	33,23
Sumatera Utara	24,13	25,11	24,63
Sumatera Barat	28,51	27,66	28,10
Riau	20,09	20,98	20,50
Jambi	35,55	27,07	31,68
Sumatera Selatan	22,79	19,17	21,07
Bengkulu	29,28	22,07	25,46
Lampung	33,86	38,36	36,08
Kep. Bangka Belitung	38,05	32,68	35,60
Kep. Riau	26,30	28,44	27,30
DKI Jakarta	39,56	35,37	37,40
Jawa Barat	33,18	32,90	33,05
Jawa Tengah	49,74	48,18	48,97
DI Yogyakarta	59,71	56,51	58,27
Jawa Timur	54,96	54,03	54,50
Banten	27,96	29,39	28,67
Bali	33,50	30,37	31,93
Nusa Tenggara Barat	44,83	41,81	43,34
Nusa Tenggara Timur	31,99	27,88	30,13
Kalimantan Barat	27,67	13,40	20,87
Kalimantan Tengah	34,32	33,27	33,81
Kalimantan Selatan	40,46	44,34	42,38
Kalimantan Timur	22,04	28,77	25,33
Kalimantan Utara	34,91	29,05	31,55
Sulawesi Utara	26,52	27,35	26,91
Sulawesi Tengah	36,89	28,88	33,06
Sulawesi Selatan	33,07	31,69	32,41
Sulawesi Tenggara	29,21	32,54	31,01
Gorontalo	47,39	43,47	45,24
Sulawesi Barat	49,80	52,60	51,10
Maluku	23,10	24,11	23,58
Maluku Utara	35,82	26,78	30,91
Papua Barat	25,69	23,60	24,66
Papua	19,09	15,79	17,48
Indonesia	36,87	36,01	36,45

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 52 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,48	32,14	31,31
Sumatera Utara	23,59	20,91	22,29
Sumatera Barat	27,35	30,72	29,05
Riau	23,34	26,68	24,96
Jambi	32,99	32,31	32,67
Sumatera Selatan	31,22	25,20	28,30
Bengkulu	26,75	30,05	28,26
Lampung	31,39	28,78	30,08
Kep. Bangka Belitung	24,36	31,59	28,14
Kep. Riau	31,43	34,22	33,08
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	35,18	34,88	35,04
Jawa Tengah	44,82	47,27	46,03
DI Yogyakarta	69,35	68,31	68,87
Jawa Timur	50,44	50,52	50,48
Banten	20,64	27,04	23,65
Bali	23,96	27,41	25,65
Nusa Tenggara Barat	41,03	45,09	43,04
Nusa Tenggara Timur	34,38	34,44	34,41
Kalimantan Barat	22,43	21,70	22,07
Kalimantan Tengah	36,16	36,05	36,11
Kalimantan Selatan	45,07	45,64	45,35
Kalimantan Timur	28,29	31,61	29,88
Kalimantan Utara	33,46	40,10	36,72
Sulawesi Utara	33,21	37,21	35,10
Sulawesi Tengah	39,09	37,06	38,12
Sulawesi Selatan	29,10	32,14	30,63
Sulawesi Tenggara	36,17	33,86	35,05
Gorontalo	48,92	53,30	50,92
Sulawesi Barat	40,62	47,03	43,67
Maluku	33,60	35,09	34,33
Maluku Utara	40,16	41,31	40,76
Papua Barat	23,24	27,93	25,59
Papua	9,32	9,35	9,33
Indonesia	34,92	35,55	35,23

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 53 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,27	32,67	31,97
Sumatera Utara	23,87	23,19	23,53
Sumatera Barat	27,94	29,21	28,57
Riau	21,97	24,43	23,14
Jambi	33,86	30,61	32,34
Sumatera Selatan	28,08	23,00	25,64
Bengkulu	27,51	27,15	27,34
Lampung	32,22	31,94	32,08
Kep. Bangka Belitung	32,55	32,17	32,37
Kep. Riau	26,71	29,15	27,88
DKI Jakarta	39,56	35,37	37,40
Jawa Barat	33,55	33,29	33,43
Jawa Tengah	47,42	47,75	47,59
DI Yogyakarta	62,00	59,44	60,84
Jawa Timur	53,05	52,54	52,80
Banten	26,24	28,88	27,53
Bali	31,05	29,63	30,34
Nusa Tenggara Barat	42,94	43,45	43,19
Nusa Tenggara Timur	33,78	32,96	33,39
Kalimantan Barat	24,33	18,81	21,64
Kalimantan Tengah	35,41	34,84	35,14
Kalimantan Selatan	42,79	44,99	43,88
Kalimantan Timur	24,03	29,65	26,76
Kalimantan Utara	34,33	32,59	33,39
Sulawesi Utara	29,71	32,11	30,84
Sulawesi Tengah	38,39	34,46	36,52
Sulawesi Selatan	30,99	31,94	31,46
Sulawesi Tenggara	33,72	33,33	33,52
Gorontalo	48,34	48,69	48,51
Sulawesi Barat	42,57	48,18	45,22
Maluku	29,38	30,84	30,09
Maluku Utara	39,02	37,14	38,04
Papua Barat	24,20	26,27	25,23
Papua	12,12	11,18	11,66
Indonesia	36,05	35,81	35,93

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Ketepatan waktu dalam partisipasi sekolah bukan merupakan isu utama dalam agenda pendidikan di Indonesia. Adanya disparitas pada nilai APM mengindikasikan bahwa disparitas pada jenjang pendidikan tersebut.

Di Sumatera Barat, terdapat range selisih sebesar 0,95 persen antara perkotaan dan perdesaan. Ini menggambarkan masyarakat lebih banyak memberikan pendidikan pra sekolah kepada putra putri mereka. Untuk itu diperlukan alokasi dana desa untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan pra sekolah yang memadai di daerah perdesaan. Ketersediaan infrastruktur pendukung dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung kesiapan bersekolah bagi anak. Perkotaan yang notabene mempunyai keunggulan dalam hal sarana dan prasarana serta didukung dengan akses teknologi dan informasi yang lebih berkualitas menjadi faktor pendorong warganya untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan pendidikan prasekolah. Disisi lain, kurangnya fasilitas diperdesaan dan akses terhadap teknologi serta informasi masih menjadi permasalahan bagi anak untuk dapat mengikuti pendidikan prasekolah. Terlebih pendidikan di masa pandemi yang cenderung bergantung pada penggunaan sarana teknologi informasi.

4.3.3 Angka Kesiapan Sekolah

Pemerintah telah memberikan jaminan/kepastian usia anak untuk masuk dalam pendidikan anak usia dini yakni usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan kewajiban orang tua untuk mempersiapkan masa depan anak dari berbagai segi mulai dari perkembangan psikologis, kognitif, sosial emosional, fisik dan motorik serta bahasanya.

Anak selalu melewati masa peralihan ketika tumbuh dan berkembang. Masa peralihan anak menuju lingkungan sosial yang lebih luas dilalui ketika anak beralih dari lingkungan keluarga menuju lingkungan sekolah. Pemahaman yang komprehensif terkait dengan indikator kesiapan anak untuk masuk ke Sekolah Dasar dapat membantu orang tua dan masyarakat

secara keseluruhan dalam menentukan keputusan untuk mulai memasukkan anak dalam jenjang pendidikan dasar. Kesiapan sekolah mencakup dua karakteristik yaitu transisi dan peningkatan kompetensi anak. Kesiapan sekolah tidak hanya menyangkut anak, namun juga terkait pada tiga dimensi kesiapan sekolah, antara lain:

1. Kesiapan anak yang mengarah pada kesiapan anak untuk tumbuh dan berkembang
2. Kesiapan sekolah yang mengarah pada lingkungan sekolah beserta praktik- praktik pendidikan yang akan mengasuh dan mendukung kelancaran masa transisi anak dalam memasuki pendidikan dasar dan lanjutan, serta mendukung proses belajar anak
3. Kesiapan keluarga yang mengarah pada sikap keluarga/pengasuh dan keterlibatannya dalam proses pembelajaran dini anak, serta perkembangan dan transisi anak dari lingkungan rumah ke sekolah

Kesiapan bersekolah erat kaitannya dengan proses transisi anak ke jenjang berikutnya. Kesiapan sekolah anak dapat diukur melalui matangnya aspek perkembangan yang akan membantu anak dalam proses pembelajaran dan penyesuaian dirinya di lingkungan sekolah (Pratiwi, 2018). Sejalan dengan itu,

Anak yang telah siap secara sosial akan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Sementara itu, anak yang belum memiliki kesiapan justru akan frustrasi bila ditempatkan di lingkungan akademis

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat). yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana anak mempersiapkan dirinya ketika akan menuju jenjang pendidikan dasar (SD/ Sederajat). Indikator AKS merupakan proporsi siswa yang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang duduk di kelas 1 SD.

Sehubungan dengan adanya Program PAUD Satu Tahun Pra-SD, pendidikan prasekolah diharapkan dapat mendukung kesiapan anak-anak

untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan formal. Indikator pendidikan yang bersesuaian dengan isu ini adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini melihat seberapa besar anak-anak yang saat ini menduduki kelas 1 sekolah dasar telah mengenyam pendidikan prasekolah sebelumnya. Jenis pendidikan prasekolah yang dihitung dalam AKS adalah TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya. Angka kesiapan sekolah juga merupakan indikator pendidikan anak usia dini yang disorot dalam dokumen resmi pemerintah, seperti Renstra Kemdikbud 2020-2024, dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI).

Sejak tahun 2019, AKS cenderung stagnan di angka 74 persen. Pada tahun 2019, AKS sebesar 74,80 persen. Kemudian pada tahun 2022, AKS sebesar 74,43 persen. Artinya, sekitar 74 dari 100 siswa kelas 1 SD/ sederajat pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit lonjakan sehingga menjadi 76,65 persen. Ini artinya terjadi penambahan 2 orang siswa dalam 100 siswa kelas 1 SD/ sederajat.

Gambar 18 Angka Kesiapan Sekolah, 2019-2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 54 Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,37	73,38	75,68	76,47	76,08
Sumatera Utara	71,45	62,68	67,14	66,88	67,01
Sumatera Barat	75,71	77,47	77,56	75,41	76,59
Riau	73,09	77,71	74,90	76,77	75,79
Jambi	70,56	70,79	68,95	72,67	70,71
Sumatera Selatan	63,67	64,41	65,16	63,05	64,12
Bengkulu	83,00	74,41	78,60	76,86	77,72
Lampung	85,20	84,94	84,87	85,18	85,03
Kep. Bangka Belitung	82,32	88,85	84,02	87,18	85,45
Kep. Riau	85,43	63,17	81,52	83,38	82,57
DKI Jakarta	83,93	-	80,92	86,97	83,93
Jawa Barat	76,56	67,79	74,29	75,38	74,84
Jawa Tengah	89,52	90,70	89,70	90,43	90,08
DI Yogyakarta	100,00	99,28	99,66	100,00	99,82
Jawa Timur	92,23	90,80	91,57	91,65	91,61
Banten	70,49	44,74	67,24	61,02	64,52
Bali	86,01	70,72	77,70	85,67	82,12
Nusa Tenggara Barat	72,62	63,80	68,55	67,21	67,88
Nusa Tenggara	55,09	54,43	51,16	58,10	54,59
Kalimantan Barat	39,90	36,73	32,81	42,63	37,87
Kalimantan Tengah	84,70	77,84	72,98	89,64	80,79
Kalimantan Selatan	92,19	90,16	90,36	91,89	91,10
Kalimantan Timur	78,13	85,08	85,16	73,95	80,42
Kalimantan Utara	82,46	64,99	75,95	74,46	75,30
Sulawesi Utara	83,79	78,21	80,55	82,22	81,35
Sulawesi Tengah	73,47	81,43	77,45	80,61	78,93
Sulawesi Selatan	68,54	67,24	64,80	71,64	67,80
Sulawesi Tenggara	83,15	75,67	79,81	76,81	78,47
Gorontalo	91,18	91,16	95,57	86,92	91,17
Sulawesi Barat	74,65	67,05	74,65	62,50	68,51
Maluku	57,76	54,04	58,45	51,39	55,36
Maluku Utara	48,84	51,14	55,00	47,18	50,63
Papua Barat	66,46	42,31	50,38	51,12	50,72
Papua	56,08	26,84	33,46	39,77	36,42
Indonesia	79,28	72,99	75,99	77,12	76,54

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Indikator Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dimaknai sebagai persentase anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD. Pada tahun 2023, capaian AKS meningkat dibanding tahun sebelumnya (Gambar 18). Tercatat ada 76,65 persen anak yang menduduki kelas 1 SD/ sederajat pernah mengikuti Pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya. Secara nasional indikator AKS juga sudah melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebesar 72,77 persen.

Sebagian besar anak di Indonesia telah mempunyai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan di SD/ sederajat sebagaimana ditunjukkan melalui gambar dibawah ini yakni AKS anak mencapai 76,65. Meskipun demikian, masih terdapat 23,35 persen atau 1 dari 4 anak usia dini yang saat ini duduk di kelas 1 SD namun sebelumnya tidak mengikuti pendidikan prasekolah. Fakta tersebut tidak dapat diabaikan dan harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah, dalam hal ini stakeholder terkait, untuk mendorong keikutsertaan anak dalam pendidikan usia dini sebagai bekal memasuki tahapan pendidikan selanjutnya.

Di Provinsi Sumatera Barat, AKS mencapai 76,59 poin. Ini diasumsikan bahwa masih terdapat 23,41 yang tidak siap memasuki pendidikan formal. AKS laki-laki 77,56 persen lebih tinggi dibandingkan AKS perempuan yaitu sebesar 75,41. Ini mengasumsikan bahwa anak laki-laki lebih siap memasuki tahapan pendidikan selanjutnya dibandingkan anak perempuan.

Ketersediaan infrastruktur pendukung dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung kesiapan bersekolah bagi anak. Perkotaan yang notabene mempunyai keunggulan dalam hal sarana dan prasarana serta didukung dengan akses teknologi dan informasi yang lebih berkualitas menjadi faktor pendorong warganya untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan pendidikan prasekolah. Disisi lain, kurangnya fasilitas dipedesaan dan akses terhadap teknologi serta informasi masih menjadi permasalahan bagi anak untuk dapat mengikuti pendidikan prasekolah. Terlebih pendidikan di masa pandemi yang cenderung bergantung pada penggunaan sarana teknologi informasi.

4.4 PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu dan memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyiapkan program unggulan untuk mengatasi masalah ini berupa Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

PUSPAGA sebagai layanan keluarga preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak. PUSPAGA dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi, bimbingan konseling atau pekerja sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan Informasi.

PUSPAGA berada di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Targetnya disetiap provinsi dan Kabupaten/kota minimal memiliki 1 (satu) PUSPAGA.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan. Selain sebagai unit layanan, PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Layanan PUSPAGA berfungsi

sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak.

Berdasarkan data KemenPPA tahun 2021, saat ini telah terbentuk 135 PUSPAGA yang tersebar di 12 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota. Namun keberadaan PUSPAGA masih harus ditingkatkan, karena secara keseluruhan 35% provinsi dan 23% Kabupaten/Kota yang telah memiliki PUSPAGA. Kondisi pada Oktober 2020, ada penambahan beberapa daerah sehingga sudah terdapat 149 PUSPAGA yang tersebar di 12 Provinsi dan 134 Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 (lima) PUSPAGA yang tersebar pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 Kota

4.5 RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan ruang/ tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

Keberadaan RBRA penting bagi anak, karena mempunyai fungsi:

1. Mengembangkan kecerdasan intelektualitas dan pengetahuan
2. Menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial
3. Mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan serta daya simpatik dan asimpatik (reflek) sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran
4. Mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa.

Bermain memiliki manfaat sangat penting bagi anak, diantaranya adalah sebagai terapi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa, kesadaran diri, kreatifitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter anak.

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandarisasi dan tersertifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan Ruang Bermain Ramah Anak, ada 13 persyaratan standar yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan lokasi, pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, pengkondisian udara/penghawaan, tempat dan peralatan/perabot bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, pencahayaan dan pengelolaan.

Berdasarkan data Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, di Provinsi Sumatera Barat telah ada 6 (enam) Ruang bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersertifikasi yaitu:

**Tabel 55 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
Di Sumatera Barat, 2023**

Nama dan Lokasi RBRA	Kab/Kota
Taman SBY di depan Taman Makam Pahlawan Gulai Bancah	Kota Bukittinggi
Taman Lembuti depan Polres Padang Panjang	Kota Padang Panjang
Karimata di Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar	Kota Sawahlunto
Taman Syekh Kukut	Kota Solok
Pantai Cermin	Kota Pariaman

Sumber: Kemen PPPA, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, 2023

BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Salah satu arahan utama Presiden dalam rangka pelaksanaan misi Nawacita serta pencapaian Visi Indonesia 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, faktor kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis (UU 36 tahun 2009). Anak sebagai seorang individu yang harus dipenuhi haknya, salah satunya adalah hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social (UU no.4 tahun 1979). Dalam Konvensi Hak Anak (pasal 24) tertuang bahwa anak berhak menikmati status kesehatan tertinggi dalam perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dapat terwujud dengan adanya dukungan layanan kesehatan yang optimal bagi anak serta peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri dalam menanggulangi masalah kesehatan anak, yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan terbagi dalam 2 aspek pemenuhan hak anak, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan dasar dan kesejahteraan mencakup perlindungan hak anak yaitu: hak menggunakan fasilitas kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, hak untuk dijaga kesehatannya, serta hak mendapatkan perawatan agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Yang termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

1. Persalinan di Faskes
2. Mempunyai status gizi normal
3. Mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang
4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
5. Air Minum dan Sanitasi
6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS Rokok)

Keenam indikator ini harus diupayakan capaiannya oleh semua stakeholder baik pemerintah maupun lembaga masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga profesi, akademisi, media dan masyarakat perorangan atau kelompok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pasal 8 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual. Selain itu, pasal 23 ayat (1) pada undang-undang yang sama juga menyatakan Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

5.1 PENOLONG PERSALINAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Ayat 1 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Hal ini untuk menjamin agar anak dapat dilahirkan dengan selamat, aman, dan sehat. Fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai akan mendukung proses kelahiran anak. Selain itu tenaga kesehatan dapat mengantisipasi serta mengambil tindakan jika terjadi sesuatu selama proses kelahiran anak

Untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis,

karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Persalinan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan ibu dan bayinya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan dan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok desa dengan cara menempatkan bidan di desa-desa.

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan

Menurut WHO (2020), penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu di banyak negara seringkali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak

kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

Untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis, karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Persalinan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan ibu dan bayinya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan dan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok desa dengan cara menempatkan bidan di desa-desa.

Pemilihan tenaga penolong persalinan merupakan salah satu faktor penting dalam persalinan. Tenaga penolong persalinan merupakan orang yang biasa memeriksa kehamilan atau memberikan pertolongan selama masa persalinan dan masa nifas. Pemilihan penolong persalinan yang memiliki kapasitas yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya kejadian fatal dalam persalinan. Selain itu, kelengkapan fasilitas persalinan dapat membantu penolong persalinan untuk menjamin kesehatan ibu dan bayinya, semakin lengkap fasilitas yang tersedia tentunya akan semakin tinggi peluang untuk menjamin keselamatan keduanya.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat popularitas rumah sakit dan rumah bersalin/klinik terlihat menonjol di daerah perkotaan, sementara itu puskesmas, peskesmas pembantu dan polindes/poskesdes populer di daerah perdesaan. Hal ini mudah dipahami mengingat bahwa keberadaan fasilitas kesehatan tersebut. Rumah sakit pemerintah/ swasta dan rumah bersalin identik dengan penolong proses kelahiran di daerah

perkotaan, yaitu sebanyak 40,15 persen persalinan di lakukan di rumah sakit pemerintah/ swasta dan 34,83 persen persalinan dilakukan di rumah bersalin/klinik.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa penolong persalinan perempuan di Sumatera Barat didominasi oleh perawat/bidan baik di tahun 2020, 2021, 2022 maupun di tahun 2023. Bila dibandingkan dalam empat tahun terakhir, tahun 2020-2023 terjadi fluktuatif besaran berupa peningkatan dan penurunan. Hanya untuk tenaga dokter yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk penolong persalinan bidan, perawat dan dukun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan yang terkecil adalah penolong persalinan lainnya.

Tabel 56 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Berdasarkan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Penolong Proses Kelahiran	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tenaga Medis	43,06	45,73	45,21	47,61
Perawat/Bidan	54,23	52,13	52,79	50,86
Non Tenaga Kesehatan	2,71	2,14	2,00	1,53

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada tahun 2023 terjadi peningkatan penolong persalinan terakhir yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter kandungan dan dokter umum). Pada tahun 2023, tercatat 47,61 persen kelahiran dibantu oleh tenaga medis (dokter kandungan maupun dokter umum), terjadi peningkatan sebesar 2,40 persen poin dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang mencapai sekitar 45,21 persen. Pada tahun 2023 prevalensi terhadap tenaga penolong kesehatan kelompok perawat/bidan mengalami penurunan menjadi 50,86 persen dari sebelumnya sekitar 52,79 persen pada tahun 2022. Hal yang cukup

menggembirakan terlihat dari menurunnya prevalensi terhadap tenaga penolong kelahiran kelompok non tenaga kesehatan menjadi 1,53 persen di tahun 2023, menurun sekitar 0,47 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Non tenaga kesehatan yang dimaksudkan meliputi perawat, dukun beranak/paraji, dan lainnya.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat.

Jika dilihat dari fasilitas atau tempat yang dipilih dalam melahirkan anak lahir hidup yang terakhir, Tabel 57 menunjukkan peningkatan prevalensi untuk melahirkan di fasilitas kesehatan menjadi 95,93 persen yang sebelumnya hanya mencapai 95,83 di tahun 2022. Fasilitas Kesehatan tempat melahirkan anak lahir hidup meliputi Rumah Sakit/RS Bersalin, rumah bersalin/klinik, Puskesmas/Pustu, dan Praktik Nakes/Polindes/Poskesdes. Dengan tingginya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis ditambah dengan fasilitas kesehatan yang sesuai standar tentunya diharapkan akan semakin memperkecil angka kematian ibu dan bayi saat dan pascapersalinan.

Tabel 57 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir (%), 2020-2023

Tempat Melahirkan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitas Kesehatan	94,80	93,22	95,83	95,93
Rumah	5,20	5,22	3,82	3,75
Lainnya	0,00	1,56	0,35	0,32

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Tabel 58 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Persalinan ALH yang Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Dokter Kandungan Obstetrician	Dokter Umum General Practitioner	Bidan Midwife	Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya Nurse and Other Health Workers	Dukun Beranak/ Paraji dan Lainnya Traditional Birth Attendance and Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	NA	NA	55,85	NA	20,11	100,00
Kab. Pesisir Selatan	42,29	NA	55,85	-	-	100,00
Kab. Solok	47,50	NA	48,21	-	NA	100,00
Kab. Sijunjung	46,36	NA	44,29	-	NA	100,00
Kab. Tanah Datar	63,71	-	36,29	-	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	42,74	-	53,96	-	NA	100,00
Kab. Agam	50,97	-	49,03	-	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	33,01	8,92	58,07	-	-	100,00
Kab. Pasaman	31,79	NA	64,70	-	NA	100,00
Kab. Solok Selatan	20,52	-	63,11	NA	11,63	100,00
Kab. Dharmasraya	56,06	NA	36,26	-	NA	100,00
Kab. Pasaman Barat	37,45	10,88	51,14	NA	NA	100,00
Kota Padang	48,39	-	48,58	NA	-	100,00
Kota Solok	69,14	-	30,86	-	-	100,00
Kota Sawahlunto	64,04	NA	27,24	-	-	100,00
Kota Padang Panjang	42,99	-	57,01	-	-	100,00
Kota Bukittinggi	50,49	NA	46,71	-	-	100,00
Kota Payakumbuh	39,79	NA	58,09	NA	-	100,00
Kota Pariaman	54,80	-	45,20	-	-	100,00
Sumatera Barat	44,62	2,99	50,05	NA	1,50	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Penolong persalinan tenaga medis tertinggi berada di Kota Solok sebesar 100 persen, sedangkan penolong persalinan dengan tenaga bidan terbesar berada di Kabupaten Pasaman (64,70%). Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penolong persalinan berupa non kesehatan masih sangat tinggi yang mencapai 20,11 persen. Ini mendeskripsikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut masih ada asumsi masyarakat untuk melahirkan dengan dibantu oleh non kesehatan tidak akan menimbulkan permasalahan. Mereka masih mendewakan sikerei nya dalam membantu

proses persalinan. Hal inilah yang harus diatasi oleh Pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan merubah pola pikir masyarakat. Pemberian advokasi melalui tokoh masyarakat, tokoh adat sangat diperlukan dalam penanganan kasus ini.

Upaya pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari persentase perempuan pernah kawin yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir di Sumatera Barat, jumlah yang di tolong tenaga lainnya hampir tidak ada. Sementara jumlah yang melahirkan dirumah hanya berkisar lima persen.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat popularitas Rumah sakit dan rumah bersalin terlihat menonjol di daerah perkotaan, sementara puskesmas, puskesmas pembantu dan praktik kesehatan populer di daerah perdesaan. Hal ini mudah dipahami mengingat bahwa keberadaan fasilitas kesehatan bersangkutan. Rumah sakit atau rumah bersalin identik dengan penolong proses kelahiran di daerah perkotaan seperti terlihat dalam tabel 59 berikut ini.

Berdasarkan data tahun 2023, perempuan yang berusia 15-49 tahun cenderung melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 96,25 persen. Ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan baik rumah sakit/rumah sakit bersalin/rumah bersalin/klinik, praktek nakes/polindes/poskesdes lebih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tempat persalinan. Kesadaran masyarakat untuk mempergunakan fasilitas kesehatan dinilai sudah cukup tinggi. Meskipun melahirkan di rumah masih ada sebesar 3,75 persen

Untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis, karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Persalinan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan ibu dan bayinya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan dan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok desa dengan cara menempatkan bidan di desa-desa.

Tabel 59 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	RS Pemerintah/ RS Swasta Public Hospital/ Private Hospital	Rumah Bersalin/ Klinik Maternity Clinic/Clinic	Puskesmas Community Health Center	Puskesmas Pembantu (Pustu) Subsidiary Health Center	Praktik Tenaga Kesehatan Health Workers Clinic	Polindes/ Poskesdes Village Maternity Post/ Village Health Post	Rumah dan Lainnya At Home and Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Kepulauan Mentawai	NA	NA	27,63	NA	-	-	55,57	100,00
Kab. Pesisir Selatan	31,57	15,27	NA	NA	32,48	11,66	-	100,00
Kab. Solok	26,51	31,38	NA	9,61	20,19	NA	8,46	100,00
Kab. Sijunjung	25,38	27,77	17,82	11,50	NA	8,81	5,52	100,00
Kab. Tanah Datar	54,18	16,86	NA	NA	23,92	NA	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	33,44	30,77	NA	-	22,80	6,34	NA	100,00
Kab. Agam	36,90	25,04	13,64	9,10	14,80	NA	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	26,14	25,83	9,96	6,55	18,78	9,79	NA	100,00
Kab. Pasaman	33,24	18,05	3,51	4,71	9,93	21,94	8,62	100,00
Kab. Solok Selatan	NA	10,21	25,11	NA	24,53	NA	14,06	100,00
Kab. Dharmasraya	34,87	31,99	NA	NA	7,66	11,06	NA	100,00
Kab. Pasaman Barat	32,56	31,99	9,83	NA	11,89	12,26	NA	100,00
Kota Padang	39,06	31,93	5,68	-	22,33	-	NA	100,00
Kota Solok	42,94	35,37	-	-	21,69	-	-	100,00
Kota Sawahlunto	58,61	25,79	10,38	NA	NA	NA	NA	100,00
Kota Padang Panjang	43,85	42,19	-	-	13,96	-	-	100,00
Kota Bukittinggi	45,08	39,30	NA	-	11,42	-	-	100,00
Kota Payakumbuh	32,56	36,28	NA	NA	24,24	-	-	100,00
Kota Pariaman	56,19	15,40	NA	-	21,07	NA	NA	100,00
Sumatera Barat	34,39	26,56	7,75	3,39	17,78	6,06	3,75	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat popularitas rumah sakit dan rumah bersalin/klinik terlihat menonjol di daerah perkotaan, sementara itu puskesmas, peskesmas pembantu dan polindes/poskesdes populer di daerah perdesaan. Hal ini mudah dipahami mengingat bahwa keberadaan fasilitas kesehatan tersebut. Rumah sakit pemerintah/ swasta dan rumah bersalin identik dengan penolong proses kelahiran di daerah perkotaan,

Tabel 60 Distribusi Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tenaga Kesehatan/ <i>Health Personnel</i>					
	Dokter ¹ <i>Doctor ¹</i>		Bidan <i>Midwife</i>		Tenaga Kesehatan Lainnya/ <i>Other Medical Personnel</i>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	4,30	NA	72,54	55,85	3,94	NA
2. Pesisir Selatan	37,18	44,15	62,11	55,85	0,23	–
3. Solok	38,90	50,10	61,10	48,21	–	–
4. Sijunjung	44,98	53,54	46,74	44,29	–	–
5. Tanah Datar	52,08	63,71	47,92	36,29	–	–
6. Padang Pariaman	39,70	42,74	58,88	53,96	–	–
7. Agam	64,17	50,97	35,68	49,03	–	–
8. Lima Puluh Kota	37,09	41,93	61,04	58,07	0,74	–
9. Pasaman	28,30	33,78	66,67	64,70	2,31	–
10. Solok Selatan	25,21	20,52	67,40	63,11	–	NA
11. Dharmasraya	52,01	61,02	43,82	36,26	0,38	–
12. Pasaman Barat	37,19	48,33	58,20	51,14	–	NA
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	58,62	48,39	41,38	48,58	–	NA
2. Solok	59,72	69,14	40,28	30,86	–	–
3. Sawahlunto	73,66	72,76	25,51	27,24	0,83	–
4. Padang Panjang	42,63	42,99	57,37	57,01	–	–
5. Bukittinggi	42,13	53,29	57,87	46,71	–	–
6. Payakumbuh	40,75	40,40	59,25	58,09	–	NA
7. Pariaman	52,16	54,80	47,84	45,20	–	–
Sumatera Barat	45,21	47,61	52,51	50,05	0,29	NA

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Non Tenaga Kesehatan/Non-Health Personnel				Jumlah Total	
	Dukun Tradisional Birth Attendant		Lainnya ¹ Others ²			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	14,27	20,11	4,95	NA	100,00	100,00
2. Pesisir Selatan	0,48	–	–	–	100,00	100,00
3. Solok	–	NA	–	–	100,00	100,00
4. Sijunjung	8,28	NA	–	–	100,00	100,00
5. Tanah Datar	0,00	–	–	–	100,00	100,00
6. Padang Pariaman	1,42	NA	–	–	100,00	100,00
7. Agam	0,15	–	–	–	100,00	100,00
8. Lima Puluh Kota	1,13	–	–	–	100,00	100,00
9. Pasaman	2,72	NA	–	–	100,00	100,00
10. Solok Selatan	7,39	11,63	–	–	100,00	100,00
11. Dharmasraya	3,79	NA	–	–	100,00	100,00
12. Pasaman Barat	–	NA	4,61	–	100,00	100,00
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	–	–	–	–	100,00	100,00
2. Solok	–	–	–	–	100,00	100,00
3. Sawahlunto	–	–	–	–	100,00	100,00
4. Padang Panjang	–	–	–	–	100,00	100,00
5. Bukittinggi	–	–	–	–	100,00	100,00
6. Payakumbuh	–	–	–	–	100,00	100,00
7. Pariaman	–	–	–	–	100,00	100,00
Sumatera Barat	1,46	1,50	0,53	NA	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Bila dilihat dari tipe daerah, tenaga bidan masih menjadi primadona masyarakat dalam penolong proses persalinan di perdesaan sebesar 56,73 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 48 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan ditolong oleh dokter kandungan. Penolong kelahiran yang ditolong oleh dokter kandungan untuk wilayah perkotaan (49,47 %) lebih besar dibandingkan daerah perdesaan (36,45 %).

Hal menarik lainnya , masih ada penduduk yang melahirkan yang ditolong oleh lainnya (keluarga, teman, tetangga) sebesar 0,49 persen dengan rincian daerah perdesaan 0,25 persen dan daerah perkotaan sebesar 0 persen.

5.2 INISIASI MENYUSUI DINI (IMD)

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah inisiasi seorang ibu yang baru melahirkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam setelah bayi dilahirkan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi dengan nalurnya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 (satu) jam pertama setelah lahir. IMD merupakan meletakkan bayi baru lahir ke payudara dalam 1 jam pertama kehidupan.

IMD sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan untuk memantapkan menyusui dalam jangka panjang. IMD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi, serta meningkatkan keberhasilan kelangsungan pemberian ASI sampai usia anak 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Inisiasi Menyusui Dini dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan dimana terlihat bahwa anak yang tidak diberi IMD 9,17 kali lebih berisiko untuk tidak mendapat ASI Eksklusif.

IMD memiliki beberapa manfaat salah satunya adalah memperkuat hubungan ibu dan bayi, membuat ibu dan bayi lebih tenang dan akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit. Bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya, bayi dibiarkan setidaknya selama 1 (satu) jam di dada ibu, sampai bayi menyusu sendiri. Praktik IMD sangat bermanfaat untuk bayi karena bayi akan mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama dihasilkan oleh ibu. Saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri. ASI yang pertama kali keluar berupa kolostrum sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi karena kaya akan imunoglobulin G, sehingga bayi menjadi lebih kebal dari penyakit. IMD juga dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan, serta mengurangi

terjadinya anemia. Susu ini kaya akan sel imun dan antibodi sehingga dapat meningkatkan daya tahan bayi. Selain itu, adanya sentuhan kulit langsung (skin-to skin contact) selama IMD juga dapat menjadi momen perkenalan untuk memperkuat ikatan batin ibu dengan bayi. Bayi pun bisa merasa semakin nyaman dan dekat dengan ibu, karena bayi bisa terus didekap dan mendengar detak jantung ibu sewaktu menyusui.

Tabel 61 Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan ALH yang Terakhir Dilahirkan Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Kurang dari Dua Jam Setelah Dilahirkan Menurut Provinsi, 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66,83	67,90	69,49
Sumatera Utara	46,19	52,67	56,61
Sumatera Barat	59,04	59,71	62,70
Riau	58,00	56,75	59,14
Jambi	61,24	65,88	64,61
Sumatera Selatan	63,99	60,15	63,82
Bengkulu	56,64	64,22	64,24
Lampung	58,00	63,06	65,74
Kep. Bangka Belitung	62,06	61,96	66,35
Kep. Riau	55,73	61,37	66,58
DKI Jakarta	72,09	67,39	68,86
Jawa Barat	68,89	67,05	68,88
Jawa Tengah	68,34	72,65	69,32
DI Yogyakarta	69,26	70,34	73,59
Jawa Timur	66,02	67,77	69,22
Banten	58,85	64,37	61,52
Bali	57,17	60,83	59,67
Nusa Tenggara Barat	69,30	74,04	68,96
Nusa Tenggara Timur	62,56	63,61	66,65
Kalimantan Barat	58,65	57,53	61,58
Kalimantan Tengah	57,72	57,53	60,06
Kalimantan Selatan	63,39	66,87	65,79
Kalimantan Timur	68,33	70,19	70,00
Kalimantan Utara	60,65	68,01	68,48
Sulawesi Utara	49,90	53,03	53,73
Sulawesi Tengah	55,20	53,08	56,48
Sulawesi Selatan	66,43	63,40	68,14
Sulawesi Tenggara	52,15	53,94	56,62
Gorontalo	54,47	59,74	62,95
Sulawesi Barat	55,19	57,03	58,86
Maluku	45,13	44,09	48,87
Maluku Utara	50,74	60,12	61,02
Papua Barat	44,82	49,61	50,17
Papua	47,08	47,75	49,34
Indonesia	63,05	64,55	65,74

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Inisiasi Menyusui Dini atau permulaan menyusui dini mendukung manfaat ASI yang telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Berbagai manfaat inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi, antara lain: Meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. ASI dan kolostrum adalah makanan terbaik bagi bayi.

Tabel 62 Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan ALH yang Terakhir Dilahirkan Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Kurang dari Satu Jam Setelah Dilahirkan Menurut Karakteristik, 2020-2022

Karakteristik	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	65,29	65,40	66,97
Perdesaan	60,29	63,45	64,11
Kelompok Umur			
15-19 tahun	58,71	62,99	64,76
20-24 tahun	61,54	64,15	65,31
25-29 tahun	65,18	65,37	66,18
30-34 tahun	64,76	64,72	67,18
35-39 tahun	61,72	65,09	65,11
40-44 tahun	58,39	61,60	62,45
45-49 tahun	45,84	55,44	59,36
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Ibu			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	53,11	55,28	61,54
SD/Sederajat	61,42	63,18	62,83
SMP/Sederajat	63,20	65,29	66,59
SMA/Sederajat	63,06	65,26	66,07
Perguruan Tinggi	67,85	65,85	67,78
Status Ekonomi			
Kuintil 1	62,88	65,39	65,44
Kuintil 2	62,02	63,45	66,53
Kuintil 3	61,74	64,10	64,79
Kuintil 4	62,96	64,21	65,28
Kuintil 5	66,62	65,77	66,91
Indonesia	63,05	64,55	65,74

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Jika dikelompokkan kedalam daerah perkotaan maupun perdesaan, maka IMD perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Ini disebabkan oleh faktor pengetahuan masyarakat perkotaan dan fasilitas

menyusui yang baik. Rendahnya praktik IMD dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi menyusui dini yang rendah karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan ibu yang rendah, ada pengaruh budaya, kurangnya ketersediaan informasi maupun fasilitas kesehatan, kurangnya dukungan dari orang terdekat dan dukungan dari tenaga kesehatan, serta kurangnya promosi IMD. Kurangnya pengetahuan ibu terkait IMD, pengetahuan masyarakat yang salah terhadap kolostrum, terbatasnya akses terhadap informasi kesehatan yang benar, pengaruh kepercayaan masyarakat, dan pendapat dari para ibu (perempuan yang lebih tua) menjadi pengaruh kuat dalam pelaksanaan IMD menjadi penghalang terlaksananya IMD.

5.3 PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI)

Kesehatan dan gizi pada tahun pertama kehidupan bayi akan menentukan tingkat kesehatan, intelektual dan produktivitas di masa depan. Mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan permulaan terbaik di awal kehidupan bayi untuk proses tumbuh kembang anak karena ASI mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Selain itu, ASI juga dapat melindungi tubuh bayi dari alergi, diare dan penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan tanpa tambahan makanan dan minuman lain termasuk juga air putih. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas tetap diberi ASI dan dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan hingga usia 2 tahun.

Berdasarkan Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Namun hal ini menjadi tidak berlaku jika terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya. ASI adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana sifat ASI bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama

lahir (HPL), mengingat periode tersebut merusak masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun.

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alami pertama untuk bayi, menyediakan semua energi dan zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk enam bulan pertama kehidupannya, dan terus menyediakan hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak hingga tahun kedua kehidupan. ASI meningkatkan perkembangan sensorik dan kognitif, serta melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Pemberian ASI eksklusif mengurangi kematian bayi karena penyakit umum masa kanak-kanak seperti diare atau pneumonia, dan membantu pemulihan lebih cepat selama sakit. ASI mengandung antibodi, hormon, faktor-faktor pertumbuhan, enzim, serta zat yang dapat membunuh bakteri dan virus. Selain itu, ASI mengandung bermacam-macam zat anti infeksi baik yang seluler maupun yang humoral, sehingga mortalitas dan morbiditas neonatus yang minum ASI lebih rendah daripada yang minum susu formula.

Pemberian ASI yang optimal pada bayi di bawah usia dua tahun memiliki potensi dampak terbesar pada kelangsungan hidup anak dari semua intervensi pencegahan, dengan potensi untuk mencegah 1,4 juta kematian pada balita di negara berkembang. Anak-anak yang disusui memiliki kesempatan bertahan hidup setidaknya enam kali lebih besar pada bulan-bulan awal dibandingkan anak-anak yang tidak disusui.

Menyusui secara drastis mengurangi kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dan diare, dua pembunuh utama anak-anak, serta dari penyakit menular lainnya. Dampak potensial dari praktik pemberian ASI yang optimal sangat penting dalam situasi negara berkembang dengan beban penyakit yang tinggi dan akses yang rendah ke air bersih dan sanitasi. Tetapi anak-anak yang tidak disusui di berisiko lebih besar untuk meninggal. Pemberian ASI pada bayi erat hubungannya dengan kondisi gizi kurang, gizi lebih (gemuk) dan kesehatan anak. Di sisi lain menyusui berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan ibu, membantu memberi ruang pada anak, mengurangi risiko kanker ovarium dan kanker payudara, meningkatkan sumber daya keluarga dan nasional, merupakan cara pemberian makan dan lingkungan yang aman.

ASI eksklusif sangat penting bagi bayi sebagai upaya pencegahan dari penyakit, karena ASI memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketahanan tubuh bayi, sehingga bayi kebal terhadap berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan. Selain itu, nutrisi dalam ASI penting untuk perkembangan otak dan fisik bayi. Perkembangan kognitif bayi meningkat dengan pemberian ASI, serta bayi yang diberi ASI dan ibu yang memberi ASI cenderung terhindar dari obesitas. Selain bagi bayi, pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui juga bermanfaat untuk mengatasi rasa trauma saat persalinan sekaligus dengan kehadiran buah hati pertama kalinya bisa menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Pasca melahirkan biasanya ibu rentan mengalami baby blues syndrome, terlebih lagi hal tersebut biasanya terjadi pada sang ibu yang belum terbiasa bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusif untuk bayi mereka. Namun dengan menyusui, secara perlahan rasa trauma pun akan hilang sendirinya dan ibu pun akan terbiasa menyusui bayinya. Menyusui juga dapat mencegah kanker payudara, membantu memperpanjang jarak antar kelahiran, serta dapat menurunkan risiko diabetes dan kanker ovarium

Kesehatan dan gizi pada tahun pertama kehidupan bayi akan menentukan tingkat kesehatan, intelektual dan produktivitas di masa depan. Mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan permulaan terbaik di awal kehidupan bayi untuk proses tumbuh kembang anak karena ASI mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Selain itu, ASI juga dapat melindungi tubuh bayi dari alergi, diare dan penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 (enam) bulan ke depan tanpa tambahan makanan dan minuman lain termasuk juga air putih. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kendala utama dalam pemberian ASI eksklusif adalah: pemahaman yang rendah tentang ASI eksklusif; persepsi bahwa bayi tetap lapar setelah menyusui; masalah kesehatan ibu; dukungan yang tidak memadai dari orang sekitar (ibu mertua, suami, saudara); nyeri di payudara; dan kebutuhan untuk kembali bekerja.

Tabel 63 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)	Perdesaan/Rural			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)	Perkotaan+Perdesaan/ Urban+Rural			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)
	<6	6-23	Jumlah/ Total		<6	6-23	Jumlah/ Total		<6	6-23	Jumlah/ Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16,44	83,56	100,00	12,04	20,13	79,87	100,00	11,55	18,85	81,15	100,00	11,72
Sumatera Utara	29,18	70,82	100,00	9,71	25,46	74,54	100,00	10,14	27,42	72,58	100,00	9,91
Sumatera Barat	23,92	76,08	100,00	11,14	25,58	74,42	100,00	10,71	24,83	75,17	100,00	10,91
Riau	24,69	75,31	100,00	11,43	25,96	74,04	100,00	10,88	25,48	74,52	100,00	11,09
Jambi	25,44	74,56	100,00	10,50	25,90	74,10	100,00	10,85	25,76	74,24	100,00	10,74
Sumatera Selatan	29,87	70,13	100,00	9,15	28,83	71,17	100,00	10,38	29,20	70,80	100,00	9,94
Bengkulu	25,19	74,81	100,00	10,73	28,48	71,52	100,00	10,28	27,38	72,62	100,00	10,43
Lampung	25,01	74,99	100,00	11,05	22,62	77,38	100,00	10,93	23,38	76,62	100,00	10,97
Kepulauan Bangka Belitung	34,48	65,52	100,00	9,05	38,09	61,91	100,00	8,59	36,07	63,93	100,00	8,85
Kepulauan Riau	24,48	75,52	100,00	10,68	31,62	68,38	100,00	9,18	25,01	74,99	100,00	10,57
DKI Jakarta	26,94	73,06	100,00	10,02	-	-	-	-	26,94	73,06	100,00	10,02
Jawa Barat	22,44	77,56	100,00	11,28	23,51	76,49	100,00	11,18	22,66	77,34	100,00	11,26
Jawa Tengah	25,39	74,61	100,00	11,15	25,85	74,15	100,00	10,84	25,60	74,40	100,00	11,00
DI Yogyakarta	20,09	79,91	100,00	11,92	14,74	85,26	100,00	13,28	18,88	81,12	100,00	12,23
Jawa Timur	22,55	77,45	100,00	10,88	25,37	74,63	100,00	10,50	23,80	76,20	100,00	10,71
Banten	24,63	75,37	100,00	10,31	22,75	77,25	100,00	11,10	24,17	75,83	100,00	10,51
Bali	28,19	71,81	100,00	9,88	24,60	75,40	100,00	10,09	27,17	72,83	100,00	9,94
Nusa Tenggara Barat	22,34	77,66	100,00	11,41	23,55	76,45	100,00	11,54	22,93	77,07	100,00	11,48
Nusa Tenggara Timur	19,94	80,06	100,00	10,61	22,33	77,67	100,00	10,96	21,84	78,16	100,00	10,89
Kalimantan Barat	24,78	75,22	100,00	10,29	24,90	75,10	100,00	10,78	24,85	75,15	100,00	10,61
Kalimantan Tengah	32,02	67,98	100,00	9,21	26,17	73,83	100,00	10,60	28,86	71,14	100,00	9,96
Kalimantan Selatan	23,49	76,51	100,00	11,16	24,51	75,49	100,00	10,72	24,02	75,98	100,00	10,93
Kalimantan Timur	22,89	77,11	100,00	10,32	29,04	70,96	100,00	10,56	24,96	75,04	100,00	10,40
Kalimantan Utara	27,30	72,70	100,00	10,05	28,37	71,63	100,00	9,56	27,66	72,34	100,00	9,88
Sulawesi Utara	26,95	73,05	100,00	10,54	23,16	76,84	100,00	10,63	25,04	74,96	100,00	10,58
Sulawesi Tengah	28,50	71,50	100,00	9,54	29,96	70,04	100,00	9,34	29,47	70,53	100,00	9,41
Sulawesi Selatan	24,75	75,25	100,00	10,39	29,75	70,25	100,00	10,24	27,48	72,52	100,00	10,31
Sulawesi Tenggara	26,88	73,12	100,00	10,40	25,08	74,92	100,00	10,51	25,67	74,33	100,00	10,47
Gorontalo	37,63	62,37	100,00	8,82	31,10	68,90	100,00	9,42	33,99	66,01	100,00	9,15
Sulawesi Barat	22,32	77,68	100,00	11,25	28,66	71,34	100,00	10,66	27,38	72,62	100,00	10,78
Maluku	28,99	71,01	100,00	10,65	30,00	70,00	100,00	10,14	29,61	70,39	100,00	10,34
Maluku Utara	27,13	72,87	100,00	10,17	21,50	78,50	100,00	10,26	22,98	77,02	100,00	10,23
Papua Barat	29,81	70,19	100,00	9,20	27,65	72,35	100,00	10,18	28,49	71,51	100,00	9,80
Papua	25,22	74,78	100,00	9,71	17,73	82,27	100,00	11,70	21,47	78,53	100,00	10,71
Indonesia	24,41	75,59	100,00	10,77	25,28	74,72	100,00	10,70	24,79	75,21	100,00	10,74

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 64 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tabel Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	100,00	100,00	100,00
Kab. Pesisir Selatan	87,18	92,72	89,83
Kab. Solok	96,92	100,00	98,35
Kab. Sijunjung	100,00	97,33	98,45
Kab. Tanah Datar	100,00	92,36	95,71
Kab. Padang Pariaman	96,28	97,09	96,67
Kab. Agam	97,81	96,95	97,37
Kab. Lima Puluh Kota	94,59	96,18	95,31
Kab. Pasaman	100,00	100,00	100,00
Kab. Solok Selatan	100,00	97,97	98,88
Kab. Dharmasraya	98,08	99,91	98,89
Kab. Pasaman Barat	97,07	100,00	98,34
Kota Padang	96,71	85,66	92,15
Kota Solok	100,00	100,00	100,00
Kota Sawahlunto	100,00	100,00	100,00
Kota Padang Panjang	99,33	93,94	97,10
Kota Bukittinggi	100,00	100,00	100,00
Kota Payakumbuh	97,03	95,26	96,03
Kota Pariaman	100,00	100,00	100,00
Sumatera Barat	96,83	95,95	96,41

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Selanjutnya setelah bayi berumur 6 (enam) bulan keatas tetap diberi ASI dan dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan hingga umur 2 (dua) tahun. Berdasarkan data Susenas 2022 dan 2023 di Provinsi Sumatera Barat, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah disusui tahun 2023 menurun dari 96,48 persen menjadi 96,41 persen. Untuk daerah perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan. Selanjutnya jika dilihat

dari rata-rata lama disusui pada anak umur 0-23 bulan pada tahun 2023 adalah sekitar 10-11 bulan. Secara rata-rata hampir tidak ada perbedaan untuk daerah perkotaan dan perdesaan hanya beda 1 (satu) bulan saja. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk berupaya menggenjot capaian persentase tersebut semakin tinggi melalui kegiatan sosialisasi atau lainnya.

Tabel 65 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI selama Sehari Kemarin menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	100,00	76,16	86,17
Kab. Pesisir Selatan	75,84	86,99	81,34
Kab. Solok	76,89	81,93	79,27
Kab. Sijunjung	88,18	82,42	84,88
Kab. Tanah Datar	89,89	87,23	88,45
Kab. Padang Pariaman	85,72	68,99	77,52
Kab. Agam	68,41	89,36	79,07
Kab. Lima Puluh Kota	87,37	77,90	83,05
Kab. Pasaman	86,11	88,59	87,35
Kab. Solok Selatan	82,19	87,67	85,19
Kab. Dharmasraya	76,37	80,53	78,23
Kab. Pasaman Barat	71,03	92,01	80,28
Kota Padang	88,58	72,09	82,25
Kota Solok	84,13	86,72	85,23
Kota Sawahlunto	81,17	79,09	80,10
Kota Padang Panjang	99,05	95,20	97,51
Kota Bukittinggi	86,05	79,37	82,04
Kota Payakumbuh	88,67	86,16	87,27
Kota Pariaman	95,04	92,96	94,27
Sumatera Barat	82,06	82,76	82,40

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Menurut Kabupaten/Kota, persentase anak Sumatera Barat yang berusia dibawah 2 tahun yang masih diberi ASI sebesar 82,40 persen. Ini berarti dalam setiap 100 orang anak, hanya 82 orang yang mendapatkan ASI hingga usia 2 tahun. Terdapat 18 orang baduta yang tidak masih diberikan ASI. Kabupaten Padang Pariaman memberikan kontribusi terkecil, dimana hanya 77,52 persen, sebaliknya Kota Padang Panjang menempati posisi teratas dengan besaran 97,51 persen. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat hanya memiliki persentase sebesar 82,25 persen. Berbagai alasan yang dikemukakan, salah satunya adanya imej di masyarakat bahwa anak usia tersebut tidak perlu lagi diberikan ASI, karena usia tersebut telah biasa diberikan air putih biasa. Selain itu, adanya pandangan ibu kalau menyusui tersebut dapat mengurangi performa mereka, payudara tidak kelihatan bagus.

Tabel 66 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Baduta/Aged Under Two Years		Jumlah Total	Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)
	< 6	6-23		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	40,51	59,49	100,00	7,84
Kab. Pesisir Selatan	23,58	76,42	100,00	9,89
Kab. Solok	22,08	77,92	100,00	10,24
Kab. Sijunjung	24,93	75,07	100,00	11,29
Kab. Tanah Datar	27,07	72,93	100,00	11,14
Kab. Padang Pariaman	25,41	74,59	100,00	11,42
Kab. Agam	25,57	74,43	100,00	10,59
Kab. Lima Puluh Kota	20,49	79,51	100,00	10,49
Kab. Pasaman	22,79	77,21	100,00	10,56
Kab. Solok Selatan	30,09	69,91	100,00	10,47
Kab. Dharmasraya	26,80	73,20	100,00	11,59
Kab. Pasaman Barat	26,19	73,81	100,00	11,88
Kota Padang	26,43	73,57	100,00	11,03
Kota Solok	19,15	80,85	100,00	11,09
Kota Sawahlunto	17,02	82,98	100,00	12,41
Kota Padang Panjang	17,82	82,18	100,00	11,56
Kota Bukittinggi	22,23	77,77	100,00	11,20
Kota Payakumbuh	24,66	75,34	100,00	11,48
Kota Pariaman	16,67	83,33	100,00	11,35
Sumatera Barat	24,83	75,17	100,00	10,91

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Dalam tabel diatas terlihat bahwa rata-rata baduta diberikan ASI di Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 10,91 bulan. Ini menunjukkan bahwa anak diberikan ASI hingga usia 11 bulan belum cukup 1 tahun. 24,83 persen anak hanya diberikan ASI selama kurang dari 6 bulan. Hal ini harus disikapi oleh Pemerintah, agar kecukupan gizi baduta dapat terpenuhi dengan baik dan dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat.

Faktor pengetahuan si ibu sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam lama pemberian ASI. Bila dibandingkan berdasarkan perwilayahan, daerah perkotaan cenderung lebih lama dalam pemberian ASI dibandingkan daerah perdesaan. Kota Sawahlunto menempati posisi tertinggi dalam rata-rata lama pemberian ASI yaitu sebesar 12,41 bulan. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai 7,48 bulan.

Tabel 67 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) menurut Kabupaten/Kota dan Pemberian Makanan Padat, Setengah Padat, atau Lunak dalam 24 Jam Terakhir, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Diberi Given	Tidak Diberi Not Given	Tidak Tahu Not Known
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	50,62	48,03	1,35
Kab. Pesisir Selatan	72,94	25,36	1,70
Kab. Solok	62,26	32,40	5,34
Kab. Sijunjung	73,37	26,63	-
Kab. Tanah Datar	74,09	25,91	-
Kab. Padang Pariaman	67,61	29,96	2,43
Kab. Agam	72,32	26,61	1,07
Kab. Lima Puluh Kota	82,46	17,54	-
Kab. Pasaman	70,29	29,71	-
Kab. Solok Selatan	68,56	31,44	-
Kab. Dharmasraya	74,36	22,90	2,75
Kab. Pasaman Barat	74,20	25,35	0,44
Kota Padang	63,96	29,69	6,35
Kota Solok	83,40	16,60	-
Kota Sawahlunto	82,41	17,59	-
Kota Padang Panjang	80,13	19,87	-
Kota Bukittinggi	78,14	21,86	-
Kota Payakumbuh	76,32	23,68	-
Kota Pariaman	81,02	18,98	-
Sumatera Barat	71,09	26,92	2,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Selain diberikan ASI , anak usia 0-23 bulan juga diberikan makanan tambahan untuk kelengkapan kebutuhan gizinya. Berdasarkan data BPS, di Sumatera Barat tahun 2023, terdapat 71,09 persen anak usia tersebut diberikan makanan/cairan tambahan. Ini mengasumsikan hampir 7 dari 10 anak telah diberikan makanan tambahan. Kecukupan gizi harus diperhatikan terutama pada usia tersebut untuk tumbuh kembang anak. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan gizinya cenderung akan mengalami banyak keluhan kesehatan nantinya.

Nutrisi yang diperoleh oleh anak pada awal masa pertumbuhannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. UNICEF (2016) menyebutkan jika apa dan bagaimana makanan diberikan ke anak pada dua tahun awal kehidupannya sangat krusial berpengaruh terhadap kesehatan, perkembangan, dan ketahanan hidup anak. Pemberian ASI merupakan salah satu investasi terbaik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi serta mengoptimalkan kelangsungan hidup anak pada dua tahun pertama. Berbagai penelitian telah membuktikan pengaruh ASI. Anak yang diberi ASI dengan durasi panjang cenderung memiliki tingkat kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak disusui atau disusui dengan durasi yang singkat. Pemberian ASI juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit di masa yang akan datang, seperti overweight dan diabetes.

Selain memiliki banyak manfaat terhadap anak, durasi menyusui yang lebih panjang juga berhubungan dengan pengurangan risiko kanker ovarium dan kanker payudara pada ibu. Menyusui dengan eksklusif dan teratur juga berpengaruh terhadap hormon ibu sehingga membantu dalam mengatur interval kelahiran. Pada usia enam bulan pertama, kebutuhan nutrisi bayi dapat tercukupi melalui pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya pada usia 6-23 bulan, pemberian ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga diperlukan pemberian makanan tambahan.

Di Indonesia, aturan mengenai pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu. Anjuran pemberian ASI dimulai sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur enam bulan, kemudian dianjurkan untuk dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun

dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Persentase bayi kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif juga merupakan salah satu indikator sasaran yang merupakan intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting, capaian target indikator ASI eksklusif tahun 2024 adalah sebesar 80 persen

Gambar 19 menunjukkan persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah dan masih diberi ASI. Tren data pada periode 2020-2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, sekitar 77 dari 100 anak umur 0-23 bulan pernah dan masih diberi ASI. Keberlangsungan pemberian ASI sampai usia dua tahun atau lebih dapat memberikan nutrisi bagi bayi ketika dihadapkan pada kondisi makanan komplementer yang kurang beragam (UNICEF, 2016). Berbeda dengan capaian IDL yang lebih tinggi di daerah perkotaan, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah dan masih diberi ASI relatif lebih tinggi di daerah perdesaan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin anak, persentase anak perempuan menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.

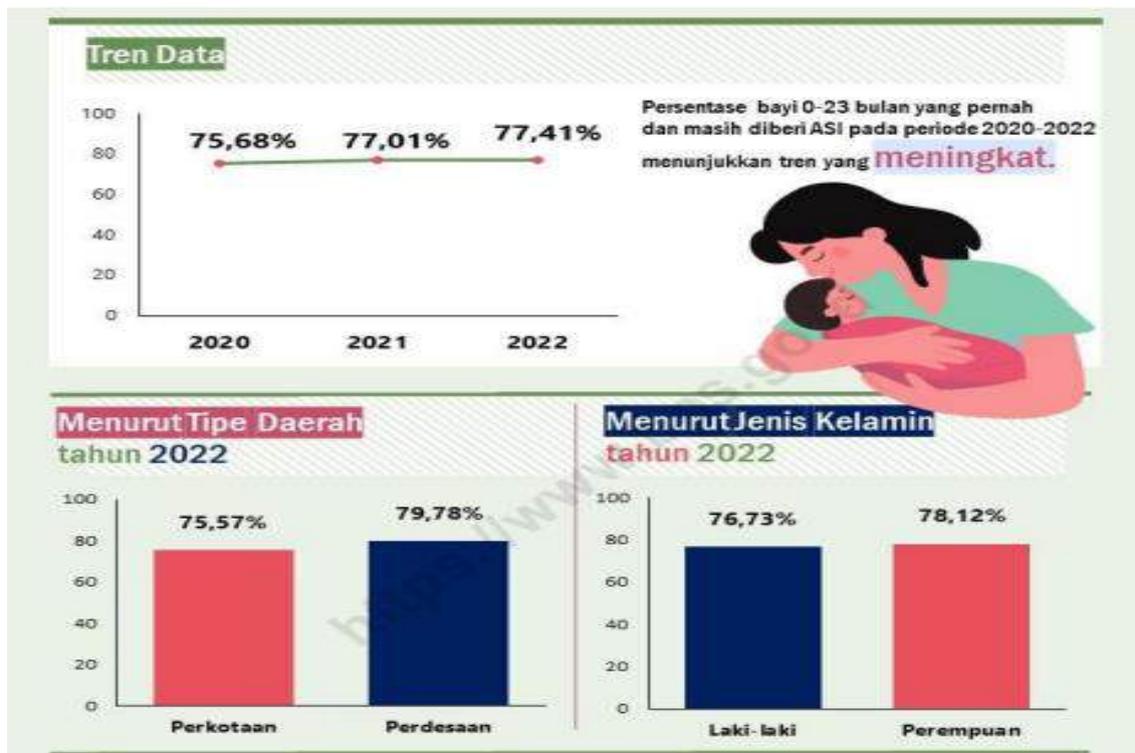
Selain anak 0-23 bulan yang pernah dan masih diberi ASI, tabel 66 dan tabel 67 menunjukkan persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI. WHO dan UNICEF (2021) menyebutkan jika indikator ini berguna untuk menilai secara keseluruhan mengenai penerimaan praktik pemberian ASI dan upaya advokasi ASI di suatu daerah. Sebanyak 83,38 persen anak umur 0-23 bulan di Indonesia pernah diberi ASI. Ketika dilihat menurut karakteristik, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI pada daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Selain itu, jika dilihat menurut status ekonomi, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI lebih tinggi pada anak yang tinggal pada keluarga dengan status ekonomi rendah.

Tabel 68 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)	Perdesaan/Rural			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)	Perkotaan+Perdesaan/ Urban+Rural			Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Average Duration of Breastfeeding (Months)
	<6	6-23	Jumlah/ Total		<6	6-23	Jumlah/ Total		<6	6-23	Jumlah/ Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16,44	83,56	100,00	12,04	20,13	79,87	100,00	11,55	18,85	81,15	100,00	11,72
Sumatera Utara	29,18	70,82	100,00	9,71	25,46	74,54	100,00	10,14	27,42	72,58	100,00	9,91
Sumatera Barat	23,92	76,08	100,00	11,14	25,58	74,42	100,00	10,71	24,83	75,17	100,00	10,91
Riau	24,69	75,31	100,00	11,43	25,96	74,04	100,00	10,88	25,48	74,52	100,00	11,09
Jambi	25,44	74,56	100,00	10,50	25,90	74,10	100,00	10,85	25,76	74,24	100,00	10,74
Sumatera Selatan	29,87	70,13	100,00	9,15	28,83	71,17	100,00	10,38	29,20	70,80	100,00	9,94
Bengkulu	25,19	74,81	100,00	10,73	28,48	71,52	100,00	10,28	27,38	72,62	100,00	10,43
Lampung	25,01	74,99	100,00	11,05	22,62	77,38	100,00	10,93	23,38	76,62	100,00	10,97
Kepulauan Bangka Belitung	34,48	65,52	100,00	9,05	38,09	61,91	100,00	8,59	36,07	63,93	100,00	8,85
Kepulauan Riau	24,48	75,52	100,00	10,68	31,62	68,38	100,00	9,18	25,01	74,99	100,00	10,57
DKI Jakarta	26,94	73,06	100,00	10,02	-	-	-	-	26,94	73,06	100,00	10,02
Jawa Barat	22,44	77,56	100,00	11,28	23,51	76,49	100,00	11,18	22,66	77,34	100,00	11,26
Jawa Tengah	25,39	74,61	100,00	11,15	25,85	74,15	100,00	10,84	25,60	74,40	100,00	11,00
DI Yogyakarta	20,09	79,91	100,00	11,92	14,74	85,26	100,00	13,28	18,88	81,12	100,00	12,23
Jawa Timur	22,55	77,45	100,00	10,88	25,37	74,63	100,00	10,50	23,80	76,20	100,00	10,71
Banten	24,63	75,37	100,00	10,31	22,75	77,25	100,00	11,10	24,17	75,83	100,00	10,51
Bali	28,19	71,81	100,00	9,88	24,60	75,40	100,00	10,09	27,17	72,83	100,00	9,94
Nusa Tenggara Barat	22,34	77,66	100,00	11,41	23,55	76,45	100,00	11,54	22,93	77,07	100,00	11,48
Nusa Tenggara Timur	19,94	80,06	100,00	10,61	22,33	77,67	100,00	10,96	21,84	78,16	100,00	10,89
Kalimantan Barat	24,78	75,22	100,00	10,29	24,90	75,10	100,00	10,78	24,85	75,15	100,00	10,61
Kalimantan Tengah	32,02	67,98	100,00	9,21	26,17	73,83	100,00	10,60	28,86	71,14	100,00	9,96
Kalimantan Selatan	23,49	76,51	100,00	11,16	24,51	75,49	100,00	10,72	24,02	75,98	100,00	10,93
Kalimantan Timur	22,89	77,11	100,00	10,32	29,04	70,96	100,00	10,56	24,96	75,04	100,00	10,40
Kalimantan Utara	27,30	72,70	100,00	10,05	28,37	71,63	100,00	9,56	27,66	72,34	100,00	9,88
Sulawesi Utara	26,95	73,05	100,00	10,54	23,16	76,84	100,00	10,63	25,04	74,96	100,00	10,58
Sulawesi Tengah	28,50	71,50	100,00	9,54	29,96	70,04	100,00	9,34	29,47	70,53	100,00	9,41
Sulawesi Selatan	24,75	75,25	100,00	10,39	29,75	70,25	100,00	10,24	27,48	72,52	100,00	10,31
Sulawesi Tenggara	26,88	73,12	100,00	10,40	25,08	74,92	100,00	10,51	25,67	74,33	100,00	10,47
Gorontalo	37,63	62,37	100,00	8,82	31,10	68,90	100,00	9,42	33,99	66,01	100,00	9,15
Sulawesi Barat	22,32	77,68	100,00	11,25	28,66	71,34	100,00	10,66	27,38	72,62	100,00	10,78
Maluku	28,99	71,01	100,00	10,65	30,00	70,00	100,00	10,14	29,61	70,39	100,00	10,34
Maluku Utara	27,13	72,87	100,00	10,17	21,50	78,50	100,00	10,26	22,98	77,02	100,00	10,23
Papua Barat	29,81	70,19	100,00	9,20	27,65	72,35	100,00	10,18	28,49	71,51	100,00	9,80
Papua	25,22	74,78	100,00	9,71	17,73	82,27	100,00	11,70	21,47	78,53	100,00	10,71
Indonesia	24,41	75,59	100,00	10,77	25,28	74,72	100,00	10,70	24,79	75,21	100,00	10,74

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Gambar 19 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah dan Masih Diberi ASI Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak, 2022

Selain anak 0-23 bulan yang pernah dan masih diberi ASI, Tabel 63 sampai dengan tabel 68 menunjukkan persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI. WHO dan UNICEF (2021) menyebutkan jika indikator ini berguna untuk menilai secara keseluruhan mengenai penerimaan praktik pemberian ASI dan upaya advokasi ASI di suatu daerah. Sebanyak 92,86 persen anak umur 0-23 bulan di Indonesia pernah diberi ASI. Ketika dilihat menurut karakteristik, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI pada daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Selain itu, jika dilihat menurut status ekonomi, persentase anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI lebih tinggi pada anak yang tinggal pada keluarga dengan status ekonomi rendah.

Indikator selanjutnya untuk menggambarkan capaian program pemberian ASI adalah Persentase anak umur 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif. Indikator ini merupakan salah satu dari rekomendasi praktik menyusui dari *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding* yang

dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF. Dengan hanya memberikan ASI sampai anak berusia enam bulan, maka bayi menerima sumber makanan yang terjamin, aman, bersih, dan sehat. Pemberian ASI eksklusif memungkinkan penyebaran bakteri baik dari ibu ke bayi yang dapat membantu melawan penyakit, membantu mencerna makanan, dan meningkatkan sistem imunitas.

Gambar 19 memperlihatkan jika tren indikator ASI eksklusif meningkat pada periode 2020- 2022. Pada tahun 2022, 72 dari 100 anak umur 0-5 bulan di Indonesia telah menerima ASI eksklusif. Walaupun tren indikator terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, capaian indikator ini masih perlu terus ditingkatkan dan diperhatikan pemerataannya. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa kegagalan pemberian ASI eksklusif terkait dengan waktu pemberian yang terlalu cepat. Budaya untuk memberikan makanan tambahan pendamping ASI sebelum umur enam bulan juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan ASI eksklusif. Penelitian terdahulu di Indonesia mencatat jika kegagalan pemberian ASI eksklusif di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh budaya pemberian makanan sesaat setelah anak lahir.

Gambar 20 Persentase Anak Umur 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak, 2022

Sejalan dengan indikator yang lain, indikator ini menunjukkan kecenderungan lebih tinggi di daerah perdesaan. Sementara itu, pola data menurut jenis kelamin anak menunjukkan persentase yang tidak jauh berbeda dalam pemberian ASI eksklusif, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Pola yang menarik terlihat dari pemberian ASI eksklusif menurut status ekonomi. Persentase anak umur 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif paling tinggi pada rumah tangga dengan status ekonomi terendah. Hal tersebut dapat menunjukkan jika upaya pengenalan ASI eksklusif telah banyak menjangkau masyarakat Indonesia di segala lapisan, termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah yang biasanya lebih minim mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan. Pola data tersebut juga mungkin terjadi karena pada rumah tangga yang ada pada status ekonomi tertinggi, rumah tangga cenderung memiliki pilihan untuk membeli susu formula atau susu kemasan yang dapat menggantikan ASI. Penelitian di Sukoharjo, Jawa Tengah menunjukkan jika tingkat penghasilan keluarga berpengaruh terhadap pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan. Kecenderungan pemberian susu formula oleh ibu pada keluarga berpenghasilan tinggi 1,99 kali lebih besar dibandingkan pada pada keluarga berpenghasilan rendah

Gambar 21 Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman selama Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak, 2022

Mulai dari umur enam bulan, secara bertahap pemberian makanan pada anak disarankan untuk mulai diberikan dengan disertai melanjutkan ASI sampai umur 23 bulan. Hal tersebut dikarenakan kalori yang diperoleh dari ASI saja sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori pada anak 6-23 bulan. Pemberian makanan yang bervariasi menjadi penting untuk memastikan bahwa nutrisi anak pada umur tersebut terpenuhi

Tabel 69 Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman selama Sehariam Kemarin Menurut Provinsi, 2022-2023

Provinsi	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Aceh	54,05	52,25
Sumatera Utara	54,07	52,19
Sumatera Barat	57,89	54,65
R i a u	55,31	53,71
J a m b i	51,37	55,62
Sumatera Selatan	63,52	53,23
Bengkulu	60,72	56,19
Lampung	55,65	59,32
Kep. Bangka Belitung	55,26	59,51
Kep. Riau	61,41	65,33
DKI Jakarta	68,10	75,93
Jawa Barat	65,07	67,38
Jawa Tengah	61,33	64,30
DI Yogyakarta	72,54	74,07
Jawa Timur	61,45	64,10
Banten	60,50	58,62
B a l i	58,19	59,47
Nusa Tenggara Barat	60,73	65,11
Nusa Tenggara Timur	41,15	40,38
Kalimantan Barat	50,52	50,04
Kalimantan Tengah	47,33	44,44
Kalimantan Selatan	46,44	56,93
Kalimantan Timur	55,75	64,55
Kalimantan Utara	52,26	57,41
Sulawesi Utara	40,85	43,72
Sulawesi Tengah	42,07	39,76
Sulawesi Selatan	52,44	52,29
Sulawesi Tenggara	36,35	43,07
Gorontalo	37,01	41,49
Sulawesi Barat	39,57	43,68
Maluku	37,77	39,29
Maluku Utara	33,63	33,03
Papua Barat	34,72	45,82
Papua	43,52	46,17
Indonesia	58,04	59,33

Sumber: BPS, Profil Statistik Indonesia, 2023

Informasi untuk membentuk indikator MDD yang telah sesuai dengan panduan UNICEF dan WHO tahun 2021 baru mulai dikumpulkan pada

Susenas sejak tahun 2022. Pengelompokan makanan yang dikonsumsi oleh bayi dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu: 1) Air Susu Ibu (ASI); 2) Sereal, akar, dan umbi; 3) Makanan dari kacang-kacangan; 4) Produk turunan susu; 5) Daging, ikan; 6) Telur; 7) Buah dan sayur sumber vitamin A; dan 8) Buah atau sayuran lainnya. Anak usia 6-23 bulan dikatakan telah memenuhi keragaman pangan (MDD) apabila pada sehari sebelum survei telah mengonsumsi setidaknya lima dari delapan kelompok makanan dan minuman tersebut.

Tabel 70 Persentase Anak Umur 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66,66	65,88	67,05
Sumatera Utara	57,83	57,17	61,98
Sumatera Barat	74,16	74,32	75,84
Riau	70,29	69,51	71,14
Jambi	71,37	72,68	74,14
Sumatera Selatan	69,93	70,46	75,59
Bengkulu	67,08	67,84	72,44
Lampung	74,93	76,76	76,20
Kep. Bangka Belitung	62,94	62,77	63,30
Kep. Riau	58,84	62,40	62,88
DKI Jakarta	65,63	67,22	76,39
Jawa Barat	76,46	77,00	80,08
Jawa Tengah	78,93	78,71	80,20
DI Yogyakarta	77,00	77,16	78,25
Jawa Timur	69,61	69,72	72,68
Banten	71,17	71,70	74,62
Bali	68,51	66,52	69,01
Nusa Tenggara Barat	81,46	79,69	82,45
Nusa Tenggara Timur	81,18	78,56	78,74
Kalimantan Barat	71,21	72,66	72,97
Kalimantan Tengah	55,98	55,26	55,78
Kalimantan Selatan	60,27	64,59	65,69
Kalimantan Timur	75,87	76,58	77,70
Kalimantan Utara	81,00	78,70	77,81
Sulawesi Utara	61,09	63,15	64,40
Sulawesi Tengah	65,93	65,84	66,70
Sulawesi Selatan	76,43	75,88	77,20
Sulawesi Tenggara	62,54	61,68	62,99
Gorontalo	52,75	53,60	55,11
Sulawesi Barat	74,75	74,67	75,04
Maluku	61,32	59,62	61,52
Maluku Utara	66,00	68,83	69,66
Papua Barat	58,77	61,79	62,92
Papua	74,08	74,18	55,41
Indonesia	71,58	72,04	73,97

Sumber: BPS, Profil Statistik Indonesia, 2023

Dari tabel 70 diatas terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat, dalam satu tahun terakhir persentase anak usia dibawah 5 bulan yang memperoleh ASI Eksklusif masih berada diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 75,84 persen. Ini menggambarkan bahwa perempuan Sumatera Barat masih memberikan ASI Eksklusifnya kepada bayi-bayinya secara baik, meskipun angka masih jauh berada jauh dibawah target nasional.

5.4 STATUS GIZI ANAK

Status gizi anak sebagai ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan energi dan zat gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi penting dalam semua siklus hidup terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.

Pemenuhan gizi anak telah menjadi prioritas kunci di Indonesia dan bagian dari komitmen SDGs pemerintah untuk menekan permasalahan gizi seperti berat badan lahir rendah, underweight dan stunting. Berbagai program sudah dilaksanakan baik berupa program spesifik maupun sensitif dan pelaksanaan konvergensi antar keduanya, diantaranya untuk mencapai target penurunan stunting sampai 14 persen pada tahun 2024. Anak yang cukup terpenuhi kebutuhan gizinya dapat bertumbuh dan belajar, berpartisipasi dan bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu bertahan saat menghadapi tantangan penyakit, bencana alam, dan bentuk lain dari krisis global.

5.4.1 Berat Badan Lahir

Berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir < 2,5 kg. Berat badan lahir penting untuk diperhatikan sebagai indikator untuk memperkirakan kesehatan dan tingkat survival bayi di masa mendatang. Berat badan lahir merupakan tanda bahwa adanya masalah gizi selama kehamilan yang menyebabkan janin gagal tumbuh dengan sempurna.

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2,5 kg tanpa memandang masa kehamilan pada saat dilahirkan. Bayi BBLR bisa berdampak pada masa

pertumbuhannya hingga dewasa. Risiko yang paling besar adalah stunting atau perawakan pendek. Stunting tidak hanya menghasilkan anak pendek, namun secara intelektual juga tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang terlahir dengan berat badan normal dan terpenuhi gizinya di masa 1000 hari pertama kehidupan.

Bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki risiko lebih tinggi meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan. Bayi BBLR lebih mudah mengalami malnutrisi dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Mereka yang bertahan hidup lebih mungkin menderita pertumbuhan terhambat dan IQ yang lebih rendah. Konsekuensi dari BBLR berlanjut hingga dewasa, meningkatkan risiko kondisi kronis yang menyerang orang dewasa seperti obesitas dan diabetes.

Tabel 71 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Berat Badan dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	< 2,5 kg	≥ 2,5 kg	Tidak Ditimbang Not Weighed	Tidak Tahu Unknown
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	15,96	72,01	12,03	-
Kab. Pesisir Selatan	3,43	96,57	-	-
Kab. Solok	6,26	90,79	1,04	1,92
Kab. Sijunjung	14,05	83,10	-	2,85
Kab. Tanah Datar	17,28	82,72	-	-
Kab. Padang Pariaman	15,43	83,70	-	0,87
Kab. Agam	20,26	79,74	-	-
Kab. Lima Puluh Kota	9,51	87,23	-	3,26
Kab. Pasaman	10,52	89,48	-	-
Kab. Solok Selatan	8,65	83,21	8,14	-
Kab. Dharmasraya	10,88	89,12	-	-
Kab. Pasaman Barat	5,84	92,26	-	1,89
Kota Padang	8,73	91,27	-	-
Kota Solok	0,48	99,52	-	-
Kota Sawahlunto	5,89	94,11	-	-
Kota Padang Panjang	5,22	94,78	-	-
Kota Bukittinggi	3,31	96,69	-	-
Kota Payakumbuh	2,65	97,13	-	0,22
Kota Pariaman	7,48	91,08	1,44	-
Sumatera Barat	10,02	88,65	0,58	0,76

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Di Sumatera Barat, pada tahun 2023 dari 100 persen data yang diperoleh, terdapat 10,02 persen bayi dengan berat badan lahir rendah (tabel 71). Meskipun persentase BBLR di Sumatera Barat masih dibawah 15 persen sebagai indikator masalah kesehatan masyarakat berdasarkan rekomendasi WHO, namun anak yang BBLR atau status gizi kurang berpotensi terhadap penurunan produktifitas dikala usia dewasa dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi bangsa.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa persentase bayi BBLR di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Bayi dengan berat badan yang rendah dapat diakibatkan oleh pendidikan ibu, status gizi ibu, pengaturan jarak kehamilan, dan tingkat ekonomi. Ibu di daerah perdesaan cenderung melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu di daerah perkotaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh disparitas antara perdesaan dan perkotaan terkait kondisi demografi, sosial-ekonomi, fasilitas kesehatan, dan karakteristik budaya.

Sebagai contoh perempuan di daerah perdesaan cenderung hidup dalam kemiskinan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga memiliki pengetahuan gizi dan akses terhadap pangan yang bergizi cenderung rendah. Tingkat pendidikan ibu yang rendah juga dapat mempengaruhi kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan maupun di Posyandu. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sadar untuk memeriksakan kandungan selama kehamilan sehingga masalah kandungan dapat segera diketahui dan ditangani. Oleh karena itu bayi yang tidak ditimbang saat lahir di perkotaan (0 persen) lebih rendah daripada di perdesaan, karena rata-rata tingkat pendidikan di perkotaan lebih tinggi dari pada di perdesaan.

Ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kehamilan pada usia remaja dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Komplikasi yang terjadi umumnya karena ibu remaja yang hamil tidak menerima perawatankehamilan dengan baik dan terkadang juga mengalami malnutrisi. Masalah malnutrisi yang diderita ibu remaja hamil inilah yang dapat menyebabkan risiko kelahiran bayi prematur dan juga mengalami berat bayi lahir rendah (Sarwono, 2009). Persentase tertinggi bayi berat lahir rendah dialami oleh ibu yang hamil di usia tua . Sama halnya dengan

kehamilan usia remaja, kehamilan usia tua juga memiliki risiko komplikasi kehamilan yang dapat menjadi penyebab bayi lahir dengan berat badan rendah. Usia reproduksi optimal bagi seorang wanita adalah usia antara 20-35 tahun, di bawah ataupun di atas usia tersebut akan meningkatkan risiko terhadap kehamilan.

Menikah di usia muda tentunya akan membuat peluang untuk hamil di usia muda pula. Rata-rata umur kehamilan perlu menjadi perhatian dikarenakan penelitian menyebutkan bahwa kehamilan di usia muda merupakan kehamilan yang mungkin berisiko, salah satunya adalah risiko bayi lahir dengan berat lahir rendah.

5.4.2 Status Gizi (BB/U) Anak Usia 0-59 Bulan (Balita)

Status gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi makanan dan utilisasi zat-zat gizi dalam tubuh hingga mencapai gizi optimal. Pertumbuhan pada masa-masa awal kehidupan anak sangat penting bagi kesehatan di masa depan, keberhasilan dalam pendidikan, bahkan berpengaruh pada tingkat ekonomi. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui status gizi anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, status gizi balita dinilai menurut 4 indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan atau Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Indikator status gizi BB/U dapat menjadi deteksi dini masalah pertumbuhan anak, sebelum melakukan penilaian lebih lanjut dan intervensi. Berat badan anak sangat mudah berubah tergantung pada asupan dan kondisi kesehatan anak, sehingga BB/U dapat digunakan untuk mengidentifikasi gizi anak dalam jangka pendek. Status gizi anak balita diukur menggunakan timbangan dengan presisi 0,1 kg, kemudian dikonversi dalam nilai terstandar (Z-Score) menggunakan buku antropometri anak balita WHO 2005. Selanjutnya, nilai Z-score tersebut diklasifikasi menjadi Gizi Buruk ($Z\text{-score} < -3$), Gizi Kurang ($-3 \leq Z\text{-score} < -2,0$), Gizi Baik ($-2 \leq Z\text{-score} \leq 2,0$), dan Gizi Lebih ($Z\text{-score} > 2,0$).

Pada balita usia 0-59 bulan, hasil Survei SSGI menyatakan bahwa persentase balita underweight di Indonesia adalah 17,0%, sedangkan persentase balita underweight Sumatera Barat adalah 18,1%. Ini artinya persentase balita gizi buruk dan kurang di Sumatera Barat berada diatas rata-rata nasional, namun hal ini harus terus disikapi Pemerintah dalam menekan angka prevalensi tersebut.

Prevalensi balita yang underweight di Sumatera Barat tertinggi berada di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 25,3 persen. Hampir seluruh Kabupaten/Kota memiliki prevalensi balita underweight diatas 10 persen. Ini harus disikapi oleh dinas terkait agar dengan melakukan program-program peningkatan gizi balita .

Tabel 72 Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, SKI 2023

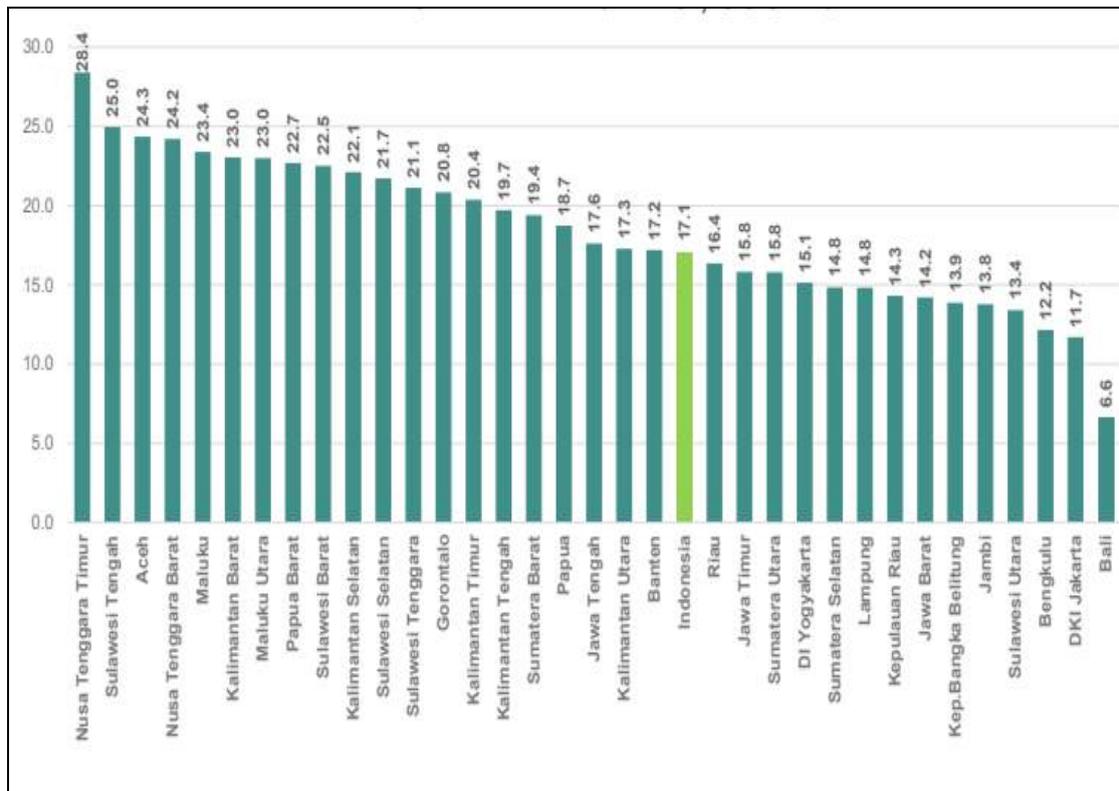
Kabupaten/Kota	Status Gizi Balita								N tertimbang
	Stunting		Wasting		Underweight		Overweight		
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	
Kepulauan Mentawai	33,7	27,3 - 40,7	12,7	9,6 - 16,7	24,3	19,6 - 29,7	2,4**	1,1 - 4,9	114
Pesisir Selatan	27,0	22,2 - 32,4	9,5	7,5 - 12,0	21,9	17,9 - 26,5	3,4**	1,9 - 5,9	625
Solok	25,4	20,0 - 31,7	4,5	2,9 - 6,8	15,0	11,3 - 19,6	3,0**	1,8 - 4,9	448
Sijunjung	28,5	24,3 - 33,1	12,1	9,7 - 15,2	25,3	21,3 - 29,7	1,4**	0,7 - 2,7	302
Tanah Datar	18,5	14,7 - 22,9	6,5	4,6 - 9,2	13,2	10,4 - 16,7	1,6**	0,6 - 4,1	397
Padang Pariaman	19,4	15,9 - 23,6	12,4	9,6 - 15,9	19,5	16,3 - 23,2	1,8**	1,0 - 3,3	514
Agam	20,1	16,9 - 23,8	7,9	5,9 - 10,6	13,2	10,8 - 16,0	2,8	1,7 - 4,4	598
Lima Puluh Kota	28,6	23,8 - 33,9	5,1	3,5 - 7,3	15,9	12,9 - 19,5	2,6	1,6 - 4,3	433
Pasaman	29,4	24,7 - 34,6	9,9	7,5 - 13,0	21,8	17,8 - 26,5	4,2	2,7 - 6,4	382
Solok Selatan	14,7	11,3 - 18,9	13,4	9,9 - 17,7	11,8	9,1 - 15,2	0,9**	0,3 - 2,2	243
Dharmas Raya	17,7	15,0 - 20,7	10,0	7,2 - 13,9	16,9	14,1 - 20,1	2,5**	1,5 - 4,1	295
Pasaman Barat	29,7	25,3 - 34,4	9,0	6,4 - 12,5	19,5	16,5 - 23,0	2,0**	1,2 - 3,5	575
Kota Padang	24,2	20,7 - 28,1	12,0	9,2 - 15,5	18,7	15,9 - 21,9	3,7	2,4 - 5,8	1.121
Kota Solok	16,3	13,0 - 20,2	7,2	5,3 - 9,5	15,7	12,4 - 19,7	0,9**	0,5 - 1,9	102
Kota Sawah Lunto	19,5	16,1 - 23,4	9,1	6,8 - 12,1	16,3	13,2 - 20,0	1,9**	1,0 - 3,7	83
Kota Padang Panjang	15,8	12,4 - 20,0	2,5**	1,5 - 4,1	8,3	6,0 - 11,4	1,9**	1,0 - 3,6	80
Kota Bukittinggi	20,1	17,0 - 23,6	5,3	3,5 - 8,0	12,6	10,4 - 15,2	3,1	1,9 - 4,8	154
Kota Payakumbuh	19,8	14,8 - 26,0	10,7	8,4 - 13,7	12,8	9,7 - 16,6	2,9**	1,7 - 5,1	179
Kota Pariaman	17,7	14,6 - 21,2	9,6	7,3 - 12,7	18,2	14,8 - 22,2	1,8**	1,0 - 3,2	124
SUMATERA BARAT	23,6	22,5 - 24,9	9,3	8,6 - 10,2	17,6	16,7 - 18,6	2,7	2,3 - 3,1	6.769

**Relative Standard Error (RSE) > 25% merupakan estimasi akurasi yang kurang baik untuk menggambarkan populasi balita di kab/kota

Sumber: BPS, Survei Kesehatan Indonesia, 2023

Prevalensi balita underweight Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 17,6 jauh berada diatas rata-rata nasional. Ini mengindikasikan masih banyak ditemukan kasus anak balita yang underweight di Sumatera Barat.

Gambar 22 Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022



Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

5.4.3 Status Gizi (PB/U) Anak Usia 0-59 Bulan (Balita)

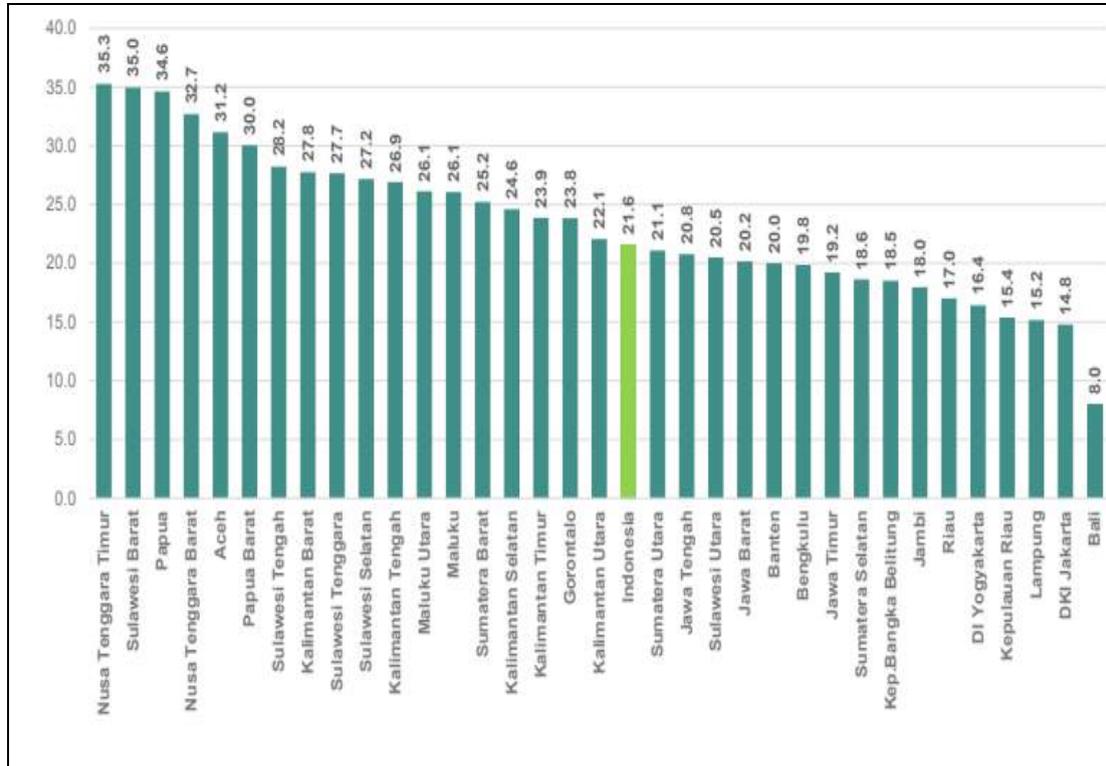
Status gizi tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur dapat menggambarkan situasi kurang gizi yang kronis atau jangka panjang. Indeks ini mengklasifikasikan status gizi anak-anak berdasarkan Tinggi Badan/Usia menjadi stunted ($Z\text{-score} < -3,0$), severely stunted ($-3,0 \leq Z\text{-score} < -2,0$), dan normal ($Z\text{-score} \geq -2,0$). Stunting atau tinggi badan kurang merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kurang gizi kronis selama kehamilan dan/atau setelah kehamilan. Selain kekurangan gizi, stunting juga dapat diakibatkan oleh derajat kesehatan yang buruk akibat penyakit yang di derita ibu selama kehamilan atau diderita anak saat masa-masa pertumbuhan awal. Kondisi anak yang sakit dapat menyebabkan terganggunya utilisasi zat gizi sehingga zat gizi tidak diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh

tubuh. Stunting lebih sulit ditangani karena merupakan akibat dari rentetan masalah yang berlangsung dalam jangka panjang.

Selain berimbas pada tinggi badan, stunting juga memiliki manifestasi jangka panjang. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif dan akademis yang rendah yang berakibat pada rendahnya produktifitas dan rendahnya tingkat pendapatan saat dewasa. Anak dengan status gizi stunting juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit gizi lebih saat dewasa.

Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai stunting merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. SDGs menargetkan untuk mengurangi angka stunting hingga 40 persen pada tahun 2030 dari persentase awal pada tahun 2012. Target untuk Indonesia sendiri adalah menurunkan angka stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024.

Gambar 23 Prevalensi Balita Stunting (Panjang Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022

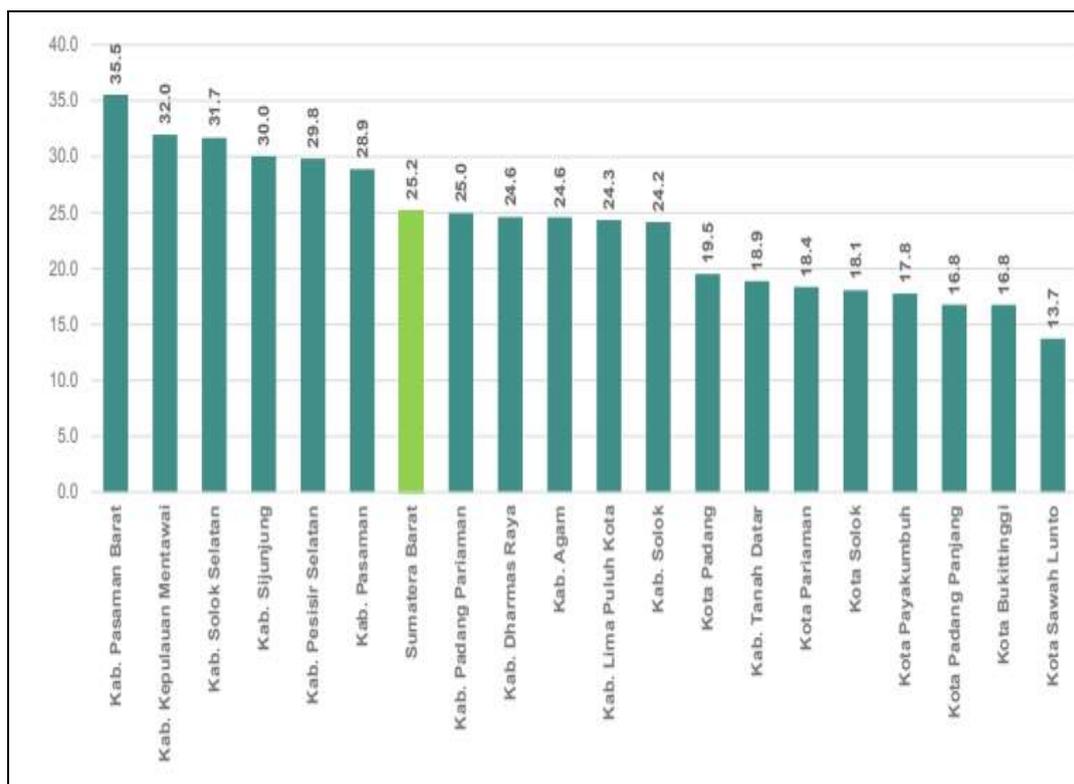


Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Berdasarkan gambar hasil survei SSGI, terlihat bahwa prevalensi balita yang stunting di Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 25,2 persen sedikit berada diatas rata-rata balita yang stunted nasional sebesar 21,6 persen.

Upaya-upaya penurunan angka stunting terus dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan stunting sebagai fokus utama bidang kesehatan dan gizi. Kerja sama berbagai sektor juga dilakukan untuk mengatasi penyebab mendasar stunting yaitu kemiskinan, pendidikan, serta sarana prasarana kesehatan dan sanitasi. Dengan adanya kerjasama dari berbagai sektor diharapkan pencapaian target SDGs dapat segera terpenuhi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama anak-anak.

Gambar 24 Prevalensi Balita Stunting (Panjang Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, SSGI 2022



Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Kabupaten Pasaman Barat menempati posisi teratas dengan 35,5 persen, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Terdapat 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang berada diatas rata-rata nasional. Untuk itu, diperlukan tim khusus penanganan stunting di

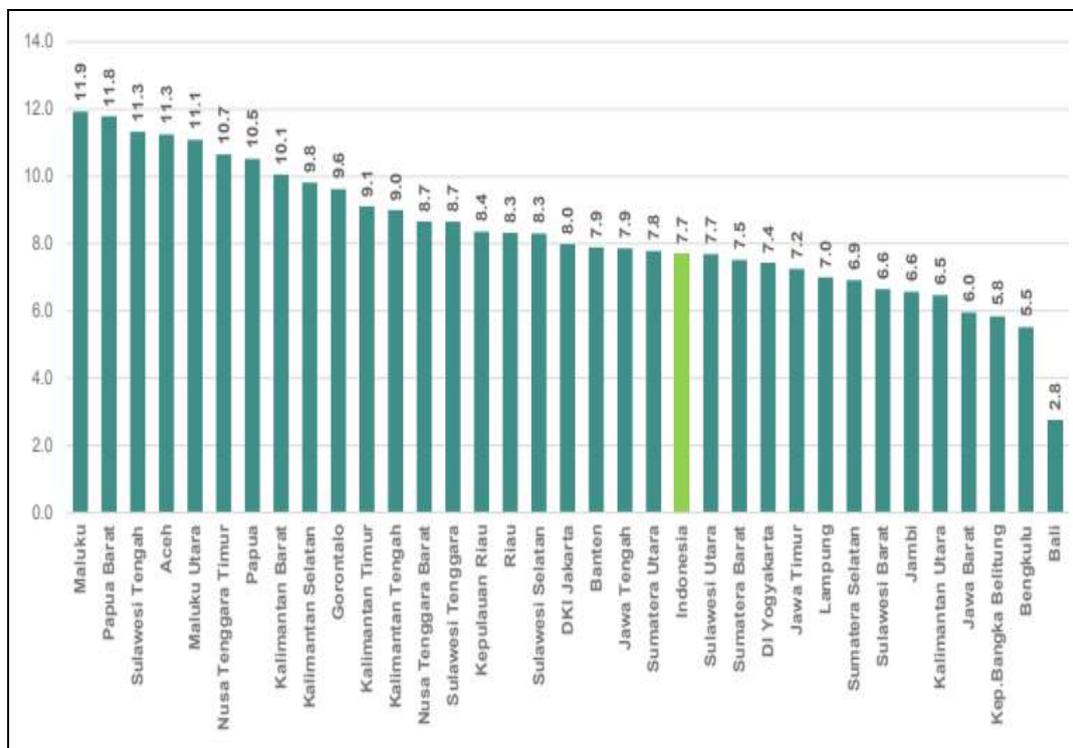
Sumatera Barat terutama pada Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi stunting yang besar.

5.4.4 Status Gizi (BB/TB) Anak Usia 0-59 Bulan (Balita)

Indeks berat badan menurut tinggi badan menggambarkan kondisi gizi anak baik yang berlangsung lama (kronis) atau yang baru saja terjadi (akut), serta menunjukkan proporsi tubuh anak. Keberadaan parameter tinggi badan yang relatif stabil dan tidak fluktuatif cocok untuk mengukur status gizi masa lampau, sedangkan parameter berat badan dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah gizi saat ini.

Meskipun demikian, persentase gizi kurang akan lebih mudah berubah jika menggunakan indeks BB/U daripada indeks BB/TB. Indeks BB/ TB mengklasifikasikan status gizi anak menjadi kurus (wasting) ($-3 \leq Z\text{-score} < -2$), normal ($-2 \leq Z\text{-score} \leq 2$), gemuk ($2 < z\text{-score} \leq 3$), dan sangat gemuk ($z\text{-score} > 3$)

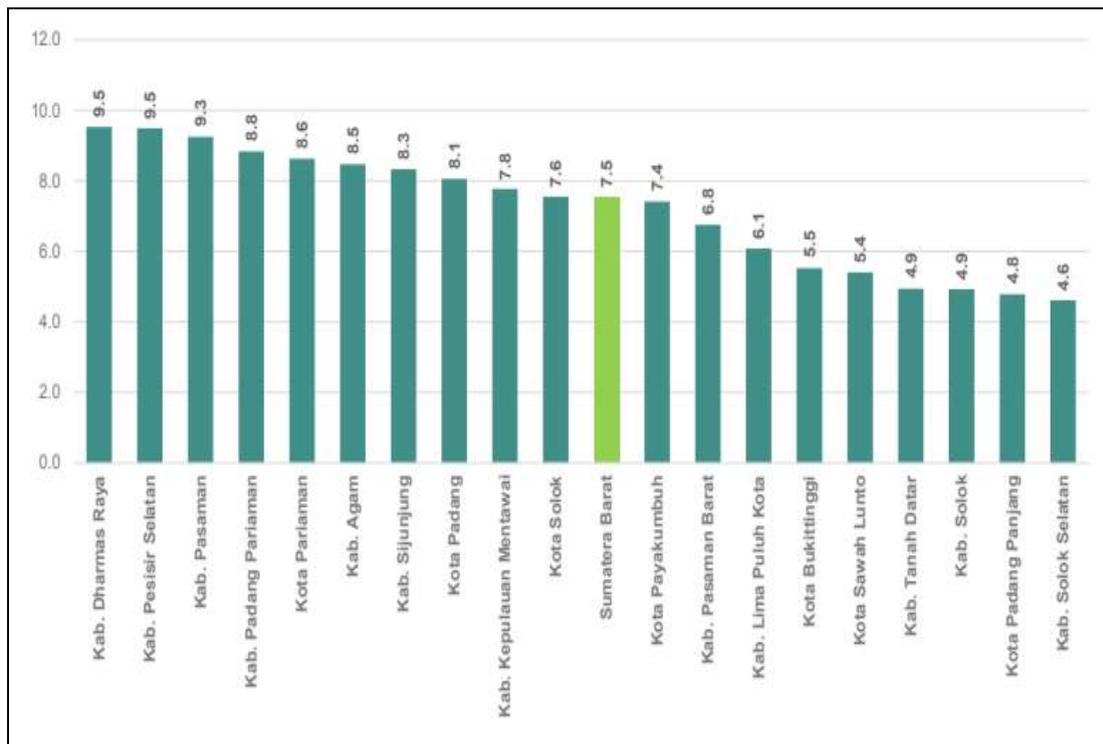
Gambar 25 Prevalensi Balita Wasting (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022



Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Dari gambar diatas terlihat, prevalensi balita wasting di Sumatera Barat menunjukkan besaran 7,5 persen. Ini artinya sedikit berada dibawah rata-rata nasional dengan besaran 7,7 persen. Diperlukan berbagai upaya dalam menekan angka balita yang wasting di Indonesia.

Gambar 26 Prevalensi Balita Wasting (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat SSGI 2022



Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Ditinjau dari Kabupaten/Kota, Kabupaten Dharmasraya menempati posisi tertinggi dalam kasus anak wasting dengan besaran 9,5. 2 poin diatas prevalensi balita wasting di Sumatera Barat. Sebaliknya Kabupaten Solok Selatan menempati posisi terendah yang hanya 4,6 poin.

5.5 KEMATIAN NEO NATAL, BAYI DAN BALITA

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak

secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/ perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Indonesia telah meraih banyak kemajuan dalam menurunkan angka kematian neonatal, bayi dan balita. Saat perempuan melahirkan hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar dan penting bagi seorang anak.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), serta menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Penurunan AKB menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan, serta kerjasama berbagai sektor telah mampu mengurangi AKI

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia telah menunjukkan penurunan, namun masih memerlukan upaya percepatan dan langkah-langkah untuk mempertahankan momentum tersebut, sehingga target AKB 16/1000 kelahiran hidup dapat tercapai pada akhir tahun 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) di Sumatera Barat di tahun 2023 menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 632 kasus. Angka kematian neonatal pada tahun 2023 sebanyak 588 kasus, angka kematian bayi 760 dan angka kematian balita sebanyak 56 kasus. Ketiga kelompok ini

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rata-rata penurunan pada kelompok tersebut sebanyak 200 kasus. Menurunnya angka kematian bayi di Sumatera Barat banyak dipengaruhi oleh meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Tabel 73 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Neonatal/Neonatal (0-28 hari/days)	Bayi/Infant (< 1 tahun/years Old)	Anak Balita/Toddler (1-5 tahun/years Old)
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
1. Kep. Mentawai	25	44	4
2. Pesisir Selatan	80	100	5
3. Solok	31	37	3
4. Sijunjung	26	43	6
5. Tanah Datar	40	49	1
6. Padang Pariaman	26	36	1
7. Agam	45	68	4
8. Lima Puluh Kota	34	49	1
9. Pasaman	48	66	12
10. Solok Selatan	15	18	–
11. Dharmasraya	32	45	3
12. Pasaman Barat	59	69	6
<i>Kota/Municipality</i>			
1. Padang	88	108	5
2. Solok	8	8	–
3. Sawahlunto	6	8	2
4. Padang Panjang	3	3	–
5. Bukittinggi	4	6	–
6. Payakumbuh	7	14	2
7. Pariaman	11	19	1
Sumatera Barat			
2023	588	790	56
2022	632	960	155
2021	727	955	96

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

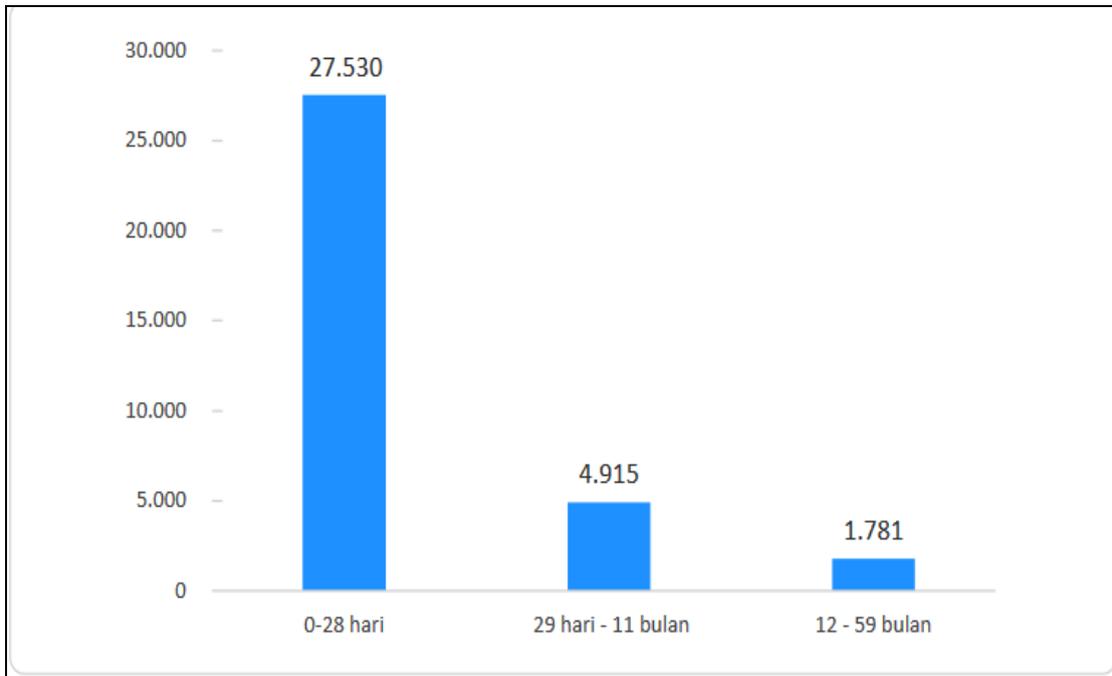
Dari gambar 27, terlihat bahwa total kematian balita dalam rentang usia 0-59 bulan pada tahun 2023 mencapai 34.226 kematian. Mayoritas kematian terjadi pada periode neonatal (0-28 hari) dengan jumlah 27.530 kematian (80,4% kematian terjadi pada bayi. Sementara itu, kematian pada periode post-neonatal (29 hari-11 bulan) mencapai 4.915 kematian (14,4%) dan kematian pada rentang usia 12-59 bulan mencapai 1.781 kematian (5,2%). Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah kematian balita pada tahun 2022, yang hanya mencapai 21.447 kasus

Penyebab kematian ibu dan bayi saling berkaitan satu sama lain tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Kematian bayi sendiri bisa disebabkan banyak hal. Mulai dari keracunan kehamilan pendarahan saat persalinan, gagal napas, berat badan lahir rendah, dan faktor lain. Namun, hal-hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan syarat, ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan diri dan janin.

Meskipun demikian, angka kematian neonatus, bayi, dan balita diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKN menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sementara, sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan, AKABA diharapkan dapat mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030.

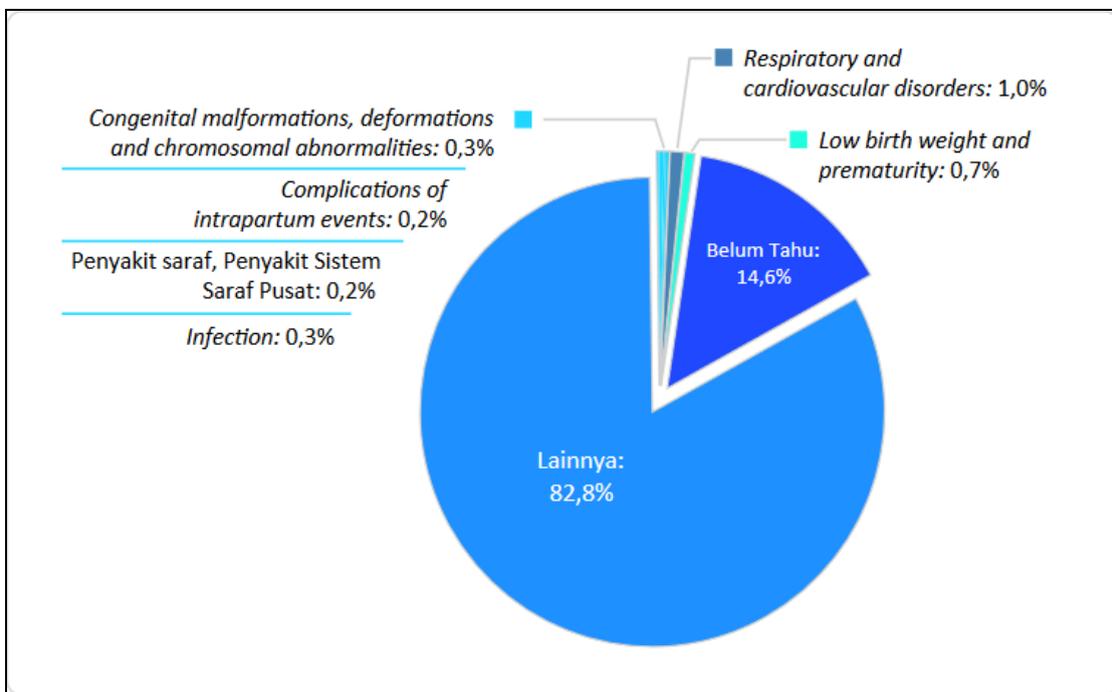
Dengan jumlah kematian yang signifikan pada masa neonatal, penyebab utama kematian pada tahun 2023, diantaranya adalah Respiratory dan Cardiovascular (1%), Kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan persentase sebesar 0,7%. Kelainan Congenital (0,3%), Infeksi (0,3%), Penyakit saraf, penyakit sistem saraf pusat (0,2%), komplikasi intrapartum (0,2%). Belum diketahui penyebabnya (14,5%) dan lainnya (82,8%). penyebab kematian lain diantaranya kelainan kongenital, infeksi, Covid 19, tetanus neonatorium dan lain-lain

Gambar 27 Jumlah Kematian Balita (0-59 Bulan) Menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023



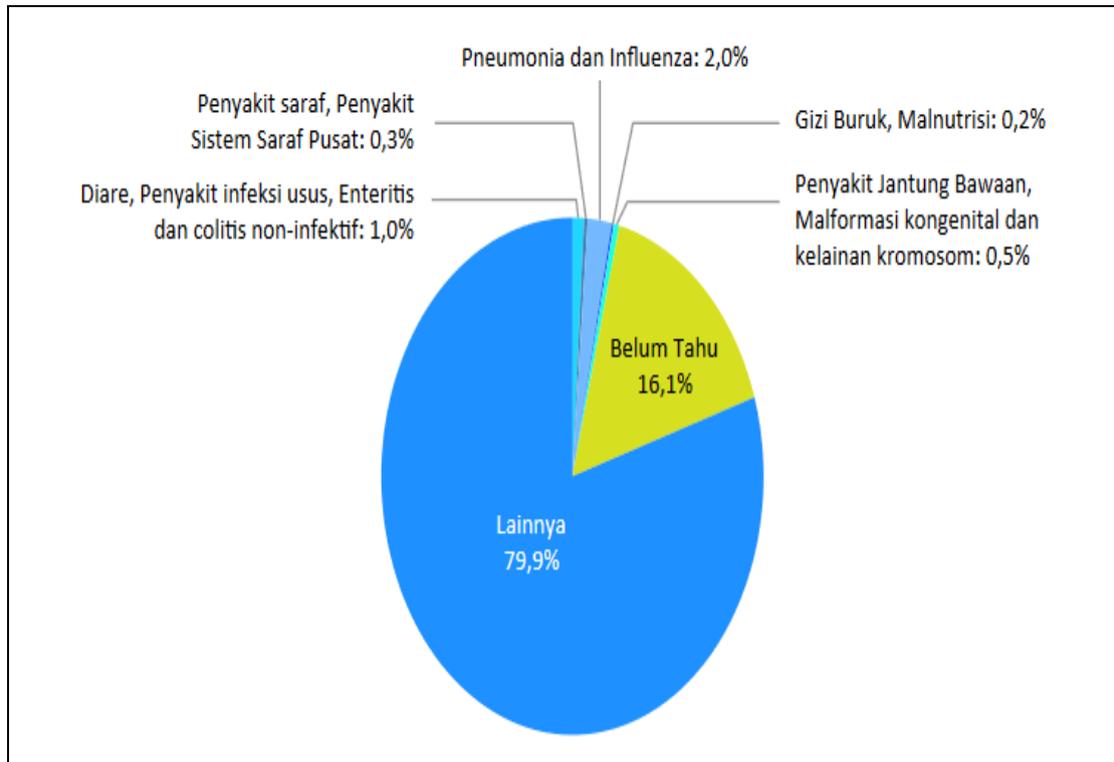
Sumber : Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Gambar 28 Proporsi Penyebab Kematian Neo Natal (0-28 Hari) Di Indonesia, 2023



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

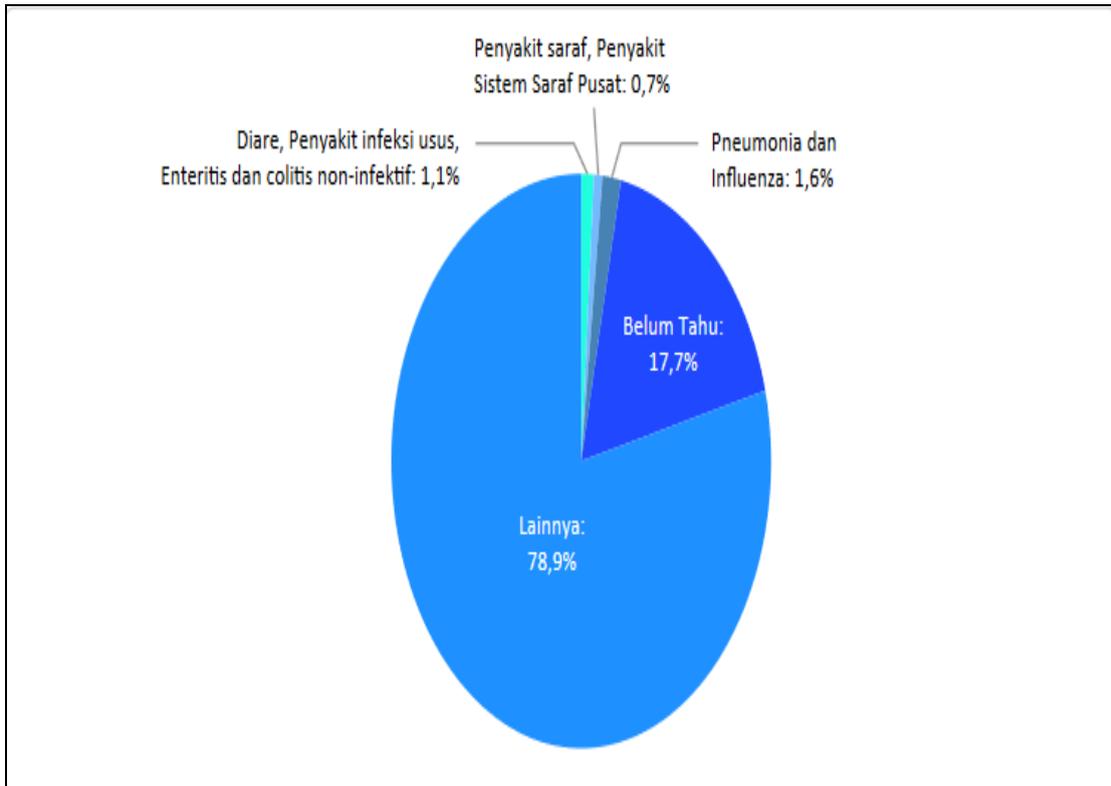
Gambar 29 Proporsi Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Di Indonesia, 2023



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Penyebab kematian pada post-neonatal di Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan Pneumonia menjadi penyebab kematian pada periode post-neonatal, menyumbang sekitar 2% dari kematian. Diare, penyakit infeksi usus, enteritis dan colitis non-infeksi sekitar 1%. Diare juga memiliki kontribusi sebesar 1% terhadap kematian pada post-neonatal. Penyakit jantung bawaan, kelainan kongenital juga merupakan penyebab yang signifikan, menyebabkan sekitar 0,5% dari kematian pada periode ini. Penyakit saraf dan penyakit sistem saraf pusat 0,3% tercatat sebagai penyebab kematian pada periode post-neonatal. Kematian yang disebabkan oleh gizi buruk atau malnutrisi 0,2%. Sekitar 16,1% dari kematian pada periode post-neonatal belum memiliki penjelasan yang belum diketahui penyebabnya. Meskipun penyakit seperti pneumonia, kelainan kongenital, dan diare menyumbang beberapa kasus kematian pada periode post-neonatal. Masih ada banyak kasus (79,9%) yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelidikan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian pada periode ini

**Gambar 30 Proporsi Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)
Di Indonesia, 2023**



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Penyebab kematian pada balita kelompok usia 12-59 bulan adalah pneumonia (1,6%), diare (1,1%, Penyakit saraf, sistem saraf pusat (0,7%). Penyebab lainnya (78,9%). Dari penyebab lainnya, yang dapat diketahui secara spesifik beberapa diantaranya: Tbc, Kongenital dan kelainan, keganasan COO-D49 dan Keracunan, Tenggelam (1,2%). Selebihnya dari beberapa kasus kematian pada periode post-neonatal, masih ada banyak kasus yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelidikan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian pada periode ini.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita dan parsekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak. Ekonomi, budaya dan daerah endemis menjadi kontributor dalam kematian anak balita di Indonesia.

5.6 KESEHATAN ANAK

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar dan penting bagi seorang anak. Kesehatan anak di tahun-tahun awal kehidupan, memperkuat sistem biologis yang berkembang yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang sehat. Anak yang sehat dan lingkungan yang positif memberi anak-anak dasar untuk membangun arsitektur otak yang kokoh, yang mendukung berbagai keterampilan dan kapasitas belajar sepanjang umur. Dengan demikian kesehatan anak adalah kekayaan bangsa kita.

5.6.1 Imunisasi

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Program imunisasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah imunisasi dasar untuk bayi sebelum berumur sebelum berumur 1 (satu) tahun dan dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan untuk anak dibawah 2 (dua) tahun. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi terhadap beberapa penyakit, yaitu imunisasi BCG untuk mencegah penyakit tuberkolosis (TBC), hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B, polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis, DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus serta imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B

Program imunisasi dasar lengkap dari pemerintah diberikan pada bayi berumur sebelum 1 (satu) tahun. Anak umur 12-23 bulan dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap jika sudah menerima 1 (satu) kali imunisasi BCG, 3

(tiga) kali imunisasi polio, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 3 (tiga) kali imunisasi hepatitis B dan 1 (satu) kali imunisasi campak.

Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya.

Tabel 74 Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	BCG	DPT	Polio	Campak-Rubella (MR)/MMR Measles-Rubella (MR)/ MMR	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	92,21	79,28	84,07	64,12	77,72
Kab. Pesisir Selatan	81,96	74,86	80,64	54,44	77,53
Kab. Solok	80,59	63,89	73,66	42,71	76,59
Kab. Sijunjung	95,27	89,05	91,95	68,65	94,03
Kab. Tanah Datar	87,10	72,20	77,42	54,62	77,29
Kab. Padang Pariaman	80,67	75,04	78,01	52,76	78,69
Kab. Agam	90,83	77,41	82,03	65,55	80,53
Kab. Lima Puluh Kota	92,06	87,18	87,42	69,29	89,67
Kab. Pasaman	78,89	66,92	79,18	45,02	76,13
Kab. Solok Selatan	86,35	74,79	77,85	53,10	65,94
Kab. Dharmasraya	85,00	83,02	83,83	67,32	92,21
Kab. Pasaman Barat	80,06	59,89	71,86	47,23	60,34
Kota Padang	83,30	78,32	80,95	56,05	84,13
Kota Solok	89,24	82,22	81,20	63,40	81,54
Kota Sawahlunto	92,62	85,21	88,82	65,90	88,97
Kota Padang Panjang	91,31	82,30	80,49	61,17	78,51
Kota Bukittinggi	73,21	68,54	56,72	52,90	61,17
Kota Payakumbuh	77,52	67,30	65,13	47,36	65,28
Kota Pariaman	82,15	73,05	81,65	47,13	78,42
Sumatera Barat	84,48	74,76	79,30	56,00	78,55

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Imunisasi mendapat tantangan yang cukup besar terkait berkembangnya isu yang tidak positif tentang imunisasi. Berdasarkan data Susenas 2023, di Sumatera Barat rata-rata anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebanyak 39,12 persen. Imunisasi campak adalah jenis yang paling sedikit dilakukan anak usia 0-59 bulan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan data partisipasi imunisasi paling tinggi adalah jenis imunisasi BCG yaitu sebanyak 84,48 persen.

Tabel 75 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,73	22,52	24,79
Sumatera Utara	42,25	42,44	41,04
Sumatera Barat	38,57	39,25	39,12
Riau	44,95	44,44	45,03
Jambi	53,64	53,94	52,99
Sumatera Selatan	53,49	53,55	54,30
Bengkulu	72,07	71,87	71,41
Lampung	71,29	75,98	73,76
Kep. Bangka Belitung	69,85	74,12	72,51
Kep. Riau	67,79	70,05	70,75
DKI Jakarta	62,08	62,77	65,76
Jawa Barat	56,26	61,70	64,45
Jawa Tengah	76,50	73,89	74,83
DI Yogyakarta	73,07	83,89	84,50
Jawa Timur	69,74	75,29	75,41
Banten	51,97	51,98	50,82
Bali	82,82	82,22	81,65
Nusa Tenggara Barat	67,66	67,40	70,74
Nusa Tenggara Timur	73,54	73,39	72,12
Kalimantan Barat	55,46	51,83	53,78
Kalimantan Tengah	53,34	54,86	56,36
Kalimantan Selatan	69,27	70,30	69,60
Kalimantan Timur	71,37	72,90	69,51
Kalimantan Utara	70,99	71,75	70,01
Sulawesi Utara	69,63	68,47	67,80
Sulawesi Tengah	68,82	68,05	60,82
Sulawesi Selatan	68,37	68,61	67,85
Sulawesi Tenggara	70,49	70,48	71,81
Gorontalo	72,02	69,27	70,56
Sulawesi Barat	56,23	54,88	58,44
Maluku	60,14	60,46	60,12
Maluku Utara	51,80	50,80	52,55
Papua Barat	56,27	54,66	53,24
Papua	49,59	46,21	50,37
Indonesia	61,09	63,17	63,58

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa 63,58 persen anak umur 12-23 bulan menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023. Untuk melengkapi hasil dari Susenas BPS mengumpulkan data tentang lokasi pemberian imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa dari 100 anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi imunisasi, sekitar 54 anak diberi imunisasi di posyandu (Gambar 31). Hal ini kemungkinan dikarenakan keberadaan posyandu yang cukup banyak di masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sesuai dengan konsep tersebut, keberadaan posyandu lebih banyak tersebar di masyarakat sehingga lebih mudah diakses untuk memperoleh imunisasi anak.

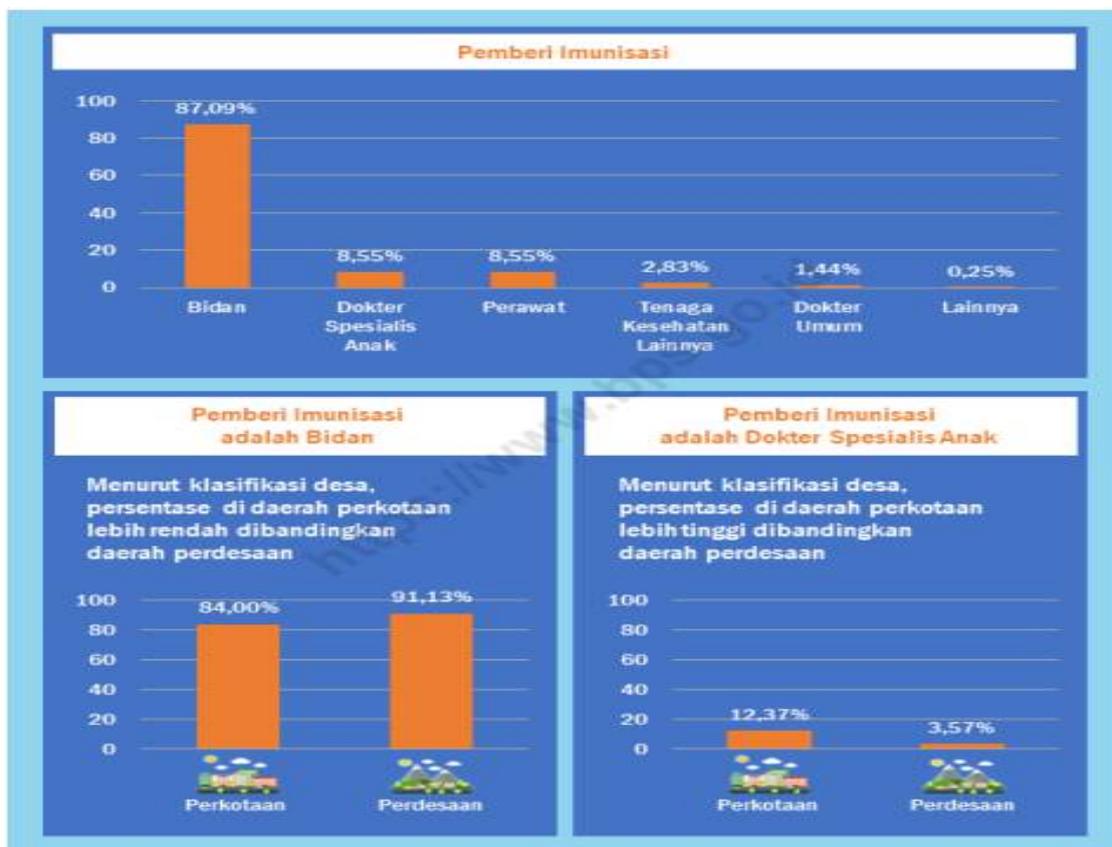
Gambar 31 Lokasi Pemberian Imunisasi Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi, 2022



Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Selain lokasi pemberian imunisasi, Susenas MKP 2022 juga menghasilkan data pemberi imunisasi. Gambar 32 menunjukkan bahwa bidan merupakan pemberi imunisasi dengan persentase terbesar yaitu sebesar 87,09 persen. Dengan kata lain, dari 100 anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi imunisasi, sekitar 87 anak diberi imunisasi oleh bidan. Tingginya persentase imunisasi oleh bidan disebabkan peran bidan yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan obyek di tengah Masyarakat. Persentase menurut klasifikasi desa menunjukkan bahwa persentase anak umur 0- 23 bulan yang pernah diberi imunisasi oleh bidan untuk daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Adapun untuk anak umur 0-23 bulan yang pernah diberi imunisasi oleh dokter spesialis anak, persentasenya sebesar 8,55 persen, dengan persentase untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Gambar 32 Pemberi Imunisasi Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi, 2022



Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 76 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi yang Diterima, 2023

Karakteristik	BCG (1 Kali)	DPT (3 Kali)	Polio (3 Kali)
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	92,03	89,63	89,49
Perdesaan	89,31	86,56	87,44
Jenis Kelamin	90,75	87,87	88,23
Laki-laki	90,98	88,76	88,99
Perempuan	89,79	85,71	85,11
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	90,60	87,64	88,83
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	91,49	88,57	89,96
SD/Sederajat	90,41	88,73	88,14
SMP/Sederajat	92,47	90,24	90,10
SMA/Sederajat	90,41	87,21	87,42
Perguruan Tinggi	90,93	88,02	87,63
Status Ekonomi	90,00	87,84	88,77
Kuintil 1	91,01	89,06	89,62
Kuintil 2	92,64	90,65	91,03
Kuintil 3	92,03	89,63	89,49
Kuintil 4	89,31	86,56	87,44
Kuintil 5	90,75	87,87	88,23
Indonesia	90,86	88,31	88,61

Karakteristik	Campak (1 Kali)	HB (3 Kali)
(1)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	75,88	88,40
Perdesaan	74,68	85,12
Jenis Kelamin	75,02	86,91
Laki-laki	75,71	87,07
Perempuan	72,19	83,51
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	74,48	87,04
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	73,16	87,91
SD/Sederajat	76,69	86,81
SMP/Sederajat	79,54	88,72
SMA/Sederajat	73,54	85,84
Perguruan Tinggi	74,15	86,18
Status Ekonomi	72,88	86,64
Kuintil 1	77,01	87,93
Kuintil 2	82,23	89,86
Kuintil 3	75,88	88,40
Kuintil 4	74,68	85,12
Kuintil 5	75,02	86,91
Indonesia	75,36	86,99

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT) memegang peranan penting dalam suksesnya program imunisasi. menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan KRT, persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap semakin tinggi. Pendidikan KRT yang tinggi berhubungan dengan lebih banyaknya pengetahuan tentang pentingnya imunisasi untuk anak. Selain pendidikan KRT, pendidikan ibu juga memberikan pengaruh besar dalam pemberian imunisasi dasar lengkap kepada anaknya.

Tabel 77 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Pemberi Imunisasi, 2022

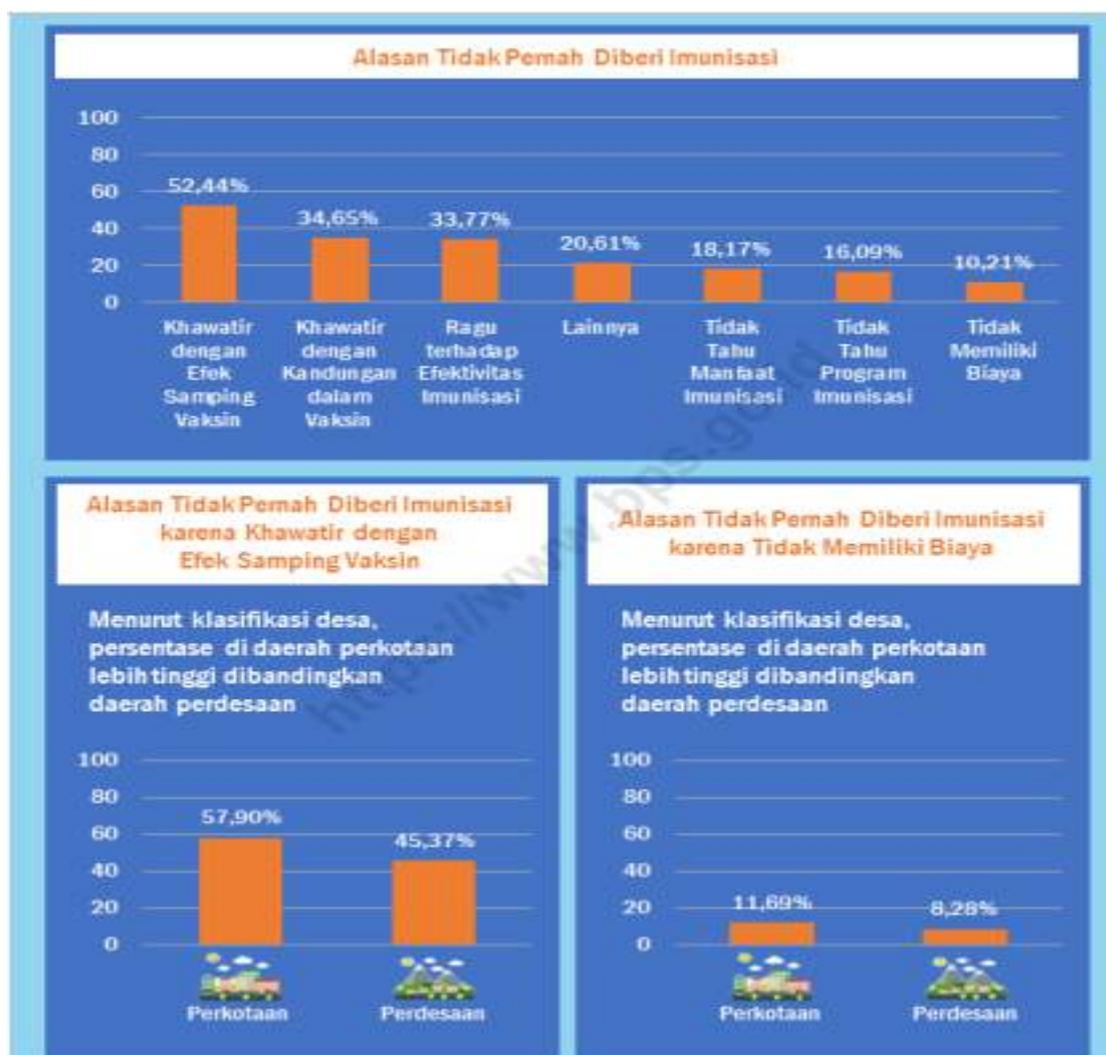
Karakteristik	Dokter Spesialis Anak	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	12,37	1,95	84,00	7,12	2,75	0,19
Perdesaan	3,57	0,78	91,13	10,42	2,95	0,34
Jenis Kelamin KRT						
Laki-laki	8,53	1,34	87,18	8,52	2,90	0,27
Perempuan	8,93	NA	85,58	8,99	1,69	NA
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT						
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	3,65	1,02	90,22	11,23	2,77	NA
SD/Sederajat	4,32	1,19	91,09	7,52	2,48	NA
SMP/Sederajat	5,93	1,27	88,90	8,67	3,06	NA
SM/Sederajat	8,27	1,20	88,18	8,28	2,91	0,30
Perguruan Tinggi	24,40	3,10	71,72	9,51	2,97	NA
Status Ekonomi						
Kuintil 1	2,60	0,96	91,34	7,68	2,39	0,47
Kuintil 2	3,78	1,58	90,86	8,90	3,93	NA
Kuintil 3	5,76	1,13	88,76	9,06	3,66	NA
Kuintil 4	11,72	1,46	86,88	8,63	2,07	0,21
Kuintil 5	26,65	2,51	71,58	8,92	1,88	NA
Indonesia	8,55	1,44	87,09	8,55	2,83	0,25

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Terdapat beberapa alasan orang tua tidak memberikan imunisasi kepada anaknya antara lain khawatir dengan efek samping vaksin, khawatir dengan kandungan dalam vaksin, ragu terhadap efektifitas imunisasi, lainnya, tidak tahu manfaat imunisasi, tidak tahu program imunisasi dan tidak memiliki biaya. Khawatir dengan efek samping menjadi alasan utama masyarakat

untuk tidak memberikan imunisasi, yang mencapai angka 52,44%. Sementara itu, anak umur 0-23 bulan yang tidak pernah diberi imunisasi karena khawatir dengan kandungan dalam vaksin serta ragu terhadap efektivitas imunisasi masing-masing persentasenya 34,65 persen dan 33,77 persen. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan anak-anak melalui imunisasi, imunisasi rutin wajib (dasar dan lanjutan) bebas biaya karena ditanggung oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan, 2022). Hal ini kemungkinan merupakan salah satu penyebab hanya sebagian kecil anak yang tidak diberi imunisasi karena tidak memiliki biaya (10,21 persen)

Gambar 33 Alasan Anak Umur 0-23 Bulan Tidak Pernah Diberi Imunisasi, 2022



Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 78 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Alasan, 2022

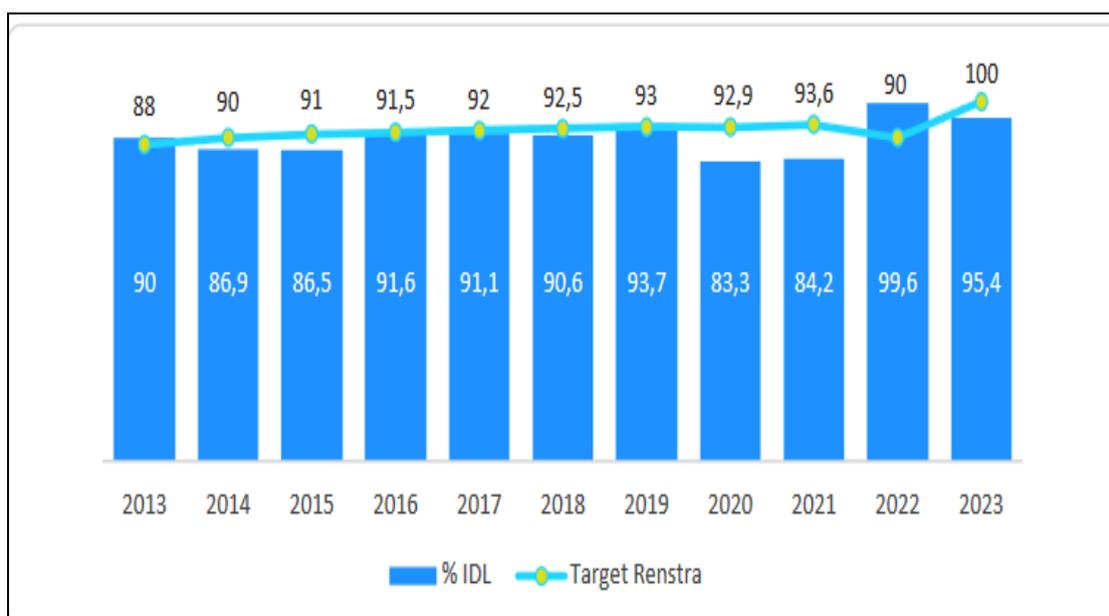
Karakteristik	Tidak Tahu Manfaat Imunisasi	Tidak Memiliki Biaya	Tidak Tahu Program Imunisasi	Khawatir dengan Efek Samping Vaksin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	16,94	11,69	17,46	57,90
Perdesaan	19,75	8,28	14,32	45,37
Jenis Kelamin KRT				
Laki-laki	18,51	10,84	15,66	52,24
Perempuan	NA	NA	NA	55,24
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	33,73	NA	17,26	52,14
SD/Sederajat	13,59	12,77	20,77	45,37
SMP/Sederajat	27,48	8,04	17,75	51,42
SM/Sederajat	12,57	15,32	13,60	61,67
Perguruan Tinggi	7,62	NA	NA	47,03
Status Ekonomi				
Kuintil 1	18,01	15,38	20,90	44,04
Kuintil 2	20,98	9,11	10,39	51,50
Kuintil 3	6,14	NA	13,43	58,15
Kuintil 4	23,51	NA	23,42	62,81
Kuintil 5	NA	NA	NA	58,22
Indonesia	18,17	10,21	16,09	52,44

Karakteristik	Khawatir dengan Kandungan dalam Vaksin	Ragu terhadap Efektivitas Imunisasi	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	35,00	30,94	16,38
Perdesaan	34,20	37,43	26,09
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	34,09	34,71	19,71
Perempuan	42,37	20,71	33,03
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	21,46	13,33	18,72
SD/Sederajat	29,53	28,49	32,04
SMP/Sederajat	36,70	44,41	14,43
SM/Sederajat	41,01	38,93	15,16
Perguruan Tinggi	39,89	29,89	21,88
Status Ekonomi			
Kuintil 1	36,23	27,55	26,03
Kuintil 2	36,73	30,00	21,53
Kuintil 3	35,21	30,16	16,74
Kuintil 4	32,30	38,72	14,91
Kuintil 5	27,41	60,63	15,21
Indonesia	34,65	33,77	20,61

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yaitu 95,4%. Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2023 sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan di mana jumlah provinsi yang mencapai target Renstra berkurang dari 9 provinsi menjadi 6 provinsi. Pada tahun 2022, Indonesia mencapai 94,6 persen cakupan imunisasi lengkap, melebihi target nasional sebesar 94,1 persen. Sebab, masih ada sekitar 5% atau 240.000 anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan tambahan dari imunisasi dasar lengkap. Artinya mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Adapun cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target Renstra 83,8 % pada tahun 2021. Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi selama 3 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 cenderung menurun, namun sedikit meningkat pada tahun 2021, yaitu sebesar 58,0% seperti tersaji dalam gambar 35. Kesenjangan capaian dibandingkan target ditetapkan semakin besar setiap tahunnya.

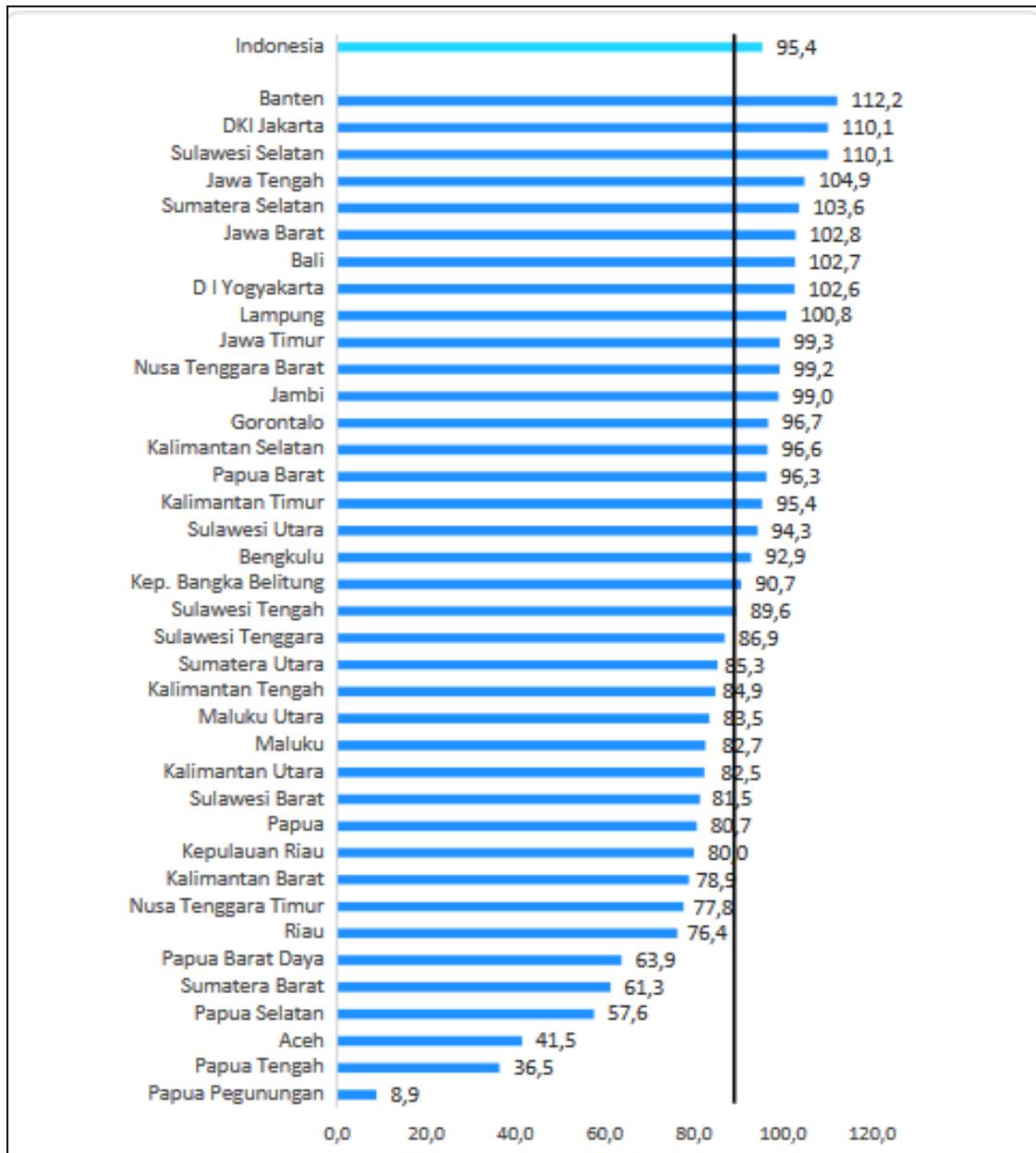
Gambar 34 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2013-2023



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Pada gambar 35 dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat kelima terendah yaitu 61,3% dalam cakupan IDL.

Gambar 35 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2023



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

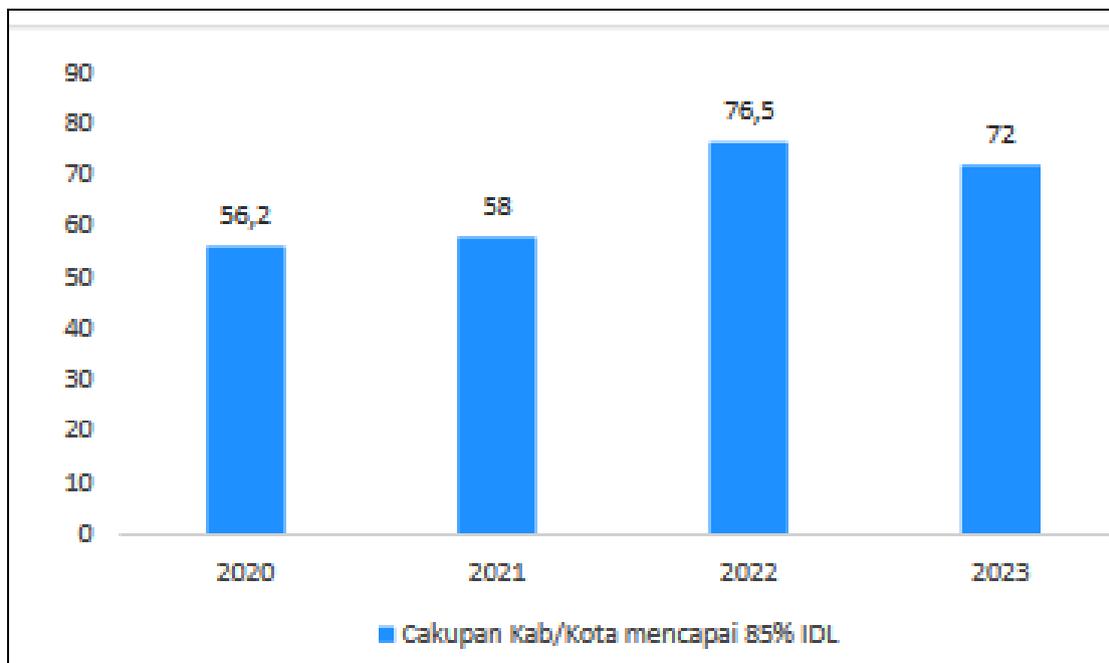
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Hal ini

mengindikasikan sejauh mana pelayanan imunisasi dasar telah tersedia dan dapat diakses secara merata di berbagai daerah.

Ketika persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah berhasil memberikan pelayanan imunisasi dasar yang cukup baik kepada bayi-bayi di daerah tersebut. Ini bisa mengindikasikan adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai di sektor kesehatan.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun persentase ini mencapai target, evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan imunisasi dasar tersebut tidak hanya merata secara geografis, tetapi juga mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau terpinggirkan. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan agar semua anak memiliki akses yang setara terhadap imunisasi dasar yang diperlukan.

Gambar 36 Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap, 2020-2023

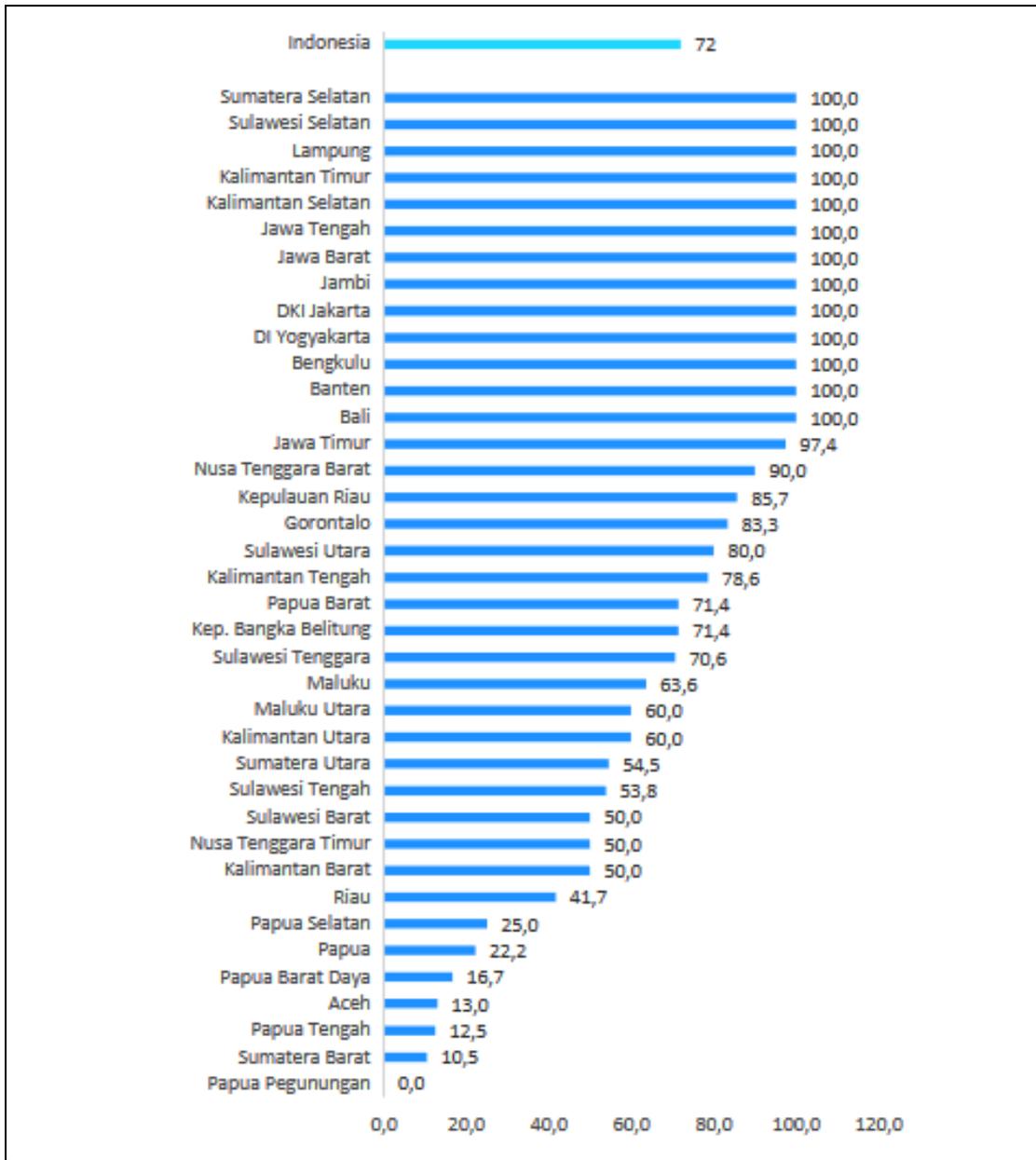


Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Peningkatan jumlah provinsi dengan kabupaten/kotanya yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan penurunan dalam Upaya peningkatan cakupan imunisasi di berbagai wilayah. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya imunisasi dalam melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah. Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap selama tiga tahun terakhir, seperti yang disebutkan, dapat dilihat pada tabel 79 dibawah. Data ini memberikan penjelasan tentang progres imunisasi di setiap wilayah, serta memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan imunisasi di seluruh negeri. Dengan memahami tren ini, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk terus meningkatkan cakupan imunisasi dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

Pada gambar 37 dapat diketahui, jumlah Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang telah mencapai 85% Imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan dari tahun 2022 sd 2023, berjumlah 15 Provinsi. Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat kedua terendah dengan capaian hanya 10,5%, bahkan berada di bawah beberapa Provinsi Papua. Ini artinya hanya 1 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian 85% IDL. Dibutuhkan peran Pemerintah untuk melakukan peningkatan capaian dengan terus mensosialisasikan pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi kesehatan anak.

Gambar 37 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2023



Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Tabel 79 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2021-2023

No	Provinsi	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Kab./Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab./Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab./Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	2	8,7	23	4	17,4	23	3	13,0
2	Sumatera Utara	33	14	42,4	33	23	69,7	33	18	54,5
3	Sumatera Barat	19	2	10,5	19	5	26,3	19	2	10,5
4	Riau	12	2	16,7	12	6	50,0	12	5	41,7
5	Jambi	11	7	63,6	11	11	100,0	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	17	17	100,0	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	10	100,0	10	10	100,0
8	Lampung	15	12	80,0	15	15	100,0	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1	7	4	57,1	7	5	71,4
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4	7	7	100,0	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	2	33,3	6	6	100,0	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	21	77,8	27	27	100,0	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	26	74,3	35	35	100,0	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	5	100,0	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	26	68,4	38	37	97,4	38	37	97,4
16	Banten	8	7	87,5	8	8	100,0	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0	9	9	100,0	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	10	10	100,0	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9	22	15	68,2	22	11	50,0
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6	14	9	64,3	14	7	50,0
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6	14	13	92,9	14	11	78,6
22	Kalimantan Selatan	13	7	53,8	13	12	92,3	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	10	10	100,0	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0	5	3	60,0	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	8	53,3	15	11	73,3	15	12	80,0
26	Sulawesi Tengah	13	8	61,5	13	8	61,5	13	7	53,8
27	Sulawesi Selatan	24	22	91,7	24	23	95,8	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	11	64,7	17	11	64,7	17	12	70,6
29	Gorontalo	6	5	83,3	6	6	100,0	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	3	50,0	6	5	83,3	6	3	50,0
31	Maluku	11	5	45,5	11	7	63,6	11	7	63,6
32	Maluku Utara	10	5	50,0	10	7	70,0	10	6	60,0
33	Papua	29	7	24,1	29	8	27,6	9	2	22,2
34	Papua Barat	13	3	23,1	13	6	46,2	7	5	71,4
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	4	1	25,0
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	6	1	16,7
	Indonesia	514	298	58,0	514	393	76,5	514	369	71,8

Sumber: Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia, 2023

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Berikut jumlah bayi di Sumatera Barat yang pernah mendapat imunisasi dan jenis imunisasi

Tabel 80 Jumlah Bayi yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Bayi <i>Number of Infant</i> (Sasaran/ <i>Target</i>)	Jenis Imunisasi/ <i>Type of Immunization</i>					
		BCG	DPT1 +HB1	DPT3 +HB3	Polio <i>Polio</i>	Campak <i>Measles</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<i>Kabupaten/Regency</i>							
1. Kep. Mentawai	2.260	1.585	1.635	1.617	1.567	1.499	
2. Pesisir Selatan	8.095	7.745	7.434	6.955	7.860	8.422	
3. Solok	6.634	5.474	5.258	4.509	5.612	5.640	
4. Sijunjung	4.951	3.464	3.345	3.161	3.469	3.776	
5. Tanah Datar	5.269	3.761	3.303	2.477	4.386	2.753	
6. Padang Pariaman	6.808	5.542	5.108	4.644	5.911	5.044	
7. Agam	8.348	4.990	4.438	3.671	5.507	3.850	
8. Lima Puluh Kota	6.542	4.328	3.805	3.396	4.522	3.381	
9. Pasaman	5.837	4.453	4.143	3.726	4.593	4.372	
10. Solok Selatan	3.427	2.106	1.933	1.478	2.172	1.481	
11. Dharmasraya	5.534	3.336	3.008	2.687	3.389	3.027	
12. Pasaman Barat	10.217	6.579	5.838	5.102	6.781	5.548	
<i>Kota/Municipality</i>							
1. Padang	15.806	11.824	11.560	10.452	12.122	11.777	
2. Solok	1.461	1.080	1.040	875	1.123	871	
3. Sawahlunto	1.110	773	734	671	811	704	
4. Padang Panjang	1.080	722	700	640	726	698	
5. Bukittinggi	2.635	2.033	1.958	1.346	2.090	1.869	
6. Payakumbuh	2.766	2.009	1.510	1.295	1.902	1.398	
7. Pariaman	1.491	1.263	1.153	987	1.395	1.144	
Sumatera Barat	2023	100.271	73.067	67.903	59.689	75.938	67.254
	2022¹	99.518	72.825	69.500	63.969	62.176	61.837
	2021	99.518	72.825	69.500	63.969	62.176	61.837
	2020	106.018	71.451	67.197	61.791	61.699	56.889

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Anak-anak dengan penyakit menular memiliki kemampuan terbatas untuk mempertahankan gizi dan oleh karena itu berisiko lebih besar mengalami malnutrisi dan keterlambatan perkembangan terkait gizi (IVAC 2020). Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Program imunisasi dasar lengkap menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, yang terdiri dari BCG, DPT1 HB1, DPT HB3, polio dan campak dan hepatitis

Tinggi rendahnya cakupan imunisasi dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, sikap petugas, lokasi imunisasi, kehadiran petugas, usia ibu, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, kepercayaan terhadap dampak buruk pemberian imunisasi, status pekerjaan ibu, tradisi keluarga, dan dukungan keluarga.

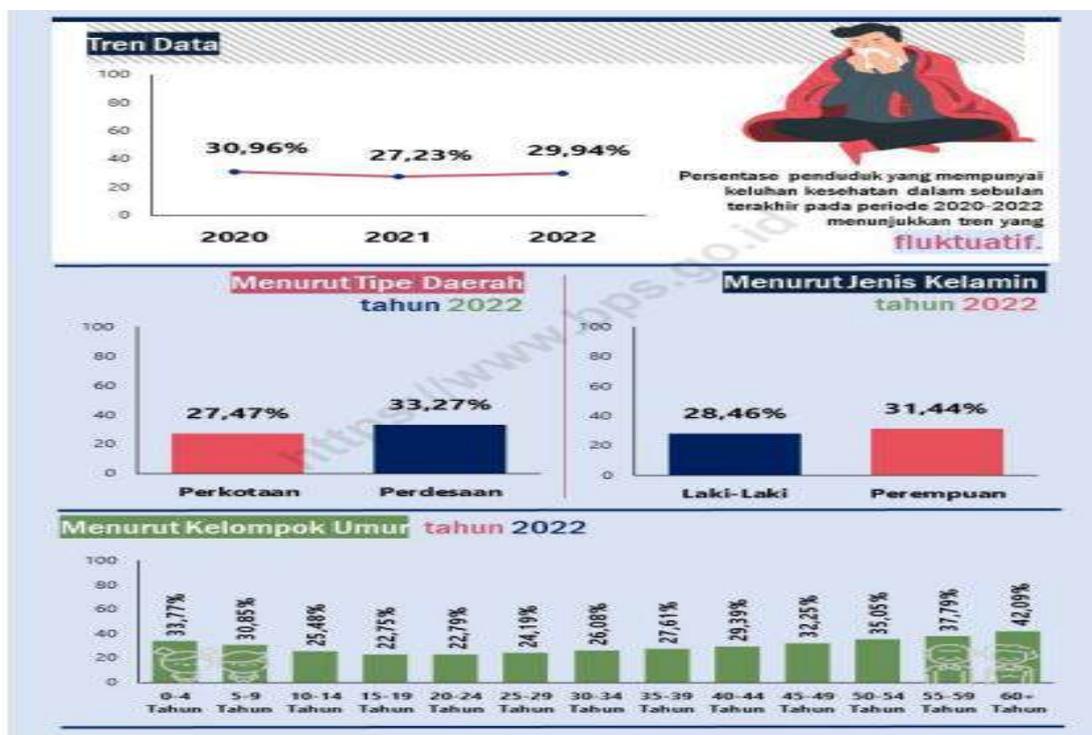
5.6.2 Keluhan Kesehatan

Kesehatan anak sangat penting untuk dijaga sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kondisi fisik yang prima mendukung anak untuk dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu penanganan terhadap anak yang mengalami gangguan kesehatan harus segera dilakukan. Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan haruslah terjangkau agar keluarga dapat dengan mudah mendapatkan penanganan ketika memiliki gangguan kesehatan.

Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Keluhan kesehatan yang banyak dialami anak adalah penyakit infeksi saluran atas (ISPA) dan infeksi pencernaan (diare). ISPA dan diare merupakan penyebab utama kematian dan morbiditas anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Diare dan ISPA pada anak-anak <5 tahun hadir sebagai komorbiditas simultan dan hubungannya menjadi lebih kuat dengan tingkat keparahan penyakit. Penyakit infeksi ISPA dan diare juga berhubungan dan stunting. Anak yang terpapar diare akut berkepanjangan berhubungan positif dengan kejadian stunting.

Keluhan kesehatan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Keluhan kesehatan menunjukkan gejala penyakit atau kondisi tubuh yang tidak sehat. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Data mengenai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya mengintervensi program-program kesehatan. Selain angka keluhan kesehatan, indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan penduduk lainnya adalah angka kesakitan atau morbiditas. Angka kesakitan dihitung dari jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi. Jumlah orang yang sakit diukur dengan pendekatan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari

Gambar 38 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022

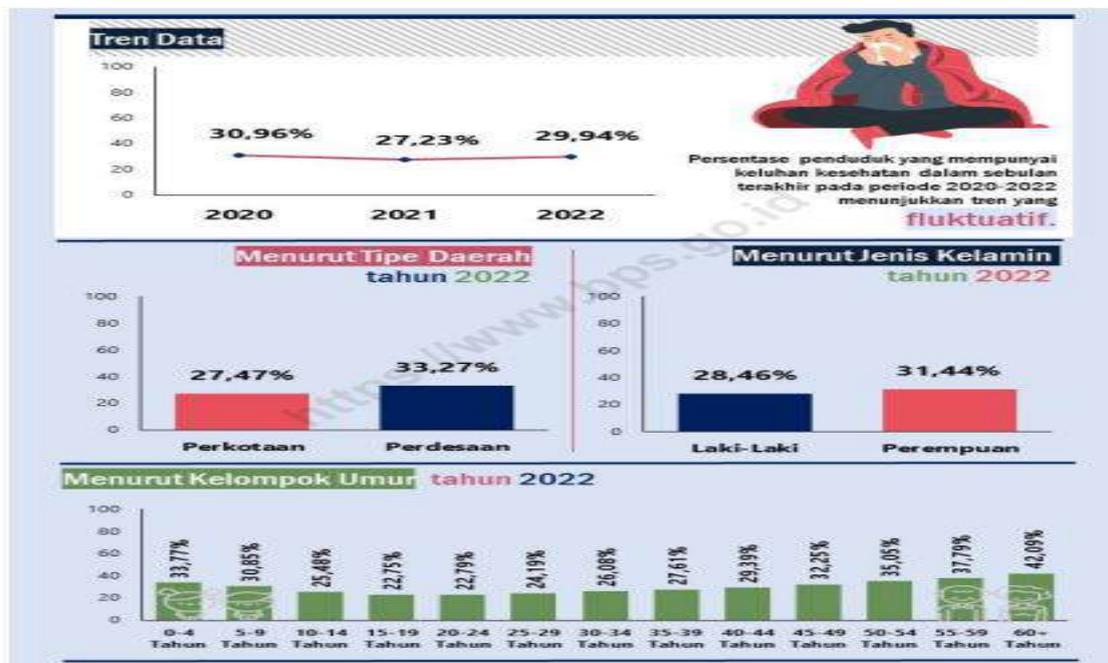


Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Data Susenas Maret tiga tahun terakhir yang disajikan pada Gambar dibawah memperlihatkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menunjukkan angka sebesar 29,94 persen pada tahun 2022. Tren data tiga tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Perlu diingat bahwa keluhan kesehatan ini bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, namun hanya merupakan persepsi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tren data yang fluktuatif bisa saja diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda sehingga penduduk cenderung menutupi keluhan kesehatan yang dialami.

Keluhan kesehatan menurut jenis kelamin menunjukkan persentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir relatif lebih tinggi pada perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki (31,44 persen berbanding 28,46 persen). Sedangkan menurut tipe daerah, persentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir lebih tinggi di daerah perdesaan jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan (33,27 persen berbanding 27,47 persen).

Gambar 39 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik,2020-2022



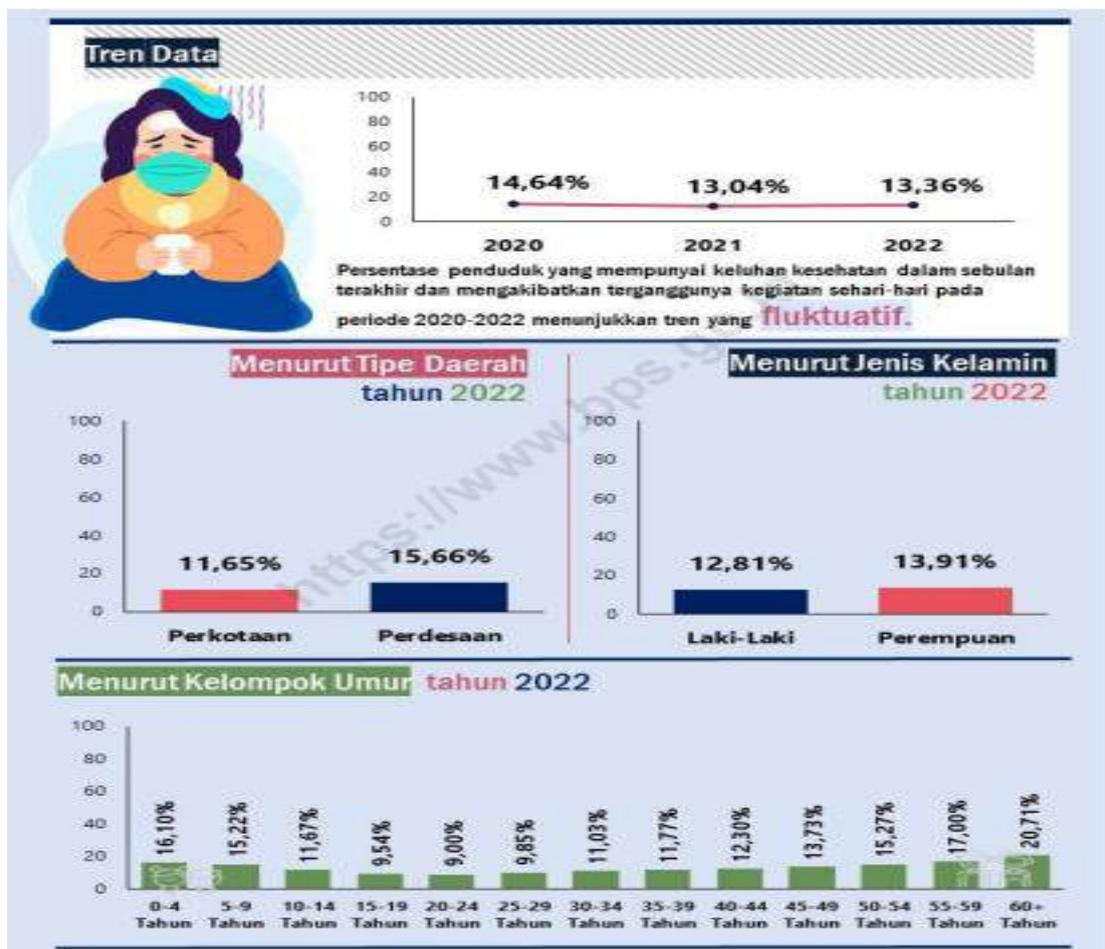
Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Terlepas dari ada tidaknya upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan kesehatan, terkadang keluhan kesehatan tersebut

berakibat pada terganggunya produktivitas penduduk dalam bekerja, sekolah, ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. Gambar 40 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 13 dari 100 penduduk mengaku mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Apabila dilihat dari tipe daerah, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Adapun dari segi jenis kelamin, persentase untuk penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Gambar 40 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Dari segi kelompok umur, Gambar 39 dan Gambar 40 memperlihatkan bahwa baik persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir maupun persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari memiliki pola yang sama yaitu menurun seiring dengan meningkatnya umur penduduk dan kemudian berbalik arah meningkat seiring dengan pertambahan umur penduduk. Pada usia balita, angka keluhan kesehatan relatif tinggi karena kekebalan tubuh balita belum sempurna sehingga masih rentan terhadap berbagai virus dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Sedangkan tingginya persentase keluhan kesehatan pada usia lansia bisa dikarenakan berkurangnya daya tahan dan fungsi organ tubuh dan adanya penyakit penyerta

Berikut beberapa tabel yang menggambarkan kondisi keluhan kesehatan pada tahun 2023.

Tabel 81 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	35,74	37,66	36,67
Kab. Pesisir Selatan	24,20	27,99	26,11
Kab. Solok	31,77	38,79	35,29
Kab. Sijunjung	31,35	33,52	32,45
Kab. Tanah Datar	28,03	31,37	29,74
Kab. Padang Pariaman	30,70	37,82	34,31
Kab. Agam	24,38	27,38	25,90
Kab. Lima Puluh Kota	20,47	26,80	23,64
Kab. Pasaman	22,92	28,79	25,88
Kab. Solok Selatan	26,61	30,69	28,64
Kab. Dharmasraya	25,26	30,96	28,03
Kab. Pasaman Barat	24,10	29,02	26,53
Kota Padang	25,90	32,27	29,10
Kota Solok	21,96	28,54	25,28
Kota Sawahlunto	24,60	26,79	25,71
Kota Padang Panjang	30,55	34,24	32,40
Kota Bukittinggi	29,04	32,78	30,97
Kota Payakumbuh	23,21	29,10	26,16
Kota Pariaman	36,19	41,15	38,71
Sumatera Barat	26,38	31,46	28,93

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Tabel 82 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Kep. Mentawai	26,80	26,44	23,82	23,61	36,67
2. Pesisir Selatan	30,09	31,06	27,27	41,79	26,11
3. Solok	31,89	30,70	25,94	23,47	35,29
4. Sijunjung	28,85	30,80	19,97	36,59	32,45
5. Tanah Datar	32,78	29,43	23,20	30,56	29,74
6. Padang Pariaman	37,77	41,15	28,19	30,79	34,31
7. Agam	25,65	32,10	19,79	23,24	25,90
8. Lima Puluh Kota	31,53	29,80	36,52	33,28	23,64
9. Pasaman	22,95	25,99	19,77	31,71	25,88
10. Solok Selatan	35,46	34,90	24,34	41,87	28,64
11. Dharmasraya	29,06	35,12	23,28	41,41	28,03
12. Pasaman Barat	22,59	22,52	31,42	21,92	26,53
Kota/Municipality					
1. Padang	30,13	31,43	19,60	10,76	29,10
2. Solok	26,20	25,25	17,11	30,22	25,28
3. Sawahlunto	28,34	33,42	20,31	38,06	25,71
4. Padang Panjang	37,40	39,30	24,21	39,35	32,40
5. Bukittinggi	33,38	30,62	22,16	34,79	30,97
6. Payakumbuh	28,80	31,80	21,44	34,59	26,16
7. Pariaman	34,56	32,76	33,82	47,79	38,71
Sumatera Barat	29,84	31,09	24,51	28,12	28,93

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 83 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27,12	25,16	32,91
Sumatera Utara	26,12	20,45	30,01
Sumatera Barat	31,09	24,51	28,12
Riau	24,66	22,78	27,07
Jambi	21,63	16,83	25,87
Sumatera Selatan	29,32	27,91	32,30
Bengkulu	30,23	26,63	26,66
Lampung	31,35	28,44	32,52
Kep. Bangka Belitung	31,25	26,16	35,11
Kep. Riau	18,21	14,72	18,41
DKI Jakarta	33,80	25,98	16,76
Jawa Barat	32,04	29,74	31,17
Jawa Tengah	35,63	29,81	35,34
DI Yogyakarta	38,07	30,20	35,73
Jawa Timur	32,80	28,55	32,14
Banten	32,22	28,41	24,09
Bali	25,48	23,62	20,45
Nusa Tenggara Barat	44,00	42,15	43,62
Nusa Tenggara Timur	34,44	30,14	29,06
Kalimantan Barat	25,84	21,32	25,30
Kalimantan Tengah	26,44	22,57	24,32
Kalimantan Selatan	34,88	32,02	31,88
Kalimantan Timur	22,65	21,32	26,46
Kalimantan Utara	26,04	25,18	34,87
Sulawesi Utara	24,98	22,09	23,31
Sulawesi Tengah	26,16	25,72	21,93
Sulawesi Selatan	28,91	28,03	33,49
Sulawesi Tenggara	29,23	25,80	30,98
Gorontalo	32,19	31,06	35,85
Sulawesi Barat	26,29	25,86	29,53
Maluku	18,55	16,42	15,60
Maluku Utara	15,97	15,66	16,41
Papua Barat	21,43	20,74	20,00
Papua	16,27	12,74	11,68
Indonesia	30,96	27,23	29,94

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 84 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Perdesaan/Rural			Perkotaan + Perdesaan/Urban + Rural		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	26,21	31,63	28,91	32,74	37,21	34,97	30,51	35,31	32,91
Sumatera Utara	27,44	30,61	29,03	29,52	32,94	31,27	28,40	31,63	30,01
Sumatera Barat	16,13	19,17	17,65	36,23	40,25	38,22	26,39	29,86	28,12
Riau	23,07	24,95	24,01	28,28	30,03	29,13	26,22	27,96	27,07
Jambi	16,61	16,77	16,69	29,45	31,41	30,40	25,25	26,52	25,87
Sumatera Selatan	31,62	35,05	33,34	30,77	32,64	31,68	31,08	33,57	32,30
Bengkulu	36,10	37,40	36,75	20,94	22,37	21,63	25,88	27,48	26,66
Lampung	23,16	26,73	24,93	34,96	37,50	36,19	31,17	33,94	32,52
Kepulauan Bangka Belitung	33,31	36,44	34,85	33,82	37,27	35,46	33,53	36,79	35,11
Kepulauan Riau	16,72	18,02	17,36	24,73	28,51	26,67	17,67	19,16	18,41
DKI Jakarta	15,65	17,88	16,76	0,00	0,00	0,00	15,65	17,88	16,76
Jawa Barat	28,00	30,70	29,33	36,31	39,67	37,97	29,76	32,61	31,17
Jawa Tengah	32,05	36,12	34,08	34,85	38,63	36,72	33,39	37,31	35,34
DI Yogyakarta	31,16	35,85	33,50	39,63	44,76	42,26	33,27	38,16	35,73
Jawa Timur	27,85	30,90	29,37	34,27	36,86	35,58	30,69	33,57	32,14
Banten	19,87	22,34	21,09	31,29	34,86	33,03	22,77	25,45	24,09
Bali	17,85	19,68	18,76	24,04	25,26	24,65	19,61	21,30	20,45
Nusa Tenggara Barat	39,09	41,85	40,47	44,93	48,76	46,83	41,98	45,25	43,62
Nusa Tenggara Timur	36,61	41,57	39,06	24,54	26,75	25,65	27,64	30,47	29,06
Kalimantan Barat	16,68	17,71	17,20	29,06	31,06	30,02	24,61	26,03	25,30
Kalimantan Tengah	21,55	23,28	22,40	24,55	27,00	25,71	23,31	25,40	24,32
Kalimantan Selatan	24,94	29,53	27,21	34,78	37,98	36,36	29,97	33,83	31,88
Kalimantan Timur	23,06	25,55	24,28	29,67	33,09	31,27	25,19	27,82	26,46
Kalimantan Utara	32,72	34,85	33,76	36,55	37,22	36,85	34,14	35,67	34,87
Sulawesi Utara	19,73	20,18	19,95	26,43	28,08	27,22	22,88	23,76	23,31
Sulawesi Tengah	22,15	22,81	22,48	20,48	22,94	21,67	21,00	22,90	21,93
Sulawesi Selatan	29,91	28,77	27,35	36,70	40,55	38,65	31,76	35,18	33,49
Sulawesi Tenggara	26,14	30,32	28,23	31,06	34,07	32,54	29,29	32,70	30,98
Gorontalo	35,35	38,43	36,92	32,84	37,31	35,01	33,92	37,82	35,85
Sulawesi Barat	32,72	35,29	34,01	26,44	30,41	28,38	27,69	31,42	29,53
Maluku	13,19	17,52	15,34	14,86	16,75	15,80	14,15	17,08	15,60
Maluku Utara	12,43	15,07	13,75	16,51	18,53	17,49	15,36	17,51	16,41
Papua Barat	17,36	20,33	18,79	19,99	21,79	20,85	18,91	21,18	20,00
Papua	14,31	16,01	15,11	10,01	10,58	10,28	11,26	12,15	11,68
Indonesia	26,01	28,96	27,47	31,76	34,82	33,27	28,46	31,44	29,94

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

Tabel 85 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022

Karakteristik	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	31,04	29,73	27,47
Perdesaan	30,85	23,95	33,27
Jenis Kelamin			
Laki-laki	29,29	26,15	28,46
Perempuan	32,65	28,32	31,44
Kelompok Umur			
0-4 tahun	43,73	34,92	33,77
5-9 tahun	34,81	25,03	30,85
10-14 tahun	25,45	18,45	25,48
15-19 tahun	20,49	17,98	22,75
20-24 tahun	20,47	21,30	22,79
25-29 tahun	21,57	23,37	24,19
30-34 tahun	23,86	24,64	26,08
35-39 tahun	25,74	23,46	27,61
40-44 tahun	28,41	25,31	29,39
45-49 tahun	32,22	28,29	32,25
50-54 tahun	36,67	31,26	35,05
55-59 tahun	40,57	35,46	37,79
60+ tahun	48,14	43,22	42,09
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	38,08	31,11	33,57
SD/Sederajat	31,55	28,11	32,75
SMP/Sederajat	25,81	24,19	28,09
SMA/Sederajat	25,15	24,04	25,63
Perguruan Tinggi	24,24	24,19	24,22
Status Ekonomi			
Kuintil 1	29,59	25,58	29,89
Kuintil 2	30,66	26,31	31,25
Kuintil 3	31,3	27,57	30,84
Kuintil 4	31,72	28,31	30,09
Kuintil 5	31,53	28,39	27,61
Indonesia	30,96	27,23	29,94

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Potret kesehatan anak bisa dilihat dari kondisi keluhan kesehatan serta angka kesakitan yang terjadi pada anak-anak. Seorang anak dikatakan sakit jika mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2022, penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebesar 29,24%, dimana di daerah perkotaan (27,47%) lebih rendah daripada di daerah perdesaan (33,27%). Keluhan kesehatan paling banyak terjadi pada anak balita dimana 1 (satu) dari 3 (tiga) anak balita mempunyai keluhan kesehatan dan akan semakin berkurang seiring bertambahnya umur anak. Hal yang sama juga terjadi di anak-anak di Provinsi Sumatera Barat dengan keluhan kesehatan sebesar 28,12%.

Tabel diatas juga menunjukkan besarnya angka kesakitan semakin rendah seiring bertambahnya kelompok umur. Anak umur 0-4 tahun (balita) merupakan kelompok umur anak yang paling banyak mengalami sakit yaitu sebesar 33,77 persen. Sebagai kelompok yang rentan dibandingkan yang lainnya, kesehatan balita menjadi perhatian khusus. Untuk kondisi kesehatan balita, 17 dari 100 umur 0-4 tahun sakit pada tahun 2022. Meski angka kesakitan balita sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi angka kesakitan balita tetap menjadi perhatian mengingat masa balita merupakan masa emas dalam pertumbuhan anak.

Anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dibandingkan anak perempuan. Ini disebabkan oleh hormon estrogen yang ada pada perempuan meningkatkan kekebalan tubuh dan bekerja sebagai antioksidan sehingga perempuan lebih kebal terhadap penyakit daripada laki-laki.

Pendidikan Kepala Rumah Tangga sangat berpengaruh pada kesehatan anak balitanya. Berdasarkan data Susenas 2022 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan KRT maka persentase anak umur 0-4 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari semakin rendah. KRT dengan pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang relatif lebih baik, sehingga kesehatan anak cenderung lebih baik. Peningkatan pendidikan masyarakat secara umum diperlukan agar

KRT memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anaknya.

Bila ditinjau dari persentase anak umur 0-4 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari, maka di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,59% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan program kesehatan sedikit mengalami penurunan atau tidak bisa berjalan secara optimal kepada anak-anak. Keluhan kesehatan pada anak baik di perkotaan maupun di perdesaan sering terjadi pada lingkungan kumuh, tinggi polusi termasuk polusi asap rokok, rendah akses pada air bersih, kurangnya pemberian ASI serta kurangnya pengetahuan pengasuh terkait gizi dan kesehatan anak.

Berdasarkan data Susenas Maret 2022 seperti terlihat pada Gambar 40, penduduk Sumatera Barat secara keseluruhan baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada tahun 2022 mencapai 13,99 persen dimana persentase angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 13,39 persen, lebih sedikit dibanding angka kesakitan penduduk perempuan yaitu sebesar 14,59 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, angka kesakitan penduduk Sumatera Barat yang tinggal di daerah perdesaan mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitasnya sebesar 20,33 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yaitu 7,42 persen. Sementara itu, jika dilihat menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, terlihat di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, persentase laki-laki mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitasnya lebih sedikit dibanding perempuan.

Selain pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya, dukungan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi prasyarat utama lainnya untuk mewujudkan derajat dan status kesehatan yang optimal. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mendapat dan menikmati layanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan keluhan yang dirasakan.

Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dinyatakan dalam tingkat kesakitan atau morbiditas. Indikator ini dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga terganggunya aktivitas. Keluhan kesehatan merupakan gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang banyak dialami antara lain panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi. Dalam konsep Susenas, orang yang sakit kronis dianggap mempunyai keluhan Kesehatan walaupun pada saat survei (rentang periode ditanyakan adalah sebulan terakhir) tidak sedang kambuh penyakitnya.

Tabel 86 Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	15,92	17,45	16,67
Kab. Pesisir Selatan	13,85	13,82	13,83
Kab. Solok	11,91	15,67	13,79
Kab. Sijunjung	10,89	10,53	10,71
Kab. Tanah Datar	12,92	12,53	12,72
Kab. Padang Pariaman	9,38	12,28	10,85
Kab. Agam	7,36	9,87	8,63
Kab. Lima Puluh Kota	10,70	15,20	12,96
Kab. Pasaman	8,39	11,39	9,90
Kab. Solok Selatan	10,52	13,54	12,02
Kab. Dharmasraya	14,79	18,32	16,51
Kab. Pasaman Barat	10,78	11,75	11,26
Kota Padang	9,12	10,25	9,69
Kota Solok	10,61	12,95	11,79
Kota Sawahlunto	11,89	15,85	13,88
Kota Padang Panjang	11,61	9,48	10,54
Kota Bukittinggi	14,44	15,96	15,22
Kota Payakumbuh	11,11	13,85	12,48
Kota Pariaman	15,98	17,95	16,98
Sumatera Barat	10,91	12,77	11,84

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Gambar 41 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (%),2020-2023



Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Selanjutnya, akan menjadi lebih menarik jika melihat angka kesakitan penduduk Sumatera Barat digolongkan berdasarkan kelompok umur. Keluhan kesakitan yang diderita oleh seseorang tidak terlepas dari pengaruh sistem kekebalan tubuh/sistem imun. Perkembangan sistem imun dimulai sejak awal dalam masa kandungan, dari keadaan lemah dan meningkat dengan seiring bertambahnya umur. Pada saat umur dewasa sistem imun akan bekerja secara maksimal. Namun pada umur lanjut, pada umumnya akan berkurang secara bertahap. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh kemunduran biologis seseorang.

Mencermati angka kesakitan atau morbiditas penduduk di Sumatera Barat hasil Susenas, tercatat angka kesakitan tahun 2023 sebesar 11,84 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 13,99 persen. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa keluhan Kesehatan lebih banyak dialami oleh perempuan. Pada tahun 2023, perempuan yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 12,77 persen sedangkan keluhan kesehatan pada laki-laki mencapai 10,90 persen

5.6.3 Berobat Sendiri dan Berobat Jalan

Berbagai upaya bisa dilakukan ketika anak mempunyai keluhan kesehatan baik mengobati sendiri maupun berobat ke fasilitas kesehatan, tergantung pada tingkat keparahan penyakit yang dideritanya. Salah satu upaya awal yang dilakukan seseorang ketika mempunyai keluhan kesehatan adalah dengan mengobati sendiri. Berbagai cara mengobati sendiri misalnya minum obat yang dibeli di warung atau apotek tanpa resep dokter, kerokan dan minum jamu. Upaya mengatasi masalah kesehatan anak biasanya ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa, yang tinggal bersama dengan anak, salah satunya keputusan untuk mengobati sendiri saat mempunyai keluhan kesehatan.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seharusnya dapat dijalankan oleh setiap manusia agar terhindar dari penyakit. Setiap orang yang mengalami keluhan sakit idealnya melakukan upaya pengobatan/kuratif. Tindakan kuratif ini meliputi upaya mengunjungi fasilitas kesehatan (berobat jalan) dan perawatan di fasilitas kesehatan dengan menginap (rawat inap). Berikut dijabarkan beberapa tempat berobat jalan yang digunakan oleh penduduk Sumatera Barat tahun 2023

Tabel 87 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tempat Berobat	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	10,53	10,32	10,41
RS Swasta	5,68	7,13	6,51
Praktik Dokter/Bidan	38,88	40,12	39,58
Klinik/Praktek Dokter bersama	12,81	11,08	11,83
Puskesmas/Pustu	30,47	30,53	30,50
UKBM ¹⁾	4,47	4,57	4,53
Praktik Pengobatan Tradisional	2,47	2,26	2,35
Lainnya ²⁾	0,27	0,11	0,18

¹⁾ UKBM: Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai pengobatan

²⁾ Lainnya: praktek dukun bersalin, posko pengobatan

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Pada tabel 87 terlihat mayoritas penduduk Provinsi Sumatera Barat berobat jalan di praktik dokter/bidan sebesar 39,58 persen. Artinya, penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 lebih banyak memilih tempat berobat atas keluhan kesehatannya di praktik dokter/bidan. Selain itu tempat berobat yang juga banyak dikunjungi penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk rawat jalan adalah puskesmas/pustu yaitu sebesar 30,50 persen. Sedangkan praktik pengobatan tradisional menjadi tempat berobat jalan yang paling rendah yaitu sebesar 2,35 persen. Dan menariknya, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata masih ada sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat berobat jalan ke tempat lainnya (praktik dukun bersalin, posko pengobatan) walau hanya sebesar 0,18 persen

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih tempat berobat jalan. Baik laki-laki maupun perempuan lebih memilih berobat jalan di praktik dokter/bidan, untuk laki-laki sebesar 38,88 persen dan untuk perempuan sebesar 40,12 persen. Begitu juga halnya dengan pilihan kedua terbanyak untuk berobat jalan yaitu ke puskesmas/pustu, yaitu 30,47 persen untuk laki-laki dan 30,53 persen untuk perempuan. Terlihat dari tabel 87 baik laki-laki maupun perempuan masih ada yang berobat jalan ke lainnya (praktek dukun bersalin, posko pengobatan) dengan persentase masing-masing yaitu 0,27 persen dan 0,11 persen.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke rumah sakit pemerintah dan swasta, praktek dokter/klinik bersama dan puskesmas/ pustu, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap warga

negara memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Tabel 88 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	25,44	22,46	23,95
Kab. Pesisir Selatan	56,98	61,56	59,46
Kab. Solok	37,77	34,66	36,06
Kab. Sijunjung	24,85	32,64	28,91
Kab. Tanah Datar	41,56	48,49	45,30
Kab. Padang Pariaman	42,65	47,67	45,46
Kab. Agam	50,08	53,04	51,67
Kab. Lima Puluh Kota	56,45	57,85	57,25
Kab. Pasaman	27,91	41,31	35,44
Kab. Solok Selatan	24,48	31,16	28,03
Kab. Dharmasraya	38,13	43,82	41,18
Kab. Pasaman Barat	53,93	41,51	47,20
Kota Padang	44,22	50,89	47,93
Kota Solok	42,62	58,39	51,60
Kota Sawahlunto	39,30	44,59	42,08
Kota Padang Panjang	41,35	36,86	38,97
Kota Bukittinggi	31,78	38,18	35,27
Kota Payakumbuh	51,22	55,77	53,75
Kota Pariaman	54,16	64,50	59,75
Sumatera Barat	43,06	46,88	45,15

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Pada tabel diatas, terlihat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang hampir sama meskipun secara digit perempuan memiliki keluhan kesehatan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh perempuan mengalami masa kehamilan dan masa haid. Pada kedua masa tersebut, perempuan membutuhkan pertolongan medis dan tidak rawat jalan. Secara keseluruhan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan sebesar 45,15 persen. Ini artinya tidak terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 89 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Punya Biaya Berobat No Budget for Outpatient	Tidak Ada Biaya Transpor No Budget for Transpor- tation	Tidak Ada Sarana Transpor- tasi No Transpor- tation Utilities	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Long Waiting Time for Health Services	Mengobati Sendiri Self Treatment	Tidak Ada yang Men- dampingi None to Accompany	Merasa Tidak Perlu Feels Unnecessary	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,22	-	1,13	0,01	48,72	-	48,72	1,20	100,00
Kab. Pesisir Selatan	-	-	0,19	-	41,20	-	56,98	1,63	100,00
Kab. Solok	2,44	0,45	-	-	59,79	-	31,27	6,06	100,00
Kab. Sijunjung	-	-	-	-	56,96	-	41,06	1,98	100,00
Kab. Tanah Datar	0,50	0,15	-	1,32	48,70	0,22	47,19	1,91	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,01	-	-	-	56,29	-	42,66	1,05	100,00
Kab. Agam	0,21	-	-	0,33	39,18	0,30	56,34	3,63	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	-	0,39	-	-	52,96	0,39	46,19	0,08	100,00
Kab. Pasaman	0,27	-	-	0,50	74,71	-	21,78	2,74	100,00
Kab. Solok Selatan	1,77	1,39	-	0,76	49,67	-	46,04	0,36	100,00
Kab. Dharmasraya	-	-	-	1,18	71,09	0,10	27,63	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,98	0,14	1,15	-	44,07	-	48,67	5,00	100,00
Kota Padang	0,75	0,04	-	4,25	51,41	-	41,62	1,94	100,00
Kota Solok	-	-	-	-	63,83	-	36,17	-	100,00
Kota Sawahlunto	-	-	-	-	46,68	-	51,24	2,09	100,00
Kota Padang Panjang	-	-	-	1,31	51,87	-	46,12	0,70	100,00
Kota Bukittinggi	-	-	-	0,67	81,64	0,01	14,96	2,72	100,00
Kota Payakumbuh	-	-	-	2,67	59,12	0,23	34,99	2,99	100,00
Kota Pariaman	0,34	-	-	0,72	62,25	0,24	36,38	0,07	100,00
Sumatera Barat	0,58	0,14	0,13	1,04	54,36	0,07	41,34	2,34	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan tabel 89 terlihat bahwa persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan tidak rawat jalan dengan alasan mengobati sendiri dan merasa tidak perlu memiliki tingkat persentase yang cukup besar yaitu sebesar 54,36 persen dan 41,34 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak asumsi masyarakat bahwa keluhan kesehatan yang dirasakan dapat ditangani dengan pembelian obat di apotik, toko obat atau warung tanpa menggunakan resep dokter. Selain itu, adanya imej dalam masyarakat bahwa penyakit yang dirasakan tidak memerlukan rawat inap.

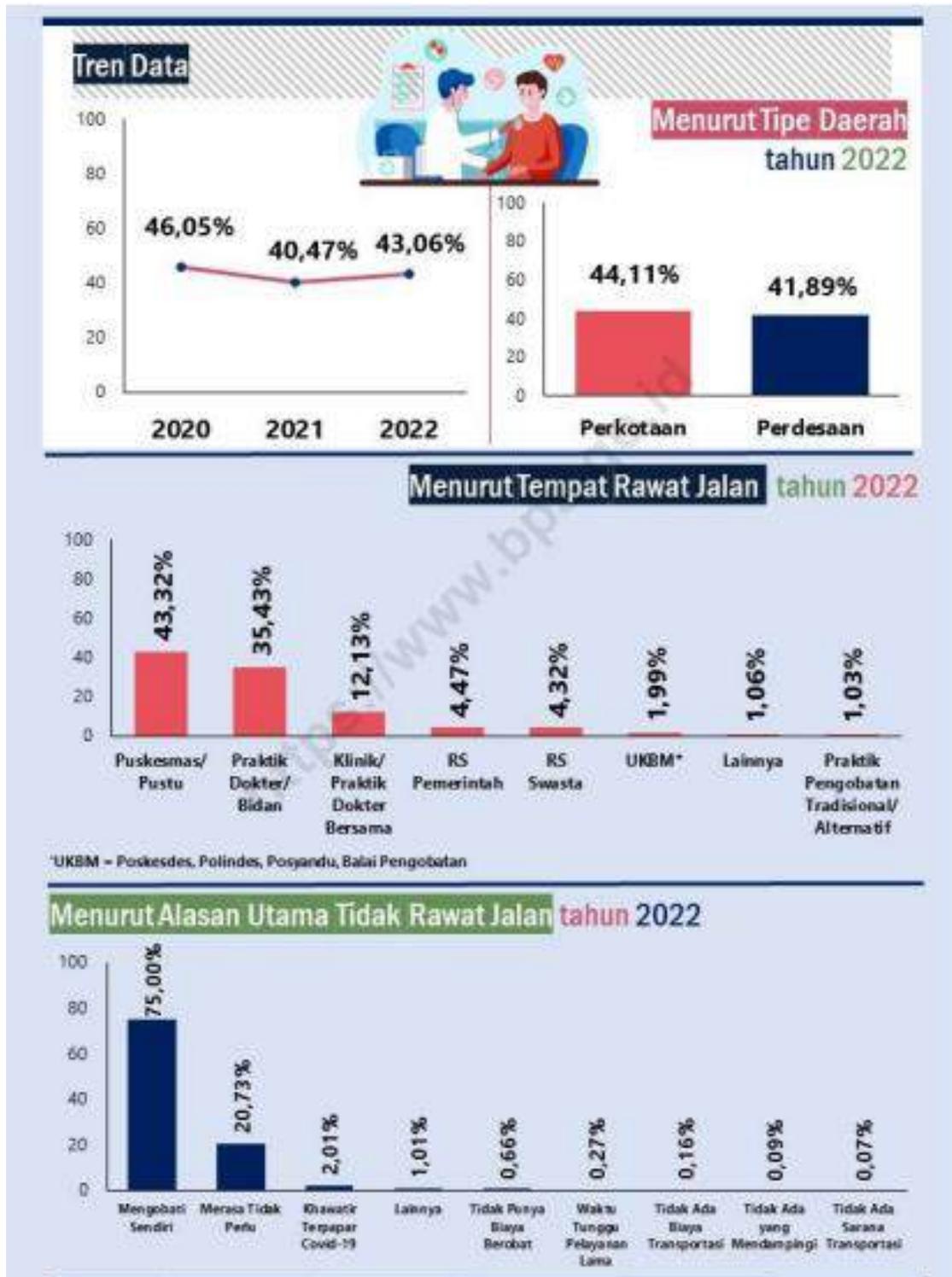
Tabel 90 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Jalan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Pemerintah Public Hospital	Rumah Sakit Swasta Private Hospital	Praktik Dokter/ Bidan Doctor/ Midwife Practice	Klinik/ Praktik Dokter Bersama Clinic/Joint Doctor Practice	Puskesmas/ Pustu Public Health Center/ Subsidiary PHC	UKBM ¹ UKBM ¹	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif Traditional/ Alternative Treatment Practice	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Kepulauan Mentawai	1,77	1,93	19,32	1,60	72,87	7,33	12,00	1,40
Kab. Pesisir Selatan	6,81	2,48	58,42	3,65	23,49	5,47	5,36	-
Kab. Solok	11,71	2,81	39,39	3,74	43,09	0,82	1,60	-
Kab. Sijunjung	17,31	2,26	33,63	6,88	27,26	14,14	4,45	0,13
Kab. Tanah Datar	10,18	1,66	34,71	12,69	37,69	3,45	3,81	2,11
Kab. Padang Pariaman	4,88	5,23	63,00	15,41	14,82	1,48	3,23	-
Kab. Agam	15,12	8,56	31,60	4,15	42,90	1,80	0,81	-
Kab. Lima Puluh Kota	7,96	2,06	46,93	5,93	26,00	13,37	1,80	-
Kab. Pasaman	10,42	2,10	42,34	2,39	33,95	10,11	1,22	-
Kab. Solok Selatan	16,29	-	61,29	3,76	17,57	1,00	8,21	-
Kab. Dharmasraya	12,68	1,02	43,87	13,27	25,12	11,85	2,51	-
Kab. Pasaman Barat	4,34	5,85	59,03	9,69	17,60	9,02	2,75	0,02
Kota Padang	11,68	16,12	19,15	28,12	28,93	0,09	0,18	0,12
Kota Solok	14,76	1,92	27,27	12,15	44,26	1,20	1,29	-
Kota Sawahlunto	18,95	0,31	30,11	8,55	47,24	1,60	0,84	-
Kota Padang Panjang	22,61	3,64	18,95	5,99	52,41	-	0,06	-
Kota Bukittinggi	11,96	18,96	31,00	12,92	28,10	1,60	0,33	-
Kota Payakumbuh	15,82	9,84	24,79	7,20	43,56	4,58	1,74	-
Kota Pariaman	10,88	5,00	24,74	15,51	46,69	2,87	1,72	-
Sumatera Barat	10,41	6,51	39,58	11,83	30,50	4,53	2,35	0,18

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan. Jika dilihat dari tempat rawat jalan, penduduk paling banyak memilih puskesmas/pustu (puskesmas pembantu) dan praktek dokter/bidan sebagai tempat rawat jalan. Hal ini kemungkinan terkait dengan jumlah dan lokasi jenis fasilitas kesehatan ini yang memudahkan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, sehingga penduduk akan lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan.

Gambar 42 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 91 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	57,92	52,34	55,40
Sumatera Utara	42,36	38,57	40,70
Sumatera Barat	57,25	55,12	59,07
Riau	42,52	39,17	40,97
Jambi	38,40	31,82	34,69
Sumatera Selatan	38,64	42,88	40,91
Bengkulu	44,14	39,16	42,45
Lampung	43,95	40,13	41,52
Kep. Bangka Belitung	46,43	37,65	44,01
Kep. Riau	43,90	32,87	39,11
DKI Jakarta	49,96	44,12	47,96
Jawa Barat	47,61	43,41	45,12
Jawa Tengah	49,09	40,33	43,76
DI Yogyakarta	50,18	44,29	40,68
Jawa Timur	46,00	39,66	43,18
Banten	42,30	38,13	40,47
Bali	61,32	53,31	58,80
Nusa Tenggara Barat	43,86	43,32	45,59
Nusa Tenggara Timur	50,80	36,19	39,98
Kalimantan Barat	37,50	32,85	33,92
Kalimantan Tengah	31,48	25,59	30,47
Kalimantan Selatan	32,52	25,84	30,61
Kalimantan Timur	46,22	38,36	42,41
Kalimantan Utara	43,06	34,60	37,63
Sulawesi Utara	49,46	41,52	46,19
Sulawesi Tengah	36,42	31,07	35,34
Sulawesi Selatan	41,02	35,27	38,65
Sulawesi Tenggara	33,41	26,70	33,78
Gorontalo	48,57	43,12	45,58
Sulawesi Barat	41,48	31,84	34,75
Maluku	40,43	32,83	36,92
Maluku Utara	44,93	35,88	39,64
Papua Barat	46,24	40,93	44,80
Papua	49,92	39,32	44,51
Indonesia	46,05	40,47	43,06

Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Lebih dari 50 persen penduduk Sumatera Barat yang memiliki keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan pada tahun 2022. Sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya mencapai angka 43,06 persen. Ini menggambarkan adanya kecenderungan masyarakat untuk berobat jalan karena berbagai alasan.

Tabel 92 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022

Karakteristik	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	47,50	43,03	44,11
Perdesaan	44,19	36,27	41,89
Jenis Kelamin			
Laki-laki	44,42	39,92	42,01
Perempuan	47,52	40,97	44,03
Kelompok Umur			
0-4 tahun	59,73	47,15	52,12
5-9 tahun	51,82	39,19	44,36
10-14 tahun	44,54	36,66	40,09
15-19 tahun	38,29	37,11	37,38
20-24 tahun	36,16	37,85	36,44
25-29 tahun	36,19	37,82	37,74
30-34 tahun	37,41	37,25	38,41
35-39 tahun	37,72	36,42	39,38
40-44 tahun	39,69	36,63	40,04
45-49 tahun	42,24	39,62	41,72
50-54 tahun	46,13	40,31	43,71
55-59 tahun	48,18	42,27	46,64
60+ tahun	52,00	45,42	49,95
Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	51,44	41,94	46,53
SD/Sederajat	43,27	39,25	41,87
SMP/Sederajat	40,39	38,17	39,85
SMA/Sederajat	41,42	40,26	40,79
Perguruan Tinggi	44,66	42,31	43,65
Status Ekonomi			
Kuintil 1	43,27	37,40	39,94
Kuintil 2	44,68	39,13	40,75
Kuintil 3	45,50	40,01	42,95
Kuintil 4	47,17	41,70	44,70
Kuintil 5	49,38	43,68	47,38
Indonesia	46,05	40,47	43,06

Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 93 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2022

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	8,47	1,27	38,14	12,25
Sumatera Utara	4,26	3,68	51,24	11,93
Sumatera Barat	5,52	2,13	39,13	5,74
Riau	3,75	4,53	29,58	14,70
Jambi	3,35	2,37	38,89	9,71
Sumatera Selatan	2,83	2,67	36,47	7,97
Bengkulu	3,26	2,22	48,91	6,53
Lampung	2,21	2,91	54,68	7,71
Kep. Bangka Belitung	5,06	5,43	38,43	11,90
Kep. Riau	9,44	12,57	18,26	16,55
DKI Jakarta	12,58	9,24	3,43	18,70
Jawa Barat	3,87	5,49	29,26	19,67
Jawa Tengah	3,99	5,18	40,23	9,76
DI Yogyakarta	5,94	10,71	30,37	14,53
Jawa Timur	3,45	3,78	48,21	8,68
Banten	2,97	6,86	27,59	26,75
Bali	6,88	7,37	43,32	8,57
Nusa Tenggara Barat	3,83	1,03	46,59	9,76
Nusa Tenggara Timur	3,32	2,36	9,44	4,09
Kalimantan Barat	4,75	2,34	31,53	9,25
Kalimantan Tengah	7,39	1,28	16,62	6,07
Kalimantan Selatan	6,74	2,40	24,75	4,47
Kalimantan Timur	6,84	5,57	13,37	11,40
Kalimantan Utara	11,26	0,24	18,09	8,43
Sulawesi Utara	6,31	4,57	30,04	8,44
Sulawesi Tengah	4,88	1,76	19,78	2,61
Sulawesi Selatan	5,31	1,74	16,08	7,17
Sulawesi Tenggara	5,98	1,11	15,98	4,68
Gorontalo	3,53	0,73	33,51	11,76
Sulawesi Barat	3,88	0,61	22,17	2,03
Maluku	5,63	1,30	13,64	4,07
Maluku Utara	9,36	1,44	13,46	6,73
Papua Barat	8,23	3,09	9,57	6,14
Papua	10,02	1,58	6,76	7,78
Indonesia	4,47	4,32	35,43	12,13

Provinsi	Puskesmas/ Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	45,67	4,63	1,10	1,96
Sumatera Utara	28,08	1,05	2,23	1,11
Sumatera Barat	44,14	4,35	1,70	0,61
Riau	46,35	1,46	1,73	0,54
Jambi	42,90	3,05	1,18	1,64
Sumatera Selatan	49,16	2,27	0,97	0,51
Bengkulu	40,05	0,62	0,70	0,49
Lampung	34,27	0,35	1,13	0,70
Kep. Bangka Belitung	40,05	1,56	1,33	0,90
Kep. Riau	39,74	4,46	0,17	1,06
DKI Jakarta	59,66	0,16	0,50	0,52
Jawa Barat	42,36	0,86	1,15	1,34
Jawa Tengah	40,52	1,13	0,78	1,18
DI Yogyakarta	39,44	0,66	0,60	0,28
Jawa Timur	34,30	3,12	1,06	0,88
Banten	38,07	0,82	0,81	0,17
Bali	36,58	0,60	0,21	0,35
Nusa Tenggara Barat	35,60	5,63	1,73	3,12
Nusa Tenggara Timur	76,23	6,31	0,46	0,59
Kalimantan Barat	45,99	7,47	0,92	0,89
Kalimantan Tengah	64,93	3,98	1,14	1,69
Kalimantan Selatan	59,36	3,12	0,90	0,80
Kalimantan Timur	62,64	1,00	0,11	0,85
Kalimantan Utara	64,13	0,96	0,02	0,00
Sulawesi Utara	51,23	1,19	0,50	1,36
Sulawesi Tengah	68,66	2,84	0,48	0,36
Sulawesi Selatan	68,52	1,53	0,58	1,47
Sulawesi Tenggara	69,49	3,19	0,38	0,94
Gorontalo	49,43	0,99	0,17	1,18
Sulawesi Barat	70,51	1,38	0,54	0,47
Maluku	73,69	2,96	0,79	0,94
Maluku Utara	61,21	9,32	0,80	0,42
Papua Barat	72,32	1,38	0,31	1,13
Papua	75,52	1,14	0,68	0,50
Indonesia	43,32	1,99	1,03	1,06

Keterangan:

*UKBM : Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 94 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2022

Karakteristik	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	5,43	6,19	29,00	16,10
Perdesaan	3,34	2,11	42,98	7,48
Jenis Kelamin				
Laki-laki	4,63	4,23	35,14	12,38
Perempuan	4,33	4,39	35,68	11,91
Kelompok Umur				
0-4 tahun	2,02	3,00	44,77	13,18
5-9 tahun	1,96	2,02	38,97	13,11
10-14 tahun	2,08	1,59	34,01	11,00
15-19 tahun	2,32	2,51	31,44	11,12
20-24 tahun	3,22	2,98	34,78	11,47
25-29 tahun	3,82	3,33	32,94	12,03
30-34 tahun	3,70	3,79	35,76	11,81
35-39 tahun	3,70	3,99	31,86	13,01
40-44 tahun	4,77	3,92	33,44	12,42
45-49 tahun	5,24	5,34	32,82	11,75
50-54 tahun	6,03	5,54	32,86	12,36
55-59 tahun	7,05	6,90	33,35	11,83
60+ tahun	7,92	7,15	35,57	11,82
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	2,95	2,87	40,37	11,83
SD/Sederajat	4,71	3,88	35,47	10,55
SMP/Sederajat	4,46	3,79	33,77	11,98
SMA/Sederajat	6,12	6,33	30,22	13,61
Perguruan Tinggi	7,79	9,86	25,14	15,76
Status Ekonomi				
Kuintil 1	2,97	1,71	36,53	7,55
Kuintil 2	3,29	2,49	39,74	8,42
Kuintil 3	4,02	3,17	37,10	11,87
Kuintil 4	4,64	3,99	35,03	14,27
Kuintil 5	7,26	9,96	28,95	18,00
Indonesia	4,47	4,32	35,43	12,13

Karakteristik	Puskesmas/ Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tipe Daerah				
Perkotaan	43,98	0,94	0,78	0,93
Perdesaan	42,54	3,23	1,32	1,22
Jenis Kelamin				
Laki-laki	43,06	1,92	1,10	1,18
Perempuan	43,54	2,05	0,97	0,96
Kelompok Umur				
0-4 tahun	36,23	2,40	0,61	0,79
5-9 tahun	42,70	2,10	0,63	1,15
10-14 tahun	50,29	1,65	0,45	0,99
15-19 tahun	51,51	1,31	0,61	1,19
20-24 tahun	47,51	1,51	0,75	1,05
25-29 tahun	46,55	2,40	0,73	1,04
30-34 tahun	44,18	2,00	1,00	1,08
35-39 tahun	47,19	1,62	0,87	1,11
40-44 tahun	44,76	1,95	1,22	1,12
45-49 tahun	44,68	1,86	0,93	1,29
50-54 tahun	43,52	1,79	1,65	1,01
55-59 tahun	41,47	1,97	1,67	1,32
60+ tahun	38,27	2,32	1,56	0,97
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	41,13	2,43	0,98	1,04
SD/Sederajat	44,96	2,19	1,29	1,16
SMP/Sederajat	45,46	1,75	1,02	1,18
SMA/Sederajat	44,25	1,34	0,97	0,97
Perguruan Tinggi	42,44	1,12	0,59	0,88
Status Ekonomi				
Kuintil 1	49,06	2,80	1,03	1,26
Kuintil 2	45,00	2,24	1,20	0,88
Kuintil 3	43,53	1,89	1,05	1,11
Kuintil 4	42,15	1,85	0,99	1,10
Kuintil 5	37,41	1,25	0,90	0,97
Indonesia	43,32	1,99	1,03	1,06

Keterangan:

*UKBM : Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 95 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2022

Provinsi	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transportasi	Tidak Ada Sarana Transportasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,05	0,00	0,11
Sumatera Utara	1,70	0,17	0,00
Sumatera Barat	0,35	0,04	0,09
Riau	1,34	0,13	0,19
Jambi	0,88	0,11	0,06
Sumatera Selatan	0,92	0,05	0,01
Bengkulu	0,25	0,07	0,14
Lampung	0,53	0,10	0,14
Kep. Bangka Belitung	0,16	0,00	0,00
Kep. Riau	0,47	0,00	0,00
DKI Jakarta	0,04	0,20	0,08
Jawa Barat	1,12	0,35	0,06
Jawa Tengah	0,27	0,06	0,05
DI Yogyakarta	0,02	0,00	0,08
Jawa Timur	0,34	0,06	0,05
Banten	1,16	0,22	0,18
Bali	0,42	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	1,15	0,06	0,15
Nusa Tenggara Timur	0,32	0,11	0,36
Kalimantan Barat	0,36	0,15	0,14
Kalimantan Tengah	0,47	0,08	0,07
Kalimantan Selatan	0,59	0,05	0,00
Kalimantan Timur	0,35	0,00	0,00
Kalimantan Utara	0,09	0,22	0,00
Sulawesi Utara	0,29	0,04	0,03
Sulawesi Tengah	0,58	0,08	0,03
Sulawesi Selatan	0,25	0,06	0,00
Sulawesi Tenggara	0,22	0,02	0,17
Gorontalo	0,30	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0,33	0,58	0,05
Maluku	1,15	0,25	0,00
Maluku Utara	1,23	0,14	0,24
Papua Barat	0,38	0,09	0,16
Papua	0,29	5,70	0,69
Indonesia	0,66	0,16	0,07

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,77	77,22	0,04
Sumatera Utara	0,36	71,92	0,05
Sumatera Barat	0,28	68,70	0,20
Riau	0,22	66,91	0,03
Jambi	0,16	73,55	0,05
Sumatera Selatan	0,25	80,18	0,06
Bengkulu	0,27	74,15	0,10
Lampung	0,03	76,06	0,08
Kep. Bangka Belitung	0,46	73,88	0,08
Kep. Riau	2,56	64,68	0,08
DKI Jakarta	0,83	71,49	0,21
Jawa Barat	0,27	74,65	0,12
Jawa Tengah	0,25	75,65	0,06
DI Yogyakarta	0,26	78,48	0,16
Jawa Timur	0,26	78,93	0,09
Banten	0,12	67,37	0,18
Bali	0,10	76,25	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,07	80,21	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,03	72,27	0,05
Kalimantan Barat	0,23	70,73	0,18
Kalimantan Tengah	0,61	76,06	0,18
Kalimantan Selatan	0,15	83,73	0,03
Kalimantan Timur	0,04	64,79	0,20
Kalimantan Utara	0,07	70,30	0,00
Sulawesi Utara	0,08	72,99	0,22
Sulawesi Tengah	0,00	71,89	0,17
Sulawesi Selatan	0,35	74,35	0,04
Sulawesi Tenggara	0,05	74,62	0,03
Gorontalo	0,33	88,66	0,25
Sulawesi Barat	0,08	72,16	0,00
Maluku	0,00	73,91	0,45
Maluku Utara	0,34	72,24	0,20
Papua Barat	0,86	66,71	0,00
Papua	0,30	64,07	0,13
Indonesia	0,27	75,00	0,09

Provinsi	Merasa Tidak Perlu	Khawatir Terpapar COVID-19	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,42	1,70	1,69
Sumatera Utara	21,65	2,93	1,22
Sumatera Barat	27,96	1,54	0,84
Riau	28,59	1,57	1,01
Jambi	23,32	0,47	1,40
Sumatera Selatan	16,44	1,09	1,01
Bengkulu	23,97	0,35	0,72
Lampung	19,09	3,12	0,84
Kep. Bangka Belitung	21,64	3,42	0,36
Kep. Riau	26,33	3,42	2,46
DKI Jakarta	22,05	4,13	0,96
Jawa Barat	20,83	1,43	1,17
Jawa Tengah	21,59	1,27	0,80
DI Yogyakarta	15,27	4,20	1,53
Jawa Timur	18,02	1,44	0,81
Banten	28,44	1,14	1,18
Bali	20,91	1,46	0,86
Nusa Tenggara Barat	16,05	1,12	1,17
Nusa Tenggara Timur	14,67	11,52	0,67
Kalimantan Barat	26,72	0,64	0,85
Kalimantan Tengah	20,04	1,63	0,85
Kalimantan Selatan	14,23	0,56	0,65
Kalimantan Timur	28,11	5,32	1,19
Kalimantan Utara	20,62	8,32	0,38
Sulawesi Utara	22,54	3,04	0,77
Sulawesi Tengah	24,50	1,57	1,18
Sulawesi Selatan	21,45	2,54	0,95
Sulawesi Tenggara	20,24	3,92	0,73
Gorontalo	9,30	0,30	0,85
Sulawesi Barat	19,46	6,30	1,03
Maluku	20,46	2,84	0,95
Maluku Utara	21,71	0,81	3,08
Papua Barat	28,33	2,48	0,99
Papua	24,64	1,77	2,42
Indonesia	20,73	2,01	1,01

Sumber: BPS, Kesehatan Ibu dan Anak, 2022

Tabel 96 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Perdesaan/Rural			Perkotaan + Perdesaan/Urban + Rural		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	46,09	50,76	48,63	56,54	59,82	58,28	53,48	57,07	55,40
Sumatera Utara	40,04	39,98	40,01	41,08	41,93	41,52	40,52	40,87	40,70
Sumatera Barat	62,18	62,39	62,30	56,02	59,09	57,63	57,87	60,14	59,07
Riau	45,09	47,47	46,32	37,38	38,66	38,02	40,06	41,86	40,97
Jambi	40,97	42,66	41,81	31,31	34,20	32,77	33,39	35,98	34,69
Sumatera Selatan	35,15	38,39	36,86	42,07	44,90	43,48	39,47	42,28	40,91
Bengkulu	32,77	36,19	34,51	46,84	51,53	49,18	40,45	44,42	42,45
Lampung	42,42	44,84	43,71	38,94	42,63	40,79	39,77	43,21	41,52
Kepulauan Bangka Belitung	36,56	40,74	38,72	50,57	51,31	50,94	42,74	45,24	44,01
Kepulauan Riau	35,00	37,77	36,43	56,42	49,53	52,96	38,56	39,63	39,11
DKI Jakarta	47,81	48,10	47,96	0,00	0,00	0,00	47,81	48,10	47,96
Jawa Barat	47,45	48,50	47,99	35,50	38,24	36,91	44,36	45,84	45,12
Jawa Tengah	42,18	45,74	44,06	42,60	44,24	43,46	42,39	45,00	43,76
DI Yogyakarta	41,15	42,79	42,03	36,07	38,81	37,56	39,64	41,58	40,68
Jawa Timur	42,53	45,15	43,91	41,48	43,29	42,43	42,01	44,23	43,18
Banten	41,65	43,00	42,36	34,74	38,88	36,87	39,24	41,60	40,47
Bali	56,03	56,62	56,34	60,92	65,86	63,46	57,73	59,80	58,80
Nusa Tenggara Barat	45,12	44,98	45,04	44,42	47,62	46,08	44,75	46,38	45,59
Nusa Tenggara Timur	38,71	38,36	38,52	39,17	42,16	40,74	39,02	40,86	39,98
Kalimantan Barat	37,41	40,68	39,09	31,11	33,29	32,19	32,65	35,18	33,92
Kalimantan Tengah	21,17	23,29	22,25	34,45	36,93	35,69	29,39	31,54	30,47
Kalimantan Selatan	22,66	26,96	24,98	33,15	36,08	34,66	28,89	32,17	30,61
Kalimantan Timur	43,10	44,52	43,83	40,64	39,28	39,97	42,17	42,64	42,41
Kalimantan Utara	30,86	34,24	32,55	43,56	48,76	45,95	35,90	39,46	37,63
Sulawesi Utara	38,82	38,12	38,47	50,43	55,19	52,78	45,12	47,26	46,19
Sulawesi Tengah	56,94	53,41	55,14	27,11	24,51	25,79	36,82	33,92	35,34
Sulawesi Selatan	35,13	36,05	35,62	39,77	41,05	40,45	38,04	39,19	38,65
Sulawesi Tenggara	20,31	23,28	21,90	38,35	40,88	39,65	32,57	34,90	33,78
Gorontalo	52,59	51,95	52,25	37,15	42,74	40,04	44,05	46,97	45,58
Sulawesi Barat	24,94	25,41	25,18	37,51	37,83	37,68	34,55	34,94	34,75
Maluku	32,33	36,20	34,52	36,97	40,17	38,64	35,14	38,43	36,92
Maluku Utara	30,99	36,32	33,91	39,86	42,95	41,45	37,84	41,28	39,64
Papua Barat	34,22	33,76	33,98	51,68	51,63	51,66	45,09	44,52	44,80
Papua	47,36	49,85	48,59	41,28	42,87	42,05	43,53	45,54	44,51
Indonesia	43,20	44,94	44,11	40,70	43,00	41,89	42,01	44,03	43,06

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 97 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Tidak Punya Biaya Berobat No Budget for Inpatient	Tidak Ada Biaya Transpor No Budget for Transportation	Tidak Ada Sarana Transportasi No Transportation	Waktu Tunggu Pelayanan Lama Time to Wait is Long	Mengobati Sendiri Self Treated	Tidak Ada yang Mendampingi No Company	Merasa Tidak Perlu No Need	Khawatir Terpapar Covid19 Worried Exposure Covid 19	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
Aceh	0,00	0,00	0,00	1,62	79,82	0,00	14,81	1,38	2,38	100,00
Sumatera Utara	2,37	0,21	0,00	0,10	72,99	0,16	18,76	4,13	1,27	100,00
Sumatera Barat	0,64	0,00	0,92	0,48	63,18	0,00	30,87	2,56	1,34	100,00
Riau	0,54	0,00	0,33	0,00	75,93	0,00	18,07	4,67	0,46	100,00
Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	16,44	0,55	1,65	100,00
Sumatera Selatan	0,50	0,00	0,00	1,35	83,45	0,00	11,12	2,79	0,79	100,00
Bengkulu	0,07	0,00	0,29	0,00	83,69	0,00	15,23	0,58	0,14	100,00
Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	13,13	7,01	1,56	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,47	0,00	0,00	2,33	71,84	0,43	18,18	5,91	0,84	100,00
Kepulauan Riau	1,52	0,00	0,00	2,90	75,34	0,27	15,39	2,79	1,79	100,00
DKI Jakarta	0,21	1,05	0,00	2,46	62,53	0,55	23,29	8,72	1,18	100,00
Jawa Barat	1,85	0,25	0,06	0,43	74,41	0,13	19,16	2,50	1,23	100,00
Jawa Tengah	0,50	0,00	0,16	0,53	78,00	0,00	18,09	1,98	0,72	100,00
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,07	1,10	78,30	0,39	12,15	2,86	5,13	100,00
Jawa Timur	0,67	0,31	0,04	0,82	79,58	0,42	14,59	2,39	1,18	100,00
Banten	2,21	0,00	0,27	0,21	69,91	0,36	24,62	1,27	1,15	100,00
Bali	2,09	0,00	0,00	0,24	69,72	0,00	20,71	3,65	3,60	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,88	0,10	0,25	0,30	71,28	0,00	20,14	3,64	1,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,07	0,00	73,03	0,00	13,22	13,50	0,18	100,00
Kalimantan Barat	0,78	0,40	0,00	0,47	77,38	0,24	18,21	0,81	1,72	100,00
Kalimantan Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	21,28	1,63	0,34	100,00
Kalimantan Selatan	0,59	0,00	0,00	0,12	79,96	0,00	16,56	1,32	1,45	100,00
Kalimantan Timur	0,64	0,00	0,00	0,00	73,28	0,50	20,50	4,72	0,36	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	18,69	15,87	1,54	100,00
Sulawesi Utara	0,21	0,22	0,00	0,00	76,09	0,40	19,68	2,56	0,84	100,00
Sulawesi Tengah	0,40	0,00	0,03	0,00	56,34	0,14	33,37	2,87	6,85	100,00
Sulawesi Selatan	0,27	0,38	0,00	0,69	74,12	0,00	20,07	2,87	1,60	100,00
Sulawesi Tenggara	0,09	0,00	0,70	0,00	57,66	0,00	32,42	7,64	1,49	100,00
Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	14,66	0,04	1,51	100,00
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	16,91	3,93	0,44	100,00
Maluku	1,38	0,00	0,00	0,00	83,31	1,46	11,33	2,35	0,16	100,00
Maluku Utara	2,95	0,86	1,07	1,34	67,04	1,57	21,32	0,37	3,47	100,00
Papua Barat	0,53	0,00	0,00	2,29	70,25	0,00	22,09	3,50	1,33	100,00
Papua	1,15	0,00	0,00	0,21	60,16	0,04	29,82	4,12	4,50	100,00
Indonesia	1,15	0,17	0,10	0,55	75,13	0,17	18,41	3,02	1,31	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 98 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Tidak Punya Biaya Berobat No Budget for Inpatient	Tidak Ada Biaya Transpor No Budget for Transportation	Tidak Ada Sarana Transportasi No Transportation	Waktu Tunggu Pelayanan Lama Time to Wait is Long	Mengobati Sendiri Self Treated	Tidak Ada yang Mendampingi No Company	Merasa Tidak Perlu No Need	Khawatir Terpapar Covid19 Worried Exposure Covid 19	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,06	0,00	0,21	0,67	78,60	0,14	17,75	1,23	1,33	100,00
Sumatera Utara	4,10	0,34	0,00	0,01	71,56	0,00	19,92	2,96	1,10	100,00
Sumatera Barat	0,94	0,09	0,05	0,13	73,45	0,07	23,39	0,94	0,92	100,00
Riau	2,32	0,31	0,05	0,38	68,25	0,00	24,78	2,18	1,69	100,00
Jambi	1,17	0,14	0,18	0,30	74,65	0,07	22,42	0,30	0,78	100,00
Sumatera Selatan	1,41	0,10	0,03	0,30	76,41	0,00	19,86	0,16	1,73	100,00
Bengkulu	0,23	0,14	0,00	0,80	71,70	0,00	26,58	0,16	0,39	100,00
Lampung	1,26	0,30	0,07	0,10	77,09	0,13	16,61	3,14	1,31	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,26	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	14,01	1,01	0,83	100,00
Kepulauan Riau	0,55	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	26,32	5,47	0,61	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2,36	0,40	0,08	0,46	72,94	0,18	21,00	1,22	1,35	100,00
Jawa Tengah	0,34	0,27	0,02	0,64	75,13	0,00	20,16	2,31	1,13	100,00
DI Yogyakarta	0,15	0,04	0,00	0,00	73,28	0,13	18,53	6,39	1,49	100,00
Jawa Timur	0,43	0,00	0,02	0,12	77,07	0,01	19,37	1,88	1,10	100,00
Banten	1,53	1,25	0,47	0,00	64,12	0,28	29,19	1,34	1,82	100,00
Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	14,73	4,55	0,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,00	0,17	0,11	0,04	79,88	0,08	14,11	1,13	2,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,72	0,19	0,64	0,05	68,70	0,08	11,10	17,50	1,02	100,00
Kalimantan Barat	0,37	0,09	0,32	0,27	69,08	0,22	28,20	0,74	0,70	100,00
Kalimantan Tengah	0,29	0,41	0,12	1,04	80,44	0,25	14,65	1,47	1,31	100,00
Kalimantan Selatan	2,08	0,15	0,00	0,26	83,59	0,00	11,40	1,17	1,35	100,00
Kalimantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	22,18	5,69	2,53	100,00
Kalimantan Utara	0,57	1,30	0,00	0,00	62,94	0,00	21,23	13,97	0,00	100,00
Sulawesi Utara	0,94	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	25,98	6,35	1,88	100,00
Sulawesi Tengah	0,56	0,15	0,00	0,00	74,45	0,26	22,16	1,89	0,53	100,00
Sulawesi Selatan	0,62	0,04	0,00	0,40	73,72	0,11	19,35	4,14	1,63	100,00
Sulawesi Tenggara	0,36	0,06	0,00	0,08	80,94	0,10	13,01	4,93	0,51	100,00
Gorontalo	1,02	0,00	0,00	0,14	88,74	0,00	9,06	0,87	0,16	100,00
Sulawesi Barat	0,92	1,40	0,15	0,24	65,25	0,00	19,98	10,72	1,35	100,00
Maluku	2,67	0,77	0,00	0,01	68,55	0,38	23,90	2,57	1,15	100,00
Maluku Utara	1,50	0,07	0,26	0,00	74,02	0,00	19,61	1,01	3,53	100,00
Papua Barat	0,40	0,20	0,38	1,10	63,91	0,00	29,41	2,58	2,01	100,00
Papua	0,58	1,56	1,96	1,08	80,00	0,00	10,27	1,24	3,32	100,00
Indonesia	1,17	0,25	0,10	0,29	74,34	0,08	19,77	2,73	1,28	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 99 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Tidak Punya Biaya Berobat No Budget for Inpatient	Tidak Ada Biaya Transpor No Budget for Transportation	Tidak Ada Sarana Transportasi No Transportation	Waktu Tunggu Pelayanan Lama Time to Wait is Long	Mengobati Sendiri Self Treated	Tidak Ada yang Mendampingi No Company	Merasa Tidak Perlu No Need	Khawatir Terpapar Covid 19 Worried Exposure Covid 19	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,04	0,00	0,15	0,96	78,97	0,10	16,85	1,28	1,65	100,00
Sumatera Utara	3,20	0,27	0,00	0,06	72,31	0,08	19,31	3,58	1,19	100,00
Sumatera Barat	0,88	0,07	0,25	0,21	71,20	0,06	25,03	1,29	1,02	100,00
Riau	1,75	0,21	0,17	0,26	70,74	0,00	22,61	2,98	1,29	100,00
Jambi	1,03	0,12	0,16	0,26	75,49	0,06	21,67	0,33	0,88	100,00
Sumatera Selatan	1,11	0,07	0,02	0,65	78,75	0,00	16,96	1,03	1,42	100,00
Bengkulu	0,14	0,07	0,15	0,37	78,09	0,00	20,53	0,39	0,26	100,00
Lampung	0,96	0,23	0,06	0,08	77,37	0,10	15,79	4,04	1,37	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,39	0,00	0,00	1,39	76,68	0,25	16,50	3,94	0,84	100,00
Kepulauan Riau	1,34	0,00	0,00	2,34	73,74	0,22	17,49	3,30	1,57	100,00
DKI Jakarta	0,21	1,05	0,00	2,46	62,53	0,55	23,29	8,72	1,18	100,00
Jawa Barat	2,02	0,30	0,07	0,44	73,91	0,15	19,79	2,06	1,27	100,00
Jawa Tengah	0,42	0,14	0,09	0,59	76,56	0,00	19,13	2,15	0,93	100,00
DI Yogyakarta	0,05	0,01	0,05	0,74	76,67	0,30	14,22	4,00	3,95	100,00
Jawa Timur	0,54	0,14	0,03	0,45	78,24	0,20	17,13	2,12	1,14	100,00
Banten	1,92	0,53	0,36	0,12	67,44	0,33	26,57	1,30	1,44	100,00
Bali	1,27	0,00	0,00	0,14	73,73	0,00	18,36	4,00	2,48	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,40	0,14	0,17	0,16	75,91	0,04	16,90	2,29	1,99	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,54	0,14	0,50	0,04	69,76	0,06	11,62	16,52	0,81	100,00
Kalimantan Barat	0,45	0,15	0,26	0,31	70,71	0,22	26,24	0,76	0,90	100,00
Kalimantan Tengah	0,56	0,25	0,08	0,64	78,63	0,15	17,21	1,54	0,94	100,00
Kalimantan Selatan	1,51	0,09	0,00	0,21	82,20	0,00	13,38	1,23	1,39	100,00
Kalimantan Timur	0,42	0,00	0,00	0,00	72,01	0,33	21,08	5,06	1,10	100,00
Kalimantan Utara	0,23	0,53	0,00	0,00	63,51	0,00	19,72	15,10	0,92	100,00
Sulawesi Utara	0,61	0,10	0,00	0,00	69,93	0,18	23,13	4,64	1,41	100,00
Sulawesi Tengah	0,53	0,11	0,01	0,00	70,56	0,23	24,57	2,10	1,89	100,00
Sulawesi Selatan	0,49	0,16	0,00	0,51	73,87	0,07	19,62	3,67	1,62	100,00
Sulawesi Tenggara	0,27	0,04	0,24	0,05	73,00	0,07	19,64	5,86	0,85	100,00
Gorontalo	0,67	0,00	0,00	0,09	87,02	0,00	11,01	0,58	0,63	100,00
Sulawesi Barat	0,74	1,13	0,12	0,19	67,79	0,00	19,40	9,44	1,17	100,00
Maluku	2,15	0,46	0,00	0,01	74,44	0,81	18,89	2,48	0,76	100,00
Maluku Utara	1,85	0,26	0,45	0,33	72,32	0,38	20,03	0,85	3,52	100,00
Papua Barat	0,47	0,10	0,19	1,70	67,11	0,00	25,72	3,04	1,67	100,00
Papua	0,80	0,94	1,18	0,74	72,16	0,02	17,99	2,38	3,78	100,00
Indonesia	1,16	0,21	0,10	0,41	74,72	0,13	19,12	2,87	1,29	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 100 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Rumah Sakit Pemerintah Public Hospital	Rumah Sakit Swasta Private Hospital	Praktek Dokter/Bidan Practitioner Doctor/Midwives	Klinik/Praktek Dokter Bersama Clinics/Practitioner Doctor Centre	Puskesmas/ Pustu Health Center/Subsidiary HC	UKBM* UKBM*	Praktek Pengobatan Tradisional Traditional Healer	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	9,58	2,71	30,76	15,12	45,78	4,03	0,79	2,91
Sumatera Utara	5,36	4,86	47,57	17,49	24,12	0,48	1,66	1,34
Sumatera Barat	6,33	3,61	28,14	7,83	54,95	0,67	0,60	0,31
Riau	3,85	6,83	24,88	23,11	41,19	0,34	1,86	0,32
Jambi	4,85	3,76	31,79	12,49	47,94	0,13	0,62	0,64
Sumatera Selatan	4,96	5,45	27,90	16,24	47,51	0,43	0,92	0,48
Bengkulu	3,42	3,68	29,18	11,46	52,51	0,23	0,21	0,34
Lampung	3,91	5,61	43,36	11,75	39,41	0,50	0,55	0,19
Kepulauan Bangka Belitung	6,02	8,50	35,67	17,23	35,39	1,18	1,87	1,36
Kepulauan Riau	10,56	13,93	18,21	19,36	37,37	1,93	0,19	0,79
DKI Jakarta	12,58	9,24	3,43	18,70	59,66	0,16	0,50	0,52
Jawa Barat	4,04	6,12	23,41	20,78	46,16	0,82	0,75	1,02
Jawa Tengah	4,87	6,95	34,03	11,50	42,91	0,61	0,86	0,97
DI Yogyakarta	6,25	13,24	21,56	16,42	44,20	0,59	0,63	0,06
Jawa Timur	4,57	5,18	41,16	11,05	37,83	1,43	0,64	0,87
Banten	2,88	9,54	23,24	31,82	35,32	0,54	0,68	0,12
Bali	7,72	9,36	40,59	10,83	35,53	0,00	0,10	0,28
Nusa Tenggara Barat	4,85	1,68	43,46	9,72	38,78	3,90	1,67	3,24
Nusa Tenggara Timur	5,56	4,54	11,53	5,95	72,92	0,21	0,12	0,66
Kalimantan Barat	8,70	4,55	29,20	20,63	35,51	1,96	1,75	1,45
Kalimantan Tengah	12,93	3,23	24,96	12,58	48,32	0,00	1,74	2,34
Kalimantan Selatan	11,79	4,04	23,31	7,18	53,11	1,69	0,38	0,89
Kalimantan Timur	7,77	7,36	13,92	13,43	57,88	0,74	0,00	,75
Kalimantan Utara	15,74	0,35	24,51	13,50	48,92	0,00	0,01	0,00
Sulawesi Utara	10,33	7,86	28,79	11,86	41,10	0,68	0,62	2,64
Sulawesi Tengah	5,47	1,70	7,79	3,05	82,07	0,16	0,29	0,00
Sulawesi Selatan	8,25	3,42	16,06	11,16	59,66	2,01	0,84	1,12
Sulawesi Tenggara	15,01	3,16	26,55	9,02	48,22	,02	0,11	0,32
Gorontalo	3,56	1,23	28,79	10,98	56,08	,15	0,00	0,00
Sulawesi Barat	8,40	0,82	39,18	3,70	48,90	0,00	0,23	0,01
Maluku	5,00	3,08	17,14	7,75	67,24	1,47	1,44	1,14
Maluku Utara	20,01	3,42	18,64	16,43	44,41	1,60	0,00	0,00
Papua Barat	13,09	6,82	17,49	13,71	48,81	0,82	0,00	1,68
Papua	16,40	3,42	12,60	16,72	58,00	0,14	0,32	0,05
Indonesia	5,43	5,19	29,00	16,10	43,98	0,94	0,78	0,93

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 101 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Rumah Sakit Pemerintah Public Hospital	Rumah Sakit Swasta Private Hospital	Praktek Dokter/Bidan Practitioner Doctor/Midwives	Klinik/Praktek Dokter Bersama Clinic/Practitioner Doctor Centre	Puskesmas/ Pustu Health Center/Subsidiary HC	UKBM* UKBM*	Praktek Pengobatan Tradisional Traditional Healer	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8,08	0,76	40,76	11,23	45,63	4,85	1,21	1,62
Sumatera Utara	3,01	2,34	55,43	5,60	32,61	1,71	2,89	0,85
Sumatera Barat	5,12	1,42	44,42	4,73	38,94	6,13	2,22	0,75
Riau	3,69	2,99	32,74	9,04	49,81	2,21	1,65	0,68
Jambi	2,84	1,89	41,35	8,75	41,16	4,06	1,38	1,98
Sumatera Selatan	1,69	1,17	41,09	3,51	50,05	3,27	0,99	0,53
Bengkulu	3,17	1,35	60,64	3,60	32,64	0,85	1,00	0,57
Lampung	1,60	1,94	58,71	6,27	32,44	0,30	1,34	0,88
Kepulauan Bangka Belitung	4,10	2,39	41,18	6,59	44,68	1,93	0,79	0,45
Kepulauan Riau	5,48	7,77	18,42	6,54	48,18	13,46	0,13	2,02
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,22	3,14	51,02	15,56	28,21	1,00	2,64	2,53
Jawa Tengah	3,07	3,36	46,62	7,97	38,06	1,66	0,71	1,40
DI Yogyakarta	5,15	4,11	53,27	9,61	27,08	0,82	0,54	0,84
Jawa Timur	2,25	2,30	55,70	6,76	30,55	4,91	1,51	0,90
Banten	3,16	1,01	37,10	15,67	44,08	0,57	1,08	0,29
Bali	5,48	4,02	47,90	4,76	38,35	1,60	0,39	0,48
Nusa Tenggara Barat	2,95	0,47	49,29	9,79	32,85	7,12	1,78	3,02
Nusa Tenggara Timur	2,22	1,29	8,41	3,18	77,85	9,30	0,63	0,55
Kalimantan Barat	3,15	1,45	32,47	4,65	50,23	9,70	0,59	0,66
Kalimantan Tengah	5,19	0,50	13,32	3,50	71,51	5,55	0,91	1,44
Kalimantan Selatan	4,13	1,54	25,50	3,06	62,60	3,87	1,18	0,75
Kalimantan Timur	5,09	2,22	12,36	7,60	71,56	1,47	0,32	1,04
Kalimantan Utara	6,06	0,12	10,64	2,55	81,79	2,08	0,03	0,00
Sulawesi Utara	3,81	2,51	30,82	6,30	57,55	1,51	0,42	0,57
Sulawesi Tengah	4,27	1,82	32,16	2,16	54,82	5,60	0,68	0,73
Sulawesi Selatan	3,76	0,86	16,09	5,07	73,16	1,27	0,44	1,66
Sulawesi Tenggara	3,52	0,55	13,70	3,50	75,29	4,05	0,46	1,11
Gorontalo	3,50	0,19	38,61	12,61	42,22	1,89	0,36	2,46
Sulawesi Barat	2,95	0,57	18,70	1,69	74,93	1,67	0,61	0,56
Maluku	6,03	0,15	11,38	1,70	77,84	3,92	0,37	0,82
Maluku Utara	6,60	0,93	12,12	4,22	65,56	11,32	1,01	0,52
Papua Barat	6,20	1,53	6,27	2,98	82,11	1,62	0,44	0,90
Papua	5,58	0,31	2,69	1,56	87,71	1,83	0,93	0,81
Indonesia	3,34	2,11	42,98	7,48	42,54	3,23	1,32	1,22

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Tabel 102 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2022

Provinsi Province	Rumah Sakit Pemerintah Public Hospital	Rumah Sakit Swasta Private Hospital	Praktek Dokter/Bidan Practitioner Doctor/Midwives	Klinik/Praktek Dokter Bersama Clinic/Practitioner Doctor Centre	Puskesmas/ Pustu Health Center/Subsidiary HC	UKBM* UKBM*	Praktek Pengobatan Tradisional Traditional Healer	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8,47	1,27	38,14	12,25	45,67	4,63	1,10	1,96
Sumatera Utara	4,26	3,68	51,24	11,93	28,08	1,05	2,23	1,11
Sumatera Barat	5,52	2,13	39,13	5,74	44,14	4,35	1,70	0,61
Riau	3,75	4,53	29,58	14,70	46,35	1,46	1,73	0,54
Jambi	3,35	2,37	38,89	9,71	42,90	3,05	1,18	1,64
Sumatera Selatan	2,83	2,67	36,47	7,97	49,16	2,27	0,97	0,51
Bengkulu	3,26	2,22	48,91	6,53	40,05	0,62	0,70	0,49
Lampung	2,21	2,91	54,68	7,71	34,27	0,35	1,13	0,70
Kepulauan Bangka Belitung	5,06	5,43	38,43	11,90	40,05	1,56	1,33	0,90
Kepulauan Riau	9,44	12,57	18,26	16,55	39,74	4,46	0,17	1,06
DKI Jakarta	12,58	9,24	3,43	18,70	59,66	0,16	0,50	0,52
Jawa Barat	3,87	5,49	29,26	19,67	42,36	0,86	1,15	1,34
Jawa Tengah	3,99	5,18	40,23	9,76	40,52	1,13	0,78	1,18
DI Yogyakarta	5,94	10,71	30,37	14,53	39,44	0,66	0,60	0,28
Jawa Timur	3,45	3,78	48,21	8,68	34,30	3,12	1,06	0,88
Banten	2,97	6,86	27,59	26,75	38,07	0,82	0,81	0,17
Bali	6,88	7,37	43,32	8,57	36,58	0,60	0,21	0,35
Nusa Tenggara Barat	3,83	1,03	46,59	9,76	35,60	5,63	1,73	3,12
Nusa Tenggara Timur	3,32	2,36	9,44	4,09	76,23	6,31	0,46	0,59
Kalimantan Barat	4,75	2,34	31,53	9,25	45,99	7,47	0,92	0,89
Kalimantan Tengah	7,39	1,28	16,62	6,07	64,93	3,98	1,14	1,69
Kalimantan Selatan	6,74	2,40	24,75	4,47	59,36	3,12	0,90	0,80
Kalimantan Timur	6,84	5,57	13,37	11,40	62,64	1,00	0,11	0,85
Kalimantan Utara	11,26	0,24	18,09	8,43	64,13	0,96	0,02	0,00
Sulawesi Utara	6,31	4,57	30,04	8,44	51,23	1,19	0,50	1,36
Sulawesi Tengah	4,88	1,76	19,78	2,61	68,66	2,84	0,48	0,36
Sulawesi Selatan	5,31	1,74	16,08	7,17	68,52	1,53	0,58	1,47
Sulawesi Tenggara	5,96	1,11	15,98	4,68	69,49	3,19	0,18	0,94
Gorontalo	3,53	0,73	33,51	11,76	49,43	,99	0,17	1,18
Sulawesi Barat	3,88	0,61	22,17	2,03	70,51	1,38	0,54	0,47
Maluku	5,63	1,30	13,64	4,07	73,69	2,96	0,79	0,94
Maluku Utara	9,36	1,44	13,46	6,73	61,21	9,32	0,80	0,42
Papua Barat	8,23	3,09	9,57	6,14	72,32	1,38	0,31	1,13
Papua	10,02	1,58	6,76	7,78	75,52	1,14	0,68	0,50
Indonesia	4,47	4,32	35,43	12,13	43,32	1,99	1,03	1,06

Sumber: BPS, Statistik Kesehatan, 2022

Jika dilihat lebih dalam, terlihat adanya perubahan fenomena mengobati sendiri. Pada tahun 2022, anak umur 0-17 tahun yang pernah mengobati sendiri di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan. Sebaliknya pada tahun 2022, anak umur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan pernah mengobati sendiri di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di perdesaan. Sementara itu, semakin tinggi kelompok umur anak, semakin tinggi pula persentase anak pernah mengobati sendiri

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Angka rawat jalan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal ini mengindikasikan akses ke fasilitas kesehatan di perkotaan yang lebih baik daripada di perdesaan. Masih adanya hambatan akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat perdesaan di Indonesia diantaranya waktu tempuh yang lama (lebih dari 30 menit) dan biaya transportasi yang mahal (lebih dari Rp 15.000). Semakin tinggi kelompok umur anak, maka persentase anak yang pernah rawat jalan semakin kecil.

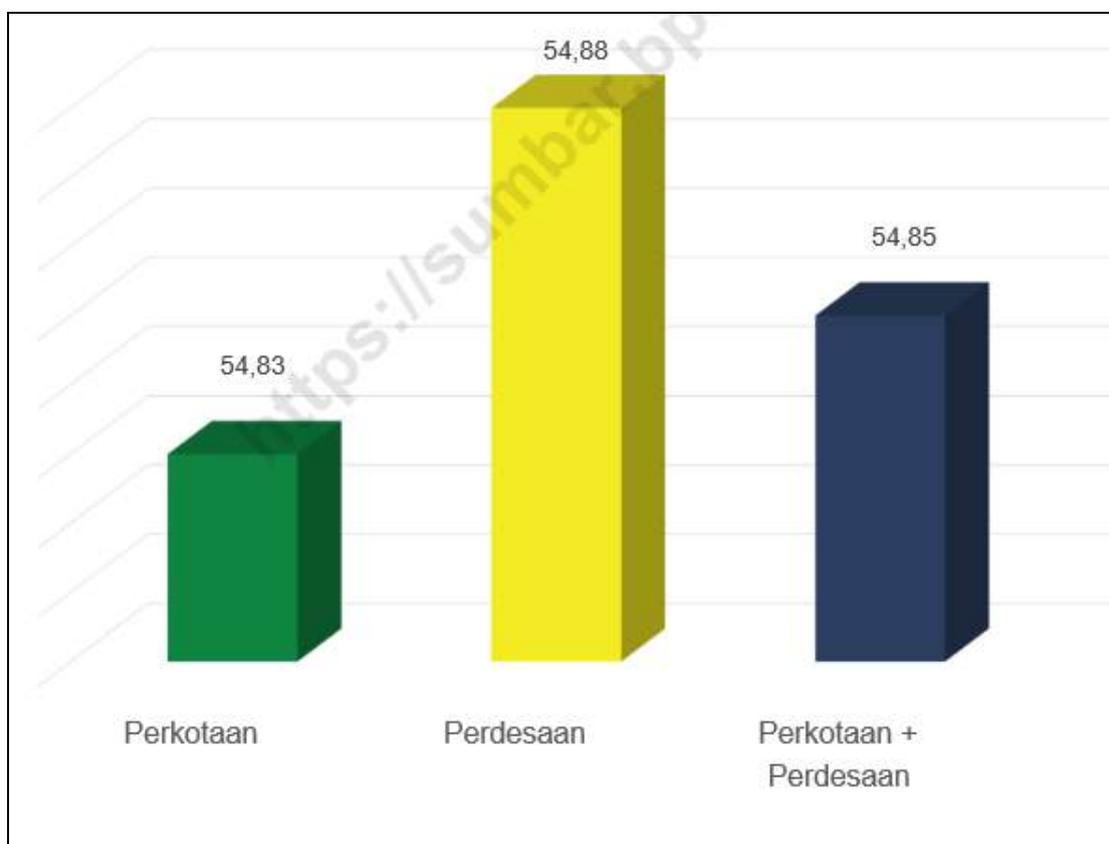
Anak yang pernah rawat jalan saat mempunyai keluhan kesehatan bisa menunjukkan adanya akses anak ke fasilitas kesehatan. Namun demikian, bukan berarti anak yang tidak pernah rawat jalan saat mempunyai keluhan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Terdapat berbagai alasan yang mendasari anak tidak rawat jalan saat mempunyai keluhan kesehatan

Upaya kesehatan lainnya yang bisa dilakukan ketika mempunyai keluhan kesehatan adalah rawat inap di fasilitas kesehatan. Rawat inap dilakukan jika anak yang mempunyai keluhan kesehatan yang berat membutuhkan pengobatan khusus dan lebih intensif.

Diantara penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, ada yang tidak pernah melakukan berobat jalan. Di Sumatera Barat tahun 2023 ada sebesar 54,85 persen yang tidak berobat jalan. Jika dilihat menurut daerah, terdapat 54,83 persen penduduk di perkotaan dan 54,88 persen di perdesaan tidak pernah melakukan berobat jalan. Terlihat dari,

persentase penduduk yang tidak pernah berobat jalan lebih besar di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan

Gambar 43 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Tetapi Tidak Pernah Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Alasan penduduk di Sumatera Barat tidak berobat jalan bisa disebabkan oleh unmet need dari pelayanan kesehatan, atau bisa jadi karena merasa tidak perlu diobati atau alasan malas. Unmet need alasan kesehatan dapat berupa tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi dan waktu tunggu pelayanan yang lama

Pada tabel 103 terlihat unmet need dengan alasan ekonomi (tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi, dan tidak ada sarana transportasi) di Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 0,85 persen (0,58% tidak punya biaya berobat, 0,14% tidak ada biaya transportasi, dan 0,13% tidak ada sarana transportasi). Terlihat di daerah pedesaan sebesar 1,33 persen (0,78% tidak punya biaya berobat, 0,28% tidak ada biaya transportasi, dan 0,27% tidak ada sarana transportasi) lebih rendah dibandingkan daerah

perkotaan yang sebesar 0,4 persen. Data tersebut dapat diartikan bahwa keterbatasan ekonomi masih sangat memengaruhi masyarakat perkotaan untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan. Jadi, meskipun banyak penduduk di daerah perkotaan yang tidak berobat jalan meskipun ada keluhan, hal ini bukan disebabkan oleh unmet need alasan kesehatan.

Tabel 103 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Biaya Berobat	0,39	0,78	0,58
Tidak Punya Biaya Transpor	0,01	0,28	0,14
Tidak Ada Sarana Transportasi	–	0,27	0,13
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	1,16	0,91	1,04
Mengobati Sendiri	53,36	55,41	54,36
Tidak Ada yang Mendampingi	0,03	0,11	0,07
Merasa Tidak Perlu	42,91	39,70	41,34
Lainnya	2,15	2,54	2,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

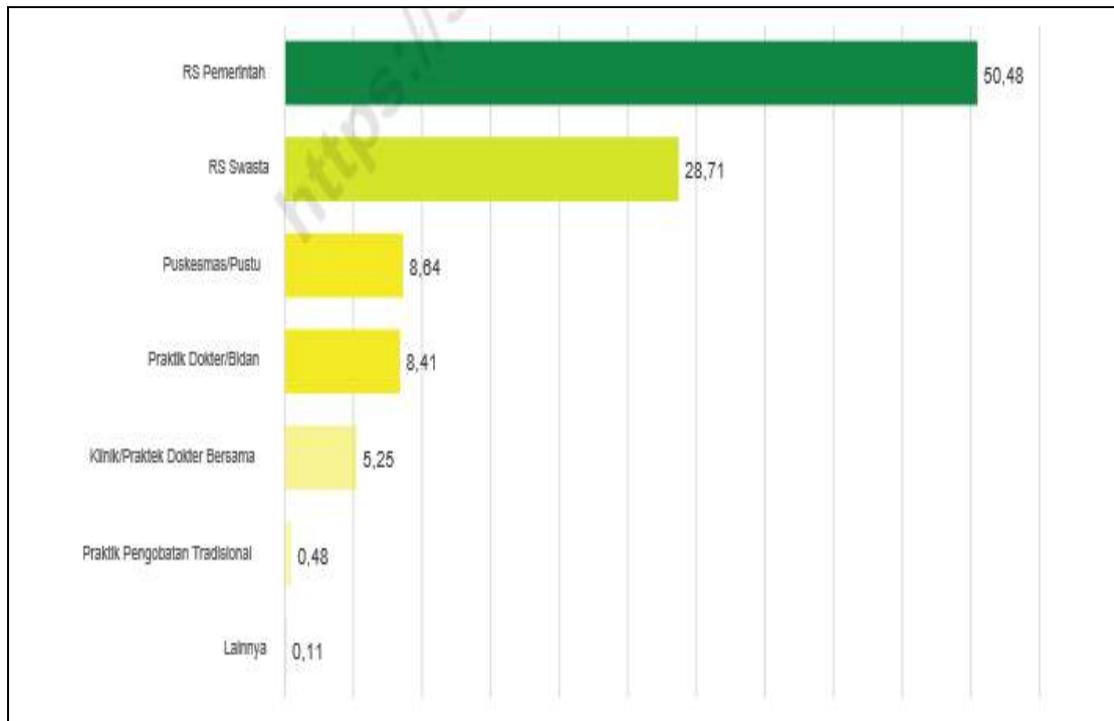
Pada tabel 103 terlihat unmet need pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Sumatera Barat tahun 2023 yang tertinggi yaitu dengan alasan utama berobat sendiri yaitu sebesar 54,36 persen dan merasa tidak perlu yaitu sebesar 41,34 persen. Selanjutnya unmet need dengan alasan utama waktu tunggu pelayanan lama juga cukup tinggi yaitu sebesar 1,04 persen. Keluhan ini dirasakan lebih banyak oleh penduduk di daerah perkotaan

sebesar 1,16 persen dibandingkan dengan penduduk di daerah perdesaan yaitu sebesar 0,91 persen. Gambaran ini menunjukkan masih kurang efektifnya manajemen pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan.

Proses penyembuhan anak akan lebih efektif jika ditunjang dengan alat-alat kesehatan yang memadai dan petugas kesehatan yang kompeten. Bagi pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya, maka biasanya dianjurkan pengobatan rawat inap. Rawat Inap (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit.

Alternatif lain atas tindakan pengobatan/kuratif terhadap keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang adalah dapat melakukan tindakan rawat inap di tempat pengobatan. Upaya pengobatan yang dilakukan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern maupun tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan. Berdasarkan gambar 44, penduduk Sumatera Barat jika ingin melakukan rawat inap terhadap penyakit yang dideritanya cenderung memilih untuk dilayani di rumah sakit pemerintah sebesar 50,48 persen. Rumah sakit swasta merupakan pilihan kedua tempat rawat inap terbanyak setelah rumah sakit pemerintah yaitu sebesar 28,71 persen.

Gambar 44 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 104 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tempat Berobat	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	62,67	44,36	50,48
RS Swasta	25,08	30,54	28,71
Praktik Dokter/Bidan	2,82	11,22	8,41
Klinik/Praktek Dokter bersama	2,31	6,72	5,25
Puskesmas/Pustu	8,34	8,78	8,64
UKBM ¹⁾	–	–	–
Praktik Pengobatan Tradisional	0,73	0,36	0,48
Lainnya ²⁾	0,34	0,00	0,11

¹⁾UKBM: Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai pengobatan

²⁾ Lainnya: praktek dukun bersalin, posko pengobatan

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan tabel 104 dapat dilihat pada pelayanan rawat inap di praktik dokter/bidan menunjukkan angka yang cukup menarik antara perbandingan persentase rawat inap penduduk laki-laki dan perempuan. Pada praktik dokter/bidan, penduduk perempuan lebih banyak mendapatkan tindakan rawat inap sebesar 11,22 persen atau lebih besar hampir 5 kali dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 2,82 persen. Hal ini diindikasikan oleh kaum perempuan yang cenderung lebih banyak memerlukan layanan persalinan di praktik dokter/bidan. Selain itu, hal ini disebabkan oleh kodrat perempuan untuk melahirkan sehingga meningkatkan proporsi perempuan untuk melakukan tindakan berobat rawat inap di praktik dokter/bidan.

Sebagian masyarakat juga menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dalam menjalankan rawat inap. Penggunaan jaminan kesehatan dalam rawat inap lebih besar jumlahnya daripada rawat jalan. Pada rawat jalan sebesar 51,38 persen sedangkan rawat inap sebesar 80,18 persen seperti terlihat pada tabel 105.

Tabel 105 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Satu Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	87,99	86,29	86,88
Perdesaan	71,86	72,54	72,32
Perkotaan + Perdesaan	80,84	79,85	80,18

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Pada tabel 105 terlihat penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap di daerah perkotaan sebesar 86,88 persen dan sebesar 72,32 persen di daerah perdesaan. Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan jaminan kesehatan yaitu 80,84

persen untuk laki-laki dan 79,85 persen untuk perempuan. Perbedaan antar gender ini juga terlihat di daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Rata-rata jumlah hari rawat inap untuk penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 4–5 hari. Dilihat pada tabel 106 berdasarkan daerah tempat tinggal, tidak terdapat perbedaan pola. Namun, pada daerah perkotaan memiliki rata-rata jumlah hari rawat inap yang lebih lama (8–9 hari) dibanding daerah perdesaan (4–5 hari). Jika dilihat menurut kelompok jumlah hari dirawat, terlihat kelompok yang paling banyak berada di kelompok rawat inap ≤ 3 hari (50,47%). Kelompok kedua adalah kelompok yang dirawat, 4–6 hari (27,88%). Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan paling banyak berada di kelompok rawat inap ≤ 3 hari

Tabel 106 Persentase Penduduk Menurut Jumlah Hari Rawat Inap Selama Setahun Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal	Jumlah Hari Rawat Inap				Lama Rawat Inap (Hari)
	≤ 3	4–6	7–29	≥ 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	46,80	30,54	21,68	0,97	8,82
Perdesaan	54,77	24,75	19,28	1,21	4,80
Perkotaan + Perdesaan	50,47	27,88	20,58	1,08	4,81

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tabel 106 jumlah hari rawat inap untuk laki-laki dan perempuan paling banyak berada di kelompok pertama yaitu kelompok rawat inap ≤ 3 hari.

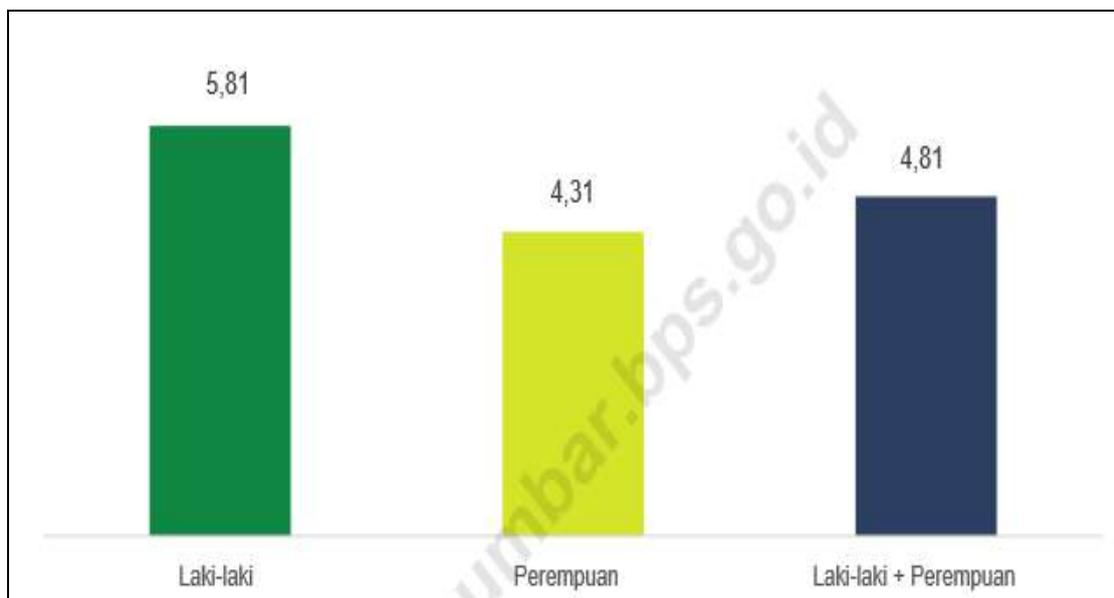
Tabel 107 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Rawat Inap Selama Setahun Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jenis Kelamin	Jumlah Hari Rawat Inap				Lama Rawat Inap (Hari)
	≤ 3	4–6	7–29	≥30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	36,71	32,28	29,49	1,52	5,81
Perempuan	57,37	25,67	16,10	0,86	4,31
Laki-laki + Perempuan	50,47	27,88	20,58	1,08	4,81

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jika melihat pola pada kelompok jumlah hari dirawat pada tabel 107, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari setengah (57,37%) perempuan dirawat ≤ 3 hari. Sedangkan penduduk laki-laki cenderung memiliki proporsi yang sama pada setiap kelompok jumlah hari dirawat yaitu sekitar 30 persen.

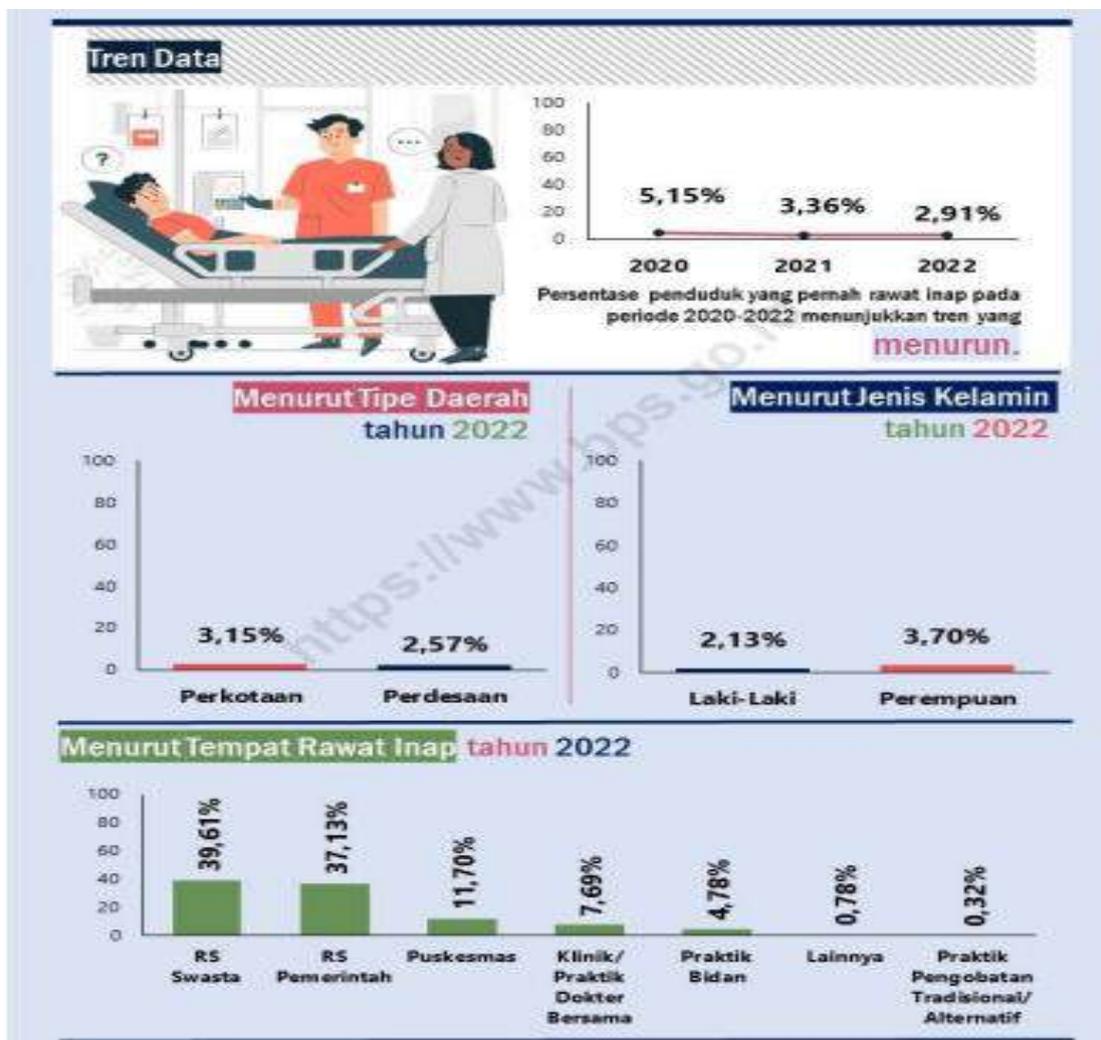
Gambar 45 Rata-rata Rawat Inap Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selanjutnya, pada gambar 45 terlihat perbedaan rata-rata jumlah hari rawat untuk laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki rata-rata membutuhkan waktu rawat inap pada tahun 2023 selama 5-6 hari, sedangkan penduduk perempuan hanya 4-5 hari. Pada gambar 48 terlihat perbedaan rata-rata jumlah hari rawat untuk laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki rata-rata membutuhkan waktu rawat inap pada tahun 2022 selama 5-6 hari, sedangkan penduduk perempuan hanya 4-5 hari

Gambar 46 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Tabel 108 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,68	4,43	4,01
Sumatera Utara	4,22	2,77	2,48
Sumatera Barat	5,06	3,33	3,31
Riau	4,44	2,52	2,62
Jambi	3,79	2,58	2,85
Sumatera Selatan	3,97	2,48	2,02
Bengkulu	5,06	3,05	2,59
Lampung	4,92	3,23	3,00
Kep. Bangka Belitung	4,60	3,53	2,89
Kep. Riau	4,80	2,71	3,04
DKI Jakarta	4,91	3,69	2,74
Jawa Barat	5,09	3,45	2,90
Jawa Tengah	6,52	3,98	3,49
DI Yogyakarta	6,91	4,34	3,98
Jawa Timur	5,41	3,40	2,72
Banten	4,04	2,80	2,26
Bali	4,36	3,54	2,95
Nusa Tenggara Barat	6,42	5,25	4,60
Nusa Tenggara Timur	4,48	3,70	3,02
Kalimantan Barat	3,78	2,58	2,22
Kalimantan Tengah	3,55	2,12	1,64
Kalimantan Selatan	4,75	2,78	2,13
Kalimantan Timur	5,74	3,49	3,17
Kalimantan Utara	5,73	3,79	3,86
Sulawesi Utara	5,89	3,82	3,52
Sulawesi Tengah	5,48	3,64	3,25
Sulawesi Selatan	6,40	3,56	3,28
Sulawesi Tenggara	4,44	3,10	3,10
Gorontalo	6,92	4,13	4,44
Sulawesi Barat	5,09	2,57	3,14
Maluku	2,79	1,59	1,64
Maluku Utara	3,50	2,39	2,27
Papua Barat	4,16	2,53	2,31
Papua	2,31	1,50	1,32
Indonesia	5,15	3,36	2,91

Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Tabel 109 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022

Karakteristik	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	5,53	3,64	3,15
Perdesaan	4,68	3,00	2,57
Jenis Kelamin			
Laki-laki	3,99	2,37	2,13
Perempuan	6,33	4,36	3,70
Kelompok Umur			
0-4 tahun	7,36	4,47	4,08
5-9 tahun	3,14	1,16	1,14
10-14 tahun	2,07	0,96	0,91
15-19 tahun	3,09	1,65	1,40
20-24 tahun	5,46	3,78	2,80
25-29 tahun	6,45	5,12	4,05
30-34 tahun	5,82	4,36	3,77
35-39 tahun	4,7	3,59	3,02
40-44 tahun	3,95	2,63	2,42
45-49 tahun	4,10	2,78	2,53
50-54 tahun	5,45	3,36	3,05
55-59 tahun	6,63	4,37	3,72
60+ tahun	8,71	5,26	4,72
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	4,98	2,84	2,55
SD/Sederajat	4,60	3,06	2,67
SMP/Sederajat	4,81	3,20	2,73
SMA/Sederajat	5,54	3,81	3,20
Perguruan Tinggi	7,31	5,58	4,53
Status Ekonomi			
Kuintil 1	3,70	2,30	1,94
Kuintil 2	4,24	2,71	2,37
Kuintil 3	4,89	3,11	2,68
Kuintil 4	5,81	3,64	3,30
Kuintil 5	7,13	5,03	4,24
Indonesia	5,15	3,36	2,91

Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Penduduk yang pernah rawat inap persentasenya semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya status ekonomi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan rumah tangga dengan status ekonomi yang tinggi memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan untuk melakukan rawat inap dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih rendah.

Anak umur 0-4 tahun memiliki angka rawat inap yang lebih tinggi daripada anak-anak pada kelompok umur lainnya. Menunjukkan persentase anak umur 0-4 tahun yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir sebesar 4,08 persen. Persentase anak umur 0-4 tahun di daerah perkotaan yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir lebih besar daripada di daerah

perdesaan meski demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan angka rawat inap di perkotaan lebih tinggi dibandingkan penurunan angka rawat inap di perdesaan. Tempat rawat inap yang digunakan balita dalam setahun terakhir didominasi oleh rumah sakit, baik RS Pemerintah maupun swasta

Tabel 110 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,92	2,24	1,57
Kab. Pesisir Selatan	2,69	6,28	4,50
Kab. Solok	3,49	5,20	4,35
Kab. Sijunjung	3,11	4,85	3,99
Kab. Tanah Datar	3,74	4,65	4,20
Kab. Padang Pariaman	1,12	4,03	2,60
Kab. Agam	1,64	4,42	3,05
Kab. Lima Puluh Kota	1,81	3,22	2,51
Kab. Pasaman	1,69	5,34	3,53
Kab. Solok Selatan	1,87	3,79	2,82
Kab. Dharmasraya	2,81	4,55	3,66
Kab. Pasaman Barat	0,77	3,42	2,08
Kota Padang	3,10	4,61	3,86
Kota Solok	4,71	6,13	5,43
Kota Sawahlunto	2,36	4,60	3,49
Kota Padang Panjang	3,42	5,48	4,46
Kota Bukittinggi	1,23	5,25	3,31
Kota Payakumbuh	2,78	6,16	4,47
Kota Pariaman	2,62	7,53	5,12
Sumatera Barat	2,36	4,65	3,51

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 20

Tabel 111 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Pemerintah Public Hospital	Rumah Sakit Swasta Private Hospital	Praktik Bidan Midwife Practice	Klinik/Praktik Dokter Bersama Clinic/Joint Doctor Practice	Puskesmas Public Health Center	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif Traditional/ Alternative Treatment Practice	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Kepulauan Mentawai	35,16	9,79	31,55	-	23,50	-	-
Kab. Pesisir Selatan	52,19	18,33	7,43	2,95	23,38	0,74	-
Kab. Solok	59,69	22,87	5,40	9,52	3,16	-	-
Kab. Sijunjung	47,43	12,80	10,52	7,79	21,46	1,78	-
Kab. Tanah Datar	57,30	31,61	3,87	1,69	5,01	1,27	-
Kab. Padang Pariaman	45,55	30,29	23,31	9,47	0,61	2,05	2,05
Kab. Agam	57,37	21,73	8,31	2,79	10,58	-	-
Kab. Lima Puluh Kota	51,15	15,32	2,05	18,38	13,09	-	-
Kab. Pasaman	46,81	24,49	14,53	3,61	10,78	-	-
Kab. Solok Selatan	58,75	8,27	8,01	-	23,98	3,29	-
Kab. Dharmasraya	54,75	12,49	12,15	16,00	9,92	-	-
Kab. Pasaman Barat	43,03	35,88	1,56	6,07	15,39	-	-
Kota Padang	43,00	48,14	8,45	-	0,41	-	-
Kota Solok	63,47	26,10	3,99	7,30	0,20	1,05	-
Kota Sawahlunto	80,76	7,64	2,92	2,49	6,94	-	-
Kota Padang Panjang	72,91	19,62	6,96	1,61	-	-	-
Kota Bukittinggi	38,61	44,23	6,87	8,96	1,34	-	-
Kota Payakumbuh	37,03	46,04	8,32	6,19	2,42	-	-
Kota Pariaman	47,44	45,55	6,74	2,47	-	-	-
Sumatera Barat	50,48	28,71	8,41	5,25	8,64	0,48	0,11

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 112 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap menurut Kabupaten/Kota, Jumlah Hari Rawat Inap, dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Hari Rawat Inap The Number of Inpatient Days				Jumlah Total	Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari) Average Length of Stay (Days)
	≤ 3	4-6	7-29	≥ 30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	68,11	20,34	11,54	-	100,00	3,28
Kab. Pesisir Selatan	41,98	27,74	28,40	1,87	100,00	5,25
Kab. Solok	36,98	45,97	15,77	1,29	100,00	4,52
Kab. Sijunjung	61,29	25,68	8,90	4,13	100,00	4,44
Kab. Tanah Datar	46,88	27,10	23,80	2,22	100,00	6,20
Kab. Padang Pariaman	63,84	17,72	18,44	-	100,00	3,86
Kab. Agam	48,85	34,95	15,88	0,33	100,00	4,46
Kab. Lima Puluh Kota	55,03	30,09	14,88	-	100,00	3,67
Kab. Pasaman	67,47	16,16	16,37	-	100,00	3,96
Kab. Solok Selatan	38,97	41,15	18,23	1,65	100,00	6,28
Kab. Dharmasraya	48,75	27,30	22,61	1,34	100,00	4,93
Kab. Pasaman Barat	69,98	19,41	10,61	-	100,00	3,48
Kota Padang	45,47	27,07	26,49	0,97	100,00	5,35
Kota Solok	49,08	27,42	22,45	1,05	100,00	5,00
Kota Sawahlunto	65,36	26,06	8,58	-	100,00	3,60
Kota Padang Panjang	56,18	25,95	17,88	-	100,00	4,13
Kota Bukittinggi	45,75	21,20	33,05	-	100,00	4,96
Kota Payakumbuh	51,21	26,39	21,35	1,06	100,00	5,09
Kota Pariaman	56,17	18,27	24,72	0,85	100,00	5,35
Sumatera Barat	50,47	27,88	20,58	1,08	100,00	4,81

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 113 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki + Perempuan <i>Male + Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	20,67	72,95	57,15
Kab. Pesisir Selatan	65,48	73,44	71,09
Kab. Solok	66,91	59,84	62,67
Kab. Sijunjung	71,23	81,91	77,78
Kab. Tanah Datar	90,55	76,02	82,32
Kab. Padang Pariaman	85,45	66,16	70,28
Kab. Agam	85,89	81,54	82,70
Kab. Lima Puluh Kota	47,13	73,63	64,13
Kab. Pasaman	73,26	94,73	89,65
Kab. Solok Selatan	73,04	76,20	75,15
Kab. Dharmasraya	83,78	61,70	70,44
Kab. Pasaman Barat	81,26	78,83	79,29
Kota Padang	96,76	96,38	96,53
Kota Solok	84,12	92,57	88,93
Kota Sawahlunto	98,01	89,73	92,51
Kota Padang Panjang	91,52	86,91	88,67
Kota Bukittinggi	91,32	79,94	81,99
Kota Payakumbuh	89,85	77,97	81,66
Kota Pariaman	81,02	92,38	89,53
Sumatera Barat	80,84	79,85	80,18

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 114 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Perdesaan/Rural			Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3,85	6,25	5,06	3,47	4,97	4,22	3,60	5,41	4,51
Sumatera Utara	2,78	4,52	3,65	1,67	2,69	2,18	2,30	3,73	3,01
Sumatera Barat	2,62	4,93	3,78	2,09	4,37	3,23	2,36	4,65	3,51
Riau	2,66	4,39	3,52	1,75	2,76	2,24	2,11	3,43	2,76
Jambi	2,72	3,52	3,11	2,63	3,56	3,09	2,66	3,55	3,10
Sumatera Selatan	1,79	3,74	2,77	1,57	2,70	2,12	1,65	3,10	2,37
Bengkulu	2,68	4,89	3,79	1,71	3,53	2,60	2,03	4,00	3,00
Lampung	2,76	5,22	3,99	1,83	3,30	2,54	2,13	3,95	3,02
Kepulauan Bangka Belitung	2,43	3,98	3,20	1,87	4,02	2,90	2,19	3,99	3,07
Kepulauan Riau	2,97	5,87	4,41	2,20	3,51	2,81	2,88	5,62	4,23
DKI Jakarta	2,67	3,88	3,28	-	-	-	2,67	3,88	3,28
Jawa Barat	2,65	3,63	3,13	2,82	3,25	3,04	2,69	3,55	3,11
Jawa Tengah	3,22	5,28	4,26	3,12	4,72	3,92	3,17	5,01	4,10
DI Yogyakarta	4,31	5,26	4,78	2,34	3,41	2,90	3,83	4,79	4,31
Jawa Timur	2,93	4,33	3,63	2,17	3,40	2,80	2,60	3,92	3,27
Banten	2,51	3,24	2,87	1,94	1,68	1,81	2,38	2,90	2,63
Bali	2,17	3,74	2,94	2,25	3,91	3,08	2,19	3,78	2,98
Nusa Tenggara Barat	3,41	5,82	4,64	4,37	6,51	5,45	3,88	6,15	5,03
Nusa Tenggara Timur	2,63	3,75	3,19	1,69	3,47	2,59	1,94	3,54	2,74
Kalimantan Barat	2,36	3,84	3,11	1,47	2,80	2,12	1,79	3,20	2,49
Kalimantan Tengah	1,76	2,60	2,18	1,16	1,73	1,43	1,41	2,11	1,75
Kalimantan Selatan	2,39	3,71	3,05	1,76	2,61	2,18	2,07	3,16	2,61
Kalimantan Timur	2,59	4,99	3,77	2,65	3,20	2,91	2,61	4,46	3,50
Kalimantan Utara	3,03	6,07	4,52	3,32	4,34	3,79	3,14	5,47	4,26
Sulawesi Utara	3,75	6,03	4,89	3,49	5,82	4,61	3,63	5,94	4,76
Sulawesi Tengah	4,29	6,22	5,27	2,12	3,71	2,90	2,81	4,54	3,66
Sulawesi Selatan	3,47	5,28	4,39	2,56	5,03	3,83	2,98	5,14	4,09
Sulawesi Tenggara	2,38	4,84	3,63	1,80	3,58	2,69	2,02	4,07	3,05
Gorontalo	5,15	8,23	6,73	2,52	5,18	3,82	3,66	6,57	5,12
Sulawesi Barat	2,78	4,42	3,62	1,78	4,23	2,99	1,98	4,27	3,12
Maluku	2,66	2,88	2,77	1,04	1,52	1,28	1,73	2,11	1,92
Maluku Utara	2,36	3,56	2,96	1,81	2,38	2,09	1,97	2,73	2,34
Papua Barat	1,76	4,45	3,06	1,72	2,14	1,92	1,74	3,10	2,39
Papua	2,29	4,00	3,10	0,49	0,82	0,65	1,02	1,75	1,37
Indonesia	2,82	4,30	3,56	2,28	3,58	2,92	2,59	4,00	3,29

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 115 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023

Provinsi <i>Province</i>	Rumah Sakit Pemerintah <i>Public Hospital</i>	Rumah Sakit Swasta <i>Private Hospital</i>	Praktik Bidan <i>Midwife Practice</i>	Klinik/Praktik Dokter Bersama <i>Clinic/Joint Doctor Practice</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Praktik Pengobatan Tradisional/Alternatif <i>Traditional/Alternative Treatment Practice</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	67,44	23,28	1,61	3,70	5,52	-	-
Sumatera Utara	25,65	55,47	7,38	9,69	1,83	0,48	0,59
Sumatera Barat	50,82	33,75	9,14	2,52	4,67	0,57	0,21
Riau	26,95	60,88	3,86	3,74	6,02	-	0,21
Jambi	41,60	42,65	7,18	4,37	5,10	-	0,03
Sumatera Selatan	39,00	48,93	4,97	7,11	0,69	0,01	0,81
Bengkulu	52,58	43,55	1,79	2,71	0,93	-	-
Lampung	17,17	57,27	8,92	11,01	6,70	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	45,92	46,61	0,03	2,72	5,96	-	-
Kepulauan Riau	26,32	66,12	2,54	1,69	3,18	0,42	-
DKI Jakarta	48,32	42,47	4,36	0,42	4,23	0,21	0,97
Jawa Barat	31,17	52,34	4,24	8,53	4,76	0,31	0,99
Jawa Tengah	34,46	52,68	1,11	5,14	8,42	0,64	-
DI Yogyakarta	31,01	63,26	2,12	2,80	1,66	-	-
Jawa Timur	36,08	46,00	4,03	5,79	9,43	0,12	0,28
Banten	23,99	59,14	4,35	5,90	6,72	0,36	0,28
Bali	36,27	55,99	3,86	2,52	1,93	-	-
Nusa Tenggara Barat	42,12	18,97	2,84	8,12	29,56	0,70	1,20
Nusa Tenggara Timur	56,17	38,07	-	0,56	8,56	-	-
Kalimantan Barat	52,92	34,54	4,45	4,00	4,63	-	-
Kalimantan Tengah	73,36	17,08	0,99	2,61	7,08	-	-
Kalimantan Selatan	61,60	27,72	3,55	4,36	2,93	-	-
Kalimantan Timur	43,65	49,27	3,18	2,13	2,39	0,18	-
Kalimantan Utara	85,38	6,42	2,92	1,36	4,58	-	0,15
Sulawesi Utara	40,16	55,23	1,11	0,92	4,33	-	-
Sulawesi Tengah	73,02	14,47	0,43	1,91	12,08	-	-
Sulawesi Selatan	53,15	34,50	0,75	1,63	11,87	0,33	0,55
Sulawesi Tenggara	53,79	28,84	1,53	2,36	14,10	-	-
Gorontalo	68,77	26,02	-	2,82	3,97	-	0,22
Sulawesi Barat	53,27	10,42	4,22	-	32,90	-	-
Maluku	68,51	26,55	0,95	0,26	3,72	-	-
Maluku Utara	83,33	11,58	-	-	5,36	-	-
Papua Barat	67,77	29,02	0,15	0,08	4,20	-	-
Papua	60,61	24,54	0,35	11,16	0,93	-	3,44
Indonesia	37,50	47,76	3,61	5,53	6,61	0,28	0,45

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 116 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023

Provinsi <i>Province</i>	Rumah Sakit Pemerintah <i>Public Hospital</i>	Rumah Sakit Swasta <i>Private Hospital</i>	Praktik Bidan <i>Midwife Practice</i>	Klinik/Praktik Dokter Bersama <i>Clinic/Joint Doctor Practice</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Praktik Pengobatan Tradisional/Alternatif <i>Traditional/Alternative Treatment Practice</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	62,65	15,94	0,91	4,06	18,33	0,26	0,13
Sumatera Utara	40,36	40,14	3,90	8,66	8,13	0,46	0,04
Sumatera Barat	50,08	22,80	7,57	8,45	13,29	0,37	-
Riau	32,35	36,03	8,49	14,66	8,60	1,80	0,23
Jambi	46,63	28,80	3,67	7,57	15,71	0,94	0,24
Sumatera Selatan	37,13	37,24	9,53	13,06	6,66	0,27	1,00
Bengkulu	56,19	22,39	7,94	7,61	9,35	-	-
Lampung	21,18	38,29	8,09	25,28	10,19	0,36	0,34
Kepulauan Bangka Belitung	60,79	21,95	1,04	3,94	14,17	-	-
Kepulauan Riau	64,75	17,80	4,49	-	12,63	-	0,49
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	35,70	23,48	3,82	20,93	17,45	0,77	0,89
Jawa Tengah	31,14	41,30	2,24	9,48	17,56	0,69	0,23
DI Yogyakarta	42,39	43,08	5,55	7,90	2,77	-	-
Jawa Timur	33,09	34,92	2,99	9,38	21,48	-	0,97
Banten	48,04	12,76	7,08	15,42	12,70	2,60	2,25
Bali	50,62	41,06	1,80	4,86	2,53	-	-
Nusa Tenggara Barat	31,08	5,73	3,66	12,64	48,89	0,58	1,87
Nusa Tenggara Timur	41,65	19,09	0,05	1,18	40,83	0,29	-
Kalimantan Barat	43,65	19,10	2,60	1,85	36,14	-	0,48
Kalimantan Tengah	64,32	9,52	3,66	3,15	21,48	0,25	-
Kalimantan Selatan	64,14	14,54	2,10	4,87	14,98	-	-
Kalimantan Timur	58,52	9,40	3,11	12,11	16,96	1,26	-
Kalimantan Utara	89,43	2,21	0,95	6,14	9,67	-	-
Sulawesi Utara	44,00	40,50	0,88	4,57	11,86	-	0,06
Sulawesi Tengah	56,13	8,58	0,34	1,37	37,14	-	-
Sulawesi Selatan	49,76	14,01	1,79	2,93	33,81	0,18	0,37
Sulawesi Tenggara	55,32	13,40	0,52	1,73	29,84	0,53	0,13
Gorontalo	74,36	5,09	0,87	3,42	17,75	-	-
Sulawesi Barat	53,20	14,54	0,74	1,65	34,65	0,10	-
Maluku	62,52	5,63	0,10	1,75	27,20	4,02	-
Maluku Utara	63,52	3,57	-	2,78	32,45	-	0,32
Papua Barat	70,60	5,99	-	3,57	20,75	0,57	-
Papua	48,51	12,50	0,67	1,93	37,17	0,36	0,06
Indonesia	40,28	28,10	3,37	9,78	20,30	0,47	0,49

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 117 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023

Provinsi <i>Province</i>	Rumah Sakit Pemerintah <i>Public Hospital</i>	Rumah Sakit Swasta <i>Private Hospital</i>	Praktik Bidan <i>Midwife Practice</i>	Klinik/Praktik Dokter Bersama <i>Clinic/Joint Doctor Practice</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Praktik Pengobatan Tradisional/Alternatif <i>Traditional/Alternative Treatment Practice</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	64,51	18,79	1,18	3,92	13,36	0,16	0,08
Sumatera Utara	30,25	50,67	6,29	9,37	3,80	0,47	0,42
Sumatera Barat	50,48	28,71	8,41	5,25	8,64	0,48	0,11
Riau	29,58	48,79	6,11	9,05	7,28	0,88	0,22
Jambi	44,95	33,43	4,84	6,50	12,17	0,62	0,17
Sumatera Selatan	37,96	42,41	7,51	10,43	4,02	0,16	0,92
Bengkulu	54,66	31,35	5,34	5,54	5,78	-	-
Lampung	19,42	46,63	8,46	19,02	8,65	0,20	0,19
Kepulauan Bangka Belitung	51,85	36,78	0,43	3,21	9,23	-	-
Kepulauan Riau	29,24	62,45	2,68	1,56	3,90	0,39	0,04
DKI Jakarta	48,32	42,47	4,36	0,42	4,23	0,21	0,97
Jawa Barat	32,07	46,56	4,16	11,01	7,30	0,40	0,97
Jawa Tengah	32,96	47,55	1,62	7,10	12,54	0,66	0,10
DI Yogyakarta	32,92	59,88	2,70	3,65	1,85	-	-
Jawa Timur	34,96	41,84	3,64	7,14	13,95	0,07	0,54
Banten	27,69	52,01	4,77	7,36	7,64	0,70	0,58
Bali	40,41	51,68	3,26	3,20	2,10	-	-
Nusa Tenggara Barat	36,31	12,00	3,27	10,50	39,73	0,64	1,55
Nusa Tenggara Timur	46,03	24,81	0,03	1,00	31,09	0,20	-
Kalimantan Barat	47,99	26,32	3,46	2,85	21,41	-	0,26
Kalimantan Tengah	69,14	13,55	2,24	2,86	13,80	0,11	-
Kalimantan Selatan	62,67	22,17	2,94	4,57	8,00	-	-
Kalimantan Timur	47,47	39,03	3,16	4,70	6,13	0,46	-
Kalimantan Utara	86,66	5,08	2,29	2,88	6,20	-	0,10
Sulawesi Utara	41,83	48,80	1,01	2,51	7,62	-	0,03
Sulawesi Tengah	64,00	11,33	0,38	1,62	25,45	-	-
Sulawesi Selatan	51,45	24,24	1,27	2,28	22,85	0,25	0,46
Sulawesi Tenggara	54,62	20,45	0,98	2,02	22,66	0,29	0,07
Gorontalo	71,08	17,35	0,36	3,06	9,68	-	0,13
Sulawesi Barat	53,22	13,57	1,56	1,26	34,23	0,08	-
Maluku	66,23	18,59	0,63	0,83	12,65	1,53	-
Maluku Utara	70,77	6,50	-	1,76	22,54	-	0,20
Papua Barat	69,10	18,22	0,08	1,71	11,96	0,27	-
Papua	56,57	20,52	0,46	8,07	13,05	0,12	2,31
Indonesia	38,54	40,46	3,52	7,11	11,70	0,35	0,47

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 118 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perkotaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Provinsi Province	Jumlah Hari Rawat Inap/The Number of Inpatient Days				Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari) Average Length of Stay (Days)	
	≤3	4-6	7-29	≥30		Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	52,82	28,70	17,52	0,96	100,00	4,89
Sumatera Utara	50,61	29,60	19,17	0,62	100,00	4,63
Sumatera Barat	46,80	30,54	21,68	0,97	100,00	4,82
Riau	58,12	25,56	15,98	0,34	100,00	4,35
Jambi	53,58	27,16	19,04	0,22	100,00	4,46
Sumatera Selatan	53,10	33,44	12,85	0,62	100,00	4,48
Bengkulu	70,37	16,27	12,76	0,61	100,00	3,85
Lampung	61,74	22,02	15,17	1,07	100,00	4,12
Kepulauan Bangka Belitung	64,29	18,37	16,85	0,49	100,00	4,28
Kepulauan Riau	70,14	17,96	11,76	0,14	100,00	3,64
DKI Jakarta	46,64	28,51	22,82	2,04	100,00	5,66
Jawa Barat	53,35	27,51	18,16	0,99	100,00	4,69
Jawa Tengah	48,91	30,40	19,78	0,91	100,00	4,97
DI Yogyakarta	50,30	26,89	22,51	0,30	100,00	4,80
Jawa Timur	48,50	30,29	20,66	0,55	100,00	4,86
Banten	59,02	23,43	16,66	0,89	100,00	4,29
Bali	55,71	23,72	19,95	0,62	100,00	4,53
Nusa Tenggara Barat	61,42	22,63	15,69	0,26	100,00	4,00
Nusa Tenggara Timur	51,99	26,51	21,04	0,47	100,00	4,51
Kalimantan Barat	56,45	21,04	21,25	1,27	100,00	5,09
Kalimantan Tengah	49,07	22,28	28,06	0,59	100,00	5,24
Kalimantan Selatan	52,69	24,24	20,77	2,30	100,00	5,23
Kalimantan Timur	55,01	23,57	20,61	0,80	100,00	4,85
Kalimantan Utara	55,05	31,05	13,50	0,41	100,00	4,28
Sulawesi Utara	40,07	31,61	27,43	0,89	100,00	5,42
Sulawesi Tengah	52,79	24,49	20,97	1,75	100,00	4,83
Sulawesi Selatan	48,35	30,41	20,30	0,94	100,00	4,89
Sulawesi Tenggara	60,16	18,56	19,64	1,65	100,00	4,88
Gorontalo	46,46	30,18	23,31	0,05	100,00	4,74
Sulawesi Barat	63,62	19,37	15,09	1,92	100,00	5,42
Maluku	46,14	17,79	33,35	2,72	100,00	6,25
Maluku Utara	49,03	23,35	27,63	-	100,00	5,38
Papua Barat	63,38	24,10	11,75	0,77	100,00	3,88
Papua	59,27	16,44	23,56	0,72	100,00	4,42
Indonesia	52,20	27,60	19,32	0,89	100,00	4,77

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 119 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perdesaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Provinsi Province	Jumlah Hari Rawat Inap/The Number of Inpatient Days				Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari) Average Length of Stay (Days)	
	≤3	4-6	7-29	≥30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	59,29	26,66	13,16	0,88	100,00	4,48
Sumatera Utara	50,36	31,17	17,93	0,54	100,00	4,73
Sumatera Barat	54,77	24,75	19,28	1,21	100,00	4,80
Riau	63,50	19,85	14,59	2,05	100,00	4,70
Jambi	53,30	25,77	19,36	1,57	100,00	4,74
Sumatera Selatan	59,59	19,66	20,28	0,47	100,00	4,67
Bengkulu	68,94	17,05	12,08	1,94	100,00	4,41
Lampung	67,88	17,59	13,90	0,63	100,00	4,00
Kepulauan Bangka Belitung	65,01	19,58	14,25	1,16	100,00	4,19
Kepulauan Riau	69,38	8,68	20,98	0,96	100,00	3,56
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	64,45	22,15	13,40	-	100,00	3,72
Jawa Tengah	55,81	28,28	15,26	0,64	100,00	4,34
DI Yogyakarta	52,42	33,23	14,35	-	100,00	4,03
Jawa Timur	60,00	26,06	13,44	0,50	100,00	4,10
Banten	56,99	19,49	19,89	3,64	100,00	5,69
Bali	56,63	26,80	16,36	0,21	100,00	4,59
Nusa Tenggara Barat	72,79	14,91	11,60	0,70	100,00	3,48
Nusa Tenggara Timur	71,27	14,28	13,62	0,83	100,00	3,77
Kalimantan Barat	68,47	14,55	15,02	1,95	100,00	5,40
Kalimantan Tengah	52,53	18,25	27,85	1,37	100,00	5,24
Kalimantan Selatan	57,29	26,67	15,82	0,22	100,00	4,25
Kalimantan Timur	54,08	13,87	30,11	1,93	100,00	5,68
Kalimantan Utara	42,10	26,66	26,66	4,58	100,00	6,48
Sulawesi Utara	47,19	27,45	24,83	0,54	100,00	5,19
Sulawesi Tengah	56,68	17,73	24,33	1,26	100,00	5,02
Sulawesi Selatan	66,62	19,08	12,57	1,73	100,00	4,45
Sulawesi Tenggara	62,60	21,35	14,87	1,18	100,00	4,26
Gorontalo	55,19	25,97	18,10	0,74	100,00	4,68
Sulawesi Barat	54,20	23,26	20,76	1,78	100,00	5,13
Maluku	56,01	14,28	26,44	3,28	100,00	5,44
Maluku Utara	51,58	24,07	22,60	1,75	100,00	6,18
Papua Barat	66,23	13,05	18,39	2,33	100,00	4,57
Papua	44,88	28,47	22,29	4,36	100,00	6,25
Indonesia	60,11	23,39	15,62	0,88	100,00	4,37

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Tabel 120 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Provinsi Province	Jumlah Hari Rawat Inap/The Number of Inpatient Days				Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari) Average Length of Stay (Days)	
	≤3	4-6	7-29	≥30		Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	56,78	27,45	14,85	0,91	100,00	4,64
Sumatera Utara	50,53	30,09	18,78	0,60	100,00	4,66
Sumatera Barat	50,47	27,88	20,58	1,08	100,00	4,81
Riau	60,74	22,78	15,30	1,18	100,00	4,52
Jambi	53,39	26,23	19,25	1,12	100,00	4,64
Sumatera Selatan	56,72	25,76	16,99	0,53	100,00	4,58
Bengkulu	69,54	16,72	12,37	1,37	100,00	4,17
Lampung	65,19	19,54	14,46	0,82	100,00	4,05
Kepulauan Bangka Belitung	64,58	18,85	15,81	0,75	100,00	4,24
Kepulauan Riau	70,08	17,25	12,46	0,20	100,00	3,64
DKI Jakarta	46,64	28,51	22,82	2,04	100,00	5,66
Jawa Barat	55,57	26,43	17,21	0,79	100,00	4,50
Jawa Tengah	52,02	29,44	17,74	0,79	100,00	4,68
DI Yogyakarta	50,66	27,95	21,14	0,25	100,00	4,67
Jawa Timur	52,82	28,70	17,94	0,53	100,00	4,58
Banten	58,71	22,82	17,16	1,31	100,00	4,51
Bali	55,98	24,61	18,91	0,50	100,00	4,54
Nusa Tenggara Barat	67,40	18,57	13,54	0,49	100,00	3,73
Nusa Tenggara Timur	65,46	17,97	15,86	0,72	100,00	3,99
Kalimantan Barat	62,85	17,59	17,93	1,63	100,00	5,26
Kalimantan Tengah	50,69	20,40	27,96	0,96	100,00	5,24
Kalimantan Selatan	54,63	25,26	18,69	1,42	100,00	4,82
Kalimantan Timur	54,78	21,08	23,05	1,09	100,00	5,06
Kalimantan Utara	50,93	29,66	17,68	1,73	100,00	4,98
Sulawesi Utara	43,18	29,80	26,29	0,74	100,00	5,32
Sulawesi Tengah	54,87	20,88	22,76	1,49	100,00	4,93
Sulawesi Selatan	57,50	24,74	16,43	1,33	100,00	4,67
Sulawesi Tenggara	61,48	20,08	17,05	1,39	100,00	4,54
Gorontalo	50,08	28,43	21,15	0,34	100,00	4,71
Sulawesi Barat	56,42	22,34	19,43	1,81	100,00	5,19
Maluku	49,90	16,45	30,72	2,93	100,00	5,94
Maluku Utara	50,65	23,81	24,44	1,11	100,00	5,89
Papua Barat	64,72	18,92	14,86	1,50	100,00	4,20
Papua	54,46	20,46	23,14	1,94	100,00	5,03
Indonesia	55,13	26,03	17,95	0,88	100,00	4,62

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

5.6.4 Jaminan Kesehatan

Target 3.8 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. Cakupan kesehatan universal adalah suatu kondisi yang memastikan semua masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan ekonomi. Upaya Pemerintah dalam mencapai cakupan kesehatan universal adalah dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014. JKN diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan kepesertaan terhadap jaminan kesehatan dengan tujuan untuk meringankan pembiayaan kesehatan ketika berobat. Penelitian di Cina menunjukkan dengan memiliki jaminan kesehatan, maka akses terhadap layanan kesehatan cenderung meningkat (Qian, Pong, Yin, Nagarajan, & Meng, 2009). Sejalan dengan itu, jaminan kesehatan meringankan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan sendiri cenderung menjadi lebih kecil, sehingga pengeluaran kesehatan yang besar tidak mengganggu kesejahteraan rumah tangga (Agustina et al., 2019).

Pemerataan kepesertaan jaminan kesehatan yang diikuti dengan sistem pelayanan kesehatan yang merata diharapkan dapat mempercepat perwujudan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai badan yang mengurus dan menyelenggarakan jaminan dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan medis, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif diharapkan dapat dirasakan secara merata. Gambar 50 menunjukkan jika pada tahun 2022, persentase penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan adalah sebesar 69,62 persen. Persentase tersebut sedikit mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, persentase kepemilikan jaminan kesehatan sempat mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan tersebut kemungkinan adalah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga berdampak pada pengurangan kepesertaan jaminan kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri yang terjadi pada Juli 2021, di masa-masa pandemi COVID-19 terbukti berpengaruh terhadap penurunan kepesertaan BPJS Kesehatan

Kepemilikan jaminan kesehatan yang merata merupakan upaya perluasan jangkauan akses layanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk melihat hal tersebut, kepemilikan jaminan kesehatan dapat dilihat melalui berbagai disagregasi. Gambar 47 menunjukkan jika persentase kepemilikan jaminan kesehatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Gambar 47 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Pola yang menarik terlihat dari kepemilikan jaminan kesehatan menurut status ekonomi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Gambar 50). Sebanyak 80,79 persen penduduk yang ada di kuintil 5 telah memiliki jaminan kesehatan, akan tetapi baru sekitar 60,52 persen dari penduduk yang ada pada kuintil 1 memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepemilikan jaminan kesehatan semakin tinggi seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi (Gambar 47).

Gap persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada penduduk dengan pendidikan tamat perguruan tinggi dengan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD terlihat cukup tinggi, yaitu sekitar 25 persen poin. Pendidikan berhubungan dengan pengetahuan dan akses informasi kesehatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pada wanita hamil dan penduduk secara umum, kepemilikan jaminan kesehatan cenderung lebih tinggi pada individu dengan status pendidikan yang lebih tinggi. Status ekonomi dan pendidikan yang rendah juga erat kaitannya dengan sektor pekerjaan informal, yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Status ekonomi pada pekerja sektor informal yang cenderung tidak stabil mengakibatkan mereka kesulitan untuk membayar tagihan jaminan kesehatan secara reguler, sementara pendidikan juga berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai keuntungan kepesertaan jaminan kesehatan

Gambar 48 selanjutnya menunjukkan kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia menurut jenis jaminan kesehatan. Terlihat jika BPJS Kesehatan merupakan jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Persentase penduduk Indonesia yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 40,37 persen, sedangkan yang memiliki BPJS Kesehatan non-PBI sebesar 21,85 persen. BPJS Kesehatan PBI lebih banyak dimiliki oleh penduduk di daerah perdesaan, sebaliknya untuk BPJS Kesehatan non-PBI persentasenya dua kali lebih tinggi pada penduduk di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan

Gambar 48 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

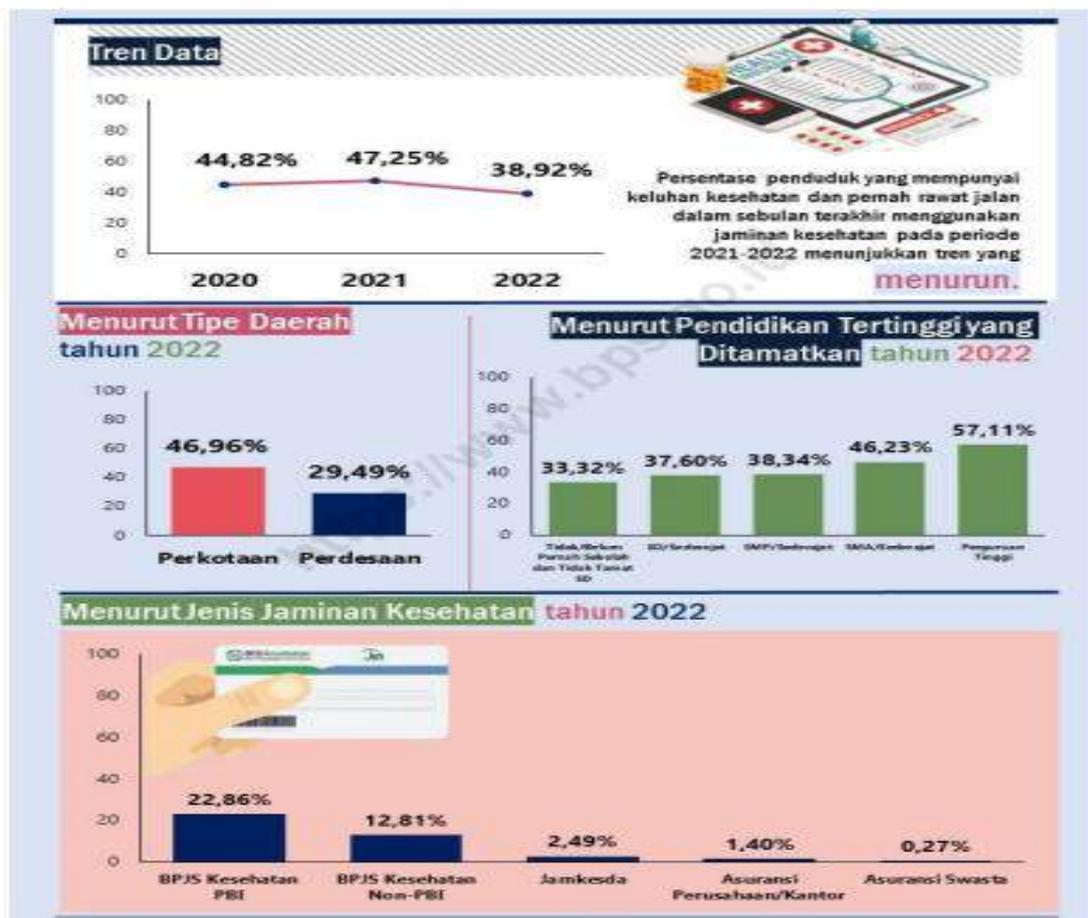
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan jenis jaminan kesehatan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa jenis Jamkesda telah melebur dengan BPJS Kesehatan. Namun demikian, masih ada Jamkesda yang berdiri sendiri sebagai jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan untuk penduduk pada wilayah tertentu. Selain jaminan kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 2,81 persen penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi dari perusahaan/kantor, dan 0,58 persen yang memiliki asuransi swasta. Kepemilikan kedua jenis jaminan kesehatan tersebut lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Selanjutnya menurut pendidikan yang ditamatkan dan status ekonomi, persentase tertinggi kepemilikan kedua jenis jaminan kesehatan tersebut ada pada penduduk dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, serta pada penduduk yang tinggal pada rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi.

Dengan kepemilikan jaminan kesehatan, diharapkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan terjangkau dari segi biaya. Hal tersebut dikarenakan jaminan kesehatan dapat digunakan untuk mencari upaya kesehatan baik melalui rawat jalan maupun rawat inap. Dalam menggunakan JKN, layanan rawat jalan dapat diperoleh di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dipilih atau fasilitas kesehatan lain

yang bekerja sama sesuai dengan sistem rujukan (BPJS Kesehatan, 2020).

Sekitar empat dari sepuluh penduduk Indonesia yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan. Terlihat jika penduduk di daerah perkotaan yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan ketika rawat jalan dibandingkan dengan penduduk di perdesaan. Hal tersebut sejalan dengan kepemilikan jaminan kesehatan yang juga lebih banyak di daerah perkotaan.

Gambar 49 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022



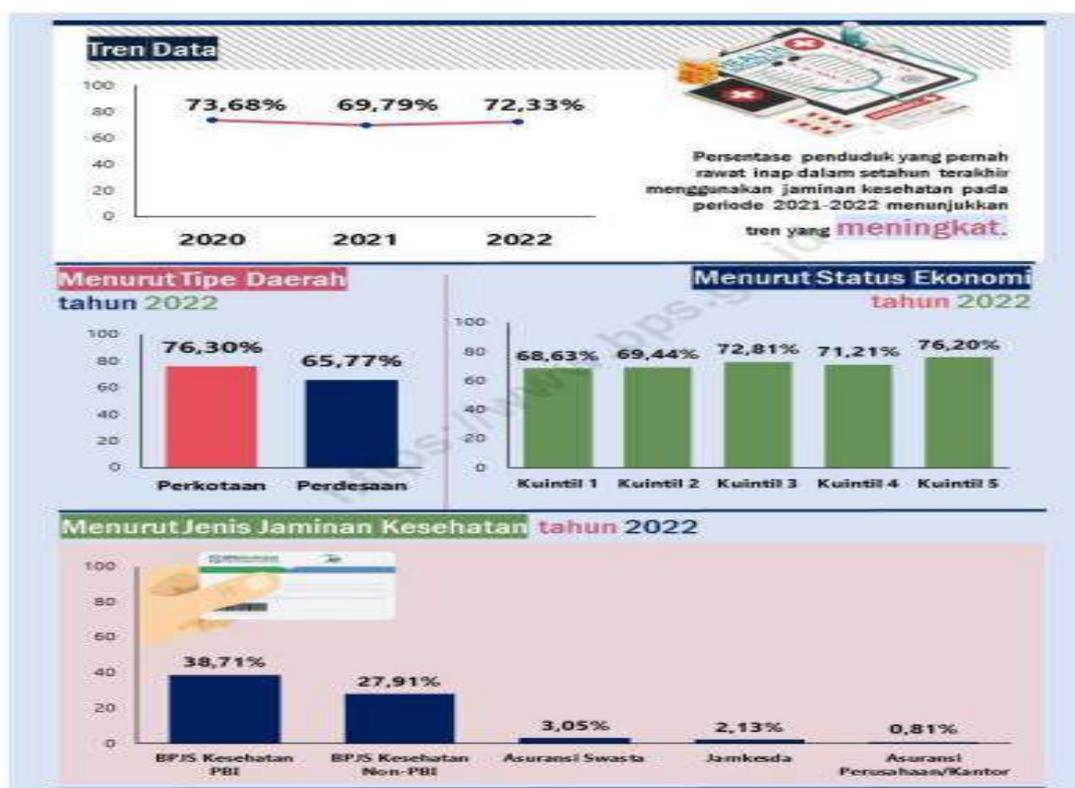
Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Kemudian, disagregasi menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan jika persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir menggunakan jaminan

kesehatan menunjukkan nilai yang semakin tinggi seiring dengan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, menurut jenis jaminan kesehatan terlihat jika BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan dalam sebulan terakhir. Pemanfaatan BPJS kesehatan PBI sebesar 22,86 persen sementara BPJS kesehatan non-PBI sebesar 12,81 persen

Lebih dari 70 persen penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat. Baik untuk rawat jalan maupun rawat inap, pemanfaatan jaminan kesehatan lebih banyak dilakukan oleh penduduk di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan tertinggi ada pada penduduk dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5). Sementara itu, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan untuk rawat inap adalah BPJS Kesehatan PBI (38,71 persen) dan BPJS Kesehatan non-PBI (27,91 persen)

Gambar 50 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Dari tabel 121 terlihat sebesar 51,38 persen penduduk di Provinsi Sumatera Barat menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, 64,74 persen di daerah perkotaan dan 37,42 persen di daerah perdesaan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki dalam penggunaan jaminan kesehatan lebih sedikit (49,42%) dibanding perempuan (52,88%). Hal yang sama juga berlaku untuk daerah perkotaan dan perdesaan jika dilihat menurut jenis kelamin, pengguna jaminan kesehatan laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Daerah perkotaan, laki-laki menggunakan jaminan kesehatan sebesar 63,28 persen sedangkan perempuan sebesar 65,85 persen. Di daerah perdesaan, laki-laki menggunakan jaminan kesehatan sebesar 34,83 persen sedangkan perempuan sebesar 39,39 persen.

Penduduk Sumatera Barat yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, terlihat lebih banyak di perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih sering mengalami keluhan kesehatan dan memanfaatkan fasilitas

Dilihat dari komposisi jaminan kesehatan yang dimiliki, BPJS kesehatan menduduki posisi terbesar disusul dengan Jamkesda masing masing 64,24 persen dan 9,53 persen. Kedua asuransi tersebut dikelola pemerintah. Asuransi yang dikelola oleh swasta berjumlah kurang dari dua persen. Sisanya 29,48 persen, tidak berasuransi. Mungkin ini lah yang jadi fokus pemerintah, masyarakat tidak berasuransi. Di perdesaan jumlahnya mencapai 32,94 persen sementara di perkotaan lebih sedikit hanya 24,27

Tabel 121 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	63,28	65,85	64,74
Perdesaan	34,83	39,39	37,42
Perkotaan + Perdesaan	49,42	52,88	51,38

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 122 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tempat Berobat	Daerah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS	72,37	60,51	66,45
Jamkesda	6,91	14,62	10,76
Asuransi Swasta	0,28	0,09	0,19
Perusahaan/ Kantor	1,54	0,37	0,95
Tidak Punya	24,01	31,28	27,64

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Ada banyak jenis jaminan kesehatan yang beredar di masyarakat seperti BPJS, Jamkesda, asuransi swasta ataupun perusahaan/kantor. Tabel 122 menyajikan persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan menurut daerah tempat tinggalnya. Ternyata, sebanyak 27,64 persen penduduk Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.

Dari tabel 122 juga dapat dilihat jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan yaitu BPJS sebesar 66,45 persen. Dilihat menurut tempat tinggal pemilik BPJS, terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Sebanyak 72,37 persen penduduk menggunakan BPJS di perkotaan sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 60,51 persen

Tabel 123 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Tabel Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	61,79	63,52	62,60
Kab. Pesisir Selatan	36,24	34,03	35,00
Kab. Solok	52,66	46,25	49,26
Kab. Sijunjung	37,13	42,99	40,58
Kab. Tanah Datar	45,96	46,90	46,50
Kab. Padang Pariaman	23,81	35,69	30,77
Kab. Agam	57,28	59,15	58,31
Kab. Lima Puluh Kota	32,84	30,50	31,50
Kab. Pasaman	62,44	60,00	60,84
Kab. Solok Selatan	29,50	45,60	39,02
Kab. Dharmasraya	36,80	37,59	37,25
Kab. Pasaman Barat	25,87	36,62	30,99
Kota Padang	77,04	75,06	75,87
Kota Solok	60,03	67,84	65,07
Kota Sawahlunto	67,40	70,93	69,37
Kota Padang Panjang	80,10	97,75	88,97
Kota Bukittinggi	67,07	71,50	69,69
Kota Payakumbuh	66,42	77,35	72,73
Kota Pariaman	72,58	84,91	79,78
Sumatera Barat	49,42	52,88	51,38

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 124 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	BPJS Kesehatan BPJS Health Insurance	Jamkesda Regional Health Insurance	Asuransi Swasta Private Health Insurance	Perusahaan/Kantor Company/Office Insurance	Tidak Punya None
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	53,53	16,94	0,09	0,78	30,56
Kab. Pesisir Selatan	58,15	53,71	0,01	0,09	3,39
Kab. Solok	49,44	-	-	0,42	50,15
Kab. Sijunjung	60,58	-	0,52	0,27	38,84
Kab. Tanah Datar	70,03	NA	-	0,51	29,24
Kab. Padang Pariaman	57,19	-	-	0,70	42,15
Kab. Agam	64,35	-	0,04	0,20	35,41
Kab. Lima Puluh Kota	52,54	NA	0,29	0,67	46,47
Kab. Pasaman	76,44	85,68	0,99	0,05	2,55
Kab. Solok Selatan	68,13	1,81	0,06	0,20	29,80
Kab. Dharmasraya	59,82	-	-	0,28	40,10
Kab. Pasaman Barat	63,44	NA	-	2,22	35,10
Kota Padang	78,94	NA	0,37	2,31	18,52
Kota Solok	93,48	45,03	0,02	0,36	3,24
Kota Sawahlunto	88,42	NA	0,15	4,12	7,30
Kota Padang Panjang	90,28	2,11	0,07	1,26	6,49
Kota Bukittinggi	76,00	34,54	0,27	1,22	11,67
Kota Payakumbuh	80,56	-	0,40	0,84	18,59
Kota Pariaman	85,64	NA	-	0,80	13,55
Sumatera Barat	66,45	10,76	0,19	0,95	27,64

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 125 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki + Perempuan Male + Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Kepulauan Mentawai	20,67	72,95	57,15
Kab. Pesisir Selatan	65,48	73,44	71,09
Kab. Solok	66,91	59,84	62,67
Kab. Sijunjung	71,23	81,91	77,78
Kab. Tanah Datar	90,55	76,02	82,32
Kab. Padang Pariaman	85,45	66,16	70,28
Kab. Agam	85,89	81,54	82,70
Kab. Lima Puluh Kota	47,13	73,63	64,13
Kab. Pasaman	73,26	94,73	89,65
Kab. Solok Selatan	73,04	76,20	75,15
Kab. Dharmasraya	83,78	61,70	70,44
Kab. Pasaman Barat	81,26	78,83	79,29
Kota Padang	96,76	96,38	96,53
Kota Solok	84,12	92,57	88,93
Kota Sawahlunto	98,01	89,73	92,51
Kota Padang Panjang	91,52	86,91	88,67
Kota Bukittinggi	91,32	79,94	81,99
Kota Payakumbuh	89,85	77,97	81,66
Kota Pariaman	81,02	92,38	89,53
Sumatera Barat	80,84	79,85	80,18

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 126 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban			Perdesaan/Rural			Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-laki+Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	39,53	43,38	41,58	45,49	49,98	47,91	43,51	47,82	45,83
Sumatera Utara	36,93	35,77	36,32	30,48	29,67	30,06	33,72	32,80	33,24
Sumatera Barat	43,18	46,82	45,17	42,94	46,93	45,12	43,06	46,88	45,15
Riau	33,91	37,18	35,71	22,42	24,53	23,51	26,99	29,99	28,59
Jambi	30,69	34,03	32,40	27,43	26,35	26,88	28,51	28,88	28,70
Sumatera Selatan	31,00	30,78	30,89	21,88	26,05	24,01	25,61	28,03	26,86
Bengkulu	30,66	31,43	31,05	27,57	29,86	28,76	28,65	30,40	29,56
Lampung	35,45	39,59	37,64	31,82	32,70	32,26	32,91	34,91	33,94
Kepulauan Bangka Belitung	33,81	33,25	33,51	33,60	37,18	35,48	33,72	34,88	34,33
Kepulauan Riau	28,56	29,32	28,97	23,01	31,70	27,89	28,09	29,54	28,87
DKI Jakarta	40,55	42,29	41,49	-	-	-	40,55	42,29	41,49
Jawa Barat	39,60	42,02	40,86	30,89	33,30	32,14	37,53	39,96	38,80
Jawa Tengah	34,72	39,89	37,52	34,83	36,72	35,85	34,77	38,43	36,75
DI Yogyakarta	37,04	40,43	38,88	46,36	45,92	46,13	39,45	41,80	40,72
Jawa Timur	34,75	36,65	35,77	32,86	36,12	34,60	33,92	36,41	35,26
Banten	31,22	32,65	31,97	23,17	25,82	24,53	29,18	30,98	30,13
Bali	52,69	48,84	50,70	57,90	58,42	58,17	54,35	51,90	53,08
Nusa Tenggara Barat	38,61	40,17	39,45	42,63	44,90	43,84	40,55	42,43	41,56
Nusa Tenggara Timur	27,11	27,39	27,25	29,60	32,22	30,99	28,96	31,03	30,05
Kalimantan Barat	26,79	33,45	30,31	21,61	24,99	23,34	23,49	28,19	25,93
Kalimantan Tengah	17,72	18,93	18,35	19,95	20,17	20,06	18,95	19,60	19,28
Kalimantan Selatan	22,71	26,00	24,47	18,18	23,91	21,17	20,22	24,88	22,68
Kalimantan Timur	33,34	37,31	35,42	26,90	30,44	28,61	31,31	35,37	33,39
Kalimantan Utara	27,34	28,81	28,06	25,70	31,93	28,79	26,73	29,99	28,34
Sulawesi Utara	38,38	36,97	37,64	38,41	39,27	38,85	38,40	37,97	38,18
Sulawesi Tengah	21,90	20,70	21,25	22,77	29,02	25,93	22,46	25,84	24,21
Sulawesi Selatan	32,09	34,30	33,27	28,71	31,41	30,23	30,29	32,68	31,60
Sulawesi Tenggara	22,36	29,26	26,21	21,58	25,21	23,54	21,86	26,73	24,53
Gorontalo	31,73	36,87	34,49	28,32	28,15	28,23	29,93	32,45	31,26
Sulawesi Barat	32,36	38,55	35,56	25,60	26,85	26,28	26,97	29,04	28,08
Maluku	26,36	27,42	26,93	23,86	30,32	27,21	24,98	28,95	27,08
Maluku Utara	29,53	35,81	33,01	27,56	30,23	28,98	28,03	31,66	29,99
Papua Barat	30,26	30,38	30,33	46,98	46,31	46,65	39,67	38,74	39,20
Papua	32,59	36,13	34,31	33,98	36,28	35,06	33,39	36,21	34,74
Indonesia	35,77	38,12	37,02	31,31	33,91	32,68	33,85	36,32	35,16

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

5.7 PERILAKU MEROKOK ANAK

Merokok merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan penyakit tidak menular lainnya. Salah satu target dalam TPB adalah pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah indikator terkait perilaku merokok. Perilaku merokok pada anak perlu menjadi perhatian, mengingat efek buruk yang ditimbulkan akibat merokok.

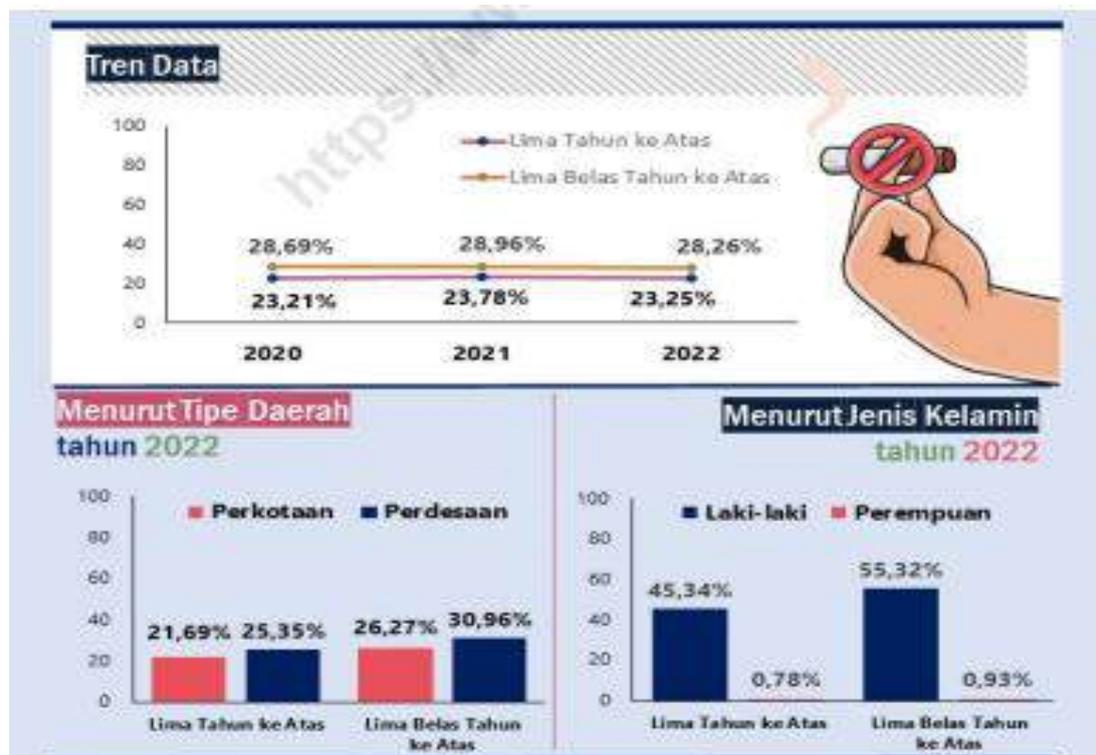
Penyakit tidak menular merupakan ancaman baru bagi kesehatan penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Institute for Health Metrics and Evaluation menunjukkan jika lebih dari 70 persen kematian secara global pada tahun 2019 disebabkan oleh penyakit tidak menular yang biasanya berupa penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular (termasuk stroke), kanker, diabetes, dll. Penyakit kardiovaskular utamanya, merupakan penyebab kematian tertinggi pada penduduk usia produktif dan lansia (Ritchie, Spooner, & Roser, 2019). Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk penyakit kardiovaskular. WHO (2019b) menyebutkan jika perokok memiliki risiko terkena stroke dua kali lebih tinggi dan risiko terkena penyakit jantung empat kali lebih tinggi. Rokok tembakau yang dihisap berbahaya karena mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, termasuk setidaknya 250 bahan kimia beracun yang juga dapat menyebabkan kanker (WHO, 2019). Di samping itu, rokok juga memiliki zat adiktif yang menyebabkan seseorang ketergantungan sehingga sulit untuk berhenti. Merokok pada usia dini semakin meningkatkan bahaya merokok. Penelitian menunjukkan jika semakin muda seseorang memulai merokok, kecenderungan untuk menjadi perokok rutin ketika menjadi dewasa juga akan semakin tinggi (Zhu, et al., 1996).

Mengingat tingginya bahaya merokok bagi kesehatan, pemerintah Indonesia terus mengupayakan berbagai program untuk menurunkan prevalensi merokok. Beberapa peraturan yang telah dibuat untuk mengurangi penggunaan rokok di masyarakat di antaranya adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang telah menghimbau mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pengemasan dan pelabelan, pembatasan iklan produk rokok, serta sponsor tembakau dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau yang diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur pencantuman label peringatan kesehatan yang harus menutupi 40 persen kemasan rokok.

Gambar 51 menunjukkan tren dan karakteristik perokok di Indonesia. Tren persentase penduduk yang merokok dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Sekitar 28 dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia merokok dalam sebulan terakhir pada tahun 2022. Perokok tersebut terdiri dari baik perokok setiap hari maupun perokok kadang-kadang. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam SDGs Tujuan 3, yaitu Indikator 3.a.1* persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

Gambar 51 Persentase Penduduk yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2022



Sumber: BPS, Profil Ibu dan Anak 2022

Menurut karakteristik, terlihat jika penduduk di daerah perdesaan memiliki persentase penduduk yang merokok selama sebulan terakhir lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Sementara menurut jenis kelamin, persentase perokok laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 127 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2022-2023

Provinsi	Umur 5 Tahun ke Atas		Umur 15 Tahun ke Atas	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,04	0,95	3,81	1,18
Sumatera Utara	2,52	1,17	3,16	1,44
Sumatera Barat	1,14	0,74	1,41	0,91
Riau	3,42	1,24	4,29	1,56
Jambi	3,39	1,23	4,19	1,47
Sumatera Selatan	3,15	1,26	3,89	1,53
Bengkulu	3,25	0,42	3,99	0,50
Lampung	3,08	1,00	3,79	1,19
Kep. Bangka Belitung	3,32	0,53	4,04	0,65
Kep. Riau	3,33	1,65	4,22	2,02
DKI Jakarta	3,47	1,83	4,13	2,18
Jawa Barat	3,56	1,58	4,29	1,90
Jawa Tengah	2,90	1,07	3,43	1,26
DI Yogyakarta	2,45	1,79	2,85	2,08
Jawa Timur	3,50	1,41	4,10	1,62
Banten	3,46	1,14	4,24	1,39
Bali	2,24	2,63	2,64	3,10
Nusa Tenggara Barat	2,55	1,44	3,18	1,73
Nusa Tenggara Timur	2,02	0,95	2,58	1,19
Kalimantan Barat	3,26	0,68	4,01	0,83
Kalimantan Tengah	2,19	1,15	2,70	1,40
Kalimantan Selatan	3,28	1,19	4,05	1,46
Kalimantan Timur	3,27	1,69	4,02	2,06
Kalimantan Utara	2,41	1,13	2,99	1,39
Sulawesi Utara	3,67	1,29	4,39	1,55
Sulawesi Tengah	2,63	1,10	3,23	1,34
Sulawesi Selatan	3,17	0,92	3,84	1,10
Sulawesi Tenggara	0,43	0,83	0,55	1,05
Gorontalo	2,35	0,86	2,86	1,05
Sulawesi Barat	3,26	1,09	4,11	1,37
Maluku	2,71	1,13	3,39	1,42
Maluku Utara	3,40	0,91	4,28	1,10
Papua Barat	2,87	1,08	3,60	1,34
Papua	1,94	1,18	2,49	1,46
Indonesia	3,09	1,29	3,74	1,55

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Tabel 127 menunjukkan bahwa 0,91 persen penduduk umur 15 tahun keatas yang merokok dengan rokok elektrik pada tahun 2023, sedangkan untuk usia 5 tahun keatas sebesar 0,74 persen. Mayoritas anak pada usia 15 tahun keatas tersebut termasuk ke dalam usia sekolah, dimana penelitian di Cina menyebutkan jika perokok di usia pelajar memiliki hubungan positif dengan pendidikan dan status pekerjaan orang tua, orang tua perokok, serta kebiasaan orang tua yang meminta anak untuk membelikan rokok (Zhu et al., 1996). Selain rokok tembakau, penggunaan rokok elektrik juga perlu menjadi perhatian karena penggunaannya yang semakin banyak di masyarakat. Hasil dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) menunjukkan jika terjadi peningkatan pengguna rokok elektrik sekitar 3,00 persen poin sejak tahun 2011 ke tahun 2021 (Kementerian Kesehatan, WHO, & CDC, 2021).

Tabel 128 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2022-2023

Karakteristik	Umur 5 Tahun ke Atas		Umur 15 Tahun ke Atas	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	3,17	1,44	3,82	1,72
Perdesaan	2,99	1,09	3,64	1,31
Jenis Kelamin				
Laki-laki	5,97	2,46	7,27	2,97
Perempuan	0,16	0,13	0,19	0,14
Kelompok Umur				
5-17 tahun	0,25	0,17	0,77	0,44
18-59 tahun	4,16	1,76	4,16	1,76
60+ tahun	2,77	0,95	2,77	0,95
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	1,37	0,46	3,22	1,00
SD/Sederajat	3,37	1,08	3,88	1,22
SMP/Sederajat	3,61	1,45	3,62	1,46
SMA/Sederajat	4,19	2,04	4,19	2,04
Perguruan Tinggi	3,03	1,76	3,03	1,76
Status Ekonomi				
Kuintil 1	2,56	1,03	3,21	1,29
Kuintil 2	2,79	1,08	3,48	1,32
Kuintil 3	3,22	1,32	3,93	1,59
Kuintil 4	3,42	1,34	4,08	1,57
Kuintil 5	3,44	1,69	3,96	1,92
Indonesia	3,09	1,29	3,74	1,55

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Sejak tahun 2023, Susenas Maret juga mengumpulkan penggunaan rokok elektrik selama sebulan terakhir. Sebanyak 1,55 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir pada tahun 2023. Berbeda dengan penggunaan rokok hisap tembakau yang persentasenya lebih tinggi di daerah perdesaan, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik sedikit lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan

Tabel 129 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	28,30	27,58	28,66
Sumatera Utara	27,24	25,32	26,28
Sumatera Barat	30,50	30,27	30,42
R i a u	28,34	26,86	27,76
J a m b i	27,47	28,62	28,67
Sumatera Selatan	30,65	30,49	30,91
Bengkulu	33,17	32,16	31,86
Lampung	34,07	33,81	34,08
Kep. Bangka Belitung	28,16	26,84	27,33
Kep. Riau	26,17	23,08	25,49
DKI Jakarta	24,44	21,25	22,60
Jawa Barat	32,68	32,07	32,78
Jawa Tengah	28,24	28,72	28,55
DI Yogyakarta	24,54	23,97	24,82
Jawa Timur	28,53	28,51	28,83
Banten	31,76	31,21	29,34
B a l i	19,58	17,91	18,90
Nusa Tenggara Barat	32,71	33,20	32,79
Nusa Tenggara Timur	27,22	26,76	26,64
Kalimantan Barat	27,93	26,64	26,96
Kalimantan Tengah	29,33	26,54	27,24
Kalimantan Selatan	24,51	21,89	22,24
Kalimantan Timur	23,37	22,21	22,97
Kalimantan Utara	27,46	24,23	25,36
Sulawesi Utara	27,87	25,29	26,96
Sulawesi Tengah	29,77	29,04	28,28
Sulawesi Selatan	24,91	23,76	24,24
Sulawesi Tenggara	25,85	23,35	24,66
Gorontalo	30,50	30,38	30,69
Sulawesi Barat	27,17	25,36	25,30
Maluku	27,90	26,80	28,04
Maluku Utara	29,84	28,82	28,82
Papua Barat	27,07	24,80	25,30
Papua	24,91	22,22	22,30
Indonesia	28,96	28,26	28,62

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Tabel 130 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2021-2023

Karakteristik	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	27,47	26,27	26,87
Perdesaan	30,97	30,96	31,09
Jenis Kelamin			
Laki-laki	57,08	55,32	56,36
Perempuan	0,91	0,93	1,06
Kelompok Umur			
5-17 tahun	5,93	5,61	5,62
18-59 tahun	31,76	30,96	31,53
60+ tahun	24,19	23,44	23,91
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	27,86	27,66	27,35
SD/Sederajat	32,41	31,74	31,59
SMP/Sederajat	27,65	27,27	27,78
SMA/Sederajat	30,80	29,63	30,35
Perguruan Tinggi	19,06	18,61	19,66
Status Ekonomi			
Kuintil 1	27,25	27,27	27,47
Kuintil 2	29,98	29,29	29,74
Kuintil 3	30,44	29,98	30,13
Kuintil 4	30,55	29,58	30,02
Kuintil 5	26,68	25,34	25,86
Indonesia	28,96	28,26	28,62

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Rata-rata jumlah rokok yang dihisap oleh penduduk berusia 15 tahun keatas di Sumatera Barat per hari sebanyak 15 batang, sama dalam tiga terakhir.

Fenomena merokok pada anak-anak di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak. Merokok yang memberi dampak negatif bagi kesehatan dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama baik dari keluarga, lingkungan dan pemerintah untuk menekan perilaku merokok pada anak-anak di Indonesia.

Rokok dengan segala keburukannya telah mencoreng menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, bahkan mencoreng hak mereka untuk hidup. Untuk itu perlu adanya upaya masif dari

seluruh elemen masyarakat tidak hanya pemerintah dalam mengendalikan rokok dan juga narkoba di kalangan anak-anak.

Tabel 131 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Batang), 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14	13	13
Sumatera Utara	13	13	14
Sumatera Barat	15	15	15
R i a u	17	17	18
J a m b i	16	17	18
Sumatera Selatan	13	13	14
Bengkulu	14	14	15
Lampung	12	12	13
Kep. Bangka Belitung	15	17	16
Kep. Riau	16	16	16
DKI Jakarta	10	10	10
Jawa Barat	10	10	11
Jawa Tengah	10	10	10
DI Yogyakarta	9	9	9
Jawa Timur	11	11	11
Banten	11	13	13
B a l i	11	11	12
Nusa Tenggara Barat	11	10	12
Nusa Tenggara Timur	7	8	9
Kalimantan Barat	16	16	16
Kalimantan Tengah	16	16	16
Kalimantan Selatan	16	16	16
Kalimantan Timur	15	16	16
Kalimantan Utara	15	15	15
Sulawesi Utara	11	11	12
Sulawesi Tengah	15	14	15
Sulawesi Selatan	14	14	15
Sulawesi Tenggara	14	15	15
Gorontalo	11	11	12
Sulawesi Barat	16	17	18
Maluku	8	8	8
Maluku Utara	11	11	11
Papua Barat	11	11	11
Papua	9	9	9
Indonesia	12	12	12

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Tabel 132 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik (Batang), 2021-2023

Karakteristik	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	11	11	11
Perdesaan	12	13	13
Jenis Kelamin			
Laki-laki	12	12	12
Perempuan	8	10	10
Kelompok Umur			
5-17 tahun	8	8	8
18-59 tahun	12	12	12
60+ tahun	10	10	11
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	11	12	12
SD/Sederajat	12	12	13
SMP/Sederajat	11	12	12
SMA/Sederajat	11	12	12
Perguruan Tinggi	12	12	12
Status Ekonomi			
Kuintil 1	9	9	10
Kuintil 2	11	11	12
Kuintil 3	12	12	12
Kuintil 4	12	13	13
Kuintil 5	13	13	14
Indonesia	12	12	12

Sumber: BPS, Profil Statistik Kesehatan, 2023

Tabel 133 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau dan Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Kebiasaan Merokok di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Merokok Tembakau/ <i>Smoked Tobacco</i>				
	Ya, Setiap Hari <i>Yes, Every Day</i>	Ya, Tidak Setiap Hari <i>Yes, Not Every Day</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak Tahu <i>Not Known</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	23,54	2,08	72,63	1,75	100,00
Kab. Pesisir Selatan	24,16	0,91	74,58	0,36	100,00
Kab. Solok	24,97	1,21	71,93	1,88	100,00
Kab. Sijunjung	24,90	1,26	73,72	0,12	100,00
Kab. Tanah Datar	21,29	0,93	76,90	0,88	100,00
Kab. Padang Pariaman	23,19	1,03	75,46	0,33	100,00
Kab. Agam	19,53	2,03	77,98	0,47	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	26,48	1,15	72,31	0,06	100,00
Kab. Pasaman	26,24	0,43	72,90	0,42	100,00
Kab. Solok Selatan	27,29	0,92	71,01	0,77	100,00
Kab. Dharmasraya	26,61	0,91	72,48	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	21,82	1,95	76,02	0,21	100,00
Kota Padang	20,08	2,55	77,16	0,21	100,00
Kota Solok	21,71	0,93	77,16	0,20	100,00
Kota Sawahlunto	24,59	1,02	73,95	0,44	100,00
Kota Padang Panjang	18,98	1,44	79,58	-	100,00
Kota Bukittinggi	19,02	1,98	78,69	0,32	100,00
Kota Payakumbuh	23,05	0,97	75,59	0,39	100,00
Kota Pariaman	20,10	1,88	77,75	0,27	100,00
Sumatera Barat	22,84	1,50	75,22	0,45	100,00

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Merokok Menggunakan Rokok Elektrik/Smoked Using Electric Cigarettes				
	Ya, Setiap Hari Yes, Every Day	Ya, Tidak Setiap Hari Yes, Not Every Day	Tidak No	Tidak Tahu Not Known	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kab. Kepulauan Mentawai	-	0,08	98,43	1,49	100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,03	0,41	99,11	0,45	100,00
Kab. Solok	-	0,32	97,31	2,36	100,00
Kab. Sijunjung	-	-	97,23	2,77	100,00
Kab. Tanah Datar	0,47	0,08	99,44	0,02	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,04	0,11	98,82	1,03	100,00
Kab. Agam	-	0,88	99,00	0,12	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	-	0,05	99,92	0,03	100,00
Kab. Pasaman	1,28	0,08	97,55	1,09	100,00
Kab. Solok Selatan	0,07	0,34	98,94	0,65	100,00
Kab. Dharmasraya	0,12	0,28	99,60	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,29	1,04	98,61	0,07	100,00
Kota Padang	0,77	0,69	98,54	-	100,00
Kota Solok	-	0,35	99,46	0,19	100,00
Kota Sawahlunto	0,34	0,30	98,13	1,23	100,00
Kota Padang Panjang	0,23	0,20	99,33	0,24	100,00
Kota Bukittinggi	1,77	0,41	97,51	0,31	100,00
Kota Payakumbuh	-	0,26	99,30	0,43	100,00
Kota Pariaman	0,13	0,38	99,35	0,14	100,00
Sumatera Barat	0,32	0,42	98,70	0,56	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 134 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu The Number of Cigarettes Smoked per Week					Jumlah Total	Rata-Rata per Minggu (Batang Rokok) Average per Week (Cigarettes)
	1-6	7-14	15-29	30-59	≥ 60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,72	1,15	6,94	4,59	86,60	100,00	121,16
Kab. Pesisir Selatan	0,14	1,36	1,47	11,52	85,51	100,00	115,53
Kab. Solok	0,37	2,22	1,43	9,23	86,76	100,00	118,54
Kab. Sijunjung	0,75	2,11	2,39	5,36	89,39	100,00	125,46
Kab. Tanah Datar	0,09	1,06	2,89	11,96	84,01	100,00	98,72
Kab. Padang Pariaman	0,20	3,02	3,54	15,98	77,26	100,00	97,41
Kab. Agam	1,23	3,55	6,27	16,66	72,29	100,00	91,15
Kab. Lima Puluh Kota	0,62	1,32	2,64	7,00	88,41	100,00	147,22
Kab. Pasaman	-	0,74	4,43	9,11	85,72	100,00	116,47
Kab. Solok Selatan	0,04	0,96	1,82	6,98	90,20	100,00	129,69
Kab. Dharmasraya	0,42	0,56	5,00	8,92	85,10	100,00	112,28
Kab. Pasaman Barat	0,01	1,73	4,34	9,17	84,75	100,00	115,65
Kota Padang	0,86	4,64	8,44	24,63	61,43	100,00	82,92
Kota Solok	0,32	3,63	4,77	15,23	76,04	100,00	97,25
Kota Sawahlunto	0,43	1,85	5,11	15,32	77,29	100,00	126,99
Kota Padang Panjang	1,60	2,40	4,07	19,57	72,36	100,00	86,59
Kota Bukittinggi	0,72	6,00	11,13	13,83	68,31	100,00	83,25
Kota Payakumbuh	0,52	2,01	4,42	10,95	82,09	100,00	101,36
Kota Pariaman	1,33	6,42	8,07	27,09	57,09	100,00	72,74
Sumatera Barat	0,49	2,44	4,55	13,30	79,22	100,00	107,64

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 135 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kebiasaan Merokok, 2023

Provinsi <i>Province</i>	Perkotaan/ <i>Urban</i>					Perdesaan/ <i>Rural</i>				
	Ya, Setiap Hari <i>Yes, Every Day</i>	Ya, Tidak Setiap Hari <i>Yes, Not Every Day</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak Tahu <i>Not Known</i>	Jumlah <i>Total</i>	Ya, Setiap Hari <i>Yes, Every Day</i>	Ya, Tidak Setiap Hari <i>Yes, Not Every Day</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak Tahu <i>Not Known</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	18,90	2,31	78,06	0,72	100,00	21,28	2,46	75,69	0,57	100,00
Sumatera Utara	18,23	1,55	79,50	0,72	100,00	21,20	1,44	76,84	0,52	100,00
Sumatera Barat	20,85	1,83	76,97	0,35	100,00	24,86	1,16	73,44	0,54	100,00
Riau	17,99	1,45	79,66	0,90	100,00	22,08	1,53	75,31	1,09	100,00
Jambi	18,31	1,60	78,95	1,14	100,00	23,85	1,26	73,69	1,20	100,00
Sumatera Selatan	18,85	1,88	78,98	0,28	100,00	25,90	1,79	71,91	0,40	100,00
Bengkulu	21,00	0,98	77,31	0,72	100,00	27,49	0,98	70,83	0,70	100,00
Lampung	23,89	1,46	74,39	0,26	100,00	27,79	1,55	70,13	0,52	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	19,93	1,37	78,70	0,01	100,00	22,83	1,01	75,53	0,63	100,00
Kepulauan Riau	18,70	1,51	79,39	0,40	100,00	22,55	1,21	76,14	0,09	100,00
DKI Jakarta	16,76	2,26	79,87	1,11	100,00	-	-	-	-	-
Jawa Barat	24,26	1,92	73,18	0,64	100,00	28,69	1,98	69,00	0,32	100,00
Jawa Tengah	20,13	1,94	77,64	0,29	100,00	24,29	2,05	73,45	0,21	100,00
DI Yogyakarta	18,80	2,22	78,89	0,09	100,00	20,77	1,58	77,62	0,04	100,00
Jawa Timur	21,28	1,83	76,47	0,41	100,00	24,84	1,78	72,83	0,55	100,00
Banten	20,75	1,76	77,07	0,42	100,00	28,05	1,32	69,59	1,04	100,00
Bali	14,24	1,25	84,39	0,11	100,00	15,88	1,29	82,20	0,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,71	1,78	73,91	0,60	100,00	25,35	2,30	71,18	1,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,27	3,28	81,72	0,73	100,00	17,81	4,33	77,03	0,83	100,00
Kalimantan Barat	18,17	1,01	80,21	0,62	100,00	22,64	1,07	75,14	1,15	100,00
Kalimantan Tengah	17,61	1,44	79,99	0,96	100,00	22,58	2,14	74,03	1,25	100,00
Kalimantan Selatan	15,14	1,27	83,46	0,12	100,00	18,65	0,98	79,73	0,64	100,00
Kalimantan Timur	15,19	1,63	83,05	0,14	100,00	21,25	1,80	76,01	0,94	100,00
Kalimantan Utara	17,64	1,35	80,83	0,18	100,00	22,02	1,13	75,83	1,02	100,00
Sulawesi Utara	17,63	3,50	75,74	3,13	100,00	20,21	4,03	73,86	1,90	100,00
Sulawesi Tengah	17,12	2,59	79,86	0,42	100,00	22,41	2,03	74,01	1,55	100,00
Sulawesi Selatan	16,88	1,55	81,42	0,15	100,00	19,98	1,43	77,87	0,71	100,00
Sulawesi Tenggara	14,52	1,89	83,29	0,29	100,00	20,06	1,48	77,89	0,57	100,00
Gorontalo	19,58	2,46	77,96	-	100,00	24,71	3,22	71,44	0,63	100,00
Sulawesi Barat	17,15	1,16	81,51	0,17	100,00	19,23	1,42	78,67	0,68	100,00
Maluku	15,73	4,12	77,37	2,77	100,00	18,10	6,00	69,87	6,03	100,00
Maluku Utara	18,02	2,77	77,72	1,49	100,00	20,07	3,90	74,32	1,72	100,00
Papua Barat	14,23	3,39	78,04	4,34	100,00	16,64	4,84	76,25	2,27	100,00
Papua	14,41	3,76	77,49	4,34	100,00	12,44	5,30	77,59	4,67	100,00
Indonesia	20,43	1,88	77,10	0,58	100,00	23,51	1,99	73,73	0,77	100,00

Provinsi Province	Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				
	Ya, Setiap Hari Yes, Every Day	Ya, Tidak Setiap Hari Yes, Not Every Day	Tidak No	Tidak Tahu Not Known	Jumlah Total
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	20,46	2,41	76,51	0,62	100,00
Sumatera Utara	19,51	1,50	78,36	0,63	100,00
Sumatera Barat	22,84	1,50	75,22	0,45	100,00
Riau	20,43	1,49	77,06	1,01	100,00
Jambi	22,01	1,37	75,44	1,18	100,00
Sumatera Selatan	23,23	1,82	74,60	0,35	100,00
Bengkulu	25,31	0,98	73,00	0,70	100,00
Lampung	26,49	1,52	71,55	0,43	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	21,15	1,22	77,36	0,27	100,00
Kepulauan Riau	19,15	1,47	79,01	0,36	100,00
DKI Jakarta	16,76	2,26	79,87	1,11	100,00
Jawa Barat	25,18	1,93	72,32	0,57	100,00
Jawa Tengah	22,09	1,99	75,67	0,25	100,00
DI Yogyakarta	19,30	2,06	78,57	0,07	100,00
Jawa Timur	22,85	1,81	74,87	0,48	100,00
Banten	22,38	1,66	75,41	0,56	100,00
Bali	14,70	1,26	83,78	0,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,51	2,03	72,58	0,88	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,88	4,05	78,26	0,80	100,00
Kalimantan Barat	20,96	1,05	77,04	0,95	100,00
Kalimantan Tengah	20,44	1,84	76,59	1,12	100,00
Kalimantan Selatan	16,91	1,13	81,58	0,38	100,00
Kalimantan Timur	17,06	1,68	80,88	0,39	100,00
Kalimantan Utara	19,21	1,27	79,04	0,48	100,00
Sulawesi Utara	18,79	3,74	74,90	2,58	100,00
Sulawesi Tengah	20,68	2,21	75,92	1,18	100,00
Sulawesi Selatan	18,54	1,49	79,52	0,45	100,00
Sulawesi Tenggara	17,92	1,64	79,97	0,47	100,00
Gorontalo	22,42	2,88	74,35	0,35	100,00
Sulawesi Barat	18,81	1,37	79,24	0,58	100,00
Maluku	17,08	5,19	73,11	4,62	100,00
Maluku Utara	19,47	3,57	75,31	1,65	100,00
Papua Barat	15,64	4,24	77,00	3,13	100,00
Papua	13,01	4,86	77,56	4,57	100,00
Indonesia	21,72	1,93	75,69	0,66	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 136 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kebiasaan Merokok, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban					Perdesaan/Rural				
	Ya, Setiap Hari Yes, Every Day	Ya, Tidak Setiap Hari Yes, Not Every Day	Tidak No	Tidak Tahu Not Known	Jumlah Total	Ya, Setiap Hari Yes, Every Day	Ya, Tidak Setiap Hari Yes, Not Every Day	Tidak No	Tidak Tahu Not Known	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,28	0,54	98,76	0,42	100,00	0,41	0,61	98,34	0,64	100,00
Sumatera Utara	0,92	0,53	97,97	0,58	100,00	0,40	0,39	98,83	0,38	100,00
Sumatera Barat	0,40	0,50	98,88	0,21	100,00	0,23	0,35	98,52	0,90	100,00
Riau	0,59	0,65	98,17	0,59	100,00	0,46	0,78	97,95	0,80	100,00
Jambi	0,49	0,90	98,33	0,28	100,00	0,45	0,70	97,51	1,33	100,00
Sumatera Selatan	0,67	0,60	98,54	0,20	100,00	0,70	0,55	98,38	0,38	100,00
Bengkulu	0,12	0,15	99,52	0,21	100,00	0,25	0,24	98,10	1,41	100,00
Lampung	0,67	0,43	98,46	0,43	100,00	0,56	0,39	98,08	0,98	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,19	0,27	99,36	0,18	100,00	0,24	0,39	99,08	0,29	100,00
Kepulauan Riau	1,02	0,75	98,13	0,11	100,00	0,61	0,15	98,96	0,27	100,00
DKI Jakarta	0,78	1,05	97,63	0,54	100,00	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,67	0,97	97,78	0,59	100,00	0,44	0,95	97,55	1,06	100,00
Jawa Tengah	0,52	0,58	98,58	0,32	100,00	0,40	0,64	98,54	0,42	100,00
DI Yogyakarta	0,98	0,91	98,04	0,07	100,00	0,95	0,56	98,49	-	100,00
Jawa Timur	0,68	0,93	98,18	0,21	100,00	0,53	0,62	98,32	0,53	100,00
Banten	0,55	0,59	98,28	0,58	100,00	0,68	0,44	97,69	1,19	100,00
Bali	1,68	0,98	97,31	0,02	100,00	1,98	0,56	97,32	0,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,83	0,52	98,05	0,61	100,00	0,73	0,81	97,68	0,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,32	0,86	97,06	1,75	100,00	0,25	0,62	97,94	1,20	100,00
Kalimantan Barat	0,38	0,24	99,06	0,32	100,00	0,28	0,43	98,14	1,15	100,00
Kalimantan Tengah	0,33	0,57	98,78	0,32	100,00	0,40	0,95	97,69	0,96	100,00
Kalimantan Selatan	0,66	0,65	98,67	0,03	100,00	0,53	0,54	98,47	0,45	100,00
Kalimantan Timur	1,06	1,00	97,78	0,16	100,00	0,28	0,57	98,55	0,60	100,00
Kalimantan Utara	0,55	0,46	98,99	0,01	100,00	0,54	0,81	97,79	0,86	100,00
Sulawesi Utara	0,53	0,66	96,85	1,96	100,00	0,61	0,81	96,80	1,78	100,00
Sulawesi Tengah	0,65	0,63	98,46	0,26	100,00	0,62	0,39	98,07	0,92	100,00
Sulawesi Selatan	0,57	0,33	98,96	0,14	100,00	0,52	0,42	98,72	0,34	100,00
Sulawesi Tenggara	0,26	0,76	98,90	0,08	100,00	0,21	0,50	99,04	0,25	100,00
Gorontalo	0,45	0,34	99,21	-	100,00	0,22	0,70	98,84	0,24	100,00
Sulawesi Barat	0,69	0,79	98,20	0,32	100,00	0,52	0,48	98,58	0,43	100,00
Maluku	0,42	0,61	96,65	2,33	100,00	0,42	0,79	94,02	4,78	100,00
Maluku Utara	0,14	0,56	97,91	1,38	100,00	0,31	0,68	97,55	1,46	100,00
Papua Barat	0,39	0,86	94,70	4,05	100,00	0,21	0,74	97,46	1,58	100,00
Papua	0,58	0,91	95,41	3,10	100,00	0,50	0,55	95,09	3,86	100,00
Indonesia	0,67	0,77	98,10	0,46	100,00	0,48	0,60	98,11	0,81	100,00

Provinsi Province	Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				
	Ya, Setiap Hari Yes, Every Day	Ya, Tidak Setiap Hari Yes, Not Every Day	Tidak No	Tidak Tahu Not Known	Jumlah Total
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	0,36	0,59	98,49	0,56	100,00
Sumatera Utara	0,70	0,47	98,34	0,49	100,00
Sumatera Barat	0,32	0,42	98,70	0,56	100,00
Riau	0,51	0,72	98,04	0,72	100,00
Jambi	0,47	0,77	97,79	0,98	100,00
Sumatera Selatan	0,69	0,57	98,44	0,31	100,00
Bengkulu	0,21	0,21	98,57	1,01	100,00
Lampung	0,60	0,40	98,20	0,80	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,21	0,32	99,24	0,23	100,00
Kepulauan Riau	0,97	0,68	98,22	0,13	100,00
DKI Jakarta	0,78	1,05	97,63	0,54	100,00
Jawa Barat	0,62	0,96	97,73	0,68	100,00
Jawa Tengah	0,46	0,61	98,56	0,37	100,00
DI Yogyakarta	0,97	0,82	98,15	0,06	100,00
Jawa Timur	0,62	0,79	98,24	0,35	100,00
Banten	0,58	0,56	98,15	0,71	100,00
Bali	1,76	0,86	97,31	0,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,78	0,66	97,87	0,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,27	0,68	97,71	1,34	100,00
Kalimantan Barat	0,32	0,36	98,48	0,84	100,00
Kalimantan Tengah	0,37	0,78	98,16	0,68	100,00
Kalimantan Selatan	0,59	0,60	98,57	0,24	100,00
Kalimantan Timur	0,82	0,87	98,02	0,29	100,00
Kalimantan Utara	0,55	0,58	98,56	0,31	100,00
Sulawesi Utara	0,56	0,73	96,82	1,88	100,00
Sulawesi Tengah	0,63	0,47	98,20	0,71	100,00
Sulawesi Selatan	0,54	0,38	98,83	0,25	100,00
Sulawesi Tenggara	0,23	0,60	98,98	0,19	100,00
Gorontalo	0,33	0,54	99,00	0,13	100,00
Sulawesi Barat	0,55	0,54	98,50	0,41	100,00
Maluku	0,42	0,71	95,15	3,72	100,00
Maluku Utara	0,26	0,64	97,66	1,44	100,00
Papua Barat	0,29	0,79	96,31	2,61	100,00
Papua	0,52	0,66	95,18	3,64	100,00
Indonesia	0,59	0,70	98,10	0,61	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 137 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023

Provinsi Province	Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu/The Number of Cigarettes Smoked per Week						Rata-Rata per Minggu (Batang Rokok) Average per Week (Cigarettes)
	1-6	7-14	15-29	30-59	≥ 60	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,74	5,26	8,97	26,54	58,49	100,00	82,13
Sumatera Utara	0,52	4,07	8,50	22,42	64,49	100,00	86,75
Sumatera Barat	0,64	3,59	5,98	16,46	73,33	100,00	99,76
Riau	0,11	2,12	5,91	13,61	78,25	100,00	114,59
Jambi	0,67	2,76	4,18	14,63	77,76	100,00	112,27
Sumatera Selatan	1,46	5,04	7,65	22,18	63,67	100,00	83,02
Bengkulu	0,08	1,84	3,17	18,66	76,25	100,00	101,05
Lampung	0,17	3,66	9,64	20,96	65,57	100,00	84,65
Kepulauan Bangka Belitung	0,57	1,13	3,76	14,12	80,40	100,00	107,25
Kepulauan Riau	0,73	1,76	6,58	20,74	70,19	100,00	102,69
DKI Jakarta	0,89	6,33	11,56	29,24	51,98	100,00	72,15
Jawa Barat	0,78	4,96	9,05	26,17	59,04	100,00	75,57
Jawa Tengah	1,09	6,76	10,71	26,74	54,70	100,00	72,50
DI Yogyakarta	3,16	9,14	14,36	32,31	41,02	100,00	60,60
Jawa Timur	0,70	4,38	9,72	24,15	61,05	100,00	77,51
Banten	0,37	3,11	4,76	21,47	70,29	100,00	86,72
Bali	1,02	4,73	10,72	26,01	57,53	100,00	78,54
Nusa Tenggara Barat	0,56	5,26	10,74	23,37	60,07	100,00	81,34
Nusa Tenggara Timur	2,93	12,16	18,93	25,62	40,36	100,00	59,55
Kalimantan Barat	0,66	2,89	6,19	13,12	77,14	100,00	101,66
Kalimantan Tengah	0,07	1,22	3,49	15,26	79,96	100,00	108,87
Kalimantan Selatan	0,22	2,87	4,65	14,84	77,42	100,00	105,36
Kalimantan Timur	0,79	2,87	6,71	19,15	70,47	100,00	100,84
Kalimantan Utara	1,24	1,96	7,09	20,88	68,84	100,00	99,23
Sulawesi Utara	1,09	3,85	12,46	30,48	52,12	100,00	78,72
Sulawesi Tengah	0,45	5,00	10,39	22,14	62,03	100,00	98,57
Sulawesi Selatan	0,81	2,73	7,83	23,40	65,25	100,00	92,57
Sulawesi Tenggara	0,85	2,51	12,33	22,23	62,08	100,00	85,00
Gorontalo	1,14	4,38	11,31	29,64	53,54	100,00	80,20
Sulawesi Barat	0,01	1,37	8,82	10,69	79,11	100,00	103,66
Maluku	3,12	15,13	31,37	23,73	26,65	100,00	50,29
Maluku Utara	0,08	3,84	9,81	22,50	63,76	100,00	83,30
Papua Barat	1,49	9,28	18,29	23,66	47,28	100,00	74,26
Papua	1,53	5,96	13,27	27,19	52,05	100,00	75,19
Indonesia	0,81	4,83	9,20	24,38	60,78	100,00	80,31

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 138 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023

Provinsi Province	Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu/The Number of Cigarettes Smoked per Week					Jumlah Total	Rata-Rata per Minggu (Batang Rokok) Average per Week (Cigarettes)
	1-6	7-14	15-29	30-59	≥ 60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,32	3,03	7,46	18,75	70,43	100,00	95,32
Sumatera Utara	0,73	2,30	4,74	11,57	80,67	100,00	105,57
Sumatera Barat	0,36	1,43	3,29	10,50	84,41	100,00	114,58
Riau	0,07	1,11	2,45	7,48	88,88	100,00	131,13
Jambi	0,20	1,13	1,59	6,09	90,99	100,00	127,95
Sumatera Selatan	0,18	1,28	3,55	12,71	82,29	100,00	100,77
Bengkulu	0,36	1,20	2,85	10,24	85,35	100,00	104,94
Lampung	0,26	1,37	3,72	14,52	80,13	100,00	98,10
Kepulauan Bangka Belitung	0,26	1,12	1,56	10,52	86,54	100,00	117,64
Kepulauan Riau	0,05	1,28	1,42	9,71	87,54	100,00	166,58
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,70	3,28	7,42	22,48	66,12	100,00	79,55
Jawa Tengah	0,83	4,96	9,13	26,27	58,80	100,00	74,05
DI Yogyakarta	0,95	5,04	11,26	28,14	54,61	100,00	76,80
Jawa Timur	0,29	3,55	9,24	23,45	63,46	100,00	78,88
Banten	0,04	1,20	1,55	11,08	86,12	100,00	103,23
Bali	1,09	3,62	7,53	21,02	66,74	100,00	90,42
Nusa Tenggara Barat	0,65	3,18	7,19	25,98	62,99	100,00	83,43
Nusa Tenggara Timur	2,42	10,36	18,36	29,80	39,06	100,00	63,65
Kalimantan Barat	0,15	1,08	2,73	9,44	86,59	100,00	115,35
Kalimantan Tengah	0,31	1,79	3,60	11,52	82,78	100,00	113,64
Kalimantan Selatan	0,30	0,83	2,06	9,66	87,15	100,00	113,39
Kalimantan Timur	0,67	0,80	2,66	9,39	86,48	100,00	126,94
Kalimantan Utara	0,06	0,40	1,42	11,79	86,34	100,00	115,97
Sulawesi Utara	1,21	3,40	9,53	25,99	59,87	100,00	86,53
Sulawesi Tengah	0,48	3,15	7,17	15,19	74,00	100,00	110,98
Sulawesi Selatan	0,40	1,39	3,43	16,44	78,34	100,00	110,95
Sulawesi Tenggara	0,41	1,47	3,30	11,93	82,89	100,00	111,06
Gorontalo	1,31	2,81	9,67	26,12	60,10	100,00	88,93
Sulawesi Barat	0,44	1,05	2,26	10,96	85,29	100,00	128,71
Maluku	3,35	10,10	18,53	34,52	33,50	100,00	56,18
Maluku Utara	0,35	4,92	13,46	32,08	49,19	100,00	75,24
Papua Barat	1,90	5,96	17,56	26,79	47,78	100,00	75,60
Papua	1,56	11,51	19,86	31,62	35,45	100,00	56,63
Indonesia	0,58	3,22	6,98	19,20	70,02	100,00	91,66

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 139 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2023

Provinsi Province	Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu/The Number of Cigarettes Smoked per Week					Rata-Rata per Minggu (Batang Rokok) Average per Week (Cigarettes)	
	1-6	7-14	15-29	30-59	≥ 60		Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,46	3,75	7,94	21,26	66,59	100,00	91,08
Sumatera Utara	0,62	3,25	6,76	17,39	71,98	100,00	95,47
Sumatera Barat	0,49	2,44	4,55	13,30	79,22	100,00	107,64
Riau	0,08	1,47	3,68	9,67	85,09	100,00	125,24
Jambi	0,34	1,59	2,32	8,51	87,24	100,00	123,51
Sumatera Selatan	0,58	2,46	4,84	15,69	76,44	100,00	95,19
Bengkulu	0,28	1,38	2,94	12,60	82,80	100,00	103,85
Lampung	0,23	2,06	5,51	16,46	75,74	100,00	94,05
Kepulauan Bangka Belitung	0,43	1,13	2,77	12,51	83,16	100,00	111,91
Kepulauan Riau	0,64	1,69	5,89	19,25	72,53	100,00	111,32
DKI Jakarta	0,89	6,33	11,56	29,24	51,98	100,00	72,15
Jawa Barat	0,76	4,57	8,67	25,31	60,69	100,00	76,50
Jawa Tengah	0,96	5,83	9,90	26,50	56,81	100,00	73,30
DI Yogyakarta	2,58	8,06	13,55	31,22	44,59	100,00	64,85
Jawa Timur	0,50	3,99	9,49	23,82	62,20	100,00	78,16
Banten	0,28	2,59	3,89	18,64	74,60	100,00	91,21
Bali	1,04	4,39	9,76	24,51	60,30	100,00	82,11
Nusa Tenggara Barat	0,61	4,21	8,95	24,69	61,54	100,00	82,39
Nusa Tenggara Timur	2,53	10,76	18,48	28,88	39,35	100,00	62,74
Kalimantan Barat	0,32	1,67	3,86	10,64	83,51	100,00	110,88
Kalimantan Tengah	0,22	1,58	3,56	12,89	81,75	100,00	111,88
Kalimantan Selatan	0,26	1,75	3,23	12,00	82,75	100,00	109,76
Kalimantan Timur	0,74	2,08	5,17	15,45	76,55	100,00	110,75
Kalimantan Utara	0,76	1,33	4,79	17,20	75,92	100,00	106,00
Sulawesi Utara	1,15	3,63	11,04	28,31	55,87	100,00	82,50
Sulawesi Tengah	0,47	3,67	8,07	17,14	70,64	100,00	107,50
Sulawesi Selatan	0,57	1,96	5,31	19,42	72,73	100,00	103,07
Sulawesi Tenggara	0,55	1,81	6,22	15,26	76,16	100,00	102,63
Gorontalo	1,24	3,42	10,31	27,49	57,54	100,00	85,53
Sulawesi Barat	0,36	1,11	3,47	10,91	84,16	100,00	124,10
Maluku	3,26	12,04	23,48	30,35	30,86	100,00	53,90
Maluku Utara	0,28	4,64	12,50	29,56	53,02	100,00	77,35
Papua Barat	1,75	7,19	17,83	25,63	47,60	100,00	75,10
Papua	1,55	9,88	17,93	30,32	40,32	100,00	62,08
Indonesia	0,71	4,11	8,20	22,04	64,95	100,00	85,42

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Kementerian PPA sendiri terus mendorong Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang memuat poin-poin penting yang perlu dibenahi dalam upaya pengendalian rokok dan narkoba pada anak. Poin penting tersebut diantaranya meliputi (1) larangan menjual produk tembakau pada anak; (2) Aturan pengendalian iklan produk tembakau pada media cetak dan media penyiaran (termasuk bioskop); (3) Tidak melibatkan anak dalam iklan, promosi dan sponsor produk tembakau; (4) Aturan jam tayang video produk iklan produk tembakau pada media penyiaran; (5) Larangan menjual produk tembakau dalam bentuk batangan (eceran); dan (6) Penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

5.8 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan konsep rumah sehat. Rumah sehat diartikan secara luas karena konsep sehat itu sendiri mencakup suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Kementerian Kesehatan mensyaratkan ada empat kondisi yang dipenuhi sehingga rumah dapat dikategorikan sebagai rumah sehat, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan psikologis, antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni;
2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari

- pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;
3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;
 4. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

Tempat tinggal dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi empat aspek, yakni diantaranya adalah (1) kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni; 2) konstruksi, bahan, dan kualitas interior; (3) infrastruktur lingkungan; serta (4) tatanan sosial lingkungan sekitar. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat terpenuhi untuk menjamin kesejahteraan setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak. Hal ini pula yang menunjang proses tumbuh kembang anak lebih terjamin di lingkungan sehat dan ramah anak.

Berdasarkan data BPS di tahun 2023 sebagian besar anak tinggal dengan orang tua di dalam rumah milik sendiri, setidaknya terdapat 81,08 persen rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase kepemilikan rumah milik sendiri tersebut lebih banyak disumbang oleh keluarga yang tinggal di perdesaan dibandingkan dengan keluarga di perkotaan. Kecenderungan keluarga di perkotaan yang tinggal di rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa lebih besar dibandingkan dengan keluarga di daerah perdesaan.

Anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan rumah tangga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tinggal di rumah milik sendiri. Tingginya persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa di daerah perkotaan erat kaitannya dengan biaya hidup dan harga tanah yang lebih mahal di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri. Status kepemilikan rumah menjadi suatu hal yang sangat penting.

Terdapat empat status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati, yakni milik sendiri, sewa atau kontrak, bebas sewa, dinas/lainnya. Maksud status rumah milik sendiri adalah rumah atau tempat tinggal tersebut adalah milik dari salah satu anggota rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri relatif tidak mengalami perubahan.

Dari sepuluh rumah tangga, terdapat tujuh rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Tabel 140 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri pada tahun 2023 tercatat sebesar 72,61 persen. Angka ini naik sebesar 4,81 poin dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 67,80 persen.

Kelompok rumah tangga kedua paling banyak adalah rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bebas sewa (rumah kerabat atau handai taulan yang bukan miliknya ditempati tanpa bayaran). Persentase untuk kelompok rumah tangga ini tercatat sebesar 18,74 persen pada tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal kontrak/sewa pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,57 poin. Proporsi kelompok rumah tangga ini tercatat sebanyak 7,24 persen, sedangkan pada tahun 2022 tercatat lebih tinggi, yakni sebesar 12,81 persen. Selanjutnya, sisanya sebesar 1,41 persen menempati bangunan tempat tinggal dengan status kepemilikan dinas dan lainnya.

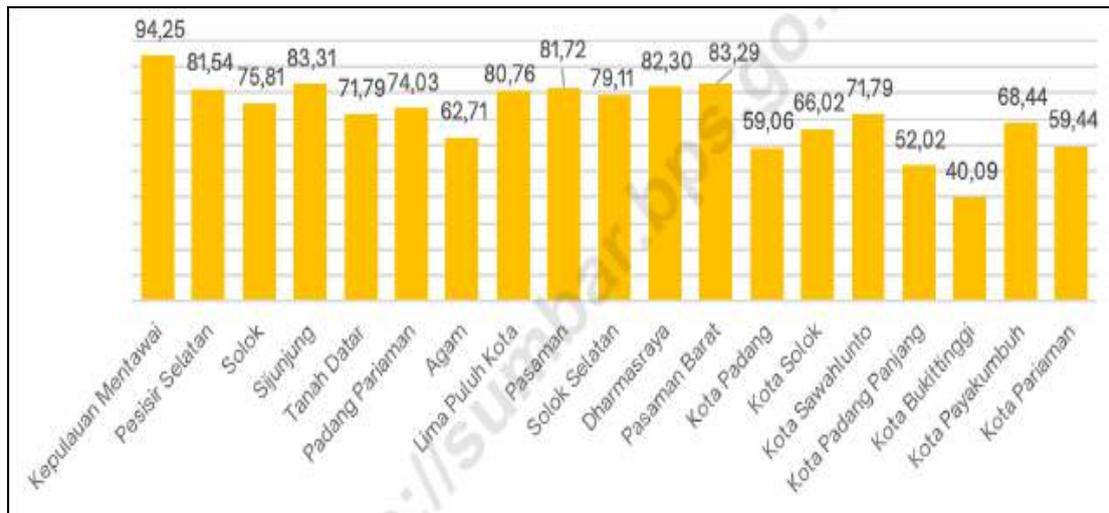
Angka ini naik dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,23 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat satu dari seratus rumah tangga yang menempati rumah dinas.

Tabel 140 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Provinsi Sumatera Barat (%), 2022 - 2023

Status Kepemilikan Rumah	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	67,80	72,61
Kontrak/Sewa	12,81	7,24
Bebas Sewa	18,16	18,74
Dinas/Lainnya	1,23	1,41

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Gambar 52 Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (%), 2023



Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Gambar 52 menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi memiliki persentase terendah rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, yaitu sebesar 40,09 persen, jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diduga disebabkan Kota Bukittinggi merupakan kota sentra ekonomi Sumatera Barat yang menarik banyak orang sehingga menyebabkan tingginya permintaan hunian. Selain itu, sempitnya lahan untuk perumahan di daerah ini juga

menyebabkan harga rumah relatif lebih mahal. Faktor tersebut menyebabkan banyak rumah tangga tidak memiliki pilihan lain selain mengontrak atau menyewa.

Berikut gambaran status kepemilikan tempat tinggal menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2023

Tabel 141 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Milik Sendiri Private	Kontrak/Sewa Lease/Rent	Bebas Sewa Free Use	Dinas/Lainnya Official Residence/ Other	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	94,25	1,31	4,44	-	100,00
Kab. Pesisir Selatan	81,54	4,78	13,42	0,27	100,00
Kab. Solok	75,81	3,35	19,43	1,41	100,00
Kab. Sijunjung	83,31	5,90	10,62	0,17	100,00
Kab. Tanah Datar	71,79	3,68	24,46	0,07	100,00
Kab. Padang Pariaman	74,03	3,56	22,15	0,26	100,00
Kab. Agam	62,71	7,86	27,87	1,56	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	80,76	3,90	14,91	0,43	100,00
Kab. Pasaman	81,72	3,97	13,97	0,34	100,00
Kab. Solok Selatan	79,11	0,98	12,28	7,63	100,00
Kab. Dharmasraya	82,30	7,53	8,15	2,02	100,00
Kab. Pasaman Barat	83,29	5,29	9,12	2,31	100,00
Kota Padang	59,06	11,73	27,20	2,00	100,00
Kota Solok	66,02	15,91	15,16	2,92	100,00
Kota Sawahlunto	71,79	10,45	14,77	2,99	100,00
Kota Padang Panjang	52,02	18,67	26,31	3,00	100,00
Kota Bukittinggi	40,09	35,32	22,45	2,14	100,00
Kota Payakumbuh	68,44	14,41	16,00	1,14	100,00
Kota Pariaman	59,44	11,16	28,03	1,36	100,00
Sumatera Barat	72,61	7,24	18,74	1,41	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Pada tabel diatas, terlihat bahwa hanya 18,74 persen rumah tangga yang memiliki status kepemilikan bangunan tempat tinggal dengan status bebas sewa. Ini artinya masyarakat di Sumatera Barat telah memiliki rumah sendiri, sesuai dengan pola matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, dimana hak kepemilikan rumah berada di anak perempuan

Tabel 142 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2023

Provinsi <i>Province</i>	Perkotaan/Urban					Perdesaan/Rural					Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				
	Milik Sendiri <i>Private</i>	Kontrak/ Sewa <i>Lease/Rent</i>	Bebas Sewa <i>Free Use</i>	Dinas. Lainnya <i>Official Residence/ Others</i>	Jumlah <i>Total</i>	Milik Sendiri <i>Private</i>	Kontrak/ Sewa <i>Lease/Rent</i>	Bebas Sewa <i>Free Use</i>	Dinas. Lainnya <i>Official Residence/ Others</i>	Jumlah <i>Total</i>	Milik Sendiri <i>Private</i>	Kontrak/ Sewa <i>Lease/Rent</i>	Bebas Sewa <i>Free Use</i>	Dinas. Lainnya <i>Official Residence/ Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	76,45	8,53	12,35	2,67	100,00	88,38	2,11	8,59	0,93	100,00	84,12	4,40	9,93	1,55	100,00
Sumatera Utara	65,49	13,80	17,58	3,12	100,00	79,29	4,37	13,91	2,43	100,00	71,46	9,72	16,00	2,82	100,00
Sumatera Barat	64,45	11,53	22,10	1,93	100,00	80,80	2,94	15,37	0,89	100,00	72,61	7,24	18,74	1,41	100,00
Riau	67,52	16,75	12,93	2,80	100,00	84,29	2,65	7,69	5,37	100,00	77,56	8,31	9,79	4,34	100,00
Jambi	80,99	7,92	9,92	1,17	100,00	90,49	1,09	7,24	1,18	100,00	87,28	3,40	8,15	1,18	100,00
Sumatera Selatan	75,05	8,28	15,47	1,20	100,00	90,41	1,02	8,33	0,24	100,00	84,71	3,71	10,98	0,60	100,00
Bengkulu	81,73	9,82	7,77	0,68	100,00	91,83	0,87	6,13	1,17	100,00	88,38	3,93	6,69	1,00	100,00
Lampung	86,36	6,46	6,99	0,19	100,00	95,41	0,47	3,95	0,18	100,00	92,40	2,45	4,96	0,18	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	84,60	5,85	8,79	0,76	100,00	94,65	1,12	2,90	1,34	100,00	88,65	3,95	6,41	0,99	100,00
Kepulauan Riau	70,65	18,36	10,14	0,84	100,00	91,21	0,56	7,88	0,35	100,00	72,97	16,35	9,89	0,79	100,00
DKI Jakarta	56,57	22,82	18,99	1,62	100,00	-	-	-	-	-	56,57	22,82	18,99	1,62	100,00
Jawa Barat	80,65	6,95	12,12	0,28	100,00	93,08	0,52	6,28	0,12	100,00	83,38	5,54	10,83	0,25	100,00
Jawa Tengah	87,17	2,20	10,54	0,09	100,00	95,39	0,22	4,32	0,06	100,00	91,05	1,27	7,60	0,08	100,00
DI Yogyakarta	83,06	7,99	8,62	0,33	100,00	96,64	0,32	3,05	-	100,00	86,43	6,08	7,24	0,25	100,00
Jawa Timur	86,70	4,48	8,43	0,38	100,00	96,25	0,29	3,42	0,03	100,00	90,92	2,63	6,22	0,23	100,00
Banten	83,52	7,83	8,23	0,42	100,00	93,33	0,58	5,96	0,14	100,00	85,67	6,24	7,73	0,36	100,00
Bali	81,71	11,44	6,51	0,34	100,00	93,17	0,95	5,78	0,10	100,00	85,24	8,22	6,28	0,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,18	1,80	9,66	0,36	100,00	94,78	0,35	4,77	0,10	100,00	91,35	1,10	7,32	0,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	79,48	11,03	7,74	1,76	100,00	95,12	0,35	3,70	0,83	100,00	90,74	3,34	4,83	1,09	100,00
Kalimantan Barat	85,69	3,83	10,10	0,38	100,00	94,90	0,36	4,18	0,56	100,00	91,43	1,67	6,41	0,50	100,00
Kalimantan Tengah	76,27	6,83	11,97	4,92	100,00	86,29	0,98	6,95	5,79	100,00	81,92	3,53	9,14	5,41	100,00
Kalimantan Selatan	76,38	8,62	13,09	1,91	100,00	89,73	1,18	7,59	1,51	100,00	83,09	4,88	10,33	1,71	100,00
Kalimantan Timur	70,61	13,88	14,50	1,01	100,00	85,32	2,61	8,09	3,99	100,00	75,14	10,41	12,53	1,93	100,00
Kalimantan Utara	70,31	14,22	12,47	3,00	100,00	88,02	1,35	9,46	1,16	100,00	76,63	9,63	11,39	2,34	100,00
Sulawesi Utara	73,58	4,29	21,06	1,07	100,00	86,90	0,76	12,12	0,22	100,00	79,47	2,73	17,11	0,69	100,00
Sulawesi Tengah	78,59	8,77	10,88	1,76	100,00	93,31	0,73	5,50	0,47	100,00	88,44	3,39	7,28	0,89	100,00
Sulawesi Selatan	81,77	4,32	13,44	0,46	100,00	92,76	0,38	6,38	0,47	100,00	87,68	2,20	9,64	0,47	100,00
Sulawesi Tenggara	84,02	5,12	10,19	0,67	100,00	94,57	0,33	4,97	0,13	100,00	90,54	2,16	6,97	0,34	100,00
Gorontalo	78,72	1,34	19,78	0,16	100,00	90,61	0,48	8,39	0,52	100,00	85,14	0,87	13,63	0,36	100,00
Sulawesi Barat	91,54	3,60	4,36	0,49	100,00	93,83	0,25	4,59	1,33	100,00	93,35	0,95	4,55	1,16	100,00
Maluku	76,82	6,71	14,72	1,75	100,00	90,34	0,58	8,16	0,92	100,00	84,69	3,14	10,90	1,27	100,00
Maluku Utara	82,95	5,79	10,14	1,12	100,00	93,39	0,32	5,60	0,68	100,00	90,26	1,96	6,96	0,81	100,00
Papua Barat	71,43	15,08	11,77	1,72	100,00	90,96	1,37	4,82	2,85	100,00	82,94	7,00	7,68	2,38	100,00
Papua	60,76	19,74	11,01	8,48	100,00	95,40	0,93	2,84	0,84	100,00	85,31	6,41	5,22	3,06	100,00
Indonesia	79,36	8,03	11,79	0,82	100,00	92,38	0,89	5,99	0,73	100,00	84,79	5,05	9,37	0,79	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

5.9 SANITASI

Sanitasi menjadi aspek penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Penyediaan sanitasi semakin menjadi perhatian dan diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun untuk pengelolaannya, agar mendatangkan kesehatan, kesejahteraan dan manfaat bagi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan. Air bersih merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi tersebut dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, utamanya manusia.

Ketiadaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan awal mula kemunculan persoalan kesehatan anak dan bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan penyerapan gizi anak terhambat sehingga pada akhirnya anak pun menderita stunting.

Dalam konteks ini terlihat bahwa kualitas air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu penentu kesehatan anak. Untuk mencegah permasalahan kesehatan tersebut muncul, maka pemerintah pun terus mengupayakan agar keluarga Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang layak.

Akses air bersih dan sanitasi adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

5.9.1 Akses Terhadap Air Layak

Air minum yang bersih dan aman merupakan hak asasi setiap manusia. Data Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa 91,05 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Akan tetapi, ketimpangan akses terhadap air minum layak masih terjadi, di mana baru sekitar 63,00 persen rumah tangga di Papua yang memiliki akses (Badan Pusat Statistik, 2022a). Pemerataan akses terhadap air layak menjadi penting, karena penggunaan air ditambah dengan sanitasi yang buruk berhubungan dengan transmisi penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio, serta keracunan bahan timbal (World Health Organization, 2018). Perlakuan yang dilakukan terhadap air, serta penyimpanan dan penyaluran air yang baik merupakan upaya dalam rangka membuat air lebih aman untuk diminum. Perlakuan yang dilakukan terhadap

air sebelum diminum dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan, khususnya dalam kondisi sistem perpipaan air yang tidak tersedia, sumber air yang kemungkinan terkontaminasi, atau tempat penyimpanan air menjadi terkontaminasi saat memperoleh air, atau saat air dalam perjalanan (World Health Organization, 2016). Beberapa kebijakan dan intervensi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan akses terhadap air minum yang merata. Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menyebutkan jika salah satu major project RPJMN 2020-2024 adalah akses air minum perpipaan (sepuluh juta sambungan rumah) dalam upaya untuk meningkatkan akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100,00 persen.

Air minum dan sanitasi yang tidak layak disertai dengan praktik kebersihan yang buruk dapat mengakibatkan penyakit diare yang merupakan penyebab tertinggi kematian anak, khususnya pada balita (World Health Organization, 2018). Selain penyediaan air minum layak, proses mengambil air dan pengambil air juga menjadi isu penting terhadap kesehatan air minum. Air yang terkontaminasi saat proses pengangkutan berkontribusi terhadap penyakit yang disebabkan oleh air misalnya hepatitis A dan E, kolera, tifus, dan poliomyelitis (Rosa & Clasen, 2010). Pengambil air yang dipergunakan untuk untuk minum pada rumah tangga juga menjadi pembahasan karena beberapa konsekuensi yang harus ditanggung ketika air diangkut oleh wanita atau oleh anak-anak dalam jarak yang jauh atau membutuhkan waktu yang lama. Pada daerah dengan kualitas fisik air yang kurang baik, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh rumah tangga agar air lebih aman untuk diminum. Upaya tersebut terdiri dari yang paling sederhana seperti mengendapkan air, sampai dengan menggunakan saringan air modern. Data mengenai penyediaan air pada rumah tangga mulai dari siapa yang mengambil air, perilaku terhadap air, dan media untuk mengakses air dikumpulkan untuk melihat intervensi apa yang dapat diberikan pada level rumah tangga. Data yang dikumpulkan dari Susenas MKP 2022 mengenai penyediaan air minum rumah tangga merupakan pelengkap dari data Susenas Maret 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung minum.

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

Menurut BPS, konsep rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah:

1. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung
2. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan.

Menurut BPS terdapat 8 sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Anak-anak sangat membutuhkan air sebagai penunjang penyerapan gizi yang baik dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari. tinggi dapat di akses di perkotaan daripada di perdesaan.

Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan semua orang. Bahkan, rumah menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Kondisi dan fasilitas rumah yang baik diharapkan memberi kepuasan dan kebahagiaan pada hidup seseorang. Termasuk ada atau tidaknya fasilitas rumah yang memadai seperti air minum, listrik, jamban, pembuangan akhir tinja, dan lain sebagainya. Persentase rumah tangga yang

menggunakan air kemasan, air isi ulang dan leding untuk minum di Sumatera Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 55,18 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 56,06 persen.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari 80,68 persen pada tahun 2022 menjadi 80,84 persen pada tahun 2023. Akan tetapi, peningkatan ini tidak terjadi pada fasilitas pembuangan akhir tinja dengan tangki. Dari tabel 6.2. dapat dilihat bahwa rumah tangga yang memiliki pembuangan akhir tinja dengan tangki pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,81 poin, dari 73,89 persen menjadi 72,08 persen.

Selanjutnya, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sumber penerangan listrik mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang sudah memiliki sumber penerangan dari listrik mencapai 99,53 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 99,52 persen.

Tabel 143 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Provinsi Sumatera Barat (%), 2022 - 2023

Fasilitas Perumahan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, Air Isi Ulang dan Leding	56,06	55,18
Jamban Sendiri	80,68	80,84
Pembuangan Akhir Tinja dengan Tangki	73,89	72,08
Sumber Penerangan Listrik	99,52	99,53

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 144 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled, Refill Water	Ledeng Tap Water	Sumur Bor/ Pompa Drilling Well/ Pump	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung Protected Well, Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Kepulauan Mentawai	23,84	NA	NA	18,87	24,27	32,90	100,00
Kab. Pesisir Selatan	60,22	5,22	5,13	14,99	12,23	2,21	100,00
Kab. Solok	24,22	13,46	3,42	21,70	35,46	1,75	100,00
Kab. Sijunjung	51,74	8,70	NA	13,42	19,03	5,97	100,00
Kab. Tanah Datar	29,23	11,90	7,59	17,65	31,61	2,03	100,00
Kab. Padang Pariaman	30,23	11,68	10,51	31,28	11,41	4,89	100,00
Kab. Agam	35,85	7,89	7,64	25,76	19,98	2,87	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	33,80	6,64	6,51	18,25	32,03	2,77	100,00
Kab. Pasaman	32,92	17,65	NA	15,01	31,30	2,50	100,00
Kab. Solok Selatan	28,28	14,30	2,36	22,17	26,87	6,02	100,00
Kab. Dharmasraya	44,93	-	17,89	29,81	6,69	NA	100,00
Kab. Pasaman Barat	25,87	12,81	14,92	45,02	NA	0,82	100,00
Kota Padang	69,93	12,54	3,15	11,71	2,66	-	100,00
Kota Solok	64,68	31,51	NA	1,75	1,44	-	100,00
Kota Sawahlunto	68,80	7,95	NA	5,71	16,30	NA	100,00
Kota Padang Panjang	57,42	24,15	9,24	6,66	2,08	NA	100,00
Kota Bukittinggi	75,05	11,98	10,41	1,71	NA	NA	100,00
Kota Payakumbuh	48,91	43,79	2,35	4,16	0,79	-	100,00
Kota Pariaman	52,27	8,54	15,89	21,64	1,41	NA	100,00
Sumatera Barat	43,76	11,42	6,48	20,02	15,69	2,63	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng di Sumatera Barat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas ini sebesar 55,18 persen di tahun 2023, menurun dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 67,05 persen. Perubahan juga terjadi baik di perdesaan dan perkotaan. Dari tabel diatas tergambar bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan sumur bor, sumur terlindung, sumur tak terlindung dan mata air terlindung masing-masing sebesar 6,48 persen, 20,02 persen, 15,69 persen dan 2,63 persen. Hanya 2,63% rumah tangga yang masih menggunakan air lainnya sebagai air minum utama. Ini artinya kesadaran masyarakat untuk menggunakan air yang layak di Sumatera Barat telah tinggi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 145 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	60,30	28,21	11,49	100,00
Kab. Pesisir Selatan	21,01	70,70	8,29	100,00
Kab. Solok	30,41	66,23	3,36	100,00
Kab. Sijunjung	17,10	68,35	14,54	100,00
Kab. Tanah Datar	12,34	87,66	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	23,62	73,66	2,72	100,00
Kab. Agam	20,46	75,64	3,89	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	21,44	73,38	5,17	100,00
Kab. Pasaman	51,60	45,56	2,83	100,00
Kab. Solok Selatan	20,66	74,40	4,93	100,00
Kab. Dharmasraya	28,05	70,74	1,22	100,00
Kab. Pasaman Barat	35,02	62,67	2,31	100,00
Kota Padang	21,24	77,93	0,83	100,00
Kota Solok	8,07	65,46	26,47	100,00
Kota Sawahlunto	6,99	92,67	0,34	100,00
Kota Padang Panjang	61,41	35,57	3,02	100,00
Kota Bukittinggi	19,03	80,97	-	100,00
Kota Payakumbuh	30,73	55,94	13,32	100,00
Kota Pariaman	32,66	66,12	1,22	100,00
Sumatera Barat	26,09	70,19	3,72	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Lebih dari 25% rumah tangga menggunakan air ledeng sebagai sumber air utama dalam memasak, mandi dan cuci. 14,57 persen menggunakan sumur bor/pompa, 34,86% menggunakan sumur terlindung/tak terlindung, 18,33% menggunakan mata air terlindung/tak terlindung dan lainnya hanya 5,89%. Ini menggambarkan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya penggunaan air yang bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kondisi geografis Sumatera Barat, kebutuhan air bersih masih terpenuhi secara baik.

Tabel 146 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dan lain-lain di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Leding Tap Water	Sumur Bor/ Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung Protected Well, Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya ¹ Surface Water, Rain Water, Others ²	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	6,50	NA	46,11	26,14	18,92	100,00
Kab. Pesisir Selatan	17,36	16,81	44,78	16,86	4,20	100,00
Kab. Solok	22,61	8,40	26,68	34,44	7,87	100,00
Kab. Sijunjung	35,96	4,71	28,88	21,64	8,80	100,00
Kab. Tanah Datar	21,38	14,88	22,52	35,95	5,26	100,00
Kab. Padang Pariaman	17,36	15,16	42,71	13,34	11,44	100,00
Kab. Agam	15,44	15,83	35,37	23,42	9,84	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	11,38	13,06	29,23	42,27	4,06	100,00
Kab. Pasaman	26,58	1,88	24,42	35,62	11,50	100,00
Kab. Solok Selatan	25,69	3,60	31,43	23,99	15,29	100,00
Kab. Dharmasraya	NA	31,48	52,24	11,60	4,21	100,00
Kab. Pasaman Barat	14,21	21,08	60,63	NA	3,32	100,00
Kota Padang	46,77	13,87	35,36	3,30	NA	100,00
Kota Solok	86,91	3,31	6,24	2,65	NA	100,00
Kota Sawahlunto	50,04	1,45	16,32	30,82	1,36	100,00
Kota Padang Panjang	63,29	20,32	12,00	3,85	NA	100,00
Kota Bukittinggi	35,23	50,60	10,55	NA	3,41	100,00
Kota Payakumbuh	82,86	6,98	9,86	NA	-	100,00
Kota Pariaman	16,70	36,04	45,62	1,50	NA	100,00
Sumatera Barat	26,34	14,57	34,86	18,33	5,89	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 147 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/DII. dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	53,95	36,53	9,52	100,00
Kab. Pesisir Selatan	23,34	70,88	5,78	100,00
Kab. Solok	31,53	65,39	3,08	100,00
Kab. Sijunjung	26,16	63,74	10,10	100,00
Kab. Tanah Datar	13,05	86,95	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	33,54	64,60	1,85	100,00
Kab. Agam	24,70	70,86	4,44	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	24,79	70,84	4,37	100,00
Kab. Pasaman	46,31	49,55	4,14	100,00
Kab. Solok Selatan	20,99	74,67	4,34	100,00
Kab. Dharmasraya	23,37	75,89	0,74	100,00
Kab. Pasaman Barat	41,26	53,40	5,34	100,00
Kota Padang	34,37	62,59	3,04	100,00
Kota Solok	24,97	56,62	18,41	100,00
Kota Sawahlunto	6,79	92,90	0,31	100,00
Kota Padang Panjang	52,11	42,06	5,82	100,00
Kota Bukittinggi	21,20	75,70	3,10	100,00
Kota Payakumbuh	43,54	53,07	3,39	100,00
Kota Pariaman	32,02	66,07	1,91	100,00
Sumatera Barat	29,40	66,76	3,84	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 148 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source
(1)	(2)	(3)
Kab. Kepulauan Mentawai	27,11	68,34
Kab. Pesisir Selatan	84,24	86,81
Kab. Solok	67,39	82,36
Kab. Sijunjung	72,70	69,60
Kab. Tanah Datar	84,26	87,17
Kab. Padang Pariaman	76,46	87,19
Kab. Agam	79,43	90,02
Kab. Lima Puluh Kota	66,16	69,39
Kab. Pasaman	66,74	81,44
Kab. Solok Selatan	73,25	80,11
Kab. Dharmasraya	73,07	71,50
Kab. Pasaman Barat	65,64	78,79
Kota Padang	95,81	98,64
Kota Solok	97,89	96,22
Kota Sawahlunto	93,51	90,46
Kota Padang Panjang	87,67	99,07
Kota Bukittinggi	97,36	99,95
Kota Payakumbuh	96,63	98,62
Kota Pariaman	85,68	94,48
Sumatera Barat	78,68	85,59

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berikut beberapa gambaran kondisi Provinsi Sumatera Barat dalam hal penyediaan air minum yang layak dan sumber air menurut Kabupaten/Kota dan menurut Provinsi pada tahun 2023.

Tabel 149 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Leding ¹ Piped Water ¹	Sumur Bor/ Pompa Pumped Water/ Borehole	Air Dalam Kemasan ² Bottled Water ²	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindungi Unprotect well	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	NA	NA	23,84	8,45	10,42	
2. Pesisir Selatan	5,22	5,13	60,22	13,51	1,48	
3. Solok	13,46	3,42	24,22	18,57	3,13	
4. Sijunjung	8,70	NA	51,74	9,55	3,87	
5. Tanah Datar	11,90	7,59	29,23	15,86	1,78	
6. Padang Pariaman	11,68	10,51	30,23	28,71	2,57	
7. Agam	7,89	7,64	35,85	23,82	1,94	
8. Lima Puluh Kota	6,64	6,51	33,80	16,17	2,08	
9. Pasaman	17,65	NA	32,92	12,73	2,28	
10. Solok Selatan	14,30	2,36	28,28	18,94	3,23	
11. Dharmasraya	-	17,89	44,93	19,45	10,37	
12. Pasaman Barat	12,81	14,92	25,87	31,75	13,27	
Kota/Municipality						
1. Padang	12,54	3,15	69,93	11,71	NA	
2. Solok	31,51	NA	64,68	1,47	NA	
3. Sawahlunto	7,95	NA	68,80	5,56	NA	
4. Padang Panjang	24,15	9,24	57,42	6,57	NA	
5. Bukittinggi	11,98	10,41	75,05	1,71	-	
6. Payakumbuh	43,79	2,35	48,91	4,00	NA	
7. Pariaman	8,54	15,89	52,27	19,47	2,17	
Sumatera Barat	2023	11,42	6,48	43,76	16,87	3,16
	2022	14,20	7,98	41,85	15,97	3,14
	2021	12,13	7,74	42,97	15,14	4,03
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Mata Air Terlindungi ³ Protected Spring ³	Air Permukaan Surface Water	Air Hujan Rainwater Collection	Lainnya Others	Jumlah Total	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	24,27	4,44	25,69	2,77	100,00	
2. Pesisir Selatan	12,23	1,31	NA	-	100,00	
3. Solok	35,46	1,17	NA	-	100,00	
4. Sijunjung	19,03	3,79	2,18	-	100,00	
5. Tanah Datar	31,61	0,98	NA	-	100,00	
6. Padang Pariaman	11,41	2,66	2,23	-	100,00	
7. Agam	19,98	NA	2,49	-	100,00	
8. Lima Puluh Kota	32,03	2,59	NA	-	100,00	
9. Pasaman	31,30	2,50	-	-	100,00	
10. Solok Selatan	26,87	5,72	NA	-	100,00	
11. Dharmasraya	6,69	NA	-	-	100,00	
12. Pasaman Barat	NA	0,82	-	-	100,00	
Kota/Municipality						
1. Padang	2,66	-	-	-	100,00	
2. Solok	1,44	-	-	-	100,00	
3. Sawahlunto	16,30	-	NA	-	100,00	
4. Padang Panjang	2,08	-	NA	-	100,00	
5. Bukittinggi	NA	-	NA	-	100,00	
6. Payakumbuh	0,79	-	-	-	100,00	
7. Pariaman	1,41	-	NA	-	100,00	
Sumatera Barat	2023	15,69	1,35	1,23	0,05	100,00
	2022	13,94	1,64	1,28	-	100,00
	2021	14,74	1,55	1,51	0,18	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 150 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled, Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	67,99	6,84	6,63	14,24	0,69	2,71	0,91	100,00
Sumatera Utara	54,82	15,82	18,56	6,91	0,83	2,14	0,92	100,00
Sumatera Barat	55,68	13,28	5,58	15,27	1,21	7,98	1,00	100,00
Riau	68,91	0,62	14,95	4,52	0,28	2,11	8,60	100,00
Jambi	41,43	17,33	7,15	20,88	4,70	2,53	5,99	100,00
Sumatera Selatan	35,55	35,24	7,52	18,07	0,85	1,12	1,65	100,00
Bengkulu	32,53	11,16	9,50	25,02	17,49	4,25	NA	100,00
Lampung	41,69	3,59	15,84	30,19	4,88	3,73	NA	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	74,07	0,85	8,59	12,63	3,19	0,52	NA	100,00
Kepulauan Riau	81,88	7,01	3,59	5,27	0,77	1,17	0,32	100,00
DKI Jakarta	79,39	7,64	12,57	0,18	-	0,11	NA	100,00
Jawa Barat	55,25	5,03	19,58	12,70	0,78	6,49	0,17	100,00
Jawa Tengah	34,06	18,15	19,93	17,92	1,27	8,26	0,40	100,00
DI Yogyakarta	27,58	7,14	29,49	30,40	1,77	3,18	0,43	100,00
Jawa Timur	46,41	8,36	24,45	12,53	0,30	7,75	0,19	100,00
Banten	67,19	2,62	23,38	3,79	1,06	1,76	0,20	100,00
Bali	52,40	17,47	7,86	3,91	0,17	17,53	0,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,67	15,44	20,20	18,60	0,98	9,78	0,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,58	31,91	14,11	18,91	1,37	5,32	0,79	100,00
Kalimantan Barat	40,89	4,02	0,95	1,22	2,45	3,96	46,50	100,00
Kalimantan Tengah	70,51	7,00	12,04	4,16	1,42	0,94	3,93	100,00
Kalimantan Selatan	44,83	37,33	4,62	6,50	3,28	0,14	3,30	100,00
Kalimantan Timur	81,64	14,50	1,35	0,87	0,23	0,37	1,03	100,00
Kalimantan Utara	85,26	4,57	1,69	0,99	-	1,50	5,99	100,00
Sulawesi Utara	64,01	9,72	9,52	9,17	1,57	5,36	0,65	100,00
Sulawesi Tengah	70,49	8,00	13,46	2,37	0,20	3,51	1,97	100,00
Sulawesi Selatan	56,87	20,75	12,74	4,75	0,60	3,08	1,21	100,00
Sulawesi Tenggara	65,17	11,11	11,60	6,34	0,60	3,73	1,45	100,00
Gorontalo	76,22	7,57	8,98	5,69	NA	1,14	-	100,00
Sulawesi Barat	55,40	13,91	12,80	9,39	NA	4,13	3,85	100,00
Maluku	46,15	15,32	9,62	9,27	0,58	17,65	1,41	100,00
Maluku Utara	44,46	36,76	2,96	10,03	0,73	2,01	3,05	100,00
Papua Barat	76,81	6,78	2,46	4,37	NA	2,61	6,53	100,00
Papua	73,76	11,38	3,57	1,74	1,00	4,83	3,71	100,00
Indonesia	53,15	10,40	17,44	11,40	0,99	5,39	1,23	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 151 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled, Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	29,95	8,32	10,61	30,32	4,06	12,90	3,84	100,00
Sumatera Utara	18,84	6,22	30,51	12,36	4,30	20,74	7,03	100,00
Sumatera Barat	31,81	9,54	7,38	18,47	5,11	23,42	4,27	100,00
Riau	45,59	0,36	13,31	13,92	2,51	4,03	20,29	100,00
Jambi	18,85	7,36	6,88	32,94	13,36	7,32	13,30	100,00
Sumatera Selatan	13,52	5,37	17,76	39,69	6,48	5,53	11,64	100,00
Bengkulu	5,27	11,43	17,31	27,69	22,39	13,85	2,07	100,00
Lampung	13,65	1,86	17,40	42,94	13,68	9,07	1,41	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	49,89	3,99	6,57	27,89	8,19	2,82	0,65	100,00
Kepulauan Riau	27,64	7,96	8,49	23,81	17,41	12,34	NA	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	26,92	3,34	14,39	24,25	5,36	24,54	1,20	100,00
Jawa Tengah	25,00	7,17	14,95	17,85	2,66	31,05	1,33	100,00
DI Yogyakarta	8,15	19,99	11,40	22,39	1,55	12,03	24,50	100,00
Jawa Timur	22,25	8,87	24,61	19,62	0,96	23,06	0,63	100,00
Banten	19,99	0,62	22,60	25,27	7,32	21,66	2,54	100,00
Bali	14,32	27,95	6,87	4,24	NA	36,71	9,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,16	9,94	25,03	21,13	1,77	18,43	0,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,22	10,50	9,20	17,64	4,36	47,42	8,66	100,00
Kalimantan Barat	13,30	1,42	4,68	6,32	3,82	20,91	49,54	100,00
Kalimantan Tengah	34,24	4,55	15,79	11,42	3,11	6,32	24,58	100,00
Kalimantan Selatan	30,42	17,17	16,38	10,93	7,65	4,42	13,03	100,00
Kalimantan Timur	73,66	5,59	2,43	4,72	1,30	5,09	7,22	100,00
Kalimantan Utara	53,05	6,91	NA	0,84	NA	9,02	29,26	100,00
Sulawesi Utara	35,48	8,93	7,96	18,64	2,41	24,37	2,21	100,00
Sulawesi Tengah	31,19	7,65	12,68	9,01	2,30	28,75	8,41	100,00
Sulawesi Selatan	22,22	7,37	23,92	19,59	3,32	19,84	3,74	100,00
Sulawesi Tenggara	27,21	10,88	15,80	20,15	2,01	20,01	3,94	100,00
Gorontalo	51,07	7,62	14,25	17,55	2,68	6,42	0,41	100,00
Sulawesi Barat	21,50	4,78	16,00	19,86	4,88	23,65	9,34	100,00
Maluku	9,13	6,36	8,29	27,03	4,32	38,93	5,96	100,00
Maluku Utara	17,05	14,35	4,90	28,85	4,44	21,97	8,44	100,00
Papua Barat	16,85	1,83	4,86	15,23	5,86	25,55	29,81	100,00
Papua	12,32	0,57	1,05	3,29	4,62	46,53	31,61	100,00
Indonesia	23,14	6,85	16,54	20,67	4,39	21,66	6,75	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 152 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled, Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	43,52	7,79	9,19	24,58	2,86	9,26	2,80	100,00
Sumatera Utara	39,25	11,66	23,73	9,27	2,33	10,19	3,57	100,00
Sumatera Barat	43,76	11,42	6,48	16,87	3,16	15,69	2,63	100,00
Riau	54,95	0,47	13,97	10,15	1,61	3,26	15,60	100,00
Jambi	26,49	10,73	6,97	28,86	10,42	5,70	10,83	100,00
Sumatera Selatan	21,70	16,46	13,96	31,67	4,39	3,89	7,93	100,00
Bengkulu	14,59	11,34	14,64	26,78	20,72	10,57	1,38	100,00
Lampung	22,95	2,44	16,88	38,71	10,76	7,30	0,97	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	64,33	2,11	7,78	18,77	5,21	1,44	0,36	100,00
Kepulauan Riau	75,76	7,11	4,14	7,36	2,65	2,43	0,55	100,00
DKI Jakarta	79,39	7,64	12,57	0,18	-	0,11	NA	100,00
Jawa Barat	49,03	4,66	18,44	15,24	1,79	10,45	0,40	100,00
Jawa Tengah	29,78	12,97	17,58	17,89	1,92	19,01	0,84	100,00
DI Yogyakarta	22,76	10,33	25,00	28,41	1,72	5,38	6,40	100,00
Jawa Timur	35,75	8,58	24,52	15,66	0,59	14,51	0,39	100,00
Banten	56,82	2,18	23,21	8,51	2,44	6,13	0,71	100,00
Bali	40,69	20,69	7,56	4,01	0,15	23,42	3,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,15	12,80	22,52	19,81	1,36	13,93	0,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	9,33	16,50	10,58	17,99	3,53	35,62	6,45	100,00
Kalimantan Barat	23,70	2,40	3,28	4,40	3,31	14,52	48,39	100,00
Kalimantan Tengah	50,07	5,62	14,15	8,25	2,37	3,97	15,57	100,00
Kalimantan Selatan	37,59	27,20	10,53	8,73	5,48	2,29	8,19	100,00
Kalimantan Timur	79,19	11,76	1,68	2,05	0,56	1,83	2,94	100,00
Kalimantan Utara	73,76	5,41	1,34	0,94	NA	4,18	14,30	100,00
Sulawesi Utara	51,40	9,37	8,83	13,36	1,94	13,76	1,34	100,00
Sulawesi Tengah	44,20	7,76	12,94	6,81	1,61	20,40	6,28	100,00
Sulawesi Selatan	38,23	13,55	18,75	12,73	2,06	12,10	2,57	100,00
Sulawesi Tenggara	41,73	10,97	14,19	14,87	1,47	13,78	2,99	100,00
Gorontalo	62,64	7,60	11,83	12,09	1,63	3,99	0,22	100,00
Sulawesi Barat	28,56	6,68	15,34	17,68	3,97	19,58	8,20	100,00
Maluku	24,60	10,10	8,84	19,61	2,76	30,03	4,05	100,00
Maluku Utara	25,27	21,07	4,32	23,20	3,33	15,98	6,82	100,00
Papua Barat	41,50	3,86	3,88	10,77	3,64	16,12	20,25	100,00
Papua	30,22	3,72	1,79	2,84	3,57	34,39	23,49	100,00
Indonesia	40,64	8,92	17,07	15,26	2,41	12,17	3,53	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 153 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban				Perdesaan/Rural				Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural			
	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	39,11	56,72	4,18	100,00	43,79	51,37	4,83	100,00	42,91	52,38	4,71	100,00
Sumatera Utara	44,61	51,55	3,84	100,00	41,13	55,14	3,73	100,00	42,36	53,87	3,77	100,00
Sumatera Barat	21,27	75,96	2,77	100,00	28,75	66,99	4,25	100,00	26,09	70,19	3,72	100,00
Riau	29,66	63,26	7,09	100,00	26,78	68,14	5,08	100,00	27,65	66,66	5,69	100,00
Jambi	24,28	73,84	1,88	100,00	21,27	76,62	2,12	100,00	21,96	75,98	2,06	100,00
Sumatera Selatan	42,14	55,44	2,43	100,00	35,94	62,28	1,78	100,00	37,12	60,98	1,90	100,00
Bengkulu	32,45	66,54	1,01	100,00	36,83	61,66	1,51	100,00	35,67	62,95	1,38	100,00
Lampung	31,58	66,43	1,99	100,00	28,82	69,88	1,30	100,00	29,50	69,03	1,47	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	26,23	72,73	1,04	100,00	23,26	72,73	4,01	100,00	24,59	72,73	2,68	100,00
Kepulauan Riau	23,81	72,27	3,92	100,00	14,63	77,42	7,94	100,00	19,94	74,44	5,62	100,00
DKI Jakarta	41,61	53,52	4,87	100,00	-	-	-	-	41,61	53,52	4,87	100,00
Jawa Barat	39,42	55,10	5,48	100,00	28,34	65,91	5,75	100,00	35,79	58,64	5,57	100,00
Jawa Tengah	28,87	68,24	2,89	100,00	18,67	77,63	3,70	100,00	23,19	73,47	3,34	100,00
DI Yogyakarta	24,65	73,19	2,16	100,00	13,09	85,19	1,72	100,00	22,40	75,53	2,07	100,00
Jawa Timur	31,80	64,68	3,52	100,00	24,18	71,47	4,35	100,00	27,64	68,38	3,97	100,00
Banten	46,27	49,31	4,42	100,00	39,23	51,14	9,62	100,00	43,32	50,08	6,60	100,00
Bali	16,37	79,13	4,50	100,00	22,41	71,29	6,29	100,00	18,90	75,85	5,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,46	55,65	1,89	100,00	32,68	63,05	4,27	100,00	37,06	59,74	3,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	28,28	61,49	10,24	100,00	22,83	71,43	5,74	100,00	23,73	69,79	6,48	100,00
Kalimantan Barat	17,30	79,11	3,59	100,00	16,34	77,35	6,31	100,00	16,46	77,58	5,96	100,00
Kalimantan Tengah	32,04	62,01	5,95	100,00	24,68	67,32	8,00	100,00	26,76	65,82	7,42	100,00
Kalimantan Selatan	26,02	73,98	-	100,00	28,48	68,30	3,22	100,00	27,82	69,82	2,36	100,00
Kalimantan Timur	16,72	65,88	17,40	100,00	23,86	70,15	5,99	100,00	21,58	68,79	9,63	100,00
Kalimantan Utara	26,77	50,04	23,19	100,00	16,89	55,77	27,33	100,00	20,95	53,42	25,63	100,00
Sulawesi Utara	30,09	63,73	6,18	100,00	31,43	59,91	8,66	100,00	30,93	61,35	7,72	100,00
Sulawesi Tengah	51,85	41,78	6,38	100,00	30,65	62,67	6,68	100,00	33,93	59,44	6,63	100,00
Sulawesi Selatan	28,95	67,29	3,76	100,00	23,98	72,94	3,08	100,00	25,04	71,73	3,22	100,00
Sulawesi Tenggara	12,18	83,17	4,65	100,00	19,90	75,43	4,66	100,00	18,42	76,92	4,66	100,00
Gorontalo	31,63	67,45	0,92	100,00	28,38	69,00	2,62	100,00	29,20	68,61	2,19	100,00
Sulawesi Barat	16,79	72,09	11,12	100,00	17,25	79,45	3,30	100,00	17,20	78,72	4,07	100,00
Maluku	24,34	67,73	7,93	100,00	22,96	68,57	8,47	100,00	23,31	68,36	8,33	100,00
Maluku Utara	29,20	63,48	7,32	100,00	38,86	53,38	7,77	100,00	37,88	54,40	7,72	100,00
Papua Barat	16,76	75,57	7,67	100,00	25,65	61,75	12,60	100,00	24,60	63,39	12,02	100,00
Papua	32,69	47,79	19,51	100,00	21,90	60,88	17,22	100,00	22,72	59,88	17,40	100,00
Indonesia	34,44	61,46	4,10	100,00	26,87	68,54	4,60	100,00	30,18	65,44	4,38	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 154 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll., 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,46	23,16	26,89	40,65	2,89	4,14	1,82	100,00
Sumatera Utara	0,62	31,18	41,24	20,86	2,44	1,92	1,74	100,00
Sumatera Barat	NA	37,05	16,69	31,24	3,10	8,75	3,17	100,00
Riau	0,23	4,81	65,99	19,38	3,68	1,47	4,44	100,00
Jambi	-	33,73	18,49	34,91	6,96	2,32	3,59	100,00
Sumatera Selatan	0,58	52,17	10,72	27,61	3,11	2,00	3,81	100,00
Bengkulu	-	21,07	15,29	36,29	23,54	3,36	0,45	100,00
Lampung	-	8,53	36,59	41,25	8,95	3,81	0,88	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	-	10,58	32,23	40,87	11,99	2,59	1,73	100,00
Kepulauan Riau	1,13	72,35	10,04	10,67	2,12	2,02	1,66	100,00
DKI Jakarta	0,31	35,89	61,91	1,66	NA	0,01	0,17	100,00
Jawa Barat	0,81	13,15	54,00	21,27	1,47	8,35	0,95	100,00
Jawa Tengah	0,26	22,15	39,42	26,02	3,05	7,89	1,20	100,00
DI Yogyakarta	NA	10,50	42,94	40,06	2,43	3,52	0,55	100,00
Jawa Timur	0,63	25,09	46,11	18,72	0,95	6,73	1,77	100,00
Banten	1,31	13,29	75,67	6,33	0,76	1,62	1,02	100,00
Bali	-	44,49	35,91	8,39	0,46	9,58	1,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,34	20,99	34,77	29,53	2,36	9,28	2,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,21	39,08	25,46	26,57	2,03	5,24	1,41	100,00
Kalimantan Barat	NA	44,76	12,74	8,87	9,14	4,59	19,89	100,00
Kalimantan Tengah	0,49	31,29	44,88	8,77	1,98	0,69	11,90	100,00
Kalimantan Selatan	NA	59,15	8,96	13,95	8,01	0,68	9,11	100,00
Kalimantan Timur	-	78,65	8,58	4,51	1,24	0,92	6,10	100,00
Kalimantan Utara	-	70,74	10,05	4,99	2,21	1,60	10,41	100,00
Sulawesi Utara	0,67	20,62	44,63	22,53	2,81	7,26	1,48	100,00
Sulawesi Tengah	0,74	25,74	53,70	6,94	1,01	8,86	3,01	100,00
Sulawesi Selatan	0,45	39,99	38,93	13,34	1,98	3,80	1,50	100,00
Sulawesi Tenggara	-	28,99	44,89	14,62	1,41	7,76	2,33	100,00
Gorontalo	-	28,66	46,25	22,29	0,83	1,98	-	100,00
Sulawesi Barat	NA	29,96	37,98	23,76	1,68	4,96	1,39	100,00
Maluku	0,36	33,03	24,36	18,63	2,12	20,40	1,10	100,00
Maluku Utara	NA	65,04	9,42	18,76	1,87	2,18	2,10	100,00
Papua Barat	NA	14,81	42,91	22,05	5,65	5,26	9,07	100,00
Papua	1,98	22,47	41,34	16,26	4,09	7,13	6,71	100,00
Indonesia	0,55	24,90	45,22	19,52	2,20	5,67	1,94	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 155 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll., 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,25	9,57	17,07	47,06	6,66	12,91	6,48	100,00
Sumatera Utara	0,22	6,92	42,73	15,26	4,97	20,20	9,70	100,00
Sumatera Barat	NA	15,59	12,45	28,80	6,58	27,95	8,61	100,00
Riau	0,52	2,77	44,92	28,56	10,44	2,51	10,28	100,00
Jambi	NA	11,43	16,01	36,17	17,14	7,29	11,87	100,00
Sumatera Selatan	0,20	7,08	20,75	38,98	11,65	5,81	15,54	100,00
Bengkulu	NA	10,09	14,78	24,19	34,07	12,77	4,03	100,00
Lampung	-	1,94	20,59	47,00	17,55	9,60	3,32	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	-	7,71	15,80	44,09	20,45	5,51	6,44	100,00
Kepulauan Riau	NA	26,93	12,70	25,48	14,41	15,55	4,86	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,37	6,17	28,05	31,93	3,69	27,07	2,71	100,00
Jawa Tengah	0,29	9,34	25,66	25,72	5,79	30,38	2,82	100,00
DI Yogyakarta	-	25,39	14,78	22,74	2,15	10,86	24,08	100,00
Jawa Timur	0,33	11,60	35,78	22,92	1,79	23,82	3,75	100,00
Banten	0,58	1,28	34,93	28,62	8,54	21,96	4,09	100,00
Bali	-	40,99	10,00	7,19	NA	30,29	11,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,21	11,42	33,18	30,47	3,52	19,27	1,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	NA	10,22	8,97	17,64	5,44	45,07	12,60	100,00
Kalimantan Barat	NA	3,39	13,29	9,95	13,85	20,90	38,59	100,00
Kalimantan Tengah	0,13	9,48	24,16	17,02	6,20	6,86	36,15	100,00
Kalimantan Selatan	NA	16,73	22,76	15,12	13,81	4,97	26,56	100,00
Kalimantan Timur	-	28,87	14,11	16,98	7,00	5,77	27,28	100,00
Kalimantan Utara	-	20,02	8,92	7,00	4,78	14,24	45,05	100,00
Sulawesi Utara	0,21	12,32	19,73	30,20	4,36	29,28	3,90	100,00
Sulawesi Tengah	0,42	10,97	21,39	18,13	3,35	34,30	11,44	100,00
Sulawesi Selatan	0,12	9,30	33,82	26,30	5,66	21,43	3,36	100,00
Sulawesi Tenggara	-	16,42	23,91	27,34	3,78	24,74	3,80	100,00
Gorontalo	NA	19,05	33,21	28,31	5,47	11,89	1,88	100,00
Sulawesi Barat	NA	5,11	25,96	26,91	7,02	24,44	10,52	100,00
Maluku	NA	7,82	11,04	29,07	9,98	36,66	5,41	100,00
Maluku Utara	NA	17,07	6,99	35,29	8,36	23,26	8,96	100,00
Papua Barat	NA	2,70	12,34	20,65	10,92	26,88	26,46	100,00
Papua	0,12	0,52	3,03	6,68	5,55	37,92	46,19	100,00
Indonesia	0,23	9,38	26,15	26,49	6,87	22,01	8,87	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 156 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/DII., 2023

Provinsi Province	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung Protected, Unprotected Spring	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya Surface Water, Rain Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,32	14,42	20,58	44,77	5,31	9,78	4,82	100,00
Sumatera Utara	0,45	20,68	41,88	18,44	3,53	9,83	5,19	100,00
Sumatera Barat	NA	26,34	14,57	30,02	4,84	18,33	5,89	100,00
Riau	0,40	3,59	53,38	24,88	7,73	2,09	7,93	100,00
Jambi	NA	18,98	16,85	35,74	13,69	5,61	9,07	100,00
Sumatera Selatan	0,34	23,82	17,02	34,76	8,48	4,40	11,19	100,00
Bengkulu	NA	13,84	14,96	28,32	30,47	9,56	2,80	100,00
Lampung	-	4,13	25,90	45,09	14,70	7,68	2,51	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	-	9,43	25,61	42,17	15,40	3,77	3,63	100,00
Kepulauan Riau	1,01	67,23	10,34	12,34	3,51	3,55	2,02	100,00
DKI Jakarta	0,31	35,89	61,91	1,66	NA	0,01	0,17	100,00
Jawa Barat	0,71	11,62	48,31	23,61	1,95	12,46	1,34	100,00
Jawa Tengah	0,28	16,11	32,93	25,88	4,34	18,50	1,96	100,00
DI Yogyakarta	NA	14,20	35,94	35,76	2,36	5,34	6,39	100,00
Jawa Timur	0,50	19,14	41,55	20,58	1,32	14,27	2,65	100,00
Banten	1,15	10,65	66,72	11,23	2,47	6,09	1,69	100,00
Bali	-	43,42	27,95	8,02	0,37	15,95	4,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,28	16,40	34,01	29,98	2,92	14,07	2,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,10	18,31	13,59	20,14	4,49	33,91	9,47	100,00
Kalimantan Barat	NA	18,98	13,08	9,54	12,07	14,75	31,54	100,00
Kalimantan Tengah	0,29	19,00	33,20	13,42	4,36	4,16	25,57	100,00
Kalimantan Selatan	NA	37,83	15,90	14,54	10,93	2,84	17,88	100,00
Kalimantan Timur	-	63,32	10,28	8,35	3,01	2,41	12,62	100,00
Kalimantan Utara	-	52,63	9,64	5,71	3,13	6,12	22,77	100,00
Sulawesi Utara	0,47	16,95	33,62	25,92	3,49	17,00	2,55	100,00
Sulawesi Tengah	0,52	15,86	32,08	14,43	2,58	25,88	8,65	100,00
Sulawesi Selatan	0,27	23,48	36,18	20,32	3,96	13,29	2,50	100,00
Sulawesi Tenggara	-	21,23	31,93	22,48	2,88	18,25	3,24	100,00
Gorontalo	NA	23,47	39,21	25,54	3,33	7,33	1,01	100,00
Sulawesi Barat	NA	10,28	28,46	26,26	5,91	20,39	8,62	100,00
Maluku	0,16	18,36	16,61	24,71	6,69	29,86	3,60	100,00
Maluku Utara	0,24	31,46	7,72	30,33	6,41	16,94	6,90	100,00
Papua Barat	0,13	7,68	24,90	21,23	8,75	17,99	19,31	100,00
Papua	0,66	6,92	14,19	9,47	5,13	28,95	34,69	100,00
Indonesia	0,42	18,43	37,27	22,43	4,14	12,48	4,83	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 157 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/DII. dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban				Perdesaan/Rural				Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural			
	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu Unknown	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	34,80	60,75	4,45	100,00	43,67	51,77	4,56	100,00	40,74	54,74	4,52	100,00
Sumatera Utara	38,59	54,70	6,70	100,00	42,96	53,65	3,39	100,00	40,73	54,19	5,09	100,00
Sumatera Barat	29,05	67,77	3,18	100,00	29,68	65,96	4,36	100,00	29,40	66,76	3,84	100,00
Riau	34,44	59,90	5,66	100,00	32,26	63,60	4,14	100,00	33,16	62,07	4,77	100,00
Jambi	25,41	71,62	2,97	100,00	21,85	75,49	2,66	100,00	22,90	74,35	2,75	100,00
Sumatera Selatan	42,59	54,78	2,63	100,00	35,88	62,13	1,98	100,00	37,56	60,30	2,14	100,00
Bengkulu	31,66	66,53	1,81	100,00	35,37	63,09	1,54	100,00	34,17	64,20	1,63	100,00
Lampung	31,51	65,57	2,92	100,00	29,61	68,97	1,42	100,00	30,22	67,87	1,91	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	28,16	69,89	1,96	100,00	25,05	70,93	4,02	100,00	26,92	70,30	2,78	100,00
Kepulauan Riau	28,82	65,88	5,30	100,00	20,40	70,89	8,71	100,00	26,65	67,17	6,18	100,00
DKI Jakarta	34,15	48,69	17,16	100,00	-	-	-	-	34,15	48,69	17,16	100,00
Jawa Barat	38,90	55,08	6,02	100,00	33,67	60,63	5,70	100,00	37,70	56,36	5,94	100,00
Jawa Tengah	31,25	65,18	3,57	100,00	20,28	76,22	3,50	100,00	25,70	70,76	3,53	100,00
DI Yogyakarta	24,22	70,81	4,97	100,00	12,37	86,74	0,89	100,00	22,35	73,33	4,32	100,00
Jawa Timur	33,31	63,42	3,27	100,00	23,81	72,22	3,97	100,00	28,76	67,63	3,60	100,00
Banten	43,75	48,37	7,88	100,00	39,48	49,26	11,27	100,00	42,73	48,58	8,69	100,00
Bali	28,90	67,55	3,55	100,00	26,71	68,54	4,75	100,00	28,28	67,83	3,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,06	56,72	2,22	100,00	33,18	63,02	3,79	100,00	37,03	59,95	3,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,64	58,85	11,52	100,00	23,62	70,67	5,72	100,00	25,00	67,94	7,05	100,00
Kalimantan Barat	32,42	61,47	6,11	100,00	22,71	72,78	4,51	100,00	25,33	69,73	4,94	100,00
Kalimantan Tengah	34,88	58,04	7,08	100,00	29,05	65,10	5,86	100,00	31,65	61,95	6,40	100,00
Kalimantan Selatan	24,62	74,57	0,81	100,00	27,80	69,84	2,36	100,00	26,67	71,52	1,81	100,00
Kalimantan Timur	22,27	69,25	8,47	100,00	18,63	73,13	8,25	100,00	20,23	71,43	8,34	100,00
Kalimantan Utara	37,06	53,39	9,56	100,00	21,64	59,85	18,51	100,00	29,24	56,67	14,09	100,00
Sulawesi Utara	28,91	63,82	7,27	100,00	34,06	57,54	8,40	100,00	31,29	60,92	7,79	100,00
Sulawesi Tengah	35,76	53,67	10,57	100,00	31,76	61,52	6,72	100,00	33,01	59,08	7,92	100,00
Sulawesi Selatan	31,85	60,92	7,23	100,00	24,92	71,94	3,14	100,00	27,44	67,94	4,63	100,00
Sulawesi Tenggara	19,36	72,20	8,44	100,00	19,19	76,04	4,76	100,00	19,25	74,71	6,04	100,00
Gorontalo	33,44	65,61	0,95	100,00	27,89	69,21	2,89	100,00	30,31	67,64	2,05	100,00
Sulawesi Barat	24,93	66,07	9,00	100,00	20,75	75,53	3,72	100,00	21,49	73,87	4,64	100,00
Maluku	31,68	61,09	7,23	100,00	25,82	65,83	8,35	100,00	27,88	64,16	7,96	100,00
Maluku Utara	32,85	59,67	7,48	100,00	39,68	52,59	7,73	100,00	38,60	53,71	7,69	100,00
Papua Barat	28,37	58,17	13,46	100,00	29,42	59,50	11,07	100,00	28,97	58,93	12,10	100,00
Papua	32,74	44,47	22,79	100,00	26,10	56,79	17,12	100,00	28,41	52,51	19,09	100,00
Indonesia	35,27	58,79	5,94	100,00	28,37	67,20	4,43	100,00	32,20	62,54	5,27	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 158 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, Sumber Air Minum Bersih, dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban		Perdesaan/Rural		Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural	
	Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source	Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source	Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	88,14	95,05	64,86	86,79	73,17	89,74
Sumatera Utara	84,60	96,20	56,10	86,93	72,27	92,19
Sumatera Barat	89,16	93,75	68,15	77,41	78,68	85,59
Riau	82,66	95,69	66,01	86,97	72,70	90,47
Jambi	80,79	91,57	60,64	74,11	67,47	80,02
Sumatera Selatan	85,32	93,67	57,04	83,37	67,54	87,19
Bengkulu	69,82	79,33	49,46	69,84	56,42	73,08
Lampung	78,62	91,81	62,57	78,29	67,89	82,78
Kepulauan Bangka Belitung	90,21	86,07	79,31	75,07	85,82	81,64
Kepulauan Riau	95,63	94,78	65,87	71,03	92,27	92,10
DKI Jakarta	93,92	99,42	-	-	93,92	99,42
Jawa Barat	81,18	96,18	66,43	85,62	77,94	93,86
Jawa Tengah	82,93	96,43	78,61	90,76	80,89	93,76
DI Yogyakarta	80,29	97,10	64,46	95,44	76,35	96,69
Jawa Timur	83,39	97,53	76,98	94,10	80,56	96,01
Banten	83,47	96,22	49,98	81,33	76,11	92,95
Bali	92,83	99,12	74,22	96,50	87,11	98,31
Nusa Tenggara Barat	76,65	96,50	73,23	95,52	75,01	96,03
Nusa Tenggara Timur	81,51	96,06	60,38	85,34	66,30	88,35
Kalimantan Barat	48,80	89,21	35,47	77,76	40,49	82,08
Kalimantan Tengah	87,63	88,92	59,79	69,05	71,94	77,72
Kalimantan Selatan	90,09	86,18	67,27	66,50	78,62	76,29
Kalimantan Timur	97,73	95,49	87,31	70,85	94,53	87,90
Kalimantan Utara	91,92	96,97	64,75	77,99	82,22	90,19
Sulawesi Utara	89,35	95,46	73,51	92,99	82,35	94,37
Sulawesi Tengah	86,47	93,67	68,15	83,48	74,21	86,85
Sulawesi Selatan	91,20	96,55	72,58	88,31	81,18	92,12
Sulawesi Tenggara	94,24	96,28	78,91	93,88	84,77	94,80
Gorontalo	94,31	99,28	83,97	93,21	88,73	96,00
Sulawesi Barat	88,23	92,91	66,63	76,42	71,13	79,86
Maluku	86,03	97,92	64,78	89,44	73,66	92,98
Maluku Utara	90,66	97,01	58,60	85,58	68,22	89,01
Papua Barat	90,61	92,78	41,43	73,76	61,64	81,57
Papua	88,88	90,71	21,08	56,54	40,83	66,49
Indonesia	84,14	96,02	66,95	85,70	76,97	91,72

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak di Sumatera Barat. Ini membuktikan bahwa program Pemerintah dalam pengadaan air bersih oleh OPD terkait dinilai cukup berhasil. Peningkatan hampir mencapai 20%.

Data BPS tahun 2023, secara nasional menunjukkan sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek, air isi ulang (40,64%), sumur bor/pompa (17,07%) dan sumur terlindungi (15,26%). Daerah perkotaan air kemasan bermerek, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan (53,15%) dan daerah perdesaan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan air kemasan bermerek, air isi ulang (23,14%). Namun di daerah perdesaan, penggunaan air sumur terlindungi juga mendominasi, tidak jauh berbeda antara penggunaan air kemasan sekitar 20,67% seperti terlihat dalam tabel 150-152

Secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 91,72%. Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 85,59% jauh berada dibawah rata-rata nasional. Ini artinya 8 dari 10 rumah tangga di Sumatera Barat yang memiliki akses air minum yang layak

Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang & ledeng untuk minum di Sumatera Barat bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas ini sebesar 43,76 persen di tahun 2023, menurun dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 56,05 persen. Perubahan juga terjadi baik di perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas ini sebanyak 55,68 persen sedangkan di perdesaan sebesar 31,81 persen di tahun 2023

5.9.2 Akses Terhadap Sanitasi Layak

Salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman adalah dengan menjaga sanitasi yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penunjang kebutuhan pokok setiap individu tak terkecuali anak dalam tumbuh kembangnya. Ketersediaan sanitasi layak menciptakan

lingkungan sehat yang mampu mencegah anak-anak menderita beragam penyakit

Sanitasi layak menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam tumbuh kembang anak. Adapun syarat sanitasi layak menurut BPS diantaranya meliputi fasilitas buang air bersih baik sendiri maupun bersama; jenis kloset leher angsa; serta tempat pembuangan tinja berupa septi tank/ SPAL.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), jamban yang sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan tersebut adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya

Tabel 159 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Fasilitas/Have Facilities				Tidak Ada Fasilitas No Facility	Jumlah Total
	Sendiri Private/Not Shared	Bersama Rumah Tangga Tertentu Shared with Certain Household	MCK Komunal, MCK Umum Communal, Public Facility	Tidak Menggunakan Not Using		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	78,60	6,08	1,03	0,40	13,89	100,00
Kab. Pesisir Selatan	82,66	3,55	0,10	0,20	13,48	100,00
Kab. Solok	73,74	4,09	4,14	0,18	17,85	100,00
Kab. Sijunjung	80,47	5,84	0,34	0,38	12,97	100,00
Kab. Tanah Datar	78,53	10,93	6,40	-	4,14	100,00
Kab. Padang Pariaman	85,55	3,13	2,72	-	8,60	100,00
Kab. Agam	83,94	9,84	1,84	0,29	4,09	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	77,76	9,40	1,29	0,16	11,38	100,00
Kab. Pasaman	66,77	5,38	6,90	0,02	20,93	100,00
Kab. Solok Selatan	78,74	2,92	0,89	0,25	17,21	100,00
Kab. Dharmasraya	87,51	4,72	0,64	-	7,13	100,00
Kab. Pasaman Barat	82,90	2,48	0,42	0,20	14,01	100,00
Kota Padang	78,03	17,30	0,77	-	3,90	100,00
Kota Solok	92,57	6,56	0,26	0,08	0,53	100,00
Kota Sawahlunto	91,24	6,20	2,48	-	0,08	100,00
Kota Padang Panjang	86,35	11,66	0,89	-	1,10	100,00
Kota Bukittinggi	90,87	8,62	0,51	-	-	100,00
Kota Payakumbuh	93,64	3,92	0,92	0,29	1,21	100,00
Kota Pariaman	84,19	12,48	2,04	0,20	1,08	100,00
Sumatera Barat	80,84	7,92	1,93	0,13	9,18	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 160 Persentase Rumah Tangga¹ menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Leher Angsa Swan Trine	Plengsengan Flushing to Pit Latrine	Cemplung/Cubluk Plunged Hole	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	97,51	1,75	0,74	100,00
Kab. Pesisir Selatan	98,03	0,66	1,31	100,00
Kab. Solok	93,37	0,80	5,83	100,00
Kab. Sijunjung	95,75	0,67	3,58	100,00
Kab. Tanah Datar	96,05	2,15	1,80	100,00
Kab. Padang Pariaman	96,55	0,70	2,75	100,00
Kab. Agam	95,94	1,12	2,94	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	89,57	0,69	9,74	100,00
Kab. Pasaman	96,13	0,21	3,66	100,00
Kab. Solok Selatan	92,68	2,93	4,40	100,00
Kab. Dharmasraya	98,74	0,17	1,08	100,00
Kab. Pasaman Barat	96,38	1,38	2,24	100,00
Kota Padang	99,02	0,09	0,89	100,00
Kota Solok	99,62	0,36	0,02	100,00
Kota Sawahlunto	99,31	0,23	0,46	100,00
Kota Padang Panjang	99,36	0,14	0,50	100,00
Kota Bukittinggi	99,25	0,75	-	100,00
Kota Payakumbuh	99,60	0,21	0,19	100,00
Kota Pariaman	97,94	0,37	1,69	100,00
Sumatera Barat	96,54	0,80	2,66	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 161 Persentase Rumah Tangga¹ menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tangki Septik dan IPAL Septic Tank and Sewage System	Kolam/Sawah/ Sungai/ Danau/Laut Pond/Rice Field/ River/ Lake/Sea	Lubang Tanah Land Hole	Pantai/Tanah Lapang/ Kebun, Lainnya Beach/Open Field/ Yard, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	77,33	4,46	18,08	0,14	100,00
Kab. Pesisir Selatan	89,60	7,32	3,08	-	100,00
Kab. Solok	73,47	18,38	7,49	0,67	100,00
Kab. Sijunjung	78,62	12,39	8,99	-	100,00
Kab. Tanah Datar	45,96	14,70	39,35	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	65,73	26,93	7,22	0,12	100,00
Kab. Agam	72,04	9,98	17,12	0,86	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	62,05	27,11	10,85	-	100,00
Kab. Pasaman	63,25	30,57	5,95	0,23	100,00
Kab. Solok Selatan	62,65	28,56	8,79	-	100,00
Kab. Dharmasraya	73,08	5,67	21,25	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	55,36	10,60	33,90	0,13	100,00
Kota Padang	81,95	16,68	0,78	0,59	100,00
Kota Solok	95,46	4,35	0,18	-	100,00
Kota Sawahlunto	92,38	7,24	0,33	0,06	100,00
Kota Padang Panjang	77,95	20,52	1,14	0,38	100,00
Kota Bukittinggi	90,35	8,58	-	1,07	100,00
Kota Payakumbuh	88,46	7,49	3,06	0,98	100,00
Kota Pariaman	88,50	10,31	1,19	-	100,00
Sumatera Barat	72,72	15,40	11,56	0,32	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 162 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2023

Provinsi Province	Perkotaan/Urban						Perdesaan/Rural						Perkotaan + Perdesaan/Urban + Rural								
	Ada Fasilitas/Have Facility					Tidak Ada Fasilitas No Facility	Jumlah Total	Ada Fasilitas/Have Facility					Tidak Ada Fasilitas No Facility	Jumlah Total	Ada Fasilitas/Have Facility					Tidak Ada Fasilitas No Facility	Jumlah Total
	Sendiri Private/Not Shared	Bersama Rute Tertentu Shared with Certain household	MCK Komunal, MCK Umum Communal, Public Facility	Tidak Menggunakan Not Using	Sendiri Private/Not Shared			Bersama Rute Tertentu Shared with Certain household	MCK Komunal, MCK Umum Communal, Public Facility	Tidak Menggunakan Not Using	Sendiri Private/Not Shared	Bersama Rute Tertentu Shared with Certain household			MCK Komunal, MCK Umum Communal, Public Facility	Tidak Menggunakan Not Using					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Aceh	89,98	6,13	1,02	0,04	2,84	100,00	80,28	4,34	2,99	0,23	12,16	100,00	83,74	4,98	2,29	0,16	8,84	100,00			
Sumatera Utara	91,25	7,03	0,37	0,01	1,34	100,00	85,15	3,67	1,89	0,11	9,18	100,00	88,61	5,58	1,03	0,05	4,73	100,00			
Sumatera Barat	84,51	9,22	1,33	0,02	4,92	100,00	77,15	6,62	2,54	0,24	13,45	100,00	80,84	7,92	1,93	0,13	9,18	100,00			
Riau	95,78	3,43	0,05	0,02	0,72	100,00	93,06	2,55	0,48	0,06	3,85	100,00	94,15	2,90	0,31	0,04	2,59	100,00			
Jambi	92,98	4,73	0,38	-	1,91	100,00	85,42	5,71	1,62	0,06	7,19	100,00	87,98	5,38	1,20	0,04	5,40	100,00			
Sumatera Selatan	91,97	5,82	1,02	0,10	1,08	100,00	82,16	6,40	3,58	0,11	7,75	100,00	85,81	6,19	2,63	0,10	5,28	100,00			
Bengkulu	94,63	4,35	0,06	0,09	0,86	100,00	88,46	3,94	0,32	0,09	7,20	100,00	90,57	4,08	0,23	0,09	5,03	100,00			
Lampung	94,43	4,21	0,57	0,04	0,74	100,00	92,74	4,70	0,51	0,12	1,93	100,00	93,30	4,53	0,53	0,10	1,54	100,00			
Kep. Bangka Belitung	96,65	1,87	0,54	0,05	0,89	100,00	92,59	3,32	0,91	0,25	2,94	100,00	95,02	2,45	0,69	0,13	1,72	100,00			
Kepulauan Riau	95,99	3,70	0,14	-	0,17	100,00	92,00	4,88	0,36	-	2,76	100,00	95,54	3,83	0,17	-	0,46	100,00			
DKI Jakarta	88,50	9,55	1,82	-	0,13	100,00	-	-	-	-	-	-	88,50	9,55	1,82	-	0,13	100,00			
Jawa Barat	87,60	8,69	1,79	0,09	1,83	100,00	84,10	7,33	3,95	0,06	4,57	100,00	86,83	8,39	2,27	0,08	2,43	100,00			
Jawa Tengah	89,49	7,55	0,82	0,06	2,08	100,00	89,30	6,44	0,50	0,05	3,71	100,00	89,40	7,03	0,67	0,05	2,85	100,00			
DI Yogyakarta	82,90	15,54	1,04	-	0,51	100,00	89,67	9,34	0,17	-	0,82	100,00	84,58	14,00	0,82	-	0,59	100,00			
Jawa Timur	87,79	7,64	0,94	0,14	3,49	100,00	82,07	9,58	0,95	0,21	7,20	100,00	85,26	8,49	0,95	0,17	5,13	100,00			
Banten	93,57	3,61	0,80	0,05	1,98	100,00	77,73	5,32	1,63	0,11	15,20	100,00	90,09	3,98	0,98	0,06	4,88	100,00			
Bali	88,42	10,35	0,07	-	1,15	100,00	78,61	15,35	0,14	0,07	5,83	100,00	85,41	11,89	0,09	0,02	2,59	100,00			
Nusa Tenggara Barat	81,67	11,37	1,35	0,12	5,49	100,00	76,76	10,96	0,66	0,28	11,34	100,00	79,32	11,17	1,02	0,20	8,30	100,00			
Nusa Tenggara Timur	84,76	12,50	1,35	-	1,40	100,00	82,51	8,65	1,27	0,22	7,35	100,00	83,14	9,73	1,29	0,16	5,68	100,00			
Kalimantan Barat	92,98	5,18	0,63	0,05	1,15	100,00	84,45	4,07	2,44	0,06	8,97	100,00	87,67	4,49	1,76	0,06	6,02	100,00			
Kalimantan Tengah	91,65	4,13	3,46	-	0,76	100,00	80,92	8,19	6,99	0,09	3,80	100,00	85,60	6,42	5,45	0,05	2,47	100,00			
Kalimantan Selatan	92,07	4,88	2,09	0,02	0,94	100,00	83,30	9,45	4,37	0,07	2,81	100,00	87,66	7,18	3,24	0,05	1,88	100,00			
Kalimantan Timur	94,61	4,43	0,52	-	0,43	100,00	91,27	2,79	3,47	0,18	2,28	100,00	93,58	3,93	1,43	0,06	1,00	100,00			
Kalimantan Utara	94,52	4,00	0,82	-	0,66	100,00	90,53	5,53	1,71	0,10	2,13	100,00	93,10	4,55	1,14	0,04	1,18	100,00			
Sulawesi Utara	82,62	13,86	0,48	0,02	3,02	100,00	81,23	7,23	2,55	0,17	8,81	100,00	82,00	10,93	1,40	0,09	5,58	100,00			
Sulawesi Tengah	87,73	5,97	2,16	0,14	4,00	100,00	75,36	7,19	3,96	0,42	13,07	100,00	79,45	6,79	3,37	0,33	10,07	100,00			
Sulawesi Selatan	91,63	6,49	0,85	0,04	0,99	100,00	89,70	6,20	0,78	0,09	3,24	100,00	90,59	6,33	0,81	0,06	2,20	100,00			
Sulawesi Tenggara	89,87	6,85	0,82	0,01	2,45	100,00	85,52	7,60	1,37	0,11	5,40	100,00	87,18	7,31	1,16	0,07	4,27	100,00			
Gorontalo	77,05	14,25	4,90	-	3,80	100,00	66,48	10,54	8,77	0,18	14,04	100,00	71,34	12,24	6,99	0,10	9,33	100,00			
Sulawesi Barat	86,85	6,51	1,68	-	4,95	100,00	81,91	6,34	1,84	0,21	9,70	100,00	82,94	6,37	1,81	0,17	8,71	100,00			
Maluku	86,92	8,19	1,74	-	3,15	100,00	74,66	4,43	5,29	0,17	15,46	100,00	79,78	6,00	3,80	0,10	10,31	100,00			
Maluku Utara	88,40	7,80	2,57	-	1,23	100,00	74,33	7,24	11,28	0,12	7,03	100,00	78,55	7,41	8,67	0,09	5,29	100,00			
Papua Barat	90,45	5,63	3,03	-	0,90	100,00	71,00	7,87	16,01	0,30	4,82	100,00	78,99	6,95	10,68	0,18	3,21	100,00			
Papua	88,45	5,80	4,25	0,19	1,32	100,00	47,00	10,13	9,20	0,57	33,10	100,00	59,07	8,87	7,76	0,46	23,85	100,00			
Indonesia	89,13	7,65	1,20	0,07	1,95	100,00	83,68	6,96	2,10	0,14	7,12	100,00	86,86	7,36	1,58	0,10	4,10	100,00			

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 163 Persentase Rumah Tangga¹ di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2023

Provinsi Province	Leher Angsa Swan Trine	Pengsengan Flushing to Pit Latrine	Cemplung/Cubluk Plunged Hole	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,69	0,26	1,06	100,00
Sumatera Utara	97,43	1,06	1,51	100,00
Sumatera Barat	98,14	0,37	1,49	100,00
Riau	96,42	1,17	2,41	100,00
Jambi	96,92	0,72	2,36	100,00
Sumatera Selatan	97,27	1,13	1,60	100,00
Bengkulu	96,90	1,39	1,71	100,00
Lampung	97,77	0,39	1,85	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	96,13	1,81	2,06	100,00
Kepulauan Riau	98,81	0,20	0,99	100,00
DKI Jakarta	98,79	0,96	0,25	100,00
Jawa Barat	98,60	0,96	0,44	100,00
Jawa Tengah	98,69	0,57	0,74	100,00
DI Yogyakarta	99,37	0,49	0,14	100,00
Jawa Timur	97,04	0,75	2,21	100,00
Banten	97,47	0,85	1,69	100,00
Bali	98,93	0,88	0,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	96,85	1,53	1,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,33	3,20	1,47	100,00
Kalimantan Barat	98,53	0,63	0,84	100,00
Kalimantan Tengah	93,01	2,05	4,94	100,00
Kalimantan Selatan	95,91	0,34	3,75	100,00
Kalimantan Timur	98,21	0,53	1,27	100,00
Kalimantan Utara	95,37	0,33	4,31	100,00
Sulawesi Utara	96,64	2,36	1,00	100,00
Sulawesi Tengah	95,48	1,34	3,18	100,00
Sulawesi Selatan	98,46	1,14	0,40	100,00
Sulawesi Tenggara	95,79	2,09	2,12	100,00
Gorontalo	99,57	0,22	0,21	100,00
Sulawesi Barat	98,10	1,57	0,33	100,00
Maluku	97,14	1,27	1,59	100,00
Maluku Utara	97,83	0,73	1,44	100,00
Papua Barat	94,53	1,78	3,69	100,00
Papua	94,52	2,96	2,52	100,00
Indonesia	97,92	0,90	1,18	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Tabel 164 Persentase Rumah Tangga¹ di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2023

Provinsi Province	Leher Angsa Swan Trine	Piengsengan Flushing to Pit Latrine	Cemplung/Cubluk Plunged Hole	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	95,95	0,96	3,09	100,00
Sumatera Utara	93,78	2,80	3,42	100,00
Sumatera Barat	94,75	1,28	3,97	100,00
Riau	88,74	5,05	6,20	100,00
Jambi	93,43	1,53	5,04	100,00
Sumatera Selatan	88,09	2,76	9,15	100,00
Bengkulu	94,60	2,09	3,31	100,00
Lampung	92,73	2,09	5,18	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	96,23	1,73	2,05	100,00
Kepulauan Riau	74,02	0,50	25,49	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	95,16	2,00	2,83	100,00
Jawa Tengah	96,64	1,17	2,19	100,00
DI Yogyakarta	98,83	0,04	1,13	100,00
Jawa Timur	90,31	2,05	7,64	100,00
Banten	96,72	1,44	1,84	100,00
Bali	99,16	0,76	0,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	95,84	2,71	1,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,00	10,40	6,59	100,00
Kalimantan Barat	94,76	2,36	2,88	100,00
Kalimantan Tengah	82,53	1,70	15,77	100,00
Kalimantan Selatan	88,59	1,14	10,28	100,00
Kalimantan Timur	91,81	2,11	6,08	100,00
Kalimantan Utara	92,27	2,43	5,30	100,00
Sulawesi Utara	96,77	2,22	1,02	100,00
Sulawesi Tengah	94,91	0,91	4,17	100,00
Sulawesi Selatan	98,82	0,54	0,64	100,00
Sulawesi Tenggara	94,99	1,46	3,55	100,00
Gorontalo	97,62	0,68	1,70	100,00
Sulawesi Barat	95,80	1,79	2,41	100,00
Maluku	94,50	2,49	3,01	100,00
Maluku Utara	93,80	2,25	3,95	100,00
Papua Barat	94,97	0,97	4,05	100,00
Papua	44,27	17,15	38,58	100,00
Indonesia	92,59	2,35	5,06	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasikan menjadi jamban komunal, jamban sehat semi permanen dan jamban sehat permanen. Jamban komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). Jamban sehat semi permanen adalah jamban yang belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak didalam rumah. Jamban sehat permanen adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak didalam rumah.

Tabel 165 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kabupaten/Regency</i>					
1. Kep. Mentawai	51,29	61,73	71,05	69,09	72,28
2. Pesisir Selatan	66,93	71,51	71,40	73,68	76,82
3. Solok	44,29	50,36	47,63	57,28	59,75
4. Sijunjung	68,69	64,95	72,63	74,14	72,18
5. Tanah Datar	61,06	62,86	53,73	57,49	62,99
6. Padang Pariaman	50,58	59,72	55,86	59,76	61,77
7. Agam	67,19	71,58	77,25	74,84	77,04
8. Lima Puluh Kota	47,02	53,86	55,69	64,19	60,64
9. Pasaman	40,24	40,90	45,26	42,81	46,74
10. Solok Selatan	51,14	59,17	58,57	55,33	54,69
11. Dharmasraya	71,27	84,16	82,71	81,09	81,57
12. Pasaman Barat	61,77	63,65	70,28	68,98	71,64
<i>Kota/Municipality</i>					
1. Padang	79,98	82,50	80,13	76,10	78,56
2. Solok	85,63	89,19	91,40	92,47	94,35
3. Sawahlunto	81,98	80,77	86,45	86,86	90,18
4. Padang Panjang	71,59	72,15	73,04	77,42	76,31
5. Bukittinggi	86,32	90,25	89,93	85,09	89,32
6. Payakumbuh	84,35	87,75	89,49	87,10	87,75
7. Pariaman	77,71	81,81	79,56	82,91	84,18
Sumatera Barat	63,98	68,11	68,68	69,27	70,97

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Di Sumatera Barat, rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar mengalami peningkatan dari 80,68 persen di tahun 2022 menjadi 80,84 persen di tahun 2023. Peningkatan ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Jika dibandingkan rumah tangga dengan fasilitas perumahan yang memiliki pembuangan akhir tinja dengan tangki, terjadi penurunan sedikit yakni dari 73,89 persen di tahun 2022 menjadi 72,72 persen di tahun 2023.

Dari data Susenas Maret 2023 diketahui bahwa sebesar 90,82 persen rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, Pihak yang melakukan pengosongan dengan persentase tertinggi dari rumah tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT) tangki septik yang dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir adalah pihak swasta (70,22 persen), diikuti dengan anggota rumah tangga (11,80 persen), pemerintah daerah (6,28 persen), dan perusahaan daerah (6,17 persen). Cukup rendahnya persentase pengosongan/penyedotan tangki septik oleh pemerintah daerah menunjukkan perlunya peningkatan layanan dan promosi yang lebih giat pada masyarakat agar dapat memperoleh layanan pengelolaan lumpur tinja yang lebih terjangkau dan terjamin.

Lokasi pembuangan lumpur tinja setelah dilakukan penyedotan menjadi penting untuk memastikan bahwa kotoran tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut berhubungan dengan banyaknya penyakit yang dapat ditransfer ke tubuh manusia yang diakibatkan oleh kotoran manusia. Pengelolaan dan pembuangan lumpur tinja dari tangki septik atau secara langsung idealnya dibuang melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui truk tinja, agar kemudian aman dibuang di media lingkungan

Hasil Susenas MKP 2022 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan TPAT tangki septik yang dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir dan membuang tinja hasil pengosongan/penyedotan dari tangki septik ke IPLT hanya sebesar 23,48 persen. Sementara itu, rumah tangga di daerah perdesaan yang membuang tinja hasil pengosongan/penyedotan dari tangki septik ke

kolam/sawah/sungai/danau/laut menunjukkan persentase yang cukup tinggi, terlebih jika dibandingkan dengan daerah perkotaan

Persentase tersebut meningkat seiring dengan makin rendahnya status ekonomi rumah tangga. Lebih dari seperempat rumah tangga yang ada pada status ekonomi terendah (kuintil 1) dengan TPAT tangka septic yang dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir membuang tinja hasil pengosongan ke kolam/sawah/sungai/danau/laut.

Tabel 166 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik yang Dikosongkan/Dilakukan Penyedotan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Tinja dari Tangki Septik, 2022

Karakteristik	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	Lainnya	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	24,28	7,65	0,73	67,34
Perdesaan	19,01	33,38	3,32	44,29
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	22,46	19,85	3,51	54,19
SD/Sederajat	21,74	19,85	1,92	56,49
SMP/Sederajat	18,66	15,03	1,36	64,95
SM/Sederajat	25,52	9,10	0,67	64,71
Perguruan Tinggi	25,22	3,61	NA	70,87
Status Ekonomi				
Kuintil 1	20,52	25,41	2,89	51,18
Kuintil 2	19,18	23,58	1,93	55,31
Kuintil 3	20,71	16,87	1,91	60,51
Kuintil 4	20,73	9,15	0,38	69,74
Kuintil 5	27,40	5,50	0,73	66,36
Indonesia	23,48	11,57	1,13	63,83

Sumber: BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman, 2022

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di Indonesia tahun 2022 adalah 86,1%. Provinsi Sumatera Barat dengan persentase sebesar 80,4%. Sedikit berada dibawah rata-rata nasional. Artinya masih ada keluarga yang belum memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak.

Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan

peningkatan. Untuk Provinsi Sumatera Barat juga terjadi peningkatan dimana 63,98% (2019), 68,11% (2020), 68,68% (2021) dan 69,27% (2022)

Tabel 167 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik yang Dikosongkan/Dilakukan Penyedotan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Pihak yang Mengosongkan/Melakukan Penyedotan saat Terakhir Kali Tangki Septik Dikosongkan, 2022

Karakteristik	Pemerintah Daerah	Perusahaan Daerah (PDAM/ PD PAL)	Pihak Swasta	Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	6,39	6,42	72,70	8,91
Perdesaan	5,66	4,77	56,41	27,93
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD				
SD/Sederajat	4,55	5,94	65,93	21,17
SMP/Sederajat	6,46	4,03	64,54	20,12
SM/Sederajat	5,64	6,08	66,78	16,46
Perguruan Tinggi	5,88	6,70	72,30	9,39
Status Ekonomi				
Kuintil 1	7,83	7,12	75,09	2,88
Kuintil 2	5,50	4,22	61,08	23,49
Kuintil 3	5,12	4,51	64,27	21,57
Kuintil 4	6,54	2,64	68,64	15,96
Kuintil 5	5,71	7,64	70,25	10,83
Kuintil 1	6,90	7,44	73,73	6,42
Indonesia	6,28	6,17	70,22	11,80

Sumber: BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman, 2022

Perkembangan persentase akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak disajikan pada tabel diatas. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat proporsi kepemilikan fasilitas tempat buang air besar di Sumatera Barat telah mencapai 80,68% untuk kategori sendiri, 4,49% milik bersama sedangkan sisanya merupakan MCK komunal, ada tapi tidak digunakan, dan tidak ada.

Persentase yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar yang masih menempati posisi kedua tertinggi setelah milik sendiri. Artinya masih ada pekerjaan besar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan sosialisasi

pentingnya memiliki MCK yang layak. Ini artinya, perhatian terhadap pembangunan desa dengan layanan sanitasi layak menjadi prioritas sehingga anak-anak yang tinggal di wilayah 3T yakni daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, dapat lebih terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya.

5.10 RUMAH TANGGA KUMUH

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dan sehat, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat diartikan sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat bersama keluarga. Rumah yang layak harus menjamin kepentingan keluarga salah satunya menjamin kesehatan keluarga.

Menurut bps.go.id tahun 2022., definisi rumah layak huni memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2m² per kapita
2. Memiliki akses terhadap air minum layak
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/papan dan batang kayu; lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinil/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah

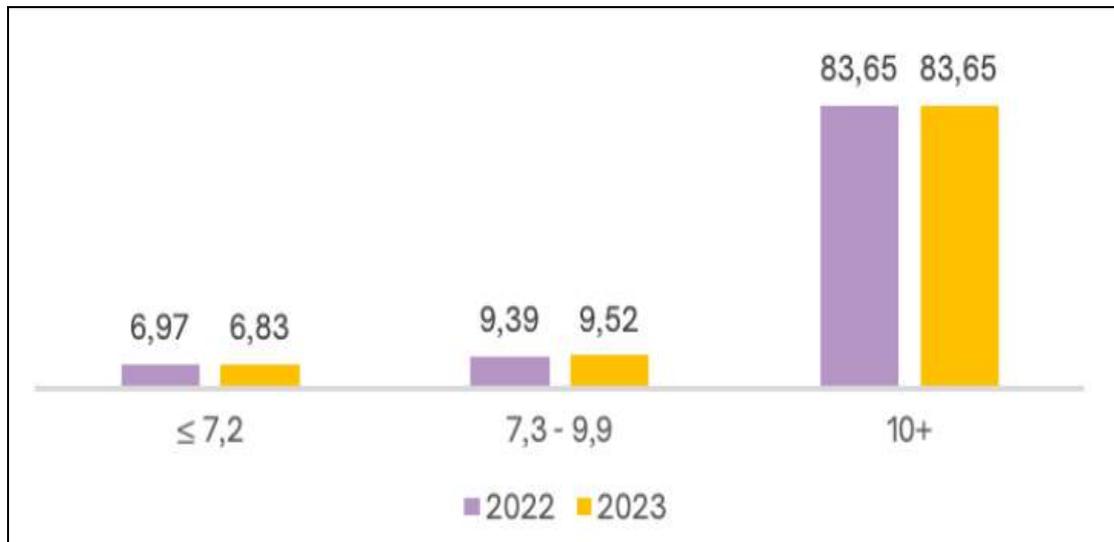
Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan konsep rumah sehat. Rumah sehat diartikan secara luas karena konsep sehat itu sendiri mencakup suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Kementerian Kesehatan mensyaratkan ada empat kondisi yang dipenuhi sehingga rumah dapat dikategorikan sebagai rumah sehat, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan psikologis, antar lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan untuk istirahat (ruang tidur) bagi masing-masing penghuni
2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup
3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah
4. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

Selanjutnya terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat yaitu komponen rumah tinggal, sanitasi dan perilaku penghuni. Komponen rumah tinggal terdiri dari langit-langit, dinding, ventilasi/ jendela, lantai, kepadatan, pencahayaan serta pemanfaatan pekarangan. Aspek sanitasi mencakup sumber air bersih, jamban, sarana pembuangan limbah dan sampah. Kemudian keberadaan jentik nyamuk, vektor tikus serta kebiasaan cuci tangan merupakan variabel yang digunakan untuk menilai perilaku sehat penghuni rumah.

Gambar dibawah menunjukkan bahwa jika dilihat dari luas lantai per kapita, pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai per kapita lebih dari 10 m², yaitu sebesar 83,65 persen. Kondisi ini relatif sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita antara 7,3 hingga 9,9 m² juga mengalami peningkatan.

Gambar 53 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Provinsi Sumatera Barat (m²), 2022-2023



Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, 2023

Tabel 168 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah (m²), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal (m ²) Dwelling Floor Area (m ²)				Jumlah Total
	< 50	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	46,32	46,69	5,15	1,84	100,00
Kab. Pesisir Selatan	21,03	61,99	12,76	4,23	100,00
Kab. Solok	34,68	48,89	12,62	3,81	100,00
Kab. Sijunjung	27,18	56,61	11,69	4,52	100,00
Kab. Tanah Datar	20,73	56,27	16,94	6,05	100,00
Kab. Padang Pariaman	13,12	50,56	28,18	8,15	100,00
Kab. Agam	24,75	58,94	12,20	4,11	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	31,25	51,88	13,80	3,07	100,00
Kab. Pasaman	39,02	49,76	7,96	3,27	100,00
Kab. Solok Selatan	33,47	50,83	11,33	4,37	100,00
Kab. Dharmasraya	15,08	48,00	23,49	13,43	100,00
Kab. Pasaman Barat	36,19	50,37	8,45	4,99	100,00
Kota Padang	25,72	44,52	18,58	11,18	100,00
Kota Solok	32,73	43,19	13,51	10,57	100,00
Kota Sawahlunto	31,73	43,54	18,41	6,32	100,00
Kota Padang Panjang	32,57	44,66	15,83	6,94	100,00
Kota Bukittinggi	36,73	38,47	17,22	7,58	100,00
Kota Payakumbuh	32,43	45,82	13,58	8,17	100,00
Kota Pariaman	19,91	47,60	23,05	9,43	100,00
Sumatera Barat	27,36	51,09	15,13	6,42	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 169 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai per Kapita (m²), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	≤ 7,2	7,3 - 9,9	≥ 10	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	7,68	16,20	76,12	100,00
Kab. Pesisir Selatan	5,73	6,45	87,82	100,00
Kab. Solok	10,68	11,88	77,44	100,00
Kab. Sijunjung	9,21	8,78	82,01	100,00
Kab. Tanah Datar	1,73	7,44	90,82	100,00
Kab. Padang Pariaman	2,92	5,58	91,50	100,00
Kab. Agam	2,11	6,83	91,07	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	4,65	7,85	87,50	100,00
Kab. Pasaman	14,28	11,70	74,02	100,00
Kab. Solok Selatan	4,94	13,42	81,64	100,00
Kab. Dharmasraya	4,92	5,45	89,63	100,00
Kab. Pasaman Barat	12,02	16,70	71,29	100,00
Kota Padang	7,12	9,26	83,62	100,00
Kota Solok	9,87	8,58	81,56	100,00
Kota Sawahlunto	8,34	11,16	80,50	100,00
Kota Padang Panjang	9,43	11,28	79,29	100,00
Kota Bukittinggi	13,81	13,37	72,82	100,00
Kota Payakumbuh	8,12	12,14	79,74	100,00
Kota Pariaman	5,02	11,43	83,55	100,00
Sumatera Barat	6,83	9,52	83,65	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 170 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Beton Concrete	Genteng Roof	Seng Zinc	Asbes Asbestos	Bambu/Kayu/ Sirap Bamboo/Wood Shingles	Jerami/Ijuk/ Daun/Rumbia Hay/Leaves/ Rumbia	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,41	1,64	79,40	3,48	2,29	12,78	100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,22	2,34	96,13	1,29	0,01	-	100,00
Kab. Solok	0,82	2,92	95,98	0,28	-	-	100,00
Kab. Sijunjung	0,44	2,77	93,69	2,86	0,24	-	100,00
Kab. Tanah Datar	1,52	1,07	97,41	-	-	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,52	1,78	97,07	0,22	0,31	0,12	100,00
Kab. Agam	0,95	3,29	95,27	0,49	-	-	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	0,45	1,72	96,67	1,15	-	-	100,00
Kab. Pasaman	1,32	3,78	94,60	-	0,30	-	100,00
Kab. Solok Selatan	0,57	0,81	98,56	0,01	0,06	-	100,00
Kab. Dharmasraya	1,97	12,14	82,55	3,33	-	-	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,93	1,09	96,17	0,93	0,49	0,40	100,00
Kota Padang	0,24	2,50	96,71	0,29	0,26	-	100,00
Kota Solok	0,77	1,13	97,77	0,33	-	-	100,00
Kota Sawahlunto	-	2,19	96,76	0,48	0,57	-	100,00
Kota Padang Panjang	2,51	2,97	94,18	0,34	-	-	100,00
Kota Bukittinggi	2,59	2,18	94,82	0,29	0,11	-	100,00
Kota Payakumbuh	0,75	2,34	96,49	0,19	0,24	-	100,00
Kota Pariaman	0,15	1,43	97,88	0,31	0,23	-	100,00
Sumatera Barat	0,78	2,66	95,31	0,77	0,20	0,29	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 171 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tembok Bricks	Plesteran Anyaman Bambu/Kawat Plastering of Woven Bamboo/Wire	Kayu/Papan, Batang Kayu Log, Wood	Bambu, Anyaman Bambu dan Lainnya Bamboo, Woven Bamboo and Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kepulauan Mentawai	13,02	0,32	86,27	0,38	100,00
Kab. Pesisir Selatan	74,28	0,59	25,13	-	100,00
Kab. Solok	74,40	2,06	23,01	0,53	100,00
Kab. Sijunjung	84,32	1,39	13,53	0,76	100,00
Kab. Tanah Datar	79,40	5,23	14,86	0,51	100,00
Kab. Padang Pariaman	83,60	-	16,22	0,18	100,00
Kab. Agam	74,09	2,18	22,20	1,52	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	80,22	1,79	17,73	0,26	100,00
Kab. Pasaman	78,45	2,15	19,02	0,37	100,00
Kab. Solok Selatan	77,93	4,15	16,44	1,48	100,00
Kab. Dharmasraya	82,85	0,61	16,38	0,16	100,00
Kab. Pasaman Barat	58,77	2,49	38,73	-	100,00
Kota Padang	86,80	-	11,52	1,68	100,00
Kota Solok	79,12	1,78	18,85	0,26	100,00
Kota Sawahlunto	86,64	1,64	11,51	0,22	100,00
Kota Padang Panjang	74,80	7,38	16,25	1,57	100,00
Kota Bukittinggi	74,95	1,17	23,85	0,03	100,00
Kota Payakumbuh	75,53	1,00	23,47	-	100,00
Kota Pariaman	89,60	0,10	10,30	-	100,00
Sumatera Barat	76,96	1,61	20,77	0,66	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 172 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Marmar/ Granit Marble/ Granite	Keramik Ceramic	Parket/ Vinil/Karpet, Ubin/Tegel/ Teraso Parquet/ Vinyle/ Carpet, Tile/ Terrazzo	Kayu/Papan Plank/Board	Semen/Bata Merah Cement/Red Brick	Bambu Bamboo	Tanah Earth	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Kepulauan Mentawai	1,44	19,69	0,50	43,95	33,12	0,52	0,78	100,00
Kab. Pesisir Selatan	1,64	30,29	0,40	3,12	63,45	0,19	0,91	100,00
Kab. Solok	1,81	23,56	1,14	10,28	62,71	0,10	0,40	100,00
Kab. Sijunjung	0,89	35,47	0,72	3,51	58,31	0,80	0,30	100,00
Kab. Tanah Datar	2,03	24,05	0,39	13,23	60,30	-	-	100,00
Kab. Padang Pariaman	2,55	44,28	0,50	3,29	49,17	0,03	0,18	100,00
Kab. Agam	1,61	30,81	1,07	13,11	51,88	1,23	0,30	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	1,44	21,09	0,75	5,74	70,77	-	0,21	100,00
Kab. Pasaman	1,40	15,45	0,75	8,07	73,84	0,35	0,14	100,00
Kab. Solok Selatan	2,23	15,04	0,46	10,12	71,09	1,06	-	100,00
Kab. Dharmasraya	2,38	33,05	-	2,74	61,57	-	0,27	100,00
Kab. Pasaman Barat	2,32	25,17	0,49	13,15	58,61	-	0,26	100,00
Kota Padang	1,49	54,66	2,31	3,43	38,11	-	-	100,00
Kota Solok	3,80	41,14	0,77	5,09	47,59	0,94	0,66	100,00
Kota Sawahlunto	1,39	40,44	1,10	7,50	49,55	0,02	-	100,00
Kota Padang Panjang	1,74	41,97	1,68	7,97	46,63	-	-	100,00
Kota Bukittinggi	2,70	40,62	2,68	7,05	46,70	0,26	-	100,00
Kota Payakumbuh	3,80	36,99	0,77	1,31	56,85	-	0,27	100,00
Kota Pariaman	0,55	53,79	0,47	3,69	41,49	-	-	100,00
Sumatera Barat	1,85	33,30	0,97	7,81	55,56	0,26	0,25	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 173 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, dan Sumber Penerangan Utama, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Listrik PLN State Electricity Company (PLN)	Listrik Non PLN Non-PLN	Bukan Listrik No Electricity	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Mentawai	74,56	15,04	10,40	100,00
Kab. Pesisir Selatan	99,41	0,27	0,31	100,00
Kab. Solok	99,49	0,16	0,35	100,00
Kab. Sijunjung	99,08	0,06	0,86	100,00
Kab. Tanah Datar	99,73	-	0,27	100,00
Kab. Padang Pariaman	99,68	-	0,32	100,00
Kab. Agam	99,22	0,14	0,64	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	99,95	-	0,05	100,00
Kab. Pasaman	99,38	0,12	0,50	100,00
Kab. Solok Selatan	96,27	3,38	0,35	100,00
Kab. Dharmasraya	98,06	1,77	0,17	100,00
Kab. Pasaman Barat	99,76	-	0,24	100,00
Kota Padang	100,00	-	-	100,00
Kota Solok	100,00	-	-	100,00
Kota Sawahlunto	99,83	-	0,17	100,00
Kota Padang Panjang	99,55	-	0,45	100,00
Kota Bukittinggi	100,00	-	-	100,00
Kota Payakumbuh	100,00	-	-	100,00
Kota Pariaman	100,00	-	-	100,00
Sumatera Barat	98,99	0,54	0,47	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 174 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Bukan Tanah Not earth/sand	Tanah¹ Earth/sand¹	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
1. Kep. Mentawai	99,22	0,78	100,00
2. Pesisir Selatan	99,09	0,91	100,00
3. Solok	99,60	0,40	100,00
4. Sijunjung	99,70	0,30	100,00
5. Tanah Datar	100,00	0,00	100,00
6. Padang Pariaman	99,82	0,18	100,00
7. Agam	99,70	0,30	100,00
8. Lima Puluh Kota	99,79	0,21	100,00
9. Pasaman	99,86	0,14	100,00
10. Solok Selatan	100,00	0,00	100,00
11. Dharmasraya	99,73	0,27	100,00
12. Pasaman Barat	99,74	0,26	100,00
<i>Kota/Municipality</i>			
1. Padang	100,00	0,00	100,00
2. Solok	99,34	0,66	100,00
3. Sawahlunto	100,00	0,00	100,00
4. Padang Panjang	100,00	0,00	100,00
5. Bukittinggi	100,00	0,00	100,00
6. Payakumbuh	99,73	0,27	100,00
7. Pariaman	100,00	0,00	100,00
Sumatera Barat	99,75	0,25	100,00
	2022	99,68	0,32
	2021	99,51	0,49

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 175 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sebaran RTLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) <i>Number of Uninhabitable Houses (units)</i>	Sebaran RTLH <i>Distribution of Uninhabitable House</i>	
		Kecamatan <i>District</i>	Desa/Kelurahan <i>Villages/Sub District</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
1. Kep. Mentawai	7.587	9	21
2. Pesisir Selatan	10.831	15	182
3. Solok	8.423	14	70
4. Sijunjung	3.742	8	50
5. Tanah Datar	11.028	14	73
6. Padang Pariaman	7.179	17	91
7. Agam	4.773	16	77
8. Lima Puluh Kota	9.990	12	66
9. Pasaman	8.222	12	37
10. Solok Selatan	3.578	8	33
11. Dharmasraya	5.183	11	52
12. Pasaman Barat	10.732	11	19
<i>Kota/Municipality</i>			
1. Padang	8.396	11	62
2. Solok	1.451	2	13
3. Sawahlunto	1.408	4	33
4. Padang Panjang	519	2	14
5. Bukittinggi	4.131	3	16
6. Payakumbuh	1.180	5	45
7. Pariaman	1.865	4	64
Sumatera Barat 2023	110.218	178	1.018
2022	123.501	178	1.018

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Rumah tangga kumuh sebagai rumah tangga yang a) tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak; b) tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak; c) tidak memiliki akses terhadap rumah dengan luas lantai $\geq 7,2$ m² per kapita; d) tidak memiliki akses terhadap kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak.

Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa persentase rumah tangga di Sumatera Barat dengan kriteria rumah sehat telah cukup tinggi, terlihat dari besaran luas lantai perkapita diatas 10 m², luas lantai rumah telah berada di kisaran 50-99 m², 55,56% lantai terluas terbuat dari semen/bata merah, 95,31% menggunakan seng sebagai atap terluas, dinding terluas berasal dari tembok sebesar 76,96% dan sumber penerangan utama 98,99% telah menggunakan listrik PLN.

Namun secara nasional, persentase penduduk yang tinggal di rumah tangga kumuh masih relatif tinggi, persentase lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tingginya persentase rumah tangga kumuh di daerah perdesaan kemungkinan dapat disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban pribadi dan/ atau sumber air minum yang kurang aman. Pendapatan yang rendah, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya sanitasi yang baik, serta sulitnya akses pada air bersih di perdesaan dapat menjadi penyebab tingginya persentase rumah tangga kumuh diperdesaan

Jika dilihat dari luas lantai perkapita, di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai perkapita lebih dari 10 m². Pada tahun 2023 sebanyak 83,65 persen rumah tangga memiliki luas lantai perkapita di golongan ini sama dengan tahun sebelumnya masih 83,65 persen. Persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita antara 7,3 hingga 9,9 m² juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terjadi perubahan kualitas rumah dan tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Persentase rumah tangga yang memiliki lantai terluas bukan tanah naik dari 99,71 persen di 2022 menjadi 99,75 persen tahun 2023. Jika dilihat dari asal wilayahnya, peningkatan ini berasal dari daerah perkotaan.

Persentase rumah tangga yang memiliki atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/ rumbia atau lainnya juga mengalami kenaikan. Peningkatan ini terjadi pada perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan terjadi tidak ada rumah tangga yang memiliki atap terluas jerami/ijuk/daun/ rumbia atau lainnya. Ini berarti bahwa rumah tangga di daerah perkotaan mengalami peningkatan untuk kualitas rumah yang atap terluasnya bukan jerami/ijuk/ daun/ rumbia atau lainnya, dari 99,85 persen menjadi 100 persen. Hal yang

sama juga terjadi di daerah perdesaan, terjadi peningkatan rumah tangga dari 99,30 persen menjadi 99,71 persen.

Berbeda halnya dengan indikator kualitas rumah dinding terluas bukan bambu/ anyaman bambu atau lainnya yang mengalami peningkatan jumlah rumah tangga dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari status daerahnya, daerah perkotaan mengalami penurunan yakni 99,29 persen pada tahun 2022 menjadi 99,46 persen di tahun 2023. Pada daerah perdesaan juga mengalami peningkatan dari 99,23 persen di tahun 2022 menjadi 99,49 persen di tahun 2023

Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik sedikit mengalami peningkatan baik di perdesaan maupun perkotaan. Secara total terjadi peningkatan dari 99,52 persen di 2022 menjadi 99,53 persen di 2023. Sumber penerangan dengan listrik ini mencakup listrik PLN dan listrik bukan PLN.

Tabel 176 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022-2023

Fasilitas Perumahan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, Air Isi Ulang dan Leding	56,06	55,18
Jamban Sendiri	80,68	80,84
Pembuangan Akhir Tinja dengan Tangki	73,89	72,08
Sumber Penerangan Listrik	99,52	99,53

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sumber penerangan listrik mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang sudah memiliki sumber penerangan dari listrik mencapai 99,53 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 99,52 persen.

Tabel 177 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022-2023

Fasilitas Perumahan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Lantai terluas bukan tanah (%)	99,71	99,75
Atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/rumbia atau lainnya (%)	99,64	99,71
Dinding terluas bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya (%)	99,26	99,34

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/rumbia atau lainnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan, dari 99,64 persen menjadi 99,71 persen. Demikian halnya dengan indikator kualitas rumah dinding terluas bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya, mengalami kenaikan dari 99,26 persen di tahun 2022 menjadi 99,34 persen di tahun 2023.

5.11 FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA, hingga tahun 2021, di Provinsi Sumatera Barat telah terdapat 4 (empat) puskesmas ramah anak (PRA) sebagai penerima penghargaan pelayanan ramah anak terbaik yaitu

Tabel 178 Penerima Penghargaan Pelayanan Ramah Anak Terbaik, 2017-2023

Nama Puskesmas	Kab/Kota	Tahun
Puskesmas Silungkang	Sawahlunto	2017
Puskesmas Sawahlunto	Sawahlunto	2018
Puskesmas Lima Kaum I	Tanah Datar	2019
Puskesmas Padang Pasir	Padang	2019
Puskesmas Rasimah Ahmad	Bukittinggi	2023

Sumber: Kemen PPPA, 2023

Tabel 179 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit Umum <i>Public Health</i>		Rumah Sakit Khusus <i>Special Hospital</i>	
	2022	2023	2022 ¹	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1. Kep. Mentawai	1	1	—	—
2. Pesisir Selatan	3	3	1	1
3. Solok	1	1	—	—
4. Sijunjung	1	1	1	1
5. Tanah Datar	2	2	2	2
6. Padang Pariaman	1	1	1	1
7. Agam	1	1	1	1
8. Lima Puluh Kota	1	1	—	—
9. Pasaman	3	3	—	—
10. Solok Selatan	1	2	—	—
11. Dharmasraya	2	2	—	—
12. Pasaman Barat	3	3	1	1
<i>Kota/Municipality</i>				
1. Padang	14	14	12	13
2. Solok	2	2	2	2
3. Sawahlunto	1	1	—	—
4. Padang Panjang	2	2	—	—
5. Bukittinggi	5	5	1	1
6. Payakumbuh	2	2	2	2
7. Pariaman	4	4	1	1
Sumatera Barat	50	51	25	26

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>				Jumlah Puskesmas <i>Public Health Center</i>		Puskesmas Pembantu/Sub <i>Public Health Center</i>	
	Rawat Inap / With <i>Inpatient Care</i>		Non Rawat Inap <i>Without Inpatient Care</i>					
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>								
1. Kep. Mentawai	10	11	5	4	15	15	39	39
2. Pesisir Selatan	11	14	10	7	21	21	87	76
3. Solok	11	11	8	8	19	19	85	58
4. Sijunjung	10	10	3	3	13	13	46	42
5. Tanah Datar	8	8	15	15	23	23	67	61
6. Padang Pariaman	10	10	15	15	25	25	60	52
7. Agam	11	9	12	14	23	23	142	165
8. Lima Puluh Kota	5	5	17	17	22	22	88	86
9. Pasaman	6	7	10	9	16	16	53	44
10. Solok Selatan	7	8	1	-	8	8	45	41
11. Dharmasraya	6	6	8	9	14	15	43	42
12. Pasaman Barat	13	13	7	7	20	20	39	20
<i>Kota/Municipality</i>								
1. Padang	—	—	24	24	24	24	59	58
2. Solok	1	1	3	3	4	4	17	10
3. Sawahlunto	2	2	4	4	6	6	27	27
4. Padang Panjang	—	—	4	4	4	4	5	6
5. Bukittinggi	—	—	7	7	7	7	14	11
6. Payakumbuh	—	—	8	8	8	8	23	22
7. Pariaman	—	—	7	7	7	7	11	12
Sumatera Barat	111	115	168	165	279	280	950	872

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Bersalin/Klinik Bersalin Maternity Hospital		Rumah Bersalin/ Bidan Praktek Mandiri Maternity Home/ Independent Practice Midwife		Polindes/Poskesdes/ Poskeskel/Poskesri	
	2022	2023	2022 [*]	2023	2022	2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	–	–	–	–	64	36
2. Pesisir Selatan	1	–	–	–	276	144
3. Solok	–	–	1	1	233	119
4. Sijunjung	2	–	–	–	126	58
5. Tanah Datar	2	–	–	–	126	80
6. Padang Pariaman	–	–	–	–	32	73
7. Agam	1	–	–	–	–	90
8. Lima Puluh Kota	1	–	–	1	160	158
9. Pasaman	–	–	–	26	–	116
10. Solok Selatan	–	–	1	2	33	36
11. Dharmasraya	–	1	–	–	109	124
12. Pasaman Barat	1	–	–	–	204	21
Kota/Municipality						
1. Padang	5	4	9	15	49	25
2. Solok	2	2	15	–	13	13
3. Sawahlunto	–	–	–	–	7	7
4. Padang Panjang	–	–	–	–	16	15
5. Bukittinggi	1	2	1	1	26	25
6. Payakumbuh	2	2	3	6	45	19
7. Pariaman	1	–	–	–	40	41
Sumatera Barat	19	11	30	52	1.559	1.200

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Klinik/Clinic					
	Klinik Pratama Primary Clinic		Klinik Utama Main Clinic		Jumlah Klinik Total Clinic	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	2	3	–	–	2	3
2. Pesisir Selatan	3	8	1	1	8	9
3. Solok	5	5	1	1	6	6
4. Sijunjung	1	2	–	–	1	2
5. Tanah Datar	4	5	2	2	6	7
6. Padang Pariaman	9	11	2	4	11	15
7. Agam	9	14	–	1	9	15
8. Lima Puluh Kota	4	5	–	–	4	5
9. Pasaman	4	6	–	–	4	6
10. Solok Selatan	3	6	–	–	3	6
11. Dharmasraya	10	13	1	1	11	14
12. Pasaman Barat	4	12	3	3	7	15
Kota/Municipality						
1. Padang	85	94	9	11	94	105
2. Solok	7	11	3	3	10	14
3. Sawahlunto	2	5	–	–	2	5
4. Padang Panjang	1	6	–	1	1	7
5. Bukittinggi	5	9	2	3	7	12
6. Payakumbuh	6	15	3	4	9	19
7. Pariaman	10	12	1	1	11	13
Sumatera Barat	174	242	28	36	206	278

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Rasio puskesmas per kecamatan dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Di Sumatera Barat, rasio puskesmas per kecamatan sebesar 1,56%, artinya tiap kecamatan di Sumatera Barat telah memiliki minimal 1 puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 180 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>			Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	1	1	1	–	–	–
2. Pesisir Selatan	3	3	3	–	–	–
3. Solok	1	1	1	–	–	–
4. Sijunjung	2	2	2	–	–	–
5. Tanah Datar	4	4	4	–	–	–
6. Padang Pariaman	2	2	2	–	–	–
7. Agam	2	3	1	–	–	1
8. Lima Puluh Kota	1	1	1	–	–	–
9. Pasaman	3	3	3	–	–	–
10. Solok Selatan	1	1	2	–	–	–
11. Dharmasraya	2	2	2	–	–	–
12. Pasaman Barat	2	2	2	1	1	1
Kota/Municipality						
1. Padang	16	16	19	11	10	6
2. Solok	2	5	5	4	1	–
3. Sawahlunto	1	1	1	–	–	–
4. Padang Panjang	2	2	2	–	–	–
5. Bukittinggi	4	4	5	–	–	–
6. Payakumbuh	4	4	4	–	–	–
7. Pariaman	5	5	5	–	–	–
Sumatera Barat	58	62	65	16	12	8

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Polclinic			Public Health Center		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	2	2	2	15	15	15
2. Pesisir Selatan	3	4	5	20	20	20
3. Solok	5	5	3	19	19	19
4. Sijunjung	3	3	3	13	13	13
5. Tanah Datar	2	2	3	23	23	23
6. Padang Pariaman	7	9	11	25	25	25
7. Agam	15	13	9	23	24	23
8. Lima Puluh Kota	2	1	1	23	22	22
9. Pasaman	3	3	3	16	17	18
10. Solok Selatan	6	5	5	9	12	11
11. Dharmasraya	7	17	12	14	14	15
12. Pasaman Barat	7	8	10	21	20	20
Kota/Municipality						
1. Padang	46	46	50	21	22	22
2. Solok	–	2	3	4	4	4
3. Sawahlunto	1	1	1	6	6	6
4. Padang Panjang	4	1	2	4	4	4
5. Bukittinggi	2	5	7	7	7	7
6. Payakumbuh	6	6	5	8	8	8
7. Pariaman	6	6	8	7	7	7
Sumatera Barat	127	139	143	278	282	282
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Puskesmas Pembantu Subsidiary of Public Health Center			Apotek Pharmacy		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	35	35	31	2	2	1
2. Pesisir Selatan	79	81	79	18	22	25
3. Solok	61	62	60	6	8	9
4. Sijunjung	40	42	40	9	12	10
5. Tanah Datar	51	53	49	7	8	10
6. Padang Pariaman	41	42	40	11	12	14
7. Agam	80	87	88	17	23	28
8. Lima Puluh Kota	58	56	57	14	13	18
9. Pasaman	28	38	37	13	15	11
10. Solok Selatan	36	41	37	6	10	11
11. Dharmasraya	30	29	30	16	13	15
12. Pasaman Barat	34	32	32	16	22	18
Kota/Municipality						
1. Padang	55	60	57	57	56	56
2. Solok	11	12	12	7	7	5
3. Sawahlunto	18	19	19	5	5	5
4. Padang Panjang	6	6	6	6	6	6
5. Bukittinggi	11	11	11	16	16	16
6. Payakumbuh	20	20	20	19	20	21
7. Pariaman	10	10	10	13	13	13
Sumatera Barat	704	736	715	258	283	292

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

BAB VI PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Budaya berpikir kritis, ilmiah, dan inovatif hanya dapat tumbuh melalui pendidikan yang baik, seperti halnya pembangunan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing individu maupun bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang krusial untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan karena pendidikan berfungsi untuk membentuk pemahaman terhadap sesuatu dan membuat manusia menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pembangunan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas unggul.

Pendidikan adalah hak dasar dari setiap warga negara dan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 C dan ditegaskan dalam pasal 31 Ayat 1. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak dalam pasal 28 juga menyatakan bahwa pendidikan pada anak harus dipenuhi dan dilindungi dengan menetapkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi negara berupa kewajiban untuk memberikan menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan memiliki arti pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dengan dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Prinsip persamaan kesempatan adalah untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua individu. Sedangkan *Equity* menyangkut aspek yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat seperti isu segregasi sosial, rasisme, diskriminasi gender atau status sosial, dan/atau bentuk- bentuk diskriminasi lain.

Komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan terlihat dengan menetapkan wajib belajar hingga 12 tahun dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak yang telah berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara gratis. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pendidikan dasar diwajibkan untuk warga negara yang berusia 7-15 tahun yaitu setara dengan jenjang pendidikan penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dan informal dilaksanakan untuk pendidikan setingkat SD hingga SMP.

Sampai saat ini sudah banyak bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah guna mencerdaskan anak bangsa salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut menasar siswa sekolah dasar dan menengah pada keluarga pra-sejahtera yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat pada pendidikan sehingga meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dasar dan menengah, serta mengurangi angka putus sekolah.

6.1 PROGRAM INDONESIA PINTAR

Keterbatasan akses terutama akses secara ekonomi dalam pendidikan merupakan penghalang besar dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini pemerintah memberikan solusi yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemberdayaan penduduk miskin dalam hal pendidikan. Dengan adanya program ini diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah serta angka partisipasi sekolah dapat meningkat dapat mencegah kemungkinan putus sekolah dari peserta didik serta menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Anak-anak yang menjadi sasaran program ini adalah anak-anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/ prioritas. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan berupa pemberian dana bantuan kepada peserta didik sehingga dapat meringankan menasar pada anak-anak yang mengalami putus sekolah dengan

memberikan arahan dan pembiayaan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Tabel 181 Capaian Program Indonesia Pintar, 2023

Jenjang		Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
Prov. Sumatera Barat					
SD	Siswa	221.020	179.920	27.905	13.195
SD	Rp	92.911.050.000	74.679.750.000	12.293.550.000	5.937.750.000
SMP	Siswa	78.640	68.218	6.813	3.609
SMP	Rp	50.663.250.000	43.566.000.000	4.390.500.000	2.706.750.000
SMA	Siswa	48.094	17.962	25.510	4.622
SMA	Rp	76.087.800.000	25.065.900.000	42.702.300.000	8.319.600.000
SMK	Siswa	33.001	18.099	12.537	2.365
SMK	Rp	51.264.000.000	25.921.800.000	21.085.200.000	4.257.000.000
Total	Siswa	380.755	284.199	72.765	23.791
	Rp	270.926.100.000	169.233.450.000	80.471.550.000	21.221.100.000

Sumber: pip.kemdikbud.go.id

Dari tabel diatas terlihat bahwa 380.755 siswa penerima PIP yang di SK-kan telah dilakukan aktivasi dengan besaran anggaran yang didistribusikan sebesar 21 miliar lebih.

Tabel 182 Penyaluran Pemberian PIP Sumatera Barat, 2023

Jenjang		Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
Prov. Sumatera Barat					
SD	Siswa	221.020	179.920	27.905	13.195
SD	Rp	92.911.050.000	74.679.750.000	12.293.550.000	5.937.750.000
SMP	Siswa	78.640	68.218	6.813	3.609
SMP	Rp	50.663.250.000	43.566.000.000	4.390.500.000	2.706.750.000
SMA	Siswa	48.094	17.962	25.510	4.622
SMA	Rp	76.087.800.000	25.065.900.000	42.702.300.000	8.319.600.000
SMK	Siswa	33.001	18.099	12.537	2.365
SMK	Rp	51.264.000.000	25.921.800.000	21.085.200.000	4.257.000.000
Total	Siswa	380.755	284.199	72.765	23.791
	Rp	270.926.100.000	169.233.450.000	80.471.550.000	21.221.100.000

Sumber: pip.kemdikbud.go.id

6.2 PARTISIPASI SEKOLAH

Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar untuk melihat daya serap sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan. Partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan di berbagai jenjang baik secara formal maupun informal. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah, antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah bersekolah terhadap populasi. Beberapa gambaran partisipasi sekolah Sumatera Barat tahun 2023

Tabel 183 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki/Male								
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	Masih Sekolah/Attending School				Diploma I s.d Universitas D-I to University	Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School	Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
		SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Uia/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kab. Kepulauan Mentawai	5,78	14,99	5,31	4,90	1,98	27,18	67,04	100,00	
Kab. Pesisir Selatan	4,12	13,56	6,82	5,11	1,84	27,33	68,56	100,00	
Kab. Solok	6,10	14,14	6,85	4,36	2,72	28,08	65,83	100,00	
Kab. Sijunjung	4,92	13,47	5,42	3,66	2,12	24,67	70,41	100,00	
Kab. Tanah Datar	2,91	13,15	5,86	4,99	3,67	27,67	69,41	100,00	
Kab. Padang Pariaman	3,36	15,77	6,05	6,85	1,78	30,46	66,18	100,00	
Kab. Agam	4,06	14,58	6,12	5,17	2,58	28,46	67,48	100,00	
Kab. Lima Puluh Kota	2,54	13,23	7,20	4,02	1,64	26,10	71,37	100,00	
Kab. Pasaman	5,80	15,98	6,04	4,34	2,30	28,66	65,54	100,00	
Kab. Solok Selatan	4,83	14,15	5,52	3,73	1,76	25,15	70,02	100,00	
Kab. Dharmasraya	4,44	12,71	5,26	3,72	1,72	23,42	72,14	100,00	
Kab. Pasaman Barat	3,66	15,30	6,65	5,78	2,43	30,15	66,19	100,00	
Kota Padang	4,11	11,39	4,26	6,66	8,52	30,83	65,06	100,00	
Kota Solok	4,68	12,20	4,67	5,90	2,12	24,88	70,43	100,00	
Kota Sawahlunto	5,96	11,47	5,63	5,72	1,40	24,22	69,82	100,00	
Kota Padang Panjang	3,47	14,03	5,46	8,24	2,92	30,65	65,88	100,00	
Kota Bukittinggi	4,22	12,09	6,39	5,75	3,14	27,37	68,41	100,00	
Kota Payakumbuh	3,66	12,77	5,23	5,74	2,18	25,92	70,41	100,00	
Kota Pariaman	3,23	12,42	7,44	8,00	3,24	31,09	65,68	100,00	
Sumatera Barat	4,16	13,57	5,86	5,35	3,40	28,18	67,67	100,00	

Perempuan/Female								
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Masih Sekolah/Attending School						Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Ula/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School	Diploma I s.d Universitas D-I to University	Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kab. Kepulauan Mentawai	4,27	16,84	6,63	3,82	0,68	27,97	67,76	100,00
Kab. Pesisir Selatan	3,54	13,86	5,32	5,36	1,72	26,26	70,19	100,00
Kab. Solok	6,43	12,48	6,54	5,72	3,22	27,97	65,60	100,00
Kab. Sijunjung	4,95	15,18	4,41	4,52	1,52	25,62	69,43	100,00
Kab. Tanah Datar	2,83	12,03	5,82	5,90	2,96	26,71	70,46	100,00
Kab. Padang Pariaman	3,83	14,73	5,61	5,94	3,92	30,20	65,97	100,00
Kab. Agam	3,53	12,98	5,62	5,74	1,74	26,08	70,39	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	4,76	13,50	4,77	4,82	1,40	24,48	70,76	100,00
Kab. Pasaman	7,65	13,77	5,67	7,05	2,33	28,81	63,53	100,00
Kab. Solok Selatan	3,48	13,83	5,37	6,03	2,95	28,18	68,34	100,00
Kab. Dharmasraya	5,01	14,04	3,98	4,88	1,24	24,14	70,85	100,00
Kab. Pasaman Barat	4,74	15,01	4,75	5,32	4,05	29,13	66,13	100,00
Kota Padang	2,92	10,52	6,27	5,98	8,97	31,74	65,34	100,00
Kota Solok	3,52	13,62	4,66	7,16	3,27	28,70	67,78	100,00
Kota Sawahlunto	3,81	12,64	5,91	4,90	3,48	26,93	69,26	100,00
Kota Padang Panjang	4,68	11,97	5,67	6,21	5,04	28,89	66,43	100,00
Kota Bukittinggi	2,78	12,26	5,23	6,41	6,67	30,56	66,66	100,00
Kota Payakumbuh	3,87	11,49	6,26	4,80	3,43	25,99	70,14	100,00
Kota Pariaman	3,53	12,04	5,80	6,79	5,08	29,71	66,76	100,00
Sumatera Barat	4,14	13,06	5,54	5,65	3,84	28,09	67,77	100,00

Laki - laki + Perempuan/Male + Female								
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Masih Sekolah/Attending School						Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Ula/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School	Diploma I s.d Universitas D-I to University	Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School		
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kab. Kepulauan Mentawai	5,05	15,89	5,95	4,38	1,35	27,56	67,39	100,00
Kab. Pesisir Selatan	3,83	13,71	6,06	5,24	1,78	26,79	69,38	100,00
Kab. Solok	6,27	13,31	6,70	5,05	2,97	28,02	65,71	100,00
Kab. Sijunjung	4,93	14,33	4,91	4,09	1,82	25,15	69,92	100,00
Kab. Tanah Datar	2,87	12,58	5,84	5,45	3,31	27,18	69,95	100,00
Kab. Padang Pariaman	3,60	15,25	5,83	6,39	2,87	30,33	66,07	100,00
Kab. Agam	3,79	13,77	5,87	5,46	2,16	27,25	68,96	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	3,66	13,37	5,97	4,43	1,52	25,28	71,06	100,00
Kab. Pasaman	6,74	14,86	5,85	5,71	2,32	28,74	64,53	100,00
Kab. Solok Selatan	4,16	13,99	5,44	4,87	2,34	26,65	69,19	100,00
Kab. Dharmasraya	4,72	13,36	4,64	4,28	1,49	23,77	71,52	100,00
Kab. Pasaman Barat	4,19	15,15	5,71	5,55	3,24	29,65	66,16	100,00
Kota Padang	3,51	10,95	5,27	6,32	8,74	31,29	65,20	100,00
Kota Solok	4,09	12,92	4,66	6,54	2,70	26,82	69,09	100,00
Kota Sawahlunto	4,87	12,06	5,77	5,30	2,45	25,59	69,54	100,00
Kota Padang Panjang	4,08	12,99	5,57	7,22	3,99	29,77	66,15	100,00
Kota Bukittinggi	3,47	12,17	5,79	6,09	4,97	29,02	67,50	100,00
Kota Payakumbuh	3,77	12,13	5,75	5,27	2,81	25,96	70,28	100,00
Kota Pariaman	3,38	12,23	6,60	7,38	4,18	30,38	66,23	100,00
Sumatera Barat	4,15	13,31	5,69	5,50	3,62	28,13	67,72	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 184 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Status Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki/Male							
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	Masih Sekolah/Attending School				Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School	Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
		SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Ula/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School	Diploma I s.d Universitas D-I to University			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,30	41,96	15,79	13,59	5,88	77,21	22,48	100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,50	37,09	20,33	15,08	4,49	76,98	22,52	100,00
Kab. Solok	0,54	40,35	19,98	11,76	6,99	79,08	20,38	100,00
Kab. Sijunjung	0,37	39,88	16,68	11,20	6,24	74,00	25,63	100,00
Kab. Tanah Datar	0,52	40,38	18,95	15,31	9,62	84,26	15,22	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,24	41,70	17,31	19,10	3,07	81,18	18,58	100,00
Kab. Agam	0,56	41,46	18,79	15,88	6,31	82,43	17,01	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	0,00	40,73	22,30	11,54	3,94	78,52	21,48	100,00
Kab. Pasaman	1,44	41,33	17,50	12,55	6,18	77,55	21,00	100,00
Kab. Solok Selatan	0,00	39,41	17,34	11,73	4,13	72,61	27,39	100,00
Kab. Dharmasraya	0,24	40,99	17,30	12,21	4,51	75,01	24,75	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,11	39,54	18,24	15,85	6,20	79,84	20,05	100,00
Kota Padang	0,29	31,22	12,10	18,93	20,21	82,47	17,24	100,00
Kota Solok	0,03	35,71	14,34	18,12	5,91	74,08	25,88	100,00
Kota Sawahlunto	1,10	38,24	20,43	20,76	2,02	81,44	17,46	100,00
Kota Padang Panjang	0,00	39,08	15,50	23,39	5,47	83,44	16,56	100,00
Kota Bukittinggi	0,11	34,55	19,57	16,95	6,62	77,69	22,20	100,00
Kota Payakumbuh	0,12	37,86	16,86	18,49	6,61	79,82	20,06	100,00
Kota Pariaman	0,52	32,59	21,34	22,97	7,43	84,33	15,15	100,00
Sumatera Barat	0,37	38,17	17,44	15,67	8,38	79,67	19,96	100,00
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perempuan/Female							
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	Masih Sekolah/Attending School				Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School	Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
		SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Ula/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School	Diploma I s.d Universitas D-I to University			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,13	47,60	18,97	10,97	1,76	79,30	20,57	100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,53	40,89	16,77	16,65	4,89	79,22	20,25	100,00
Kab. Solok	0,50	38,09	20,46	17,64	9,23	85,42	14,07	100,00
Kab. Sijunjung	0,11	45,35	13,80	13,67	2,82	75,64	24,24	100,00
Kab. Tanah Datar	1,08	40,35	20,04	20,32	8,22	88,93	9,98	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,19	41,90	17,26	18,27	11,41	88,84	10,97	100,00
Kab. Agam	0,00	39,54	18,48	18,63	5,10	81,75	18,25	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	0,00	46,83	16,77	16,75	4,02	84,37	15,63	100,00
Kab. Pasaman	0,45	41,53	18,11	22,52	6,00	88,15	11,39	100,00
Kab. Solok Selatan	0,18	37,88	16,96	19,05	7,73	81,62	18,20	100,00
Kab. Dharmasraya	0,00	45,47	13,18	15,03	2,46	76,15	23,85	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,59	41,99	14,39	15,18	11,67	83,24	16,17	100,00
Kota Padang	0,00	29,16	17,80	16,97	22,08	86,02	13,98	100,00
Kota Solok	0,27	37,85	13,80	21,19	6,49	79,33	20,39	100,00
Kota Sawahlunto	0,55	41,14	20,42	16,16	7,32	85,04	14,41	100,00
Kota Padang Panjang	1,20	35,76	17,78	19,46	13,14	86,14	12,66	100,00
Kota Bukittinggi	0,00	33,32	14,39	17,65	17,58	82,94	17,06	100,00
Kota Payakumbuh	0,27	37,06	20,57	15,78	10,76	84,18	15,55	100,00
Kota Pariaman	0,00	34,21	17,40	20,40	13,08	85,10	14,90	100,00
Sumatera Barat	0,27	38,75	17,25	17,38	10,42	83,81	15,93	100,00

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki - laki + Perempuan/Male + Female							
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling/ Never Attended School	Masih Sekolah/Attending School				Jumlah yang Masih Sekolah Total Attending School	Tidak Bersekolah Lagi Not Attending School Anymore	Jumlah Total
		SD/MI/ Paket A/ SPM/PDF Ula/SDLB Primary School	SMP/MTs/ Paket B/ SPM/PDF Wustha/ SMPLB/ Junior High School	SMA/SMK/ MA/Paket C/ SPM/PDF Ulya/SMLB/ MAK/Senior High School	Diploma I s.d Universitas D-I to University			
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kab. Kepulauan Mentawai	0,22	44,74	17,35	12,30	3,85	78,24	21,54	100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,52	38,96	18,58	15,85	4,69	78,08	21,41	100,00
Kab. Solok	0,52	39,25	20,22	14,61	8,08	82,16	17,32	100,00
Kab. Sijunjung	0,24	42,60	15,25	12,43	4,54	74,82	24,94	100,00
Kab. Tanah Datar	0,80	40,37	19,49	17,80	8,92	86,58	12,62	100,00
Kab. Padang Pariaman	0,21	41,80	17,29	18,69	7,16	84,94	14,85	100,00
Kab. Agam	0,29	40,52	18,64	17,23	5,72	82,10	17,61	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	0,00	43,63	19,67	14,02	3,98	81,30	18,70	100,00
Kab. Pasaman	0,97	41,42	17,79	17,35	6,09	82,65	16,38	100,00
Kab. Solok Selatan	0,09	38,66	17,15	15,35	5,91	77,06	22,85	100,00
Kab. Dharmasraya	0,12	43,16	15,31	13,58	3,52	75,56	24,32	100,00
Kab. Pasaman Barat	0,34	40,70	16,42	15,54	8,78	81,44	18,22	100,00
Kota Padang	0,14	30,19	14,97	17,95	21,15	84,25	15,60	100,00
Kota Solok	0,16	36,81	14,06	19,71	6,21	76,79	23,05	100,00
Kota Sawahlunto	0,81	39,74	20,43	18,38	4,76	83,30	15,88	100,00
Kota Padang Panjang	0,57	37,49	16,59	21,51	9,14	84,73	14,69	100,00
Kota Bukittinggi	0,05	33,88	16,75	17,33	12,58	80,55	19,40	100,00
Kota Payakumbuh	0,20	37,46	18,70	17,15	8,67	81,98	17,82	100,00
Kota Pariaman	0,26	33,40	19,37	21,69	10,25	84,71	15,03	100,00
Sumatera Barat	0,32	38,45	17,35	16,51	9,39	81,70	17,98	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 185 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Karakteristik Characteristics	Angka Partisipasi Sekolah (APS)/School Enrollment Ratio (SER)			
	7-12 Tahun 7-12 Years	13-15 Tahun 13-15 Years	16-18 Tahun 16-18 Years	19-23 Tahun 19-23 Years
	(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan/Urban				
Laki-Laki/Male	99,87	95,73	84,03	46,67
Perempuan/Female	99,58	97,05	92,93	53,70
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	99,73	96,35	88,64	50,05
Perdesaan/Rural				
Laki-Laki/Male	99,74	96,75	76,03	29,55
Perempuan/Female	99,86	97,76	83,36	35,81
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	99,80	97,26	79,58	32,53
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				
Laki-Laki/Male	99,80	96,21	80,09	38,96
Perempuan/Female	99,72	97,40	88,53	45,70
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	99,76	96,79	84,33	42,19

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 186 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah¹ di Provinsi Sumatera Barat, 2021–2023

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah <i>Sex and School Age Group</i>	2021			2022		
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>	Tidak/ Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki/Male						
7–12	0,32	99,60	0,08	0,48	99,52	0,08
13–15	0,38	95,51	4,11	0,58	95,27	4,15
16–18	0,13	81,08	18,80	0,58	79,24	20,18
19–24	0,13	30,70	69,16	0,79	32,76	66,45
7–24	0,24	74,67	25,09	0,61	74,34	25,05
Perempuan/Female						
7–12	0,30	99,62	0,07	0,42	99,58	0,00
13–15	0,13	97,79	2,08	0,28	97,93	1,80
16–18	0,25	87,30	12,45	0,65	88,02	11,33
19–24	0,13	42,23	57,64	0,63	38,28	61,09
7–24	0,21	79,68	20,11	0,50	78,45	21,05
Laki–Laki+Perempuan <i>Male+Female</i>						
7–12	0,31	99,61	0,08	0,45	99,55	0,00
13–15	0,25	96,63	3,11	0,44	96,52	3,04
16–18	0,19	84,07	15,75	0,62	83,71	15,67
19–24	0,13	36,41	63,46	0,71	35,41	63,87
7–24	0,23	77,14	22,63	0,56	76,34	23,10
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah <i>Sex and School Age Group</i>	2023					
	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>			
(1)	(8)	(9)	(10)			
Laki-laki/Male						
7–12	0,12	99,80	0,08			
13–15	0,15	96,21	3,64			
16–18	0,38	80,09	19,54			
19–24	0,75	35,51	63,75			
7–24	0,35	76,82	22,83			
Perempuan/Female						
7–12	0,23	99,72	0,05			
13–15	0,00	97,40	2,60			
16–18	0,67	88,53	10,80			
19–24	0,19	40,84	58,97			
7–24	0,25	80,62	19,12			
Laki–Laki+Perempuan <i>Male+Female</i>						
7–12	0,17	99,76	0,06			
13–15	0,08	96,79	3,14			
16–18	0,52	84,33	15,15			
19–24	0,48	38,08	61,44			
7–24	0,31	78,69	21,00			

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Sebagai gambaran, persentase penduduk Sumatera Barat usia 7-24 tahun yang tidak/belum bersekolah adalah sebesar 0,31 persen, 78,69 persen masih bersekolah dan 21,00 persen tidak bersekolah lagi. Ini artinya penduduk Sumatera Barat pada range usia tersebut, masih mengenyam pendidikan dalam berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan dan mengalami kendala sehingga harus memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dasar hingga menengah.

Dilihat dari aspek perwilayahan, tidak terdapat differensiasi yang menyolok antara perkotaan maupun perdesaan. Ini diasumsikan bahwa seluruh penduduk Sumatera Barat pada usia tersebut baik di perkotaan maupun di perdesaan telah memperoleh kesempatan belajar secara baik, dimana hanya dibawah 1% yang tidak/belum bersekolah.

Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan, ketimpangan dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Ini terlihat selisih antara tidak/belum bersekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi antara laki-laki dan perempuan hanya 0,11 persen. Selisih terbesar terdapat pada kelompok tidak bersekolah lagi yaitu sebesar 3,71 persen,. Sedangkan untuk kategori masih bersekolah memiliki perbedaan sebesar 3,80%.

Terdapat 16 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian tidak/belum bersekolahnya dibawah 1 persen. Ini artinya pada usia tersebut hampir seluruh penduduk sedang menempuh pendidikan dalam berbagai tingkatan.

Tingginya angka pada belum/tidak bersekolah pada Kabupaten/Kota menunjukkan ciri kemiskinan perdesaan. Masyarakat miskin perdesaan sering kurang memiliki akses ke layanan dasar, dukungan bagi penyandang cacat, dan peluang pendidikan berkualitas.

Akses terhadap pendidikan harus tetap ditingkatkan hingga tingkat partisipasi pendidikan mencapai nilai sempurna yaitu 100 persen karena pendidikan merupakan hak dasar bagi anak-anak dan dilindungi dalam konvensi hak-hak anak.

Salah satu dari tujuan pembangunan global adalah kesetaraan gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama

terhadap semua sumber daya dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal termasuk pendidikan. Menjaga dan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah pada anak perempuan dan laki-laki sangat diperlukan agar keduanya dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan nasional.

6.3 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS), ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Partisipasi sekolah diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. APS menitikberatkan pada partisipasi anak usia sekolah, APK dan APM memberikan fokus pada cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan. Meskipun jenjang pendidikan formal di Indonesia dimulai dari sekolah dasar, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mendorong terwujudnya pendidikan prasekolah.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus menerus. Dengan pendidikan yang baik akan dihasilkan tenaga kerja yang andal dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memacu pembangunan di berbagai bidang. Dengan pendidikan yang baik juga akan meningkatkan daya saing anak bangsa dalam kancah pergaulan global.

Memanfaatkan fasilitas pendidikan terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA / S * MK / M * A) dan pendidikan

tinggi (perguruan tinggi) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tabel 187 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Di Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			Jumlah
	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	3,81	29,40	66,79	100,00
Laki-laki	3,92	29,29	66,80	100,00
Perempuan	3,71	29,50	66,79	100,00
Perdesaan	4,49	26,85	68,66	100,00
Laki-laki	4,40	27,06	68,55	100,00
Perempuan	4,57	26,65	68,77	100,00
Perkotaan + Perdesaan	4,15	28,13	67,72	100,00
Laki-laki	4,16	28,18	67,67	100,00
Perempuan	4,14	28,09	67,77	100,00

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 187 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,15 persen. Hal ini menunjukkan masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak mengenyam pendidikan. Jika diagregasi menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan sebesar 4,49 persen, lebih tinggi dari pada penduduk perkotaan yang hanya sebesar 3,81 persen. Hal ini disebabkan oleh akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan

dengan penduduk perdesaan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan. Hal tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah yang lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas Pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 28,13 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 67,72 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (29,40 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (26,85 persen). Sementara itu, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan sebesar 66,79 persen dan di perdesaan sebesar 68,66 persen. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan.

Tabel 187 menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,14 persen sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yang nilainya sebesar 4,16 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas di daerah perkotaan yang tidak/belum sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu, pada daerah perdesaan terjadi sebaliknya, penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

6.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan

jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar untuk melihat persentase anak usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan peluang yang besar bagi anak untuk mengakses pendidikan di suatu daerah. APS pada setiap kelompok umur menunjukkan besarnya peluang bersekolah pada kelompok umur tersebut. Indikator ini tidak hanya memperhitungkan jenjang pendidikan formal namun juga jenjang pendidikan non-formal.

APS dibedakan menurut kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan. Indikator ini tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk yang bersekolah (tanpa mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan) terhadap total seluruh penduduk. Indikator APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur, yaitu (i) APS 7-12 tahun, (ii) APS 13-15 tahun, (iii) 16-18 tahun, dan (iv) APS 19-23 tahun. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi

Dilihat dari kelompok umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil seiring bertambahnya umur. Partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) sudah lebih dari 95 persen. Akan tetapi, APS 16-18 tahun masih berkisar di angka 73 persen. Meskipun demikian, APS 16-18 tahun meningkat secara perlahan setiap tahun. Di sisi lain, APS 19-23 tahun sebesar 27,61 persen.

Artinya, satu dari empat penduduk kelompok umur 19-23 tahun sedang bersekolah. Kelompok umur 19- 23 tahun bersesuaian dengan kelompok umur jenjang pendidikan PT. Akan tetapi, penghitungan indikator APS tidak mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan penduduk sehingga angka tersebut tidak menunjukkan partisipasi sekolah penduduk pada jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan dasar untuk semua, khususnya kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Angka partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 dan 13- 15 tahun menjadi sasaran kinerja Kemdikbud yang dimuat dalam Renstra Kemdikbud 2020-2024. Lebih jauh, pemerintah melalui Kemdikbud menyoroti isu ketimpangan ekonomi dalam partisipasi sekolah. Pemerintah berharap kemerdekaan belajar merata untuk semua kelompok ekonomi masyarakat.

Tabel 188 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	99,16	96,10	73,42	28,96
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	99,11	95,24	71,90	26,79
Perempuan	99,21	96,99	75,01	31,20
Status Disabilitas				
Disabilitas	87,92	70,70	42,00	21,03
Nondisabilitas	99,20	96,26	73,60	29,01
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	98,77	93,70	65,45	18,58
Kuintil 2	99,25	95,88	72,06	22,40
Kuintil 3	99,19	96,52	75,27	25,50
Kuintil 4	99,37	97,46	75,66	30,55
Kuintil 5	99,37	97,65	79,27	45,01
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,46	97,18	75,91	33,84
Perdesaan	98,77	94,66	69,92	21,29

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 241 menunjukkan perbedaan besaran angka partisipasi sekolah pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) dan terbawah (Kuintil 1). Perbedaan tersebut semakin nyata terlihat seiring kenaikan kategori kelompok umur. Ketimpangan ekonomi tampak samar pada APS 7-12 tahun. Hal ini sejalan dengan besarnya APS 7-12 tahun.

Di sisi lain, APS 13-15 tahun pada kuintil 1 terpaut sekitar 4 persen poin dari nilai kuintil 5. Selisih tersebut semakin besar pada APS 16-18 tahun dengan selisih hampir 18 persen poin. Peningkatan APS 13-15 dan 16-18 tahun dapat dilakukan dengan menyoal penduduk kelompok pengeluaran terbawah

Sementara itu, pemerintah membuka usia sekolah dasar dimulai pada usia 7 tahun, namun hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan partisipasi sekolah sudah terlihat pada kelompok umur di bawah 7 tahun. Sebesar 1,88 persen penduduk umur 5 tahun sudah memasuki jenjang pendidikan dasar. Kemudian, terdapat 39,17 persen penduduk umur 6 tahun yang sedang bersekolah. Temuan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang memberikan kesempatan anak usia 5 tahun 6 bulan untuk dapat diterima pada jenjang sekolah dasar dengan sejumlah persyaratan

APS kelompok umur 7-12 tahun nyaris menyentuh angka 100 persen. Artinya hampir semua anak umur 7-12 tahun masih bersekolah. Nilai APS semakin kecil seiring kenaikan kelompok umur. Dilihat menurut disagregasi indikator APS, kesenjangan partisipasi sekolah antar gender tidak kentara pada semua kelompok umur. Perempuan cenderung memberikan kontribusi lebih besar dalam partisipasi sekolah. Kelompok dengan partisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan kategori lain pada masing-masing karakteristik adalah mereka yang tinggal di perdesaan, kelompok disabilitas dan status ekonomi rumah tangga yang rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Ketimpangan nilai indikator APS antar kelompok disagregasi semakin lebar seiring kenaikan kelompok umur. Semakin mendekati usia dewasa, peluang kegiatan ekonomi semakin terbuka untuk individu. Hal ini kemudian menimbulkan *trade off* antara menghabiskan waktu untuk sekolah atau

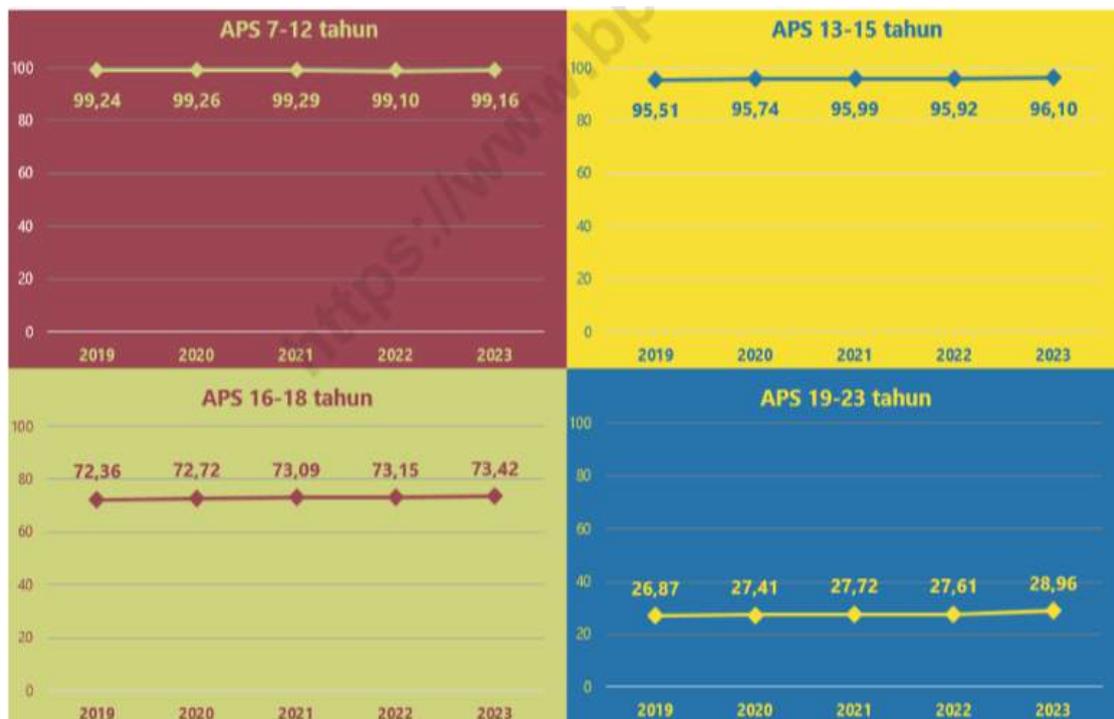
menghasilkan pendapatan (bekerja). Mereka yang kurang beruntung secara ekonomi cenderung sulit bertahan di sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Pada tahun 2023, APS untuk kelompok umur 5-6 tahun mengalami peningkatan sebesar 20,63 persen dibanding tahun 2022. Secara umum, peningkatan ini juga terjadi untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengikuti sekolah pada umur 5-6 tahun lebih besar yaitu 23,31 persen dibanding perempuan sebesar 21,93 persen. APS umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun terbilang cukup tinggi walaupun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya APS rentang umur tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sudah berjalan efektif. Pada tahun 2023, APS umur 7-12 tahun sebesar 99,16 persen, APS umur 13-15 tahun sebesar 96,10 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk APS pada setiap kelompok lebih didominasi oleh perempuan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, APS pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun lebih tinggi di daerah perkotaan, sedangkan pada kelompok umur 5-6 tahun dan 7-12 tahun kebalikannya. Hal ini menandakan penduduk dengan kelompok umur 13-18 tahun diperkotaan lebih banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan dibandingkan di perdesaan. Untuk umur 16-18 tahun, APS mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 83,71 persen menjadi 73,42 persen di tahun 2023. Partisipasi sekolah umur 16-18 tahun lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu sebesar 75,91 persen dibanding daerah perdesaan sebesar 69,92 persen.

Gambar 54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2019-2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 54 secara umum, capaian APS pada tahun 2023 di masing-masing kelompok umur cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Capaian APS kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk kelompok umur 7-12 tahun terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Sementara itu, capaian APS kelompok umur 13-15 tahun berada pada kisaran yang hampir sama, yaitu 96,10 persen. Tingginya capaian indikator APS pada jenjang pendidikan dasar ini mengindikasikan keberhasilan program Wajib Belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian Supriyadi (2010, dalam Fatah, Suhaili, & Farida, 2021) menjelaskan bahwa tingginya partisipasi pendidikan pada usia ini juga didukung oleh minat masyarakat untuk bersekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat karena tidak ada pungutan biaya.

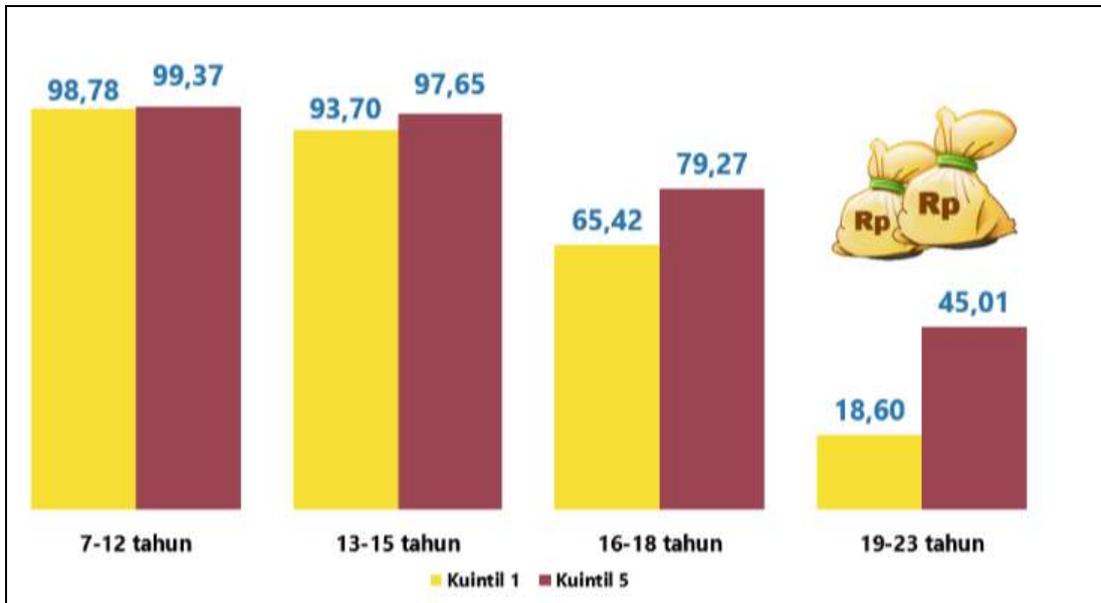
Capaian APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,42 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APS yang merepresentasikan usia sekolah jenjang menengah ini mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian masih diperlukan upaya peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan supaya penduduk kelompok umur 16-18 tahun dapat menuntaskan Wajib Belajar 12 tahun atau setidaknya dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SM/ sederajat. Sementara itu, capaian APS kelompok umur 19-23 tahun sebesar 28,96 persen, pada tahun 2023. Cukup rendahnya capaian APS pada kelompok umur yang lebih tinggi ini sejalan dengan penelitian Arum dan Adry (2020) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini dikarenakan dengan semakin bertambahnya umur, seseorang akan cenderung memutuskan untuk bekerja atau menikah dibanding bersekolah.

Status sosial ekonomi seringkali digunakan sebagai indikator kesejahteraan yang menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam pengambilan keputusan untuk bersekolah (Cendekia, 2021). Faktor ekonomi rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat Pendidikan seseorang. Meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang membuat uang masuk dan bulanan menjadi gratis, tetapi masih ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2015) menyebutkan bahwa anak yang berada dalam rumah tangga pada tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak bersekolah dibanding anak yang berada dalam rumah tangga pada tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dengan demikian, semakin baik kesejahteraan rumah tangga, semakin mudah pula rumah tangga tersebut untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak mereka.

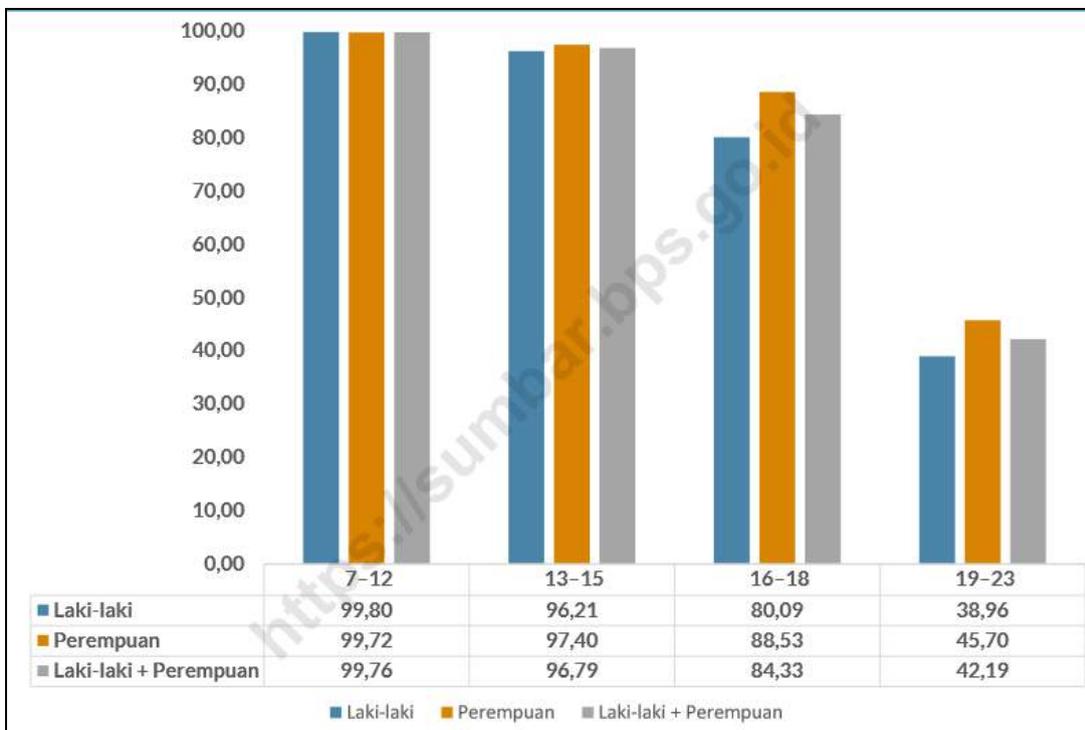
Gambar berikut menunjukkan capaian APS pada kelompok pengeluaran terbawah (Kuintil 1) dan teratas (Kuintil 5). Perbedaan capaian APS antara kelompok pengeluaran teratas dan terbawah semakin terlihat seiring dengan kenaikan kelompok umur. Pada APS kelompok umur 7-12 tahun, perbedaan capaian APS antara kelompok pengeluaran terbawah dan teratas tidak begitu terlihat (98,78 persen berbanding 99,37 persen). Sementara itu, pada APS kelompok umur 19-23 tahun perbedaan tersebut semakin lebar dengan selisih sebesar 26,41 persen poin

Gambar 55 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 56 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 56 memperlihatkan data APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Berdasarkan kelompok umur, APS pada kelompok umur 7–12 tahun yaitu 99,76 persen atau dapat dikatakan hampir semua anak usia 7–12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun yang menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat pada APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 84,33 persen. Hal ini berarti hanya 84,33 persen anak usia 16–18 tahun yang melanjutkan ke sekolah menengah, disaat pemerintah sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Tabel 189 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023

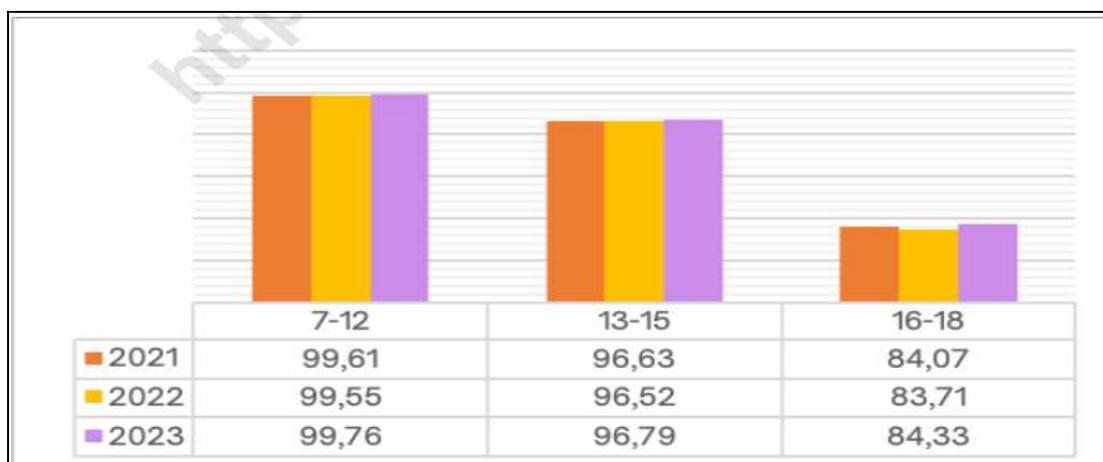
Daerah Tempat Tinggal; Status Ekonomi Rumah Tangga	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			
	7–12	13–15	16–18	19–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	99,73	96,35	88,64	50,05
40% bawah	99,50	95,59	89,44	44,90
40% menengah	99,94	96,70	88,42	49,37
20% atas	99,91	97,66	87,29	59,48
Perdesaan	99,80	97,26	79,58	32,53
40% bawah	99,91	96,71	76,37	31,88
40% menengah	99,56	98,18	81,74	31,89
20% atas	99,99	96,59	82,38	35,32
Perkotaan + Perdesaan	99,76	96,79	84,33	42,19
40% bawah	99,72	96,15	82,99	38,37
40% menengah	99,75	97,41	85,37	42,07
20% atas	99,95	97,18	84,90	49,31

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Angka partisipasi sekolah juga bisa dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah tempat tinggal yang dapat dilihat pada tabel 190 APS kelompok umur 7–12 dan 13–15 untuk daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, sedangkan pada kelompok umur 16–18 tahun dan 19–23 tahun APS di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan . Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan pada kelompok umur 16–18 tahun dan kelompok umur 19–23 tahun semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19–23 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan perguruan tinggi dengan perbedaan sekitar 17,52 persen.

Berdasarkan data tahun 2023, gambar 57 memperlihatkan APS Provinsi Sumatera Barat untuk usia 7-12 tahun telah mencapai lebih dari 99 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia tersebut telah memperoleh pendidikan dasar. APS pada kelompok usia 13-15 tahun juga terbilang cukup baik. Pada tahun 2023 APS pada kelompok umur ini tercatat di atas 96 persen. Demikian juga untuk APS kelompok umur 16-18 tahun yang di tahun 2023 tercatat di kisaran 84,33 persen. Besaran APS yang tergolong cukup tinggi pada kelompok-kelompok umur tersebut sekiranya sejalan dengan program pemerintah terkait kewajiban belajar 12 tahun. Secara umum, sebagian besar penduduk usia sekolah sudah dapat menikmati fasilitas Pendidikan.

Gambar 57 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023



Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan untuk anak usia sekolah bersifat fundamental. Dengan kata lain, dalam kondisi apapun, anak usia sekolah khususnya yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar tetap berpartisipasi sekolah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah masih relatif tinggi. Hampir seluruh anak pada kedua kelompok umur masih bersekolah.

Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan ekonomi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan termasuk dalam bidang pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan yang tidak diimbangi oleh pembangunan di daerah perdesaan menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Akses pendidikan yang lebih mudah dan fasilitas pendidikan yang lebih baik dari daerah perdesaan menyebabkan APS di daerah perkotaan menjadi lebih tinggi. Di daerah perdesaan menunjukkan bahwa salah satu penyebab anak putus sekolah adalah sulitnya akses menuju sekolah yang sulit dan jauh.

6.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur dari official age sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas.

Angka Partisipasi kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi penduduk secara umum yang telah mengakses fasilitas pendidikan tanpa melihat usia menurut tingkatan pendidikan, sehingga nilai APK bisa melebihi 100 persen..

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang

tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Semakin tinggi jenjang Pendidikan semakin kecil nilai APK

Gambar 58 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Capaian APK pada jenjang SD/ sederajat mengalami penurunan. Pada tahun 2023, capaian APK jenjang SD/ sederajat sebesar 105,62 persen, sedangkan pada tahun 2022 capaiannya sebesar 106,27 persen (Gambar 3.8). Sementara itu, APK jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT pada tahun 2023 justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, capaian APK untuk jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT pada tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar 100,00 persen, 95,00 persen, dan 37,63 persen (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras dan upaya yang solid agar capaian APK yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024.

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil nilai APK. Indikator APK SD/ sederajat dihitung berdasarkan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Nilai APK SD/ sederajat yang mencapai 105,62 pada tahun 2023 menunjukkan lebih besarnya penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat dengan komposisi umur yang berada di luar 7-12 tahun. Hasil ini sejalan dengan partisipasi sekolah anak umur 6 tahun yang menunjukkan hampir 40 persen anak umur 6 tahun sudah bersekolah di jenjang pendidikan dasar (Gambar 58).

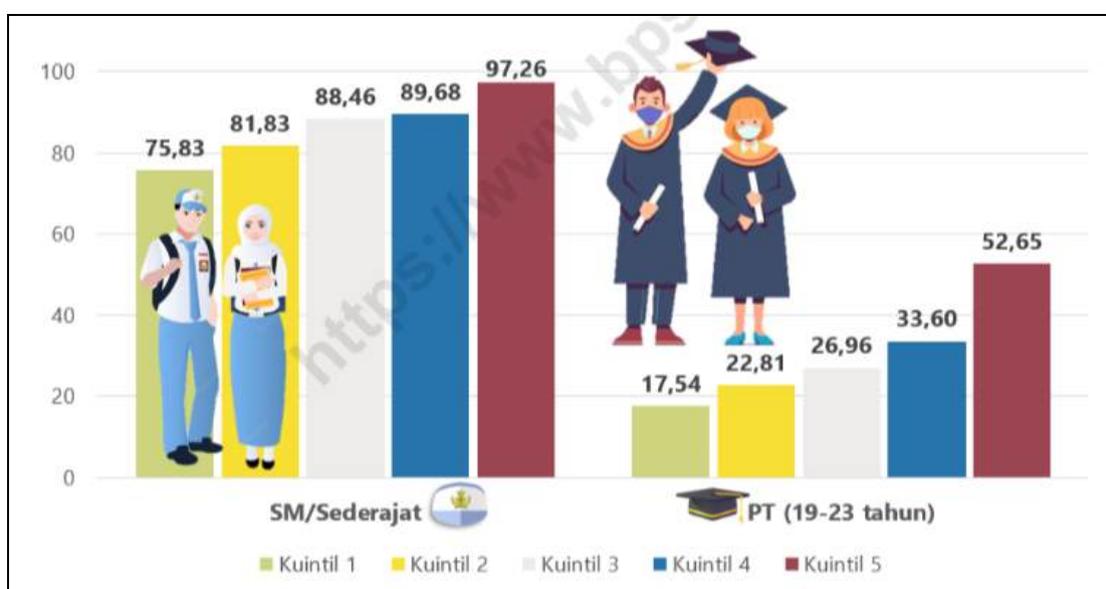
Sementara itu, capaian APK SD/ sederajat dan APK SMP/ sederajat lebih besar dibandingkan APK jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pada tahun 2023, APK SM/ sederajat sebesar 92,51 dengan sumbangan terbesar dari penduduk kelompok pengeluaran menengah atas.

Keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan dalam dunia Pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Karini (2018) menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat ekonomi rendah. Biaya pendidikan yang relatif besar, terlebih pada Pendidikan menengah dan tinggi, membuat masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Penduduk miskin masih sulit dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Padahal, kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari kemiskinan (Elmira dan Suryadarma, 2018). Seperti yang terlihat pada gambar 59, capaian APK PT tahun 2023 pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya sebesar 17,54 persen. Capaian tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok dengan pengeluaran tertinggi (Kuintil 5). Pada kelompok ini, lebih dari separuh penduduk berusia 19-23 tahun sedang bersekolah di pendidikan tinggi (52,65 persen). Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.

Masih sulitnya penduduk miskin dalam mengakses pendidikan tinggi ini sejalan dengan penelitian Ridho Al Izzati (2021) yang menemukan bahwa anak dari rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok 60 persen termiskin hanya memiliki peluang 1 persen hingga 20 persen untuk melanjutkan kuliah. Peluang tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan anak dari rumah tangga yang termasuk kelompok 61-100 persen terkaya memiliki peluang 20 persen hingga 60 persen untuk melanjutkan pendidikan tinggi

Gambar 59 Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT menurut Kelompok Pengeluaran, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Untuk menggenjot angka partisipasi kasar PT, upaya intervensi harus lebih keras lagi dibandingkan dengan APK SM/ sederajat. Salah satu sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun adalah meningkatnya partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan menengah (SM/ sederajat) yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan itu ditandai dengan tingginya nilai APK SM/ sederajat. Pemerintah menargetkan capaian indikator APK SM/ sederajat level provinsi melebihi 95 (Renstra Kemdikbud 2020-2024)

Tabel 190 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	108,38	91,55	97,24	52,56
Laki-laki	110,54	88,04	96,83	47,74
Perempuan	106,29	95,55	97,62	57,78
Perdesaan	107,71	93,87	86,25	31,82
Laki-laki	108,50	96,00	81,36	27,60
Perempuan	106,90	91,75	91,45	36,44
Perkotaan + Perdesaan	108,03	92,66	92,00	43,26
Laki-laki	109,46	91,74	89,20	38,67
Perempuan	106,60	93,66	94,78	48,24

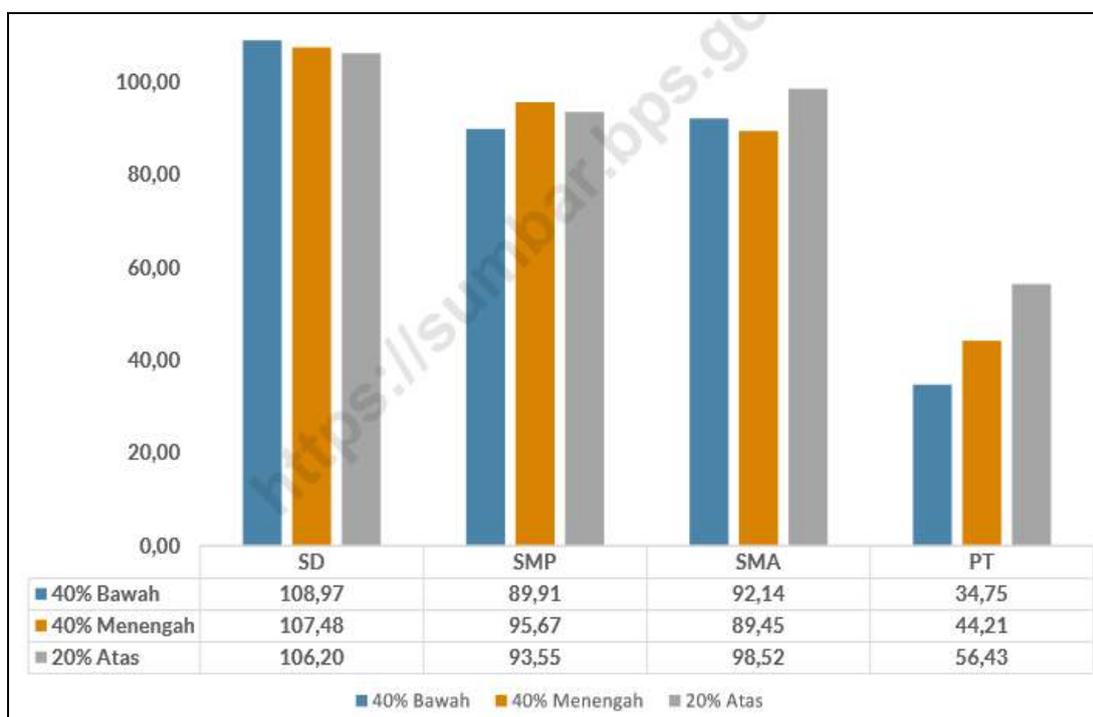
Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Pada tabel 190 terlihat APK untuk SD/ sederajat secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan dan daerah perkotaan maupun perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam Pendidikan SD/ sederajat masih ada yang berada di luar kelompok umur 7–12 tahun. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat orang tua yang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati TK sejenisnya terlebih dahulu ataupun sudah melewati tetapi belum cukup umur. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena terdapatnya murid yang tinggal kelas atau mengulang kelas.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga semakin rendah. APK jenjang pendidikan SMP/ sederajat pada tahun 2023 sebesar 92,66 persen, angka ini masih di bawah target pemenuhan RPJMN untuk tahun 2024 sebesar 95,43 persen. Hal yang sama, APK perguruan tinggi yang

nilainya sebesar 43,26 persen juga masih di bawah target RPJMN 2024 (43,86 persen). Akan tetapi, APK SD/ sederajat (108,03 persen) dan APK SMA/ sederajat (92,00 persen) sudah mencapai target RPJMN 2020–2024 dengan target APK SD/ sederajat yaitu 106,71 persen dan APK SMA/ sederajat 84,02 persen.

Gambar 60 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Barat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Akan tetapi, terdapat perbedaan APK laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan. APK laki-laki hanya lebih tinggi pada jenjang pendidikan SD/ sederajat di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, pada SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi APK perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan

SMP/ sederajat, APK di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Pada jenjang SD/ sederajat APK daerah perkotaan (108,38 persen) lebih tinggi daripada daerah perdesaan (107,71 persen). Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perkotaan yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar dari pada di perdesaan. Ini menunjukkan sistem Pendidikan SD/ sederajat di perdesaan relatif sedikit lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

Tabel 191 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,04	97,06	99,25	56,72
Sumatera Utara	105,29	91,63	100,70	37,03
Sumatera Barat	108,38	91,55	97,24	52,56
Riau	104,39	98,15	91,21	47,89
Jambi	106,55	83,48	98,88	48,75
Sumatera Selatan	111,43	90,91	87,95	44,41
Bengkulu	106,42	95,68	101,81	57,23
Lampung	103,61	90,98	95,61	31,72
Kep. Bangka Belitung	103,38	88,78	95,71	20,55
Kep. Riau	106,13	92,16	91,89	30,09
DKI Jakarta	103,63	95,78	77,40	40,05
Jawa Barat	104,19	95,88	81,58	27,99
Jawa Tengah	105,15	92,84	93,15	30,94
DI Yogyakarta	105,18	95,48	90,35	80,10
Jawa Timur	103,75	94,00	93,95	38,24
Banten	106,26	97,63	77,62	36,30
Bali	103,05	97,07	95,42	40,14
Nusa Tenggara Barat	107,53	95,22	94,09	38,60
Nusa Tenggara Timur	111,24	89,64	101,63	52,00
Kalimantan Barat	107,65	88,16	94,39	35,50
Kalimantan Tengah	104,93	91,18	90,48	35,00
Kalimantan Selatan	106,11	84,85	81,23	37,12
Kalimantan Timur	106,46	92,53	93,72	48,79
Kalimantan Utara	100,86	96,53	101,84	30,50
Sulawesi Utara	104,63	93,45	86,55	40,87
Sulawesi Tengah	100,06	96,72	98,69	59,54
Sulawesi Selatan	105,55	89,27	91,70	53,75
Sulawesi Tenggara	108,20	83,56	97,41	61,43
Gorontalo	108,39	84,03	90,33	51,44
Sulawesi Barat	100,79	95,62	87,40	42,70
Maluku	108,47	90,87	103,62	60,55
Maluku Utara	106,20	92,19	101,28	57,76
Papua Barat	103,03	94,96	106,39	44,06
Papua	105,53	98,15	98,12	36,60
Indonesia	105,07	93,93	89,03	37,44

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Berdasarkan gambar 60 dapat dilihat bahwa capaian APK perguruan tinggi di Provinsi Sumatera barat tahun 2023 pada rumah tangga dengan pengeluaran rendah (40 persen bawah) hanya sebesar 34,75 persen. Capaian tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan kelompok pengeluaran tertinggi (20 persen atas) dalam mengkases pendidikan tinggi. Pada kelompok ini penduduk yang berumur 19–24 tahun lebih dari separuhnya sedang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini berarti keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat saat ini.

Tabel 192 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,71	94,72	90,85	36,12
Sumatera Utara	108,67	92,70	94,59	25,92
Sumatera Barat	107,71	93,87	86,25	31,82
Riau	105,95	89,68	80,42	26,96
Jambi	109,22	90,89	77,67	23,53
Sumatera Selatan	109,98	89,14	78,59	15,78
Bengkulu	108,27	91,72	90,20	26,48
Lampung	106,14	91,29	85,47	16,40
Kep. Bangka Belitung	109,88	88,10	78,22	15,08
Kep. Riau	104,79	95,43	80,15	14,75
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	105,83	89,92	69,01	14,60
Jawa Tengah	104,86	92,75	82,04	17,15
DI Yogyakarta	102,59	90,76	92,72	41,42
Jawa Timur	103,64	95,71	83,18	22,79
Banten	109,17	89,75	65,62	17,42
Bali	101,78	100,72	87,84	25,47
Nusa Tenggara Barat	106,59	91,52	92,30	25,97
Nusa Tenggara Timur	111,38	90,67	83,43	23,95
Kalimantan Barat	110,52	82,10	84,95	19,75
Kalimantan Tengah	108,53	85,66	81,87	20,42
Kalimantan Selatan	108,67	88,00	83,20	18,28
Kalimantan Timur	106,46	91,77	98,83	23,16
Kalimantan Utara	102,62	99,46	90,61	18,98
Sulawesi Utara	106,30	85,89	85,33	27,20
Sulawesi Tengah	103,81	91,39	82,94	28,52
Sulawesi Selatan	107,56	85,28	84,34	29,04
Sulawesi Tenggara	108,25	86,42	85,55	30,23
Gorontalo	109,05	76,12	88,03	23,87
Sulawesi Barat	105,10	82,60	89,73	27,00
Maluku	109,16	89,96	89,39	36,55
Maluku Utara	108,39	86,77	93,29	35,06
Papua Barat	113,18	89,01	90,17	26,00
Papua	86,00	76,30	64,86	13,44
Indonesia	106,34	90,61	82,56	22,04

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 193 Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,98	95,24	92,30	39,18
Sumatera Utara	106,56	92,82	97,40	28,08
Sumatera Barat	109,46	91,74	89,20	38,67
Riau	106,14	94,02	79,85	32,49
Jambi	108,09	89,10	78,06	29,17
Sumatera Selatan	110,95	89,23	79,97	22,64
Bengkulu	107,09	90,41	88,88	34,72
Lampung	104,86	91,08	87,73	19,21
Kep. Bangka Belitung	107,70	86,15	90,41	17,05
Kep. Riau	105,77	89,82	87,40	24,77
DKI Jakarta	104,18	97,03	72,24	39,39
Jawa Barat	104,06	95,89	74,85	25,17
Jawa Tengah	105,15	93,90	84,83	22,74
DI Yogyakarta	104,01	98,64	89,01	74,31
Jawa Timur	104,41	94,56	86,50	29,00
Banten	108,97	91,82	76,32	28,23
Bali	101,90	98,56	91,23	36,79
Nusa Tenggara Barat	106,36	92,74	92,38	36,46
Nusa Tenggara Timur	112,40	87,61	86,94	30,27
Kalimantan Barat	110,23	82,61	84,79	20,57
Kalimantan Tengah	108,67	85,71	86,73	22,34
Kalimantan Selatan	108,28	84,96	80,73	24,85
Kalimantan Timur	106,44	94,21	93,90	37,18
Kalimantan Utara	101,85	98,87	89,42	20,66
Sulawesi Utara	104,69	96,72	79,56	28,94
Sulawesi Tengah	102,18	91,76	83,70	34,31
Sulawesi Selatan	107,22	86,68	85,23	41,41
Sulawesi Tenggara	107,94	88,16	81,40	41,13
Gorontalo	108,45	75,03	85,20	31,45
Sulawesi Barat	104,14	84,73	80,84	26,00
Maluku	109,87	90,01	96,31	42,92
Maluku Utara	106,35	88,46	94,34	40,36
Papua Barat	108,87	89,80	94,72	33,38
Papua	90,89	79,62	75,42	22,03
Indonesia	105,84	92,59	83,49	29,12

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 194 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	107,97	95,79	95,26	47,84
Sumatera Utara	107,16	91,35	98,66	37,67
Sumatera Barat	106,60	93,66	94,78	48,24
Riau	104,55	91,83	90,66	39,32
Jambi	108,49	87,22	92,69	34,44
Sumatera Selatan	110,04	90,31	84,70	32,18
Bengkulu	108,26	95,85	100,13	41,52
Lampung	105,78	91,29	90,55	24,68
Kep. Bangka Belitung	104,41	90,98	86,07	19,34
Kep. Riau	106,15	95,91	94,04	32,40
DKI Jakarta	103,06	94,55	82,38	40,65
Jawa Barat	105,01	93,48	83,75	25,98
Jawa Tengah	104,87	91,64	91,13	26,92
DI Yogyakarta	105,04	89,90	92,65	73,84
Jawa Timur	102,98	94,93	92,08	34,65
Banten	104,90	100,24	73,79	36,87
Bali	103,54	97,76	95,73	36,10
Nusa Tenggara Barat	107,78	93,92	94,04	29,44
Nusa Tenggara Timur	110,29	93,29	90,37	35,28
Kalimantan Barat	108,67	86,47	92,46	30,91
Kalimantan Tengah	105,32	90,51	84,54	32,06
Kalimantan Selatan	106,52	88,04	83,68	31,48
Kalimantan Timur	106,48	90,13	96,50	45,79
Kalimantan Utara	101,16	96,40	106,28	34,28
Sulawesi Utara	106,14	83,60	93,53	42,06
Sulawesi Tengah	103,17	94,35	93,56	45,25
Sulawesi Selatan	106,07	87,59	90,94	42,64
Sulawesi Tenggara	108,55	82,36	99,86	47,41
Gorontalo	109,06	84,19	92,91	41,44
Sulawesi Barat	104,32	85,15	98,57	34,43
Maluku	107,92	90,72	95,61	54,62
Maluku Utara	109,41	87,88	96,96	45,89
Papua Barat	109,63	93,18	98,92	34,43
Papua	91,31	84,46	72,24	17,76
Indonesia	105,39	92,43	89,31	33,87

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 195 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,48	95,51	93,80	43,50
Sumatera Utara	106,85	92,11	98,02	32,67
Sumatera Barat	108,03	92,66	92,00	43,26
Riau	105,35	92,91	85,12	35,78
Jambi	108,29	88,20	85,23	31,77
Sumatera Selatan	110,51	89,78	82,26	27,26
Bengkulu	107,67	93,10	94,53	38,01
Lampung	105,31	91,19	89,12	21,88
Kep. Bangka Belitung	106,09	88,51	88,28	18,19
Kep. Riau	105,96	92,58	90,58	28,50
DKI Jakarta	103,63	95,78	77,40	40,05
Jawa Barat	104,53	94,69	79,07	25,57
Jawa Tengah	105,01	92,80	87,84	24,78
DI Yogyakarta	104,52	94,28	90,82	74,08
Jawa Timur	103,71	94,74	89,26	31,84
Banten	106,96	95,71	75,02	32,31
Bali	102,70	98,18	93,40	36,46
Nusa Tenggara Barat	107,07	93,32	93,23	32,99
Nusa Tenggara Timur	111,35	90,41	88,66	32,65
Kalimantan Barat	109,46	84,49	88,52	25,74
Kalimantan Tengah	106,98	88,06	85,63	26,95
Kalimantan Selatan	107,41	86,44	82,21	28,10
Kalimantan Timur	106,46	92,28	95,16	41,21
Kalimantan Utara	101,52	97,60	97,78	27,07
Sulawesi Utara	105,41	90,12	86,03	35,41
Sulawesi Tengah	102,66	93,06	88,69	39,71
Sulawesi Selatan	106,65	87,15	88,04	42,02
Sulawesi Tenggara	108,23	85,28	90,31	44,32
Gorontalo	108,75	79,66	89,11	36,23
Sulawesi Barat	104,23	84,95	89,18	30,27
Maluku	108,90	90,35	95,96	48,55
Maluku Utara	107,81	88,17	95,64	43,03
Papua Barat	109,24	91,41	96,79	33,89
Papua	91,10	81,91	73,90	19,99
Indonesia	105,62	92,51	86,34	31,45

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 196 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Angka Partisipasi Kasar (APK)/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>					
	SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>		SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>		SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	116,45	109,95	77,61	85,40	68,54	77,79
2. Pesisir Selatan	112,91	109,76	80,69	91,25	101,19	84,31
3. Solok	106,10	105,98	114,59	94,32	79,81	85,57
4. Sijunjung	108,69	107,06	92,19	91,32	84,33	85,35
5. Tanah Datar	110,17	109,06	98,44	88,12	87,89	97,00
6. Padang Pariaman	110,92	110,54	98,37	95,49	93,56	94,96
7. Agam	110,62	109,48	95,03	96,40	84,78	92,22
8. Lima Puluh Kota	105,55	106,29	85,11	91,26	95,89	85,86
9. Pasaman	110,79	109,44	100,23	101,90	80,54	83,78
10. Solok Selatan	115,29	114,05	93,40	89,83	85,11	83,37
11. Dharmasraya	107,32	106,84	98,50	90,19	72,93	88,18
12. Pasaman Barat	107,49	108,02	93,42	91,26	86,09	87,56
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	103,76	104,58	86,26	93,67	101,77	101,89
2. Solok	108,40	108,90	86,32	80,95	95,84	97,94
3. Sawahlunto	110,24	110,35	105,42	103,44	94,35	96,09
4. Padang Panjang	106,51	106,07	82,02	93,36	109,73	97,51
5. Bukittinggi	106,34	106,72	86,77	93,12	98,95	98,85
6. Payakumbuh	109,04	110,60	98,79	89,50	86,25	94,93
7. Pariaman	112,97	107,52	86,79	86,41	113,91	114,29
Sumatera Barat	108,47	108,03	92,57	92,66	90,66	92,00

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Dalam tabel 196 ditunjukkan bahwa APK Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir mengalami fluktuasi pada beberapa tingkatan pendidikan. Untuk APK SD/ sederajat, terjadi penurunan sebesar 0,44% dari 108,47 menjadi 108,03. Untuk SMP/sederajat terjadi peningkatan sebesar 0,06% menjadi 92,66%. Sedangkan untuk APK SMA/sederajat terjadi peningkatan sebesar 1,34% menjadi 92,00%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK pada tingkat pendidikan tersebut.

Persentase APK melebihi 100 persen menandakan bahwa terdapat penduduk yang bersekolah di bawah atau di atas usia yang seharusnya. Karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas. Misalnya, pada jenjang SD, APK menunjukkan angka lebih besar dari 100 berarti jumlah

peserta didik yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD yaitu 7-12 tahun.

Keterbatasan jumlah sekolah SMA di wilayah perdesaan serta sulitnya akses ke sekolah dapat menjadi penghalang anak untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah 12 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan menambah jumlah sekolah dan memperbaiki akses ke sekolah sehingga peserta didik dapat mengakses sekolah dengan mudah dan aman.

6.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/ sederajat (7-12 tahun), SMP/ sederajat (13-15 tahun) dan SM/ sederajat (16-18 tahun). Untuk jenjang pendidikan tinggi, indikator APM kurang tepat digunakan karena besarnya variasi durasi program pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM berfungsi untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Perubahan APS sering diikuti pula dengan perubahan APM pada arah yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Nilai APM selalu kurang dari atau sama dengan nilai APK. Selisih keduanya merupakan kejadian terlalu dini/terlambat mendaftar dan pengulangan kelas di jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin besar nilai beda APK dan APM. Artinya, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih cenderung tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah.

Akan tetapi ketepatan waktu dalam partisipasi sekolah bukan merupakan isu utama dalam agenda pendidikan Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, pemerintah mengedepankan keikutsertaan semua penduduk untuk mengakses pendidikan. Adanya pandemi Covid 19 juga menghasilkan kebijakan pendaftaran peserta didik baru dengan melonggarkan syarat akademik sehingga batas atas umur menjadi lebih panjang dari usia sekolah resmi sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/Sederajat (7-12 tahun), SMP/Sederajat (13-15 tahun), dan SM/Sederajat (16-18 tahun). Untuk jenjang pendidikan tinggi, indikator APM kurang tepat digunakan karena besarnya variasi durasi program pendidikan (UNESCO, 2009). APM tidak masuk target Renstra Kemdikbud dan RPJMN 2020-2024. Ketepatan waktu dalam partisipasi sekolah bukan merupakan isu utama dalam agenda pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, pemerintah mengedepankan keikutsertaan semua penduduk untuk mengakses pendidikan.

Pemerintah, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemdikbudristek 2020-2024, tidak memasukkan APM sebagai bagian dari salah satu agenda pencapaian target pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam Target 4.5 menggunakan indikator APM untuk melihat kesenjangan antar kelompok dalam mengakses pendidikan sebagai upaya menghilangkan disparitas gender dan menjamin akses pendidikan yang sama bagi semua penduduk (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Kelompok penduduk yang dibandingkan antara lain adalah laki-laki dan perempuan, perkotaan dan

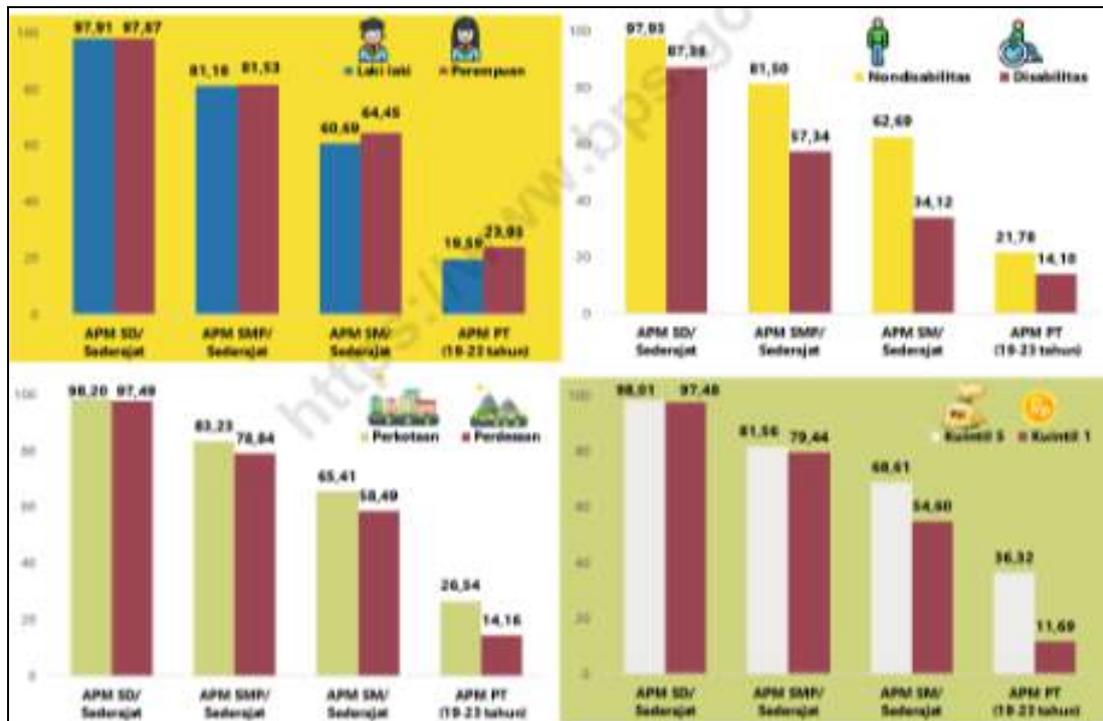
perdesaan, disabilitas dan nondisabilitas, serta kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) dan terbawah (kuintil 1).

Program peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang digalakkan pemerintah melalui Wajib Belajar tampaknya cukup berhasil menutup jurang kesenjangan partisipasi pendidikan jenjang dasar. Akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar telah mencapai level yang patut dibanggakan. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.10, pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat hampir tidak ada perbedaan dalam mengakses pendidikan, baik antar jenis kelamin, wilayah, maupun tingkat ekonomi keluarga. Namun, kesenjangan mulai terlihat pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM digunakan untuk mengetahui partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7–12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa capaian APM perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD/ sederajat lebih besar dibandingkan laki-laki (Gambar 60). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) dalam laporannya memberikan gambaran, pada umumnya perempuan lebih mampu bertahan bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan yang sudah berada di sekolah sudah sangat terseleksi sehingga mampu bertahan dengan lebih baik di sekolah. Styawan (2018) menyebutkan rendahnya APM laki-laki pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan laki-laki cenderung meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak umur yang cukup, untuk bekerja.

Gambar 61 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah banyak tertuang dalam berbagai regulasi. Harapannya penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Namun dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Seperti yang terlihat pada gambar 60, kesenjangan partisipasi pendidikan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas tampak terlihat pada semua jenjang pendidikan. APM kelompok bukan disabilitas pada semua jenjang pendidikan capaiannya lebih besar dibanding kelompok disabilitas.

Secara umum, menurut Fitriyani, (2021) partisipasi penyandang disabilitas di ranah pendidikan masih rendah karena banyaknya hambatan yang dialami baik karena minimnya dukungan dari support system mereka, seperti teman, orang tua dan keluarga, juga karena infrastruktur (sarana dan prasarana), maupun suprastruktur (kebijakan) yang kurang tersedia.

Dilihat menurut jenis kelamin, ketimpangan APM tampak samar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Artinya, penduduk umur 7-12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat. Akan tetapi, pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola ini tampak berkebalikan dari hipotesis awal disparitas gender yang umumnya menyoroti kelompok perempuan sebagai kelompok vulnerable (SDGs Tujuan 5).

Sementara itu, kesenjangan partisipasi pendidikan tampak nyata pada kelompok bukan disabilitas dan disabilitas serta perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan tersebut konsisten terjadi pada semua jenjang pendidikan. APM semua jenjang pendidikan lebih besar pada kelompok perkotaan dibandingkan perdesaan dan kelompok nondisabilitas terhadap kelompok disabilitas. Ketidakmerataan ini perlu dijadikan perhatian pemerintah, tanpa mengesampingkan isu kelompok pengeluaran yang saat ini sudah masuk dalam sasaran Renstra Kemdikbud.

Tabel 197 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Karakteristik (1)	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat (2)	SMP/ sederajat (3)	SM/ sederajat (4)	PT (19-23 Tahun) (5)
Indonesia	97,89	81,35	62,53	21,73
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	97,91	81,18	60,69	19,59
Perempuan	97,87	81,53	64,45	23,93
Status Disabilitas				
Disabilitas	87,38	57,34	34,12	14,10
Nondisabilitas	97,93	81,50	62,69	21,78
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	97,48	79,44	54,60	11,69
Kuintil 2	98,16	81,90	60,48	15,86
Kuintil 3	97,95	81,40	64,41	18,69
Kuintil 4	97,95	82,74	65,23	23,46
Kuintil 5	98,01	81,56	68,61	36,32
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	98,20	83,23	65,41	26,54
Perdesaan	97,49	78,84	58,49	14,16

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Sementara itu, nilai APM pada jenjang pendidikan menengah ke atas yang didisagregasi berdasarkan tipe daerah dan status disabilitas mengindikasikan adanya disparitas, dimana nilai APM rendah terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal di perdesaan dan penyandang disabilitas. Kemudian, dilihat dari status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi kuintil ekonomi, semakin besar nilai APM pada jenjang pendidikan menengah ke atas.

Tabel 198 menunjukkan APM jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan APM jenjang perguruan tinggi. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK padatahun 2023. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, capaian APM perempuan di Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki untuk setiap jenjang pendidikan kecuali jenjang SD/ sederajat.

Jika dilihat dari selisihnya, APM SD/ sederajat antara laki-laki dan perempuan tidak signifikan, nilai selisihnya hanya 0,08 persen. Jika dilihat capaian menurut wilayah tempat tinggal, APM perkotaan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan APM di perdesaan. Sementara itu, untuk APM jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Nilai APM juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan untuk kedua wilayah tempat tinggal.

Tabel 198 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	98,77	79,14	72,78	40,07
Laki-laki	99,14	77,22	69,25	35,54
Perempuan	98,41	81,33	76,06	44,98
Perdesaan	99,00	81,39	65,23	22,54
Laki-laki	98,74	81,34	60,88	18,79
Perempuan	99,27	81,44	69,86	26,66
Perkotaan + Perdesaan	98,89	80,22	69,18	32,21
Laki-laki	98,93	79,13	65,12	28,00
Perempuan	98,85	81,39	73,21	36,79

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 199 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Angka Partisipasi Murni (APM)/ Net Enrollment Rate					
	SD/MI/Sederajat Primary School		SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School		SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	96,99	96,94	61,14	67,69	44,33	56,74
2. Pesisir Selatan	99,55	99,42	79,95	80,73	74,49	65,03
3. Solok	98,71	98,79	79,13	79,85	57,03	64,31
4. Sijunjung	99,95	99,86	75,22	82,09	59,25	59,47
5. Tanah Datar	98,70	98,36	76,22	78,60	69,22	74,20
6. Padang Pariaman	99,26	99,15	77,62	78,22	71,16	73,75
7. Agam	98,46	98,79	79,70	81,50	68,80	70,21
8. Lima Puluh Kota	99,62	99,67	80,45	80,08	72,64	58,84
9. Pasaman	97,97	97,79	77,12	84,07	54,77	72,77
10. Solok Selatan	99,18	99,32	76,79	82,23	64,06	61,46
11. Dharmasraya	99,31	98,94	76,64	76,47	56,25	57,07
12. Pasaman Barat	98,28	98,38	82,41	81,75	65,99	67,28
Kota/Municipality						
1. Padang	98,20	98,72	81,59	80,55	77,27	74,50
2. Solok	99,69	99,85	75,96	77,36	72,04	75,03
3. Sawahlunto	99,03	98,89	82,94	84,69	70,98	73,72
4. Padang Panjang	99,03	98,99	79,02	80,40	75,53	75,86
5. Bukittinggi	99,85	99,85	81,98	82,83	77,94	76,92
6. Payakumbuh	98,18	98,80	78,97	80,01	72,62	73,40
7. Pariaman	98,99	99,00	75,53	78,50	77,95	84,41
Sumatera Barat	98,80	98,89	78,86	80,22	68,38	69,18

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 200 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Karakteristik Characteristics	Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio (NER)			
	SD Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Perguruan Tinggi College
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan/Urban				
Laki-Laki/Male	99,14	77,22	69,25	35,54
Perempuan/Female	98,41	81,33	76,06	44,98
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	98,77	79,14	72,78	40,07
Perdesaan/Rural				
Laki-Laki/Male	98,74	81,34	60,88	18,79
Perempuan/Female	99,27	81,44	69,86	26,66
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	99,00	81,39	65,23	22,54
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				
Laki-Laki/Male	98,93	79,13	65,12	28,00
Perempuan/Female	98,85	81,39	73,21	36,79
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female	98,89	80,22	69,18	32,21

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jenjang pendidikan dengan APM tertinggi di Sumatera Barat adalah jenjang SD/MI yang mencapai 98,89 persen, yang menunjukkan sebanyak lebih dari 98 persen penduduk berusia 7-12 tahun sedang bersekolah tepat waktu.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, tabel 202 menunjukkan secara umum APM penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali SD pada tahun 2023. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APM perempuan tercatat sebesar 98,85 persen, sedikit di bawah APM SD laki-laki tercatat sebesar 98,93 persen. Pada jenjang SMP,

APM perempuan tercatat sebesar 81,39 persen sementara APM laki-laki mencapai 79,13 persen. Kemudian pada jenjang SMA, APM perempuan sebesar 73,21 cukup signifikan berada di atas APM SMA laki-laki yang tercatat sebesar 65,12 persen. Kesenjangan nilai APM antar gender paling lebar tercatat pada jenjang pendidikan SMA, yakni mencapai 8,09 poin. Sementara yang paling berimbang tercatat pada jenjang Pendidikan SD, APM pada kedua jenis kelamin hanya terpaut 0,08 poin.

Gambar 62 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023



Sumber: BPS, Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 201 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat menurut Jenis Kelamin (%), 2021-2023

APM	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD	98,81	98,78	98,93	98,82	98,82	98,85	98,82	98,80	98,89
SMP	76,64	78,67	79,13	80,91	79,08	81,39	78,75	78,86	80,22
SMA	68,46	62,62	65,12	69,56	73,75	73,21	68,99	68,38	69,18

Sumber: BPS, Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 202 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023

Karakteristik <i>Characteristics</i>	Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio (NER)			
	SD <i>Primary School</i>	SMP <i>Junior High School</i>	SMA <i>Senior High School</i>	Perguruan Tinggi <i>College</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan/Urban				
Laki-laki/Male	98,24	83,54	63,94	24,29
Perempuan/Female	98,15	82,90	66,92	28,83
Laki-laki+Perempuan/Male+Female	98,20	83,23	65,41	26,54
Perdesaan/Rural				
Laki-laki/Male	97,48	78,03	56,21	12,38
Perempuan/Female	97,51	79,69	60,92	16,04
Laki-laki+Perempuan/Male+Female	97,49	78,84	58,49	14,16
Perkotaan dan Perdesaan/Urban and Rural				
Laki-laki/Male	97,91	81,18	60,69	19,59
Perempuan/Female	97,87	81,53	64,45	23,93
Laki-laki+Perempuan/Male+Female	97,89	81,35	62,53	21,73

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan, 2023

Secara umum, kondisi APM Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan APM SD di tahun 2023 sebesar 97,89 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 97,78 persen. Sedangkan APM SMP mengalami peningkatan dari 80,82 persen pada tahun 2022 menjadi 81,35 persen di tahun 2023. Selanjutnya, untuk tingkat SMA APM mengalami peningkatan dari 61,73 persen menjadi 62,53 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM SD untuk perempuan dan APM SD untuk laki-laki yaitu 97,91, persen dan 97,87 persen. APM SMP untuk perempuan lebih besar dibandingkan APM SMP untuk laki-laki, sama dengan APM SMA. APM perempuan untuk SMP yaitu sebesar 81,53 persen

sedangkan APM laki-laki 81,18 persen. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan 64,45 persen berbanding 60,69 persen APM laki-laki. Anak laki-laki dalam keluarga terutama pada keluarga ekonomi menengah ke bawah cenderung diharapkan sebagai tulang punggung keluarga selain ayah, sehingga sering kali dikerahkan untuk mencari penghasilan tambahan saat terjadi krisis ekonomi dalam keluarga. Hal tersebut menyebabkan anak laki-laki cenderung memilih untuk bekerja dan membantu keluarga sehingga kesulitan untuk melanjutkan sekolah.

Anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki akses terhadap pendidikan lebih baik daripada anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan. Infrastruktur sekolah yang memadai, ketersediaan tenaga pengajar, dan akses jalan menuju sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih baik sehingga meningkatkan kesempatan anak untuk dapat bersekolah. Perubahan APS sering diikuti pula dengan perubahan APM pada arah yang sama.

Pemerintah telah memberikan berbagai intervensi di bidang pendidikan agar APM meningkat. Dari semua intervensi bidang pendidikan, bantuan sosial pendidikan dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat penyelesaian studi. Pemberian bantuan secara ekonomi untuk keluarga miskin dapat mencegah anak-anak menjadi pekerja dan dapat melanjutkan sekolah. Koordinasi dengan berbagai bidang perlu dilakukan agar lebih efektif, cepat, dan efisien.

6.4 ANGKA BUTA HURUF

Pendidikan merupakan katalisator dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia. Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

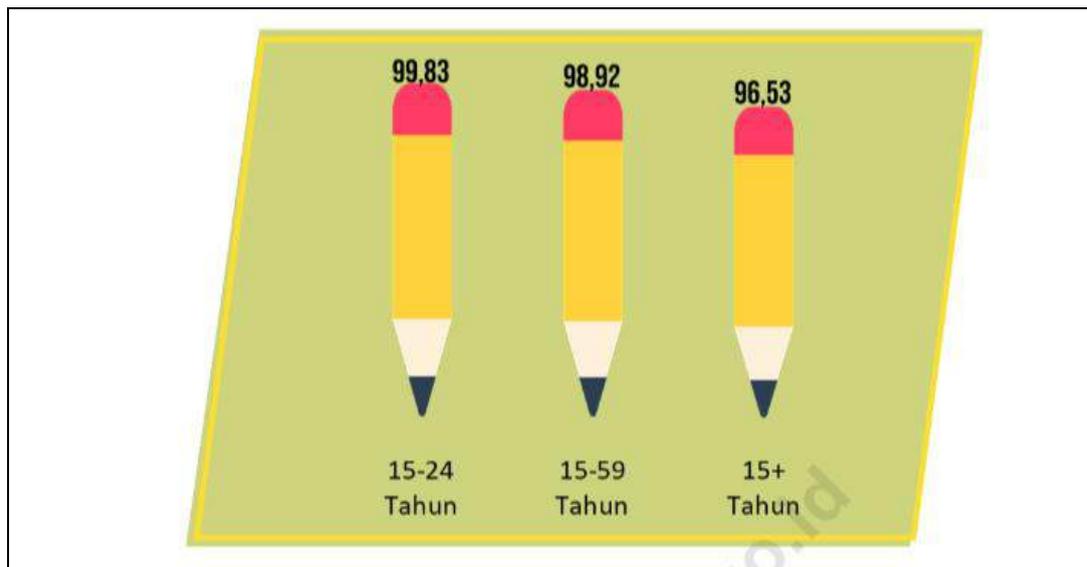
Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, dengan kemampuan tersebut seseorang dapat

menambah pengetahuannya dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negara di berbagai bidang kehidupan. Kemampuan membaca merupakan hal dasar untuk mendapatkan pengetahuan. Kemampuan ini sangat penting dan fundamental agar manusia dapat menuntut ilmu sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul. Meski pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan sudah dilakukan, sampai saat ini masih terdapat penduduk yang belum mampu membaca. Masalah ini terjadi di akibat beberapa faktor seperti kurangnya akses di daerah terpencil, kemiskinan, dan lain-lain.

Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka buta huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia keatas. Angka tersebut digunakan untuk melihat pencapaian suatu daerah dalam mengupayakan sistem pendidikan dasar yang efektif.

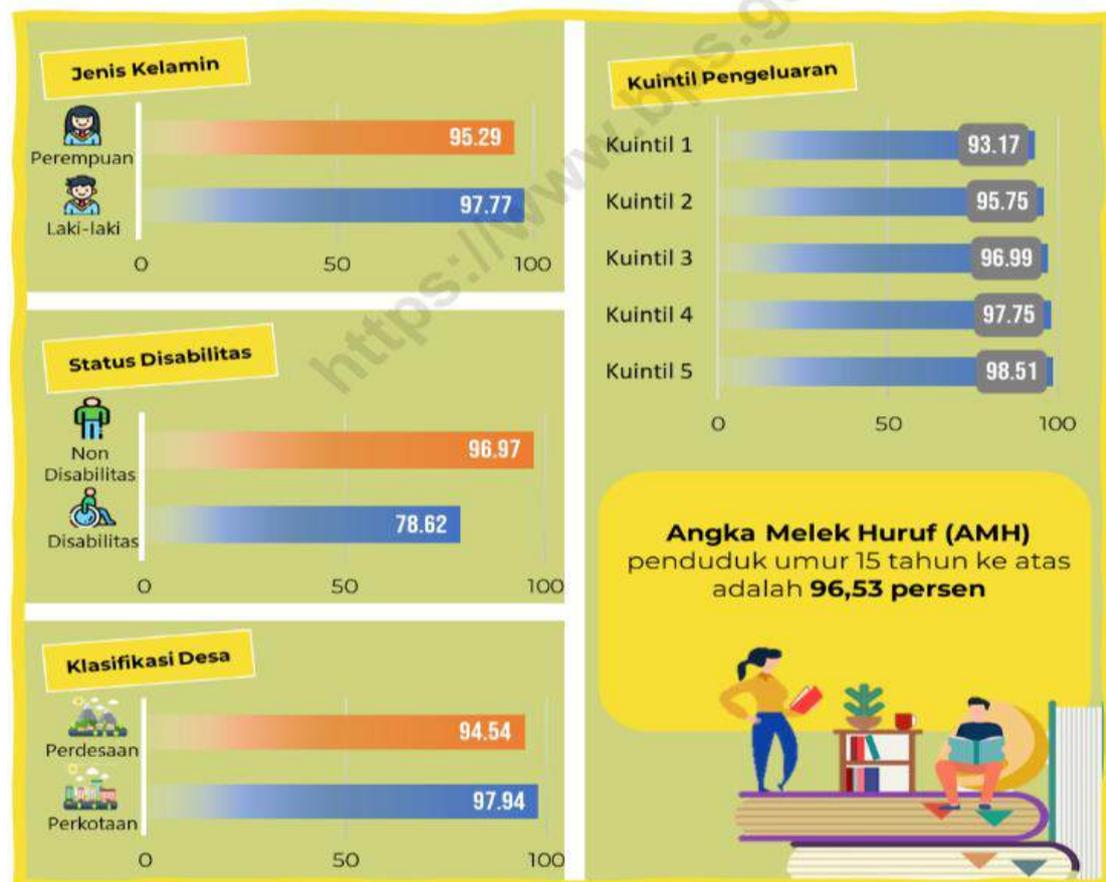
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat keefektifan sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan (membaca dan menulis). Kemampuan keaksaraan merupakan kemampuan dasar yang dapat membantu seseorang dalam kegiatan sehari-hari untuk terus belajar, menggali informasi, dan berkomunikasi. Dengan demikian, seseorang dapat menambah pengetahuannya dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan (UNESCO, 2009). AMH juga menjadi salah satu indikator target SDGs pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Gambar 63 Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 64 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 63 memperlihatkan perbandingan capaian AMH untuk setiap kelompok umur dimana AMH usia 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Pada tahun 2023, AMH usia 15-24 tahun mencapai 99,83 persen dan AMH usia 15-59 tahun mencapai 98,92 persen sedangkan AMH usia 15 tahun ke atas hanya 96,53 persen. Hal ini diasumsikan karena pada kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan tidak bisa baca tulis. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Merujuk pada gambar 64 dapat dilihat bahwa capaian AMH 15 tahun ke atas masih terdapat kesenjangan pada tiap karakteristik. Dilihat dari jenis kelamin, capaian AMH 15 tahun ke atas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (95,29 persen dibanding 97,77 persen). Kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, dimana capaian AMH 15 tahun ke atas untuk penduduk yang tidak mengalami disabilitas sebesar 96,97 persen sedangkan yang mengalami disabilitas capaiannya hanya sebesar 78,62 persen.

Capaian AMH 15 tahun ke atas di perdesaan juga lebih rendah dibandingkan perkotaan (94,54 persen dibanding 97,94 persen). Menurut status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi status ekonominya maka akan semakin tinggi juga capaian AMH 15 tahun ke atas.

Untuk dapat mewujudkan prinsip SDGs yaitu “leave no one behind”, keempat hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan capaian AMH. Literasi merupakan bagian dari hak atas Pendidikan yang dapat meningkatkan derajat kehidupan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan mempunyai dampak positif terhadap kesehatan dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2023). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh penduduk dewasa namun juga anak-anak sebagai bekal mereka di masa depan

Pada gambar 63 dapat dilihat perbandingan capaian AMH untuk setiap kelompok umur, AMH usia 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan AMH

usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Di tahun 2023, AMH usia 15-24 tahun mencapai 99,80 persen dan AMH usia 15-59 tahun mencapai 98,49 persen sedangkan AMH usia 15 tahun keatas hanya 96,35 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun keatas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan tidak bisa baca tulis. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Berdasarkan gambar 64 dapat dilihat bahwa capaian AMH 15 tahun keatas pada tiap karakteristik masih terdapat kesenjangan. Capaian AMH 15 tahun keatas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (95,26 persen dibanding 97,42 persen). Sementara itu, penduduk 15 tahun keatas di perdesaan memiliki capaian AMH yang juga lebih rendah dibandingkan perkotaan (94,21 persen dibanding 97,91 persen). Apabila dilihat menurut status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi status ekonominya maka akan semakin tinggi juga capaian AMH 15 tahun keatas. Kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, dimana capaian AMH 15 tahun keatas untuk penduduk yang tidak mengalami disabilitas sebesar 96,82 persen sedangkan yang mengalami disabilitas capaiannya hanya sebesar 79,97 persen.

Keempat hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan capaian AMH supaya dapat mewujudkan prinsip SDGs yaitu "leave no one behind". Adanya peningkatan kemampuan literasi penduduk akan memberikan multiplier effect dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain (UNESCO, 2013)

Berikut gambaan kondisi penduduk Sumatera Barat yang berusia 5 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2023 menurut kemampuan membaca dan menulisnya

Tabel 203 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-laki/ <i>Male</i>			Perempuan/ <i>Female</i>			Laki-laki + Perempuan/ <i>Male + Female</i>		
	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Kepulauan Mentawai	99,69	23,00	1,54	98,36	19,43	1,31	99,05	21,28	1,43
Kab. Pesisir Selatan	99,20	24,60	0,54	98,28	29,82	0,62	98,73	27,26	0,58
Kab. Solok	99,53	34,35	4,06	98,33	37,71	5,43	98,92	36,06	4,76
Kab. Sijunjung	98,47	32,15	0,20	96,24	36,22	0,11	97,34	34,21	0,15
Kab. Tanah Datar	99,82	53,38	1,15	98,65	54,20	1,35	99,22	53,81	1,26
Kab. Padang Pariaman	99,10	27,41	2,59	97,00	28,03	2,01	98,02	27,73	2,29
Kab. Agam	99,71	67,71	4,04	99,10	66,83	3,72	99,40	67,26	3,88
Kab. Lima Puluh Kota	99,97	11,13	0,14	98,88	14,28	0,16	99,42	12,73	0,15
Kab. Pasaman	99,54	83,23	0,65	98,32	85,95	0,64	98,92	84,60	0,64
Kab. Solok Selatan	99,66	65,33	3,44	99,22	66,82	1,99	99,44	66,06	2,72
Kab. Dharmasraya	99,76	8,71	1,22	98,04	11,35	1,25	98,93	9,99	1,24
Kab. Pasaman Barat	99,61	7,94	1,51	99,36	10,33	1,70	99,49	9,13	1,60
Kota Padang	99,63	33,16	1,06	99,62	36,31	1,28	99,62	34,75	1,17
Kota Solok	99,94	24,29	2,58	99,58	24,77	3,50	99,76	24,53	3,04
Kota Sawahlunto	99,40	14,34	1,11	99,53	18,53	0,82	99,47	16,46	0,96
Kota Padang Panjang	99,94	75,55	3,99	99,51	79,75	2,27	99,72	77,68	3,11
Kota Bukittinggi	99,72	28,73	1,80	99,83	32,54	2,30	99,78	30,73	2,06
Kota Payakumbuh	99,78	46,75	2,37	99,31	46,98	0,72	99,54	46,86	1,54
Kota Pariaman	99,79	14,20	0,71	99,56	19,58	0,68	99,67	16,99	0,70
Sumatera Barat	99,56	34,87	1,69	98,72	37,46	1,71	99,13	36,18	1,70

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 204 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Sumatera Barat, 2023

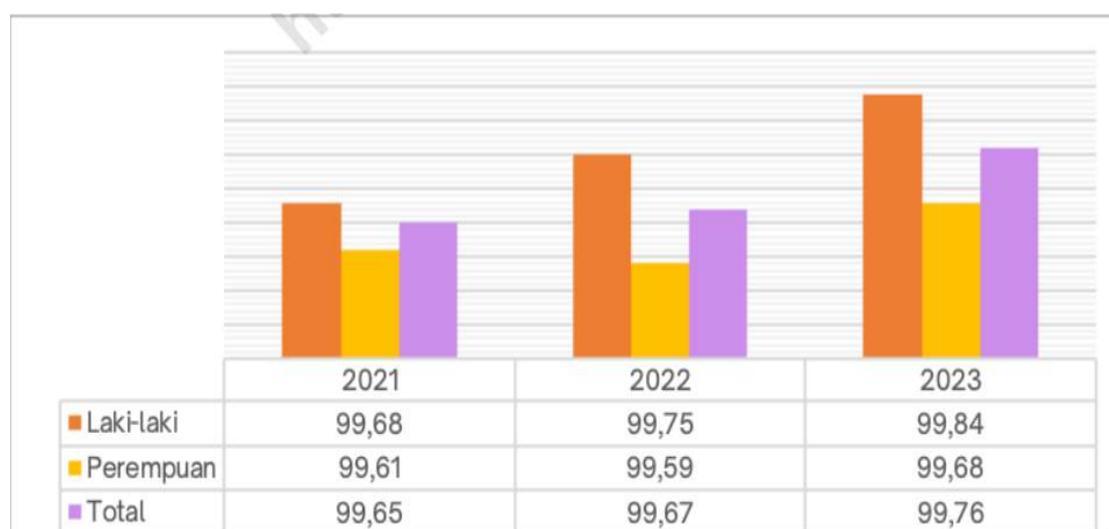
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-laki/Male			Perempuan/Female			Laki-laki + Perempuan/Male + Female		
	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>	Huruf Latin <i>Latin</i>	Huruf Arab <i>Arabic</i>	Huruf Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Kepulauan Mentawai	99,96	25,84	1,07	98,75	25,77	0,82	99,38	25,81	0,95
Kab. Pesisir Selatan	100,00	30,26	0,23	100,00	37,84	-	100,00	33,94	0,12
Kab. Solok	100,00	41,17	2,68	99,69	47,20	7,20	99,85	44,20	4,96
Kab. Sijunjung	98,91	30,30	0,46	100,00	42,26	0,04	99,45	36,25	0,25
Kab. Tanah Datar	100,00	60,00	0,77	99,73	66,93	1,67	99,87	63,42	1,22
Kab. Padang Pariaman	99,53	33,25	3,82	100,00	43,45	2,11	99,76	38,21	2,99
Kab. Agam	99,68	66,41	1,78	100,00	68,05	3,58	99,83	67,19	2,64
Kab. Lima Puluh Kota	100,00	11,26	-	100,00	28,23	-	100,00	18,90	-
Kab. Pasaman	100,00	85,06	-	100,00	92,79	1,26	100,00	88,80	0,61
Kab. Solok Selatan	100,00	70,75	3,90	100,00	75,06	1,23	100,00	72,82	2,62
Kab. Dharmasraya	100,00	6,66	-	100,00	6,98	-	100,00	6,81	-
Kab. Pasaman Barat	100,00	6,60	1,30	100,00	16,25	3,51	100,00	11,15	2,34
Kota Padang	100,00	36,07	0,83	100,00	34,87	1,80	100,00	35,47	1,31
Kota Solok	100,00	26,17	0,83	99,55	18,32	2,91	99,76	22,08	1,92
Kota Sawahlunto	99,61	12,03	-	99,23	29,76	1,02	99,42	20,74	0,50
Kota Padang Panjang	100,00	74,09	2,24	100,00	80,39	2,70	100,00	77,26	2,47
Kota Bukittinggi	100,00	31,97	1,43	99,57	38,04	1,40	99,75	35,40	1,41
Kota Payakumbuh	100,00	49,56	1,59	100,00	46,64	0,47	100,00	48,11	1,04
Kota Pariaman	100,00	15,67	1,61	100,00	16,92	2,74	100,00	16,31	2,19
Sumatera Barat	99,89	37,00	1,22	99,92	42,04	1,99	99,91	39,47	1,60

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 203-204 memberikan gambaran kondisi persentase penduduk Sumatera Barat baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 15-24 tahun menurut kemampuan membaca dan menulis. Pada kedua tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf latin lebih banyak dibandingkan kemampuan membaca dan menulis huruf arab. Hal ini disebabkan pada kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih dominan menemukan huruf latin. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin hampir mendekati 100 persen, hanya 0,17 persen yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin.

Capaian AMH baik usia 15 tahun keatas maupun 15-24 tahun selalu mengalami peningkatan. Namun peningkatannya dapat dikatakan lambat bahkan cenderung stagnan karena angkanya yang sudah mencapai hampir 100 persen. Apabila dibandingkan capaian AMH untuk setiap kelompok umur, AMH usia 15 tahun keatas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15-24 tahun. Di tahun 2022, AMH usia 15-24 tahun mencapai 99,91 sedangkan AMH usia 15 tahun keatas hanya 99,13 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun keatas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Gambar 65 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-64 Tahun di Provinsi Sumatera Barat (%), 2021-2023



Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dalam 3 tahun terakhir (2021 s.d. 2023), angka melek huruf penduduk berumur 15-64 tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 AMH mencapai 99,76 persen, meningkat sebesar 0,09 persen poin dari AMH tahun 2022 yang mencapai 99,67 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari tahun ke tahun AMH laki-laki lebih tinggi dibanding AMH perempuan. Gambar 64 menunjukkan pada tahun 2023, AMH laki-laki sebesar 99,84 persen, lebih tinggi 0,16 poin dibanding AMH perempuan pada tahun yang sama.

Tabel 205 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022-2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Perkotaan <i>Urban</i>		Perdesaan <i>Rural</i>		Perkotaan + Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15–19	100,00	99,99	99,75	99,93	99,87	99,96
20–24	99,86	99,96	99,87	99,74	99,87	99,86
25–29	99,84	99,78	100,00	100,00	99,92	99,89
30–34	99,97	99,99	99,85	100,00	99,91	100,00
35–39	99,86	99,92	99,90	100,00	99,88	99,96
40–44	99,74	99,81	99,93	100,00	99,84	99,90
45–49	99,63	99,84	99,95	100,00	99,79	99,92
50+	98,61	98,46	97,11	97,08	97,84	97,75
Jumlah/Total						
15–24	99,93	99,97	99,81	99,85	99,87	99,91
15–44	99,88	99,91	99,88	99,95	99,88	99,93
15+	99,50	99,51	99,09	99,11	99,29	99,31
45+	98,86	98,79	97,77	97,75	98,30	98,26

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Pada tabel diatas, terlihat bahwa 0,07 persen penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 usia 15-44 tahun masih buta huruf, artinya 99,93% penduduk Sumatera Barat telah melek huruf. Ini terjadi peningkatan pada

angka buta huruf sebesar 0,35% dibandingkan pada tahun 2022. Artinya semakin tinggi angka buta huruf, maka semakin rendah angka melek.

Angka buta huruf di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong sangat tinggi akibat kondisi daerah yang terpencil dan sulitnya akses pada pendidikan menjadi sulit. Ketersediaan guru, fasilitas, dan infrastruktur sekolah perlu ditingkatkan sehingga memudahkan masyarakat untuk bersekolah. Selain itu penyediaan kelas kejar paket bagi masyarakat juga dapat membantu untuk menurunkan angka buta huruf.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka buta huruf pada perempuan terlihat lebih tinggi daripada laki-laki. Penurunan angka buta huruf merupakan bukti bahwa upaya pemerataan pendidikan terus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan bangsa. Upaya untuk menyediakan akses pendidikan hingga ke pelosok, penyediaan tenaga pengajar, pembangunan infrastruktur, dan sosialisasi kepada masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun perlu tetap dilakukan dan ditingkatkan sehingga angka buta huruf dapat ditekan hingga mencapai 0.

Tabel 206 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Kelompok Umur					
	10-14	15-24	25-44	45+	10+	15+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	99,84	100,00	99,84	100,00	99,83	99,83
Perempuan	99,90	99,95	99,90	99,95	99,27	99,20
Laki-laki + Perempuan	99,87	99,97	99,87	99,97	99,55	99,51
Perdesaan						
Laki-laki	99,70	99,81	100,00	99,81	99,50	99,47
Perempuan	99,99	99,89	100,00	99,89	98,90	98,76
Laki-laki + Perempuan	99,85	99,85	100,00	99,85	99,20	99,11
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	99,77	99,91	99,92	99,91	99,66	99,65
Perempuan	99,95	99,92	99,95	99,92	99,09	98,98
Laki-laki + Perempuan	99,86	99,91	99,94	99,91	99,37	99,31

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk Provinsi Sumatera Barat umur 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 99,37 persen, sedangkan untuk yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 99,31 persen. Sementara itu, pencapaian AMH usia 45 tahun ke atas sudah cukup baik yaitu 99,91 persen. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk Provinsi Sumatera Barat terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat tajam, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca. Dalam pembangunan berkelanjutan, kemampuan literasi penduduk bersifat multiplier effect, dimana hal tersebut akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik, kesenjangan indikator AMH relatif kecil di Provinsi Sumatera Barat. Menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 99,20 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 99,55 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, AMH 10 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan sebesar 99,09 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki 99,66 persen.

Tabel 207 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	99,83	98,92	96,53
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	99,82	99,22	97,77
Perempuan	99,83	98,62	95,29
Status Disabilitas			
Disabilitas	92,26	89,80	78,62
Nondisabilitas	99,87	99,02	96,97
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	99,72	97,86	93,17
Kuintil 2	99,83	98,70	95,75
Kuintil 3	99,83	99,10	96,99
Kuintil 4	99,85	99,28	97,75
Kuintil 5	99,90	99,47	98,51
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	99,94	99,50	97,94
Perdesaan	99,66	98,09	94,54

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 208 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,90	99,83	99,44
Sumatera Utara	99,93	99,83	99,54
Sumatera Barat	99,97	99,82	99,51
Riau	99,94	99,95	99,55
Jambi	99,82	99,90	99,03
Sumatera Selatan	99,93	99,90	99,52
Bengkulu	100,00	99,81	99,03
Lampung	99,76	99,55	98,53
Kep. Bangka Belitung	100,00	99,57	98,80
Kep. Riau	99,98	99,94	99,42
DKI Jakarta	99,91	99,88	99,69
Jawa Barat	99,97	99,79	98,68
Jawa Tengah	99,96	98,98	95,85
DI Yogyakarta	99,94	99,43	97,08
Jawa Timur	100,00	98,94	96,15
Banten	99,96	99,89	98,54
Bali	99,95	99,95	97,29
Nusa Tenggara Barat	99,84	95,89	91,16
Nusa Tenggara Timur	99,91	99,43	98,26
Kalimantan Barat	99,97	99,16	96,93
Kalimantan Tengah	99,80	99,94	99,41
Kalimantan Selatan	99,97	99,84	99,14
Kalimantan Timur	99,94	99,90	99,28
Kalimantan Utara	99,73	99,49	98,91
Sulawesi Utara	99,93	99,97	99,83
Sulawesi Tengah	99,62	99,90	99,58
Sulawesi Selatan	99,94	98,95	97,29
Sulawesi Tenggara	99,64	99,55	97,68
Gorontalo	99,69	99,67	99,34
Sulawesi Barat	99,75	98,95	97,18
Maluku	100,00	100,00	99,75
Maluku Utara	100,00	99,90	99,59
Papua Barat	99,53	99,70	99,49
Papua	99,78	99,17	98,67
Indonesia	99,94	99,50	97,94

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 209 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,95	99,54	97,76
Sumatera Utara	99,98	99,72	98,65
Sumatera Barat	99,85	99,96	99,11
Riau	99,92	99,96	98,93
Jambi	99,88	99,84	97,74
Sumatera Selatan	99,95	99,55	98,23
Bengkulu	99,85	99,81	97,31
Lampung	99,99	99,33	96,73
Kep. Bangka Belitung	99,93	99,15	97,47
Kep. Riau	99,76	98,33	96,18
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,95	99,87	97,88
Jawa Tengah	99,95	98,29	92,63
DI Yogyakarta	100,00	97,86	91,10
Jawa Timur	99,87	97,37	90,57
Banten	99,75	99,84	97,15
Bali	99,83	97,96	91,29
Nusa Tenggara Barat	99,80	92,63	86,92
Nusa Tenggara Timur	99,46	97,29	93,96
Kalimantan Barat	99,88	97,46	93,50
Kalimantan Tengah	99,76	99,93	98,75
Kalimantan Selatan	99,89	99,95	97,61
Kalimantan Timur	99,98	99,89	98,40
Kalimantan Utara	99,33	98,49	95,74
Sulawesi Utara	99,93	99,97	99,74
Sulawesi Tengah	99,92	98,80	97,44
Sulawesi Selatan	99,79	95,96	90,79
Sulawesi Tenggara	99,93	98,01	94,96
Gorontalo	99,85	98,99	97,80
Sulawesi Barat	99,53	96,60	93,60
Maluku	99,93	99,57	99,24
Maluku Utara	99,82	99,95	98,49
Papua Barat	99,75	97,91	96,61
Papua	91,14	79,14	78,18
Indonesia	99,66	98,09	94,54

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 210 Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,89	99,74	99,03
Sumatera Utara	100,00	99,85	99,49
Sumatera Barat	99,91	99,91	99,65
Riau	99,95	99,96	99,60
Jambi	99,77	99,88	98,89
Sumatera Selatan	99,89	99,76	99,24
Bengkulu	99,85	99,84	98,74
Lampung	99,97	99,47	98,26
Kep. Bangka Belitung	99,97	99,54	98,98
Kep. Riau	99,95	99,83	99,35
DKI Jakarta	99,81	99,87	99,74
Jawa Barat	99,99	99,90	99,14
Jawa Tengah	99,93	99,19	96,68
DI Yogyakarta	100,00	99,26	97,46
Jawa Timur	99,92	98,98	96,10
Banten	99,90	99,92	99,10
Bali	99,90	99,70	97,57
Nusa Tenggara Barat	99,97	96,02	92,05
Nusa Tenggara Timur	99,60	98,03	96,14
Kalimantan Barat	99,89	98,83	96,56
Kalimantan Tengah	99,82	99,96	99,27
Kalimantan Selatan	99,92	99,89	99,10
Kalimantan Timur	99,91	99,94	99,46
Kalimantan Utara	99,20	99,32	98,34
Sulawesi Utara	99,86	99,94	99,78
Sulawesi Tengah	99,69	99,28	98,63
Sulawesi Selatan	99,84	97,71	95,23
Sulawesi Tenggara	99,78	98,93	97,44
Gorontalo	99,92	99,10	98,47
Sulawesi Barat	99,39	97,42	95,67
Maluku	99,97	99,78	99,59
Maluku Utara	99,90	99,95	99,47
Papua Barat	99,50	99,03	98,42
Papua	93,98	86,46	85,80
Indonesia	99,82	99,22	97,77

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 211 Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,97	99,55	97,67
Sumatera Utara	99,90	99,72	98,85
Sumatera Barat	99,92	99,87	98,98
Riau	99,91	99,95	98,75
Jambi	99,95	99,83	97,42
Sumatera Selatan	100,00	99,61	98,20
Bengkulu	99,96	99,78	97,01
Lampung	99,86	99,33	96,37
Kep. Bangka Belitung	99,97	99,24	97,47
Kep. Riau	99,97	99,72	98,74
DKI Jakarta	100,00	99,89	99,65
Jawa Barat	99,95	99,72	97,88
Jawa Tengah	99,98	98,13	92,06
DI Yogyakarta	99,90	98,87	93,77
Jawa Timur	99,97	97,56	91,39
Banten	99,92	99,84	97,36
Bali	99,95	99,12	93,63
Nusa Tenggara Barat	99,68	92,67	86,31
Nusa Tenggara Timur	99,59	97,74	94,13
Kalimantan Barat	99,94	97,34	92,99
Kalimantan Tengah	99,73	99,90	98,78
Kalimantan Selatan	99,94	99,90	97,64
Kalimantan Timur	100,00	99,86	98,54
Kalimantan Utara	100,00	98,95	97,17
Sulawesi Utara	100,00	100,00	99,80
Sulawesi Tengah	99,93	99,05	97,65
Sulawesi Selatan	99,89	97,08	92,53
Sulawesi Tenggara	99,83	98,32	94,66
Gorontalo	99,64	99,50	98,52
Sulawesi Barat	99,77	96,72	92,99
Maluku	99,96	99,74	99,35
Maluku Utara	99,85	99,93	98,15
Papua Barat	99,83	98,29	97,21
Papua	93,14	83,05	82,47
Indonesia	99,83	98,62	95,29

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Tabel 212 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99.93	99.65	98.34
Sumatera Utara	99.95	99.79	99.17
Sumatera Barat	99.91	99.89	99.31
Riau	99.93	99.96	99.18
Jambi	99.86	99.86	98.16
Sumatera Selatan	99.94	99.69	98.73
Bengkulu	99.90	99.81	97.89
Lampung	99.91	99.40	97.33
Kep. Bangka Belitung	99.97	99.39	98.24
Kep. Riau	99.96	99.77	99.05
DKI Jakarta	99.91	99.88	99.69
Jawa Barat	99.97	99.81	98.51
Jawa Tengah	99.95	98.66	94.34
DI Yogyakarta	99.95	99.07	95.59
Jawa Timur	99.94	98.27	93.70
Banten	99.91	99.88	98.23
Bali	99.92	99.42	95.61
Nusa Tenggara Barat	99.82	94.32	89.11
Nusa Tenggara Timur	99.60	97.88	95.11
Kalimantan Barat	99.92	98.10	94.79
Kalimantan Tengah	99.78	99.93	99.03
Kalimantan Selatan	99.93	99.89	98.37
Kalimantan Timur	99.95	99.90	99.01
Kalimantan Utara	99.59	99.14	97.78
Sulawesi Utara	99.93	99.97	99.79
Sulawesi Tengah	99.81	99.17	98.14
Sulawesi Selatan	99.87	97.39	93.83
Sulawesi Tenggara	99.80	98.62	96.03
Gorontalo	99.78	99.30	98.49
Sulawesi Barat	99.58	97.08	94.33
Maluku	99.96	99.76	99.47
Maluku Utara	99.88	99.94	98.81
Papua Barat	99.66	98.67	97.84
Papua	93.57	84.83	84.22
Indonesia	99.83	98.92	96.53

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

6.5 ANGKA PUTUS SEKOLAH

Akses pada pendidikan yang tidak merata merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Diversitas yang ada di Indonesia memunculkan tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan. Tantangan yang muncul antara lain:

1. Tidak semua pelajar dapat melanjutkan wajib belajar hingga 12 tahun
2. Terdapat disparitas yang cukup besar sehingga terdapat 'gap' dalam meraih kesuksesan belajar antar pelajar
3. Banyak murid tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

4. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, yang memperlebar ketimpangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Sasaran yang ingin dicapai dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program prioritas nasional adalah memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan. Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Namun demikian, pada gambar 65 terlihat bahwa masih terdapat penduduk yang putus sekolah, baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat, 10 di antaranya putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, dimana angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan (Okumu, 2008). Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada semua jenjang pendidikan juga lebih besar dibandingkan perempuan

Salah satu arah kebijakan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 adalah penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), melalui program percepatan pelaksanaan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua anak usia sekolah yang tidak sekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

Berdasarkan gambar 65 terlihat bahwa semakin bertambah umur, maka persentase anak tidak sekolah juga semakin tinggi. Sementara itu jika

dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak tidak sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Gambar 66 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Hasil pendataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat anak yang putus sekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat. Sebagaimana terlihat pada gambar 65, semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi.

Pola tersebut terjadi baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan serta untuk yang tinggal di perkotaan. Secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat.

Angka Putus Sekolah hasil Susenas hanya dapat disajikan sampai dengan estimasi tingkat nasional, dikarenakan ketidakcukupan sampel untuk menyajikan data sampai dengan tingkat provinsi. Namun demikian angka

estimasi nasional memberikan hasil yang sejalan dengan angka putus sekolah data kemendikbud (Kemendikbud, 2023).

Berdasarkan klasifikasi desa, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, dimana angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan (Okumu, 2008). Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat lebih besar dibandingkan perempuan.

Faktor penyebab peserta didik putus sekolah menurut penelitian yang dilakukan oleh Imran (2015) adalah (1) ketidakmampuan menyelesaikan pelajaran, (2) tidak memiliki biaya sekolah, (3) sakit parah, (4) terpaksa bekerja, (5) membantu orang tua di ladang, dan (6) dikeluarkan dari sekolah. Meskipun separuh penyebabnya berkaitan dengan faktor ekonomi namun pemerintah juga perlu memerhatikan faktor lain agar angka putus sekolah dapat semakin ditekan.

Tabel 213 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023

Daerah Tempat Tinggal; Status Ekonomi Rumah Tangga	Putus Sekolah		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	–	0,64	0,77
40% bawah	–	0,64	0,12
40% menengah	–	0,89	1,50
20% atas	–	–	0,17
Perdesaan	0,09	0,85	1,68
40% bawah	0,02	1,25	1,67
40% menengah	0,22	0,55	1,91
20% atas	–	0,46	1,16
Perkotaan + Perdesaan	0,05	0,74	1,17
40% bawah	0,01	0,94	0,84
40% menengah	0,11	0,72	1,67
20% atas	–	0,23	0,62

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor, misalnya faktor kurangnya motivasi anak untuk bersekolah atau masalah keterbatasan ekonomi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus rumah tangga, tidak tersedianya fasilitas pendidikan memadai, lokasi jauh dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan alasan yang biasa dijumpai di kalangan masyarakat. Tabel 214 menyajikan angka putus sekolah menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga yang digolongkan ke dalam golongan pengeluaran rendah, menengah, dan tinggi serta menurut jenjang pendidikan.

Dilihat secara total berdasarkan jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula angka putus sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Angka putus sekolah di jenjang SD/ sederajat sebesar 0,05 persen, SMP/ sederajat sebesar 0,74 persen dan pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 1,17 persen. Kenaikan angka putus sekolah dari jenjang SD sampai SMA terlihat pada kelompok menengah dan atas. Pada golongan pengeluaran bawah, angka putus sekolah tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat yaitu sebesar 0,94 persen.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, angka putus sekolah di perdesaan dan perkotaan terjadi pada penduduk dengan pengeluaran rendah dan menengah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat di perkotaan untuk semua kelompok pengeluaran sudah mencapai nol persen. Hal yang sama juga terjadi pada wilayah perdesaan pada kelompok atas jenjang pendidikan SD/ sederajat dan pada wilayah perkotaan pada kelompok atas jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

Tingginya angka putus sekolah pada kelompok pengeluaran rendah dan menengah bisa dibayangkan sangat memprihatinkan karena pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan, yang bertujuan untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah terutama yang berasal dari kelompok pengeluaran rendah. Misalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka putus sekolah di golongan pengeluaran rendah juga mencerminkan bahwa

program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas.

Tabel 214 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023

Daerah Tempat Tinggal; Status Ekonomi Rumah Tangga	Putus Sekolah		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	-	0,64	0,77
Laki-laki	-	1,24	1,70
Perempuan	-	-	-
Perdesaan	0,09	0,85	1,68
Laki-laki	0,10	0,91	2,89
Perempuan	0,09	0,78	0,54
Perkotaan + Perdesaan	0,05	0,74	1,17
Laki-laki	0,05	1,08	2,24
Perempuan	0,04	0,39	0,23

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan jenis kelamin, angka putus sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Barat terjadi pada penduduk laki-laki untuk semua jenjang pendidikan. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk laki-laki di wilayah perkotaan dan perdesaan untuk semua jenjang pendidikan. Angka putus sekolah pada daerah perkotaan untuk jenjang SD/sederajat pada penduduk laki-laki dan perempuan sudah mencapai nol persen pada tahun 2023. Selain itu penduduk perempuan di perkotaan memperlihatkan capaian yang sangat baik dengan angka putus sekolah nol persen untuk semua jenjang pendidikan. Ketimpangan juga dapat dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal dimana angka putus sekolah di perdesaan masih lebih besar dibandingkan perkotaan.

Pada gambar diatas, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Pada tahun 2022, 0 dari 1000 penduduk putus sekolah di jenjang SD/sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/sederajat dan

SM/ sederajat. Dari 1000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat, 10 di antaranya harus putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat berbeda tipis dengan SMP/ sederajat dimana 10 dari 1000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah.

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat perbedaan dimana angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan. Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada semua jenjang pendidikan juga lebih besar dibandingkan perempuan.

Tabel 215 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kelompok Umur	Angka Anak Tidak Sekolah
(1)	(2)
7-12 Tahun	0,29 ¹
13-15 Tahun	5,14
16-18 Tahun	14,45

Catatan: ¹RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan tabel 281, dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok umur penduduk indikator ATS-nya juga semakin meningkat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Persentase anak tidak sekolah tertinggi yaitu pada kelompok umur 16-18 tahun (umur SMA) yaitu sebesar 14,45 persen. Hal ini berarti terdapat sekitar 14 hingga 15 dari 100 orang anak yang berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Misalkan faktor kurangnya motivasi anak untuk bersekolah atau masalah keterbatasan ekonomi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja,

menikah/mengurus rumah tangga, tidak tersedianya fasilitas pendidikan memadai, lokasi jauh dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan alasan yang biasa dijumpai di kalangan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

Tabel 216 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki/Male					Jumlah Total
	Tingkat Pendidikan Tertinggi/Highest Level of Education Completed					
	Tidak Mempunyai Ijazah No Certificate	SD/MI/Paket A/ SPM/PDF Ula/ SDLB Primary School	SMP/MTs/Paket B/SPM/PDF Wustha/SMPL Junior High School	SMA/SMK/MA/ Paket C/SPM/ PDF Ulya/SMLB/ MAK Senior High School	Perguruan Tinggi College	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kepulauan Mentawai	19,32	22,94	17,70	30,55	9,49	100,00
Kab. Pesisir Selatan	14,07	22,92	27,10	29,07	6,84	100,00
Kab. Solok	23,52	24,29	24,57	21,05	6,56	100,00
Kab. Sijunjung	12,82	23,40	27,13	27,03	9,63	100,00
Kab. Tanah Datar	16,16	21,35	22,72	27,90	11,86	100,00
Kab. Padang Pariaman	14,17	21,34	26,86	28,80	8,83	100,00
Kab. Agam	11,02	23,36	22,22	34,94	8,45	100,00
Kab. Lima Puluh Kota	14,91	26,36	22,30	27,96	8,47	100,00
Kab. Pasaman	18,03	25,94	21,79	27,46	6,79	100,00
Kab. Solok Selatan	12,66	25,30	22,05	33,38	6,60	100,00
Kab. Dharmasraya	14,57	22,97	24,34	30,30	7,82	100,00
Kab. Pasaman Barat	7,98	25,96	24,90	33,95	7,21	100,00
Kota Padang	6,31	10,60	22,11	46,59	14,39	100,00
Kota Solok	7,10	12,06	19,92	42,00	18,92	100,00
Kota Sawahlunto	10,62	17,95	20,12	36,61	14,70	100,00
Kota Padang Panjang	4,45	10,81	21,78	46,70	16,25	100,00
Kota Bukittinggi	4,71	14,71	20,45	41,45	18,68	100,00
Kota Payakumbuh	7,03	17,26	20,54	39,31	15,86	100,00
Kota Pariaman	6,64	13,07	22,15	43,72	14,42	100,00
Sumatera Barat	12,13	20,46	23,41	33,84	10,16	100,00

Perempuan/Female							
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tingkat Pendidikan Tertinggi/Highest Level of Education Completed					Perguruan Tinggi College	Jumlah Total
	Tidak Mempunyai Ijazah No Certificate	SD/MI/Paket A/ SPM/PDF Ula/ SDLB Primary School	SMP/MTs/Paket B/SPM/PDF Wustha/SMPL Junior High School	SMA/SMK/MA/ Paket C/SPM/ PDF Ulya/SMLB/ MAK Senior High School			
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Kab. Kepulauan Mentawai	26,97	26,65	16,52	18,58	11,28	100,00	
Kab. Pesisir Selatan	16,36	18,31	21,07	32,90	11,35	100,00	
Kab. Solok	22,44	19,49	21,92	22,54	13,61	100,00	
Kab. Sijunjung	15,71	21,54	19,27	30,48	13,00	100,00	
Kab. Tanah Datar	14,23	18,25	22,59	29,47	15,46	100,00	
Kab. Padang Pariaman	19,18	19,44	20,34	28,23	12,80	100,00	
Kab. Agam	13,82	18,44	20,70	31,16	15,88	100,00	
Kab. Lima Puluh Kota	20,89	22,74	19,12	26,87	10,38	100,00	
Kab. Pasaman	20,72	21,61	23,12	24,47	10,08	100,00	
Kab. Solok Selatan	15,41	18,14	25,26	27,34	13,85	100,00	
Kab. Dharmasraya	14,77	22,74	20,07	27,15	15,26	100,00	
Kab. Pasaman Barat	10,57	22,39	21,96	29,87	15,20	100,00	
Kota Padang	4,16	13,49	17,92	44,35	20,08	100,00	
Kota Solok	7,32	11,97	20,13	37,27	23,30	100,00	
Kota Sawahlunto	11,73	16,21	20,00	31,62	20,44	100,00	
Kota Padang Panjang	3,95	10,09	15,61	40,05	30,30	100,00	
Kota Bukittinggi	4,85	12,79	16,86	41,43	24,07	100,00	
Kota Payakumbuh	7,27	15,31	15,79	38,97	22,66	100,00	
Kota Pariaman	10,53	14,80	16,33	36,21	22,13	100,00	
Sumatera Barat	13,53	18,38	20,12	32,31	15,65	100,00	

Laki - laki + Perempuan/Male + Female							
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tingkat Pendidikan Tertinggi/Highest Level of Education Completed					Perguruan Tinggi College	Jumlah Total
	Tidak Mempunyai Ijazah No Certificate	SD/MI/Paket A/ SPM/PDF Ula/ SDLB Primary School	SMP/MTs/Paket B/SPM/PDF Wustha/SMPL Junior High School	SMA/SMK/MA/ Paket C/SPM/ PDF Ulya/SMLB/ MAK Senior High School			
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kab. Kepulauan Mentawai	23,00	24,73	17,13	24,78	10,35	100,00	
Kab. Pesisir Selatan	15,24	20,57	24,03	31,02	9,14	100,00	
Kab. Solok	22,97	21,85	23,22	21,81	10,15	100,00	
Kab. Sijunjung	14,28	22,46	23,16	28,77	11,33	100,00	
Kab. Tanah Datar	15,17	19,75	22,66	28,71	13,72	100,00	
Kab. Padang Pariaman	16,74	20,36	23,51	28,51	10,87	100,00	
Kab. Agam	12,45	20,84	21,44	33,01	12,25	100,00	
Kab. Lima Puluh Kota	17,94	24,53	20,69	27,41	9,44	100,00	
Kab. Pasaman	19,39	23,75	22,46	25,95	8,45	100,00	
Kab. Solok Selatan	14,02	21,76	23,64	30,40	10,18	100,00	
Kab. Dharmasraya	14,67	22,86	22,27	28,78	11,42	100,00	
Kab. Pasaman Barat	9,27	24,19	23,44	31,92	11,18	100,00	
Kota Padang	5,22	12,06	20,00	45,46	17,27	100,00	
Kota Solok	7,21	12,02	20,03	39,60	21,14	100,00	
Kota Sawahlunto	11,18	17,07	20,06	34,08	17,61	100,00	
Kota Padang Panjang	4,20	10,45	18,65	43,33	23,37	100,00	
Kota Bukittinggi	4,79	13,70	18,57	41,44	21,51	100,00	
Kota Payakumbuh	7,15	16,27	18,15	39,14	19,29	100,00	
Kota Pariaman	8,65	13,97	19,14	39,83	18,41	100,00	
Sumatera Barat	12,84	19,41	21,74	33,07	12,94	100,00	

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

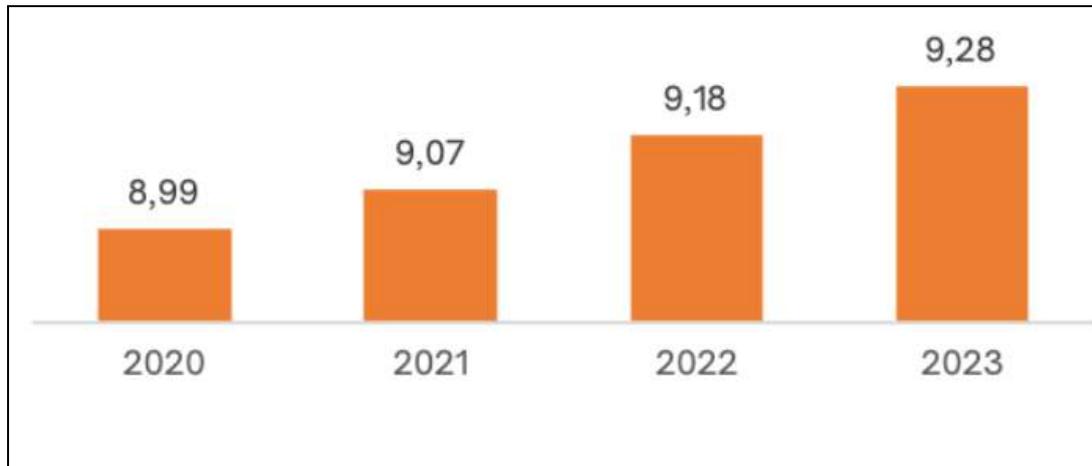
6.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh United Nations Development Programs (UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/RLS*) mencerminkan kondisi secara umum atau secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk, pada kelompok usia 25 tahun ke atas, kelompok usia di mana penduduk dianggap telah menyelesaikan pendidikan secara penuh. Untuk melihat lebih jauh kondisi pendidikan yang sedang berjalan kiranya bisa dilihat dari tingkat partisipasi penduduk dalam jenjang pendidikannya.

Secara umum rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah mencapai 8,99 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya besaran RLS mengalami peningkatan hingga mencapai 9,28 tahun pada tahun 2023. Besaran RLS tersebut menggambarkan kondisi umum pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mendekati program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Gambar 67 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat (tahun), 2020-2023



Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2023

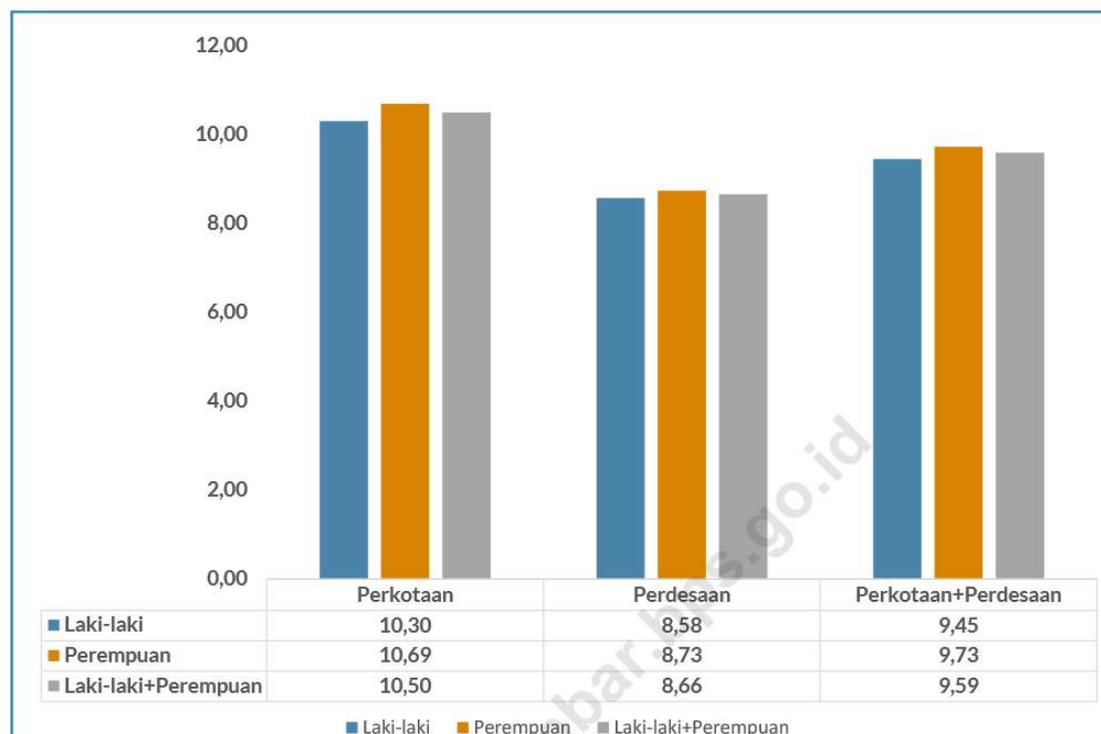
Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya mencapai 9,18 tahun pada tahun 2022.

Gambar 67 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2022 mencapai 9,51 tahun (setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat). Angka ini sudah melewati target RPJMD pada tahun 2022. Hal ini berarti usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengenyam pendidikan sudah menampakkan hasil yang nyata.

Gambar tersebut juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (relatif sama yaitu lebih dari 9 tahun). Kondisi ini menunjukkan secara umum tidak ada isu gender pada rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah di perkotaan penduduk laki-laki sebesar 10,35 tahun dan perempuan sebesar 10,77 tahun, sedangkan di perdesaan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 8,44 tahun dan perempuan sebesar 8,55 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP (kelas IX)

bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata baru menamatkan pendidikan hingga kelas VIII SMP.

Gambar 68 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (tahun), 2023



Sumber: BPS, Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2022

Nilai RLS pada tahun 2023 mencapai 9,13 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2022) yakni sebesar 9,08 tahun. Dengan melihat pola pergerakan capaian RLS antar tahun yang terus meningkat, diharapkan target RLS penduduk usia 15 tahun ke atas, yang tertera pada RPJMN sebesar 9,18 tahun di tahun 2024, dapat tercapai.

Jika dilihat sebaran RLS pada setiap provinsi, terdapat ketimpangan pendidikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi dengan nilai RLS tertinggi adalah DKI Jakarta dengan capaian sebesar 11,42 tahun atau setara dengan kelas 11 SM/ sederajat. Capaian ini menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di DKI Jakarta sudah mulai mendekati target wajib

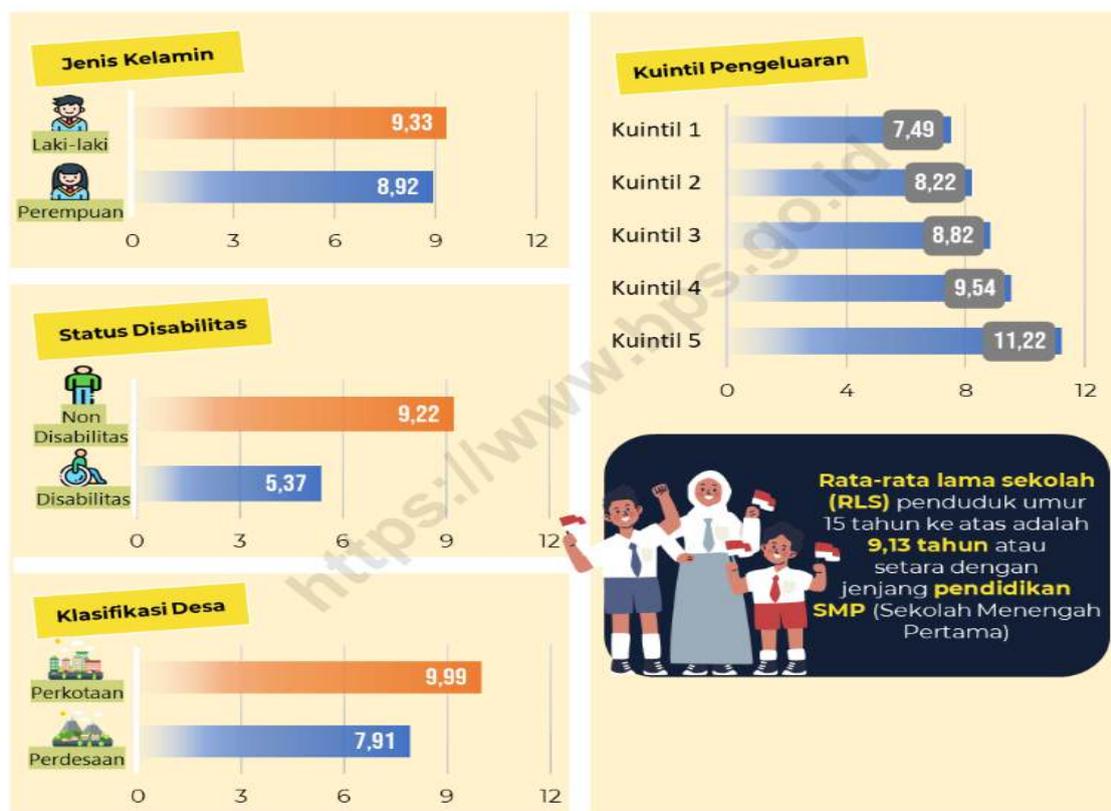
belajar 12 tahun. Di sisi lain, provinsi dengan nilai RLS terendah adalah Papua dengan capaiannya sebesar 7,34 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat.

Gambar 69 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 70 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Karakteristik Demografi, 2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Menurut Ghumus dan Chudgar (2015) yang menyatakan bahwa status ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Teori ini diperkuat dengan temuan dari Moh. Yamin, dkk (2015), bahwa salah satu faktor yang memengaruhi capaian RLS adalah status kemiskinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan gambaran RLS menurut status ekonomi rumah tangga, dimana semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi pula capaian RLS. Penduduk yang berada di kuintil 5 memiliki capaian RLS sebesar 11,22 tahun atau setara kelas 11 SM/ sederajat. Sementara itu, perbedaan yang cukup jauh terjadi pada penduduk yang berada pada kuintil 1 dimana capaiannya hanya 7,49 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat.

Faktor lain yang memengaruhi capaian RLS adalah akses terhadap fasilitas pendidikan (Moh. Yamin dkk, 2015). Kurangnya fasilitas pendidikan di perdesaan yang menyebabkan sulitnya penduduk di perdesaan untuk mengakses pendidikan, diindikasikan menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan RLS antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Capaian RLS penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Dimana di perkotaan mencapai 9,99 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat sedangkan di perdesaan hanya 7,91 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat.

Selain itu, kesulitan yang dialami oleh penduduk penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan juga diduga memengaruhi ketimpangan RLS antara penduduk penyandang disabilitas dengan penduduk yang bukan penyandang disabilitas. Penduduk yang mengalami disabilitas memiliki capaian yang jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak mengalami disabilitas. Hal ini terlihat pada capaian RLS penduduk yang mengalami disabilitas hanya 5,37 tahun atau setara kelas 5 SD/ sederajat sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas mencapai 9,22 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diukur melalui rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk di jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah dilakukan pada penduduk mulai usia 15 tahun ke atas untuk melihat jumlah tahun efektif bersekolah formal

yang sudah dicapai penduduk dalam menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat Sekolah Menengah diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun (sirusa.bps.go.id).

Rata-rata ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan apakah penduduk tersebut menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu, misalnya pernah tinggal kelas, pernah melakukan berhenti sementara (cuti), atau pernah mengulang tingkat jenjang atau kelas tertentu karena alasan khusus.

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah merujuk pada 4 (empat) informasi yaitu, 1) partisipasi sekolah, 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 3) Ijazah tertinggi yang dimiliki dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (sirusa.bps.go.id).

Interpretasi pada hasil rata-rata lama sekolah bermakna bahwa semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, data yang ditunjukkan dalam hasil rata-rata lama sekolah ini dapat menginformasikan tentang kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 217 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023

Kode Referensi	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
		2022	2023
1309	Kab. Kepulauan Mentawai	7,48	7,76
1301	Kab. Pesisir Selatan	8,43	8,58
1302	Kab. Solok	7,89	7,9
1303	Kab. Sijunjung	8,3	8,57
1304	Kab. Tanah Datar	8,9	9,02
1305	Kab. Padang Pariaman	8,16	8,41
1306	Kab. Agam	8,98	9,22
1307	Kab. Lima Puluh Kota	8,08	8,12
1308	Kab. Pasaman	8,11	8,13
1311	Kab. Solok Selatan	8,41	8,69
1310	Kab. Dharmasraya	8,56	8,71

1312	Kab. Pasaman Barat	8,55	8,81
1371	Kota Padang	11,6	11,62
1372	Kota Solok	11,35	11,36
1373	Kota Sawahlunto	10,43	10,44
1374	Kota Padang Panjang	11,92	11,94
1375	Kota Bukittinggi	11,63	11,64
1376	Kota Payakumbuh	10,82	10,88
1377	Kota Pariaman	10,78	10,79
13	Provinsi Sumatera Barat	9,18	9,28

Sumber: BPS, bps.go.id, 2023

Pada tahun 2023 terlihat rata-rata lama sekolah Sumatera Barat sebesar 9,28 meningkat sebesar 0,1 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun belum menunjukkan angka yang signifikan, dimana penduduk Sumatera Barat masih memiliki rata-rata lama sekolah pada 9 tahun. Ini artinya program wajib belajar 9 tahun telah dicapai namun belum dapat mencapai program wajib belajar 12 tahun. Rata-rata penduduk hanya dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat pendidikan menengah pertama.

Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah penduduk sudah mencapai 10-12 tahun, namun di wilayah perdesaan masih mencapai 7-9 tahun. Untuk itu, diperlukan program inovasi Pemerintah terutama Dinas Pendidikan dalam upaya menggenjot rata-rata lama sekolah tersebut melalui kemudahan akses pendidikan.

Tabel dibawah menggambarkan rata-rata lama sekolah pada perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah pada laki-laki sudah mencapai 9,20 tahun, sedangkan pada perempuan mencapai 9,37.

Di tahun 2023, capaian rata-rata lama sekolah pada laki-laki meningkat sebesar 0,81 persen dibandingkan pada tahun 2022, sedangkan pada perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen menjadi 9,37 persen. Hingga tahun 2022, capaian rata-rata lama sekolah pada perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun pada tahun 2023 justru sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Capaian rata-rata lama sekolah ini cukup jauh dari angka harapan lama sekolah (HLS) Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu 14,10 tahun.

Gambaran rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan kelompok perempuan lebih banyak yang tidak sampai jenjang sekolah menengah

pertama dan atau tidak menamatkan jenjang pendidikannya di tingkat SMP/ sederajat; sedangkan laki-laki lebih banyak yang telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SMP/ sederajat namun belum menuntaskan jenjang Pendidikan di tingkat SMA/ sederajat. Rata-rata lama sekolah yang dicapai pada tahun 2022 ini sedikit diatas harapan program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah serta angka harapan lama sekolah.

Di wilayah perdesaan, terjadi kesenjangan yang signifikan pada rata-rata lama sekolah pada perempuan usia 15 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan laki-laki berdasarkan wilayah tempat tinggal, baik di perdesaan maupun di perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibanding laki-laki. Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Perempuan di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau setara dengan kelas 11, sedangkan perempuan di perdesaan hanya mampu menamatkan sekolah sampai dengan kelas 8. Kecenderungan yang sama juga terlihat untuk laki-laki 15 tahun ke atas di perkotaan yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMP, sedangkan laki-laki di perdesaan mempunyai rata-rata lama sekolah setara dengan kelas 8 SMP/ sederajat

Tabel 218 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2022-2023

Kode Referensi	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota			
		Laki-laki		Perempuan	
		2022	2023	2022	2023
1309	Kab. Kepulauan Mentawai	8,02	8,36	7,16	7,29
1301	Kab. Pesisir Selatan	8,6	8,61	8,42	8,58
1302	Kab. Solok	7,92	7,93	7,87	7,9
1303	Kab. Sijunjung	8,42	8,66	8,21	8,55
1304	Kab. Tanah Datar	8,72	8,78	8,98	9,22
1305	Kab. Padang Pariaman	8,58	8,7	7,83	8,11
1306	Kab. Agam	8,92	9,09	9,07	9,33
1307	Kab. Lima Puluh Kota	8,41	8,45	8,07	8,11
1308	Kab. Pasaman	8,37	8,39	8,03	8,05
1311	Kab. Solok Selatan	8,42	8,67	8,4	8,72
1310	Kab. Dharmasraya	8,94	8,95	8,54	8,7
1312	Kab. Pasaman Barat	8,74	8,96	8,34	8,63
1371	Kota Padang	11,69	11,71	11,55	11,56
1372	Kota Solok	11,23	11,24	11,51	11,52
1373	Kota Sawahlunto	10,39	10,4	10,58	10,59

1374	Kota Padang Panjang	11,55	11,56	12	12,18
1375	Kota Bukittinggi	11,45	11,46	11,63	11,64
1376	Kota Payakumbuh	10,6	10,61	10,94	11,06
1377	Kota Pariaman	10,65	10,7	10,89	10,9
13	Provinsi Sumatera Barat	9,19	9,2	9,17	9,37

Sumber: BPS, bps.go.id, 2023

6.7 FASILITAS PENDIDIKAN

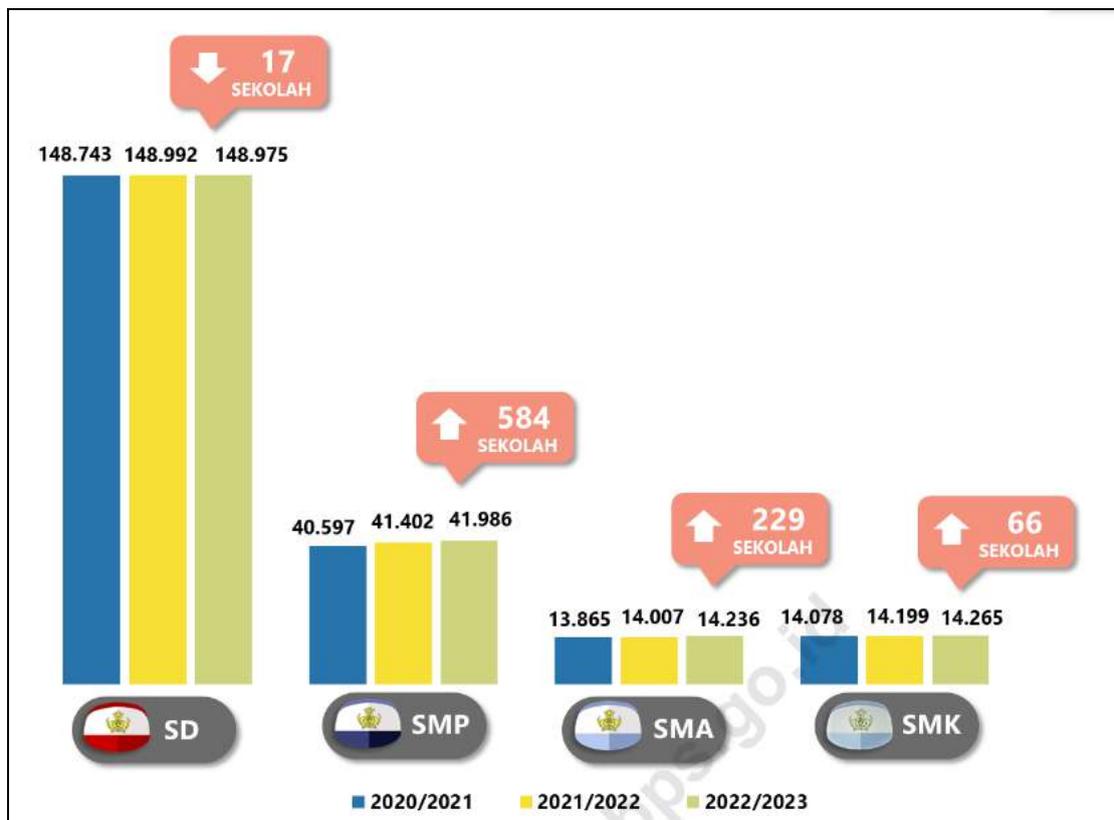
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah rasio murid-guru dan rasio murid-kelas. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru dapat memberikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar, sehingga apabila rasio murid-guru semakin tinggi maka semakin banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Sedangkan Rasio murid-kelas menggambarkan daya tampung siswa dalam satu kelas. Semakin tinggi rasio murid-kelas, maka semakin banyak jumlah siswa dalam satu kelas. Keadaan ini berdampak pada suasana dan keberhasilan dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2021 lalu, telah mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami penutupan sehingga hampir pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah sekolah mengalami penurunan (Statistik Pendidikan 2021). Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun ajaran 2021/2022, infrastruktur pendidikan sekolah telah mengalami kemajuan. Jumlah sekolah dasar dan menengah telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021. Apabila memperhatikan kecenderungan jumlah peserta didik pada setiap jenjang, kenaikan jumlah sekolah dasar tidak begitu banyak dibandingkan kenaikan jumlah sekolah menengah pertama. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun paling banyak terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 805 sekolah baru dan penambahan jumlah sekolah paling sedikit terjadi pada jenjang sekolah menengah kejuruan yaitu sebanyak 121 sekolah baru. Namun, dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelum pandemi melanda yaitu tahun ajaran 2019/2020, jumlah sekolah dasar dan

sekolah menengah kejuruan tahun ajaran 2021/2022 masih mengalami penurunan. Sebanyak 443 sekolah dasar dan sebanyak 102 sekolah menengah kejuruan sudah tidak melakukan aktivitas pembelajaran lagi.

Peraturan zonasi sekolah mengakibatkan sekolah negeri terbatas menerima peserta didik dari luar zona sekolah dan orang tua banyak memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang tidak terikat peraturan tersebut. Dalam satu tahun, kenaikan jumlah sekolah swasta lebih besar dari kenaikan jumlah sekolah negeri di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2022/2023. Pada sekolah swasta, kenaikan jumlah sekolah paling banyak terjadi pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yaitu lebih dari 1.000 sekolah baru terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Gambar 71 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023



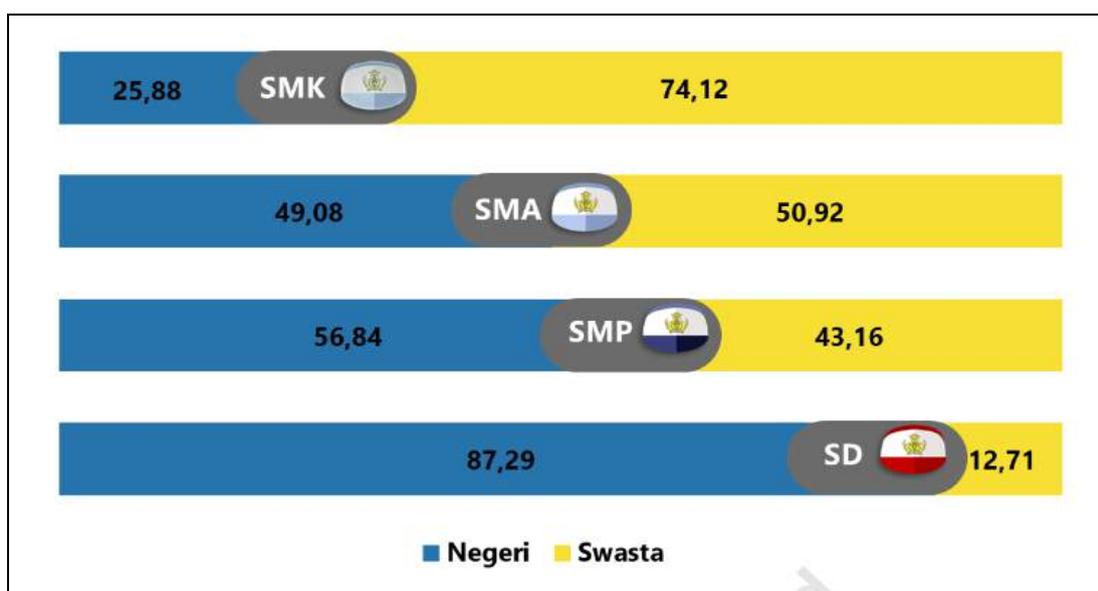
Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Keberadaan sekolah merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Keberadaan sekolah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang merata dan memadai dapat memicu masyarakat untuk menempuh pendidikan, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (Virdam dan Ariani, 2023).

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP yaitu sebanyak 584 sekolah baru. Sementara itu, pada jenjang SD jumlah sekolah justru mengalami penurunan sebanyak 17 sekolah.

Sementara itu apabila ditinjau menurut status sekolahnya, jumlah sekolah negeri tersedia lebih banyak pada jenjang Sekolah Dasar, dan semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta. Sebaliknya jumlah sekolah swasta lebih mendominasi pada jenjang pendidikan SMA dan SMK.

Gambar 72 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

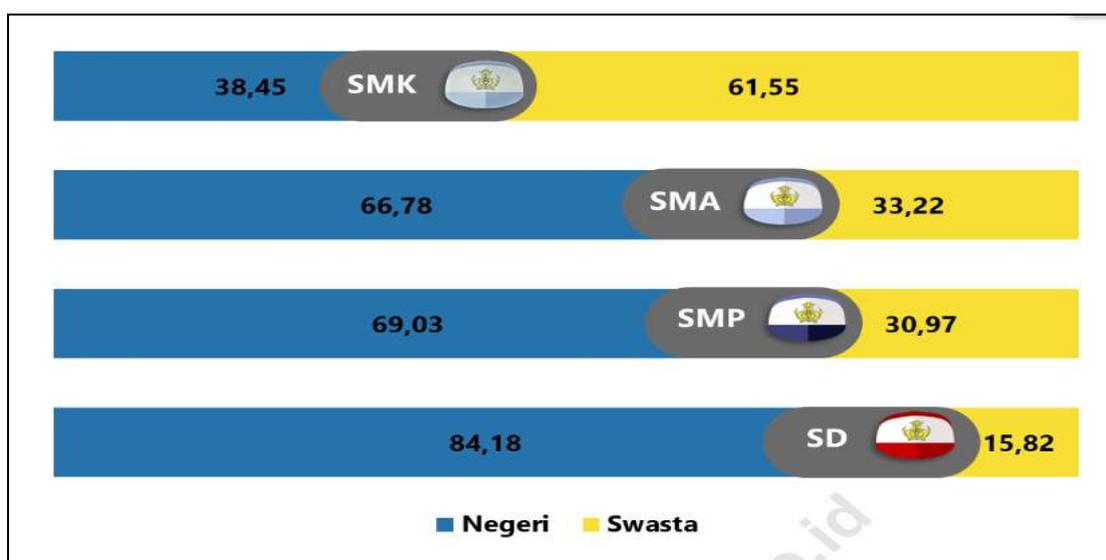


Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Berkebalikan dengan sekolah swasta, jenjang pendidikan dasar sekolah negeri dalam setahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran 2022/2023. Sekolah-sekolah swasta dituntut untuk dapat menjaga kualitas pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana sekolah, karena sekolah swasta juga memiliki peran menjamin mutu pendidikan di Indonesia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Ruang kelas merupakan komponen prasarana sekolah yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Ruang kelas berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Jika ditinjau dari status sekolah, jumlah ruang kelas sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA lebih banyak dari ruang kelas sekolah swasta. Bahkan jumlah ruang kelas pada jenjang SD negeri lima kali jumlah ruang kelas SD swasta. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang SMK dimana jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah ruang kelas sekolah negeri.

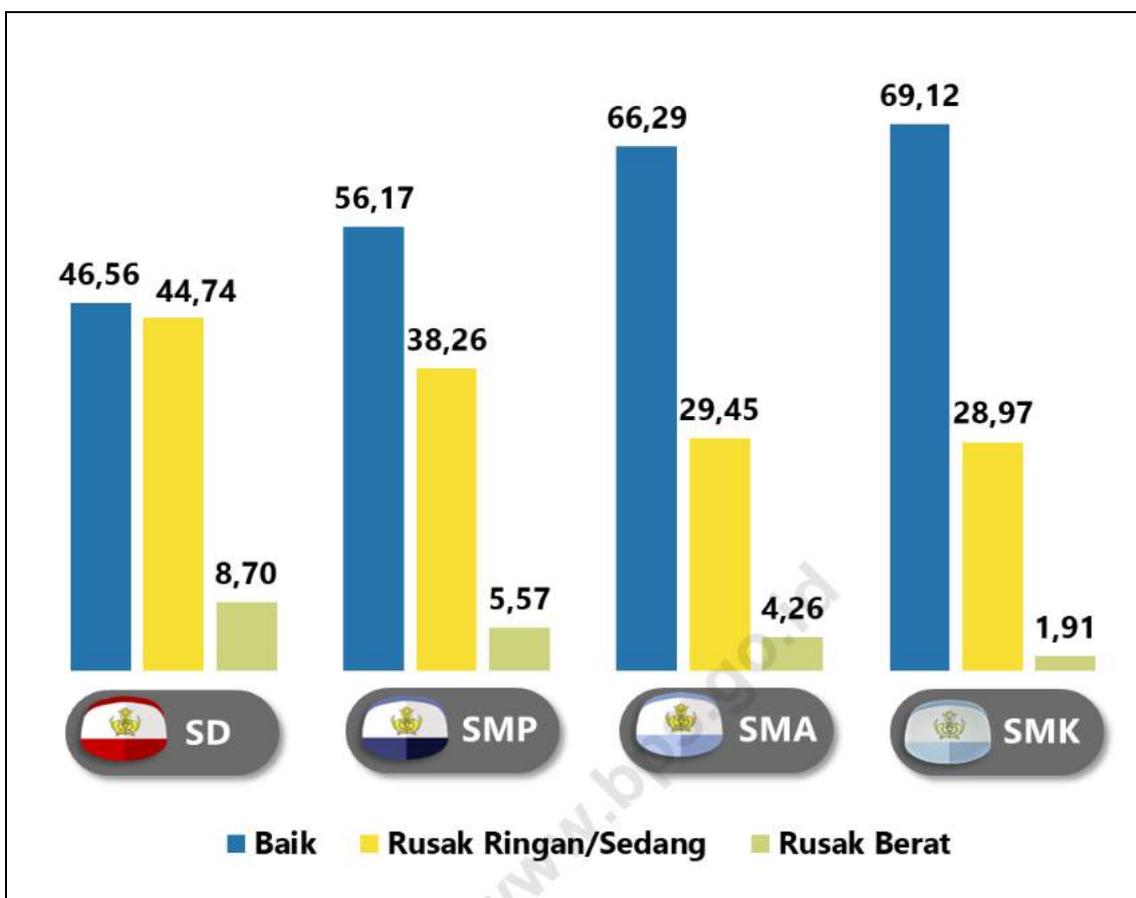
Gambar 73 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Jika dilihat dari kondisi dan keadaan ruang kelas, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah ruang kelas dengan kondisi baik semakin meningkat. Di sisi lain, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang dan rusak berat jumlahnya semakin berkurang seiring dengan tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK masih terdapat 4,26 persen dan 1,91 persen ruang kelas dengan kondisi rusak berat.

Gambar 74 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

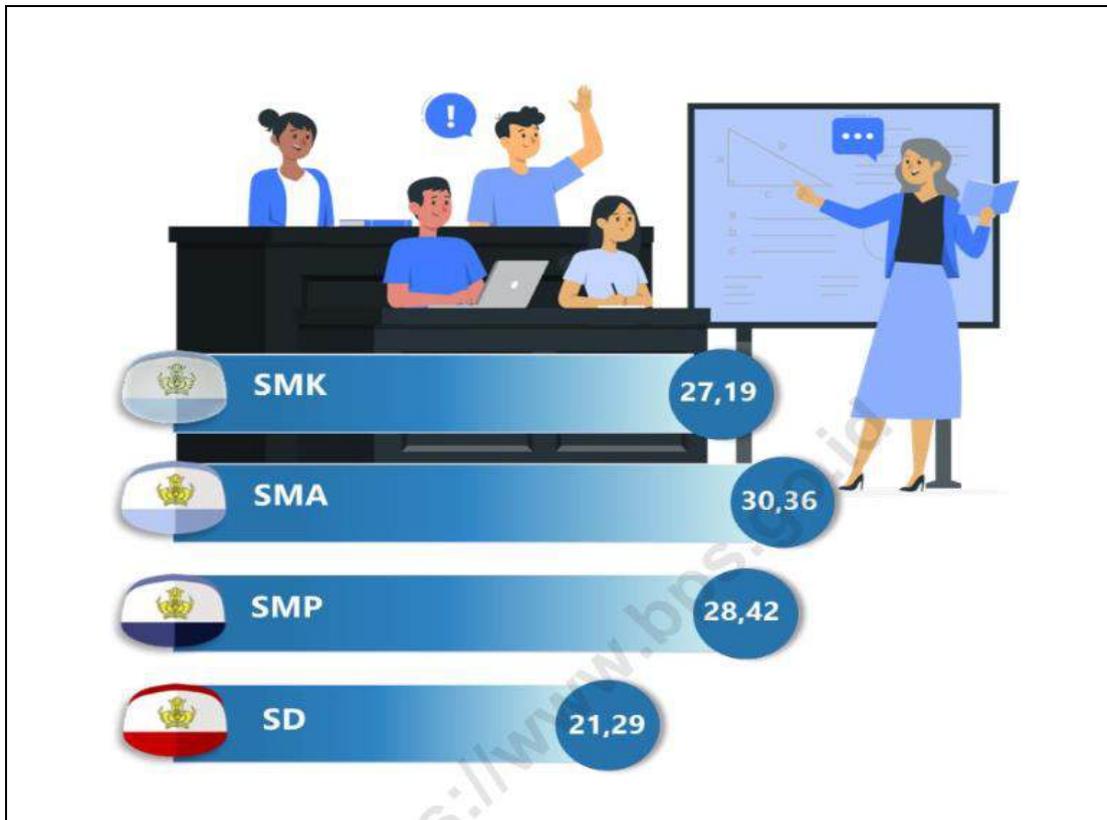
Menurut status sekolah, jumlah ruang kelas sekolah negeri lebih banyak dari ruang kelas sekolah swasta. Walaupun jumlah sekolah swasta mengalami kenaikan yang lebih banyak dari kenaikan jumlah sekolah negeri, namun penambahan ruang kelas sekolah swasta tidak lebih banyak dari penambahan ruang kelas sekolah negeri. Jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah dasar di sekolah negeri lebih banyak 8 kali dari jumlah ruang kelas sekolah swasta pada jenjang yang sama. Sedangkan pada jenjang sekolah

menengah kejuruan, jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah ruang kelas sekolah negeri. Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sisi kondisi/keadaannya. Apabila dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/2023, jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan. Namun, jumlah ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan. Keadaan ini terjadi pada semua jenjang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, rombongan belajar (rombel) merupakan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, peraturan tersebut juga mengatur jumlah peserta didik per rombel untuk setiap sekolah. Kebijakan pengaturan jumlah peserta didik ini utamanya bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup 20-28 peserta didik, jenjang SMP mencakup 20-32 peserta didik, jenjang SMA mencakup 20-36 peserta didik, dan jenjang SMK setidaknya mencakup 15-36 peserta didik. Sementara itu, jumlah rombel pada setiap jenjang pendidikan diatur sebagai berikut: pada jenjang SD jumlah rombel antara 6-24 rombel, jenjang SMP mencakup 3-33 rombel, jenjang SMA mencakup 3-36 rombel, dan jenjang SMK mencakup 3-72 rombel. Semakin kecil rombel atau semakin sedikit jumlah peserta didik dalam satu rombel, semakin efektif sebuah proses pembelajaran dan memberikan capaian akademik yang lebih baik. Jumlah peserta didik yang sedikit dalam sebuah rombel akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pendidik dengan peserta didik (peserta didik merasa lebih mendapatkan dukungan dari guru-guru mereka), antar peserta didik, antar komunitas, dan sekolah sehingga menciptakan komitmen pada pendidikan dari semua pemegang kepentingan

Gambar 75 Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

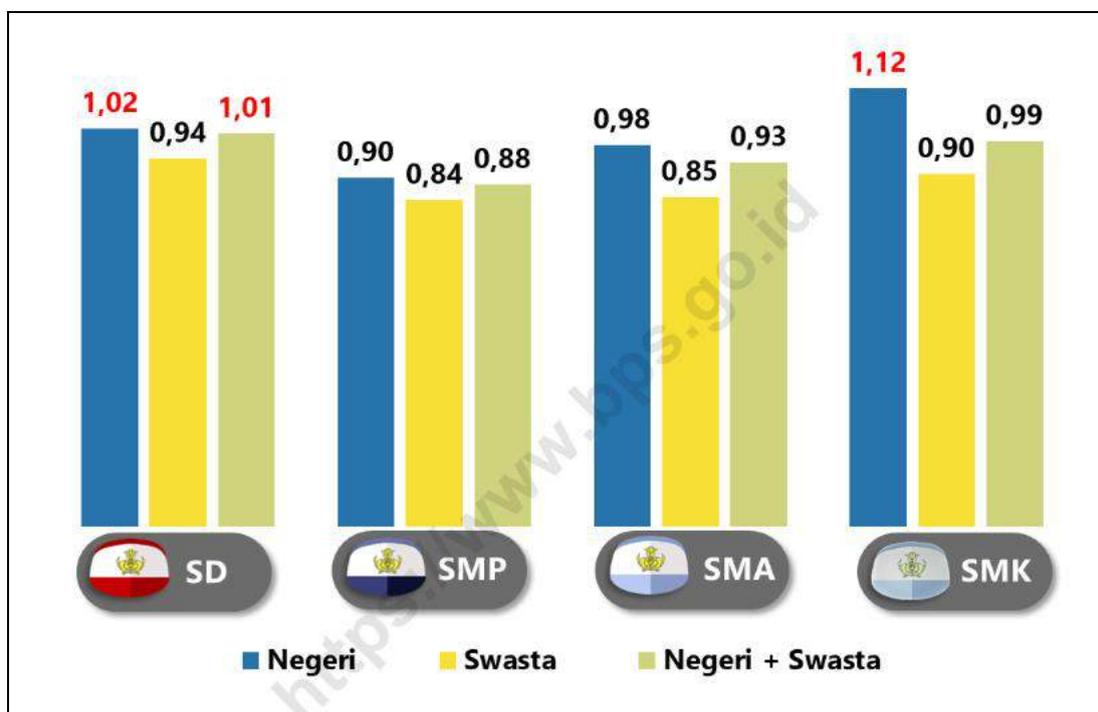
Gambar diatas menunjukkan rasio peserta didik per rombel pada setiap jenjang pendidikan. Rasio peserta didik per rombel paling kecil terdapat pada jenjang SD dan rasio paling besar terdapat pada jenjang SMA. Rasio peserta didik per rombel jenjang SD sebesar 21,29 yang artinya bahwa setiap rombel di SD terdiri dari 21 sampai 22 peserta didik. Sementara itu, pada jenjang SMA setiap rombel terdiri dari 30 sampai 31 peserta didik.

Chingos dalam penelitiannya sebagaimana yang dikutip (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), menyatakan bahwa jumlah rombel yang lebih sedikit dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman belajarnya. Namun, jika jumlahnya terlalu sedikit juga akan berdampak kurang baik karena mengurangi sosialisasi dan kerja sama peserta didik yang juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan.

Menurut status sekolah, pada sekolah negeri rasio rombel per kelas lebih dari 1 pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang artinya jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia

Selain rasio peserta didik per rombel, hal yang patut mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Semua jenjang pendidikan memiliki angka rasio rombel per kelas dibawah satu. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia lebih besar daripada jumlah rombel. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang ada, dengan memperhatikan kewajaran daya tampung peserta didik per kelas. Walaupun secara nasional rasio rombel per kelas sudah dibawah satu, kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa sekolah yang kekurangan ruang kelas atau ruang kelas dalam kondisi rusak berat sehingga ruang kelas harus digunakan secara bergantian (detik.com, 2022). Menurut status sekolah, pada sekolah negeri rasio rombel per kelas lebih dari 1 pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang artinya jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia. Rasio rombel per kelas pada jenjang SMP dan SMA nilainya di bawah satu, artinya jumlah ruang kelas yang tersedia lebih banyak daripada jumlah rombel. Kondisi ini menggambarkan kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang ada, dengan memperhatikan kewajaran daya tampung peserta didik per kelas. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK negeri memiliki rasio rombel per kelas lebih dari satu. Hal ini berarti jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia.

Gambar 76 Rasio Rombel per Kelas menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan seorang guru dalam melakukan pengajaran. Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Indikatornya adalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta memantau upaya peningkatan kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDG's, guru yang memenuhi kualifikasi adalah yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kualitas seorang guru menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pembelajaran (Bappenas, 2019). Karena perannya tersebut, jumlah dan kualitas guru menjadi salah satu target pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Hal ini tertuang pada target SDGs 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Target tersebut diukur dengan indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

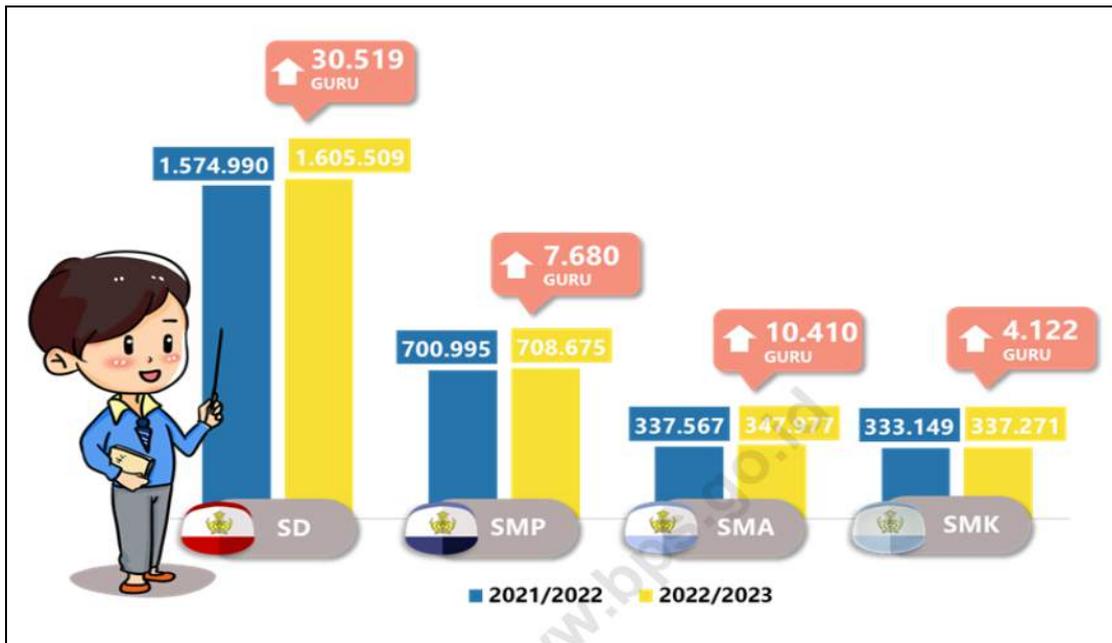
Pada tahun ajaran 2022/2023 terjadi peningkatan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Komposisi guru paling banyak berada pada jenjang SD yaitu sebanyak 1,6 juta guru. Jumlah guru pada jenjang SMP sekitar setengah dari jumlah guru SD yaitu sebanyak 708 ribu guru. Sementara itu, jumlah guru pada jenjang SMK lebih sedikit dibandingkan jumlah guru pada jenjang SMA.

Kualitas dan distribusi pendidik yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA rasio murid-guru masih memenuhi standar ideal. Namun, pada jenjang pendidikan SMK rasio murid-guru belum memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan.

Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDGs, guru yang memenuhi kualifikasi adalah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

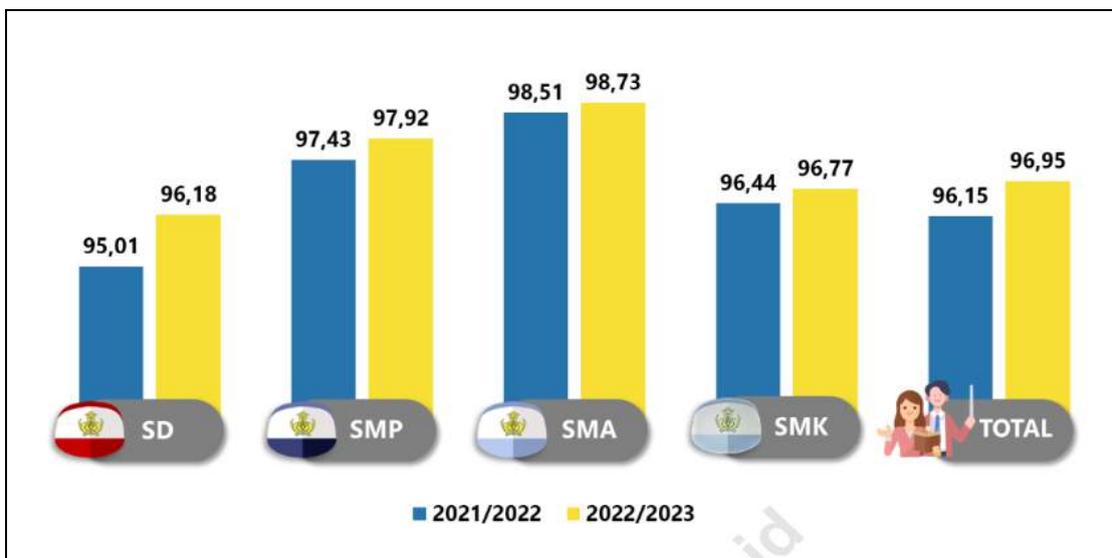
Riset, dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yaitu bahwa kualifikasi akademik guru SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SM/ sederajat adalah minimal D4 atau S1.

Gambar 77 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambar 78 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

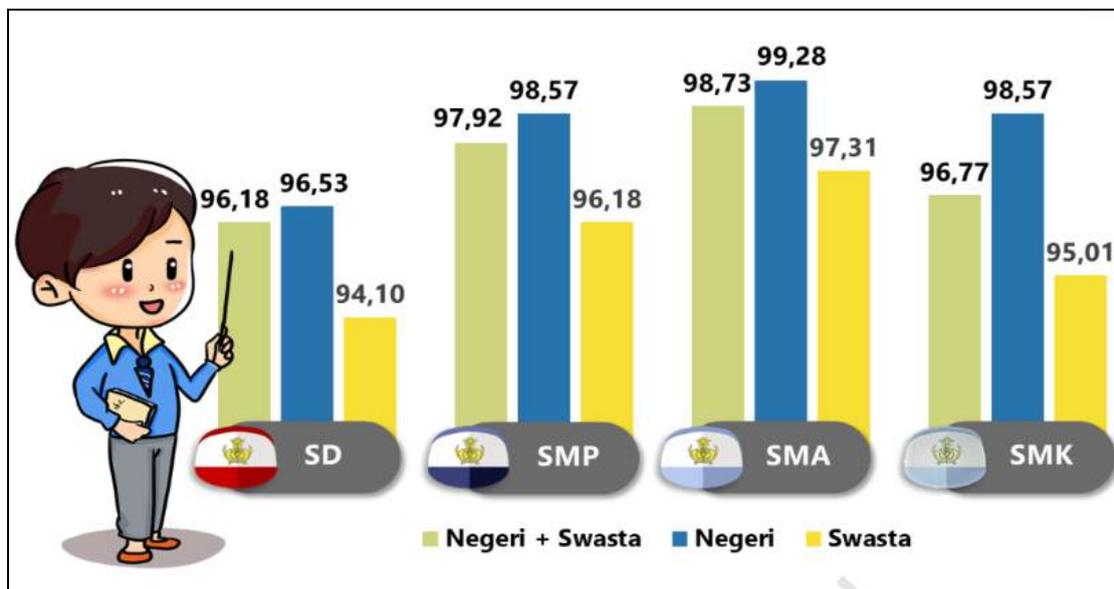


Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar diatas, pada tahun ajaran 2022/2023 secara umum persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 sebesar 96,95 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya (96,15 persen). Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 pada setiap jenjang Pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun SMK juga meningkat dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas pendidik sebagai ujung tombak pendidikan. Namun, setidaknya dapat mengindikasikan bahwa kualitas pendidik menjadi semakin baik. Persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 paling banyak terdapat pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SD memiliki persentase yang paling kecil. Apabila dilihat dari status sekolah, keberadaan guru dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Gambar 79 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

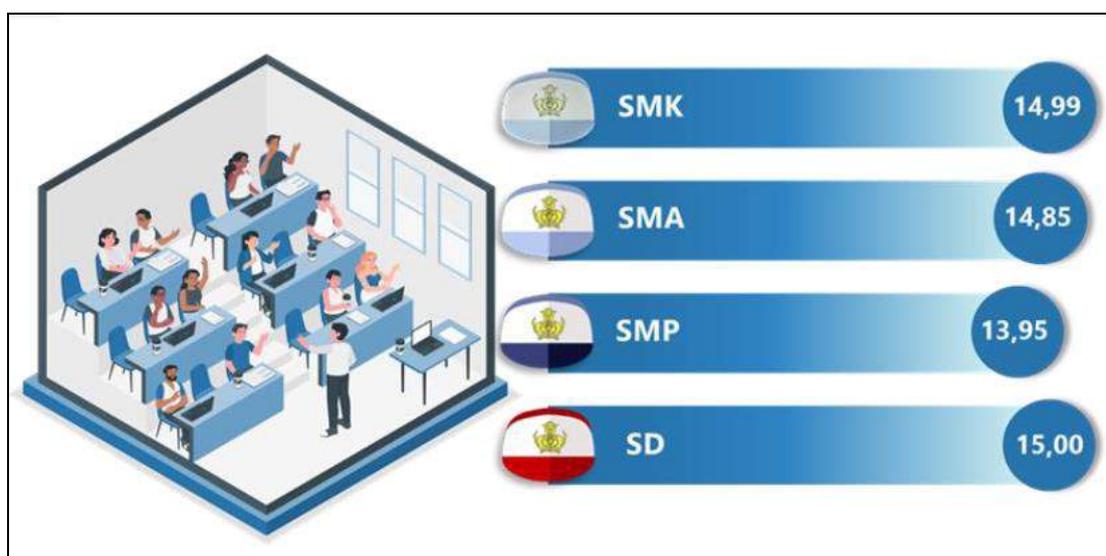


Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Distribusi guru yang ideal dan menyeluruh masih menjadi tantangan pembangunan bidang pendidikan di Indonesia (Haekal, 2022). Terdapat daerah yang kelebihan guru, namun ada juga daerah lain yang kekurangan guru. Hal ini menyebabkan beban kerja guru di setiap daerah berbeda-beda. Beban kerja guru dapat dilihat melalui rasio murid-guru. Angka tersebut mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, menunjukkan semakin berkurang efektivitas proses pembelajaran, dikarenakan tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang. Hal ini memberikan pengaruh juga pada mutu pengajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Berdasarkan gambar dibawah ini, terlihat bahwa rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan.

Gambar 80 Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

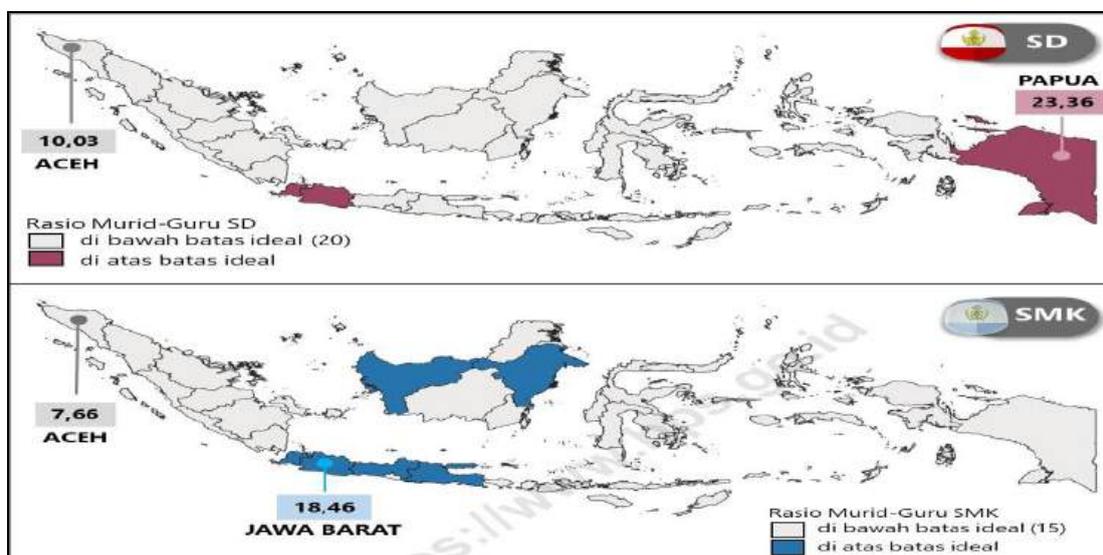


Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Meskipun secara nasional rasio murid-guru pada jenjang SD tidak melebihi batas ideal, namun masih terdapat tiga provinsi dengan rasio murid-guru di atas batas ideal yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua. Angka ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya penyebaran jumlah guru SD di level provinsi. Rasio terkecil ada di Provinsi Aceh, dimana satu guru bertanggung jawab terhadap 10 murid, sedangkan di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab terhadap 23 murid. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMK, dimana terdapat beberapa provinsi dengan rasio murid-guru di atas batas ideal. Salah satunya yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, sementara empat provinsi lainnya ditemukan di wilayah Pulau Jawa yang cenderung banyak penduduknya yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pada jenjang SMP dan SMA, sudah tidak ada provinsi yang secara rata-rata memiliki rasio murid-guru di atas batas ideal.

Pada jenjang sekolah dasar walaupun secara nasional rasio murid-guru sudah baik yaitu tidak lebih dari angka ideal, namun penyebaran masih belum merata di beberapa provinsi. Pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dimana menurut sebaran provinsi sudah tidak ada provinsi yang rasio murid-guru di atas batas ideal. Lain hal dengan yang terjadi pada jenjang sekolah menengah kejuruan, dimana provinsi-provinsi dengan rasio di atas batas ideal banyak ditemukan di Pulau Jawa.

Gambar 81 Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2023

Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid, dan guru.

Tabel 219 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Lembaga Pendidikan	Jumlah		Pertumbuhan (%)
	2022/2023	2023/2024	
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/Sejenisnya			
Jumlah	2.913	2.896	-0,58
Jumlah Murid	98.168	98.086	-0,08
Jumlah Guru	10.543	10.602	0,56
SD/Sederajat			
Jumlah	4.419	4.371	-1,09
Jumlah Murid	624.446	619.427	-0,80
Jumlah Guru	49.385	51.196	3,67
SMP/Sederajat			
Jumlah	1.272	1.271	-0,08
Jumlah Murid	298.720	280.503	-0,44
Jumlah Guru	28.235	28.014	-0,78
SMA/Sederajat			
Jumlah	773	771	-0,26
Jumlah Murid	278.813	279.140	0,12
Jumlah Guru	23.854	23.710	-0,60

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel 219 menunjukkan perkembangan jumlah sekolah pada dua tahun ajaran terakhir di Provinsi Sumatera Barat, yaitu 2022/2023 dan 2023/2024. Semua jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami penurunan jumlah bangunan sekolah dibandingkan 2022/2023. Penurunan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, yaitu sebesar 1,09 persen. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan TK/ sejenisnya mengalami penurunan sebesar 0,58 persen, jenjang pendidikan SMP/ sederajat mengalami penurunan sebesar 0,08

persen dan jenjang pendidikan SMA/ sederajat mengalami penurunan sebesar 0,26 persen.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama dua tahun terakhir, jumlah murid juga mengalami penurunan, yaitu pada jenjang pendidikan TK/ sejenisnyanya, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat. Penurunan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 0,80 persen, diikuti penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 0,44 persen, dan pada TK/ sejenisnyanya sebesar 0,08 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat jumlah murid mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen. Selanjutnya, jika dilihat dari peningkatan jumlah guru di Provinsi Sumatera Barat, jumlah guru SD/ sederajat pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan sebesar 3,67 persen dan guru TK/ sejenisnyanya mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen. Sementara itu, guru SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,78 persen dan 0,60 persen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disebutkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang minimal jumlah siswa terhadap gurunya sebagai berikut: jenjang TK/RA = 15:1; jenjang SD/ sederajat = 20:1; jenjang MI/ sederajat = 15:1; jenjang SMP/ sederajat = 20:1; jenjang MTs/ sederajat = 15:1; jenjang SMA/ sederajat = 20:1; jenjang MA/ sederajat = 15:1; jenjang SMK/ sederajat = 15:1; jenjang MAK/ sederajat = 12:1. Beban kerja guru dapat dilihat dari rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru (baik guru layak mengajar maupun tidak) pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 220 Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Rasio
	Murid	Guru	
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/Sejenisnya	98.086	10.602	9
SD/Sederajat	619.427	51.196	12
SMP/Sederajat	280.503	28.014	10
SMA/Sederajat	279.140	23.710	12

Sumber: BPS, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan untuk TA 2023/2024 sudah memenuhi standar ideal

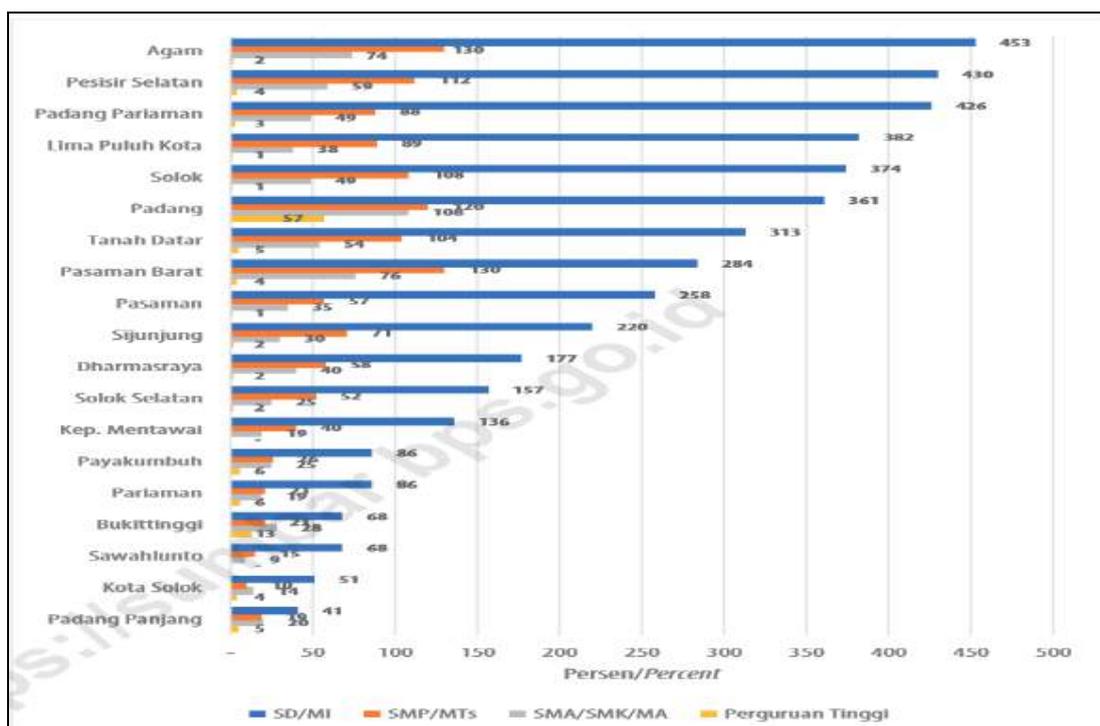
Angka rasio murid-guru yang besar mengindikasikan bahwa satu orang guru harus bertanggung jawab terhadap banyak murid dan begitu pun sebaliknya. Semakin ideal rasio murid-guru, semakin besar akses murid terhadap guru. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memerhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik dan dapat menjadikan suasana belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya lebih optimal. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini juga tercantum dalam tujuan SDGs keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

Target yang ditetapkan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026. Adapun visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Visi ini didukung oleh 7 misi yang akan dicapai pada akhir masa

keperintahan Gubernur Mahyeldi yang berakhir di tahun 2026. Pada misi ke-1 yang berbunyi “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing” tertulis tujuan agar masyarakat di Provinsi Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

Apabila dilihat dengan hasil yang dicapai di Provinsi Sumatera Barat melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas Maret 2023 dapat dilihat sejauh mana capaian provinsi terhadap target renstra nasional dan target kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah adalah angka partisipasi sekolah. Indikator ini menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif suatu program pendidikan

Gambar 82 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023



Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 221 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri /Public		Swasta / Private		Jumlah / Total	
	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	—	—	71	71	71	71
2. Pesisir Selatan	14	14	155	155	169	169
3. Solok	5	5	164	164	169	169
4. Sijunjung	22	22	116	116	138	138
5. Tanah Datar	6	6	186	186	192	192
6. Padang Pariaman	3	3	128	128	131	131
7. Agam	7	7	270	270	277	277
8. Lima Puluh Kota	1	1	234	234	235	235
9. Pasaman	10	10	82	82	92	92
10. Solok Selatan	9	9	82	82	91	91
11. Dharmasraya	16	16	120	120	136	136
12. Pasaman Barat	5	5	233	233	238	238
Kota/Municipality						
1. Padang	5	5	313	313	318	318
2. Solok	1	1	17	17	18	18
3. Sawahlunto	2	2	32	32	34	34
4. Padang Panjang	1	1	18	18	19	19
5. Bukittinggi	2	2	48	48	50	50
6. Payakumbuh	4	4	47	47	51	51
7. Pariaman	4	4	34	34	38	38
Sumatera Barat	117	117	2.350	2.350	2.467	2.467

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	—	—	206	206	206	206
2. Pesisir Selatan	109	109	608	608	717	717
3. Solok	54	54	550	550	604	604
4. Sijunjung	111	111	363	363	474	474
5. Tanah Datar	34	34	567	567	601	601
6. Padang Pariaman	17	17	467	467	484	484
7. Agam	50	50	860	860	910	910
8. Lima Puluh Kota	6	6	732	732	738	738
9. Pasaman	55	55	328	328	383	383
10. Solok Selatan	57	57	274	274	331	331
11. Dharmasraya	98	98	332	332	430	430
12. Pasaman Barat	34	34	799	799	833	833
Kota/Municipality						
1. Padang	31	31	1185	1185	1216	1216
2. Solok	11	11	89	89	100	100
3. Sawahlunto	12	12	117	117	129	129
4. Padang Panjang	13	13	93	93	106	106
5. Bukittinggi	21	21	294	294	315	315
6. Payakumbuh	27	27	268	268	295	295
7. Pariaman	15	15	129	129	144	144
Sumatera Barat	755	755	8.261	8.261	9.016	9.016

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²	2022/2023	2023/2024 ²
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	—	—	1.829	1.829	1.829	1.829
2. Pesisir Selatan	884	884	5.540	5.540	6.424	6.424
3. Solok	328	328	5.004	5.004	5.332	5.332
4. Sijunjung	947	947	3.304	3.304	4.251	4.251
5. Tanah Datar	355	355	4.652	4.652	5.007	5.007
6. Padang Pariaman	147	147	3.960	3.960	4.107	4.107
7. Agam	453	453	7.629	7.629	8.082	8.082
8. Lima Puluh Kota	71	71	6.136	6.136	6.207	6.207
9. Pasaman	470	470	3.127	3.127	3.597	3.597
10. Solok Selatan	448	448	2.260	2.260	2.708	2.708
11. Dharmasraya	1026	1026	3.394	3.394	4.420	4.420
12. Pasaman Barat	405	405	8.726	8.726	9.131	9.131
Kota/Municipality						
1. Padang	373	373	11.931	11.931	12.304	12.304
2. Solok	83	83	993	993	1.076	1.076
3. Sawahlunto	84	84	812	812	896	896
4. Padang Panjang	140	140	1.045	1.045	1.185	1.185
5. Bukittinggi	222	222	2.639	2.639	2.861	2.861
6. Payakumbuh	266	266	2.395	2.395	2.661	2.661
7. Pariaman	123	123	1.136	1.136	1.259	1.259
Sumatera Barat	6.825	6.825	76.512	76.512	83.337	83.337

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 222 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah Schools		Guru ^{2,3} Teachers ^{2,3}		Murid Pupils	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	15	15	50	47	450	481
2. Pesisir Selatan	73	72	223	238	2.318	2.287
3. Solok	22	20	68	69	598	613
4. Sijunjung	29	28	78	82	746	754
5. Tanah Datar	14	14	43	40	381	335
6. Padang Pariaman ¹	42	41	153	158	1.155	1.221
7. Agam	14	15	50	57	409	443
8. Lima Puluh Kota	20	20	54	52	465	486
9. Pasaman	17	12	62	57	579	568
10. Solok Selatan	29	27	96	102	925	894
11. Dharmasraya	36	34	145	156	1.538	1.460
12. Pasaman Barat	47	46	130	129	1.633	1.547
Kota/Municipality						
1. Padang	47	44	186	199	1.904	1.918
2. Solok	7	7	41	48	387	453
3. Sawahlunto	9	9	42	45	461	445
4. Padang Panjang	3	3	26	24	186	178
5. Bukittinggi	6	6	33	30	219	207
6. Payakumbuh	11	11	32	35	395	373
7. Pariaman	5	5	15	18	82	86
Sumatera Barat	446	429	1.527	1.586	14.831	14.749

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 223 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	127	127	7	8	134	135
2. Pesisir Selatan	385	385	21	21	406	406
3. Solok	344	344	19	20	363	364
4. Sijunjung	205	207	7	9	212	216
5. Tanah Datar	295	295	9	11	304	306
6. Padang Pariaman	401	401	12	15	413	416
7. Agam	419	417	20	24	439	441
8. Lima Puluh Kota	360	360	12	12	372	372
9. Pasaman	244	244	5	5	249	249
10. Solok Selatan	131	131	6	7	137	138
11. Dharmasraya	147	147	20	21	167	168
12. Pasaman Barat	254	254	21	21	275	275
Kota/Municipality						
1. Padang	338	268	74	78	412	346
2. Solok	41	41	7	7	48	48
3. Sawahlunto	55	55	7	8	62	63
4. Padang Panjang	32	32	6	6	38	38
5. Bukittinggi	46	46	19	19	65	65
6. Payakumbuh	66	66	17	18	83	84
7. Pariaman	72	72	9	10	81	82
Sumatera Barat	3.962	3.892	298	320	4.260	4.212

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru/Teachers					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	1385	1.376	67	78	1.452	1.454
2. Pesisir Selatan	4664	4.947	293	328	4.957	5.275
3. Solok	3397	3.438	240	248	3.637	3.686
4. Sijunjung	1953	2.637	120	115	2.073	2.752
5. Tanah Datar	2700	2.733	140	156	2.840	2.889
6. Padang Pariaman	3783	3.835	138	158	3.921	3.993
7. Agam	3842	3.875	219	274	4.061	4.149
8. Lima Puluh Kota	3660	3.602	165	147	3.825	3.749
9. Pasaman	2680	2.716	82	88	2.762	2.804
10. Solok Selatan	1769	1.759	104	129	1.873	1.888
11. Dharmasraya	1667	1.791	252	304	1.919	2.095
12. Pasaman Barat	3288	3.469	353	377	3.641	3.846
Kota/Municipality						
1. Padang	4279	4.197	1.143	1.213	5.422	5.410
2. Solok	470	513	123	120	593	633
3. Sawahlunto	531	539	84	88	615	627
4. Padang Panjang	306	304	81	86	387	390
5. Bukittinggi	554	574	475	499	1.029	1.073
6. Payakumbuh	749	754	288	287	1.037	1.041
7. Pariaman	695	689	94	104	789	793
Sumatera Barat	42.372	43.748	4.461	4.799	46.833	48.547

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	11.064	10.579	1.098	1.065	12.162	11.644
2. Pesisir Selatan	51.778	51.055	3.228	3.560	55.006	54.615
3. Solok	41.532	40.806	3.253	3.684	44.785	44.490
4. Sijunjung	26.596	25.977	1.414	1.577	28.010	27.554
5. Tanah Datar	33.653	32.596	1.939	2.165	35.592	34.761
6. Padang Pariaman	43.839	42.732	2.739	2.927	46.578	45.659
7. Agam	48.021	47.144	3.264	3.539	51.285	50.683
8. Lima Puluh Kota	35.736	34.419	2.184	2.239	37.920	36.658
9. Pasaman	34.156	33.204	1.028	1.099	35.184	34.303
10. Solok Selatan	16.711	16.507	1.887	2.064	18.598	18.571
11. Dharmasraya	23.165	22.939	3.656	3.983	26.821	26.922
12. Pasaman Barat	48.068	47.657	5.215	5.381	53.283	53.038
Kota/Municipality						
1. Padang	69.908	69.493	18.704	19.831	88.612	89.324
2. Solok	7.266	7.282	1.428	1.516	8.694	8.798
3. Sawahlunto	5.267	5.065	969	1.031	6.236	6.096
4. Padang Panjang	4.669	4.488	1.476	1.598	6.145	6.086
5. Bukittinggi	9.639	9.522	6.304	6.360	15.943	15.882
6. Payakumbuh	11.522	11.292	4.474	4.814	15.996	16.106
7. Pariaman	8.603	8.448	1.765	1.999	10.368	10.447
Sumatera Barat	531.193	521.205	66.025	70.432	597.218	591.637

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelas/Classes					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	818	1.371	66	94	884	1.465
2. Pesisir Selatan	2.723	4.510	139	292	2.862	4.802
3. Solok	2.394	4.017	119	281	2.513	4.298
4. Sijunjung	1.469	2.809	61	133	1.530	2.942
5. Tanah Datar	1.922	3.163	72	136	1.994	3.299
6. Padang Pariaman	2.540	3.784	107	200	2.647	3.984
7. Agam	2.768	4.762	132	278	2.900	5.040
8. Lima Puluh Kota	2.399	4.242	65	207	2.464	4.449
9. Pasaman	1.868	3.141	39	95	1.907	3.236
10. Solok Selatan	950	1.749	66	149	1.016	1.898
11. Dharmasraya	1.127	2.146	158	346	1.285	2.492
12. Pasaman Barat	2.120	3.840	204	361	2.324	4.201
Kota/Municipality						
1. Padang	2.240	5.491	766	1.694	3.006	7.185
2. Solok	334	578	58	148	392	726
3. Sawahlunto	321	641	49	84	370	725
4. Padang Panjang	190	378	49	125	239	503
5. Bukittinggi	368	739	253	441	621	1.180
6. Payakumbuh	516	1.019	192	390	708	1.409
7. Pariaman	465	824	89	167	554	991
Sumatera Barat	27.532	49.204	2.684	5.621	30.216	54.825

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	8	8	16	14	8	8
2. Pesisir Selatan	11	10	11	11	11	10
3. Solok	12	12	14	15	12	12
4. Sijunjung	14	10	12	14	14	10
5. Tanah Datar	12	12	14	14	13	12
6. Padang Pariaman	12	11	20	19	12	11
7. Agam	12	12	15	13	13	12
8. Lima Puluh Kota	10	10	13	15	10	10
9. Pasaman	13	12	13	12	13	12
10. Solok Selatan	9	9	18	16	10	10
11. Dharmasraya	14	13	15	13	14	13
12. Pasaman Barat	15	14	15	14	15	14
Kota/Municipality						
1. Padang	16	17	16	16	16	17
2. Solok	15	14	12	13	15	14
3. Sawahlunto	10	9	12	12	10	10
4. Padang Panjang	15	15	18	19	16	16
5. Bukittinggi	17	17	13	13	15	15
6. Payakumbuh	15	15	16	17	15	15
7. Pariaman	12	12	19	19	13	13
Sumatera Barat	13	12	15	15	13	12

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid Baru/New Pupils		Murid yang Lulus/Graduated Pupils	
	Negeri dan Swasta Public and Private		Negeri dan Swasta Public and Private	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)
Kabupaten/Regency				
1. Kep. Mentawai	2.141	10.579	2.093	1.065
2. Pesisir Selatan	9.808	51.055	9.602	3.560
3. Solok	7.743	40.806	7.465	3.684
4. Sijunjung	4.628	25.977	4.824	1.577
5. Tanah Datar	6.128	32.596	6.273	2.165
6. Padang Pariaman	7.914	42.732	8.412	2.965
7. Agam	8.612	47.144	8.886	2.927
8. Lima Puluh Kota	6.212	34.419	7.016	3.539
9. Pasaman	6.042	33.204	6.048	2.239
10. Solok Selatan	3.300	16.507	3.001	1.099
11. Dharmasraya	4.746	22.939	4.229	2.064
12. Pasaman Barat	9.363	47.657	8.483	5.381
Kota/Municipality				
1. Padang	15.307	69.493	14.622	19.831
2. Solok	1.573	7.282	1.372	1.516
3. Sawahlunto	1.085	5.065	1.148	1.031
4. Padang Panjang	983	4.488	1.004	1.598
5. Bukittinggi	2.778	9.522	2.726	6.360
6. Payakumbuh	2.754	11.292	2.864	4.814
7. Pariaman	1.837	8.448	1.732	1.999
Sumatera Barat	102.954	521.205	101.800	69.414

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 224 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	–	–	1	1	1	1
2. Pesisir Selatan	13	13	10	11	23	24
3. Solok	4	4	6	6	10	10
4. Sijunjung	–	–	4	4	4	4
5. Tanah Datar	3	3	4	4	7	7
6. Padang Pariaman	5	5	5	5	10	10
7. Agam	8	8	4	4	12	12
8. Lima Puluh Kota	1	1	9	9	10	10
9. Pasaman	2	2	8	7	10	9
10. Solok Selatan	7	7	12	12	19	19
11. Dharmasraya	2	2	6	7	8	9
12. Pasaman Barat	2	2	8	7	10	9
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	7	7	8	8	15	15
2. Solok	1	1	2	2	3	3
3. Sawahlunto	3	3	2	2	5	5
4. Padang Panjang	–	–	3	3	3	3
5. Bukittinggi	1	1	2	2	3	3
6. Payakumbuh	1	1	1	1	2	2
7. Pariaman	2	2	2	2	4	4
Sumatera Barat	62	62	97	97	159	159

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	–	–	9	9	9	9
2. Pesisir Selatan	308	317	134	138	442	455
3. Solok	107	109	64	65	171	174
4. Sijunjung	–	–	40	43	40	43
5. Tanah Datar	76	77	39	43	115	120
6. Padang Pariaman	59	57	56	57	115	114
7. Agam	139	147	28	31	167	178
8. Lima Puluh Kota	19	17	86	91	105	108
9. Pasaman	42	41	70	69	112	110
10. Solok Selatan	148	155	133	133	281	288
11. Dharmasraya	33	36	61	77	94	113
12. Pasaman Barat	69	73	121	121	190	194
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	236	236	108	126	344	362
2. Solok	31	34	21	20	52	54
3. Sawahlunto	48	53	17	19	65	72
4. Padang Panjang	–	–	81	82	81	82
5. Bukittinggi	31	30	31	33	62	63
6. Payakumbuh	20	21	22	20	42	41
7. Pariaman	45	48	20	21	65	69
Sumatera Barat	1.411	1.451	1.141	1.198	2.552	2.649

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	–	–	107	96	107	96
2. Pesisir Selatan	2085	2057	1016	1.074	3.101	3.131
3. Solok	1371	1393	504	505	1.875	1.898
4. Sijunjung	–	–	329	323	329	323
5. Tanah Datar	733	757	304	324	1.037	1.081
6. Padang Pariaman	612	591	419	418	1.031	1.009
7. Agam	1579	1681	249	214	1.828	1.895
8. Lima Puluh Kota	209	198	798	832	1.007	1.030
9. Pasaman	528	550	665	633	1.193	1.183
10. Solok Selatan	1583	1680	860	887	2.443	2.567
11. Dharmasraya	449	462	544	652	993	1.114
12. Pasaman Barat	1133	1123	1906	1.953	3.039	3.076
Kota/Municipality						
1. Padang	3538	3420	987	1.123	4.525	4.543
2. Solok	616	645	158	147	774	792
3. Sawahlunto	526	531	214	232	740	763
4. Padang Panjang	–	–	952	968	952	968
5. Bukittinggi	552	564	328	353	880	917
6. Payakumbuh	391	412	261	272	652	684
7. Pariaman	538	550	184	170	722	720
Sumatera Barat	16.443	16.614	10.785	11.176	27.228	27.790

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	–	–	12	11	12	11
2. Pesisir Selatan	7	6	8	8	7	7
3. Solok	13	13	8	8	11	11
4. Sijunjung	–	–	8	8	8	8
5. Tanah Datar	10	10	8	8	9	9
6. Padang Pariaman	10	10	7	7	9	9
7. Agam	11	11	9	7	11	11
8. Lima Puluh Kota	11	12	9	9	10	10
9. Pasaman	13	13	10	9	11	11
10. Solok Selatan	11	11	6	7	9	9
11. Dharmasraya	14	13	9	8	11	10
12. Pasaman Barat	16	15	16	16	16	16
Kota/Municipality						
1. Padang	15	14	9	9	13	13
2. Solok	20	19	8	7	15	15
3. Sawahlunto	11	10	13	12	11	11
4. Padang Panjang	–	–	12	12	12	12
5. Bukittinggi	18	19	11	11	14	15
6. Payakumbuh	20	20	12	14	16	17
7. Pariaman	12	11	9	8	11	10
Sumatera Barat	12	11	9	9	11	10

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 225 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru, Murid Baru dan Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah ¹ /Schools ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	27	28	7	7	34	35
2. Pesisir Selatan	74	74	5	5	79	79
3. Solok	67	67	5	6	72	73
4. Sijunjung	48	48	7	7	55	55
5. Tanah Datar	49	49	7	8	56	57
6. Padang Pariaman	58	58	4	3	62	61
7. Agam	56	56	11	12	67	68
8. Lima Puluh Kota	47	47	12	14	59	61
9. Pasaman	38	38	1	2	39	40
10. Solok Selatan	32	32	3	3	35	35
11. Dharmasraya	33	33	7	7	40	40
12. Pasaman Barat	53	53	19	19	72	72
Kota/Municipality						
1. Padang	43	44	57	56	100	100
2. Solok	6	6	2	2	8	8
3. Sawahlunto	9	9	3	3	12	12
4. Padang Panjang	6	6	8	7	14	13
5. Bukittinggi	8	8	7	7	15	15
6. Payakumbuh	10	10	10	10	20	20
7. Pariaman	9	9	5	5	14	14
Sumatera Barat	673	675	180	183	853	858

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	496	526	64	58	560	584
2. Pesisir Selatan	2.079	2.058	53	56	2.132	2.114
3. Solok	1.195	1.170	74	102	1.269	1.272
4. Sijunjung	732	714	68	79	800	793
5. Tanah Datar	861	844	78	70	939	914
6. Padang Pariaman	1.323	1.241	39	33	1.362	1.274
7. Agam	1.131	1.106	115	113	1.246	1.219
8. Lima Puluh Kota	1.076	996	136	147	1.212	1.143
9. Pasaman	969	945	18	37	987	982
10. Solok Selatan	571	556	47	45	618	601
11. Dharmasraya	720	684	71	76	791	760
12. Pasaman Barat	1.270	1.278	266	242	1.536	1.520
Kota/Municipality						
1. Padang	1.867	1.852	799	796	2.666	2.648
2. Solok	268	302	16	16	284	318
3. Sawahlunto	221	200	37	32	258	232
4. Padang Panjang	213	211	74	82	287	293
5. Bukittinggi	313	313	110	109	423	422
6. Payakumbuh	340	325	214	184	554	509
7. Pariaman	308	303	37	38	345	341
Sumatera Barat	15.953	15.624	2.316	2.315	18.269	17.939

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid ¹ /Pupils ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	4.814	4.567	559	571	5.373	5.138
2. Pesisir Selatan	16.993	17.021	183	200	17.176	17.221
3. Solok	12.597	12.379	750	1.265	13.347	13.644
4. Sijunjung	8.487	8.417	575	578	9.062	8.995
5. Tanah Datar	9.363	9.305	665	619	10.028	9.924
6. Padang Pariaman	15.219	14.797	287	276	15.506	15.073
7. Agam	13.000	13.266	1.059	1.380	14.059	14.646
8. Lima Puluh Kota	11.325	11.004	1.749	1.979	13.074	12.983
9. Pasaman	9.303	9.163	103	294	9.406	9.457
10. Solok Selatan	4.859	4.894	461	447	5.320	5.341
11. Dharmasraya	8.112	8.226	540	602	8.652	8.828
12. Pasaman Barat	12.202	12.327	2.658	2.721	14.860	15.048
Kota/Municipality						
1. Padang	28.006	28.342	8.543	7.851	36.549	36.193
2. Solok	4.044	4.022	168	211	4.212	4.233
3. Sawahlunto	2.086	2.135	263	259	2.349	2.394
4. Padang Panjang	2.851	2.887	534	462	3.385	3.349
5. Bukittinggi	5.071	5.268	1.152	1.096	6.223	6.364
6. Payakumbuh	5.562	5.670	3.213	2.986	8.775	8.656
7. Pariaman	3.750	3.668	304	347	4.054	4.015
Sumatera Barat	177.644	177.358	23.766	24.144	201.410	201.502

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelas ² /Classes ²					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	217	277	27	53	244	330
2. Pesisir Selatan	768	1.712	12	28	780	1.740
3. Solok	609	1.022	26	109	635	1.131
4. Sijunjung	362	838	22	52	384	890
5. Tanah Datar	517	750	39	68	556	818
6. Padang Pariaman	687	1.183	19	21	706	1.204
7. Agam	652	1.042	48	77	700	1.119
8. Lima Puluh Kota	549	918	74	158	623	1.076
9. Pasaman	385	651	5	25	390	676
10. Solok Selatan	267	536	20	67	287	603
11. Dharmasraya	336	630	11	64	347	694
12. Pasaman Barat	510	828	114	178	624	1.006
Kota/Municipality						
1. Padang	835	2.647	430	676	1.265	3.323
2. Solok	104	182	10	33	114	215
3. Sawahlunto	114	166	13	33	127	199
4. Padang Panjang	108	199	33	44	141	243
5. Bukittinggi	201	426	54	93	255	519
6. Payakumbuh	210	448	116	240	326	688
7. Pariaman	143	249	10	30	153	279
Sumatera Barat	7.574	14.704	1.083	2.049	8.657	16.753

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	10	9	9	10	10	9
2. Pesisir Selatan	8	8	3	4	8	8
3. Solok	11	11	10	12	11	11
4. Sijunjung	12	12	8	7	11	11
5. Tanah Datar	11	11	9	9	11	11
6. Padang Pariaman	12	12	7	8	11	12
7. Agam	11	12	9	12	11	12
8. Lima Puluh Kota	11	11	13	13	11	11
9. Pasaman	10	10	6	8	10	10
10. Solok Selatan	9	9	10	10	9	9
11. Dharmasraya	11	12	8	8	11	12
12. Pasaman Barat	10	10	10	11	10	10
Kota/Municipality						
1. Padang	15	15	11	10	14	14
2. Solok	15	13	11	13	15	13
3. Sawahlunto	9	11	7	8	9	10
4. Padang Panjang	13	14	7	6	12	11
5. Bukittinggi	16	17	10	10	15	15
6. Payakumbuh	16	17	15	16	16	17
7. Pariaman	12	12	8	9	12	12
Sumatera Barat	11	11	10	10	11	11

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid Baru ² /New Pupils ²		Murid yang Lulus ² /Graduated Pupils ²	
	Negeri dan Swasta Public and Private		Negeri dan Swasta Public and Private	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)
Kabupaten/Regency				
1. Kep. Mentawai	1.919	4.547	1.695	569
2. Pesisir Selatan	5.986	17.035	6.154	198
3. Solok	4.707	12.348	4.320	1.261
4. Sijunjung	3.214	8.439	3.003	579
5. Tanah Datar	3.506	9.297	3.566	617
6. Padang Pariaman	5.456	14.767	5.581	279
7. Agam	4.883	13.204	4.666	1.362
8. Lima Puluh Kota	4.383	10.984	4.196	1.976
9. Pasaman	3.138	9.144	3.340	293
10. Solok Selatan	1.922	4.889	1.799	447
11. Dharmasraya	2.956	8.216	2.743	605
12. Pasaman Barat	5.249	12.307	4.931	2.690
Kota/Municipality				
1. Padang	12.891	28.325	12.139	7.826
2. Solok	1.496	3.977	1.465	208
3. Sawahlunto	802	2.125	763	257
4. Padang Panjang	1.161	2.882	1.187	465
5. Bukittinggi	2.177	5.256	1.988	1.096
6. Payakumbuh	3.084	5.674	2.825	2.984
7. Pariaman	1.393	3.665	1.303	350
Sumatera Barat	70.323	177.081	67.664	24.062

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 226 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	2	2	3	3	5	5
2. Pesisir Selatan	13	13	21	20	34	33
3. Solok	7	7	30	28	37	35
4. Sijunjung	6	6	10	10	16	16
5. Tanah Datar	17	17	30	30	47	47
6. Padang Pariaman	10	10	19	17	29	27
7. Agam	13	13	48	49	61	62
8. Lima Puluh Kota	7	7	21	21	28	28
9. Pasaman	5	5	12	12	17	17
10. Solok Selatan	6	6	11	11	17	17
11. Dharmasraya	1	1	18	17	19	18
12. Pasaman Barat	7	7	52	51	59	58
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	7	7	13	13	20	20
2. Solok	1	1	1	1	2	2
3. Sawahlunto	2	2	1	1	3	3
4. Padang Panjang	1	1	5	5	6	6
5. Bukittinggi	2	2	4	4	6	6
6. Payakumbuh	2	2	4	4	6	6
7. Pariaman	3	3	4	4	7	7
Sumatera Barat	112	112	307	301	419	413

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ^{1,2} /Teachers ^{1,2}					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	41	44	30	33	71	77
2. Pesisir Selatan	820	838	450	469	1.270	1.307
3. Solok	255	261	455	458	710	719
4. Sijunjung	212	210	127	131	339	341
5. Tanah Datar	600	609	408	399	1.008	1.008
6. Padang Pariaman	403	391	249	234	652	625
7. Agam	581	557	811	842	1.392	1.399
8. Lima Puluh Kota	302	305	300	299	602	604
9. Pasaman	253	221	180	194	433	415
10. Solok Selatan	233	239	151	159	384	398
11. Dharmasraya	66	62	243	239	309	301
12. Pasaman Barat	307	305	720	743	1.027	1.048
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	486	523	259	271	745	794
2. Solok	66	65	29	26	95	91
3. Sawahlunto	61	68	11	13	72	81
4. Padang Panjang	87	84	119	132	206	216
5. Bukittinggi	152	158	61	55	213	213
6. Payakumbuh	163	161	59	54	222	215
7. Pariaman	153	158	63	65	216	223
Sumatera Barat	5.241	5.259	4.725	4.816	9.966	10.075

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	353	354	161	137	514	491
2. Pesisir Selatan	7.008	6.857	3.045	3.045	10.053	9.902
3. Solok	2.714	2.662	3.136	3.091	5.850	5.753
4. Sijunjung	2.243	2.200	872	858	3.115	3.058
5. Tanah Datar	5.690	5.571	3.290	2.998	8.980	8.569
6. Padang Pariaman	3.987	3.931	1.442	1.339	5.429	5.270
7. Agam	6.325	6.140	8.487	8.278	14.812	14.418
8. Lima Puluh Kota	3.807	3.809	2.515	2.360	6.322	6.169
9. Pasaman	3.971	3.958	1.720	1.731	5.691	5.689
10. Solok Selatan	2.721	2.619	1.023	1.009	3.744	3.628
11. Dharmasraya	698	757	2.242	2.110	2.940	2.867
12. Pasaman Barat	3.343	3.335	7.447	7.523	10.790	10.858
Kota/Municipality						
1. Padang	5.928	6.272	1.863	1.776	7.791	8.048
2. Solok	782	830	276	230	1.058	1.060
3. Sawahlunto	799	759	55	49	854	808
4. Padang Panjang	1.039	1.001	1.042	1.221	2.081	2.222
5. Bukittinggi	1.850	1.696	444	428	2.294	2.124
6. Payakumbuh	2.077	2.086	460	382	2.537	2.468
7. Pariaman	2.010	2.038	445	471	2.455	2.509
Sumatera Barat	57.345	56.875	39.965	39.036	97.310	95.911

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	9	8	5	4	7	6
2. Pesisir Selatan	9	8	7	6	8	8
3. Solok	11	10	7	7	8	8
4. Sijunjung	11	10	7	7	9	9
5. Tanah Datar	9	9	8	8	9	9
6. Padang Pariaman	10	10	6	6	8	8
7. Agam	11	11	10	10	11	10
8. Lima Puluh Kota	13	12	8	8	11	10
9. Pasaman	16	18	10	9	13	14
10. Solok Selatan	12	11	7	6	10	9
11. Dharmasraya	11	12	9	9	10	10
12. Pasaman Barat	11	11	10	10	11	10
Kota/Municipality						
1. Padang	12	12	7	7	10	10
2. Solok	12	13	10	9	11	12
3. Sawahlunto	13	11	5	4	12	10
4. Padang Panjang	12	12	9	9	10	10
5. Bukittinggi	12	11	7	8	11	10
6. Payakumbuh	13	13	8	7	11	11
7. Pariaman	13	13	7	7	11	11
Sumatera Barat	11	11	8	8	10	10

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 227 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid-Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah ¹ /Schools ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	11	11	2	2	13	13
2. Pesisir Selatan	25	25	–	–	25	25
3. Solok	19	19	3	3	22	22
4. Sijunjung	13	13	2	2	15	15
5. Tanah Datar	15	15	4	5	19	20
6. Padang Pariaman	20	20	4	4	24	24
7. Agam	21	21	7	7	28	28
8. Lima Puluh Kota	16	16	3	3	19	19
9. Pasaman	12	12	2	2	14	14
10. Solok Selatan	11	11	–	–	11	11
11. Dharmasraya	16	16	1	1	17	17
12. Pasaman Barat	13	13	11	11	24	24
Kota/Municipality						
1. Padang	17	17	42	41	59	58
2. Solok	4	4	3	3	7	7
3. Sawahlunto	3	3	1	1	4	4
4. Padang Panjang	4	4	2	3	6	7
5. Bukittinggi	5	5	6	6	11	11
6. Payakumbuh	5	5	6	6	11	11
7. Pariaman	6	6	2	2	8	8
Sumatera Barat	236	236	101	102	337	338

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	335	334	18	21	353	355
2. Pesisir Selatan	1.362	1.323	–	–	1.362	1.323
3. Solok	621	616	37	33	658	649
4. Sijunjung	373	378	11	8	384	386
5. Tanah Datar	576	582	56	58	632	640
6. Padang Pariaman	877	853	38	41	915	894
7. Agam	778	756	54	52	832	808
8. Lima Puluh Kota	544	557	14	16	558	573
9. Pasaman	565	554	16	17	581	571
10. Solok Selatan	400	396	–	–	400	396
11. Dharmasraya	449	449	8	6	457	455
12. Pasaman Barat	595	580	145	147	740	727
Kota/Municipality						
1. Padang	948	1.017	743	666	1.691	1.683
2. Solok	257	249	14	11	271	260
3. Sawahlunto	95	95	15	14	110	109
4. Padang Panjang	188	200	29	27	217	227
5. Bukittinggi	314	319	92	90	406	409
6. Payakumbuh	287	287	117	106	404	393
7. Pariaman	270	255	23	27	293	282
Sumatera Barat	9.834	9.800	1.430	1.340	11.264	11.140

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid ¹ /Pupils ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	3.899	3.982	237	196	4.136	4.178
2. Pesisir Selatan	16.514	16.508	–	–	16.514	16.508
3. Solok	7.633	7.826	317	268	7.950	8.094
4. Sijunjung	5.203	5.305	94	120	5.297	5.425
5. Tanah Datar	9.267	9.243	358	292	9.625	9.535
6. Padang Pariaman	11.769	11.743	245	285	12.014	12.028
7. Agam	10.559	10.674	302	336	10.861	11.010
8. Lima Puluh Kota	7.845	7.734	88	132	7.933	7.866
9. Pasaman	7.427	7.561	111	102	7.538	7.663
10. Solok Selatan	4.476	4.325	–	–	4.476	4.325
11. Dharmasraya	5.313	5.573	96	89	5.409	5.662
12. Pasaman Barat	8.369	8.263	1.486	1.596	9.855	9.859
Kota/Municipality						
1. Padang	17.293	17.668	7.434	7.865	24.727	25.533
2. Solok	3.896	3.883	159	131	4.055	4.014
3. Sawahlunto	1.361	1.361	138	134	1.499	1.495
4. Padang Panjang	2.961	3.049	128	133	3.089	3.182
5. Bukittinggi	5.179	5.126	1.014	968	6.193	6.094
6. Payakumbuh	4.855	5.028	1.707	1.811	6.562	6.839
7. Pariaman	4.055	4.127	140	98	4.195	4.225
Sumatera Barat	137.874	138.979	14.054	14.556	151.928	153.535

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelas ² /Classes ²					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	138	133	14	11	152	144
2. Pesisir Selatan	489	479	–	–	489	479
3. Solok	283	251	18	13	301	264
4. Sijunjung	171	170	2	6	173	176
5. Tanah Datar	300	284	34	17	334	301
6. Padang Pariaman	425	347	19	17	444	364
7. Agam	335	345	19	23	354	368
8. Lima Puluh Kota	257	241	3	9	260	250
9. Pasaman	214	234	9	6	223	240
10. Solok Selatan	174	148	–	–	174	148
11. Dharmasraya	201	191	5	4	206	195
12. Pasaman Barat	249	255	53	49	302	304
Kota/Municipality						
1. Padang	466	508	387	294	853	802
2. Solok	118	116	10	9	128	125
3. Sawahlunto	49	43	7	6	56	49
4. Padang Panjang	89	92	11	8	100	100
5. Bukittinggi	122	150	39	40	161	190
6. Payakumbuh	143	146	78	64	221	210
7. Pariaman	140	125	11	10	151	135
Sumatera Barat	4.363	4.258	719	586	5.082	4.844

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	12	12	13	9	12	12
2. Pesisir Selatan	12	12	—	—	12	12
3. Solok	12	13	9	8	12	12
4. Sijunjung	14	14	9	15	14	14
5. Tanah Datar	16	16	6	5	15	15
6. Padang Pariaman	13	14	6	7	13	13
7. Agam	14	14	6	6	13	14
8. Lima Puluh Kota	14	14	6	8	14	14
9. Pasaman	13	14	7	6	13	13
10. Solok Selatan	11	11	—	—	11	11
11. Dharmasraya	12	12	12	15	12	12
12. Pasaman Barat	14	14	10	11	13	14
Kota/Municipality						
1. Padang	18	17	10	12	15	15
2. Solok	15	16	11	12	15	15
3. Sawahlunto	14	14	9	10	14	14
4. Padang Panjang	16	15	4	5	14	14
5. Bukittinggi	16	16	11	11	15	15
6. Payakumbuh	17	18	15	17	16	17
7. Pariaman	15	16	6	4	14	15
Sumatera Barat	14	14	10	11	13	14

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid Baru ² /New Pupils ²		Murid yang Lulus ² /Graduated Pupils ²	
	Negeri dan Swasta Public and Private		Negeri dan Swasta Public and Private	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)
Kabupaten/Regency				
1. Kep. Mentawai	1.559	1.988	1.109	1.187
2. Pesisir Selatan	5.834	8.440	5.082	5.209
3. Solok	2.930	1.594	2.502	2.357
4. Sijunjung	2.009	2.651	1.357	1.591
5. Tanah Datar	3.417	4.471	2.940	3.140
6. Padang Pariaman	4.342	5.964	3.741	3.742
7. Agam	3.897	4.900	3.326	3.333
8. Lima Puluh Kota	2.825	3.709	2.349	2.582
9. Pasaman	2.639	3.312	2.229	2.370
10. Solok Selatan	1.618	2.400	1.470	1.417
11. Dharmasraya	2.050	2.128	1.572	1.603
12. Pasaman Barat	3.548	4.467	2.701	3.058
Kota/Municipality				
1. Padang	8.554	9.162	8.121	8.030
2. Solok	1.461	1.594	1.500	1.261
3. Sawahlunto	552	596	478	482
4. Padang Panjang	1.152	1.584	1.976	999
5. Bukittinggi	2.084	2.515	2.499	2.092
6. Payakumbuh	2.387	2.794	1.840	2.059
7. Pariaman	1.466	1.869	1.400	1.365
Sumatera Barat	54.324	66.138	48.192	47.877

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 228 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Kelas, Rasio Murid dan Guru, Murid Baru, dan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah ¹ /Schools ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	3	3	—	—	3	3
2. Pesisir Selatan	9	9	8	8	17	17
3. Solok	9	9	4	2	13	11
4. Sijunjung	8	8	3	3	11	11
5. Tanah Datar	5	5	5	5	10	10
6. Padang Pariaman	5	5	9	9	14	14
7. Agam	10	10	3	4	13	14
8. Lima Puluh Kota	6	7	2	2	8	9
9. Pasaman	6	6	2	2	8	8
10. Solok Selatan	5	5	1	1	6	6
11. Dharmasraya	8	8	1	1	9	9
12. Pasaman Barat	9	9	10	11	19	20
Kota/Municipality						
1. Padang	14	14	27	26	41	40
2. Solok	3	3	3	3	6	6
3. Sawahlunto	2	2	1	1	3	3
4. Padang Panjang	2	2	2	2	4	4
5. Bukittinggi	2	2	9	9	11	11
6. Payakumbuh	4	4	5	5	9	9
7. Pariaman	4	4	3	3	7	7
Sumatera Barat	114	115	98	97	212	212

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	82	82	—	—	82	82
2. Pesisir Selatan	555	535	126	120	681	655
3. Solok	302	291	43	32	345	323
4. Sijunjung	294	284	51	45	345	329
5. Tanah Datar	264	259	35	32	299	291
6. Padang Pariaman	226	218	117	97	343	315
7. Agam	514	486	31	44	545	530
8. Lima Puluh Kota	291	308	4	13	295	321
9. Pasaman	329	321	42	41	371	362
10. Solok Selatan	171	164	16	17	187	181
11. Dharmasraya	272	271	7	11	279	282
12. Pasaman Barat	373	374	166	176	539	550
Kota/Municipality						
1. Padang	1.106	1.064	453	413	1.559	1.477
2. Solok	260	243	28	25	288	268
3. Sawahlunto	108	100	6	7	114	107
4. Padang Panjang	116	115	45	34	161	149
5. Bukittinggi	258	234	220	219	478	453
6. Payakumbuh	377	366	85	80	462	446
7. Pariaman	306	302	41	40	347	342
Sumatera Barat	6.204	6.017	1.516	1.446	7.720	7.463

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid ¹ /Pupils ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	409	411	–	–	409	411
2. Pesisir Selatan	4.790	4.564	1.613	1.507	6.403	6.071
3. Solok	2.765	2.804	144	109	2.909	2.913
4. Sijunjung	3.829	3.854	310	267	4.139	4.121
5. Tanah Datar	3.530	3.456	148	154	3.678	3.610
6. Padang Pariaman	2.404	2.422	907	800	3.311	3.222
7. Agam	5.981	5.937	392	372	6.373	6.309
8. Lima Puluh Kota	4.311	4.124	41	60	4.352	4.184
9. Pasaman	3.726	3.859	678	768	4.404	4.627
10. Solok Selatan	1.635	1.528	198	210	1.833	1.738
11. Dharmasraya	3.317	3.261	65	64	3.382	3.325
12. Pasaman Barat	4.953	4.900	1.658	1.475	6.611	6.375
Kota/Municipality						
1. Padang	14.528	14.610	4.208	3.825	18.736	18.435
2. Solok	3.159	3.359	47	60	3.206	3.419
3. Sawahlunto	1.318	1.265	35	39	1.353	1.304
4. Padang Panjang	1.734	1.730	287	255	2.021	1.985
5. Bukittinggi	3.429	3.598	2.589	2.374	6.018	5.972
6. Payakumbuh	5.567	5.605	537	477	6.104	6.082
7. Pariaman	3.820	3.987	237	192	4.057	4.179
Sumatera Barat	75.205	75.274	14.094	13.008	89.299	88.282

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelas ² /Classes ²					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	29	95	–	–	29	95
2. Pesisir Selatan	191	692	45	113	236	805
3. Solok	120	382	19	22	139	404
4. Sijunjung	135	337	16	40	151	377
5. Tanah Datar	109	368	14	36	123	404
6. Padang Pariaman	109	282	79	75	188	357
7. Agam	202	763	23	60	225	823
8. Lima Puluh Kota	87	499	8	10	95	509
9. Pasaman	123	470	20	108	143	578
10. Solok Selatan	73	175	9	18	82	193
11. Dharmasraya	122	378	3	6	125	384
12. Pasaman Barat	165	654	74	169	239	823
Kota/Municipality						
1. Padang	343	1.453	245	548	588	2.001
2. Solok	111	674	15	19	126	693
3. Sawahlunto	24	103	3	8	27	111
4. Padang Panjang	26	180	26	44	52	224
5. Bukittinggi	74	465	92	284	166	749
6. Payakumbuh	123	578	62	97	185	675
7. Pariaman	112	427	23	33	135	460
Sumatera Barat	2.278	8.975	776	1.690	3.054	10.665

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	5	5	—	—	5	5
2. Pesisir Selatan	9	9	13	13	9	9
3. Solok	9	10	3	3	8	9
4. Sijunjung	13	14	6	6	12	13
5. Tanah Datar	13	13	4	5	12	12
6. Padang Pariaman	11	11	8	8	10	10
7. Agam	12	12	13	8	12	12
8. Lima Puluh Kota	15	13	10	5	15	13
9. Pasaman	11	12	16	19	12	13
10. Solok Selatan	10	9	12	12	10	10
11. Dharmasraya	12	12	9	6	12	12
12. Pasaman Barat	13	13	10	8	12	12
Kota/Municipality						
1. Padang	13	14	9	9	12	12
2. Solok	12	14	2	2	11	13
3. Sawahlunto	12	13	6	6	12	12
4. Padang Panjang	15	15	6	8	13	13
5. Bukittinggi	13	15	12	11	13	13
6. Payakumbuh	15	15	6	6	13	14
7. Pariaman	12	13	6	5	12	12
Sumatera Barat	12	13	9	9	12	12

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid Baru ² /New Pupils ²		Murid yang Lulus ² /Graduated Pupils ²	
	Negeri dan Swasta Public and Private		Negeri dan Swasta Public and Private	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)
Kabupaten/Regency				
1. Kep. Mentawai	112	281	110	138
2. Pesisir Selatan	2.207	2.941	2.041	2.002
3. Solok	1.063	1.229	898	841
4. Sijunjung	1.554	1.931	1.050	1.207
5. Tanah Datar	1.311	1.830	1.067	1.052
6. Padang Pariaman	1.439	1.714	1.273	988
7. Agam	2.393	3.611	1.852	1.900
8. Lima Puluh Kota	1.596	1.776	927	1.283
9. Pasaman	2.202	1.865	1.336	1.211
10. Solok Selatan	701	1.051	574	550
11. Dharmasraya	1.186	1.489	865	925
12. Pasaman Barat	2.202	2.935	1.742	1.975
Kota/Municipality				
1. Padang	6.574	8.474	5.955	5.137
2. Solok	1.326	1.298	827	913
3. Sawahlunto	554	564	468	356
4. Padang Panjang	722	813	682	587
5. Bukittinggi	2.110	2.489	1.532	1.698
6. Payakumbuh	2.199	2.629	1.787	1.777
7. Pariaman	1.439	2.157	1.410	1.210
Sumatera Barat	32.890	41.077	26.396	25.750

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 229 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022/2023 dan 2023/2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	—	—	3	3	3	3
2. Pesisir Selatan	4	4	13	13	17	17
3. Solok	3	3	13	13	16	16
4. Sijunjung	2	2	2	2	4	4
5. Tanah Datar	4	4	20	20	24	24
6. Padang Pariaman	4	4	8	7	12	11
7. Agam	5	5	27	27	32	32
8. Lima Puluh Kota	1	1	9	9	10	10
9. Pasaman	2	2	11	11	13	13
10. Solok Selatan	2	2	6	6	8	8
11. Dharmasraya	1	1	14	13	15	14
12. Pasaman Barat	6	6	26	26	32	32
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	3	3	8	7	11	10
2. Solok	1	1	—	—	1	1
3. Sawahlunto	1	1	1	1	2	2
4. Padang Panjang	3	3	6	6	9	9
5. Bukittinggi	2	2	4	4	6	6
6. Payakumbuh	3	3	2	2	5	5
7. Pariaman	1	1	3	3	4	4
Sumatera Barat	48	48	176	173	224	221

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023 ¹	2023/2024
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	—	—	32	32	32	32
2. Pesisir Selatan	277	276	191	207	468	483
3. Solok	152	158	154	164	306	322
4. Sijunjung	72	80	17	21	89	101
5. Tanah Datar	184	201	195	211	379	412
6. Padang Pariaman	194	214	121	111	315	325
7. Agam	198	196	389	387	587	583
8. Lima Puluh Kota	32	26	127	128	159	154
9. Pasaman	123	127	180	185	303	312
10. Solok Selatan	80	83	104	97	184	180
11. Dharmasraya	40	44	136	131	176	175
12. Pasaman Barat	220	255	304	331	524	586
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	274	309	175	173	449	482
2. Solok	55	58	—	—	55	58
3. Sawahlunto	29	28	8	9	37	37
4. Padang Panjang	201	223	126	141	327	364
5. Bukittinggi	162	176	56	48	218	224
6. Payakumbuh	157	171	18	18	175	189
7. Pariaman	59	61	28	27	87	88
Sumatera Barat	2.509	2.686	2.361	2.421	4.870	5.107

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	–	–	95	98	95	98
2. Pesisir Selatan	1.910	1.940	603	543	2.513	2.483
3. Solok	1.406	1.349	770	739	2.176	2.088
4. Sijunjung	644	645	88	73	732	718
5. Tanah Datar	1.719	1.710	1.057	1.070	2.776	2.780
6. Padang Pariaman	1.435	1.433	642	560	2.077	1.993
7. Agam	1.344	1.276	3.397	3.517	4.741	4.793
8. Lima Puluh Kota	252	257	548	512	800	769
9. Pasaman	1.020	1.023	965	897	1.985	1.920
10. Solok Selatan	721	743	514	495	1.235	1.238
11. Dharmasraya	305	327	564	486	869	813
12. Pasaman Barat	2.222	2.265	2.364	2.245	4.586	4.510
Kota/Municipality						
1. Padang	3.245	3.226	1.201	1.229	4.446	4.455
2. Solok	597	587	–	–	597	587
3. Sawahlunto	305	354	33	37	338	391
4. Padang Panjang	1.913	1.931	819	885	2.732	2.816
5. Bukittinggi	1.919	1.972	208	210	2.127	2.182
6. Payakumbuh	1.984	2.011	41	24	2.025	2.035
7. Pariaman	580	541	156	113	736	654
Sumatera Barat	23.521	23.590	14.065	13.733	37.586	37.323

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio					
	Negeri Public		Swasta Private		Jumlah Total	
	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024	2022/2023'	2023/2024
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	–	–	3	3	3	3
2. Pesisir Selatan	7	7	3	3	5	5
3. Solok	9	9	5	5	7	6
4. Sijunjung	9	8	5	3	8	7
5. Tanah Datar	9	9	5	5	7	7
6. Padang Pariaman	7	7	5	5	7	6
7. Agam	7	7	9	9	8	8
8. Lima Puluh Kota	8	10	4	4	5	5
9. Pasaman	8	8	5	5	7	6
10. Solok Selatan	9	9	5	5	7	7
11. Dharmasraya	8	7	4	4	5	5
12. Pasaman Barat	10	9	8	7	9	8
Kota/Municipality						
1. Padang	12	10	7	7	10	9
2. Solok	11	10	–	–	–	–
3. Sawahlunto	11	13	4	4	9	11
4. Padang Panjang	10	9	7	6	8	8
5. Bukittinggi	12	11	4	4	10	10
6. Payakumbuh	13	12	2	1	12	11
7. Pariaman	10	9	6	4	8	7
Sumatera Barat	9	9	6	6	8	7

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 230 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2019–2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SD Primary School			SMP Junior High School		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	43	43	43	26	27	27
2. Pesisir Selatan	180	181	181	93	94	95
3. Solok	74	74	74	57	56	56
4. Sijunjung	62	62	62	44	45	44
5. Tanah Datar	75	75	75	59	58	59
6. Padang Pariaman	103	103	103	63	63	63
7. Agam	91	105	105	66	73	72
8. Lima Puluh Kota	81	81	79	57	58	56
9. Pasaman	62	62	62	37	38	40
10. Solok Selatan	47	47	47	38	38	39
11. Dharmasraya	52	52	52	33	32	32
12. Pasaman Barat	91	91	91	68	66	68
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	101	101	101	65	65	65
2. Solok	13	13	13	9	7	8
3. Sawahlunto	34	34	34	14	13	15
4. Padang Panjang	14	14	14	10	10	10
5. Bukittinggi	22	23	23	13	13	13
6. Payakumbuh	44	44	44	23	20	18
7. Pariaman	54	54	53	18	18	18
Sumatera Barat	1.243	1.259	1.256	793	794	798

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SMA Senior High School			SMK Vocational School		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Kep. Mentawai	13	13	13	3	3	3
2. Pesisir Selatan	40	41	40	15	15	15
3. Solok	25	25	24	12	12	13
4. Sijunjung	14	13	13	10	10	10
5. Tanah Datar	31	31	32	6	6	6
6. Padang Pariaman	32	31	30	12	11	11
7. Agam	36	38	42	11	12	11
8. Lima Puluh Kota	23	24	22	7	7	7
9. Pasaman	23	23	24	7	7	9
10. Solok Selatan	17	17	17	6	6	6
11. Dharmasraya	18	18	18	8	8	8
12. Pasaman Barat	37	37	36	14	15	16
<i>Kota/Municipality</i>						
1. Padang	41	44	45	28	29	28
2. Solok	6	6	5	5	5	5
3. Sawahlunto	6	6	6	3	3	3
4. Padang Panjang	9	8	8	3	3	3
5. Bukittinggi	12	12	10	9	9	8
6. Payakumbuh	18	14	12	7	7	7
7. Pariaman	9	10	10	7	7	7
Sumatera Barat	410	411	407	173	175	176

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perguruan Tinggi University		
	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)
Kabupaten/Regency			
1. Kep. Mentawai	—	—	—
2. Pesisir Selatan	3	3	3
3. Solok	2	1	1
4. Sijunjung	1	1	1
5. Tanah Datar	4	3	3
6. Padang Pariaman	5	5	6
7. Agam	5	5	5
8. Lima Puluh Kota	1	1	1
9. Pasaman	2	2	2
10. Solok Selatan	1	2	2
11. Dharmasraya	3	3	3
12. Pasaman Barat	5	5	4
Kota/Municipality			
1. Padang	37	30	35
2. Solok	4	4	5
3. Sawahlunto	1	1	1
4. Padang Panjang	4	5	5
5. Bukittinggi	12	11	12
6. Payakumbuh	8	7	7
7. Pariaman	5	5	5
Sumatera Barat	103	94	101

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

6.8 SEKOLAH RAMAH ANAK

Permasalahan anak dalam dunia pendidikan dirasa masih tinggi, misalnya Masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan yang terjadi di antara murid dalam bentuk tawuran dan bullying. dan masih Selain itu, adanya permasalahan lainnya adalah jajanan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak mengalami keracunan jajanan di sekolah. Selain itu Tekanan akibat beratnya beban pelajaran yang harus ditanggung oleh peserta didik, serta sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan pendisiplinan dengan cara kekerasan juga sangat membebani anak. Lingkungan yang aman, sarana prasarana yang tidak membahayakan bagi anak sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak sekolah yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang tidak layak.

Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat krusial maka dianggap perlu suatu program khusus untuk melindungi anak selama minimal 8 jam di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk perlindungan anak selama disekolah, serta menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990 dan tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 ayat 1 dan ayat 2.

Pemerataan akses,fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai untuk mengadakan SRA perlu diratakan tidak hanya fokus di kota-kota besar namun juga menyentuh daerah pelosok. Kesiapan daerah untuk mengimplementasikan SRA berbeda-beda. Pelaksanaan kebijakan di daerah dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat indikator penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, kerjasama OPD dari berbagai sektor dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi program. Akibat adanya perbedaan sumber daya antar daerah menyebabkan beberapa daerah mengalami kesulitan dalam implementasi program sehingga Pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mendorong daerah dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi perangkat daerah guna menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program.

			SMA NEGERI 1 PALUPUH SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG SMA NEGERI 2 IV KOTO SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG SMA NEGERI AGAM CENDEKIA SMA PK NURUL IHSAN PANAMPUANG SMA SWASTA BANUHAMPU SMA TAHFIZHUL QUR AN SYECH AHMAD CHATIB SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI SMK NEGERI 1 MATUR SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG SMK PLUS BERBASIS PESANTREN BINA NUSANTARA MANDIRI TANJUNG MUTIARA SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG SMKS AL IZHAR BOARDING SCHOOL
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 AGAM MAN 2 AGAM MAN 3 AGAM MAN 4 AGAM MAN 5 AGAM
1310	Kab. Dharmasraya	SLB	SLB Athallah Sungai Rumbai SLB KOTO AGUNG SLBN 1 PULAU PUNJUNG
		SMA/SMK	SMAN 1 ASAM JUJUHAN SMAN 1 IX Koto SMAN 1 TIUMANG SMAS TARUNA SUMATERA BARAT SMKN 1 PADANG LAWEH SMKN 1 SITIUNG SMKN 1 SUNGAI RUMBAI SMKS START UP DARA JINGGA
		MADRASAH ALIYAH	MAN DHARMASRAYA
1309	Kab. Kepulauan Mentawai	SLB	SLB BINA LAGGAI MENTAWAI SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI
		SMA/SMK	SMA LENTERA MENTAWAI SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN SMAN 1 SIBERUT TENGAH SMAN 1 SIBERUT UTARA SMK NEGERI 1 KEPULAUN MENTAWAI
1307	Kab. Lima Puluh	SLB	SLB AIR RANDAH

	Kota		SLB AL HIDAYAH SLB AL MUNAWAROH SLB AL-AZRA IYAH SLB BUDI KARYA DANGUNG-DANGUNG SLB CITRA BANGSA SLB DARMA BAKTI INSANI SLB MUTIARA ANNAFII SLB Pelita Kapur SLB SEHATI SLB SYEH MUHAMMAD SA AD SLB ULURAN KASIH SLB YP PEDULI ANAK NAGARI SLBN 1 HARAU
		SMA/SMK	SMA AL FURQON ISLAMIC BOARDING SCHOOL SMA Cahaya Islam SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX SMA Quran Al Zamriyah Islamic Boarding School SMAN 1 BUKIK BARISAN SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU SMAN 1 Kec. Mungka SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI SMAN 1 SULIKI SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU SMK IT CAHAYA PERADABAN SMK KESEHATAN EXCELLENT SMK Kesehatan Negeri Akabiluru SMKN 1 KECAMATAN LUAK SMKN 1 PANGKALAN SMKN 1 SULIKI SMKN 2 KEC GUGUAK SMKN PP PADANG MENGATAS SMKS USWATUN HASANAH
		MADRASAH ALIYAH	MAN LIMA PULUH KOTA
1305	Kab. Padang Pariaman	SLB	SLB AMAL BHAKTI SICINCIN SLB ARAFAH SLB ARRAHMAN SLB BERKAH BERSAMA SLB DWINATA SLB MUTIARA BUDI SLB MUTIARA ILMU TERPILIH SLB MUTIARA QALBU SLB NUR RACHMAN SLB Nurul Hasanah Pakandangan SLB PERMATA BUNDA SLB YPAC NAN SABARIS
		SMA/SMK	SMA N 1 PATAMUAN SMA PRAJA NUSANTARA SUMBAR SMAN 1 BATANG GASAN SMAN 1 2X11 KAYU TANAM SMAN 1 ENAM LINGKUNG

			SMAN 1 IV KOTO AUR MALINTANG
			SMAN 1 NAN SABARIS
			SMAN 1 PADANG SAGO
			SMAN 1 SUNGAI GERINGGING
			SMAN 1 V KOTO TIMUR
			SMAN 2 Batang Anai
			SMAN 2 Lubuk Alung
			SMAN 2 SUNGAI LIMAU
			SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK
			SMAS INS KAYU TANAM
			SMAS YAPPHI BATANG ANAI
			SMAS YDB LUBUK ALUNG
			SMK MARITIM NUSANTARA
			SMKS DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG
			SMKS INDONESIA RAYA
			SMKS KESEHATAN MANDIRI LUBUK ALUNG
			SMKS NASIONAL KAYUTANAM
			SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING
			SMKS SOSIAL / PARIWISATA LUBUK ALUNG
			SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR
			SMKS YPP LUBUK ALUNG
			SUPM NEGERI PARIAMAN
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 PADANG PARIAMAN
			MAN 2 PADANG PARIAMAN
			MAN 3 PADANG PARIAMAN
			MAN INSAN CENDEKIA
1308	Kab. Pasaman	SLB	SLB HUSNI MURNI
			SLB INDAH PERMATA BUNDA
			SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING
			SLBN 1 LUBUK SIKAPING
			SLBN 1 PANTI
		SMA/SMK	SMAN 1 DUA KOTO
			SMAN 1 RAO
			SMAN 1 RAO UTARA
			SMAN 1 TIGO NAGARI
			SMAN 2 LUBUK SIKAPING
			SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN
			SMAS PGRI RAO SELATAN
			SMAS YAPPAS PASAMAN
			SMK HARAPAN BANGSA PANTI
			SMKN 1 BONJOL
			SMKN 1 DUA KOTO
			SMKN 1 PADANG GALUGUR
			SMKN 1 RAO SELATAN
			SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI
			SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING
		MADRASAH ALIYAH	MAN 2 PASAMAN
1312	Kab. Pasaman Barat	SLB	SLB AUTISMA MITRA AFIZA NUSANTARA
			SLB BAITUL FATTAHU KINALI
			SLB Bismillah
			SLB HUSNI MURNI JAMBAK

			SLB MIFTAHUL KHOIR
			SLB UMMI CHAIRA
			SLBN 1 SUNGAI AUR
		SMA/SMK	SMA CENDEKIA PASBAR
			SMA N 1 GUNUNG TULEH
			SMA N 1 RANAH BATAHAN
			SMA S ASSYFA KAPA
			SMA S CITRA INSANI
			SMA S ISLAM CENDEKIA
			SMA S IT DARUL HIKMAH
			SMA S MUHAMMADIYAH AIR BANGIS
			SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING
			SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI
			SMA S TARUNA AL-MUNIR
			SMA S TUNAS BANGSA MALIGI
			SMAN 2 RANAH BATAHAN
			SMAS EZHAQI
			SMK AL FATIH
			SMK IT Al Hidayah
			SMK S ARABI DARUL YAMANI SASAK
			SMK S CERSA PASAMAN
			SMK S DARUL FALAH
			SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI
			SMK S IT AGUS SUSANTO
			SMK S NURUL FALAH
			SMK S PERWIRA NEGARA 1 PASAMAN BARAT
			SMK S SUBULUS SALAM
			SMK S TI ZAMIGA
			SMKN 1 KOTO BALINGKA
			SMKN 1 PASAMAN
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 PASAMAN BARAT
			MAN 2 PASAMAN BARAT
			MAN 3 PASAMAN BARAT
			MAN 4 PASAMAN BARAT
			MAN 5 PASAMAN BARAT
			MAN 6 PASAMAN BARAT
1301	Kab. Pesisir Selatan	SLB	SLB AL AZIZ MUNAWARAH
			SLB AL-MIRZA
			SLB BALQIS NUR ADIBA
			SLB BINAR TARUSAN
			SLB CAHAYA BUNDA
			SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT
			SLB Hazirah Ranah Pesisir
			SLB KASIH IBU BAYANG
			SLB YAPEM TARUSAN
			SLB YMIK BAYANG
			SLB YPPC PAINAN
			SLBN 1 LENGAYANG
			SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI
			SLBN 1 PAINAN
			SLBN 1 RANAH PESISIR
		SMA/SMK	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI
			SMAN 1 LUNANG
			SMAN 1 PANCUNG SOAL

			SMAN 2 BASA AMPEK BALAI
			SMAN 2 Linggo Sari Baganti
			SMAN 2 RANAH PESISIR
			SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR
			SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI
			SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG
			SMKS MAKMUR LENGGAYANG
			SMKS PGRI PAINAN
			SMKS PLUS BUDI DARMA LUMPO
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 PESISIR SELATAN
			MAN 2 PESISIR SELATAN
			MAN 3 PESISIR SELATAN
			MAN 4 PESISIR SELATAN
1303	Kab. Sijunjung	SLB	SLB AISYIYAH SIJUNJUNG
			SLB ALISHA
			SLB TUNAS MULIA
			SLBN 1 KAMANG BARU
			SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG
		SMA/SMK	SMA ISLAM AS-SALAM
			SMAS ORYZA
			SMK Excelent YSI
			SMKN 5 SIJUNJUNG
			SMKS ELEKTRO SIJUNJUNG
			SMKS KARYA MULIA MUARO
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 SIJUNJUNG
			MAN 2 SIJUNJUNG
1302	Kab. Solok	SLB	SLB AMAL BHAKTI WARGA
			SLB ANGGUN MANDIRI
			SLB BERKAH ANISA
			SLB BERKAH ARSY
			SLB BUNDA ZIKRILLAH
			SLB DANAU KEMBAR
			SLB FISABILILLAH
			SLB Nazra Hiliran Gumanti
			SLBN 1 ALAHAN PANJANG
			SLBN 1 KUBUNG
			SLBS BUNDA
		SMA/SMK	SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL
			SMAN 1 DANAU KEMBAR
			SMAN 1 HILIRAN GUMANTI
			SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI
			SMAN 1 JUNJUNG SIRIH
			SMAN 1 LEMBANG JAYA
			SMAN 1 PAYUNG SEKAKI
			SMAN 1 TIGO LURAH
			SMAN 1 X KOTO DIATAS
			SMAN 1 X KT SINGKARAK
			SMAN 2 HILIRAN GUMANTI
			SMAN 2 LEMBANG JAYA
			SMAN 2 X KT SINGKARAK
			SMAS M NATSIR
			SMAS PLUS NAGARI TALANG
			SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM
			SMKN 1 BUKIT SUNDI

			SMKN 1 GUNUNG TALANG SMKN 1 HILIRAN GUMANTI SMKN 1 PANTAI CERMIN SMKN 1 SINGKARAK SMKN 1 X KOTO DIATAS SMKN 2 GUNUNG TALANG SMKN 2 LEMBAH GUMANTI SMKS BUDI MULIA SMKS PARIWISATA LEMBAH GUMANTI SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 SOLOK MAN 2 SOLOK MAN 3 SOLOK
1311	Kab. Solok Selatan	SLB	SLB FAN REDHA SLBN 1 SANGIR SLBN 1 SUNGAI PAGU SMAN 08 SOLOK SELATAN
		SMA/SMK	SMAN 4 SOLOK SELATAN
		MADRASAH ALIYAH	MAN 2 SOLOK SELATAN
1304	Kab. Tanah Datar	SLB	SLB AISYIYAH CABANG SIMABUR SLB AUTISCARE SLB AZ ZAHRA SLB KASIEH MANDE SLB KEMALA BHAYANGKARI SLB MUTIARA KASIH SLB PKLK RAMBATAN SLB WARAQIL JANNAH SLBN 1 LIMA KAUM SLBN 1 PAGARUYUNG
		SMA/SMK	SMA IT QURRATA A'YUN SMAS AL HIRA SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR SMAS NURUL IKHLAS SMK Mediatama Batusangkar SMK NURUL IKHLAS SMKN 1 BATIPUH SMKN 1 TANJUNG BARU SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR SMKS PAGARUYUNG BATUSANGKAR SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 TANAH DATAR MAN 4 TANAH DATAR
1375	Kota Bukittinggi	SLB	SLB AL AZHAR SLB Al Ikhlas SLB AUTISMA PERMATA BUNDA SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI SLB KARAKTER MANDIRI SLB RESTU IBU SLBN 1 BUKITTINGGI
		SMA/SMK	SMA ISLAM AL ISHLAH SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI SMAS PEMBANGUNAN

			SMAS PSM
			SMAS TARUNA BANGSA
			SMK FORT DE KOCK
			SMK KESEHATAN PRIMA NUSANTARA
			SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI
			SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI
			SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI
			SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI
			SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI
			SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH
			SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI
		MADRASAH ALIYAH	MAN 2 BUKIT TINGGI
1371	Kota Padang	SLB	SLB AL - ISHLAAH PADANG
			SLB AL HIDAYAH
			SLB AL MUJADILLAH
			SLB AMANAH KOTO TANGAH
			SLB ASLAM KIDS
			SLB AUTIS BIMA PADANG
			SLB AUTIS BUAH HATI IBU
			SLB AUTIS HARAPAN BUNDA
			SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA
			SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA
			SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA
			SLB AUTISMA YPPA
			SLB BAKTI
			SLB BINA BANGSA TN.SIRAH
			SLB BUNDO KANDUANG
			SLB ETNIK KREATIF
			SLB FAN REDHA
			SLB GEMA INSANI
			SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH
			SLB KARYA PADANG
			SLB KASIH UMMI
			SLB KHANSA
			SLB LIMAS PADANG
			SLB MGF LUBUK BUAYA PADANG
			SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO
			SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG
			SLB PERWARI
			SLB SALSABILLA INDAH
			SLB SAMUDERA BIRU
			SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG
			SLB WACANA ASIH
			SLB WORK SHOP
			SLB YPAC SUMATERA BARAT
			SLB YPPLB
			SLBN 1 PADANG

		SLBN 2 PADANG
		SLBS LUMIN ALISA
		SLBS PK-PLK TIJI
		SLB HIKMAH REFORMASI
		SMA DAR EL IMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL
		SMA DEK
		SMA IT SEKOLAH ALAM AR ROYYAN
		SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)
		SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP
		SMA PUTI BUNGSU
		SMA SURYA BAKTI
		SMA TAMANSISWA PADANG
		SMA YARI SCHOOL
		SMA YULIN PRATAMA
		SMAS ABDULLAH AHMAD
		SMAS ADABIAH 2 PADANG
		SMAS ADABIAH PADANG
		SMAS BAITURRAHMAH
		SMAS BUKIT BARISAN
		SMAS BUNDA PADANG
		SMAS DIAN ANDALAS
		SMAS DM TRIGUNA
		SMAS DON BOSCO
		SMAS EKA SAKTI
		SMAS HUDAYA
		SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT
	SMA/SMK	SMAS KALAM KUDUS
		SMAS KARTIKA I-5
		SMAS KATHOLIK XAVERIUS
		SMAS MEDIA UTAMA
		SMAS MUHAMMADIYAH 1
		SMAS MUHAMMADIYAH 2
		SMAS MUHAMMADIYAH 3
		SMAS MURNI
		SMAS PERTI PPMTI PADANG
		SMAS PERTIWI 1
		SMAS PERTIWI 2
		SMAS PGRI 1
		SMAS PGRI 2
		SMAS PGRI 3
		SMAS PGRI 4
		SMAS PGRI 6
		SMAS PMT PROF DR HAMKA
		SMAS SABBHISMA
		SMAS SEMEN PADANG
		SMK AN NUR
		SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH
		SMK KESEHATAN
		SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMATERA BARAT
		SMK PP NEGERI PADANG
		SMK SMAK PADANG

			SMK SMTI PADANG
			SMKS CITRA UTAMA PADANG
			SMKS DEK BUSINESS SCHOOL
			SMKS DHUAFA PADANG
			SMKS KARTIKA I 1 PADANG
			SMKS KARTIKA I 2 PADANG
			SMKS LABOR PADANG
			SMKS MEDIA UTAMA PADANG
			SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG
			SMKS NASIONAL PADANG
			SMKS NUSATAMA PADANG
			SMKS PELAYARAN PADANG
			SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL
			SMKS PRATAMA PADANG
			SMKS PROFESIONAL PADANG
			SMKS SEMEN PADANG
			SMKS TAMAN SISWA PADANG
			SMKS TARUNA 1 PADANG
			SMKS TARUNA 2 PADANG
			SMKS TD KOSGORO 1 PADANG
			SMKS TD KOSGORO 2 PADANG
			SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG
			SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG
			SMKS TAMAN SISWA PADANG
			SMAS SIMA
			SMAS YAPI
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 KOTA PADANG
			MAN 3 KOTA PADANG
1374	Kota Padang Panjang	SLB	SLB ASIH PUTRA
			SLB AUTIS BIMA
			SLB CAHYA KEMALA
			SLB INSAN MANDIRI
			SLB MUTIARA BUNDA
		SMA	SMA GENETIKA AL QURAN
			SMAS USWATUN HASANAH
			SMKS CENDANA PADANGPANJANG
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 PADANG PANJANG
			MAN 2 PADANG PANJANG
			MAN 3 PADANG PANJANG
1377	Kota Pariaman	SLB	SLB AUTIS BIMA PARIAMAN
			SLB SABILUNA
		SMA	SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA
			SMAN 5 PARIAMAN
			SMAN 6 PARIAMAN
			SMAS MANUNGGAL BHAKTI
			SMKS Global Pariaman
			SMKS KARYA PARIAMAN
			SMKS KESEHATAN NUSANTARA
			SMKS PLUS BNM PARIAMAN
1376	Kota Payakumbuh	SLB	SLB A PAYAKUMBUH
			SLB AUTIS JALINAN HATI
			SLB AUTISMA PERMATA BUNDA
			SLB B Payakumbuh
			SLB C PAYAKUMBUH

			SLB Insan Mulia SLB Jendela Hati Insani Payakumbuh SLB LUAK NAN BUNGSU SLB PEDULI ANAK BANGSA SLBN 1 PAYAKUMBUH SLB Serasi
		SMA/SMK	SMA IT AL-FATH SMA IT INSAN CENDEKIA SMA TALENT MADANI ISLAMIC SCHOOL PAYAKUMBUH SMAN 5 PAYAKUMBUH SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH SMAS MUCHTAR ISLAMIC SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH SMAS PGRI PAYAKUMBUH SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH SMKS MITRA PAYAKUMBUH SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH
		MADRASAH ALIYAH	MAN 1 KOTA PAYAKUMBUH MAN 3 KOTA PAYAKUMBUH
1373	Kota Sawahlunto	SLB	SLB AL KAUSAR SLB RUMAH TIA SLB TUNAS HARAPAN SLB YKB TALAWI SLBN 1 SAWAHLUNTO SLBN 2 SAWAHLUNTO
		SMA/SMK	SMAS SDI SILUNGKANG SMKS MUHAMMADIYAH SAWAHLUNTO
		MADRASAH ALIYAH	MAN KOTA SAWAH LUNTO
1372	Kota Solok	SLB	SLB AUTIS BIMA SLB AUTISMA YPPA SOLOK SLBN 1 SOLOK SLBS LENTERA BUNDA
		SMA/SMK	SMA ISLAM AL MUMTAZ SMA Plus Golden Madani SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY SMKS KOSGORO 1 SOLOK SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK
		MADRASAH ALIYAH	MAN KOTA SOLOK

Sumber: DP3AP2KB Sumbar, 2023

6.9 PUSAT KREATIFITAS ANAK (PKA)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi Hak Anak pasal 31 ayat 1, menegaskan bahwa "Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan

bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni". Merujuk pada pasal tersebut negara harus memberikan akses kesempatan kepada anak di dalam kehidupan budaya, seni dan berkeaktivitas. Anak dilibatkan untuk berkomunikasi, bertindak serta berkontribusi secara aktif mengembangkan ekspresi, intelektual, spiritual, perilaku dan seni kehidupan berbudaya.

Dalam KHA juga tertuang amanat bahwa negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, baik secara individu maupun kelompok tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 11 bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."

Perwujudan hak bermain anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 14 yaitu "Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Anak memiliki hak berupa hak asasi manusia dan harus dipenuhi, dihargai serta dilindungi. Sesuai dengan prinsip utama upaya pemenuhan hak anak yang didasarkan pada 4 (empat) prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Bermain atau berekreasi sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan anak karena dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi dan kepercayaan diri anak. Perkembangan kognitif, motorik dan sosio-emosional anak berhubungan pula dengan bermain atau berekreasi.

Dalam kehidupan budaya memberi kontribusi pada rangsangan dan keberlanjutan kehidupan budaya dan seni tradisional di lingkungan tempat anak berada menjadi salah satu bentuk keterlibatan anak. Ruang ini akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mereproduksi, mengubah,

membuat dan menggambarkan budaya melalui imajinasi, lagu, tari, animasi, cerita, lukisan, permainan dan teater.

Dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk memperoleh hak anak menggunakan waktu istirahatnya dengan kegiatan bersenang-senang. Perlu pula memastikan setiap anak cukup istirahat sesuai dengan usia dan perkembangannya serta memiliki waktu luang dan bebas dari tuntutan lain. Anak berada dalam lingkungan yang aman saat berkreativitas tanpa didampingi orang tua.

Tantangan terbesar dalam pengembangan kreativitas anak terletak pada kemampuan para pihak terkait atau stakeholders dalam mengupayakan tempat/sarana dan metodologi atau cara menghasilkan karya kreatif, inovatif dengan menyenangkan dan tidak dipungut biaya / gratis. Penyediaan sarana dan prasarana juga perlu dilengkapi sehingga dapat dijadikan tempat kegiatan anak yang menyenangkan, dan tidak membahayakan, nyaman, mengeksplorasi kreativitas, mendorong inovasi serta memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal.

Tempat/sarana tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan anak saat ini dengan meningkatnya peran media elektronik yang tidak terkendali. Kecanduan game online menjadi salah satu masalah penting, selain dapat menjauhkan anak bersosialisasi juga mengurangi waktu anak untuk bermain aktif, berekreasi dan terlibat dalam kegiatan budaya dan seni.

Permasalahan lain yang seringkali dihadapi anak dan mengganggu pemenuhan haknya adalah maraknya tawuran antar sekolah/geng, konflik sosial, narkoba, geng kekerasan, penculikan, pornografi sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Polemik penyelesaian masalah tersebut salah satunya adalah kurangnya pengakuan dan pemahaman dari keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya kegiatan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.

Perlu disediakan suatu ruang berkreativitas yang aman dalam pemenuhan waktu luang untuk memfasilitasi semua anak sesuai dengan bakat, minat dan usianya. Ruang yang dimaksud adalah Pusat Kreativitas Anak, merupakan wahana yang bersih, sehat, inklusif, aman, dan nyaman yang dapat digunakan anak untuk bermain, berkreasi, rekreasi termasuk kegiatan pengembangan budaya yang dapat diakses oleh seluruh anak.

Pusat Kreativitas Anak dapat dibentuk dan dikembangkan melalui sanggar, taman bermain ramah anak, ruang bermain ramah anak, perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat anak, gelanggang remaja, tempat ibadah atau bentuk lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi anak termasuk anak disabilitas. Data PKA sampai dengan tahun 2021 menunjukkan 430 PKA yang terbentuk di 80 Kab/Kota 29 Provinsi.

Pembentukan dan Pengembangan PKA sudah dimulai sejak 2016 namun sampai saat ini dalam implementasinya di daerah, masih terjadi kesulitan. Salah satu kesulitan dalam upaya implementasi PKA di daerah karena kurangnya pemahaman Pemda untuk menyediakan tempat yang nyaman dan aman supaya anak dapat melakukan kegiatan secara positif, inovatif dan kreatif.

Penyelenggaraan Pusat Kreativitas Anak bertujuan agar anak dapat:

- a. Meningkatkan kualitas pemanfaatan waktu luang, diluar waktu sekolah dan waktu tidurnya untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, kreatif, produktif dan inovatif dengan cara atau metode yang menarik / atraktif
- b. Meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam berbagai aspek/bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan rasa cinta terhadap nilai budaya dan kebangsaan Indonesia dan dalam waktu yang bersamaan tidak canggung bahkan unggul dalam skala internasional. Daya kreativitas digali, dibina dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan antara lain seni, teknologi, social, rekayasa dan bidang lainnya dengan cara dan metoda yang menarik dan interaktif
- c. Membentuk karakter yang jujur, percaya diri karena pintar, sopan, santun, disiplin, tertib, hormat kepada orang tua, guru dan senior, sangan dan melindungi kepada keluarga, teman dan Yunior, berani karena benar, pekerja keras, tidak suka mengeluh serta bertanggung jawab
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nilai-nilai luhur budaya lokal yang antara lain dapat berupa produk seni tradisional (tari, lagu, musik, kerajinan, patung, Lukis dan lain sebagainya),

- olahraga tradisional, ilmu rekayasa tradisional (arsitektur, jembatan, pertanian dan lain sebagainya) ataupun yang lainnya
- e. Meningkatkan Kerjasama pusat dengan daerah dan pemerintah dengan masyarakat/komunitas
 - f. Menggali inspirasi yang berkaitan dengan sejarah ekologi, social dan budaya lokal
 - g. Mengembangkan kerangka berpikir kritis, peduli dan kreatif yang memanfaatkan materi dari lingkungan tempat tinggalnya
 - h. Membangun kolaborasi kreatif, peduli dan berbudaya lingkungan, serta membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat
 - i. Mengembangkan kemampuan sosial dan melakukan eksplorasi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Pemenuhan Hak Anak pada kluster 4 yang berbunyi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya seringkali masih diartikan pemenuhan hak pendidikan saja, namun pemenuhan untuk pemanfaatan waktu luang anak menjadi terabaikan. Pasal 31 Konvensi hak Anak (KHA) menegaskan bahwa “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat, bersantai, untuk kegiatan permainan kreativitas dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”. Hak anak untuk memanfaatkan waktu luang dan kegiatan budaya memberikan dampak yang signifikan antara lain berpengaruh pada kualitas, tahapan perkembangan, dan resiliensi (daya tahan) anak, pembentukan karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, perkembangan fisik, keterampilan, dan memperkaya kehidupan budaya.

Dengan adanya hal-hal yang membahayakan bagi anak mulai dari penggunaan gadget oleh anak, serta belum adanya wahana bagi anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang mereka kearah yang positif, inovatif dan kreatif secara aman dan nyaman, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang akan menjadi tempat berkumpul anak-anak setelah jam sekolah untuk memanfaatkan waktu luang dengan mengembangkan kreativitas seni dan budaya. Pusat Kreativitas Anak adalah tempat atau wadah yang disediakan

agar anak dapat melakukan kegiatan mengembangkan kreativitasnya melalui pendekatan bersenang-senang, bersantai, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Prinsip dari pengembangan Pusat Kreativitas Anak ini adalah bukan membangun wahana baru namun memanfaatkan wahana yang sudah ada dengan melakukan perbaikan dan melengkapi apa saja yang menjadi persyaratan dalam pembentukan dan pengembangan Pusat Kreativitas Anak. Saat ini, banyak PKA yang dikembangkan dari rumah ibadah khususnya Masjid melalui kebijakan Masjid Ramah Anak (MRA) dan Gereja Ramah Anak. Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa PKA merupakan suatu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap Tumbuh Kembang Anak.

BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan khusus wajib diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara lainnya apabila terdapat anak yang berada pada kondisi tertentu, antara lain:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran Anak dengan
14. perilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

7.1 ANAK KORBAN KEKERASAN

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan selalu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data Simfoni PPA, di Provinsi Sumatera Barat sampai Bulan Juli 2023, tercatat dari 149 korban dari 194 kasus dengan angka rate sebesar 5,516 yang menjadi korban kekerasan, dimana 139 korban merupakan anak-anak dengan angka rate sebesar 0,763.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perlakuan baik disengaja maupun tidak yang dapat menyakiti/mengganggu kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh ayah namun juga dilakukan oleh ibu.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik berupa kebiasaan ibu untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman berupa cubitan, pukulan, tamparan, mengurung anak di kamar mandi. Kekerasan psikologis berupa pengucapan kata-kata kasar terhadap anak, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, dan pengabaian anak. Kekerasan secara ekonomi seperti tidak memberikan uang jajan pada anak dan secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak. Selain kekerasan

dalam KDRT, kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021. SNPHAR ini merupakan survei rumah tangga nasional yang bertujuan untuk menggambarkan situasi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan rentang usia 15-17 tahun baik di perkotaan maupun di perdesaan di Indonesia dalam 12 bulan terakhir dan sepanjang hidupnya.

Dari data SNPHAR 2024, pengalaman kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun dalam 12 bulan terakhir menunjukkan bahwa 3 dari 10 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Sedangkan 2 dari 10 laki-laki pada usia tersebut pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun.

Pengalaman kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun memperlihatkan bahwa 4 dari 10 perempuan dan 3 dari 10 laki-laki pada usia tersebut pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Pada masa pandemi Covid 19 juga ditunjukkan bahwa 2 dari 10 laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih, 3 dari 10 perempuan juga pernah mengalami kekerasan satu jenis atau lebih kekerasan pada masa pandemi Covid 19.

Bila dibandingkan pada data SNPHAR 2018 terjadi penurunan kekerasan dimana pada tahun tersebut 4 dari 10 anak laki-laki dan perempuan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun dalam 12 bulan terakhir. 6 dari 10 laki-laki dan perempuan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun.

7.1.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain.

Hasil penelitian SNPHAR, 2021 menunjukkan bahwa prevalensi fisik pada anak umur 13-17 tahun untuk laki-laki sebesar 12 persen. Artinya 12 dari 100 orang anak laki-laki di perkotaan pernah mengalami satu jenis atau

lebih kekerasan fisik di sepanjang hidupnya, sedangkan di perdesaan 15 dari 100 orang anak laki-laki pada usia tersebut mengalami hal yang sama. Selama hidupnya pernah mengalami tindak kekerasan fisik. Untuk anak perempuan 10 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan maupun di perdesaan pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan fisik di sepanjang hidupnya.

Adapun pengalaman kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir pada anak usia 13-17 tahun pada daerah perkotaan sebesar 6,31% (laki-laki) dan 4,49% (perempuan). Sedangkan di perdesaan, sebesar 6,26% (laki-laki) dan 5,51% (perempuan). Ini artinya terdapat 6 dari 100 anak laki-laki di perkotaan telah memiliki kekerasan fisik dalam setahun terakhir, sedangkan pada anak perempuan 4 dari 100 anak mengalami hal yang sama.

Hal yang sama juga terjadi pada wilayah perdesaan dimana 6 dari 100 anak juga mengalami kekerasan fisik, pada anak perempuan di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan di perkotaan. Banyak perempuan di desa mengalami kekerasan karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi perempuan serta tingkat pengetahuan perempuan terhadap tindak kekerasan.

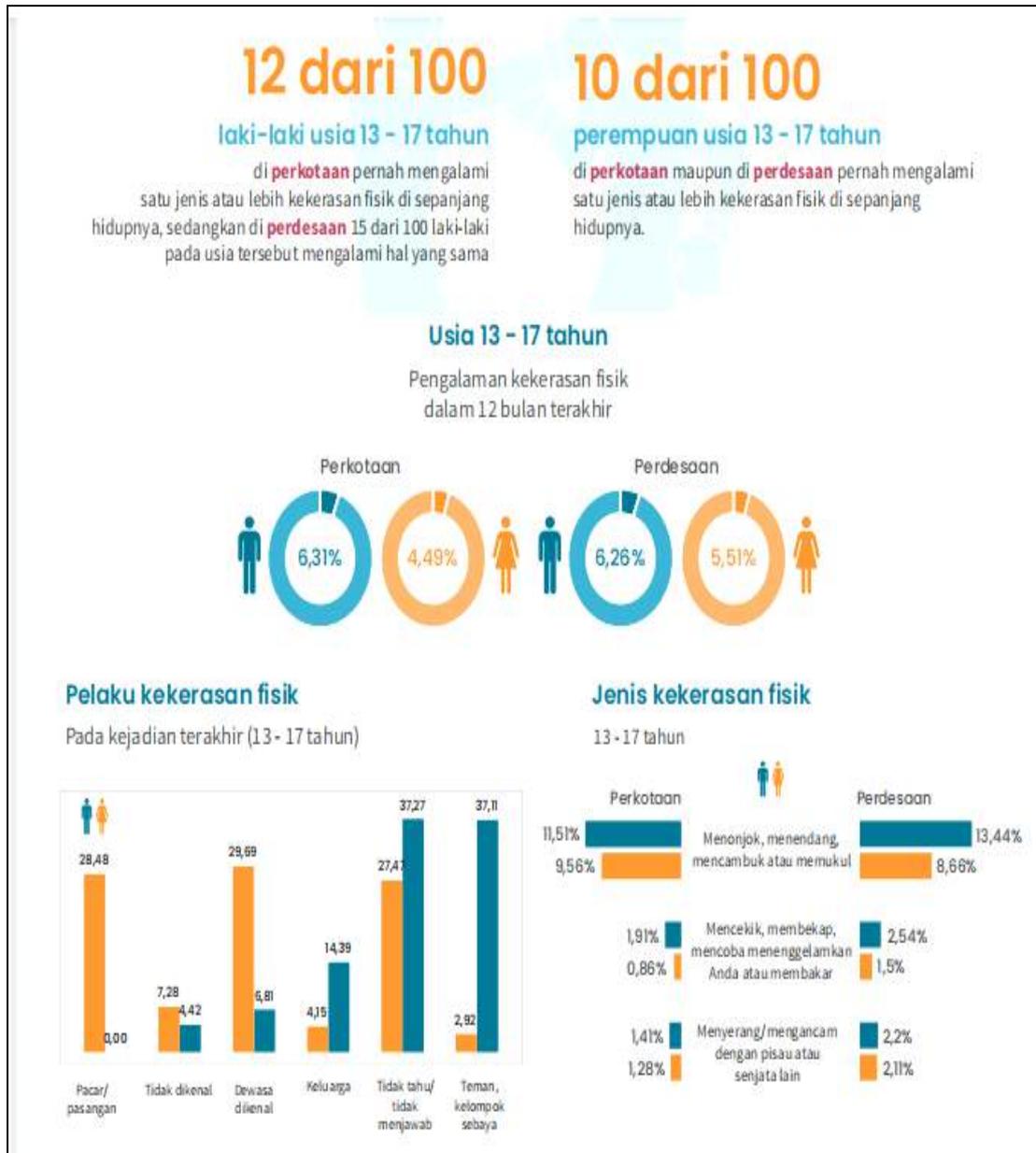
Jenis kekerasan fisik yang dialami anak usia 13-17 tahun baik di perkotaan maupun di perdesaan berupa menonjok, menendang, mencambuk atau memukul, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar, menyerang/mengancam. Untuk daerah perkotaan, kekerasan fisik yang paling dominan adalah menonjok, menendang, mencambuk atau memukul yaitu sebesar 11,51% pada anak laki-laki dan 9,56% pada anak perempuan. Sedangkan kekerasan fisik berupa mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar sebesar 1,91% (laki-laki) dan 0,86% (perempuan). Kekerasan fisik berupa menyerang/mengancam dengan pisau atau senjata lain sebesar 1,41% pada laki-laki dan 1,28% pada perempuan. Dari prevalensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik pada anak laki-laki lebih banyak dibandingkan pada anak perempuan, meskipun seluruh bentuk kekerasan tersebut dilakukan terhadap perempuan di perkotaan.

Tidak jauh berbeda dengan perkotaan, kekerasan fisik di perdesaan juga dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Seluruh kekerasan

tersebut juga ditemui di perdesaan. Kekerasan fisik berupa menonjok, menendang, mencambuk atau memukul sebesar 13,44% pada anak laki-laki dan 8,66% pada anak perempuan. Kekerasan ini lebih tinggi dialami oleh anak laki-laki perdesaan dibandingkan anak laki-laki di perkotaan, sebaliknya pada anak perempuan kekerasan fisik berupa menonjok, menendang, mencambuk atau memukul relatif lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Sedangkan bentuk kekerasan fisik lainnya berupa mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar, menyerang/mengancam dengan pisau atau senjata lain lebih dominan dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dan lebih banyak dialami oleh anak di perdesaan di bandingkan perdesaan.

Jika dilihat dari pelaku kekerasan, pelaku yang paling banyak adalah tidak tahu/tidak menjawab yaitu sebesar 37,27% pada anak laki-laki dan sedangkan untuk anak perempuan yang paling banyak adalah dewasa dikenal sebesar 28,89%. Pelaku yang paling rendah prevalensinya adalah 0% pada anak laki-laki dengan pelaku pacar/pasangan. Untuk anak perempuan, 2,92% dengan pelaku teman/kelompok sebaya. Ketimpangan yang sangat menyolok terjadi pada pelaku pacar/pasangan dimana pada anak laki-laki hal tersebut tidak dijumpai sedangkan pada anak perempuan mencapai 28,48%. Hal ini juga terjadi pada teman/kelompok sebaya, pada anak laki-laki sebesar 37,11 % namun pada anak perempuan hanya 2,92%. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan dari teman sebaya. Sedangkan anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan fisik dari pacar/pasangan.

Gambar 84 Kekerasan Fisik Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



Sumber: Infografis SNP HAR, 2021

7.1.2 Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang dapat mengganggu perkembangan sosial ataupun kesehatan mental anak. Kekerasan emosional disebut juga sebagai kekerasan verbal, mental ataupun kekerasan psikologis. Terdapat efek jangka panjang dari kekerasan emosional yang dapat berakibat buruk bagi perkembangannya pada masa remaja dan dewasa nanti dan perilaku anak mungkin akan menjadi anti sosial.

Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat dalam penganiayaan baik secara fisik maupun emosional. Semakin tinggi kekerasan emosional yang diterima oleh seorang anak, maka semakin besar pula resiko anak tersebut pada kecenderungan kenakalan remaja.

Berdasarkan data SNPHAR, 2021 terlihat bahwa 4 dari 10 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan emosional di sepanjang hidupnya. Sedangkan 3 dari 10 laki-laki usia yang sama pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan emosional di sepanjang hidupnya.

Gambar 85 Kekerasan Fisik Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



Sumber: Infografis SNPHAR, 2021

Dalam gambar di atas, terlihat bahwa pengalaman kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir di perkotaan sebesar 16,97% pada laki-laki dan 22,82% pada perempuan. Tidak jauh berbeda, kekerasan emosional juga dialami pada anak laki-laki maupun anak perempuan di perdesaan, dimana 16,11 % anak laki-laki mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir dan 23,63% pada anak perempuan. Artinya terdapat 17 dari 100 anak laki-laki perkotaan mengalami kekerasan emosional dan 23 dari 100 anak perempuan mengalami hal yang serupa. Sedikit berbeda pada wilayah perdesaan dimana 16 dari 100 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional dan 23 dari 100 anak perempuan mengalami hal yang sama.

Ditinjau dari sisi pelaku kekerasan, teman/kelompok sebaya merupakan pelaku paling tinggi dalam melakukan kekerasan emosional baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu menyolok, dimana pada laki-laki sebesar 71,69% dan 72,42% pada anak perempuan. Pada pelaku kekerasan yang lain seperti keluarga (dewasa dikenal) dan tidak tahu/tidak menjawab hanya berkisar antara 10,06% hingga 18,24 persen.

Kekerasan emosional tersebut dapat berupa makian baik melalui melalui media daring maupun langsung. Kekerasan emosional yang melalui media daring biasanya lebih dominan dirasakan oleh anak-anak di perkotaan. Kekerasan melalui daring yang menjadi penyebabnya adalah kontrol perilaku yang rendah akan menjadikan individu kesulitan dalam melakukan penyesuaian untuk diterima lingkungannya.

Terdapat tiga jenis utama kekerasan emosional yaitu perundungan media daring, makian sebaya, dan makian keluarga. Kekerasan emosional harus menjadi perhatian khusus karena dampak kekerasan terhadap anak yang dirasakan tidak hanya pada taraf menyakiti perasaan saja namun juga dapat merusak jiwa dan kondisi psikologis dari remaja sehingga menyebabkan korban merasa depresi, sedih, dan frustrasi. Salah satu dampak yang dikhawatirkan dari kekerasan emosional termasuk *cyber bullying* adalah korban cenderung ingin melakukan bunuh diri.

7.1.3 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan, dilakukan terhadap seorang anak oleh individu lainnya dengan menggunakan kekuasaan, ancaman dan caracara memaksa lainnya. Menurut WHO, kekerasan seksual anak (Child Sexual Abuse) sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dia pahami dan tidak dapat memberikan informasi yang disampaikan, tanpa persetujuan anak, atau yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat.

Kekerasan seksual terdiri dari kegiatan dengan kontak fisik dan tanpa kontak fisik. Kekerasan seksual terhadap anak menghambat semua aspek perkembangan anak baik secara fisik, psikologis dan sosial.

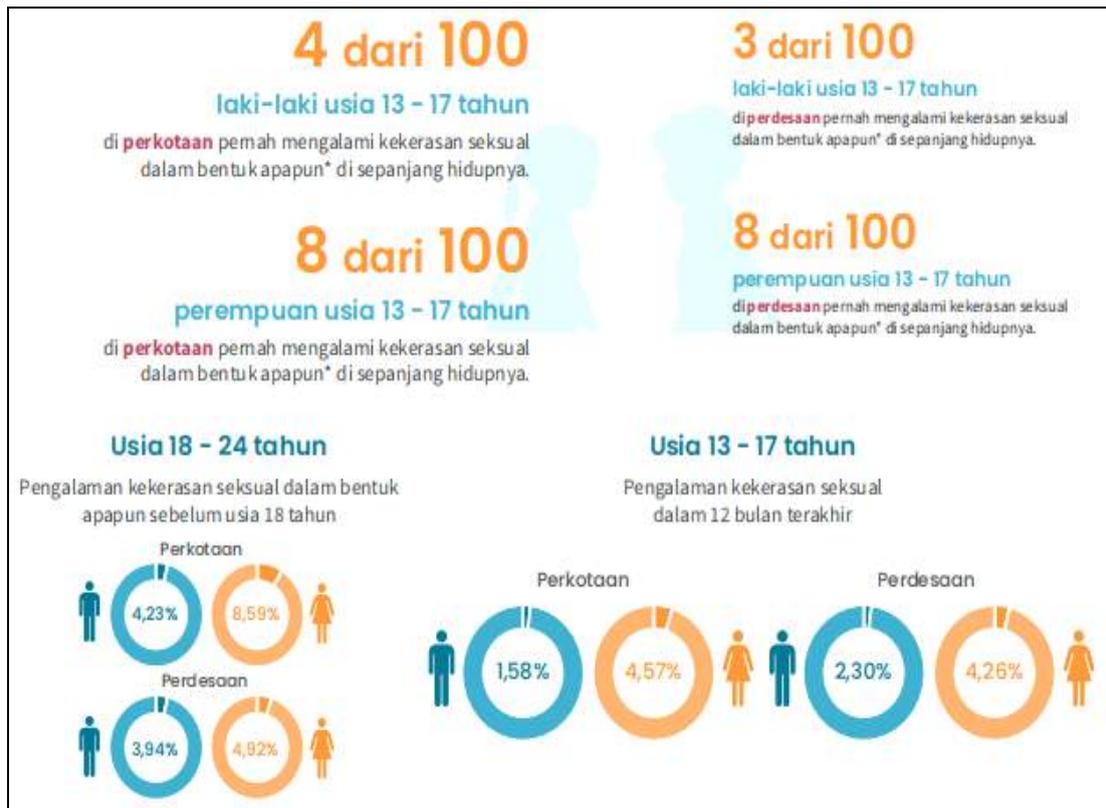
Pengungkapan dan pelaporan tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan langkah penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan lanjutan dan memastikan bahwa korban mendapatkan intervensi yang dibutuhkan secepatnya untuk menanggulangi dampak negatif yang dialami akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Pengungkapan dan pelaporan juga memfasilitasi terjadinya tindakan hukum atas pelaku, serta membantu penyediaan data yang akurat terkait prevalensi dan tingkat keparahan kekerasan terhadap anak yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk membangun strategi penanggulangan masalah.

Berdasarkan data SNPHAR tahun 2021, 4 dari 100 anak laki-laki usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya. Sedangkan pada anak perempuan 8 dari 100 anak di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya. Sebaliknya 3% anak laki-laki di perdesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya dan 8% anak perempuan di perdesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya.

Dilihat dari sisi pengalaman kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir, anak-anak di perdesaan lebih banyak mendapatkan kekerasan seksual terutama pada anak laki-laki dibandingkan anak laki-laki perkotaan yaitu 2,30% berbanding 1,58%. Artinya anak laki-laki perdesaan memiliki pengalaman hampir dua kali lipat dibandingkan pengalaman anak laki-laki

perkotaan. Sebaliknya pada anak perempuan pengalaman tersebut hampir sama, 4,26 persen pada perdesaan dan 4,57 persen pada perkotaan. Kekerasan seksual di perkotaan cenderung disebabkan oleh pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya.

Gambar 86 Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



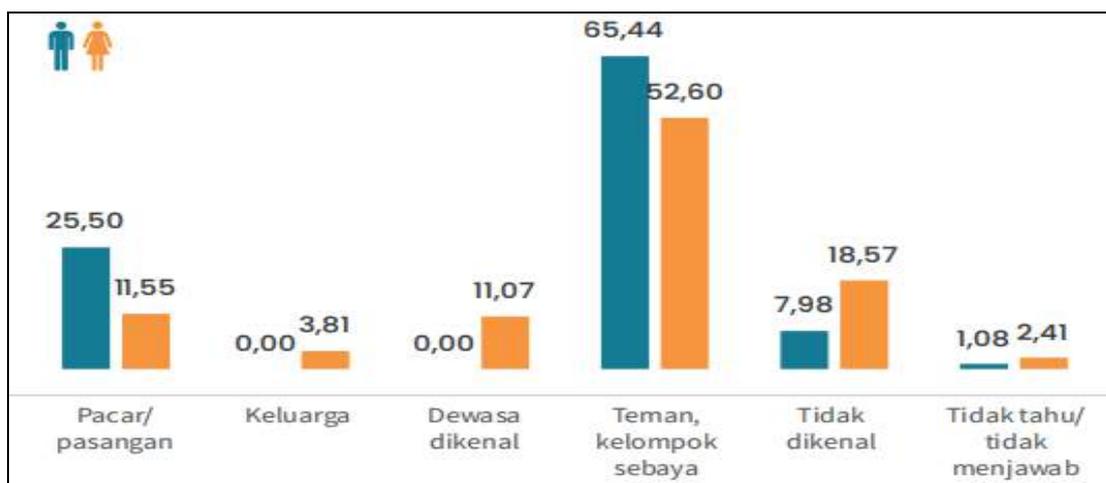
Sumber: Infografis SNPHAR, 2021

Terdapat gradien hubungan antara tingkat keparahan kekerasan seksual pada anak kesehatan mental. Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual baik kontak maupun non-kontak fisik memiliki status kesehatan mental buruk.

Berdasarkan pada pelaku kekerasan pada kejadian terakhir, teman/kelompok sebaya lebih dominan dibandingkan pelaku-pelaku lainnya. 65,44% pada anak laki-laki dan 52,60 persen pada anak perempuan. Seluruh pelaku kekerasan yang terdata terdapat pada anak perempuan. Namun pada anak laki-laki terdapat 2 (dua) jenis pelaku yang tidak ditemui yaitu keluarga dan dewasa dikenal. Pelaku pacar/pasangan lebih banyak dilakukan pada

anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, melebihi dua kali lipat. Pelaku yang dikenal lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dengan besaran 18,57% seperti terlihat pada gambar berikut ini

Gambar 87 Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



Sumber: Infografis SNPCHAR, 2021

7.1.3.1 Kekerasan Seksual Non Kontak

Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual non kontak seperti eksibisionisme (memperlihatkan alat kelamin), paparan pornografi, pelecehan seksual verbal, distribusi gambar-gambar intim yang bertentangan dengan kehendak seseorang. Jumlah bentuk kekerasan seksual non kontak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan anak muda.

Kekerasan seksual non kontak merupakan kekerasan yang dialami dalam bentuk dipaksa menyaksikan kegiatan seksual, membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam gambar/foto, atau video kegiatan seksual, diminta untuk mengirimkan teks, gambar/foto, atau video tentang kegiatan seksual.

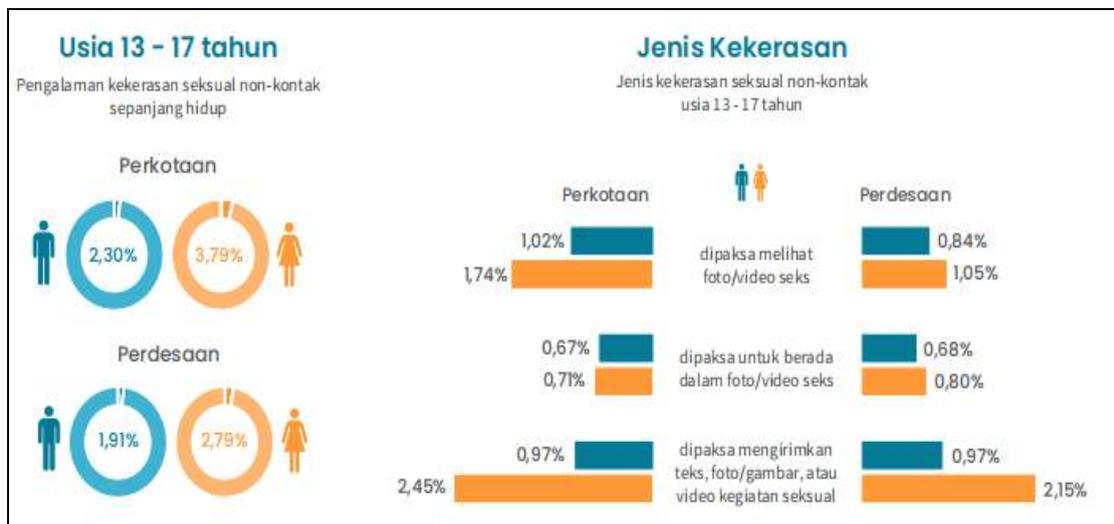
Pada anak usia 13-17 tahun di perkotaan memiliki pengalaman kekerasan seksual non kontak sebesar 2,30% (laki-laki) dan 3,79% (perempuan). Sedangkan pada perdesaan sebesar 1,91% pada laki-laki dan 2,79% pada perempuan. Kekerasan seksual pada anak perempuan lebih

dominan dibandingkan anak laki-laki baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dipicu karena anak perempuan memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan anak laki-laki dalam melakukan perlawanan terhadap pelaku.

Berdasarkan data, terdapat beberapa jenis kekerasan seksual non kontak antara lain dipaksa melihat foto/video seks. Jenis ini dialami anak laki-laki di perkotaan sebesar 1,02% dan anak perempuan sebesar 1,74%. Anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan ini dibandingkan anak laki-laki. Jenis kekerasan seksual berupa dipaksa untuk berada dalam foto/video seks hampir sama banyak dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan di perkotaan (0,67% dan 0,71%). Kekerasan seksual non kontak lainnya berupa dipaksa mengirimkan teks, foto/gambar atau video kegiatan seksual juga lebih sering dilakukan terhadap anak perempuan, hampir 3 kali lipat (0,97% pada anak laki-laki dan 2,45% pada anak perempuan).

Untuk perdesaan, kekerasan seksual juga dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Kekerasan seksual berupa dipaksa melihat foto/video seks juga lebih banyak dilakukan terhadap anak perempuan. Terdapat 1,05% kekerasan seksual non kontak dialami anak perempuan dan 0,84% pada anak perempuan. Hal yang sama dengan wilayah perkotaan kekerasan seksual non kontak jenis dipaksa untuk berada dalam foto/video seks juga terjadi di perdesaan dengan persentase yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pada anak perempuan kekerasan jenis ini sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu 0,80 persen (perdesaan) berbanding 0,71% (perdesaan). Kekerasan berupa dipaksa mengirimkan teks, foto/gambar atau video kegiatan seksual dilakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang hampir sama dengan perkotaan

Gambar 88 Kekerasan Seksual Non Kontak Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



Sumber: Infografis SNPHAR, 2021

7.1.3.2 Kekerasan Seksual Kontak

Selain kekerasan seksual non kontak, kekerasan seksual juga dapat berupa kekerasan seksual kontak. Kekerasan seksual kontak merupakan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sentuhan yang tidak diinginkan, diajak berhubungan seks, dipaksa secara fisik berhubungan seks, dan hubungan seks dengan tekanan (ancaman, pengaruh/kekuasaan).

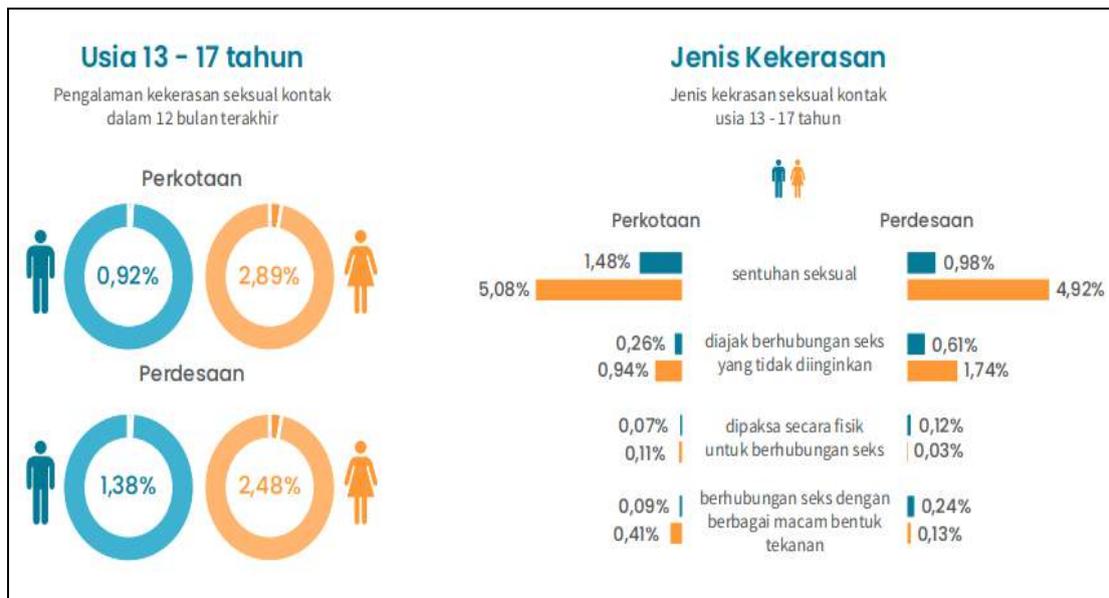
Kekerasan seksual kontak fisik berakibat pada timbulnya cedera fisik, meningkatnya risiko berbagai kesehatan seksual dan masalah reproduksi, baik langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual kontak fisik juga memiliki dampak mendalam pada kesejahteraan sosial, korban kekerasan seksual tidak sedikit yang mengalami stigmatisasi dan dikucilkan oleh keluarga mereka dan orang lain.

Kekerasan seksual kontak mengacu pada menyentuh bagian seksual anak atau mendorong anak untuk melakukannya menyentuh tubuh orang lain. Ini bisa melibatkan aktivitas yang melibatkan penetrasi, seperti hubungan seksual, atau kegiatan tanpa penetrasi, seperti cumbuan atau ciuman.

Faktor pembiaran orang tua menjadi penyebab tingginya jumlah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Orang tua masih berpikir anak laki-laki tidak akan beresiko menjadi korban kekerasan seksual. Saat

mereka bermain atau pergi, orang tua membiarkan sehingga memudahkan predator seksual melakukan kekerasan. Padahal predator tidak hanya mengincar anak perempuan tetapi juga anak laki-laki.

Gambar 89 Kekerasan Seksual Non Kontak Pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



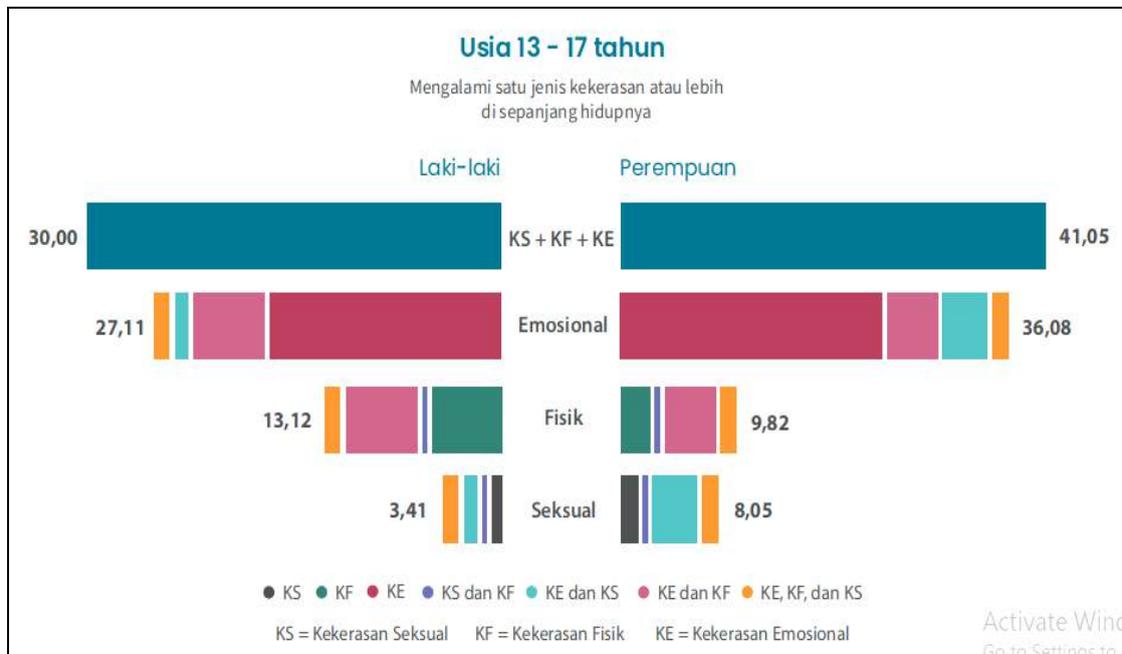
Sumber: Infografis SNPCHAR, 2021

7.2 TUMPANG TINDIH PENGALAMAN KEKERASAN

Menurut data SNPCHAR, 2021, anak usia 13-17 tahun mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. , 30 % anak laki-laki mengalami 3 jenis kekerasan (kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan emosional). Ini artinya 3 dari 10 anak laki-laki mengalami tiga jenis kekerasan. Secara berturut-turut anak laki-laki yang hanya mengalami satu jenis kekerasan saja adalah 27,11 persen hanya kekerasan emosional, 13,12 persen hanya kekerasan fisik dan 3,41 persen hanya kekerasan seksual saja. Selanjutnya pada anak perempuan terdapat 41,05% mengalami ketiga jenis kekerasan baik seksual, fisik dan emosional. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan pada anak laki-laki. Ini artinya terdapat 4 dari 10 anak mengalami 3 jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Untuk anak perempuan yang mengalami satu jenis kekerasan saja, 36,08% mengalami kekerasan emosional saja, lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. 9,08 persen

mengalami kekerasan fisik saja dan 8,05 persen hanya mengalami kekerasan seksual saja.

Gambar 90 Tumpang Tindih Pengalaman Kekerasan Anak Usia 13-17 Tahun, 2021



Sumber: Infografis SNP HAR, 2021

Berdasarkan pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir, di perdesaan 25,55% anak perempuan pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir, 18,99% anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 91 Tumpang Tindih Pengalaman Kekerasan Anak Usia 13-17 Tahun Berdasarkan Pengalaman Kekerasan 12 Bulan Terakhir, 2021



Sumber: Infografis SNPHAR, 2021

Sebagai gambaran kasus kekerasan terhadap anak laki-laki di Sumatera Barat Tahun 2023 (Januari-Desember) berdasarkan data Simfoni PPPA terdapat sebanyak 313 kasus yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah korban sebanyak 337 orang. Ini artinya terdapat 1 orang anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan setiap bulannya di setiap Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Sumatera Barat pada tahun yang sama sebesar 478 kasus dengan korban sejumlah 504 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 2 orang anak perempuan setiap bulannya per Kabupaten/Kota menjadi korban kekerasan baik fisik, seksual maupun kombinasi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada seluruh Masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan.

**Tabel 232 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak
(Januari s/d Desember 2023)**

Laki-Laki

Kode Referensi	Kab/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan
1309	Kep. Mentawai																
1301	Pesisir Selatan	8	8	6		2					8	2	1				
1302	Solok	12	12	11		1					12						
1303	Sijunjung	6	6	14	2					1	8	1	1	2			
1304	Tanah Datar	14	14	8		6					14						
1305	Padang Pariaman	5	5	2		3					5						
1306	Agam	12	19	3	3	16					18	3		3	3		
1307	Lima Puluh Kota	15	15	12		3					13	2	1				
1308	Pasaman	82	87	9	5	75	2		3	1	85	77	82	1	9		
1311	Solok Selatan																
1310	Dharmasraya	51	51	10	48	5					51	51	2	1			
1312	Pasaman Barat	8	11	2			4		5		8			5	4		
1371	Kota Padang	19	25	3	5	14			3		21						
1372	Kota Solok	10	11	11	1						10	2					
1373	Kota Sawahlunto	11	11	5						6	9		1				
1374	Kota Padang Panjang	3	3		2	2				1	2	2					
1375	Kota Bukittinggi	27	28	3	7	1			1	16	28	15	3	1	1	2	
1376	Kota Payakumbuh	21	22	21	1					1	14		6	1			
1377	Kota Pariaman	9	9		5	4					7	1					
13	SUMATERA BARAT	313	337	110	79	132	6		12	26	303	156	97	14	17	2	

Jumlah Korban Berdasarkan Usia			Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan							Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian						Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan								
<6	'6-12	'13-17	Tidak/Belum Pernah Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	PAUD/TK	NA	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Klat	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Mengurus Rumah Tangga	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	NA	
	5	3		5	2				1	2			3	3		1		6						1
	6	5		3	2	2			5	2		6	2	2				10						2
	3	3		4	2					1		5						6						
2	6	5	2	7	4	1				4		5	2	3		2		12						
	2	3		3	1	1				2		1	1	1				5						
1	11	7	1	12	6	7				4		12	3			1		18						
	3	12		2	6	7				5		5	2	2		1		14						
11	72	4	4	74	5	1		3		24		22	2	39		13		74						
1	32	18	2	30	12			7		7		2	42			2		49						
4	5	2	3	2		2			4	9			1	1		7		4						
5	11	9	4	10	6	4			1	8		5	11	1		7		17						1
1		10		1	2	6			2			6	2	3		2		8						1
1	3	7	1	3	4	2		1		2		2	2	5		1		10						
	3			3										3		2		1						
1	15	12		22	3	2			1	22		2	4			2		25						1
1	2	19	1	4	4	9			4	3		13	2	4		3		15						4
1	5	3	1	5	2	1				1		3	3	2		1		8						
29	184	124	19	190	61	38	0	11	18	96	0	90	82	69	0	45	0	282	0	0	0	0	0	10

Perempuan

Kode Referensi	Kab/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1309	Kep. Mentawai	12	12			12					6			8				
1301	Pesisir Selatan	32	36	3	2	30		2		1	36	17	6	1	2			
1302	Solok	21	25	2		23					20							
1303	Sijunjung	33	33	3	6	25				1	19	4	5	10				
1304	Tanah Datar	26	26	1	1	25					25							
1305	Padang Pariaman	21	22	3		18				1	22	1	1				2	
1306	Agam	27	30	1		29					30	10		12	10		1	
1307	Lima Puluh Kota	33	35	5		28				2	21	1	12		9			
1308	Pasaman	24	30	1		26			3		27	15	24		15			
1311	Solok Selatan	10	10		3	7					7		3		1			
1310	Dharmasraya	57	57	7	53	18			1		57	55	4	1				
1312	Pasaman Barat	39	39	6		25	2		5	1	15			20	5			
1371	Kota Padang	31	32	3	5	23			2		31							
1372	Kota Solok	32	33	10		23			1		32	10	5					
1373	Kota Sawahlunto	9	9	1		5			2	1	8	1	1					
1374	Kota Padang Panjang	6	6	1	3	2			1	1	4	1	1		2	1		
1375	Kota Bukittinggi	24	24	1	6	6			1	11	24	17	2	1	2	1		1
1376	Kota Payakumbuh	23	23	8	1	14	2				16	3	4			2		1
1377	Kota Pariaman	18	22	2	4	15				1	15	5	3	1				1
13	SUMATERA BARAT	478	504	58	84	354	4	2	16	20	415	140	71	46	54	4	3	3

Jumlah Korban Berdasarkan Usia			Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan							Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian						Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan							
'<6	'6-12	'13-17	Tidak/Belum Pernah Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Penguruan Tinggi	PAUD/TK	NA	Rurusah Tarangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Giat	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Mengurus Rumah Tangga	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	NA
	6	6		6	4	2				5		6		1				12					
4	5	27	4	8	9	7		1	7	16		13	1	6		21		12					3
3	8	14	2	7	2	5			9	11		7	5	2		4		16	1				4
3	23	7	2	20	4	2		4	1	4		15	13	1		3		30					
4	5	17	3	3	11	7		2		20		4		2		4		22					
2	5	15	3	6	9	3		1		5		12		5		9		12					1
2	12	16	3	12	11	4				23		3	2	2		6		24					
3	11	21	3	12	8	9		3		27		8				8		27					
6	16	8	5	19	6					18		9	1	2		13		17					
	2	8		2	6	2				8		2				2		8					
1	18	38	1	27	21	4		2	2	13		5	33	6		3		54					
4	15	20	7	9	14	3			6	19	1	3	1	15		12		26					1
3	13	16	2	12	9	7			2	19	1	7	3	2		4		27					1
5	3	25		1	7	14		3	8	9		18	4	2		4		27					2
3	2	4	1	2	2	3			1	7		1	1			2		7					
	2	4	1	1	2	1			1	3			2	1		4		1					1
2	13	9	1	15	3	4			1	21		1	1	1		3		21					
1	5	17		8	5	8			2	6		11	1	5		2		18					3
5	7	10	5	7	3	7				12		5	1	4		12		10					
51	171	282	43	177	136	92	0	16	40	246	2	130	69	57	0	116	0	371	1	0	0	0	16

Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan				Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban											Jumlah Kasus KDRT	Presentas e Kasus KDRT	Jumlah Korban KDRT	Presentas e Korban KDRT	Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Kekerasan yang Dialami				Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima				
Belum Kawin	Kawin	Ceraai	NA	Orang Tua	Keluarga / Saudara	Suami / Istri	Tetangga	Pacar / Teman	Guru	Majikan	Rekan Kerja	Lainnya	NA					1	2	3	>3	1	2	3	4	>4	
12				2	2		2					9	1					10	1		1	6	4		1		
33		1	2	4	1		6	13				3	15					30	4		2	9	19		5	3	
21	1		3									1	22	1	4.76%		1	4.00%	23		2		17	1	2		
33								1				7						31	2			28	3		2		
26				1	5		1	10				18						23	2		1	22	2		1		
22					3		7	9				2	1					21		1		17	4	1			
30				4	5		6	8	1			4	2					29		1		8	8	6	3	5	
34		1		6	6		10	4				3	4	2	6.06%		2	5.71%	34	1			22	9	2		
29			1	6	2		10	3					1					30				3	3	8	11	3	
10				1	1		3	1				4						10				7	2	1			
56	1			5			2					1		5	8.77%		5	8.77%	38	16	3		2	33	3	2	17
39				10	2		7	13				4	1	4	10.26%		4	10.26%	38			1	37	1		1	
32				5	6		7	6	2		1	4	1	3	9.68%		3	9.38%	30	1	1		29	1	1		
26	1		6	2	3		1	14				3	8					32	1			16	9	7			
8	1			1	4	1		1	1				2					8	1			7	2				
6							1	2										4	2			2	2	1	1		
24				1				4				2						22	1	1		6	6	3	4	5	
21			2	3	1		3	8				3	5					21	1		1	18	4		1		
22							2	6				1		3	16.67%		3	13.64%	21		1		7	7	1	1	
184	4	2	14	51	41	1	66	105	4	0	1	69	63	18	3.77%		18	3.57%	455	33	10	6	263	120	34	31	37

Sumber: KemenPPPA, Simfoni PPA, 2023

7.3 ANAK TERLIBAT NAPZA

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah pemakai obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia (BNN 2019).

Usia remaja awal dan akhir merupakan periode risiko kritis untuk inisiasi penggunaan zat dan memungkinkan untuk memuncak di kalangan anak muda yang beranjak dari remaja ke dewasa. BNN juga menyatakan bahwa mayoritas orang yang menggunakan narkoba adalah laki-laki, tetapi perempuan memiliki pola penggunaan narkoba yang spesifik. Wanita biasanya mulai menggunakan zat lebih lambat daripada pria, setelah mereka memulai penggunaan zat, wanita cenderung meningkatkan tingkat konsumsi alkohol, ganja, kokain dan opioid lebih cepat daripada pria serta cepat mengembangkan gangguan penggunaan narkoba. Wanita dengan gangguan penggunaan zat dilaporkan memiliki tingkat gangguan stress pasca-trauma yang tinggi dan mungkin juga mengalami kesulitan masa kecil seperti kelalaian fisik, pelecehan atau pelecehan seksual.

Secara umum perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak Langsung narkoba terhadap jasmani/tubuh adalah: 1) Gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur

urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem syaraf, paru-paru, dan gangguan pada sistem pencernaan; 2) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dan lain-lain. Dampak langsung Narkoba Bagi Kejiwaan/Mental adalah: menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba.

Sedangkan dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan adalah yaitu: 1) pengeluaran biaya yang tinggi untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu; 2) dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik, juga akan bersikap anti sosial; 3) rasa malu keluarga karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang; 4) kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah (drop out); 5) tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal; 6) kemungkinan besar bisa mengalami hidup di penjara.

Kebiasaan akan konsumsi alkohol merupakan gangguan yang kompleks pada perspektif *biopsychosocial*. Istilah ini dapat juga diartikan sebagai gangguan pada sistem kekebalan fisik tubuh, psikis manusia serta akan berimbas pada kehidupan sosialnya. Baik laki-laki maupun perempuan yang mengkonsumsi alkohol rentan terhadap kekerasan.

Berdasarkan data BNN tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau setara dengan 3,41 juta orang . Terjadi peningkatan sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2017. Rata-rata penduduk Indonesia yang meninggal akibat narkoba sebanyak 30 orang per hari.

Berdasarkan pengukuran BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan 0,22 persen dari sebelumnya 1,95 persen pada tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada tahun 2023. Dari angka 1,95 persen dua tahun terakhir, menjadi 1,73 persen kalau dijumlahkan penduduknya yakni 3,3 juta terindikasi menggunakan dari (sebelumnya) 3,6 juta di dua tahun terakhir

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Marthinus Hukom mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia memapar 3,3 juta jiwa atau 1,73 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023

Gambar 92 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, 2021



Sumber: bps. go.id, 2022

7.4 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berarti Indonesia telah bersedia menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berusia 12 dan kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak agar tetap menjaga harkat martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) berupa sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi antara lain bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan diversifikasi karena terdapat faktor-faktor yang kurang mendukung seperti Pasal 9 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berhak mendapatkan diversifikasi adalah ABH dengan hukuman minimal ancaman hukuman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga tidak semua ABH mendapatkan diversifikasi.

Pengetahuan aparat penegak hukum tentang diversifikasi yang kurang juga menjadi kendala karena aparat-aparat tersebut merupakan pelaksana utama proses peradilan. Sarana prasarana seperti ruang pengadilan khusus anak juga masih kurang sehingga anak dapat mengalami trauma selama proses persidangan. Upaya diversifikasi juga harus disosialisasikan secara luas pada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham bahwa kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara damai. Hal tersebut harus diupayakan agar anak yang menjalani proses diversifikasi dapat diterima dengan baik di masyarakat serta bebas dari stigma yang merendahkan martabat anak.

Menurut Undang-Undang SPPA, ABH di tempatkan di lembaga permasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Dengan ditematkannya anak di LPKA diharapkan anak tidak terpengaruh narapidana dewasa. Jumlah LPKA yang masih terbatas menyebabkan tidak semua anak dengan hukuman pidana dapat di tempatkan di LPKA.

Lembaga perlindungan anak haruslah menjadi tempat yang aman dan mengayomi anak agar anak dapat pulih secara fisik dan psikologis dengan baik, sehingga dapat terintegrasi kembali dalam lingkungan masyarakat, serta dapat hidup secara optimal.

Selain dilakukan pembinaan untuk dapat terintegrasi dengan masyarakat kembali, anak yang menjalani hukuman pidana juga diberi berbagai macam pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan penting untuk meningkatkan kemampuan anak dan menyiapkan anak agar saat bebas dari LPKA, anak lebih siap mengaktualisasikan diri dan berkarya dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga berfungsi untuk membantu anak untuk mengejar ketertinggalan akibat tidak dapat hadir di sekolah.

Konvensi hak anak menyatakan bahwa pemenjaraan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Anak yang dipenjara dapat mengalami berbagai macam masalah terutama dalam hal pemenuhan hak anak seperti: a) hak untuk dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan fasilitas di tahanan; b) terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan dan lingkungan tempat tinggal yang serba terbatas; c) tahanan anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan apabila dicampur dengan tahanan dewasa

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terdapat tiga macam narapidana anak berdasarkan status narapidana, yaitu:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun

- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun

Tabel 233 Jumlah Tahanan Anak Di Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

Tahanan Anak	LAPAS	RUTAN	LPKA	LPP
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	3	5	0	0
TAP : Tahanan Anak Perempuan	0	0	0	0

Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id, 2023

Tabel 232 Jumlah Tahanan Anak Di Sumatera Barat Menurut Satuan Kerja Wilayah Sumatera Barat, 2023

Tahanan Anak	TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN	1	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PAINAN	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MUARA LABUH	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI	1	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PADANG PANJANG	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MANINJAU	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B LUBUK SIKAPING	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PAYAKUMBUH	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SAWAHLUNTO	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK	0	0

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA SIJUNJUNG	1	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BATUSANGKAR	0	0
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TANJUNG PATI	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK BASUNG	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II B PASAMAN	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA	0	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO	0	0
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PADANG	5	0
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG	0	0

Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id, 2023

Ini menunjukkan bahwa kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak semakin banyak dengan berbagai kasus. Untuk itu diperlukan pembinaan yang menyeluruh dari berbagai pihak sehingga angka kriminalitas tersebut dapat ditangani secara baik. Terjadi penurunan anak yang berhadapan dengan hukum dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 orang

7.5 PEKERJA ANAK

Selain perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan dari eksploitasi anak. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. perlindungan terhadap pekerja usia anak harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan perusahaan- perusahaan.

Internasional Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa pekerja usia anak dapat mengganggu masa kecil anak, menurunkan potensi anak, serta martabat anak, sehingga berbahaya bagi perkembangan fisik maupun mental anak.

Anak yang bekerja merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Anak bekerja didefinisikan sebagai anak yang melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam secara berturut-turut (tidak terputus) dalam periode seminggu yang lalu dan kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan, pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya.

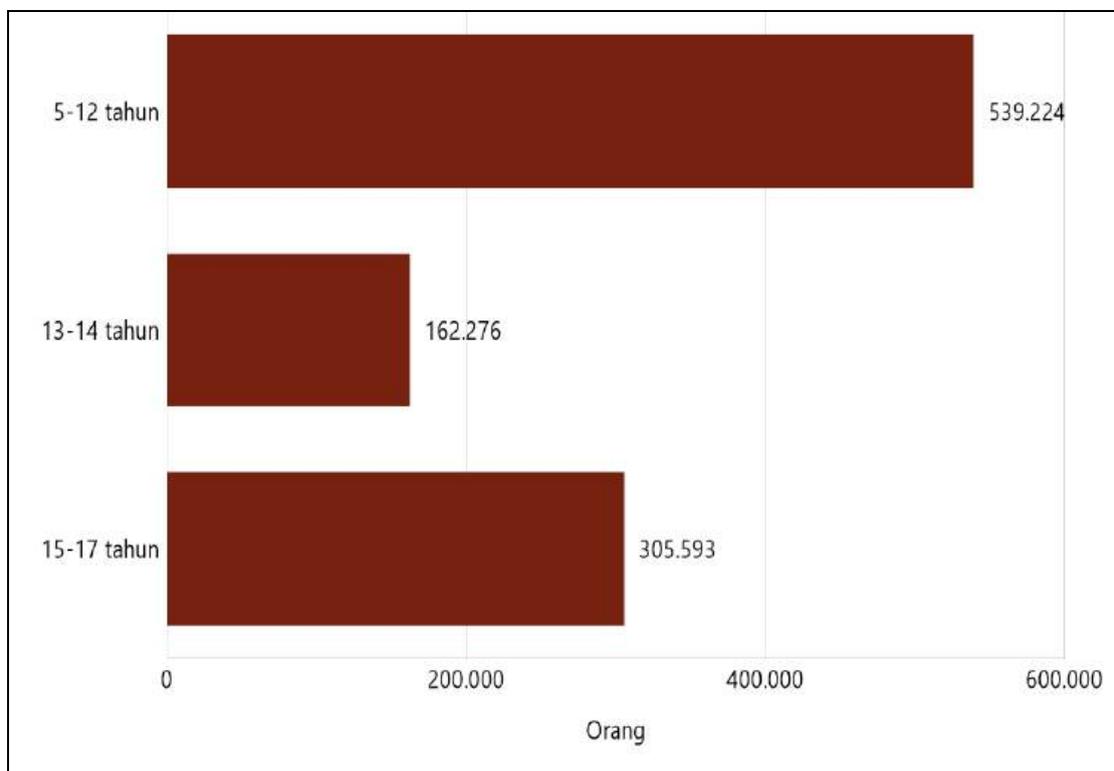
Terlibatnya anak-anak dalam kegiatan perekonomian keluarga merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang memaksa anak untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu adanya beberapa budaya yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses anak menuju kedewasaan serta bentuk darma bakti anak terhadap orang tua juga turut menjadi penyebab anak bekerja. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan tingginya angka pekerja anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, kecuali anak yang telah berusia 13- 15 tahun dengan syarat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh anak merupakan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Undang-undang tersebut juga menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun keatas, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Gambar 93 Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia, 2023



Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia pada 2023. Proporsinya mencapai 1,72% dari total anak usia 5-17 tahun secara nasional. Kondisi ini berarti bahwa pada tahun 2023, satu sampai dua anak di antara 100 anak Indonesia yang berusia 5–17 tahun adalah pekerja anak.

Pada 2023 pekerja anak Indonesia dari kelompok usia 5-12 tahun mencapai 539.224 orang, proporsinya 1,52% dari total penduduk seusianya. Kemudian jumlah pekerja anak usia 13-14 tahun ada 162.276 orang (1,87% dari total penduduk seusianya), dan pekerja anak usia 15-17 tahun ada 305.593 orang (2,13% dari total penduduk seusianya).

BPS mendefinisikan pekerja anak berdasarkan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak berumur 5-12 tahun yang bekerja tanpa mempertimbangkan jam kerja mereka;
2. Anak berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; dan
3. Anak berumur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

BPS juga mencatat, pada 2023 mayoritas atau 676.156 orang pekerja anak usia 5-17 tahun masih bersekolah. Kemudian yang tidak bersekolah lagi 318.948 orang, dan tidak/belum pernah sekolah 11.989 orang.

Anak didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 18 tahun. Definisi ini sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Konvensi Hak Anak (telah diratifikasi pada 1990 melalui Kepres No. 36) mendefinisikan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih di dalam rahim ibu mereka.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun.

Kemudian berikut adalah pasal-pasal terkait pekerja anak:

- Pasal 68, yang berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- Pasal 69, ayat (1) yang berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- Pasal 69, ayat (2) yang berbunyi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 74, ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- Pasal 74, ayat (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- Pasal 74, ayat (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 77, ayat (1) yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- Pasal 77, ayat (2) yang berbunyi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

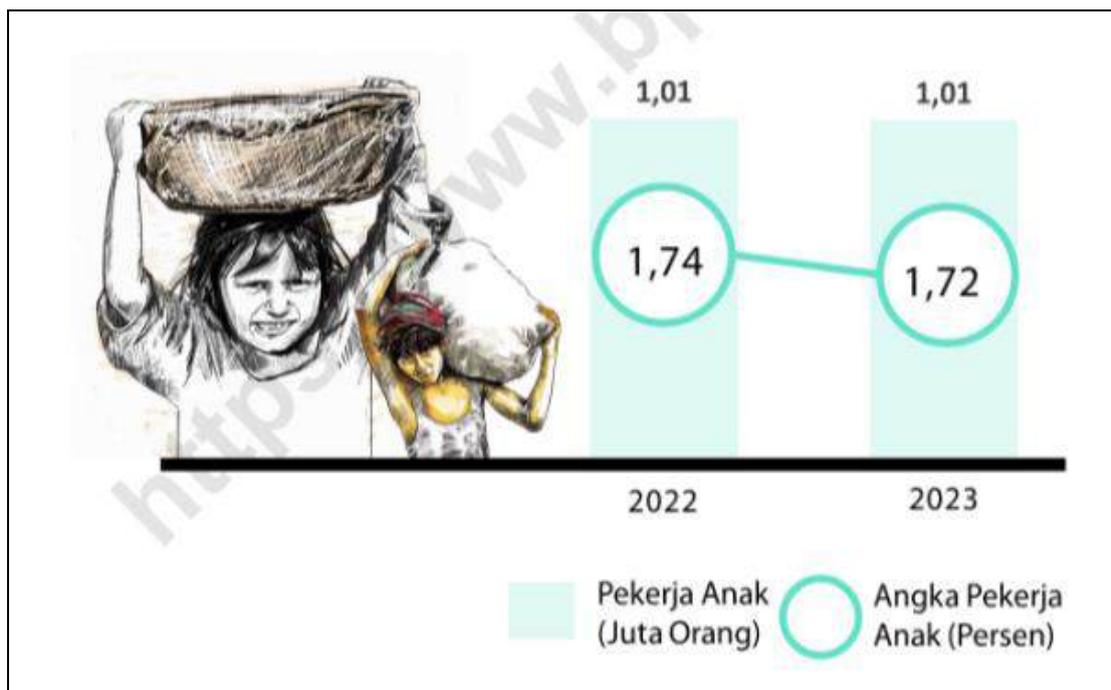
Istilah anak-anak yang bekerja atau pekerja anak mengacu pada definisi ILO, yaitu anak-anak yang terlibat kegiatan produksi dalam SNN paling sedikit selama satu jam dalam periode referensi. Sakernas mulai menangkap kondisi ke bekerjaan anak usia 5 tahun ke atas sejak 2007, akan tetapi belum pernah dilaporkan hasilnya. Kemudian pada tahun 2022, BPS bekerja sama dengan Unicef, Bapenas dan ILO mulai menghitung pekerja anak usia 5–17 tahun. Pekerja anak pada publikasi ini menggunakan pendekatan UU No.13 tahun 2003 dan didefinisikan sebagai semua anak-anak usia 5–12 tahun yang bekerja tanpa mempertimbangkan jam kerja mereka, anak-anak usia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan anak-anak usia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Karena keterbatasan data yang dapat diperoleh dari Sakernas, konsep pekerja anak yang digunakan tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Anak merupakan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara dan semua pihak berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi anak. Namun pada kenyataannya, untuk berbagai alasan, masih ada anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja terlalu dini.

Jumlah penduduk usia 5–17 tahun di Indonesia yang termasuk pekerja anak berdasarkan hasil Sakernas 2023 adalah sekitar 1,01 juta orang. Jumlah tersebut cenderung stagnan dibanding tahun 2022 yang juga sekitar 1,01 juta orang. Akan tetapi, apabila dilihat dari persentasenya, pekerja anak pada 2022–2023 mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin. Pada tahun

2022 angka pekerja anak sebesar 1,74 persen turun menjadi 1,72 persen pada tahun 2023. Kondisi ini berarti bahwa pada tahun 2023, satu sampai dua anak di antara 100 anak Indonesia yang berusia 5–17 tahun adalah pekerja anak

Gambar 94 Jumlah Pekerja Anak (Juta Orang) dan Angka Pekerja Anak (Persen), 2022–2023



Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Di Indonesia, angka pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keadaan tersebut terlihat pada periode 2022–2023. Gambar 95 dan tabel 234 menunjukkan bahwa angka pekerja anak laki-laki pada tahun 2023 adalah 1,84 persen, naik 0,03 persen poin dibanding tahun 2022. Sementara itu, angka pekerja anak perempuan pada tahun 2023 sebesar 1,60 persen (turun 0,08 persen poin dibanding 2022). Dengan kata lain pada tahun 2023 terjadi penurunan angka pekerja anak hanya pada anak perempuan.

Di samping itu, Gambar 95 dan tabel 234 menunjukkan angka pekerja anak berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal, angka pekerja anak pada tahun 2023 di pedesaan (2,29 persen) lebih tinggi daripada perkotaan

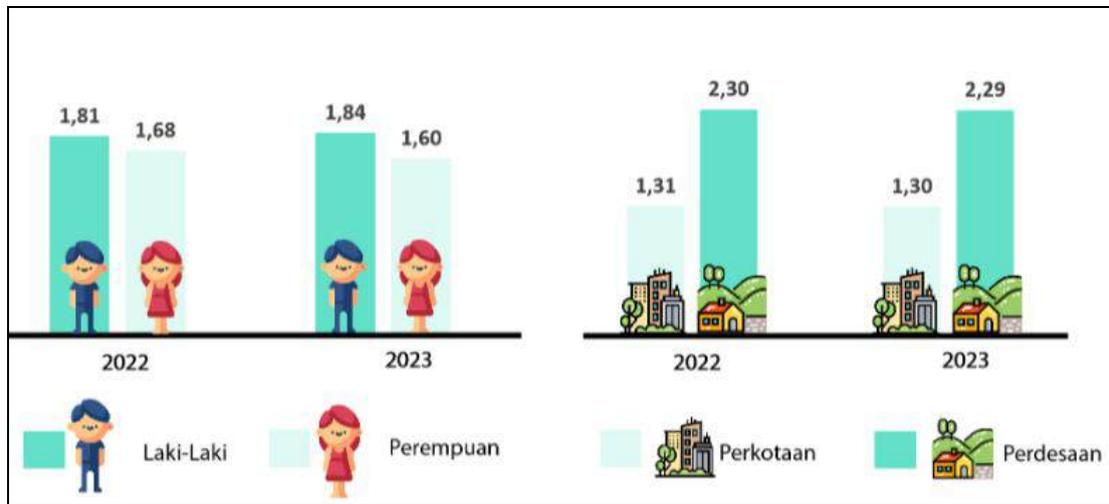
(1,30 persen). Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 terjadi penurunan angka pekerja anak baik di perkotaan maupun di perdesaan

Tabel 233 Angka Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2022–2023

Angka Pekerja Anak	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Total		
Pekerja anak umur 5-17 tahun	1.010.902	1.007.093
Total anak umur 5-17 tahun	58.008.229	58.430.427
Angka Pekerja Anak (%)	1,74	1,72
Laki-Laki		
Pekerja anak umur 5-17 tahun	532.586	549.359
Total anak umur 5-17 tahun	29.474.135	29.892.121
Angka Pekerja Anak (%)	1,81	1,84
Perempuan		
Pekerja anak umur 5-17 tahun	478.316	457.734
Total anak umur 5-17 tahun	28.534.094	28.538.306
Angka Pekerja Anak (%)	1,68	1,60
Perkotaan		
Pekerja anak umur 5-17 tahun	425.835	438.296
Total anak umur 5-17 tahun	32.568.280	33.610.753
Angka Pekerja Anak (%)	1,31	1,30
Perdesaan		
Pekerja anak umur 5-17 tahun	585.067	568.797
Total anak umur 5-17 tahun	25.439.949	24.819.674
Angka Pekerja Anak (%)	2,30	2,29

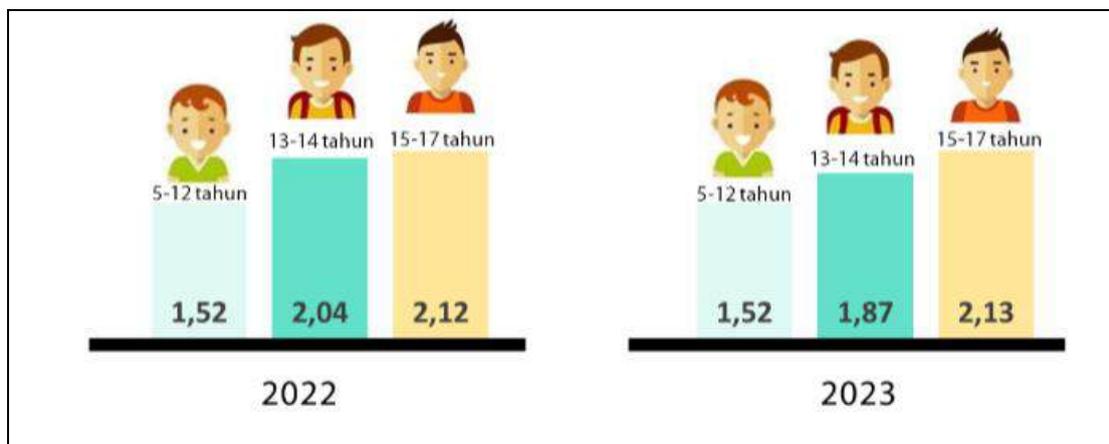
Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Gambar 95 Angka Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2022–2023



Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Gambar 96 Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur (Persen), 2022–2023



Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

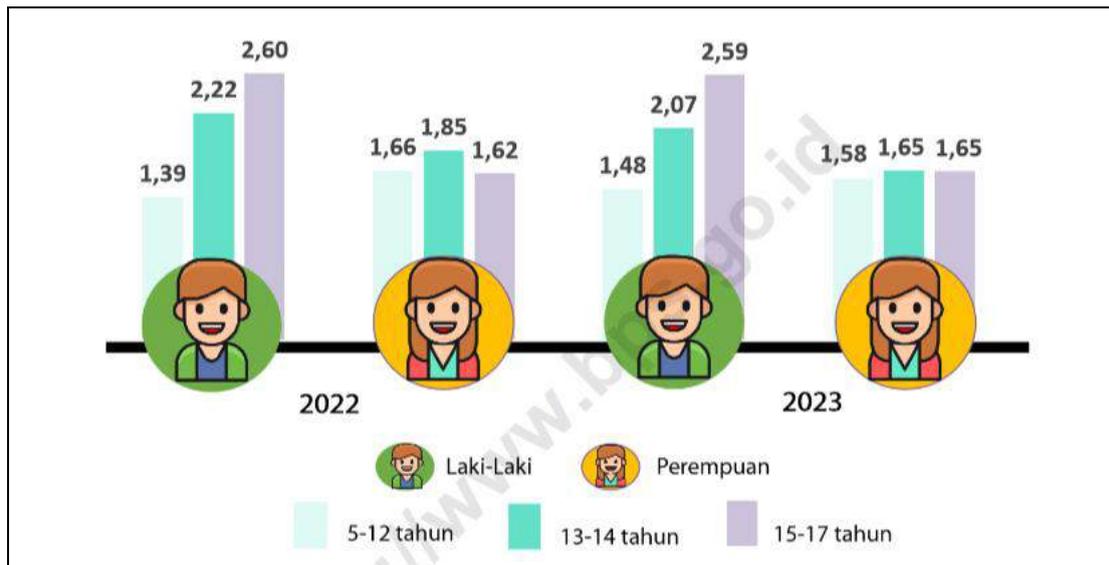
Berdasarkan kelompok umur (Gambar 96 dan tabel 235), terlihat bahwa baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023, persentase pekerja anak paling kecil terdapat pada kelompok umur 5–12 tahun. Sementara persentase pekerja anak tertinggi terdapat pada kelompok umur 15–17 tahun. Pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 terjadi penurunan angka pekerja anak pada kelompok umur 13–14 tahun, sementara pada kelompok umur 5–12 cenderung stagnan dan terjadi sedikit peningkatan pada kelompok umur 15–17 tahun.

Tabel 234 Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur, 2022–2023

Angka Pekerja Anak	2022	2023
(1)	(2)	(3)
5-12 tahun		
Pekerja anak umur 5-12 tahun	539.807	539.224
Total anak umur 5-12 tahun	35.446.785	35.370.879
Angka Pekerja Anak (%)	1,52	1,52
13-14 tahun		
Pekerja anak umur 13-14 tahun	174.832	162.276
Total anak umur 13-14 tahun	8.575.819	8.685.912
Angka Pekerja Anak (%)	2,04	1,87
15-17 tahun		
Pekerja anak umur 15-17 tahun	296.263	305.593
Total anak umur 15-17 tahun	13.985.625	14.373.636
Angka Pekerja Anak (%)	2,12	2,13

Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Gambar 97 Persentase Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022–2023



Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Tabel 235 Angka Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022–2023

Angka Pekerja Anak	2022		2023	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-12 tahun				
Pekerja anak umur 5-12 tahun	251.154	288.653	266.314	272.910
Total anak umur 5-12 tahun	18.010.807	17.435.978	18.045.688	17.325.191
Angka Pekerja Anak (%)	1,39	1,66	1,48	1,58
13-14 tahun				
Pekerja anak umur 13-14 tahun	97.548	77.284	93.072	69.204
Total anak umur 13-14 tahun	4.401.438	4.174.381	4.501.144	4.184.768
Angka Pekerja Anak (%)	2,22	1,85	2,07	1,65
15-17 tahun				
Pekerja anak umur 15-17 tahun	183.884	112.379	189.973	115.620
Total anak umur 15-17 tahun	7.061.890	6.923.735	7.345.289	7.028.347
Angka Pekerja Anak (%)	2,60	1,62	2,59	1,65

Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Jika dianalisis berdasarkan kelompok umur pada masing-masing jenis kelamin (Gambar 97 dan tabel 236), terdapat pola yang sama antara periode 2022 dan 2023. Angka pekerja anak laki-laki lebih rendah dibanding perempuan pada kelompok umur 5–12 tahun, sementara pada kelompok umur 13–14 tahun dan 15–17 tahun angka pekerja anak laki-laki yang lebih tinggi.

Pada kondisi tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya terdapat penurunan angka pekerja anak laki-laki pada kelompok umur 13–14 tahun dan 15–17 tahun, sementara pada kelompok umur 5–12 tahun mengalami

peningkatan sebesar 0,09 persen poin. Sedangkan untuk pekerja anak perempuan, terjadi penurunan pada kelompok umur 5–12 tahun dan 13–14 tahun, sementara pada kelompok umur 15–17 tahun terjadi peningkatan sebesar 0,03 persen poin.

Lebih lanjut, gambar 98 dan tabel 237 menunjukkan angka pekerja anak menurut partisipasi sekolah. Terdapat pola yang mirip pada angka pekerja anak berdasarkan partisipasi sekolah pada tahun 2022 maupun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka pekerja anak yang berada pada kelompok tidak bersekolah lagi, dan angka pekerja anak paling rendah berada pada kelompok tidak atau belum pernah sekolah.

Apabila kondisi 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan angka pekerja anak pada kategori masih bersekolah. Sementara pada anak-anak yang tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah terjadi penurunan yaitu masing-masing sebesar 0,08 persen poin dan 0,09 persen poin.

Gambar 98 Angka Pekerja Anak Menurut Partisipasi Sekolah (Persen), 2022–2023



Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Tabel 236 Angka Pekerja Anak Berdasarkan Partisipasi Sekolah, 2022–2023

Tingkat Pekerja Anak	2022			2023		
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerja anak umur 5-17 tahun	15.863	669.870	325.169	11.989	676.156	318.948
Total anak umur 5-17 tahun	4.895.445	51.119.826	1.992.958	5.077.082	51.388.134	1.965.211
Angka Pekerja Anak (%)	0,32	1,31	16,32	0,24	1,32	16,23

Sumber: BPS, Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia, 2023

Pekerja anak merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu pendek, di luar waktu sekolah, dan tanpa unsur eksploitasi. Misalnya dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan. Pekerja anak beresiko putus sekolah, terlantar, dan masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan diri sehingga mengancam tumbuh kembang yang optimal.

Tabel 237 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Angkatan Kerja/Economically Active				Jumlah Angkatan Kerja Economically Active	
	Bekerja Working	Pengangguran ¹ /Unemployment ¹		Jumlah Total		
(1)	(2)	Pernah Bekerja Ever Work	Tidak Pernah Bekerja Never Worked	(5)	(6)	
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	52.888	—	711	711	53.599	
2. Pesisir Selatan	244.236	6.025	6.163	12.188	256.424	
3. Solok	223.156	4.321	7.410	11.731	234.887	
4. Sijunjung	118.593	2.530	3.331	5.861	124.454	
5. Tanah Datar	197.708	8.498	2.673	11.171	208.879	
6. Padang Pariaman	207.131	7.998	6.863	14.861	221.992	
7. Agam	280.902	7.358	7.294	14.652	295.554	
8. Lima Puluh Kota	212.991	4.994	3.768	8.762	221.753	
9. Pasaman	161.059	5.492	3.151	8.643	169.702	
10. Solok Selatan	106.590	1.306	1.505	2.811	109.401	
11. Dharmasraya	123.524	5.286	2.903	8.189	131.713	
12. Pasaman Barat	204.700	6.228	6.869	13.097	217.797	
Kota/Municipality						
1. Padang	426.765	33.384	18.630	52.014	478.779	
2. Solok	38.564	673	815	1.488	40.052	
3. Sawahlunto	34.018	1.079	703	1.782	35.800	
4. Padang Panjang	27.035	678	893	1.571	28.606	
5. Bukittinggi	61.932	2.218	1.032	3.250	65.182	
6. Payakumbuh	74.137	1.270	2.500	3.770	77.907	
7. Pariaman	48.996	1.838	1.115	2.953	51.949	
Sumatera Barat	2023	2.844.925	101.176	78.329	179.505	3.024.430
	2022	2.688.164	91.100	89.006	180.106	2.868.270
	2021	2.581.444	93.464	86.484	179.948	2.761.392

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Economically Active	Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Activ				
		Sekolah Attending School	Mengurus Rumah Tangga House keeping	Lainnya Other	Jumlah Bukan Angkatan Kerja Total of Not Economically Active	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kabupaten/Regency						
1. Kep. Mentawai	98,67	5.702	6.015	1.620	13.337	
2. Pesisir Selatan	95,25	30.652	81.389	26.031	138.072	
3. Solok	95,01	18.580	40.695	11.900	71.175	
4. Sijunjung	95,29	11.956	33.807	11.429	57.192	
5. Tanah Datar	94,65	25.531	48.266	18.151	91.948	
6. Padang Pariaman	93,31	30.390	69.348	18.830	118.568	
7. Agam	95,04	35.492	71.929	24.378	131.799	
8. Lima Puluh Kota	96,05	26.087	42.962	14.499	83.548	
9. Pasaman	94,91	20.325	28.311	13.960	62.596	
10. Solok Selatan	97,43	9.456	19.708	4.414	33.578	
11. Dharmasraya	93,78	13.841	28.347	4.267	46.455	
12. Pasaman Barat	93,99	28.291	68.865	12.956	110.112	
Kota/Municipality						
1. Padang	89,14	67.061	140.805	28.049	235.915	
2. Solok	96,28	5.053	9.557	2.461	17.071	
3. Sawahlunto	95,02	4.493	9.076	1.844	15.413	
4. Padang Panjang	94,51	5.062	7.848	1.792	14.702	
5. Bukittinggi	95,01	8.375	14.901	4.306	27.582	
6. Payakumbuh	95,16	9.796	16.037	4.682	30.515	
7. Pariaman	94,32	4.936	12.399	3.644	20.979	
Sumatera Barat	2023	94,06	361.079	750.265	209.213	1.320.557
	2022	93,72	387.773	724.529	158.377	1.270.679
	2021	93,48	385.915	723.072	207.249	1.316.236

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Total	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja Percentage of Economically Active to Working Age Population	
(1)	(12)	(13)	
Kabupaten/Regency			
1. Kep. Mentawai	66.936	80,07	
2. Pesisir Selatan	394.496	65,00	
3. Solok	306.062	76,74	
4. Sijunjung	181.646	68,51	
5. Tanah Datar	300.827	69,43	
6. Padang Pariaman	340.560	65,18	
7. Agam	427.353	69,16	
8. Lima Puluh Kota	305.301	72,63	
9. Pasaman	232.298	73,05	
10. Solok Selatan	142.979	76,52	
11. Dharmasraya	178.168	73,93	
12. Pasaman Barat	327.909	66,42	
Kota/Municipality			
1. Padang	714.694	66,99	
2. Solok	57.123	70,12	
3. Sawahlunto	51.213	69,90	
4. Padang Panjang	43.308	66,05	
5. Bukittinggi	92.764	70,27	
6. Payakumbuh	108.422	71,86	
7. Pariaman	72.928	71,23	
Sumatera Barat	2023	4.344.987	69,61
	2022	4.138.949	69,30
	2021	4.077.628	67,72

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat yang bekerja sebesar 3.024.430 orang yang terdiri dari 2.246.155 orang dari wilayah perdesaan dan sisanya 778.275 orang dari daerah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa angkatan kerja didominasi di daerah perdesaan. Meskipun jumlah pengangguran didominasi oleh daerah perkotaan. Apabila ditinjau tipe daerah, persentase anak yang bekerja pada daerah perdesaan lebih dari dua kali lipat lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bekerja daripada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Daerah perdesaan merupakan pusat pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Keterlibatan ibu dalam aktivitas pertanian turut meningkatkan keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut.

Ini disebabkan oleh adanya migrasi dari perdesaan ke perkotaan dalam mencari pekerjaan. Perkembangan jumlah penduduk mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat

Angkatan kerja yang bekerja sebesar 2.844.925 orang dan yang menganggur sejumlah 179.505 orang. Ini juga menggambarkan bahwa 94,06% angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja, hanya 5,94% yang menganggur. Tingkat serapan tenaga kerja di Sumatera Barat telah cukup tinggi terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel 240 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	1.790.032	1.234.398	3.024.430
1. Bekerja/ <i>Working</i>	1.695.012	1.149.913	2.844.925
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	95.020	84.485	179.505
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	387.247	933.310	1.320.557
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	163.896	197.183	361.079
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	80.626	669.639	750.265
3. Lainnya/ <i>Others</i>	142.725	66.488	209.213
Jumlah/<i>Total</i>	2.177.279	2.167.708	4.344.987
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Labor Force Participation Rate</i>	82,21	56,94	69,61
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Unemployment Rate (UR)</i>	5,31	6,84	5,94

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.695,012 orang adalah laki-laki dan 1.149.913 orang adalah perempuan. Ini diasumsikan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas seiring dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Perbedaan persentase anak yang bekerja juga terlihat pada pembagian berdasarkan jenis kelamin. Anak laki-laki yang bekerja hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal tersebut sesuai dengan temuan ILO, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi pekerja anak daripada anak perempuan. Namun terdapat kemungkinan bahwa terdapat pekerjaan anak perempuan tidak terhitung atau tidak terlihat sehingga tidak dilaporkan seperti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Sedangkan angkatan kerja yang menganggur sebesar 179.505 orang yang terdiri dari 95.020 orang laki-laki dan 84.485 orang perempuan. Artinya jumlah pengangguran laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Terdapat 8 orang penganggur perempuan dalam 9 orang penganggur laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang bukan angkatan kerja untuk kategori mengurus rumah tangga didominasi oleh perempuan, karena tugas domestik yang dimiliki oleh perempuan. Tingginya daya serap angkatan kerja dalam dunia kerja menunjukkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Sumatera Barat mencapai 69,61%. TPAK laki-laki sebesar 82,21% dan TPAK perempuan sebesar 56,94%.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga. Dalam upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membentuk Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2045 dengan salah satu kegiatannya adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia mengembalikan pekerja anak untuk kembali bersekolah dengan prioritas sasarannya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Persentase anak usia 5-17 tahun yang bekerja secara keseluruhan terlihat memiliki tren yang menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan pekerja anak cukup berhasil. Beberapa penelitian di negara-negara yang menerapkan program bantuan tunai untuk masyarakat miskin menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengurangi kerawanan keluarga untuk mengalami krisis ekonomi sehingga peluang anak untuk bekerja sebagai respon terhadap krisis menjadi berkurang. Bahkan, pemberian bantuan tunai yang disertai dengan program pendampingan dan pemberdayaan anak dapat mengisi waktu luang anak melalui kegiatan pelatihan sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak dalam berbagai hal, serta meningkatkan partisipasi sekolah anak.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pekerja anak berhubungan erat dengan eksploitasi, pekerjaan yang berbahaya, akses terhambat pembangunan fisik, psikologis dan sosial pendidikan. Pekerjaan yang buruk dan memprihatinkan seringkali mengeksploitasi anak sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 238 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (jiwa), 2023

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	≤ SD ≤ Elementary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Perguruan Tinggi College	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	267.623	124.539	251.501	50.431	694.094
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/ <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	208.282	93.491	144.585	22.850	469.208
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	29.562	17.033	46.518	28.616	121.729
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	120.656	93.045	326.617	356.678	896.996
Pekerja Bebas di Pertanian/ <i>Casual Employee in Agriculture</i>	95.553	40.600	30.188	79	166.420
Pekerja Bebas di Non Pertanian/ <i>Casual Employee not in Agriculture</i>	54.139	32.894	43.708	2.429	133.170
Pekerja keluarga/tak dibayar/ <i>Family worker/unpaid worker</i>	123.861	95.915	120.146	23.386	363.308
Jumlah/Total	899.676	497.517	963.263	484.469	2.844.925

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 239 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
15–19	64.834	39.704	104.538
20–24	173.156	98.477	271.633
25–29	209.035	122.249	331.284
30–34	212.383	130.528	342.911
35–39	203.793	134.841	338.634
40–44	190.962	139.354	330.316
45–49	170.644	133.053	303.697
50–54	152.523	118.199	270.722
55–59	124.160	97.917	222.077
60+	193.522	135.591	329.113
Jumlah/Total			
2023	1.695.012	1.149.913	2.844.925
2022	1.587.057	1.101.107	2.688.164
2021	1.526.586	1.054.858	2.581.444

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh tamatan SMA sebesar 963.263 orang. Pada posisi kedua adalah tamatan SD dan disusul oleh tamatan SMP. Penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 484.469 orang. Diperkirakan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi tersebut bekerja di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah kebawah masih didominasi oleh penduduk perdesaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan di perdesaan terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Hal inilah yang menjadikan penduduk di perdesaan lebih malas untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dilihat dari sisi status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja tertinggi adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 840.702

orang. Jumlah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap namun tidak dibayar terlihat lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa ibu yang bekerja di sektor informal pertanian cenderung meminta anak untuk membantu dalam pekerjaannya tanpa memberi anak upah. Selanjutnya ibu yang bekerja juga mendorong anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga terutama anak perempuan. Hal tersebut sejalan dengan data Sakernas yang menunjukkan bahwa persentase perempuan yang melakukan pekerjaan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, laki-laki dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan sebagai pekerja keluarga/tak dibayar masih tinggi dibandingkan perempuan. Pada ketiga status tersebut mencapai angka 400 ribuan orang. Hanya status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar yang berada dibawah 100 ribuan orang.

Secara keseluruhan lebih dari separuh penduduk yang bekerja berada dalam sektor informal. Distribusi yang sama juga terdapat pada daerah perdesaan dan perkotaan. Persentase yang bekerja di sektor formal lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan dan sebaliknya anak yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan. Sementara persentase pekerja informal baik laki-laki dan perempuan hampir sama.

Secara keseluruhan lebih dari separuh (58,85 persen) anak usia 15 tahun keatas yang bekerja masih bersekolah. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena anak masih mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Meskipun perlu diperhatikan bahwa bekerja dapat mengurangi waktu anak untuk bersosialisasi dan belajar sehingga perkembangan anak menjadi kurang maksimal. Anak yang bekerja secara terus menerus dan masih bersekolah, cenderung malas bersekolah, dan memiliki tingkat kehadiran yang rendah, serta prestasi sekolah yang menurun dibandingkan saat anak sebelum bekerja.

Salah satu dampak utama dari anak yang bekerja adalah kecenderungan anak untuk mengalami putus sekolah. Perempuan yang

bekerja didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan terakhir, tidak/belum sekolah,diploma hingga universitas. Ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan penduduk perempuan yang bekerja hanya menggunakan ijazah yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini memungkinkan perempuan tidak dapat menduduki posisi yang baik dibandingkan laki- laki.

Meskipun range penduduk yang bekerja yang sangat besar antara pendidikan yang tidak/belum sekolah dengan pendidikan tidak/belum tamat SD, namun Pemerintah perlu memberikan attensi agar penduduk yang bekerja tersebut memiliki pendidikan yang lebih baik sehingga mereka siap dalam memasuki dunia kerja global nantinya.

Jumlah penduduk yang bekerja paling dominan di sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 939.746 orang dengan 620.198 orang merupakan penduduk laki-laki dan sisanya merupakan penduduk perempuan. Selain itu, lapangan pekerjaan utama di perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga cukup tinggi yaitu sebesar 543.335 orang yang terdiri dari 288.522 orang merupakan penduduk laki-laki. Sebagian besar merupakan pekerja di reparasi mobil dan sepeda motor sedangkan yang berjenis kelamin perempuan cenderung untuk bekerja sebagai pedagang besar atau eceran. Hal ini disebabkan oleh tugas dan tanggung jawab perempuan di sektor domestik rumah tangga. Dengan kata lain bekerja menghasilkan penghasilan sambil berperan sebagai ibu rumah tangga.

Lapangan pekerjaan sektor pengadaan gas dan listrik serta konstruksi cenderung kurang diminati karena pekerjaan tersebut memiliki skill dan resiko yang tinggi terutama bagi perempuan. Sektor lain yang juga kurang diminati adalah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini membutuhkan tingkat pendidikan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan dimaksud. Penduduk yang bekerja pada sektor ini biasanya didominasi oleh laki-laki dalam hal penyediaan jaringan/instalasi jaringan.

Tabel 240 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2023

Lapangan Pekerjaan Utama ² <i>Main Industry²</i>	Jenis Kelamin/ Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
A	642.372	322.121	964.493
B	33.796	1.691	35.487
C	127.501	118.067	245.568
D, E	10.174	2.857	13.031
F	129.671	552	130.223
G	284.582	244.703	529.285
H	107.501	3.180	110.681
I	90.943	146.903	237.846
J	13.647	11.306	24.953
K, L	12.769	12.882	25.651
M, N	33.417	11.359	44.776
O	81.350	58.798	140.148

Lapangan Pekerjaan Utama ² <i>Main Industry²</i>	Jenis Kelamin/ Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
P	50.618	136.660	187.278
Q	15.657	39.352	55.009
R, S, T, U	61.014	39.482	100.496
Jumlah/Total			
2023	1.695.012	1.149.913	2.844.925
2022	1.587.057	1.101.107	2.688.164
2021	1.526.586	1.054.858	2.581.444

Catatan/Note: ¹ A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*
B. Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*
C. Industri Pengolahan/*Manufacturing*
D. Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*
F. Konstruksi/*Construction*
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
H. Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*
J. Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*
L. Real Estat/*Real Estate Activities*
M, N Jasa Perusahaan/*Business Activities*
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*
P. Jasa Pendidikan/*Education*
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*
R, S, T, U Jasa Lainnya/*Other Services Activities*

Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

7.6 PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Sistem perlindungan anak yang terpusat dinilai tidak efektif karena sering kali anak tidak mengetahui kepada siapa harus melapor saat terjadi tindak kekerasan. Untuk itu, diperlukan sistem perlindungan yang dapat langsung diakses oleh anak yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu / terkoordinasi antara masyarakat, aparat desa /perangkat kelurahan, dunia usaha, media dan anak dengan mengacu pada prinsip hak anak untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM ini merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya- upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 72 Ayat 1, masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pasal 72 ayat 3 menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak
2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijak yang terkait Perlindungan Anak
3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak
7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
8. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Gerakan PATBM bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan. Pencegahan kekerasan dilakukan dengan:

1. Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima membenarkan atau mengabaikan kekerasan
2. Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach)
3. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Tujuan kedua gerakan ini adalah untuk menanggapi apabila terjadi kekerasan terhadap anak dengan: 1) Melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menerima laporan, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak; 2) Melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko.

Prinsip Pelaksanaan PATBM adalah: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta partisipasi anak; memperkuat struktur perlindungan anak lokal yang telah ada; dan membangun sinergitas dengan lembaga desa/kelurahan, perangkat desa/aparat kelurahan, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, LSM (jaringan horisontal) dan SKPD, rujukan layanan primer (jaringan vertikal).

Sasaran PATBM dalam jangka pendek dan menengah adalah aparat Desa/Kelurahan yang berjejaring dan berkoordinasi dengan LSM yang berhubungan dengan perlindungan anak, masyarakat, dunia usaha, keluarga forum anak. Sasaran jangka panjangnya adalah terwujudnya perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya PATBM juga berjejaring dengan kelembagaan yang menangani perlindungan anak baik tingkat kecamatan (seperti: pemerintahan kecamatan, puskesmas, polsek dan sekolah), maupun tingkat kabupaten (PUSPAGA, UPTD PPA/P2TP2A, Dinas PPPA, Dunia Usaha, LPA/LKSA dan OPD lain terkait).

Strategi PATBM memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki kekuatan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan menjadi jalan untuk dapat mengakses dukungan dan pelayanan dari berbagai macam sumber daya profesional. Sebagai gerakan yang difungsikan untuk

memperkuat upaya perlindungan anak, PATBM mengerahkan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kelurahan bertingkat yaitu:

- a. Tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk memampukan anak melindungi diri dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak
- b. Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk memampukan orangtua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orangtua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orangtua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa; Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Adapun Perubahan yang diharapkan dalam Gerakan PATBM antara lain:

1. Memperkuat norma masyarakat terhadap anti kekerasan
2. Meningkatkan ketrampilan dalam menghindari kekerasan terhadap anak. Orangtua PATBM diharapkan mampu memperkuat ketrampilan diri dalam hal pola pengasuhan anak, sedangkan anak-anak diharapkan mampu memperkuat ketrampilan hidupnya agar dapat mandiri dan berdaya secara optimal.
3. Meningkatkan kemampuan untuk menanggapi kekerasan terhadap anak. Sasaran dalam menanggapi kekerasan terhadap anak adalah: (1) mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan; (2)

mengenali anak yang mengalami kekerasan; dan (3) merespon kekerasan terhadap anak

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasian yang mengatur secara jelas tugas-tugas atau mandat para pihak serta dukungan regulasi yang memberi kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan. Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa/kelurahan dimana PATBM dilaksanakan harus dibangun dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi PATBM berguna untuk memberikan informasi berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintahan daerah, pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat. Monitoring berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam perencanaan dilaksanakan memiliki tolok ukur untuk menilai berjalan atau tidaknya di tingkat pelaksanaan. Sedangkan evaluasi berupa penilaian objektif dan sistimatis sebuah kegiatan yang sedang atau sudah berlangsung termasuk disain, pelaksanaan dan hasil-hasilnya.

Kerangka kerja monitoring dan evaluasi PATBM diarahkan untuk: (1) memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan PATBM pada tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; (2) mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan PATBM di masing-masing tingkat administrasi; (3) mengukur efektivitas PATBM sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**